

**2020**  
**Laporan Tahunan**  
*Annual Report*

# TRANSFORMASI MENUJU EKOSISTEM YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

*Transformation towards an Inclusive  
& Sustainable Ecosystem*



Indonesia Financial Group



**SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020  
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**

STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2020 ANNUAL REPORT OF PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the 2020 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 13 Januari 2022  
Jakarta, January 13, 2022

**Dewan Komisaris  
Board of Commissioners**

**Fauzi Ichsan**

Komisaris Utama/Komisaris Independen

**Masyita Crystallin**  
Komisaris

**Hotbonar Sinaga**  
Komisaris Independen

**Melrijal Nur**  
Komisaris

**Arlef Budiman**  
Komisaris

**Direksi  
Board of Directors**

**Robertus Billitea**  
Direktur Utama

**Pantro Pander Silitonga**  
Direktur Bisnis

**Rizal Arlansyah**  
Direktur Keuangan  
dan Umum

## TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2020

### ABOUT 2020 ANNUAL REPORT

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) tahun buku 2020 dengan tema “Transformasi menuju Ekosistem yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis IFG sepanjang 2020 serta masa depan keberlanjutan usaha.

Laporan Tahunan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 2020 diterbitkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dalam lingkup internal kepada pemegang saham serta para pemangku kepentingan dan otoritas terkait. Laporan Tahunan ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dollar AS” atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan tahunan ini memuat kata “Perusahaan” yang didefinisikan sebagai PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang menjalankan usaha di bidang keuangan khususnya asuransi, penjaminan, dan investasi. Adakalanya kata “kami”, “BPUI” dan “IFG” digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) secara umum.

Welcome to the 2020 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG) with the theme “Transformation towards an Inclusive and Sustainable Ecosystem”. The theme was chosen based on an in-depth analysis and study based on facts and IFG’s business developments throughout 2020 and the future of business sustainability.

The 2020 Annual Report of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) was published to increase internal information disclosure to shareholders as well as stakeholders and related authorities. This Annual Report is a source of comprehensive documentation containing information on the Company’s performance in a year.

The mention of the currency unit “Rupiah” or IDR refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar” or USD refers to the official currency of the United States of America. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

This annual report contains the word “Company” which defines PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) which operates a business in the financial sector, especially in insurance, guarantee and investment sectors. Sometimes the words “we”, “BPUI” and “IFG” are used on the basis of convenience to refer to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in general.



## SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, karena hasil sebenarnya di masa depan dapat berbeda karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

This annual report contains statements of the financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), which are classified as forward-looking statements in the implementation of prevailing laws, except for historical matters. These statements are subject to risks, uncertainties, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the business environment in which the Company conducts its business activities. The statements contained in this Annual Report are not a guarantee of future performance since the actual results in the future may differ due to several factors beyond the control of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

## SEKAPUR SIRIH

FOREWORD



## TRANSFORMASI MENUJU EKOSISTEM YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

TRANSFORMATION TOWARDS INCLUSIVE AND SUSTAINABLE  
ECOSYSTEM



Pemerintah menerbitkan PP 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada tahun 2020, pemerintah melalui PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Asuransi dan Penjaminan sehingga terdapat empat anggota baru yang terdiri dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Pada tahun ini pula, sebagai BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) melakukan transformasi *brand* menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

Sebagai salah satu tonggak utama penggerak industri finansial di Indonesia, IFG berfungsi penting dalam menopang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional. Mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan antar BUMN, melalui konsolidasi aset sebesar Rp92,34 triliun per 31 Desember 2020, IFG bertujuan untuk melakukan transformasi menuju ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas.

Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. IFG memiliki semangat untuk terus maju sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

The government issued Government Regulation number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of Joint Ventures. The issuance of this Government Regulation concerning Insurance Companies in the Form of Joint Ventures is to implement the provisions of Article 6 paragraph (3) of Law no. 40 of 2014 concerning Insurance. In 2020, the government, through PP No. 20 of 2020 dated March 16, 2020, stipulates PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as a Holding Company of Insurance and Guarantee State-Owned Enterprises. Because of this, there are four new members consisting of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Moreover, this year, as a Holding Company of Insurance and Guarantee State-Owned Enterprises, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) transformed its brand into the Indonesia Financial Group (IFG).

As one of the main pillars of driving the financial industry in Indonesia, IFG has an important function in supporting the national economy, increasing national financial stability and inclusion. Prioritizing synergies and collaborations with the government and between SOEs, through asset consolidation of IDR 92.34 trillion as of December 31, 2020, IFG aims to transform towards an inclusive and sustainable ecosystem. IFG is committed to bringing changes in the financial sector, especially in insurance, investment, and guarantees sectors that are accountable, *prudent*, and transparent with good corporate governance and full of integrity.

The collaborative spirit with transparent corporate governance is the foundation for IFG to become a leading, trusted, and integrated provider of insurance, guarantee, and investment services. IFG is the future of the financial industry in Indonesia. IFG possesses the passion to move forward as a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem.

## KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY



### Membangun Masa Depan Berkelanjutan

Mengawali tahun 2019, perekonomian Indonesia tetap stabil dan *resilient* di mana ekspansi pertumbuhan PDB mencapai 5.07% pada Kuarter I 2019 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Kuarter II 2019 di level 5.05%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Semester I 2019 mengalami peningkatan ke level 5.06% dari 5.17% pada Semester I 2018. Dari sisi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia.

### Building a Sustainable Future

In early 2019, the Indonesian economy remained stable and resilient in which the GDP growth reached 5.07% in the first quarter of 2019 and experienced a significant increase in the second quarter of 2019 at the level of 5.05%. Indonesia's economic growth in the First Semester of 2019 increased to a level of 5.06% from 5.17% in the First Semester of 2018. From a global perspective, Indonesia's economic growth is still above the average world economic growth.



Berbekal ekuitas Bahana yang sudah positif ditunjang dengan kondisi perekonomian yang diharapkan lebih baik, menjadi dasar bagi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya (“Bahana”) untuk dapat bangkit, tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat. Selain itu, semangat, etos kerja keras untuk memberikan upaya terbaik dan kerja sama yang selama menjadi budaya di setiap insan di Bahana, akan menjadi modal yang kuat dalam mewujudkan cita-cita Bahana.

Apa yang telah dicapai Bahana di masa lalu menunjukkan kemampuan dalam mencapai cita-cita ke depan. Setelah melewati era pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan kini fokus di tahun 2019 Membangun Masa Depan Berkelanjutan dengan terus menerus meningkatkan kinerja operasional anak anak perusahaan untuk meraih peluang bisnis di berbagai bidang serta mengedepankan pertumbuhan bisnis dan keunggulan kualitas kita di setiap lini bisnis.

Keberhasilan Bahana tak lepas dari strategi yang dijalankan manajemen. Menjalin sinergi antar anak perusahaan dan dengan pihak lain sehingga menghasilkan kinerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahana terus melanjutkan penataan ulang landasan kinerja keuangan yang sehat dan melalukan inovasi di berbagai bidang, baik yang berhubungan dengan produk maupun layanan yang diberikan kepada pelanggan. Bahana melaksanakan strategi pengembangan usaha Grup bahana yang bersifat *mixed*, tergantung pada kondisi, situasi, kondisi dan *nature of business* masing-masing anak perusahaan. Hal yang penting dan menjadi perhatian adalah berkomitmen Perusahaan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang merupakan asset utama Perusahaan secara berkesinambungan.

The positive equity, and supported by expected better economic conditions, became the basis for PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its subsidiaries (“Bahana”) to be able to rise, grow and develop faster. In addition, enthusiasm, hard work ethic to give the best effort and cooperation which has been a culture for every individual in Bahana, will be a strong asset in realizing Bahana's ideals.

Bahana's achievement in the past shows its ability to achieve future goals. After going through an era of sustainable business growth, We are now focusing on 2019 Building a Sustainable Future by continuously improving the operational performance of our subsidiaries to seize business opportunities in various fields as well as prioritizing our business growth and quality excellence in every line of business.

The success of Bahana was due to the strategy implemented by the management in establishing synergies between subsidiaries and with other parties so as to produce performance that continues to improve from time to time. Bahana continues to restructure the foundation for sound financial performance and innovate in various fields related to products and services provided to customers. Bahana implements a mixed business development strategy for the Bahana Group, depending on the conditions, circumstances, conditions and nature of the business of each subsidiary. The most important aspect for the Company is its commitment to improving its comparative advantage on an ongoing basis in terms of developing human resources, which are the main assets of the Company.

## DAFTAR ISI

### Table of Content

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)	1
STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2020 ANNUAL REPORT OF PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)	
TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2020 ABOUT 2020 ANNUAL REPORT	2
SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY	3
SEKAPUR SIRIH FOREWORD	4
KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY	6
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENT	8
PENCAPAIAN ACHIEVEMENT IN 2020	12

## KILAS KINERJA 2020

### 2020 PERFORMANCE HIGHLIGHT

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING HIGHLIGHTS OF IMPORTANT FINANCIAL DATA	16
IKHTISAR OPERASIONAL HIGHLIGHTS OF OPERATIONAL ACTIVITIES	21
IKHTISAR SAHAM SHARE HIGHLIGHTS	22
INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS	23
INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA INFORMATION ABOUT OTHER SOURCES OF FUNDING	24
PERISTIWA PENTING IMPORTANT EVENTS	29

## LAPORAN MANAJEMEN

### MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT	34
---	----



### LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' REPORT

**48**


## PROFIL PERUSAHAAN

### COMPANY PROFILE

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY	66
RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY	69
JEJAK LANGKAH MILESTONES	72
LOGO PERUSAHAAN COMPANY LOGO	73
BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND SERVICES	74
VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE	79
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE	84
PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE	86
PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' PROFILE	91
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICER PROFILE	94
DEMOGRAFI DAN PENCEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM	96
STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS	101



DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI,  
VENTURA BERSAMA, DAN KERJA SAMA OPERASI  
LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE ENTITIES,  
JOINT VENTURES,  
AND COOPERATIVE OPERATIONS

ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI,  
JARINGAN KAWASAN, SERTA INFORMASI  
TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR  
PERWAKILAN  
ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATE ENTITIES,  
REGIONAL NETWORKS, AND  
INFORMATION ABOUT BRANCH OFFICES AND  
REPRESENTATIVE OFFICES

STRUKTUR GRUP IFG  
IFG GROUP STRUCTURE

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN  
SAHAM  
CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN  
EFEK LAINNYA  
CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE  
AND LISTING

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG  
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN  
INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN  
KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE,  
SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN KEPALA AUDIT  
INTERNAL  
EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD  
OF COMMISSIONERS, BOARD OF  
DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE  
SECRETARY, AND HEAD OF INTERNAL AUDIT

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI  
AWARDS AND CERTIFICATION

103

129

130

131

131

132

133

134

136

140

155



## ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN  
INDUSTRI  
OVERVIEW OF THE ECONOMY AND  
INDUSTRY

168

RENCANA STRATEGIS 2020  
2020 STRATEGIC PLAN

176

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA  
OVERVIEW OF OPERATIONS PER  
BUSINESS SEGMENT

178

TINJAUAN KEUANGAN  
FINANCIAL REVIEW

201

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT  
AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE  
INCOME

206

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH  
FLOWS

210

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN  
TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG  
SOLVENCY AND COLLECTIBILITY OF  
RECEIVABLES

212

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN  
MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL  
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT  
POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

213

## FUNGSI PENUNJANG BISNIS BUSINESS SUPPORTING FUNCTION

SUMBER DAYA MANUSIA  
HUMAN RESOURCES

140

TEKNOLOGI INFORMASI  
INFORMATION TECHNOLOGY

155





REALISASI INVESTASI BARANG MODAL REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT	<b>215</b>
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT HAPPENED AFTER THE ACCOUNTING PERIOD	<b>216</b>
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAM COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATIONS, AND PROJECTIONS ONE YEAR AHEAD	<b>219</b>
PROYEKSI TAHUN 2021 PROJECTIONS FOR 2021	<b>223</b>
ASPEK PERPAJAKAN TAXATION ASPECTS	<b>224</b>
INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP) INFORMATION ABOUT EMPLOYEE AND/ OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)	<b>225</b>
INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM INFORMATION REGARDING THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS	<b>225</b>
INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/ CAPITAL RESTRUCTURING	<b>226</b>
INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES	<b>227</b>
PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN CHANGES IN LEGISLATIONS THAT SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE COMPANY	<b>232</b>



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN CHANGES TO ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT TO THE COMPANY	<b>234</b>
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN COMPANY SOUNDNESS LEVEL	<b>238</b>
INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY	<b>239</b>
PROSPEK USAHA TAHUN 2021 BUSINESS PROSPECTS IN 2021	<b>241</b>



## TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE	<b>246</b>
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE	<b>252</b>
STRUKTUR DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM	<b>271</b>
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)	<b>274</b>
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM	<b>386</b>
MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT	<b>388</b>



PERKARA PENTING IMPORTANT CASES	<b>396</b>
------------------------------------	------------

SANKSI ADMINISTRATIF ADMINISTRATIVE SANCTIONS	<b>396</b>
--	------------

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA	<b>397</b>
---	------------

KODE ETIK PERUSAHAAN COMPANY CODE OF CONDUCT	<b>399</b>
---	------------

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI ANTI-CORRUPTION POLICY	<b>402</b>
--	------------

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI GRATIFICATION CONTROL POLICY	<b>403</b>
--	------------

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA POLICY OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES	<b>404</b>
---	------------

KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK POLICY ON FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES	<b>405</b>
---	------------

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE ADMINISTRATIVE WEALTH REPORT (LHKPN)	<b>406</b>
---	------------

WHISTLEBLOWING SYSTEM	<b>409</b>
-----------------------	------------

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES	<b>412</b>
--	------------



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	
---	--

**434**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY	
---	--

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DAN MITRA KERJA	
---	--

**438**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO RESPONSIBILITY TO CONSUMERS AND WORK PARTNERS	
--	--

**439**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	
---	--

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT	
--	--

## **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

### **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	
---	--

**416**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE	
---	--

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA	
---	--

**424**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS	
--	--

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL	
---	--

**427**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS	
---	--

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	
--	--

**431**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT	
---	--

## **LAPORAN KEUANGAN**

### **FINANCIAL REPORT**

**450**

## PENCAPAIAN 2020

ACHIEVEMENT IN 2020

**Pendapatan Premi**  
 Premium Income  
**Rp15,83** IDR 15.83  
 TriliunTrilion

**Pendapatan Penjaminan**  
 Guarantee Income  
**Rp2,56** IDR 2.56  
 TriliunTrillion

**Pendapatan Usaha**  
 Operating Income  
**Rp8,31** IDR 8.31  
 TriliunTrilion

**Hasil Underwriting**  
 Underwriting Income  
**Rp4,80** IDR 4.80  
 TriliunTrilion

**Hasil Investasi**  
 Investment Income  
**Rp2,85** IDR 2.85  
 TriliunTrillion

**Laba Tahun Berjalan**  
 Profit for the Year  
**Rp2,20** IDR 2.20  
 TriliunTrilion

**Aset**  
 Assets  
**18,9%**



**Total Aset meningkat 18,9% dari Rp77,68 triliun di tahun 2019 menjadi Rp92,34 triliun di tahun 2020.**

Total Assets increased by 18.9% from IDR 77.68 trillion in 2019 to IDR 92.34 trillion in 2020.

**Ekuitas**  
 Equity  
**28,4%**



**Ekuitas meningkat 28,4% dari Rp29,36 triliun di tahun 2019 menjadi Rp37,70 triliun di tahun 2020.**

Equity increased by 28.4% from IDR 29.36 trillion in 2019 to IDR 37.70 trillion in 2020.

**Skor Assessment GCG**  
 GCG Assessment Score

**80,15 “Baik” “Good”**

**Hasil pengukuran terhadap penerapan GCG untuk tahun buku 2020 mencapai skor sebesar 80,15 dengan predikat “Baik”**

The assessment results on the implementation of GCG for the 2020 fiscal year reached a score of 80.15 with the predicate “Good”



**Program Bina Lingkungan**  
Community Development Program

**Rp408,6** IDR 408.6  
juta million

**Program Kemitraan**  
Partnership Program

**Rp800** IDR 800  
juta million

**Perusahaan telah mencapai target penyaluran 100% untuk Program Bina Lingkungan dan mencapai efektivitas penyaluran Program Kemitraan sebesar 95,7% dari dana tersedia.**

The Company has achieved the target of 100% distribution of the Community Development Program fund and has effectively achieved 95.7% distribution of the available funds for the Partnership Program.

**Pelatihan Softskill**  
Softskill Training

**368** Jam Hours

**Pelatihan Teknikal**  
Technical Training

**912** Jam Hours

**Perusahaan senantiasa mengembangkan kompetensi dari SDM yang dimilikinya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik secara internal maupun melalui pihak eksternal Perusahaan.**

The Company always develops Human Resources' competencies by providing trainings conducted internally as well as trainings conducted by external parties.

# Kilas Kinerja 2020

2020 Performance  
Highlight

**Tahun 2020 sekaligus menjadi momentum bersejarah bagi Perusahaan dengan ditetapkannya IFG sebagai BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan.**

The year 2020 was also a historic moment for the Company with the establishment of IFG as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs.





## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

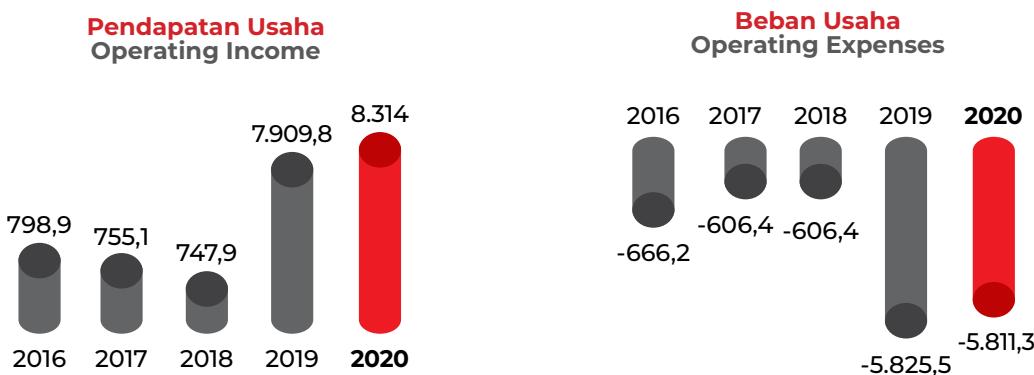
HIGHLIGHTS OF IMPORTANT FINANCIAL DATA

### Ikhtisar Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Highlights of Consolidated Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  
 (in IDR billion, unless otherwise stated)

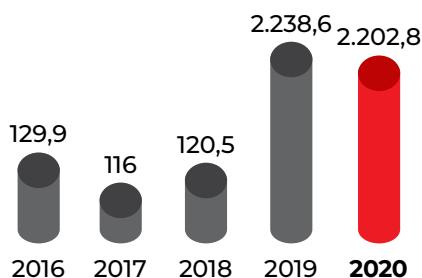
Uraian Description	2020	2019*	2018	2017	2016	YoY 2020-2019 (%)
Pendapatan Usaha Operating Income	8.314,0	7.909,8	747,9	755,1	798,9	5,1
Beban Usaha Operating Expenses	(5.811,3)	(5.825,5)	(606,4)	(606,4)	(666,2)	-0,7
Laba Usaha Operating Profit	2.502,7	2.057,3	141,5	138,4	132,7	21,7
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the year	2.202,8	2.238,6	120,5	116,0	129,9	-1,6
<b>Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:</b>						
Profit (Loss) for the Year Attributable To:						
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner	2.129,5	2.158,9	45,5	43,8	60,2	-1,4
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	73,3	79,7	74,9	72,2	69,7	-8,0
Laba (Rugi) Komprehensif Comprehensive Profit (Loss)	2.367,7	2.235,8	133,9	109,3	125,6	5,9
<b>Laba (Rugi) Komprehensif yang Diatribusikan Kepada:</b>						
Comprehensive Profit (Loss) Attributable To:						
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner	2.295,4	2.157,7	56,3	37,3	56,5	6,4
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	72,3	78,1	77,6	72,0	69,2	-7,4

\*Disajikan Kembali/\*Restated





### Laba Tahun Berjalan Profit for the Year



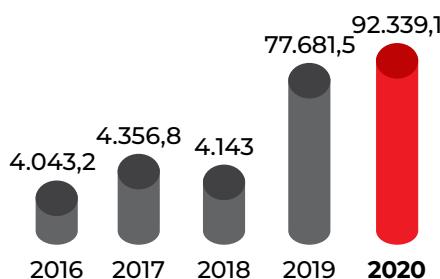
### Ikhtisar Posisi Keuangan Konsolidasian Highlights of Consolidated Financial Position

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  
(in IDR billion, unless otherwise stated)

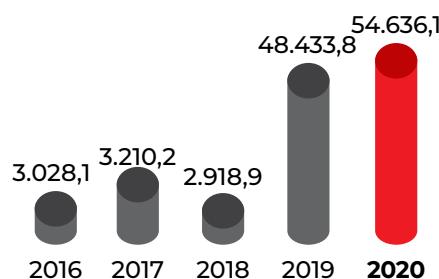
Uraian Description	2020	2019*	2018	2017	2016	YoY 2020- 2019 (%)
Jumlah Aset Total Assets	92.339,1	77.681,5	4.143,0	4.356,8	4.043,2	18,9
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	54.636,1	48.433,8	2.918,9	3.210,2	3.028,1	13,07
Dana Tabarru	(188,9)	(112,3)	-	-	-	68,21
<b>Ekuitas yang Diatribusikan Kepada:</b> Equity Attributable To:						
Pemilik Entitas Induk The Owners of The Parent Entity	36.835,4	28.433,8	342,8	286,5	249,2	29,5
Kepentingan Non- Pengendali Non-controlling Interests	867,6	926,3	881,3	860,1	765,8	-6,3
Total Ekuitas Total Equity	37.703,0	29.360,1	1.224,1	1.146,6	1.015,1	28,4
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	92.339,1	77.681,5	4.143,0	4.356,8	4.043,2	18,9

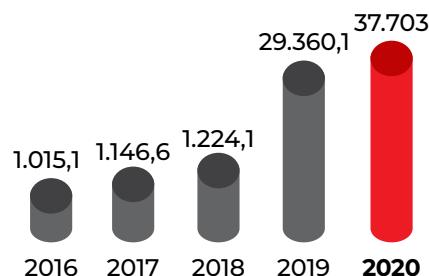
\*Disajikan Kembali/\*Restated

### Jumlah Aset Total Assets



### Jumlah Liabilitas Total Liabilities




**Jumlah Ekuitas**  
**Total Equity**

**Ikhtisar Arus Kas Konsolidasian**  
**Highlights of Consolidated Cash Flow**

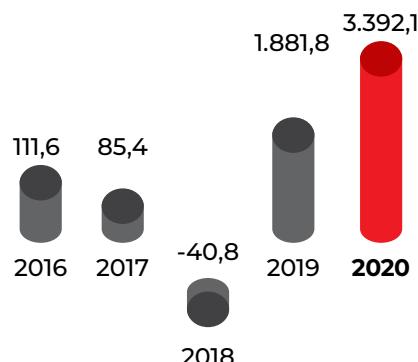
(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)  
 (in IDR billion, unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2019*	2018	2017	2016	YoY 2020- 2019 (%)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (for) Operating Activities	3.392,1	1.881,8	(40,8)	85,4	111,6	80
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (for) Investment Activities	1.514,2	(1.544,7)	(274,4)	42,3	59,2	-198
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (for) Financing Activities	6.193,5	(817,8)	151,1	84,4	(135,5)	-857
Kas dan Setara Kas di Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	14.525,6	15.010,6	884,5	672,3	637,0	-3
Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	25.625,1	14.525,6	720,4	884,5	672,3	76

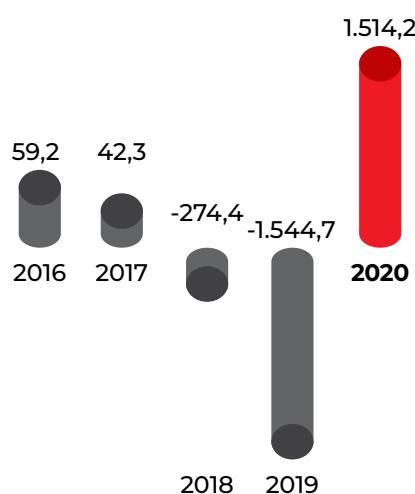
\*Disajikan Kembali/\*Restated



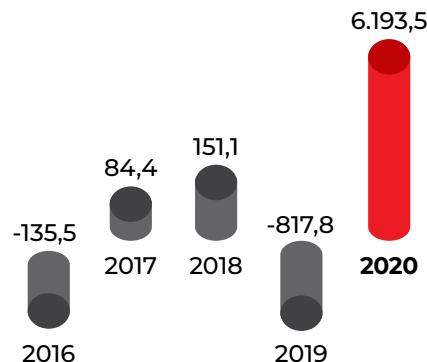
### Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi Cash Flow from (for) Operating Activities



### Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi Cash Flow from (for) Investment Activities



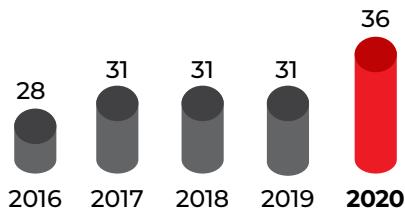
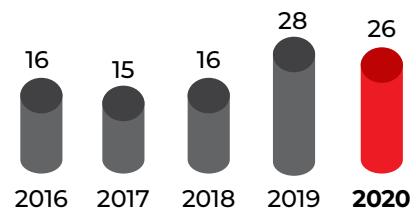
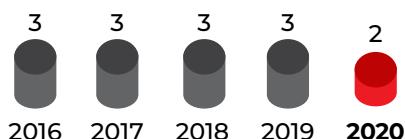
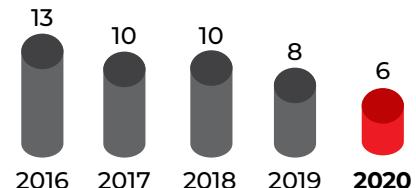
### Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flow from (for) Financing Activities



### Ikhtisar Rasio-rasio Keuangan Highlights of Financial Ratios

(dalam persen (%), kecuali dinyatakan lain)  
(in percent (%), unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA Margin	36	31	31	31	28
Net Income Margin	26	28	16	15	16
Return on Aset (ROA)	2	3	3	3	3
Return on Equity (ROE)	6	8	10	10	13
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	145	165	238	280	298
Rasio Liabilitas terhadap jumlah Aset Liabilities to Total Assets Ratio	59	62	70	74	75


**EBITDA Margin (%)**

**Net Income Margin (%)**

**Return on Asset (ROA) (%)**

**Return on Equity (ROE) (%)**




## IKHTISAR OPERASIONAL

HIGHLIGHTS OF OPERATIONAL ACTIVITIES



Uraian Description	2020 (Rp-miliar) (IDR-million)	2019 (Rp-miliar) (IDR-million)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp-miliar) (IDR-million)	Percentase Percentage (%)
<b>Pendapatan underwriting</b> Underwriting Income				
Pendapatan Premi asuransi-Bersih Insurance Premium Income-Net	15.830	15.630	200	1,3
Pendapatan Penjaminan-Bersih Guarantee Income-Net	2.562	2.045	517	25,3
Jumlah pendapatan underwriting Total underwriting income	18.392	17.675	717	4,1
Beban Underwriting Underwriting Expenses	13.592	13.427	165	1,2
Hasil underwriting Underwriting Income	4.800	4.248	552	13,0
Pendapatan jasa keuangan Financial services income	485	543	(58)	-10,6
Pendapatan hasil pengelolaan gedung Revenue from building management	177	197	(20)	-9,9
Hasil investasi Investment income	2.852	2.922	(70)	-2,4

## IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHTS



### Jumlah Saham

Jumlah saham Perusahaan sebanyak 67.163.537 lembar saham, dengan kepemilikan 100,00% atau seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan.

### Informasi tentang Perdagangan Saham dan Kepemilikan Saham oleh Publik

Hingga 31 Desember 2020, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa

### Number of shares

The number of the Company's shares is 67,163,537 shares, with 100% ownership or the whole ownership by the Government of the Republic of Indonesia. The Company does not issue its shares to be owned by the public or by management or employees.

### Information on Share Trading and Public Ownership

As of December 31, 2020, the Company has never conducted an Initial Public Offering and has not traded its shares to the public. Accordingly, there is no information related to share trading which contains market capitalization based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the highest, the lowest, and the closing share prices based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the trading volume of shares on the Stock Exchange in which the shares are listed; and information in the form of a graphic containing at least the closing price based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed and the trading volume of the shares on the Stock Exchange in which the shares are listed



kuartal dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## Informasi Tentang Aksi Korporasi

Di sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

### Dividen Saham

Pembagian Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2019 yang dilakukan di tahun 2020, dan Dividen Saham untuk hasil usaha tahun buku 2018 yang dibagikan di tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Dividen Saham Share Dividend	2020 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2019) (for 2019 Fiscal Year Share Dividend)	2019 (untuk Dividen Saham Tahun Buku 2018) (for 2018 Fiscal Year Share Dividend)
Jumlah Dividen yang Dibagikan (Rp-juta) Total Dividend Distributed (IDR-million)	-	-
Dividen Kas per Saham (Rp) Cash Dividend per Share (IDR)	-	-
Rasio Pembagian Dividen (%) Dividend Ratio (%)	-	-
Tanggal Pengumuman Announcement Date	-	-
Tanggal Pembayaran Payment Date	-	-

for each quarter in the last 2 (two) financial years; including the temporary suspension of share trading in the last 2 (two) years.

## Information About Corporate Action

Throughout 2020, the Company did not take corporate actions such as stock splits, reverse stock, bonus shares, or a decrease in the nominal value of shares.

### Share Dividend

The distribution of Share Dividends as the results of operations for the 2019 financial year conducted in 2020, and the Share Dividends as the results of operations for the 2018 financial year distributed in 2019, are as follows

## INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMATION ABOUT BONDS, SUKUK OR CONVERTIBLE BONDS

### Informasi tentang Obligasi, Sukuk Atau Obligasi Konversi

Hingga 31 Desember 2020, Perusahaan tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, dan peringkat obligasi/sukuk.

### Information about Bonds, Sukuk Or Convertible Bonds

As of December 31, 2020, the Company did not keep record on bonds, sukuk or convertible bonds, or record of other securities. Therefore, there is no information regarding the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds, interest/yield rates, maturity dates, and ratings of bonds/sukuk.



# INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

INFORMATION ABOUT OTHER SOURCES OF FUNDING

## PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)

### Dasar Usulan PMN

Dasar usulan PMN adalah sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020;

## STATE EQUITY PARTICIPATION (PMN)

### Legal Basis of State Equity Participation (PMN)

The basis for the PMN proposal is as follows:

1. Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
3. Law No.1 of 2004 concerning the State Treasury;
4. Law No. 20 of 2019 concerning the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2020;
5. Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability Becomes Law;
6. Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for State Equity Participation and Administration in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies as amended by Government Regulation no. 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for State Equity Participation and Administration in State Owned Enterprises and Limited Liability Companies;
7. Government Regulation No. 23 of 2020 concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program (PEN) in the Context of Supporting State Financial Policies for Handling the COVID-19 Pandemic and/or Facing Threats Endangering the National Economy and/or Financial System Stability, as well as Rescuing the National Economy as amended by Government Regulation No. 43 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 23 of 2020;



8. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 105 Tahun 2016 tentang Penetapan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi COVID-19;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
8. Presidential Regulation No. 72 of 2020 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 54 of 2020 concerning Changes in Posture and Details of the State Budget for Fiscal Year 2020;
9. Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 105 of 2016 concerning Stipulation of People's Business Credit Guarantee Company;
10. Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 8 of 2019 concerning Guidelines for the Implementation of People's Business Credit;
11. Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs No. 6 of 2020 concerning Special Treatment for People's Business Credit Recipients Affected by the COVID-19 Pandemic;
12. Regulation of the Minister of Finance No. 71/PMK.08/2020 concerning Procedures for Government Guarantees Through Guarantee Business Entities Designated in the Framework of Implementing the National Economic Recovery Program.

### Tujuan dan Rincian Penggunaan Penyertaan Modal Negara

Penambahan PMN sebesar Rp6 triliun merupakan penyertaan modal negara pada IFG sebagai *holding* perusahaan Askrindo dan Jamkrindo yang telah ditugaskan sebagai penjamin KUR dan penjamin KMK PEN atas kredit UMKM yang terdampak COVID-19. IFG sebagai *holding* perusahaan diharapkan dapat memonitor dan menjaga tata kelola penggunaan dana PMN ini sesuai persyaratan dan peruntukannya, dan mendukung bisnis anak perusahaan dalam hal:

1. Memperkuat permodalan Perusahaan Penjaminan;
2. Meningkatkan kapasitas usaha penjaminan Askrindo dan Jamkrindo;
3. Meningkatkan peran Askrindo dan Jamkrindo selaku Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM;
4. Mempermudah UMKM mengakses perbankan melalui penjaminan, sehingga UMKM menjadi lebih terberdayakan (*empowered*).

Askrindo dan Jamkrindo selaku perusahaan penjamin yang merupakan anggota *Holding*, mempunyai peran penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka COVID-19. Dengan adanya penjaminan KUR dan penjaminan KMK PEN, akan semakin membuka jalan UMKM terhadap akses permodalan yang disalurkan oleh Bank sebagai

### Purpose and Details of Use of State Equity Participation (PMN)

The addition of PMN of IDR 6 trillion is the state's equity participation in BPUI as the parent company of Askrindo and Jamkrindo which has been assigned as guarantor of KUR and guarantor of KMK PEN for MSME loans affected by COVID-19. BPUI as the holding company is expected to be able to monitor and maintain the governance of the use of PMN funds according to the requirements and designations, and to support the subsidiary's business in terms of:

1. Strengthening the capital of the Guarantee Company;
2. Increase the capacity of the guarantee business of Askrindo and Jamkrindo;
3. Increasing the role of Askrindo and Jamkrindo as Credit Guarantee Institutions for MSMEs;
4. Facilitate the MSMEs to access banking through guarantees, so that MSMEs become more empowered.

Askrindo and Jamkrindo as guarantee companies which are members of the Insurance and Guarantee Holding with PT BPUI as the Holding Company, have an important role in the National Economic Recovery in the context of COVID-19. With the KUR guarantee and KMK PEN guarantee, it will further pave the way for MSMEs to access capital distributed



penyalur, di mana Bank sebagai penyalur dapat merasa lebih aman menyalurkan kredit dengan adanya penjaminan. Dalam kondisi pandemi seperti ini, UMKM yang mengalami dampak COVID-19 akan tetap mendapatkan akses permodalan dan akan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Dari dana sebesar Rp6 triliun yang diterima pada tahun 2020, IFG akan melakukan tambahan modal kepada Askindo dan Jamkrindo. Pelaporan secara berkala atas penggunaan PMN akan dilakukan kepada pemegang saham dan Kementerian Keuangan sesuai dengan Permen BUMN No. PER-08/MBU/06/2015. Dalam hal penyertaan tambahan modal, *holding* dapat menjalankan tugas untuk melakukan review atas kebutuhan modal anak perusahaan (Askindo dan Jamkrindo), melakukan *monitoring* atas penggunaan dana dan melakukan evaluasi atas penggunaan dana. Sehingga penyertaan modal negara pada IFG akan disalurkan secara tepat jumlah, waktu dan sasaran. Hal ini merupakan wujud dari fungsi *holding* untuk menjalankan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan PMN. Di samping itu pula *holding* akan menjalankan tugas untuk memantau proses pelaporan penggunaan PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Manfaat Penambahan Penyertaan Modal Negara**

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan dengan nilai Rp6 triliun antara lain:

#### **1. Manfaat Bagi Pemerintah**

- Dengan meningkatnya jumlah pengusaha UMKM yang dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya, maka ekonomi nasional juga akan mengalami pertumbuhan, khususnya di sektor riil;
- Apabila jumlah UMKM yang dapat mengakses pembiayaan melalui KUR meningkat dan makin besar sehingga usahanya tumbuh, berkembang dan menguntungkan, maka Pemerintah akan memperoleh manfaat adanya pertumbuhan sektor riil dan secara tidak langsung juga akan terjadi peningkatan pendapatan negara melalui sektor perpajakan;
- PMN yang disalurkan dapat dikelola secara terintegrasi oleh IFG sebagai *holding* perusahaan penjaminan, sehingga peruntukannya dapat dikelola dengan baik secara tepat waktu, jumlah dan sasaran sesuai persyaratan dan tata kelola yang baik;

by the Bank as a distributor, in which the Bank as a distributor more secure in channeling credit with a guarantee. In a pandemic condition, the MSMEs experiencing the impact of COVID-19 will still have access to capital and will encourage the recovery of the national economy.

From the Rp 6 trillion fund received in 2020, IFG will provide additional capital to Askindo and Jamkrindo. Periodic reports on the use of PMN will be submitted to shareholders and the Ministry of Finance in accordance with SOE Ministerial Regulation No. PER-08/MBU/06/2015. In terms of additional equity participation, the Holding can conduct the task of reviewing the capital needs of subsidiaries (Askindo and Jamkrindo), and monitoring the use of funds and evaluating the use of funds so that state equity participation in IFG will be channeled in the right amount, time and target. This is a manifestation of the Holding function to carry out risk management and the principle of prudence in the use of PMN. In addition, the Holding will conduct the task of monitoring the process of reporting the use of PMN in accordance with prevailing regulations.

### **Benefits of Additional State Equity Participation**

The benefits obtained from the addition of State Equity Participation (PMN) to the Company with a value of IDR6 trillion include:

#### **1. Benefits for the Government**

- With the increasing number of MSME entrepreneurs who can run and develop their businesses, the national economy will also experience growth, especially in the real sector;
- If the number of MSMEs that can access financing through KUR increases and their business grows, develops, and is profitable, then the Government will benefit from the growth of the real sector and indirectly there will also be an increase in state income through the taxation sector;
- PMN distributed can be managed in an integrated manner by IFG as the guarantee holding company, so that its allocation can be managed properly in a timely manner, in quantity and target according to requirements and good governance;



- d. Mendukung pelaksanaan program Pemulihian Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19;
- e. Pemerintah memiliki *buffer* terhadap potensi risiko dalam ekosistem penjaminan penyaluran kredit modal kerja UMKM apabila terjadi perubahan kebijakan tentang stimulus ekonomi yang berpengaruh terhadap UMKM.

## 2. Manfaat Bagi Perusahaan

- a. Memperkuat struktur permodalan IFG sehingga dapat berperan dalam penataan industri asuransi sesuai dengan tujuan dibentuknya *Holding* Asuransi dan Penjaminan yaitu memperkuat daya saing nasional melalui peningkatan permodalan, standar pelayanan, kompetensi SDM, dan jangkauan distribusi;
- b. Untuk meningkatkan kapasitas Askindo dan Jamkrindo dalam melakukan penjaminan KUR dan penjaminan KMK PEN, sehingga mempunyai kapasitas penjaminan yang mencukupi untuk menjamin penyaluran KUR kepada UMKM sebesar Rp99 triliun dan Rp65 triliun untuk KMK PEN pada tahun 2020;
- c. Dengan adanya penambahan dana PMN tersebut, Askindo dan Jamkrindo dapat meningkatkan kinerja keuangan melalui pengelolaan dana sehingga dapat memperoleh hasil investasi. Selain itu, secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kepercayaan perbankan dan mitra usaha dalam menjalin kerja sama bisnis (*reciprocal business*).

## 3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Dengan adanya pelaksanaan program penjaminan KUR sebesar Rp99 triliun dan penjaminan KMK PEN sebesar Rp32,5 triliun tahun 2020 oleh Askindo dan Jamkrindo, maka diproyeksikan jumlah UMKM yang akan dijamin oleh Askindo dan Jamkrindo pada tahun 2020 akan semakin meningkatkan Unit Usaha yang terjamin dan peningkatan penyerapan tenaga kerja;
- b. Dengan adanya penjaminan KUR dan penjaminan KMK PEN oleh Askindo dan Jamkrindo tahun 2020 kepada UMKM yang *feasible but not bankable* atau tidak mempunyai agunan tambahan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan ketentuan perbankan, maka UMKM tersebut dapat mengakses kredit, sehingga pengusaha UMKM dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya;

- d. It supports the implementation of the National Economic Recovery program conducted by the Government for handling the COVID-19 pandemic;
- e. The government has a buffer against potential risks in the MSME working capital credit guarantee ecosystem if there is a policy change regarding economic stimulus that affects MSMEs.

## 2. Benefits for the Company

- a. Strengthening the capital structure of IFG so that it can perform a role in structuring the insurance industry in accordance with the objectives of the establishment of the Holding Company of Insurance and Guarantee, namely strengthening national competitiveness through increased capital, service standards, HR competencies, and distribution coverage;
- b. Increasing the capacity of Askindo and Jamkrindo in providing KUR guarantees and KMK PEN guarantees, therefore they have sufficient guarantee capacity to guarantee the distribution of KUR to MSMEs amounting to IDR 99 trillion and IDR 65 trillion for KMK PEN in 2020;
- c. With the addition of PMN funds, Askindo and Jamkrindo can improve financial performance through fund management so that they can obtain investment returns. In addition, it can also indirectly increase the confidence of banks and business partners in establishing business cooperation (reciprocal business).

## 3. Benefits for Society

- a. With the implementation of the KUR guarantee program of IDR 99 trillion and the KMK PEN guarantee of IDR 32.5 trillion in 2020 by Askindo and Jamkrindo, respectively, it is projected that the number of MSMEs that will be guaranteed by Askindo and Jamkrindo in 2020 will further increase the number of Business Units guaranteed and increased absorption of labor;
- b. With the KUR guarantee and KMK PEN guarantee by Askindo and Jamkrindo in 2020 to MSMEs that are feasible but not bankable or do not have additional collateral in sufficient quantities in accordance with banking regulations, these MSMEs can access credit, so that MSME entrepreneurs can run and develop their business;



c. Selain penjaminan KUR dan penjaminan KMK PEN oleh Askrindo dan Jamkrindo, UMKM yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank maupun pelaksanaan proyek infrastruktur juga dapat dilakukan penjaminan oleh Askrindo dan Jamkrindo.

c. In addition to the KUR guarantee and the KMK PEN guarantee by Askrindo and Jamkrindo, MSMEs which receive financing facilities from banks and the implementation of infrastructure projects can also be guaranteed by Askrindo and Jamkrindo.

## PINJAMAN PERBANKAN IFG

Sehubungan dengan strategi investasi yang dilakukan oleh Indonesia Financial Group ("IFG") dalam rangka penugasan IFG melalui Surat Kementerian BUMN No. S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 untuk menjalankan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam program penyelamatan dan penyehatan (restrukturisasi) PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), pada tahun 2020 IFG melakukan akuisisi aset Jiwasraya berupa lahan Cilandak Towsquare ("Citos") dimana salah satu sumber dana atas akuisisi aset Citos tersebut berasal dari *fundraising* IFG melalui Pinjaman Jangka Pendek yang diajukan oleh IFG pada Maret 2020 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan plafon sebesar Rp800 miliar dan pinjaman yang ditarik sebesar Rp350 miliar serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan plafon sebesar Rp800 miliar dan pinjaman yang ditarik sebesar Rp350 miliar. Adapun Pinjaman Jangka Pendek tersebut telah dilunasi oleh IFG pada September 2020.

## BPUI BANKING LOAN

In relation to the investment strategy conducted by PT Indonesia Financial Group ("IFG"), in the context of the assignment of IFG through the Letter of the Ministry of SOEs No. S-187/MBU/03/2020 dated March 23, 2020 to conduct the steps deemed necessary in the rescue and restructuring program of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya"), in 2020, BPUI acquired Jiwasraya's assets in the form of Cilandak Towsquare ("Citos") in which one of the sources of funds for the acquisition of Citos assets came from BPUI fundraising through a Short Term Loan proposed by BPUI in March 2020 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a credit limit of IDR800 billion and a loan drawn amounting to IDR350 billion and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a credit limit of IDR800 billion and loans drawn amounting to IDR350 billion. The short-term loan has been repaid by BPUI in September 2020.



## PERISTIWA PENTING

IMPORTANT EVENTS

### APRIL APRIL



**6 April**

Syukuran Holding IFG  
IFG Holding Thanking Event



**17 April**

Ulang tahun IFG  
IFG Anniversary

### MEI MAY



**26 Mei May**

Halal bi Halal 1441 H IFG  
IFG 1441 H Gathering

### JUNI JUNE



**5 Juni June**

Pembagian Sembako kepada Yatim Dhuafa Yayasan  
Pesantren Islam Al-Hamra Serang  
Distribution of basic necessities to orphans at the Al-  
Hamra Islamic Boarding School, Serang

### JULI JULY



**20 Juli July**

Sosialisasi Core Values AKHLAK Holding  
Asuransi dan Penjaminan  
Dissemination of AKHLAK Core Values of the  
Holding Company of Insurance and Guarantee



## AGUSTUS AUGUST



### 17 Agustus August

Kegiatan upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI  
Celebration of the Indonesian Independence Day



### 26 Agustus August

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS dengan IFG  
Signing of Memorandum of Understanding between BPJS and IFG

## SEPTEMBER SEPTEMBER



### 31 Agustus August

Courtesy Meeting antara IFG dengan BPJSTK  
Courtesy Meeting between IFG and BPJSTK



### 15 September September

Laporan Progres Penyusunan Pedoman Strategis pada Wamen BUMN II  
Progress Report on the Preparation of Strategic Guidelines for Deputy Minister II of the Ministry of SOEs

## OKTOBER OCTOBER



### 2 Oktober October

Town Hall bersama Bapak Agus Martwardjo  
Town Hall with Mr. Agus Martwardjo



### 19 Oktober October

Media Gathering bersama rekan media  
Media Gathering with Media Partners



## NOVEMBER NOVEMBER



### 3 November

Brand Launching IFG 3 November 2020  
IFG Brand Launching on November 3, 2020



### 6 November

Penandatanganan Komitmen AKHLAK IFG dan Anak Perusahaan  
Signing of the AKHLAK Commitment by IFG and its Subsidiaries



### 20 November

Town Hall Meeting bersama Bapak Hotbonar Sinaga  
Town Hall Meeting with Mr. Hotbonar Sinaga



### 23 November

Rapat Koordinasi IFG dengan Kejaksaan RI  
IFG Coordination Meeting with the Attorney General Office of Republic of Indonesia



# Laporan Manajemen

Management  
Report

**Secara umum, inisiatif strategis yang disusun Perusahaan di tahun 2020 senantiasa mengedepankan prinsip *financial sustainability*, sehingga dapat mengatasi tantangan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19.**

In general, the strategic initiatives prepared by the Company in 2020 always prioritized the principle of financial sustainability, so that they can overcome the economic challenges affected by the COVID- 19 pandemic.



Indonesia Financial Group

## LAPORAN DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT



**Fauzi Ichsan**  
Komisaris Utama  
President Commissioner



**Melalui pengamatan cermat terhadap kondisi makro ekonomi, perubahan lingkungan usaha serta perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen, Perusahaan cukup mampu beradaptasi dan menerapkan strategi yang relevan sesuai perkembangan terkini.**

Through careful observation of macroeconomic conditions, changes in the business environment, as well as changes in consumer behavior and needs, the Company is quite capable of adapting and implementing relevant strategies according to the latest developments.

## Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan capaian yang cukup baik. Dalam menjalankan fungsi strategisnya, Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Perusahaan. Fokus pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2020 meliputi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tindak lanjut dan rekomendasi atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, efektivitas sistem pengendalian internal dan penerapan budaya Perusahaan serta pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Tinjauan Makro Ekonomi

Dewan Komisaris menyadari bahwa kegiatan usaha Perusahaan secara tidak langsung cukup dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan industri, yang juga menjadi salah satu dasar pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas Kinerja Direksi. Pada tahun 2020, seluruh dunia menghadapi krisis luar biasa (*extraordinary*) yang belum pernah dialami sebelumnya seiring dengan merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di hampir seluruh negara di dunia. Pandemi COVID-19 ini, tidak hanya menimbulkan

## Dear Shareholders and Stakeholders,

Allow us to express our most sincere gratitude to God Almighty who has bestowed upon us His grace and gifts which has enabled PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG) to go through 2020 which is full of challenges with quite good achievements. In conducting its strategic functions, the Board of Commissioners has carried out its responsibilities of supervising and providing advice to the Board of Directors in good faith and prudence for the benefit of the Company. The focus of supervisory and advisory duties of the Board of Commissioners in 2020 includes planning and implementing the Company's Work Plan and Budget (RKAP), and following up on the recommendations regarding the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), implementing Good Corporate Governance, ensuring effectiveness of the internal control system, and implementing corporate culture as well as adherence to prevailing laws and regulations.

## Macroeconomic Overview

The Board of Commissioners realizes that the Company's business activities are indirectly influenced by economic and industrial conditions, which are also one of the basic considerations for the Board of Commissioners in assessing the performance of the Board of Directors. In 2020, the whole world faced an extraordinary crisis that has never been experienced before with the outbreak of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic in almost every countries in the world. The COVID-19 pandemic has not only caused a major health

krisis kesehatan dan kemanusiaan yang besar, namun juga menimbulkan krisis ekonomi di hampir seluruh negara di dunia.

Pandemi COVID-19 yang pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Tiongkok, terus menyebar ke hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Seperti dikutip dari Laporan Kebijakan Moneter kuartal IV 2020 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Perkembangan tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi COVID-19 di banyak negara untuk membangun *herd immunity* dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh Amerika Serikat (AS), sedangkan di negara berkembang didorong oleh perbaikan ekonomi Tiongkok dan India.

Di sisi lain, BPS juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2020 masih terkontraksi sebesar -2,19% (yoY), tetapi mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 yang terkontraksi sebesar -3,49% (yoY). Kondisi perekonomian ini tentunya berdampak cukup besar terhadap kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas upaya Direksi untuk tetap memperkuat eksistensi dan mempertahankan kinerja Perusahaan agar tetap optimal di tengah kondisi yang sangat menantang di tahun 2020. Perusahaan mampu merespon kondisi tersebut dengan cepat, melalui langkah-langkah preventif yang salah satunya adalah melakukan review atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 agar mampu melewati tantangan ekonomi termasuk pengaruh dampak pandemi COVID-19.

## Penilaian Atas Kinerja Direksi

Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi Perusahaan, di mana sejak memasuki kuartal II-2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Dewan Komisaris dapat memahami tantangan yang dihadapi Perusahaan tersebut. Namun, Dewan Komisaris cukup mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang diambil Direksi, dengan pencapaian kinerja yang dibukukan Perusahaan di tahun 2020.

and humanitarian crisis, but has also caused an economic crisis in almost all countries in the world.

The COVID-19 pandemic, which was first detected at the end of 2019 in China, continued to spread to almost all countries in the world, including Indonesia. As quoted from the quarter IV of 2020 Monetary Policy Report released by Bank Indonesia, it was stated that the global economic recovery is expected to improve. These progresses are in line with the implementation of COVID-19 vaccination in many countries to build herd immunity and encourage mobility, as well as the continuation of fiscal and monetary policy stimulus. The higher global economic recovery in developed countries was supported mainly by the United States (US), while in developing countries it was driven by the economic recovery of China and India.

On the other hand, Statistics Indonesia (BPS) also recorded that even though the economic growth in the quarter IV of 2020 was still contracted by -2.19% (yoY), it also experienced improvement when compared to economic growth in quarter III of 2020 which was contracted by -3.49% (yoY). This economic condition certainly has a significant impact on the Company's performance. The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors to continue in strengthening the existence and to maintain the Company's performance in order to remain optimal in the midst of very challenging conditions in 2020. The Company was able to respond to these conditions rapidly, through preventive measures, one of which is to review the 2020 Company Work Plan and Budget (RKAP) in order to be able to overcome economic challenges which include the impact of the COVID-19 pandemic.

## Assessment of the Performance of the Board of Directors

The year 2020 was a challenging year for the Company. Since entering the second quarter of 2020, the Indonesian economy has experienced a decline due to the impact of the COVID-19 pandemic. The Board of Commissioners understand the challenges faced by the Company and the Board of Commissioners appreciates the various strategic initiatives taken by the Board of Directors which resulted in the performance achievements recorded by the Company in 2020.



Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan memberikan saran atas kinerja Perusahaan yang mengacu pada RKAP tahun 2020 dalam rangka optimalisasi aspek pengendalian kinerja dan kepatuhan manajemen. Dewan Komisaris juga melakukan pengkajian atas hasil pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan Perusahaan. Fungsi pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris merupakan bagian dari amanat pemegang saham yang telah diputuskan melalui mekanisme RUPS. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Dewan Komisaris menjadi representasi atas kepentingan pemegang saham untuk mengawasi pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas Perusahaan serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan di tengah kondisi yang penuh tantangan di tahun 2020. Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat, pada tahun 2020 Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan Perusahaan dengan sangat baik. Hal tersebut terlihat dari kinerja Perusahaan di tahun 2020, yang mampu membukukan kinerja secara optimal.

Tahun 2020 sekaligus menjadi momentum bersejarah bagi Perusahaan dengan ditetapkannya IFG sebagai BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, maka IFG resmi menjadi *holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) di samping anak-anak perusahaan yang telah ada sebelumnya. Pada tahun yang sama dengan ditetapkannya IFG sebagai BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, IFG melakukan transformasi *brand* dan logo menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

Dewan Komisaris memberikan apresiasinya terhadap kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah diperlihatkan Direksi di sepanjang tahun 2020, serta mengapresiasi upaya Direksi dan seluruh jajarannya dalam mengantisipasi tantangan dan perkembangan bisnis ke depan. Beberapa catatan penting terkait kebijakan mendasar di tahun 2020 akan menjadi fondasi bagi Dewan Komisaris untuk mendorong perkembangan Perusahaan ke depan.

The Board of Commissioners monitors and gives advices on the Company's performance, which refers to the 2020 RKAP, in order to optimize aspects of performance control and management compliance. The Board of Commissioners also reviews the results of the general audit concerning the Company's financial statements. The supervisory function conducted by the Board of Commissioners is part of the shareholder's mandate which has been decided through the GMS mechanism. Directly or indirectly, the Board of Commissioners is a representation of the shareholders' interests to oversee the management of the Company carried out by the Board of Directors.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has made great efforts to maintain the stability of the Company and maintain the trust of stakeholders in the midst of challenging conditions in 2020. In general, the Board of Commissioners have an opinion that in year 2020, the Board of Directors has conducted the management tasks very well. This can be seen from the Company's performance in 2020, which was able to record optimal performance.

The year 2020 was also a historic moment for the Company with the establishment of IFG as a SOE Holding Insurance and Guarantee, and IFG officially becomes the parent company of PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), in addition to the existing subsidiaries. In the same year as per the stipulation of IFG as a SOE Holding Insurance and Guarantee, based on the letter of the Ministry of SOEs No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020, IFG transformed its brand and logo into Indonesia Financial Group (IFG)

The Board of Commissioners truly appreciates the performance, commitment, and dedication demonstrated by the Board of Directors throughout 2020, and appreciates the efforts of the Board of Directors and all staffs in anticipating future challenges and business developments. Several important notes related to the fundamental policies in 2020 will be the foundation for the Board of Commissioners to encourage the development of the Company going forward.

## Fungsi Pengawasan Implementasi Kebijakan dan Strategi Perusahaan

Dewan Komisaris secara proaktif meninjau dan memonitor implementasi kebijakan dan strategi yang ditetapkan pada awal tahun bersama Direksi, pada pengelolaan Perusahaan. Setiap periode tertentu, Dewan Komisaris senantiasa melakukan *review* atas performa Perusahaan. Adapun rekomendasi dan saran yang konstruktif dan solutif terhadap hasil *review* atas performa Perusahaan tersebut kemudian disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi dan organ lain yang berkepentingan melalui mekanisme Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, serta rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk membahas aspek-aspek yang membutuhkan perhatian khusus. Dewan Komisaris secara berkala juga melakukan pengawasan langsung demi memastikan kecukupan pengawasan serta meninjau kesesuaian proses dan hasil kerja dengan kualifikasi yang ditetapkan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris telah menjalankan perannya dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi. Dewan Komisaris senantiasa terlibat dan dilibatkan dalam setiap penyusunan target tahunan Perusahaan, juga turut memberikan saran dan masukannya dalam penetapan rencana dan target yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun pada awal tahun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi internal dan eksternal yang dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan Dewan Komisaris baik melalui pembahasan dengan Direksi terkait kinerja Perusahaan, maupun dengan turun langsung ke lapangan, Dewan Komisaris menilai, Perusahaan telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan rencana kerja tahunan, visi dan misi serta arahan strategis dari Pemegang Saham. Melalui pengamatan cermat terhadap kondisi makro ekonomi, perubahan lingkungan usaha serta perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen, Perusahaan cukup mampu beradaptasi dan menerapkan strategi yang relevan sesuai perkembangan terkini.

## The Supervision Function of Implementation of Company Policies and Strategies

The Board of Commissioners proactively reviews and monitors the implementation of policies and strategies set at the beginning of the year together with the Board of Directors, regarding the management of the Company. In every specific period, the Board of Commissioners always reviews the Company's performance. The recommendations and suggestions that are constructive and become the solution to the review's results concerning the Company's performance are then presented by the Board of Commissioners to the Board of Directors and other interested organs through the mechanism of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as coordination meetings held to discuss aspects that require special attention. The Board of Commissioners also periodically conducts direct supervision to ensure the adequacy of supervision as well as reviews the suitability of work processes and results with the specified qualifications.

As mandated in the prevailing laws and regulations, in particular Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Board of Commissioners has conducted its role in supervising the management of the Company by the Board of Directors. The Board of Commissioners is always involved in every preparation of the Company's annual targets. The BOC also provides advice and input in setting plans and targets contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), which was prepared at the beginning of the year, by taking into account internal and external assumptions considered to have a significant impact on the Company's business continuity.

Based on the supervision conducted by the Board of Commissioners, both through discussions with the Board of Directors regarding the Company's performance, as well as by going directly to the area, the Board of Commissioners assesses that the Company has performed its business in accordance with the annual work plan, vision and mission as well as strategic directions from the Shareholders. Through careful observation of macroeconomic conditions, changes in the business surroundings as well as changes in consumer behavior and needs, the Company is quite capable of adapting and implementing relevant strategies according to the latest developments.



## Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat kepada Direksi

Dewan Komisaris senantiasa menjalin hubungan kerja yang sangat baik dengan Direksi dan mengedepankan prinsip saling menghormati wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi yang dijalankan Direksi dengan senantiasa menempatkan pengawasan atas implementasi strategi Perusahaan sebagai salah satu prioritas. Dewan Komisaris selalu berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif dan solutif kepada Direksi, dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. Satu hal yang selalu ditekankan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga senantiasa menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan mengundang Direksi sebanyak 8 (delapan) kali. Selain forum rapat gabungan, organ Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat dengan mengundang Direktorat dan Divisi terkait untuk membahas bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing Komite.

## Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Dewan Komisaris berpendapat bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun optimis bagi IFG. Hal ini tercermin dari beberapa target yang telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berharap agar segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan transformasi usaha berkelanjutan.

## Mechanism and Frequency of Giving Advice to the Board of Directors

The Board of Commissioners always maintains a very good working relationship with the Board of Directors and prioritizes the principle of mutual respect for the authority of each party. The Board of Commissioners supervises the implementation of the strategy carried out by the Board of Directors by always placing supervision over the implementation of the Company's strategy as one of the priorities. The Board of Commissioners always strives to carry out its responsibilities by providing constructive suggestions and recommendations to the Board of Directors, in managing the Company. One thing that the Board of Commissioners always emphasizes to the Board of Directors is to always prioritize aspects of compliance and the principles of Good Corporate Governance (GCG).

The Board of Commissioners regularly holds meetings with the Board of Directors to discuss various matters related to the management of the Company conducted by the Board of Directors in a joint meeting forum. In the forum, the Board of Commissioners can request an explanation from the Board of Directors regarding the achievement of the Company's performance and the various obstacles faced. The Board of Commissioners also continuously expresses views and provides advice to the Board of Directors regarding this matter.

Throughout 2020, the Board of Commissioners has held joint meetings with the Board of Directors for as many as 8 (eight) times. In addition to the joint meeting forum, the organs of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, as well as the Nomination and Remuneration Committee, has held meetings inviting the relevant Directorates and Divisions to discuss the areas of responsibility of each Committee.

## Opinions on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners believes that 2020 will be an optimistic year for IFG. This is reflected in several targets that have been prepared by the Board of Directors and have been approved by the Board of Commissioners. The Board of Commissioners hopes that all Company personnel will always work together to achieve the best goals and are committed to continuing to build business values as well as healthy business processes and sustainable business transformation.



Direksi telah menyusun RKAP 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, di mana Direksi tetap memastikan kegiatan operasional Perusahaan dijalankan dengan menjaga protokol kesehatan. Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja Perusahaan untuk tahun 2021, sudah cukup baik dan selaras dengan arah serta tujuan Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun Direksi, telah mempertimbangkan asumsi-asumsi dalam makro ekonomi global dan nasional pada masa mendatang.

Pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir 2020, diprediksi meningkat secara bertahap pada 2021. Meski sedikit lebih rendah dari perkiraan semula, perkembangan sejumlah indikator pada Desember 2020 mengindikasikan perbaikan yang terus berlangsung, seperti aktivitas ekspor dan impor yang meningkat, PMI manufaktur yang membaik, serta ekspektasi penjualan dan konsumen yang masih tetap baik. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik.

Dewan Komisaris memandang bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh tantangan terutama di tengah hantaman pandemi COVID-19. Namun, Dewan Komisaris berkeyakinan tantangan ini akan mampu dilalui dengan penuh rasa optimisme. Dengan semangat baru yang ditumbuhkan dalam tubuh IFG, Dewan Komisaris yakin bahwa Perusahaan akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang lebih baik.

## Peran Dewan Komisaris atas Penerapan dan Pengelolaan WBS

Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pencegahan terjadinya *fraud* di lingkup Perusahaan. Keberadaan WBS merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk menjadikan prinsip GCG sebagai landasan dari setiap aspek operasional Perusahaan. WBS sendiri, memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor. Di lingkup Perusahaan, WBS telah dikelola dengan cukup baik. Mekanisme WBS juga memungkinkan prosedur pelaporan tindak kecurangan di lingkup Perusahaan,

The Board of Directors has prepared the 2021 RKAP and has received approval from the Board of Commissioners, in which the Board of Directors continues to ensure that the Company's operational activities are carried out by maintaining health protocols. Broadly speaking, the Board of Commissioners have an opinion that the business prospects, that have been prepared by the Board of Directors as stated in the Company's work plan for 2021, are good and in line with the guidance and short and long term objectives of the Company. The Board of Commissioners assesses that the business prospects prepared by the Board of Directors have taken into account the assumptions of the global and national macro-economy in the future.

Improved domestic economic growth until the end of 2020, is predicted to increase gradually in 2021. Although slightly lower than the initial estimate, progress in a number of indicators in December 2020 indicate ongoing improvements, such as increasing export and import activity, improving PMI manufacturing, as well as good sales and consumer expectations. The national vaccine program which started in early January 2021 and various disciplinary actions accompanied by the implementation of the COVID-19 protocol are expected to support the domestic economic recovery process.

The Board of Commissioners views that 2021 will be a year full of challenges, especially in the midst of the COVID-19 pandemic. However, the Board of Commissioners believes that this challenge will be overcome with a sense of optimism. With the new spirit that is grown in IFG's body, the Board of Commissioners is confident that the Company will continue to advance towards a better future.

## The Role of the Board of Commissioners on the Implementation and Management of WBS

The Company has a violation reporting system or Whistleblowing System (WBS), which serves as a fraud prevention mechanism within the Company. The existence of WBS is part of the Company's commitment to make GCG principles become the foundation of every aspect of the Company's operations. WBS itself, allows a reporting mechanism that ensures the confidentiality of the whistleblower. Within the Company, WBS has been managed quite well. The WBS mechanism also enables fraud reporting procedures within the Company, including abuse of authority, misuse of



termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan aset Perusahaan, pemalsuan laporan, serta diskriminasi dan penyimpangan lainnya, terhadap seluruh jenjang organisasi, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengelolaan WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anonim, dan independen. Setiap pengaduan yang masuk, diterima oleh Tim Pengelola Pelaporan yang akan menganalisis untuk kemudian disampaikan kepada IFG. Mekanisme penanganan laporan WBS dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan No. SK DIR 049/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2019, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Prosedur kebijakan WBS memberikan jaminan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh karyawan IFG dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. WBS akan menerima setiap laporan yang masuk untuk dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Dewan Komisaris yang bersinergi melalui unit terkait senantiasa melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan dan proses pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkup Perusahaan. Dewan Komisaris menilai penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan telah dijalankan dengan cukup baik, hal tersebut tercermin dengan tidak terdapatnya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Perusahaan yang disampaikan melalui mekanisme Whistleblowing System.

## Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Di tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut kronologi perubahan komposisi dan susunan Anggota Dewan Komisaris, per 31 Desember 2020.

Company assets, falsification of reports, as well as discrimination and other irregularities, at all levels of the organization, including in the level of Board of Commissioners and the Board of Directors.

The management of the WBS is conducted with the principle of confidentiality, anonymously, and independently. Each incoming complaint is received by the Reporting Management Team which will analyze it and then submit it to IFG. The mechanism for handling the WBS report is carried out based on Implementation Guidelines No. SK DIR 049/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2019, concerning Good Corporate Governance Guidelines for the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

The WBS policy procedure guarantees that reporting can be implemented with confidentiality, anonymously, and independently which is used to optimize the participation of all IFG employees and other parties in disclosing violations that occur within the Company. WBS will receive every incoming report to be studied, classified and followed up through an in-depth investigation based on the facts obtained. The decision on whether the report is proven or not will be made and taken based on consideration of the consequences of the action, the degree of intent and the motive for the action.

The Board of Commissioners, through synergy with related units, always conduct supervisory responsibilities over the reporting process and the process of monitoring compliance with prevailing laws and regulations within the Company. The Board of Commissioners considers that the implementation of the Violation Reporting System in the Company has been performed well. This is reflected in the absence of reports of alleged violations committed by the Company's Personnel submitted through the Whistleblowing System mechanism.

## Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2020, there was a change in the composition and structure of the members of the Board of Commissioners based on the Resolution of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). The following is a chronology of changes in the composition and structure of the members of the Board of Commissioners, as of December 31, 2020.

### Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2020

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners throughout 2020

<b>Periode 1 Januari –20 Oktober 2020</b> <small>January 1 – October 20, 2020 Period</small>	<b>Periode 20 Oktober – 30 Desember 2020</b> <small>October 20 – December 30, 2020 Period</small>	<b>Periode 30 - 31 Desember 2020</b> <small>December 30 – December 31, 2020 Period</small>	<b>Keterangan</b> <small>Description</small>
Gatot Darmasto (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Gatot Darmasto (Komisaris Utama) (President Commissioner)		Gatot Darmasto tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 30 Desember 2020 Gatot Darmasto has not served as the President Commissioner since December 30, 2020
	Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/ Independen) (President/Independent Commissioner)		Fauzi Ichsan diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 30 Desember 2020 Fauzi Ichsan has been appointed as President Commissioner since December 30, 2020
Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf (Komisaris) (Commissioner)	Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf (Komisaris) (Commissioner)		Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 30 Desember 2020 Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf has not served as Commissioner of the Company since December 30, 2020
	Masyita Crystallin (Komisaris) (Commissioner)		Masyita Crystallin diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 30 Desember 2020 Masyita Crystallin has been appointed as Commissioner of the Company since December 30, 2020
Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	Meirijal Nur diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 7 Januari 2019 Meirijal Nur has been appointed as Commissioner of the Company since January 7, 2019
	Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Hotbonar Sinaga diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 20 Oktober 2020 Hotbonar Sinaga has been appointed as the Company's Independent Commissioner since October 20, 2020
	Arief Budiman (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)		Arief Budiman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Februari 2021 Arief Budiman has not served as Independent Commissioner since February 2021

Per 31 Desember 2020, Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 5 (lima) orang dan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Pemegang Saham guna menjamin calon Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, there were 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners, and they have passed a fit and proper test by the Shareholders to ensure that the candidates for the Board of Commissioners have the integrity, competence, reputation, as well as having experience and expertise needed in carrying out their respective functions and duties, and are free from affiliation or other conflicts of interest. The composition and structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 are as follows:



**Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020**  
 Composition and Structure of the Board of Commissioners as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Position Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/ Independen President/ Independent Commissioner	30 Desember 2020- RUPS Tahun 2025 December 30, 2020- AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Appointed as President Commissioner since December 30, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of IFG No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	30 Desember 2020- RUPS Tahun 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris sejak 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 Appointed as Commissioner since December 30, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Meirijal Nur	Komisaris Commissioner	Januari 2019 - sekarang January 2019 - now	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris sejak 7 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-06/MBU/01/2019 Appointed as Commissioner since January 7, 2019 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. Number SK-06/MBU/01/2019
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner	20 Oktober 2020- RUPS Tahun 2025 October 20, 2020- AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 Appointed as Independent Commissioner since October 20, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020..
Arief Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Oktober 2020 - Februari 2021 October 2020 - February 2021	Ke-1 1st	Diangkat melalui SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, SK-87/ MBU/S/1/2020 tanggal 26 November 2020 ralat atas SK-337/MBU/10/2020 Appointed through SK-337/MBU/10/2020 on October 20, 2020, SK-87/MBU/S/1/2020 on November 26, 2020, an amendment on SK-337/MBU/10/2020.



Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi di bidangnya masing-masing yang memadai serta mampu menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi.

## Penutup dan Apresiasi

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Perusahaan, meski demikian, Perusahaan berhasil menjaga stabilitas dan konsistensinya di sepanjang tahun 2020 yang tidak lepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan. Untuk itu, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, konsumen atau pelanggan, mitra bisnis, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya dalam mendukung kelangsungan usaha Perusahaan.

Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap dedikasi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya guna mengembangkan usaha untuk lebih maju lagi. Akhir kata, izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama ini. Apresiasi dan penghargaan terdalam juga kami tujuhan kepada segenap Direksi, jajaran Manajemen dan seluruh karyawan atas kerja keras serta dedikasi dalam upaya pengembangan Perusahaan menjadi lebih baik lagi.

All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence and reputation in their respective fields and are able to provide sufficient time in carrying out their duties, and do not have conflicts of interest and familial relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or or the Board of Directors.

## Closing and Appreciation

Year 2020 was a year full of challenges for the Company. However, the Company managed to maintain its stability and consistency throughout 2020. This was due to the support of all stakeholders. For this reason, the Board of Commissioners would like to express its gratitude towards the Shareholders, consumers or customers, business partners, employees and other stakeholders for their trust in supporting the Company's business continuity.

We appreciate the policy of the Company which has put its faith in the dedication of the Board of Commissioners in conducting the supervisory function in order to develop the business to be more advanced. Finally, allow us to express our appreciation to the shareholders and stakeholders for the trust and support given so far. We also extend our deepest appreciation and gratitude to the entire Board of Directors, management and all employees for their hard work and dedication to develop the Company for the better.

Jakarta, 13 Januari 2022  
 Jakarta, January 13, 2022

Atas nama Dewan Komisaris  
 On behalf of the Board of Commissioners  
 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)



**Fauzi Ichsan**  
 Komisaris Utama  
 President Commissioner

**Halaman Ini Sengaja Dikosongkan**  
This Page Is Intentionally Left Blank



2

**Arief Budiman**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

1

**Fauzi Ichsan**  
Komisaris Utama/Independen  
President Commissioner/Independent  
Commissioner

3

**Meirjal Nur**  
Komisaris  
Commissioner



FUNGSI PENUNJANG  
BISNIS

Business Supporting Function



ANALISIS DAN  
PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion  
and Analysis



TATA KELOLA  
PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility



4

**Masyita Crystallin**  
Komisaris  
Commissioner

5

**Hotbonar Sinaga**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

## LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' REPORT



**Robertus Billitea**  
Direktur Utama  
President Director



**IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas.**

IFG is committed to bringing changes in the financial sector, especially in insurance, investment, and guarantees that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full integrity

## Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga sehingga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG), dapat melalui tahun 2020 dengan capaian yang cukup baik, di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Berbagai tantangan yang dihadapi Perusahaan di sepanjang tahun 2020, menjadi momentum tersendiri untuk meningkatkan komitmen bersama dalam memperkuat eksistensi IFG ke depan.

Bersama dengan ini, Izinkan kami mewakili manajemen IFG untuk menyampaikan jalannya kepengurusan Perusahaan selama tahun 2020, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada para Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya. Laporan Direksi ini akan menyajikan analisis atas kinerja Perusahaan, analisis tentang prospek usaha, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, dan informasi terkait perubahan komposisi Direksi di tahun 2020.

## Analisa Makro Ekonomi dan Segmen Industri

Merebaknya pandemi Virus COVID-19 sejak Maret 2020 memberikan dampak yang sangat signifikan bagi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah guna menanggulangi pandemi yang terjadi mulai menimbulkan dampak perekonomian di dalam negeri. Berbeda dengan krisis yang pernah dialami, krisis yang terjadi akibat pandemi

## Dear Shareholders and Stakeholders,

Praise and gratitude we pray to God Almighty, for HIS grace and gifts given which has enabled PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or Indonesia Financial Group (IFG), to go through 2020 with a fairly good achievement, in the midst of economic pressure due to COVID-19 pandemic. The various challenges faced by the Company throughout 2020 became its own momentum to increase mutual commitment in strengthening the existence of IFG in the future.

With this report, allow us, as the representation of the IFG management, to convey the course of the Company's management during 2020, as a form of our accountability to the Shareholders and all other Stakeholders. This Board of Directors' report will present an analysis of the Company's performance, an analysis of business prospects, developments in the implementation of corporate governance, and all information related to changes in the composition of the Board of Directors in 2020.

## Macroeconomic Analysis and Industrial Segment

The outbreak of the COVID-19 pandemic since March 2020 has had a very significant impact on almost every countries in the world, including Indonesia. Various policies taken by the Government to cope with the pandemic have began to show impacts on the domestic economy. Unlike the crisis that has been experienced, the crisis that occurred due to the pandemic is a new thing for Indonesia and the



merupakan hal baru bagi Indonesia dan Pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai COVID-19 yang kemudian ikut memberi dampak terhadap penurunan ekonomi nasional.

Realisasi belanja Negara (APBN) kuartal IV tahun 2020 mencapai Rp732,74 triliun, naik dibanding realisasi kuartal IV tahun 2019 yang hanya Rp704,22 triliun. Sedangkan realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM (PMA dan PMDN) selama kuartal 4 tahun 2020 sebesar Rp214,7 triliun, atau naik sebesar 2,7% (qtq) dan naik 3,1% (oy).

Sementara itu, sepanjang tahun 2020, pasar modal kerap dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam kondisi Pandemi COVID-19. Kendati demikian, regulator pasar modal mampu beradaptasi secara dinamis dan terus berupaya menjawab kebutuhan pasar, serta kembali mencatatkan sejumlah pencapaian yang mendukung kemajuan Pasar Modal Indonesia. Seperti dikutip dari siaran pers Bursa Efek Indonesia dengan No. PR No. 114/BEI.SPR/12-2020, di tengah Pandemi COVID-19, minat perusahaan untuk masuk ke pasar modal tidak surut. Hingga 30 Desember 2020, telah terdapat 51 perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga, sampai dengan saat ini terdapat 713 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI. Indonesia pun masih menjadi Bursa dengan jumlah IPO terbanyak di ASEAN.

Aktivitas perdagangan BEI pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang tercermin dari kenaikan rata-rata frekuensi perdagangan yang tumbuh 32% menjadi 619 ribu kali per hari di bulan November 2020 dan menjadikan likuiditas perdagangan saham BEI lebih tinggi di antara Bursa-bursa lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pada periode yang sama, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) berangsur-angsur pulih dan mencapai nilai Rp9,18 triliun.

Government was forced to issue a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy to break the COVID-19 average rate which then contributed to the decline in the national economy.

Meanwhile, the realization of investment recorded at Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) (Foreign Investment/PMA and Domestic Investment/PMDN) during quarter IV of 2020 amounted to IDR 214.7 trillion, which was an increase of 2.7% (qtq) and an increase of 3.1% (oy).

Meanwhile, throughout 2020, the capital market was often faced with various challenges during the COVID-19 pandemic. However, the capital market regulator was still able to adapt dynamically and continuously strives to respond to market needs, and has again recorded a number of achievements which support the progress of the Indonesian Capital Market. As quoted from the press release of the Indonesia Stock Exchange No. 114/BEI.SPR/12-2020, in the midst of the COVID-19 Pandemic, companies' interest in entering the capital market did not subside. As of December 30, 2020, there have been 51 companies that have conducted Initial Public Offerings (IPOs) and listed shares in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Thus, until now, there are 713 companies that have listed their shares on the IDX, making Indonesia having a stock exchange with the highest number of IPOs in ASEAN.

IDX trading activity in 2020 also increased, as reflected in the increase in the average trading frequency which grew by 32% to 619 thousand times per day in November 2020 and made IDX stock trading liquidity higher among other exchanges in the Southeast Asia region. In the same period, the Average Daily Transaction Value (RNTH) gradually recovered and reached a value of IDR 9.18 trillion.



Di sisi lain, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan industri asuransi jiwa mencatat adanya tren peningkatan kinerja di Kuartal IV Tahun 2020, yaitu peningkatan pada Pendapatan, Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Pembayaran Klaim dan Manfaat kepada nasabah. Peningkatan kinerja pada Kuartal IV tahun 2020 didorong oleh membaiknya ekonomi makro, peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan asuransi jiwa, mulai adanya sosialisasi vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah dan dampak atas strategi industri asuransi jiwa sepanjang tahun 2020. Data perbandingan Kuartal IV Tahun 2019 dan Kuartal IV tahun 2020 masih menunjukkan sedikit perlambatan di beberapa kategori, seperti Total Pendapatan, dan Total Klaim akibat pandemi COVID-19, namun AAJI optimis akan perkembangan industri asuransi jiwa.

Data AAJI menunjukkan peningkatan pendapatan dari Kuartal III Tahun 2020 ke Kuartal IV Tahun 2020 sebesar 81,7%, dari Rp50,56 triliun di Kuartal III Tahun 2020, menjadi Rp91,86 triliun di Kuartal IV Tahun 2020. Perbaikan lain terlihat pada investasi, di mana jika dibandingkan dengan Kuartal III Tahun 2020, selama Kuartal IV tahun 2020 AAJI mencatatkan Hasil Investasi sebesar Rp35,52 triliun.

Namun, meskipun pendapatan industri asuransi jiwa dari Kuartal III Tahun 2020 ke Kuartal IV Tahun 2020 meningkat, jika Kuartal IV Tahun 2020 dibandingkan dengan Kuartal IV Tahun 2019, tercatat perlambatan Total Pendapatan sebesar 8,6% di mana Kuartal IV Tahun 2019 tercatat sebesar Rp235,80 triliun dan di Kuartal IV Tahun 2020 tercatat Rp215,42 triliun. Sedangkan untuk Hasil Investasi, sebesar Rp17,95 pada Kuartal IV Tahun 2020 tercatat melambat dibandingkan Rp23,53 triliun pada Kuartal IV Tahun 2019 yang disebabkan oleh kondisi pasar modal di Indonesia yang kurang kondusif hingga Q4 2020, ditandai dengan adanya koreksi yang cukup dalam dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yaitu sebesar 5,1% dibandingkan Q4 2019.

Sementara itu, kinerja asuransi umum melemah pada 2020, hal tersebut selaras dengan lini bisnis utama yang belum pulih. Industri asuransi umum mengalami penurunan perolehan premi dan kenaikan klaim sepanjang 2020. Lini bisnis asuransi kendaraan bermotor masih mengalami penurunan kinerja, sehingga porsi preminya disalip oleh asuransi kredit. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) per 2020, perolehan premi industri tercatat sebesar Rp76,8 triliun. Nilainya

On the other hand, the Indonesian Life Insurance Association (AAJI) stated that the life insurance industry recorded a trend of improving performance in the fourth quarter of 2020, namely an increase in revenue, premium income, investment returns and payment of claims and benefits to customers. Improved performance in the fourth quarter of 2020 was driven by improved macroeconomics, increased public awareness of the need for life insurance protection, the socialization of COVID-19 vaccination by the government and the impact on the life insurance industry strategy throughout 2020. Comparative data for the fourth quarter of 2019 and the fourth quarter of 2020 still shows a slight slowdown in several categories, such as in Total Revenue, and Total Claims, which was due to the COVID-19 pandemic. However, AAJI is still optimistic about the development of the life insurance industry.

AAJI data shows an increase in revenue from the third quarter of 2020 to the fourth quarter of 2020 by 81.7%, from IDR 50.56 trillion in the third quarter of 2020 to IDR 91.86 trillion in the fourth quarter of 2020. Another improvement is seen in investment, in which when compared to the third quarter of 2020, during the fourth quarter of 2020, AAJI recorded an investment return of IDR 35.52 trillion.

However, even though the life insurance industry's income from the third quarter of 2020 to the fourth quarter of 2020 increased, when comparing the fourth quarter of 2020 to the fourth quarter of 2019, there was a slowdown in total revenue of 8.6%, in which in the fourth quarter of 2019, it was recorded at IDR 235.80 trillion and in the fourth quarter of 2020, it was recorded at IDR 215.42 trillion. As for Investment Returns, which amounted to IDR 17.95 in the fourth quarter of 2020, it was recorded to slow down when compared to IDR 23.53 trillion in the fourth quarter of 2019. This was due to the unfavorable condition of the capital market in Indonesia until Q4 2020, which was marked by a fairly deep correction in the Jakarta Composite Index (JCI) of 5.1% when compared to Q4 2019.

Meanwhile, the performance of general insurance weakened in 2020; this is in line with the main business lines that have not yet recovered. The general insurance industry experienced a decline in premium income and an increase in claims throughout 2020. The motor vehicle insurance business was still experiencing a decline in performance, so that the premium portion was overtaken by credit insurance. Based on data from the Indonesian General Insurance Association (AAUI)



menurun 3,6% (year-on-year/yoY) dari sebelumnya senilai Rp79,8 triliun. Perolehan premi terbesar masih berasal dari lini bisnis utama asuransi kerugian, yakni asuransi properti. Sepanjang 2020, Lini bisnis ini memperoleh premi Rp21,03 triliun atau tumbuh tipis 0,8% (yoY) dari sebelumnya Rp20,8 triliun.

Adapun, sepanjang 2020, industri asuransi kerugian membayarkan klaim Rp36,1 triliun. Nilainya turun 3,3% (yoY) dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp37,3 triliun. Pembayaran klaim terbesar berasal dari asuransi kredit senilai Rp10,7 triliun atau mencapai 48,5% dari total klaim industri. Pembayaran itu melebihi total klaim dua lini bisnis utama asuransi umum, yakni properti senilai Rp6,9 triliun (19%) dan kendaraan bermotor senilai Rp7,01 triliun (19,4%).

## Kebijakan Strategis Perusahaan di Tahun 2020

Tahun 2020 menjadi momentum besar bagi Perusahaan. Penunjukkan Indonesia Financial Group atau IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, mendasari Perusahaan untuk mengambil strategi inisiatif.

Berdasarkan penunjukkan tersebut, Perusahaan mengambil langkah untuk memperkuat fondasinya sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan dengan melakukan beberapa strategi inisiatif seperti:

1. Menyelesaikan pembentukan organisasi *Holding* beserta tanggungjawabnya (manajemen risiko, dan lain-lain.) untuk memastikan operasional yang *prudent*;
2. Menyelaraskan area fokus bisnis Anak Perusahaan, termasuk penetapan aturan pelibatan (*rule of engagements*); dan
3. Finalisasi strategi produk dan desain ekosistem, khususnya untuk Asuransi Kendaraan bermotor dan Properti.

as of 2020, the acquisition of industrial premiums was recorded at IDR 76.8 trillion. Its value decreased by 3.6% (year-on-year/yoY) from the previous number of IDR 79.8 trillion. The largest premium income still came from the main line of loss insurance business, namely property insurance. Throughout 2020, this line of business received a premium of IDR 21.03 trillion or grew slightly by 0.8% (yoY) from the previous number of IDR 20.8 trillion.

Meanwhile, throughout 2020, the loss insurance industry paid claims of IDR 36.1 trillion. Its value decreased by 3.3% (yoY) from the same period last year of IDR 37.3 trillion. The largest claim payments came from credit insurance worth IDR 10.7 trillion or 48.5% of the industry's total claims. This payment exceeds the total claims of the two main general insurance business lines, namely property insurance which was worth IDR 6.9 trillion (19.1%) and motor vehicles insurance which was worth IDR 7.01 trillion (19.4%).

## Company Strategic Policy in 2020

The year 2020 offered a big momentum for the Company. The appointment of Indonesia Financial Group or IFG as the SOE Holding Insurance and Guarantee based on Government Regulation no. 20 dated March 17, 2020 regarding the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), underlies the Company to take an initiative strategy.

Based on this appointment, the Company took steps to strengthen its foundation as a SOE Holding Insurance and Guarantee by conducting several strategic initiatives such as:

1. Completing the establishment of the Holding organization and its responsibilities (risk management, etc.) to ensure prudent operations;
2. Aligning the business focus areas of the Subsidiaries, including establishing the rules of engagements; and
3. Finalization of product strategy and ecosystem design, especially for Motor Vehicle and Property Insurance.



Dengan menjadi BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, Perusahaan juga melakukan transformasi *brand* menjadi Indonesia Financial Group (IFG). IFG merupakan *holding* yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, Asuransi dan penjaminan.

IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, saat ini Perusahaan memiliki 10 (sepuluh) anak perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan operasional, yakni terdiri dari 5 (lima) anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan dan 5 (lima) anak perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan investasi.

## Kendala dan Solusi Penanganannya

Kondisi perekonomian mengalami tantangan yang cukup menantang seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Maraknya penyebaran virus yang terjadi di seluruh negara, khususnya Indonesia ini menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Beberapa kendala yang dihadapi oleh IFG di tahun 2020 antara lain; kegiatan usaha terbatas karena PSBB atau pembatasan *social berskala besar*. Sementara itu, daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi negatif, dan kondisi *market* yang tidak stabil juga menjadi tantangan tersendiri. Proses bisnis yang berubah menjadi digital selaras dengan penerapan protokol COVID-19 (*Social Distancing*, tanpa tatap muka) membuat Perusahaan harus beradaptasi secara tepat dan cepat.

Untuk mengatasi hal tersebut, Perusahaan menerapkan sejumlah strategi di tahun 2020, meliputi; penyesuaian proses operasional dengan melakukan strategi penjualan dengan tidak bertatap muka serta peningkatan sistem telemarketing, optimalisasi bisnis secara digital, penguatan *underwriting policy*, meningkatkan kapabilitas dan kompetensi *sales*, hingga memaksimalkan *e-learning* dalam rangka menggapai kinerja unggul yang berkelanjutan.

By becoming a SOE Holding Insurance and Guarantee, the Company is also transforming its brand into the Indonesia Financial Group (IFG). IFG is a holding established to perform a role in national development through the development of a complete and innovative financial industry through investment, Insurance and guarantee services.

IFG is committed to bringing changes in the financial sector, especially in provision of insurance, investment, and guarantees that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full integrity. As a SOE Holding Insurance and Guarantee, currently the Company has 10 (ten) subsidiaries that are still actively conducting operational activities, which consist of 5 (five) subsidiaries engaged in insurance and guarantee and 5 (five) subsidiaries engaged in capital market and investment sector.

## Obstacles and Solutions

The Indonesian economic conditions have faced massive challenges along with the COVID-19 pandemic since March 2020. The widespread transmission of the virus that has occurred in all countries, especially Indonesia has hampered Indonesia's economic growth in general. Some of the obstacles faced by IFG in 2020 include limited business activities due to PSBB or large-scale social restrictions. Meanwhile, declining purchasing power, negative economic growth, and unstable market conditions also become challenges. Business processes that have turned digital in line with the implementation of the COVID-19 protocol (Social Distancing, without face-to-face) have forced the Company to adapt appropriately and rapidly.

To overcome this, the Company implemented a number of strategies in 2020, including adjustment of operational processes by implementing non-face-to-face sales strategies as well as improving the telemarketing system, optimizing digital business, strengthening underwriting policies, increasing sales capabilities and competencies, and maximizing e-learning in order to achieve sustainable superior performance.



Perusahaan juga telah melakukan transformasi *brand* dan logo menjadi Indonesia Financial Group (IFG). Selanjutnya, pada bulan Desember 2020, pemerintah bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Penanaman Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Pendirian IFG Life sebagai bagian dari Anggota *Holding* IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun. IFG mendukung prioritas BUMN dalam mempercepat pembangunan nasional dan berkomitmen untuk memenuhi mandatnya dengan kepatuhan penuh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar terciptanya pengelolaan perusahaan yang *prudent* dan *accountable*.

Secara umum, inisiatif strategis yang disusun Perusahaan di tahun 2020 senantiasa mengedepankan prinsip *financial sustainability*, sehingga dapat mengatasi tantangan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19, diharapkan ke depannya Perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan.

## Kinerja Tahun 2020 dan Perbandingannya terhadap Target

Terlepas dari berbagai tantangan dan kekhawatiran terkait pandemi COVID-19, Perusahaan berhasil membukukan kinerja yang optimal dan tetap sehat. Dalam penetapan RKAP, IFG senantiasa memperkuat fondasi bisnis melalui kebijakan strategis yang tepat sasaran. Di tahun 2020, IFG merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan, sebagai berikut:

- **Aset**

Per 31 Desember 2020, Perusahaan membukukan Jumlah Aset sebesar Rp92,34 triliun yaitu 113,78% dari RKAP Perusahaan sebesar Rp81,16 triliun. Kinerja Aset tersebut terutama dipengaruhi oleh nilai investasi diatas RKAP 2020, sejalan dengan peningkatan kondisi market di akhir tahun 2020. Selain itu juga terkait dengan piutang jasa penjaminan dan piutang premi yang terealisasi diatas RKAP 2020 sejalan dengan meningkatnya volume penjaminan khususnya KUR dan PEN di anak perusahaan.

- **Utang**

Per 31 Desember 2020, Perusahaan membukukan jumlah utang sebesar Rp54,82 triliun yaitu 150,84% dari RKAP Perusahaan

The Company has also transformed its brand and logo into the Indonesia Financial Group (IFG). Furthermore, in December 2020, the Government, together with Commission VI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, approved the State Equity Participation (PMN) to IFG to establish PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). The establishment of IFG Life as part of the IFG Holding Member has become IFG's business map for its business portfolio in the life insurance, health and pension fund sectors. IFG supports the priority of SOEs in accelerating national development and is committed to fulfilling its mandate with full compliance towards the principles of good corporate governance in order to create prudent and accountable corporate management.

In general, the strategic initiatives prepared by the Company in 2020 always prioritized the principle of financial sustainability, so that they can overcome the economic challenges affected by the COVID-19 pandemic, it is expected that in the future the Company can grow sustainably.

## 2020 Performance and Comparison to the Target

Despite the various challenges and concerns related to the COVID-19 pandemic, the Company managed to record optimal performance and remain healthy. In determining the Company Work Plan and Budget (RKAP), IFG continues to strengthen the business foundation through strategic policies that are on target. In 2020, IFG has planned to acquire several substantial components as a benchmark in assessing the Company's performance, as follows:

- **Assets**

As of December 31, 2020, the Company recorded Total Assets of IDR 92.34 trillion, which is 113.78% of the Company's RKAP of IDR 81.16 trillion. The performance of these assets was mainly influenced by the investment value which was above the 2020 RKAP, which was in line with improving market conditions at the end of 2020. In addition, it is also related to guarantee service receivables and premium receivables that are realized above the 2020 RKAP. This was in line with the increasing volume of guarantees, especially the volume of KUR and PEN in subsidiaries.

- **Liabilities**

As of December 31, 2020, the Company recorded a Total Liabilities of IDR 54.82 trillion, which was 150.84% of the Company's RKAP of IDR 36.35



sebesar Rp36,35 triliun. Realisasi utang tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan sejalan dengan peningkatan produksi dan *outstanding* penjaminan serta asumsi yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya klaim di masa yang akan datang.

- **Ekuitas**

Per 31 Desember 2020, Perusahaan membukukan Jumlah Ekuitas sebesar Rp37,70 triliun yaitu 84,14% dari RKAP Perusahaan sebesar Rp44,81 triliun. Kinerja ekuitas tersebut terutama dipengaruhi oleh selisih antara nilai aset bersih dengan nilai modal disetor pemerintah, dari 4 anak perusahaan asuransi penjaminan (Jasa Raharja, Jamkrindo, Askrindo dan Jasindo) yang menjadi bagian dari Perusahaan per 31 Maret 2020 dengan nilai net tambahan modal disetor sebesar minus Rp32,99 triliun.

- **Laba Bersih Tahun Berjalan**

Per 31 Desember 2020, laba bersih tahun berjalan tercatat sebesar Rp2,20 triliun yaitu 121,12% dari RKAP Perusahaan sebesar Rp1,82 triliun. Kinerja laba bersih tahun berjalan tersebut terutama dipengaruhi oleh pendapatan *underwriting* yang tercapai diatas RKAP 2020 terkait dengan peningkatan volume imbal jasa penjaminan serta pendapatan premi pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) pada anak perusahaan sepanjang 2020.

Perbandingan antara target dan pencapaian tersebut menjadi salah satu gambaran yang dipertimbangkan dalam penyusunan target dan strategi bisnis ke depan. Didukung oleh kapasitas serta prospek yang dimiliki, Perusahaan optimis untuk dapat meraih kinerja unggul secara berkelanjutan di masa mendatang.

## Analisa Terkait Prospek usaha 2021

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan sangat bergantung pada penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona yang telah menekan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemulihan ekonomi melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan UMKM, pemberian insentif pajak kepada korporasi serta realisasi dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi katalis kunci bagi *outlook* ekonomi Indonesia di 2021.

trillion. The realization of this liabilities was mainly affected by the realization of insurance and guarantee contract liabilities, which was in line with the increase in the production and outstanding guarantees as well as the assumptions used to anticipate the occurrence of claims in the future.

- **Equity**

As of December 31, 2020, the Company recorded a Total Equity of IDR 37.70 trillion, which was 84.14% of the Company's RKAP of IDR 44.81 trillion. The performance of the equity was mainly influenced by the difference between the net asset value and the government's paid-in capital value of the 4 guarantee insurance subsidiaries (Jasa Raharja, Jamkrindo, Askrindo, and Jasindo) which were part of the Company, as of March 31, 2020 with a net value of additional paid-in capital of minus IDR 32.99 trillion

- **Net Profit for the Year**

As of December 31, 2020, the net profit for the year was recorded at IDR 2.20 trillion, which was 121.12% of the Company's RKAP of IDR 1.82 trillion. The performance of the net profit for the year was mainly influenced by the underwriting income which achieved above the 2020 RKAP. This was related to the increase in the volume of guarantee fees and premium income on People's Business Credit (KUR) and National Economic Recovery (PEN) in subsidiaries throughout 2020.

The comparison between the targets and achievements is one of the aspects considered in the preparation of future business targets and strategies. Supported by its capacity and prospects, the Company is optimistic that it will be able to achieve sustainable superior performance in the future.

## Analysis on 2021 Business Prospects

The Indonesia's economy in 2021 is estimated to be very dependent on the government's handling of the corona virus pandemic which has suppressed the Indonesia economy throughout 2020. In addition, the government is committed to continuing to encourage economic recovery through the provision of social assistance to the community and MSMEs, the provision of tax incentives to corporations and the realization of the National Economic Recovery (PEN) budget to become a key catalyst for Indonesia's economic outlook in 2021.



Berdasarkan sisi pengeluaran pemerintah, naiknya anggaran untuk sektor infrastruktur dan peningkatan stimulus untuk UMKM dan korporasi besar ditengah pandemi diperkirakan akan mendukung perekonomian.

Sementara itu, walaupun inflasi masih terkendali selama 2020, diprediksi tingkat inflasi akan naik di kisaran 3,0% pada tahun 2021 sejalan dengan meningkatnya tekanan harga dari sisi permintaan (*demand-side*) maupun penawaran (*supply-side*). Dari sisi permintaan, pola konsumsi masyarakat perlahan akan meningkat seiring dengan kembalinya aktivitas perekonomian yang dapat mendorong pendapatan dan daya beli masyarakat paska pandemi COVID-19. Dari sisi penawaran, diperkirakan akan terjadi peningkatan inflasi sebagai dampak dari kebijakan monetisasi hutang Bank Indonesia (BI) di tahun 2020, yang sejauh ini sudah mendorong pertumbuhan uang beredar (*money supply M2 growth*) dengan cukup pesat. Kebijakan pemerintah dan BI yang menetapkan BI untuk tetap menjadi *stand by buyer* atas surat hutang pemerintah di tahun 2021 juga menimbulkan risiko terhadap melonjaknya tingkat inflasi ke depan.

Pemulihan ekonomi diharapkan dapat mengembalikan *risk-appetite investor*, baik domestik maupun asing, terhadap aset di Indonesia dan kemudian mendorong nilai tukar Rupiah hingga mencapai level Rp14.600/USD, atau lebih kuat dari level sekarang yaitu Rp14.700/USD. Surplus pada neraca perdagangan (*trade balance*), neraca transaksi berjalan (*current-account balance*), dan neraca pembayaran (*balance of payments*) sangat mungkin tetap berlanjut dan akan meningkatkan devisa dalam negeri dan memberikan kestabilan bagi nilai tukar rupiah.

## **Sasaran dan Strategi Perusahaan terkait Prospek Usaha di Tahun 2021**

Di tahun 2020, Perusahaan ditunjuk sebagai *Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Penambahan modal tersebut telah dilakukan, sehingga Perusahaan saat ini memiliki 10 (sepuluh) Anak Perusahaan yang terdiri dari Anak Perusahaan bidang asuransi dan penjaminan; dan Anak Perusahaan bidang Keuangan dan Pasar Modal serta 1 (satu) Anak Perusahaan dormant.

From the government's side on expenditure, the increase in the budget for infrastructure sector and increased stimulus for SMEs and large corporations amid the pandemic are expected to support the economy.

Meanwhile, although inflation is still under control during 2020, it is predicted that the inflation rate will rise in the range of 3.0% in 2021; this is in line with the pressures of increasing price from both the demand and supply. In terms of demand, public consumption patterns will slowly increase in line with the return of economic activity that can boost people's income and purchasing power after the COVID-19 pandemic. Meanwhile, in relations with supply, it is estimated that there will be an increase in inflation as a result of Bank Indonesia's (BI) debt monetization policy in 2020, which has so far driven the money supply (M2) growth quite rapidly. The government's and BI's policies that establish BI to remain the stand-by buyer for government debt securities in 2021 also pose a risk of soaring inflation rates in the future.

The economic recovery is expected to restore both domestic and foreign risk-appetite investors to assets in Indonesia and then promote the Rupiah exchange rate to reach the level of Rp. 14,600/USD, or stronger than the current level of Rp. 14,700/USD. Surpluses in the trade balance, current-account balance and balance of payments are very likely to continue and will increase domestic foreign exchange and provide stability to the Rupiah exchange rate.

## **Company Goals and Strategies related to Business Prospects in 2021**

In 2020, the Company was appointed as a SOE Holding Insurance and Guarantee in accordance with Government Regulation No. 20 dated March 17, 2020 regarding the addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The capital increase has been made, so that the Company currently has 10 (ten) Subsidiaries consisting of Subsidiaries in the insurance and guarantee sector; and Subsidiaries in Finance and Capital Markets as well as 1 (one) dormant Subsidiary.



Anak Perusahaan di bidang asuransi dan penjaminan yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sementara anak Perusahaan di bidang keuangan dan pasar modal yaitu PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), PT Bahana Mitra Investa (BMI) dan PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). Pada tahun 2020, Perusahaan juga telah mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG untuk melengkapi portofolio layanan asuransi dan penjaminan serta mempertimbangkan peluang bisnis di asuransi jiwa dan kesehatan.

Dengan menjadi BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, Perusahaan yang telah melakukan transformasi *brand* menjadi Indonesia Financial Group (IFG), berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu tonggak utama penggerak industri finansial di Indonesia, IFG berfungsi penting dalam menopang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional. Mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan antar BUMN, IFG bertujuan untuk melakukan transformasi menuju ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2021 ini, secara umum IFG Group ingin bertumbuh secara signifikan dengan fokus pada beberapa program kerja utama salah satunya adalah dengan memperkuat sinergi antar anak Perusahaan dalam memanfaatkan setiap peluang usaha.

## Penerapan Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2020

Melalui peran aktif seluruh Insan IFG serta dengan penerapan GCG yang tepat dan sesuai dengan standar *best practice* yang berlaku, Perusahaan berupaya mengoptimalkan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar sebagaimana telah

Subsidiaries in the insurance and guarantee sector are PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Meanwhile, the subsidiaries in finance and capital market are PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), PT Bahana Mitra Investa (BMI) and PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). In 2020, the Company has also established PT Asuransi Jiwa IFG to complete its portfolio of insurance and guarantee services and consider business opportunities in life and health insurances

By becoming a SOE Holding Insurance and Guarantee, the Company which has transformed its brand into the Indonesia Financial Group (IFG), is committed to bringing changes in the financial sector, especially in insurance, investment, and guarantees that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full of integrity. The collaborative spirit with transparent corporate governance is the foundation for IFG to become a leading, trusted, and integrated provider of insurance, guarantee, investment services. IFG is the future of the financial industry in Indonesia. It's time to move forward with IFG as a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem.

As one of the main pillars of driving the financial industry in Indonesia, IFG has an important function in supporting the national economy, increasing national financial stability and inclusion. Prioritizing synergies and collaboration with the government and between SOEs, IFG aims to transform towards an inclusive and sustainable ecosystem. In 2021, in general, IFG Group wants to grow significantly by focusing on several main work programs, one of which is strengthening the synergy between subsidiaries in taking advantage of every business opportunity.

## Implementation of Good Corporate Governance in 2020

Through the active role of all IFG Personnel, as well as the proper implementation of GCG and in accordance with applicable best practice standards, the Company seeks to optimize the implementation of GCG principles within the Company by referring to the 5 (five) basic principles as released in the



dirilis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (kewajaran).

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga *Holding Asuransi* dan Penjaminan, IFG berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan mengacu pada tujuan penerapan GCG BUMN yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat dan handal, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Tujuan penerapan GCG di lingkungan BUMN tersebut selaras dengan penerapan GCG di lingkup Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga terus berupaya untuk memenuhi tujuan GCG yang dideklarasikan oleh otoritas/regulator, di mana penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat mendorong korporasi di Indonesia agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN.

General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness.

As part of a State-Owned Enterprises (BUMN) which is also an Insurance and Guarantee Holding Company, IFG is committed to implementing GCG principles consistently by referring to the objectives of implementing GCG in SOEs as stated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as amended by Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012, namely:

1. Optimizing the value of the Company so that the Company possesses strong and reliable competitiveness, both nationally and internationally therefore it is able to maintain its existence and live sustainably to achieve the Company's goals and objectives;
2. Encouraging professional, effective and efficient Company management, as well as empowering functions and increasing the independence of Company organs;
3. Encouraging Company organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the existence of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increasing the Company's contribution to the national economy;
5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

The purpose of implementing GCG in the SOEs is in line with the implementation of GCG within the Company which aims to improve the achievement of business results and provide added value for Shareholders and other Stakeholders in order to realize the vision and mission of the Company. In addition, the Company also continues to strive in fulfilling the GCG objectives declared by the authorities/regulators, in which the implementation of GCG principles is expected to encourage corporations in Indonesia to compete with companies in the ASEAN region.



Di tahun 2020, IFG melaksanakan assessment GCG yang dilakukan secara independen oleh PT RSM Indonesia Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 001/PU-SPK/BPUI/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 antara IFG dengan RSM Indonesia. Assessment GCG ini dilakukan dari tanggal 8 Maret hingga 20 April 2021. Laporan hasil assessment penerapan GCG tahun 2020 telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 20 April 2021.

Hasil assessment penerapan GCG Perusahaan periode tahun 2020 mencapai total skor 80,15 dari total bobot sebesar 100,00 dengan klasifikasi "BAIK". Dari hasil assessment penerapan GCG untuk tahun buku 2020, terdapat 12 rekomendasi sebagai *Area of Improvement (Aoi)*, yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya. IFG senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis. Dengan demikian, melalui penerapan prinsip GCG di lingkungan IFG diharapkan tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik dan benar serta mampu melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya pemegang saham.

## Perubahan Komposisi Direksi

Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Di sepanjang tahun 2020 terdapat perubahan komposisi Direksi dengan kronologi sebagai berikut:

**Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2020**  
Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors throughout 2020

Periode 1 Januari-11 Februari 2020 January to February 11, 2020 Period	Periode 11 Februari-31 Desember 2020 February 11 to February 31, 2020 Period	Keterangan Description
Marciano H. Herman (Direktur Utama) (President Director)		Marciano H. Herman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 11 Februari 2020 Marciano H. Herman has not served as President Director since February 11, 2020
	Robertus Billitea (Direktur Utama) (President Director)	Robertus Billitea mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak 11 Februari 2020 Robertus Billitea has been serving as President Director since February 11, 2020
Dwijanti Tjahjaningsih (Direktur) (Director)		Dwijanti Tjahjaningsih tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 11 Februari 2020 Dwijanti Tjahjaningsih has not served as Director since February 11, 2020

### Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2020

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors throughout 2020

<b>Periode 1 Januari-11 Februari 2020</b> January to February 11, 2020 Period	<b>Periode 11 Februari-31 Desember 2020</b> February 11 to February 31, 2020 Period	<b>Keterangan</b> Description
	Rizal Ariansyah (Direktur Keuangan dan Umum) (Director of Finance and General Affairs)	Rizal Ariansyah mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum sejak 11 Februari 2020 Rizal Ariansyah has been serving as Director of Finance and General Affairs since February 11, 2020
	Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) (Director of Business)	Pantro Pander Silitonga mulai menjabat sebagai Direktur Bisnis sejak 11 Februari 2020 Pantro Pander Silitonga has been serving as Director of Business since 11 February 2020

### Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2020

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan</b> Position	<b>Masa Jabatan</b> Term of Office	<b>Periode</b> <b>Jabatan</b> Position Period	<b>Dasar Pengangkatan</b> Basis of Appointment
Robertus Billitea	Direktur Utama President Director	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Utama sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as President Director since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of IFG No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020
Rizal Ariansyah	Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as Director of Finance and General Affairs since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of IFG No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020
Pantro Pander Silitonga	Direktur Bisnis Director of Business	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1st	Diangkat sebagai Direktur Bisnis sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as Director of Business since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020

Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap dedikasi Direksi dalam mengembangkan IFG untuk lebih maju lagi. Direksi senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

We appreciate the Company's policy which has put faith in the dedication of the Board of Directors in developing IFG to be even more advanced. The Board of Directors is always committed to conducting this mandate by prioritizing the principles of good corporate governance for the benefit of the Shareholders and other Stakeholders.



## Penutup

Atas pencapaian yang dicatatkan di tahun 2020, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, Insan Perusahaan, regulator, pelanggan dan nasabah, pemasok, hingga mitra usaha, atas kerja sama yang telah tercipta. Selaras dengan terbentuknya *Holding Asuransi dan Penjaminan*, kami berharap agar IFG dapat terus melangkah lebih agresif, dan senantiasa berinovasi dalam rangka berkontribusi ke level yang optimal. Semoga pencapaian ini akan menginspirasi seluruh pihak untuk dapat terus memaksimalkan kemampuannya dan menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat tumbuh di masa yang akan datang.

## Closing

For the achievements recorded in 2020, allow the Board of Directors to express respect and gratitude to the Board of Commissioners, shareholders, Company personnel, regulators, customers and consumers, suppliers, and business partners for their cooperation. In line with the establishment of the Insurance and Guarantee Holding, we hope that IFG can continue to develop more aggressively, and continue to innovate in order to contribute to an optimal level. Hopefully this achievement will inspire all parties to be able to continue to maximize their abilities and become the foundation for the Company to be able to grow in the future.

Jakarta, 13 Januari 2022  
Jakarta, January 13, 2022

Atas nama Direksi  
On behalf of the Board of Directors  
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

**Robertus Billitea**  
Direktur Utama  
President Director





1

### **Robertus Billitea**

Direktur Utama  
President Director

2

### **Rizal Ariansyah**

Direktur Keuangan dan Umum  
Director of Finance and General Affairs

3

### **Pantro Pander Silitonga**

Direktur Bisnis  
Director of Business

The background of the page features a photograph of a library. In the foreground, a person's hands are visible, holding a white book. Behind them are tall, dark wooden bookshelves filled with books. A red diagonal bar runs from the bottom left towards the center of the page.

# Profil Perusahaan

Company Profile

**IFG merupakan *holding* yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan.**

IFG is a holding established to perform a role in national development through the development of a complete and innovative financial industry through investment, insurance, and guarantee services.





## INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY



	<b>Nama Perusahaan</b> Company Name	<b>PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)</b>
	<b>Nama Holding</b> Holding Name	Indonesia Financial Group (IFG)
	<b>Bentuk Holding</b> Type of Holding	BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs
	<b>Bentuk dan Status Badan Usaha</b> Type and Status of Business Entity	Perseroan Terbatas (PT); Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT); State-Owned Enterprises (BUMN)
	<b>Tanggal dan Tahun Pendirian</b> Date and Year of Establishment	17 April 1973 April 17, 1973



 <b>Dasar Hukum Pendirian</b> Legal Basis of Establishment	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 tahun 1973, tanggal 13 April 1973, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional.</li> <li>Akta No. 11 tanggal 17 April 1973, yang dibuat di hadapan Mohamad Ali, S.H., Notaris, di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 1973 Tambahan No. 508.</li> <li>Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 18 of 1973, dated April 13, 1973, concerning the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company in the field of National Private Business Development.</li> <li>Deed No. 11 dated April 17, 1973, drawn up before Mohamad Ali, S.H., Notary, in Jakarta, and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia dated May 22, 1973 No. YA.5/191/20 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 1973</li> </ul>
 <b>Dasar Hukum Pembentukan Holding</b> Legal Basis of Holding Establishment	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional maksud dan tujuan dari IFG adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan holding di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.</li> <li>Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Limited Liability Company in the field of National Private Business Development. The purpose and objectives of IFG are to conduct activities as a holding company in the financial and investment fields as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including micro, small and medium enterprises, as well as optimizing the utilization of the Company's (Persero) resources based on the principles of good corporate governance.</li> <li>Government Regulation no. 20 of 2020 dated March 16, 2020 regarding the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, which originated from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.</li> </ul>
 <b>Bidang Usaha</b> Line of Business	: <p>Bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasihat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran.</p> <p>Insurance, guarantee, venture capital, securities, investment managers, investment advisors, financial consultants and management consultants, as well as other financial services businesses, including the business of managing office buildings.</p>
 <b>Kepemilikan Saham</b> Share Ownership	: <p>100% Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (Akta No. 7 Tanggal 6 April 2020)</p> <p>100% Owned by the Republic of Indonesia (Deed No. 7 Dated April 6, 2020)</p>
<b>Modal Dasar</b> Authorized Capital	: <p>Rp240.000.000.000.000</p> <p>IDR240.000.000.000.000</p>



	<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> Issued and Fully-Paid Capital	: Rp67.163.537.000.000 IDR67.163.537.000.000
	<b>Jumlah Karyawan</b> Number of Employees	: 77 (orang) per 31 Desember 2020 77 (people) as of December 31, 2020
	<b>Alamat</b> Address	: Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru South Jakarta, DKI Jakarta 12190
	<b>Telepon</b> Telephone Number	: (+62 21) 2505080
	<b>Surel</b> E-mail Address	: cs@ifg.id
	<b>Website Perusahaan</b> Company Website	: www.ifg.id
	<b>Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi</b> Business Network and Operation Area	: Seluruh wilayah di Indonesia All regions in Indonesia
	<b>Kelompok Usaha</b> Business Group	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak Perusahaan Bidang Asuransi dan Penjaminan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>» PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)</li> <li>» PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)</li> <li>» PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)</li> <li>» PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)</li> <li>» PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)</li> </ul> </li> <li>• Anak Perusahaan Bidang Keuangan dan Pasar Modal:               <ul style="list-style-type: none"> <li>» PT Bahana Sekuritas (BS)</li> <li>» PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)</li> <li>» PT Bahana Artha Ventura (BAV)</li> <li>» PT Bahana Kapital Investa (BKI)</li> </ul> </li> <li>• Anak Perusahaan Bidang Non Keuangan               <ul style="list-style-type: none"> <li>» PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)</li> </ul> </li> <li>• Subsidiaries in the field of Insurance and Guarantee:               <ul style="list-style-type: none"> <li>» PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)</li> <li>» PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)</li> <li>» PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)</li> <li>» PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)</li> <li>» PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)</li> </ul> </li> <li>• Subsidiaries in the field of Financial and Capital Market:               <ul style="list-style-type: none"> <li>» PT Bahana Sekuritas (BS)</li> <li>» PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)</li> <li>» PT Bahana Artha Ventura (BAV)</li> <li>» PT Bahana Kapital Investa (BKI)</li> </ul> </li> <li>• Subsidiaries in Non-financial field               <ul style="list-style-type: none"> <li>» PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)</li> </ul> </li> </ul>



## RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

### SEJARAH PENDIRIAN DAN SEKILAS PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("IFG") didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha mikro, kecil, dan menengah ("UMKM") di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja.

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan bisnis, IFG melebarkan bisnis layanan keuangannya di bidang investasi pasar modal, *investment banking* dan *securities trading* melalui PT Bahana Sekuritas, melakukan *joint venture* dengan *Trust Company of the West* dengan membentuk perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW *Investment Management*, layanan pendampingan dan pembiayaan UMKM melalui PT Bahana Artha Ventura, layanan *property management* melalui PT Grahaniaga Tatautama serta layanan penasihat investasi dan keuangan melalui PT Bahana Kapital Investa.

Pada tahun 2020, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya di bidang keuangan dan investasi, diperlukan perubahan maksud dan tujuan dari IFG. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, maksud dan tujuan dari IFG adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bawa untuk mencapai maksud dan tujuan, IFG melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu:

1. Aktivitas perusahaan *holding* termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain;

### HISTORY OF ESTABLISHMENT AND COMPANY DEVELOPMENT OVERVIEW

The limited liability company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("IFG") was established in 1973 with the aim of providing guidance to micro, small and medium enterprises ("MSMEs") in Indonesia through the provision of mentoring and working capital.

Along with business developments and needs, IFG expands its financial services business in the areas of capital market investment, investment banking and securities trading through PT Bahana Sekuritas, enters into a joint venture with the Trust Company of the West by establishing an investment management company PT Bahana TCW Investment Management, provides mentoring and financing services of MSMEs through PT Bahana Artha Ventura, provides property management services through PT Grahaniaga Tatautama as well as provides investment and financial advisory services through PT Bahana Kapital Investa.

In 2020, to support government policies in the development of the national economy, particularly in finance and investment, it is necessary to change the goals and objectives of IFG. In this regard, based on Article 2 of Government Regulation no. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No. 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company in the field of National Private Business Development, the goals and objectives of IFG are to conduct activities as a holding company in finance and investment as well as management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties including business micro, small, and medium enterprises, as well as optimizing the utilization of Company resources based on the principles of good corporate governance. To achieve its goals and objectives, IFG performs the main business activities, namely:

1. Conducts Holding company activities which include establishing or participating in other entities;

2. Aktivitas kantor pusat;
3. Investasi langsung maupun tidak langsung;
4. Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan
5. Aktivitas konsultasi manajemen.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, IFG dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selanjutnya, pada tahun yang sama, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia menetapkan IFG sebagai Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Holding Asuransi dan Penjaminan. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui surat No. S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notarial berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Dengan ditetapkannya IFG sebagai BUMN *holding* Asuransi dan Penjaminan, maka IFG resmi menjadi *holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo"), PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo"), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) dan PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") di samping anak-anak perusahaan yang telah ada sebelumnya.

Pada tahun yang sama dengan ditetapkannya IFG sebagai BUMN *holding* Asuransi dan Penjaminan, berdasarkan surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020, IFG melakukan transformasi *brand* dan logo menjadi Indonesia Financial Group ("IFG"). Selanjutnya, pada bulan Desember 2020, pemerintah bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Penanaman Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life"). Pendirian IFG Life sebagai bagian dari

2. Carries out Head office activities;
3. Conducts direct or indirect investment;
4. Performs company/asset restructuring activities; and
5. Carries out management consulting activities.

In addition to the main business activities, IFG may carry out other business activities in optimizing the utilization of its human resources.

Furthermore, in the same year, the government, through Government Regulation no. 20 of 2020, concerning the Addition of State Equity of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, stipulates IFG as a State-Owned Enterprise ("SOE" or "BUMN") Holding Insurance and Guarantee. After the issuance of the Government Regulation, the Ministry of SOEs, as the Company's General Meeting of Shareholders ("GMS") conducted a follow up by issuing a Decree of the Minister of BUMN through letter No. S-203/MBU/03/2020 regarding Approval of Acceptance of Transfer of Shares dated March 31, 2020, which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Statement of the Decision of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

With the stipulation of IFG as a Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs, IFG officially becomes the parent of PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo"), PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo"), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) and PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), in addition to the existing subsidiaries.

In the same year as the establishment of IFG as a Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs, based on the letter of the Ministry of BUMN No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020, IFG transformed its brand and logo into the Indonesia Financial Group ("IFG"). Furthermore, in December 2020, the government, in collaboration with Commission VI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, approved the State Equity Participation (PMN) to IFG to establish PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life"). The establishment of



Anggota *Holding* IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun. IFG mendukung prioritas BUMN dalam mempercepat pembangunan nasional dan berkomitmen untuk memenuhi mandatnya dengan kepatuhan penuh pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar terciptanya pengelolaan perusahaan yang *prudent* dan *accountable*.

## INFORMASI PERUBAHAN NAMA

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Perusahaan didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI dan tidak pernah melakukan pergantian nama. Namun, seiring dengan terbentuknya BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan berdasarkan PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, di mana IFG ditunjuk sebagai *holding* asuransi dan penjaminan, IFG melakukan transformasi *brand* sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan *Brand* dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

IFG Life as part of the IFG Holding Member becomes IFG's business map for its business portfolio in the life insurance, health and pension fund sectors. IFG supports the priority of SOEs in accelerating national development and is committed to fulfilling its mandate with full compliance with the principles of good corporate governance in order to create prudent and accountable corporate management.

## INFORMATION ON BRAND CHANGE

As previously described, the Company was founded in 1973 under the name PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or IFG and has never changed its brand. However, in line with the formation of Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs based on PP no. 20 of 2020 dated March 16, 2020, which IFG was appointed as the holding company of insurance and guarantee SOEs, IFG carried out a brand transformation, as stated in the Letter of the Ministry of SOEs No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Change of Brand and Logo of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to become Indonesia Financial Group (IFG).

## JEJAK LANGKAH

### MILESTONES

#### 1973

Indonesia Financial Group (IFG) didirikan pada tahun 1973 memiliki misi untuk membina pengusaha-pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (IFG) was established in 1973 with a mission to foster entrepreneurs of Micro, Small and Medium Enterprises.

#### 2004

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2004, IFG mengakuisisi PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan Gedung (*building management*). Subsequently, on December 23, 2004, IFG acquired PT Grahaniaga Tatautama (GNTU), a company engaged in building management.

#### 1993

Pada tahun 1993 IFG melakukan pengembangan usaha di bidang pasar modal, di mana kemudian IFG membentuk anak-anak perusahaan di bidang modal ventura dan pembinaan usaha kecil dan menengah (PT Bahana Artha Ventura), di bidang pasar modal dan pasar uang (PT Bahana Securities), dan di bidang manajemen investasi (PT Bahana TCW Investment Management).

In 1993, IFG conducted business development in the capital market sector, in which later IFG established subsidiaries in the field of venture capital and small and medium business development (PT Bahana Artha Ventura), in the capital market and money market (PT Bahana Securities), and in the field of investment management (PT Bahana TCW Investment Management).

#### 2018

Pada bulan Juni 2018, IFG melakukan aktivasi PT Bahana Kapital Investa (BKI) sebagai salah satu anak usaha yang bergerak di bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*).

In June 2018, IFG activated PT Bahana Kapital Investa (BKI) as a subsidiary engaged in investment and financial advisory services.

#### 2020

- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional merupakan landasan hukum penunjukan IFG sebagai *holding* di bidang Keuangan dan investasi di mana kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai landasan hukum penunjukan IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan sebagai tambahan dari peran IFG selaku *holding* di bidang Keuangan dan Investasi. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut Kementerian BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN melalui surat No. S-203/MBU/03/2020 perihal Persetujuan Penerimaan Pengalihan Saham tanggal 31 Maret 2020 yang kemudian dituangkan dalam akta notariil berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia maka IFG resmi menjadi *holding* dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) di samping anak-anak Perusahaan yang sudah ada yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tatautama dan PT Bahana Kapital Investa.
- Sehubungan dengan pembentukan *holding* tersebut dan sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Brand dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG).
- Di bulan Desember 2020, Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI menyetujui penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan IFG Life. Pendirian IFG Life sebagai bagian dari IFG menjadi peta bisnis IFG untuk portofolio bisnis di sektor asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun.
- Government Regulation No. 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 year 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Companies in the field of National Private Business Development is the legal basis for the appointment of BPUI as a holding company in the field of finance and investment. Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Company's Capital (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia serves as the legal basis for the appointment of IFG as the holding company for the Insurance and Guarantee SOEs, in addition to IFG's role as a holding company in the field of Finance and Investment. After the issuance of the Government Regulation (PP), the Ministry of BUMN as the Company's General Meeting of Shareholders (GMS) conducted a follow up by issuing a Decree of the Minister of BUMN through letter No. S-203/MBU/03/2020 regarding Approval for Acceptance of Transfer of Shares dated March 31, 2020 which was then stated in a notarial deed based on the Deed of Statement of Decisions of the Minister of SOEs Meeting as a General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. With the issuance of said regulation, IFG officially became the holding company for PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Jasa Raharja (Jasa Raharja), and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), in addition to existing subsidiaries, namely PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Grahaniaga Tatautama and PT Bahana Kapital Investa.
- With the establishment of the holding, and according to the Letter of the Ministry of SOEs No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Change of Brand and Logo of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), BPUI becomes Indonesia Financial Group (IFG).
- Representatives of the Republic of Indonesia approved the participation of State Equity (PMN) to IFG to establish IFG Life. The establishment of IFG Life as part of IFG's parent company has become IFG's business map for its business portfolio in the life insurance, health and pension fund sectors.



## LOGO PERUSAHAAN

COMPANY LOGO



Logo Perusahaan telah diatur berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-562/MBU/08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Persetujuan Perubahan Brand dan Logo PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) menjadi Indonesia Financial Group (IFG). Di mana logo Perusahaan ini memiliki pengertian sebagai berikut:

### **Tipografi:**

Logo IFG telah didesain untuk membangkitkan kehadiran yang bermakna. Garis-garis sudut logo memberikan kesan kontemporer dari sebuah organisasi yang berorientasi ke depan.

### **Ikonografi:**

Perangkat yang saling berhubungan dengan huruf "I" melambangkan gerak dan aspirasi ke depan.

### **Warna:**

Merah mewakili Dinamika, Kekuatan, dan Semangat. Warna merah yang kami gunakan sama persis dengan warna merah bendera Indonesia yang mewujudkan kebanggaan kami akan warisan nasional.

The Company's logo has been regulated based on the Letter of the Ministry of SOEs No. S-562/MBU/08/2020 dated August 6, 2020 concerning Approval of Change of Brand and Logo of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to become Indonesia Financial Group (IFG). The company logo is imbued with the following meanings:

### **Typography:**

The IFG logo has been designed to evoke a meaningful presence. The angular lines of the logo give a contemporary feel of a forward-looking organization.

### **Iconography:**

The interconnected device with the letter "I" symbolizes forward movement and aspiration.

### **The Colours:**

The colour Red represents Dynamics, Strength and Spirit. The colour red used is exactly the same as the red color of the Indonesian flag, which embodies our pride in our national heritage.



# BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND SERVICES

## Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 07 tanggal 6 April 2020, disebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

## Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, saat ini Perusahaan memiliki 10 (sepuluh) anak perusahaan, yang terdiri dari 5 (lima) anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan dan 5 (lima) anak perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan investasi. Melalui 10 (sepuluh) anak perusahaannya tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi, penjaminan, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, penasihat investasi, konsultan keuangan dan konsultan manajemen, serta usaha jasa-jasa keuangan lainnya termasuk pada usaha pengelolaan gedung perkantoran.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan melalui 10 (sepuluh) anak perusahaannya, secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Hasn't Been Carried Out	Keterangan Details
Jasa Keuangan Non-Asuransi & Penjaminan Non-Insurance and Guarantee Financial Services	✓	Telah dijalankan melalui PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), dan PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). It has been carried out through PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), and PT Grahaniaga Tatautama (GNTU).



Kegiatan Usaha Business Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/Hasn't Been Carried Out	Keterangan Details
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reinsurance	✓	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). It has been conducted through PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) and PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).
Penjaminan Guarantee	✓	Telah dijalankan melalui PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). It has been carried out through PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).
Asuransi Jiwa dan Kesehatan Life and Health Insurance	✓	Telah dijalankan melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). It has been conducted through PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

✓ = telah dijalankan/x = belum dijalankan  
✓ = has been carried out/x = has not been carried out

## Produk dan Layanan

Jenis-jenis produk dan jasa yang dimiliki dan ditawarkan Perusahaan melalui 10 (sepuluh) anak perusahaan adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

## Products and Services

The types of products and services that are owned and offered by the Company through its 10 (ten) subsidiaries are as attached below.

Jenis Produk dan Layanan Products and Services	Keterangan Detail
Produk/Products	
Reksa Dana Mutual Fund	IFG melalui PT Bahana TCW Investment Management (BTIM) memiliki beragam produk Reksadana baik Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap, Reksadana Ekuitas, Reksadana Campuran, Reksadana Index, Reksadana Terproteksi, Reksadana Penyertaan Terbatas/Investasi Alternatif, dan Kontrak Pengelolaan Dana. Selama bulan Januari 2020 hingga Desember 2020 BTIM telah meluncurkan 19 produk untuk memenuhi kebutuhan klien, dan berhasil membawa tambahan AUM sebesar Rp4,80 triliun. Through PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), IFG has a variety of mutual fund products, including Money Market Mutual Funds, Fixed Income Mutual Funds, Equity Mutual Funds, Mixed Mutual Funds, Index Mutual Funds, Protected Mutual Funds, Limited Participation/Alternative Investments Mutual Funds, and Fund Management Contracts. From January 2020 to December 2020, BTIM has launched 19 products to meet client needs, and managed to bring in an additional IDR 4.80 trillion in AUM.
Pendanaan Ultra Mikro Ultra Micro Funding	BAV sebagai agent of Development UMKM menyalurkan program UMi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kepada Koperasi untuk mendukung pengusaha mikro. Pada tahun 2020 BAV telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp734 miliar kepada 44 Koperasi di seluruh Indonesia. As an agent of MSME Development, BAV distributes the Government Investment Center (PIP) UMi program to Cooperatives to support micro-entrepreneurs. In 2020 BAV has disbursed financing of IDR 734 billion to 44 cooperatives throughout Indonesia.



<b>Jenis Produk dan Layanan</b> Products and Services	<b>Keterangan</b> Detail
Pendanaan PMVD PMVD (Regional Venture Capital Company) Funding	Melalui anak usaha Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia maka BAV memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang ada di setiap daerah. Sampai dengan akhir tahun 2020, BAV dan seluruh jaringan PMVD telah melakukan pembiayaan kepada 67,6 ribu Pasangan Usaha berskala mikro, kecil dan menengah di berbagai sektor usaha yang menyerap sekitar 4,3 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Secara kumulatif, jumlah pembiayaan kepada para pasangan usaha tersebut sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2020 telah mencapai Rp13,2 triliun Through its subsidiaries of Regional Venture Capital Companies (PMVD) spread across 25 provinces in Indonesia, BAV strengthens its network and expands the MSME base in each region. As of the end of 2020, BAV and the entire PMVD network have provided financing to 67.6 thousand micro, small and medium-scale Business Partners in various business sectors which creates around 4.3 million direct and indirect workers. Cumulatively, the amount of financing to these business partners from 1994 to 2020 has reached IDR 13.2 trillion
Pendanaan PMVJP PMVJP (Short-term Venture Capital Company) Funding	PMVJP merupakan pembiayaan Anjak Piutang/ <i>Invoice Financing</i> yaitu jasa pengalihan piutang ( <i>hak tagih</i> ) jangka pendek yang dimiliki oleh Nasabah kepada BAV. PMVJP is an <i>Invoice Financing</i> , which is a service to transfer short-term receivables (claims) owned by the Customer to BAV.
<b>Layanan/Services</b>	
Perasuransian dan Penjaminan Insurance and Guarantee	<p><b>Jamkrindo:</b> Penjaminan Konsumtif, Penjaminan Produktif, KUR, PEN dan <i>Suretyship</i></p> <p><b>Askrindo:</b> KUR, AKK, AKM, Askredag, Surety, KBG, Asuransi Umum, LC/SKBDN dan PEN</p> <p><b>Jasindo:</b> <i>Cargo, Aviation, M.Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental &amp; Health, Credit, Suretyship and Miscellaneous</i></p> <p><b>Jasa Raharja:</b> Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib</p> <p><b>Jamkrindo:</b> Consumptive Guarantee, Productive Guarantee, KUR, PEN and <i>Suretyship</i></p> <p><b>Askrindo:</b> KUR, AKK, AKM, Askredag, Surety, KBG, General Insurance, LC/SKBDN and PEN</p> <p><b>Jasindo:</b> <i>Cargo, Aviation, M. Hull, Offshore, Onshore, Fire, Engineering, Motor, Satellite, Public Liability, Accidental &amp; Health, Credit, Suretyship and Miscellaneous</i></p> <p><b>Jasa Raharja:</b> Compulsory Premium and Compulsory Contribution</p>
Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat ekuitas (saham) Equity-based Securities Trading Brokerage Services (shares)	PT Bahana Sekuritas (BS) memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek dengan strategi meningkatkan volume transaksi untuk memperbesar <i>market shares</i> dan untuk meningkatkan pendapatan usaha. Namun pada tahun 2020 BS <i>market share</i> BS menurun menjadi 1,05% ( <i>rank-29</i> ) dari sebelumnya 1,34%. Pendapatan BS pada tahun 2020 sebagai Jasa Perantara Pedagang Efek untuk produk saham menurun 13,2% YoY. PT Bahana Sekuritas (BS) has a license as a Broker-Dealer with a strategy of increasing transaction volume to increase market shares and to increase operating income. However, in 2020 BS <i>market share</i> decreased to 1.05% ( <i>rank-29</i> ) from the previous year's of 1.34%. BS's revenue in 2020 as Broker-Dealer Services for stock products decreased by 13.2% YoY.



Jenis Produk dan Layanan Products and Services	Keterangan Detail
Jasa Perantara Pedagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Debt and Sukuk Securities (EBUS) Trading Brokerage Services	<p>Kegiatan perdagangan <i>fixed income</i> PT Bahana Sekuritas (BS) untuk tahun 2020, terjadi penurunan <i>market share</i> untuk perdagangan <i>Government Bonds</i> (2020: 12,35%; 2019: 12,58%) namun disisi lain terdapat peningkatan untuk perdagangan <i>Corporate Bonds</i> (2020: 3,24%, 2019: 2,60%). Secara keseluruhan, realisasi pendapatan operasional dari aktivitas perdagangan <i>fixed income</i> di tahun 2020 tercatat sebesar Rp11,7 miliar atau meningkat sekitar 23,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp9,5 miliar.</p> <p>In Fixed income trading activities of PT Bahana Sekuritas (BS) in 2020, there was a decrease in market share for Government Bonds trading (2020: 12.35%; 2019: 12.58%). On the other hand there was an increase in Corporate Bonds trading (2020: 3 ,24%, 2019: 2.60%). Overall, the realization of operating income from fixed income trading activities in 2020 was recorded at IDR 11.7 billion, which was an increase of about 23.4% when compared to 2019 which was recorded at IDR 9.5 billion.</p>
Penjamin Emisi Efek Underwriter	<p>PT Bahana Sekuritas (BS) melakukan penjaminan emisi efek untuk saham dan utang. Pada tahun 2020 BS melakukan 1 penjaminan emisi efek saham yaitu <i>private placement</i> PT Merdeka Cooper Gold Tbk (MDKA). Penurunan pendapatan untuk kegiatan Penjamin Emisi Efek menurun 49% YoY untuk saham dan menurun 61% YoY untuk utang disebabkan adanya penundaan beberapa mandat IPO Efek bersifat Ekuitas di tahun 2020 atas permintaan klien, yaitu sebanyak 3 mandat IPO (2 BUMN; 1 Non-BUMN) terkait dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia serta penurunan nilai pasar Perdana Obligasi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 (2020: 70,2 triliun, 2019: 115,6 triliun).</p> <p>PT Bahana Sekuritas (BS) underwrites securities issuance for shares and debt. In 2020, BS conducted 1 underwriting of shares, namely the private placement of PT Merdeka Cooper Gold Tbk (MDKA). The revenue for Underwriting activities decreased 49% YoY for shares, and 61% YoY for debt. This was due to the postponement of several IPO mandates of Equity-based Securities in 2020 at the request of clients, namely 3 IPO mandates (2 SOEs; 1 Non-SOE). It is related to the COVID-19 pandemic situation in Indonesia and the decline in the market value of Initial Bonds that occurred on the Indonesia Stock Exchange in 2020 (2020: 70.2 trillion, 2019: 115.6 trillion).</p>
Penasihat Keuangan Financial Advisor	<p>PT Bahana Sekuritas (BS) membukukan pendapatan operasional dari kegiatan jasa penasihat pada tahun 2020 sebesar Rp 74,9 miliar atau meningkat 21,5% YoY. Hal ini terutama terkait mandat-mandat yang diterima dari perusahaan swasta nasional dan BUMN/BUMD yang merealisasikan rencana aksi korporasi di tahun 2020, termasuk kegiatan aksi korporasi IFG sebagai <i>holding</i> Asuransi dan Penjaminan sejak bulan Maret tahun 2020.</p> <p>PT Bahana Kapital Investa (BKI) secara aktif melakukan penjajakan pada pasar jasa <i>advisory non capital</i> market meliputi transaksi M&amp;A, <i>debt and corporate restructuring</i>, <i>feasibility study</i>, serta jasa <i>financial advisory</i> lainnya. Penggalian potensi proyek jasa <i>advisory</i> dilakukan atas proyek dan klien baru serta juga dengan turut melakukan pengembangan pada proyek-proyek yang telah dilakukan pada tahun 2019. BKI juga melakukan kerja sama dengan beberapa BUMN terkait jasa <i>advisory</i> yang diberikan dengan total pendapatan <i>advisory</i> sebesar Rp7,1 miliar. Selama tahun 2020, BKI telah menyelesaikan 6 proyek <i>Advisory</i>.</p> <p>PT Bahana Sekuritas (BS) posted operating revenue from advisory services in 2020 of IDR 74.9 billion, an increase of 21.5% YoY. This was mainly related to the mandates received from national private companies and SOEs/ROEs that realize the corporate action plan in 2020, including the IFG corporate action activities as Holding Copany of Insurance and Guarantee SOEs since March 2020.</p> <p>PT Bahana Kapital Investa (BKI) is actively exploring the non-capital market advisory services including M&amp;A transactions, debt and corporate restructuring, feasibility studies, and other financial advisory services. The exploration of potential advisory service projects is carried out on new projects and clients, as well as by participating in the projects development which have been conducted in 2019. BKI also collaborates with several SOEs regarding advisory services provided with a total advisory income of IDR 7.1 billion. In 2020, BKI has completed 6 Advisory projects.</p>



<b>Jenis Produk dan Layanan</b> Products and Services	<b>Keterangan</b> Detail
Manajemen Aset Asset Management	<p>PT Bahana TCW Investment Management mendapatkan pendapatan usaha yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan adalah pendapatan usaha yang dihasilkan dari jasa pengelolaan produk investasi yang dikelola perusahaan. Prinsip pengelolaan risiko yang berhati-hati (<i>prudent</i>) dan ketataan terhadap peraturan telah melekat dan dijalankan oleh seluruh insan BTIM dalam praktik pengelolaan perusahaan dan portofolio secara berkesinambungan. Per Desember 2020 dana kelolaan BTIM mencapai Rp51,94 triliun. BTIM termasuk ke dalam 10 perusahaan terbesar di industri reksa dana Indonesia, dengan total pangsa pasar sejumlah 62,31%.</p> <p>PT Bahana TCW Investment Management obtains operating revenue from the Company's main activities, namely operating revenue generated from the management services of investment product managed by the Company. The principles of prudent risk management and compliance with regulations have been adhered to and implemented by all BTIM personnel in the practice of managing the Company and its portfolio on an ongoing basis. As of December 2020, BTIM's managed funds that reached IDR 51.94 trillion. BTIM is included in the 10 largest companies in the Indonesian mutual fund industry, with a total market share of 62.31%.</p>
Investasi dan Manajemen Properti Property Investment and Management	<p>PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) merupakan pemilik dan pengelola Gedung Graha CIMB yang merupakan <i>landmark</i> Jalan Sudirman dan telah memperoleh Sertifikasi <i>Green Building</i> sejak tahun 2015. GNTU dapat mempertahankan tingkat hunian yang optimal sebesar 95.9% ditengah bertambahnya jumlah penawaran gedung perkantoran dan dampak dari Pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, GNTU melepaskan asset yang tidak produktif, yaitu penjualan PT Griyacanggu Tatautama (GCTU) anak usaha yang direncanakan mengembangkan bisnis perhotelan di Bali sehingga mencatatkan pendapatan non-operasional senilai Rp54,5 miliar atau sebesar 48% dari laba bersih GNTU tahun 2020 sebesar Rp113,6 miliar.</p> <p>PT Grahaniaga Tatautama (GNTU) is the owner and operator of the Graha CIMB Building which is a landmark of Jalan Sudirman and has obtained Green Building Certification since 2015. GNTU is able to maintain an optimal occupancy rate of 95.9% amid the increasing number of office building offers and the impact of the COVID-19 pandemic. In 2020, GNTU released non-productive assets, namely the sale of PT Griyacanggu Tatautama (GCTU), a subsidiary which is planned to develop the hotel business in Bali so as to record non-operating revenues of IDR 54.5 billion or 48% of GNTU's 2020 net profit of IDR 113.6 billion.</p>

### **Kompetensi Inti**

Perusahaan memiliki kompetensi inti sebagai penyedia solusi yang berkualitas bagi pelanggannya. Setiap produk dan jasa yang dibuat oleh Perusahaan adalah solusi terhadap kebutuhan pelanggan dan diberikan dalam kualitas yang tinggi secara konsisten.

### **Core Competencies**

The Company has core competencies as a provider of quality solutions for its customers. Every product and service made by the Company is a solution to customer needs and is delivered in a consistently high quality.



## VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE CULTURE



### **Visi Vision**

**Menjadi salah satu grup keuangan non-perbankan yang terbesar di Asia Tenggara yang sehat, terpercaya dan dikelola dengan tingkat prudensi yang tinggi.**



To be one of the largest non-banking financial groups in Southeast Asia which is sound, trusted and managed with a high level of prudence.



### **Misi Missions**

- 1. Memberikan jaminan perlindungan dasar dan kemudahan usaha kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup bangsa di seluruh wilayah dalam kerangka negara kesatuan.**
  - 2. Memberikan pelayanan berkualitas, berkontribusi untuk memberikan solusi inovatif dan terintegrasi melalui sumber daya manusia yang kompeten dan produk yang terjangkau dalam menjawab kebutuhan nasabah dan meningkatkan nilai pemegang saham.**
  - 3. Menjalankan usaha yang berkelanjutan dengan menjunjung nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dengan berlandaskan sinergi dan prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik).**
1. Provide basic protection guarantees and ease of conducting business to the community in order to improve social welfare and the nation's standard of living in all regions within the framework of the united country.
  2. Provide quality services, contribute to providing innovative and integrated solutions through competent human resources and affordable products in responding to customer needs and increasing shareholder value.
  3. Operate a sustainable business by upholding the values of good corporate governance based on synergy and the principle of Utmost Good Faith.



#### **Review Visi dan Misi Perusahaan oleh Manajemen Kunci**

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi Perusahaan, baik dalam periodik jangka pendek Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 yang telah di revisi dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 22 September 2020.

#### **Review of Company Vision and Mission by Key Management**

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the Company's vision and mission in the short-term period of the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) which was revised and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on September 22, 2020.



## Tujuan Perusahaan

Tiga objektif utama sebagai Perusahaan *Holding* Asuransi dan Penjaminan

### 1. Meningkatkan Bisnis Non-Asuransi Jiwa

Saat ini, perusahaan non asuransi jiwa terbesar yang memberikan pengaruh terhadap keseimbangan kondisi di Industri, praktik terbaik dan potensi sinergi dengan perusahaan BUMN lainnya.

- Menjaga keseimbangan Industri dengan mitra-mitra bisnis (mis. bank, *dealers*, penyedia layanan Kesehatan) untuk memastikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan;
- Menyediakan arahan yang strategis termasuk fokus pada bisnis, *cross-selling*, *shared-services*, dan infrastruktur;
- Manajemen risiko yang kuat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

### 2. Transformasi Bisnis Asuransi Jiwa

Menciptakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia dengan memetamorfosikan perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

- Konsep "*Bridge Bank*": Perusahaan asuransi jiwa yang baru untuk mengambil alih portofolio yang direstrukturasi;
- Restrukturisasi yang *massif* untuk membuat portofolio yang sehat;
- Didorong oleh dukungan signifikan dari pemerintah termasuk PMN, konsesi ke pasar *captive*, dll;
- Bisnis baru termasuk kerja sama dengan BUMN, membuat platform Kesehatan yang baru, dan institusi pemerintahan.

### 3. Agen Pengembangan

Menciptakan sebuah model yang berkelanjutan sebagai agen pengembangan untuk mendukung program pemerintah.

- Mengembangkan sebuah model yang berkelanjutan untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang melibatkan Jamkrindo dan Askrindo;
- Menyediakan penjaminan kredit untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMKM (bisnis mikro dan kecil);
- Memastikan Jamkrindo dan Askrindo tidak terekspos risiko kredit yang berlebihan.

## Company's Objectives

The three main objectives of the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs

### 1. Promoting Non-Life Insurance Business

Currently, the Company is the largest non-life insurance company that has an influence on the balance of conditions in the industry, best practices and potential synergies with other state-owned enterprises.

- Maintain a balance of Industry with business partners (e.g. banks, dealers, healthcare providers) to ensure more sustainable business practices.
- Provide strategic direction including focus on business, cross-selling, shared-services, and infrastructure.
- Strong and prudent risk management.

### 2. Life Insurance Business Transformation

Creating one of the largest life insurance companies in Indonesia by metamorphosing the oldest insurance company in Indonesia.

- "Bridge Bank" concept: New life insurance company to take over restructured portfolio.
- Massive restructuring to create a healthy portfolio.
- Driven by significant support from the government including State Equity Participation (PMN), concessions to captive markets, etc.
- New business including cooperation with SOEs, creating new healthcare platforms, and government institutions.

### 3. Development Agent

Creating a sustainable model as a development agent to support government programs.

- Develop a sustainable model to support the National Economic Recovery (PEN) Program involving Jamkrindo and Askrindo.
- Provide credit guarantees for KUR (People's Business Credit) and MSMEs (micro, small, and medium enterprises).
- Ensure that Jamkrindo and Askrindo are not exposed to excessive credit risk.



## Sikap Dasar dan Budaya Perusahaan

## Basic Attitude and Corporate Culture



Sesuai dengan Surat Edaran No. SE-07/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tanggal 29 September 2020, maka saat ini nilai-nilai utama Perusahaan yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) dengan penjabaran sebagai berikut:

### a. AMANAH

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

### b. KOMPETEN

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

### c. HARMONIS

Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif.

In accordance with Circular No. SE-07/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020, and the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 concerning the Determination of the Core Values of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dated September 29, 2020, currently, the Company's main values are Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal (Loyal), Adaptif (Adaptive), and Kolaboratif (Collaborative) which is abbreviated into AKHLAK (Moral Values) with the following description:

### a. AMANAH (TRUSTWORTHY)

The Company upholds the trust given by fulfilling promises and commitments, being responsible for the tasks, decisions and actions taken and adhering to moral and ethical values.

### b. KOMPETEN (COMPETENT)

The Company continues to learn and develop its capabilities by improving competence to respond to ever-changing challenges, helping others learn and completing assignments with the best quality.

### c. HARMONIS (HARMONIOUS)

The Company continues to increase mutual care and respect for differences regardless of background and always want to support others and also build a conducive work environment.


**d. LOYAL**

Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, Badan Usaha Milik Negara dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika.

**e. ADAPTIF**

Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif.

**f. KOLABORATIF**

Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

**d. LOYAL (LOYAL)**

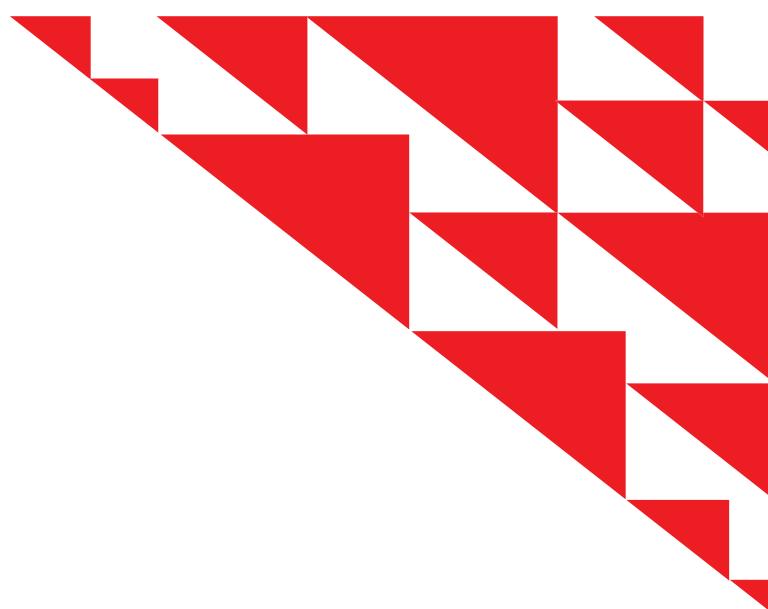
The Company will continue to be dedicated and prioritize the interests of the nation and state by maintaining the good name of employees, leaders, State-Owned Enterprises and the State. The Company is willing to sacrifice to achieve a bigger goal and also uphold a sense of obedience to the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.

**e. ADAPTIF (ADAPTIVE)**

The Company will continue to innovate and also enthusiastically drive or face changes that occur by adapting to be better, to continuously make improvements by following technological developments and acting proactively.

**f. KOLABORATIF (COLLABORATIVE)**

The Company continues to build synergistic cooperation by providing opportunities for parties to contribute, being open to working together to generate added value and also mobilizing the use of various resources for common goals.

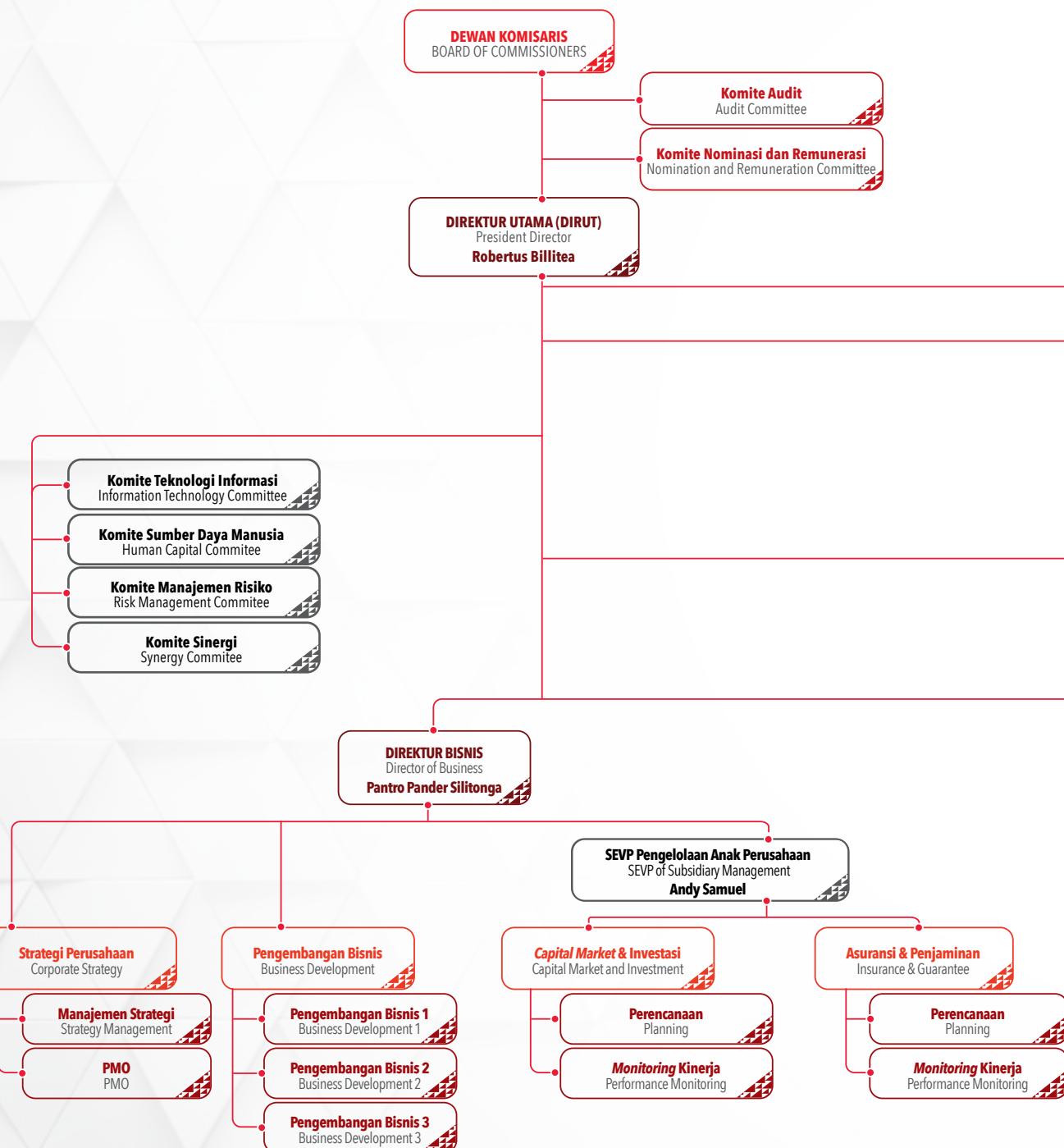




# STRUKTUR ORGANISASI

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

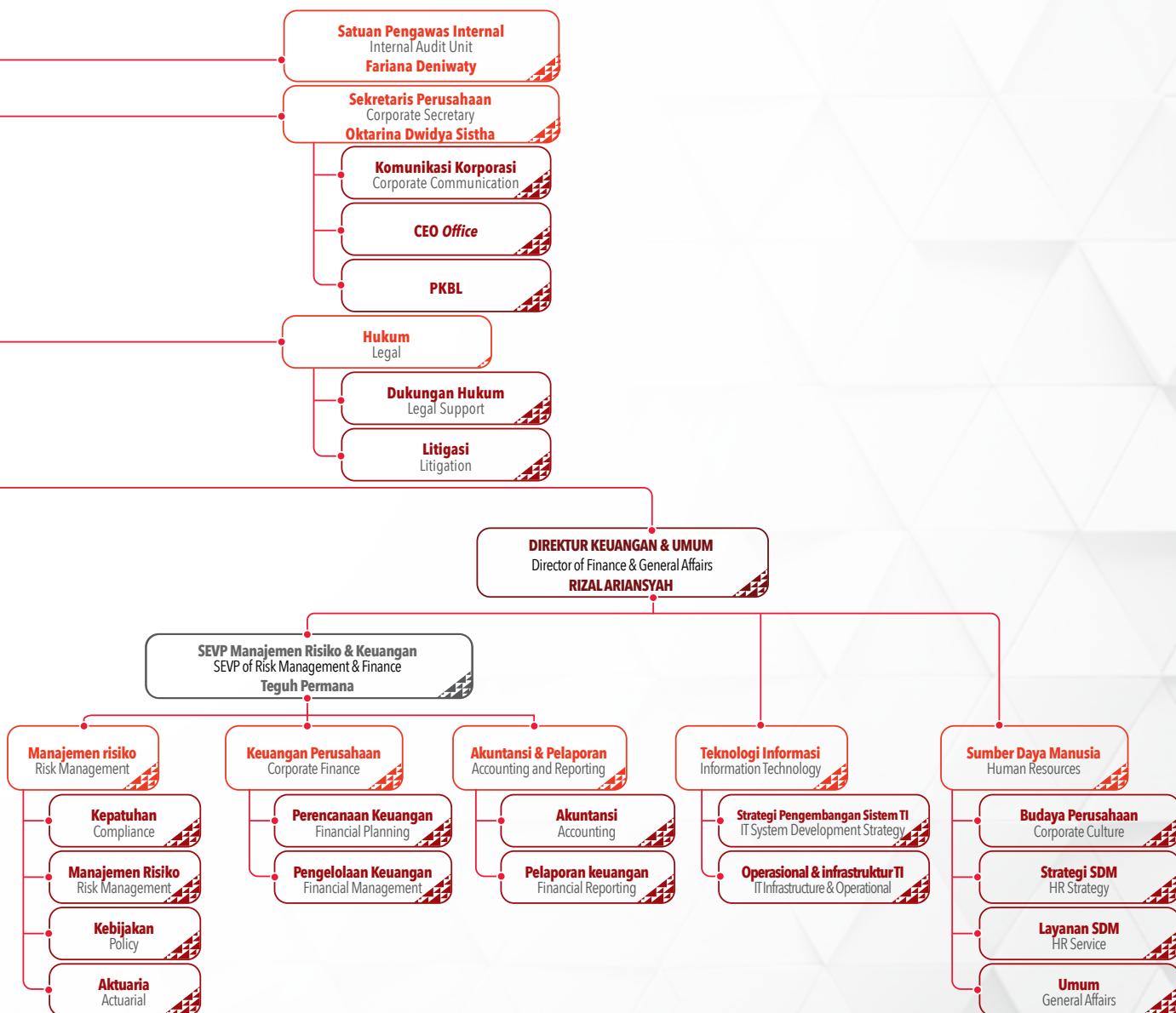
Struktur organisasi Perusahaan disusun dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan arah dan tujuan pengembangan korporasi, efektivitas pengelolaan korporasi, alur kerja yang efektif serta proses kontrol yang seimbang sehingga memberikan dukungan optimal kepada arah tujuan Perusahaan. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 021/SK-DIR/CORP/BPUI/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, sebagaimana terlampir di bawah ini.





The Company's organizational structure is structured and determined based on consideration of the guidance and objectives of corporate development, effectiveness of corporate management, effective workflow and balanced control processes, so as to provide optimal support for the direction of the Company's goals. The Company's organizational structure has been ratified by the Decree of the Board of Directors No. 021/SK-DIR/CORP/BPUI/VIII/2020 concerning the Organizational Structure of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, as attached below.

KOMISARIS	COMMISSIONER
KOMITE AUDIT	AUDIT COMMITTEE
DIREKSI	DIRECTOR
SEVP	SEVP
DIVISI	DIVISION
DEPARTEMEN	DEPARTMENT





# PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



## Data Pribadi

Warga negara Indonesia  
 Usia 50 tahun per 31 Desember 2020  
 Kelahiran Jakarta, 27 Januari 1970

## Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

## Riwayat Penunjukan

Fauzi Ichsan diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

## Riwayat Pendidikan

- Magister (S2) Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1995.
- Sarjana (S1) London School of Economics, 1991.

## Pengalaman Kerja

Karier Fauzi Ichsan antara lain Treasury Economist dan Head of Fixed Income Sales di Citibank Jakarta (1995-1997), Senior Economic Advisor Dubes Inggris untuk Indonesia (1998-2001), Managing Director, Senior Economist and Head of Government Standard Chartered Bank Jakarta (2001-2014), dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (2015-2020).

## Rangkap Jabatan

- Komisaris Independen-PT Manulife Investment Management Indonesia (Juli 2020-Sekarang)
- Komisaris Independen-PT AKR Corporindo (April 2020-Sekarang)
- Senior Advisor-A.T Kearney (Mei 2020-Sekarang)

## Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

## Fauzi Ichsan

### Komisaris Utama/Komisaris Independen

Periode Jabatan: 30 Desember 2020-RUPS 2025,  
 Periode Pertama

### President Commissioner/Independent Commissioner

Term of Office: December 30, 2020-AGM 2025,  
 First Period

## Personal Data

Indonesian citizens  
 50 years old as of 31 December 2020  
 Born in Jakarta, January 27, 1970

## Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

## Appointment History

Fauzi Ichsan was appointed as President Commissioner and also as Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.

## Educational Background

- Master Degree (S2) from Massachusetts Institute of Technology (MIT), 1995.
- Bachelor Degree (S1) from London School of Economics, 1991.

## Work Experience

Fauzi Ichsan's careers include Treasury Economist and Head of Fixed Income Sales at Citibank Jakarta (1995-1997), Senior Economic Advisor of the British Ambassador to Indonesia (1998-2001), Managing Director, Senior Economist and Head of Government Standard Chartered Bank Jakarta (2001-2014), and Chief Executive of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (2015-2020).

## Concurrent Position

- Independent Commissioner-PT Manulife Investment Management Indonesia (July 2020-Present)
- Independent Commissioner-PT AKR Corporindo (April 2020-Present)
- Senior Advisor-A.T Kearney (May 2020-Present)

## Affiliations

Has no affiliation either with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



#### **Data Pribadi**

Warga Negara Indonesia  
Usia 39 tahun per 31 Desember 2020  
Kelahiran Surabaya, 13 Juli 1981

#### **Domisili**

DKI Jakarta, Indonesia

#### **Riwayat Penunjukan**

Masyita Crystallin diangkat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

#### **Riwayat Pendidikan**

- Doktor (S3) Ekonomi bidang International Monetary and Finance, Claremont Graduate University, 2015
- Magister (S2) Ekonomi Pembangunan Internasional, The Australian National University, 2007
- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005

#### **Pengalaman Kerja**

Masyita Crystallin saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi. Sebelum bergabung dengan Kemenkeu, Masyita merupakan Kepala Ekonom Bank DBS Indonesia, bertanggung jawab untuk melakukan analisis makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan. Beliau juga pernah bergabung dengan World Bank sebagai Ekonom Makro pada Tim Manajemen Makro-Fiskal (Januari 2014–Desember 2017).

#### **Rangkap Jabatan**

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi (2020-sekarang).

#### **Hubungan Afiliasi**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

#### **Masyita Crystallin**

##### **Komisaris**

Periode Jabatan: 30 Desember 2020-RUPS 2025,  
Periode Pertama

##### **Commissioner**

Term of Office: December 30, 2020-AGM 2025,  
First Period

#### **Personal Data**

Indonesian citizens  
39 years old as of December 31, 2020  
Born in Surabaya, July 13, 1981

#### **Domicile**

DKI Jakarta Indonesia

#### **Appointment History**

Masyita Crystallin was appointed as Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020

#### **Educational Background**

- Doctor of Economics (S3) in International Monetary and Finance, Claremont Graduate University, 2015
- Master (S2) in International Development Economics, The Australian National University, 2007
- Bachelor (S1) of Economics, University of Indonesia, 2005

#### **Work Experience**

Masyita Crystallin currently serves as Special Staff to the Minister of Finance for Fiscal and Macroeconomic Policy Formulation. Prior to joining the Ministry of Finance, Masyita was the Chief Economist of Bank DBS Indonesia, who is responsible for conducting macroeconomic, fiscal and financial market analysis. She has also previously joined the World Bank as a Macro Economist on the Macro-Fiscal Management Team (January 2014 – December 2017)

#### **Concurrent Position**

Special Staff to the Minister of Finance for Fiscal Policy and Macroeconomics (2020-present)

#### **Affiliations**

Has no affiliation either with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.


**Data Pribadi**

Warga Negara Indonesia  
 Usia 71 tahun per 31 Desember 2020  
 Kelahiran Cipanas, 20 Mei 1949

**Domisili**

DKI Jakarta, Indonesia

**Riwayat Penunjukan**

Hotbonar Sinaga diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

**Riwayat Pendidikan**

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Indonesia, 1980

**Pengalaman Kerja**

Karir Hotbonar Sinaga antara lain Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Program Sarjana Strata 1 dan Magister Management tahun 1973-2016, kemudian menjabat sebagai Managing Director Johnson & Higgins (Pialang Asuransi Patungan dengan Amerika) 1986-1991, Direktur Pemasaran Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 1991-1997, Direktur Metlife Sejahtera 1997-2000, Konsultan E & Y Kanada 1999-2000, Direktur Utama PT Asuransi Berdikari 2000-2005, Komisaris dan Komite Audit kelompok Sinarmas 2004-2007, Direktur Utama PT Jamsostek 2007-2012 dan Dewan Audit OJK 2013-2014, lalu menjabat Komisaris Independen di beberapa perusahaan diantaranya PT Asia Pratama General Insurance, PT Sarana Proteksi Broker Asuransi, PT Sinar Mas Multi Artha Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Eka Life, dan PT Asuransi Mega Life.

**Rangkap Jabatan**

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

**Hubungan Afiliasi**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

**Hotbonar Sinaga**
**Komisaris Independen**

Periode Jabatan: 20 Oktober 2020-RUPS 2025,  
 Periode Pertama

**Independent Commissioner**

Term of Office: 20 October 2020-AGM 2025,  
 First Period

**Personal Data**

Indonesian citizens  
 71 years old as of December 31, 2020  
 Born in Cipanas, May 20, 1949

**Domicile**

DKI Jakarta, Indonesia

**Appointment History**

Hotbonar Sinaga was appointed as an Independent Commissioner based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Number SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020.

**Educational Background**

Bachelor Degree (S1) in Economics from the University of Indonesia, 1980

**Work Experience**

Hotbonar Sinaga's career includes working as a permanent lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia, Undergraduate and Masters in Management Programs from 1973-2016, then served as Managing Director of Johnson & Higgins (Joint Insurance Broker with America) 1986-1991, Marketing Director of Asuransi Jiwa Tugu Mandiri 1991-1997, Director of Metlife Sejahtera 1997-2000, Canada E & Y Consultant 1999-2000, President Director of PT Asuransi Berdikari 2000-2005, Commissioner and Audit Committee of the Sinarmas Group 2004-2007, President Director of PT Jamsostek 2007-2012 and 2013 OJK Audit Board 2013-2014. He also served as Independent Commissioner in several companies including PT Asia Pratama General Insurance, PT Sarana Proteksi Broker Asuransi, PT Sinar Mas Multi Artha Tbk, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Eka Life, and PT Asuransi Mega Life.

**Concurrent Position**

Does not have concurrent positions in other institutions or companies.

**Affiliations**

Has no affiliation either with the members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



#### Data Pribadi

Warga Negara Indonesia  
Usia 52 tahun per 31 Desember 2020  
Kelahiran Lubuk Basung, 19 Mei 1968

#### Domisili

Jawa Barat, Indonesia

#### Riwayat Penunjukan

Ditunjuk sebagai Dewan Komisaris IFG berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG SK-06/MBU/01/2019 tanggal 7 Januari 2019.

#### Riwayat Pendidikan

- Master (S2) Administrasi Bisnis dari Nanzan Nagoya-Jepang, 2001
- Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Andalas, 1993

#### Pengalaman Kerja

Karier Meirijal Nur antara lain Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Keuangan pada tahun 1994, Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung pada tahun 2013, Direktur Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2014, dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2019.

#### Rangkap Jabatan

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN (2019–Sekarang).

#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

#### Meirijal Nur

##### Komisaris

Periode Jabatan: Januari 2019-Agustus 2021,  
Periode Pertama

##### Commissioner

Term of Office: January 2019-August 2021,  
First Period

#### Personal Data

Indonesian citizens  
52 years old as of 31 December 2020  
Born in Lubuk Basung, May 19, 1968

#### Domicile

West Java, Indonesia

#### Appointment History

Appointed as the Board of Commissioners of PT BPUI (Persero) based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of IFG, SK-06/MBU/01/2019 dated January 7, 2019.

#### Educational Background

- Master (S2) of Business Administration from Nanzan Nagoya-Japan, 2001
- Bachelor (S1) of Economics from Andalas University, 1993

#### Work Experience

Meirijal Nur's careers include Candidates for Civil Servants (CPNS) at the Ministry of Finance in 1994, Head of the DJKN Regional Offices of South Sumatra, Jambi, and Bangka Belitung in 2013, Director of Appraisal, Directorate General of State Assets in 2014, and Director of Separated State Assets , Directorate General of State Assets in 2019.

#### Concurrent Position

Director of Separated State Assets, DJKN (2019 – Present)

#### Affiliations

Has no affiliation either with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.


**Data Pribadi**

Warga Negara Indonesia  
 Usia 46 tahun per 31 Desember 2020  
 Kelahiran Bandung, 10 Agustus 1974

**Domisili**

DKI Jakarta, Indonesia

**Riwayat Penunjukan**

Ditunjuk sebagai Dewan Komisaris IFG berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS IFG SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 tanggal 26 November 2020 ralat atas SK-337/MBU/10/2020. Beliau mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 16 Februari 2021.

**Riwayat Pendidikan**

- Master (S2) Administrasi Bisnis dari University of Pennsylvania-Amerika Serikat, 2002
- Sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung, 1996

**Pengalaman Kerja**

Karier Arief Budiman antara lain Booz Allen Hamilton, New York and Asia tahun 1997-2004, Partner McKinsey & Co dan President Director pada PT McKinsey Indonesia tahun 2004-2014, dilantik sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) tahun 2014-2018 dan kemudian sebagai Presiden Direktur PT Danareksa (Persero) pada tahun 2018-2020.

**Rangkap Jabatan**

Tidak memiliki rangkap jabatan baik di instansi maupun perusahaan lain.

**Hubungan Afiliasi**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

**Arief Budiman**
**Komisaris**

Periode Jabatan: Oktober 2020-Februari 2021,  
 Periode Pertama

**Commissioner**

Term of Office: October 2020-February 2021,  
 First Period

**Personal Data**

Indonesian citizens  
 46 years old as of December 31, 2020  
 Born in Bandung, August 10, 1974

**Domicile**

DKI Jakarta, Indonesia

**Appointment History**

Appointed as the Board of Commissioners of IFG based on the Decree of the Minister of SOEs as IFG's GMS SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 dated November 26, 2020 on SK-337/MBU/10/2020. He resigned from his position on February 16, 2021.

**Educational Background**

- Master (S2) of Business Administration from the University of Pennsylvania-United States, 2002
- Bachelor Degree (S1) in Industrial Engineering from Bandung Institute of Technology, 1996

**Work Experience**

Arief Budiman's careers include a career in Booz Allen Hamilton, New York and Asia in 1997-2004, Partner of McKinsey & Co, and President Director of PT McKinsey Indonesia in 2004-2014, appointed as Finance Director of PT Pertamina (Persero) in 2014-2018, and later as President Director of PT Danareksa (Persero) in 2018-2020.

**Concurrent Position**

Does not have concurrent positions in other institutions or companies.

**Affiliations**

Has no affiliation either with members of the Board of Directors and other members of the Board of Commissioners, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



## PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



### Data Pribadi

Warga Negara Indonesia  
Usia 54 tahun per 31 Desember 2020  
Kelahiran Flores, 4 Agustus 1966

### Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

### Riwayat Penunjukan

Robertus Billitea diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.

### Riwayat Pendidikan

- Master (S2) Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran, 2009
- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Krisnadipati, 1990

### Pengalaman Kerja

Robertus Billitea sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (2020), Direktur Eksekutif Hukum (2012-2020) dan Plt. Kepala Eksekutif di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2013-2014). Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Hukum Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004). Selain itu, Robertus Billitea juga pernah bekerja sebagai pengacara profesional.

### Rangkap Jabatan

Komisaris Utama PT Bahana Sekuritas

### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

### Robertus Billitea

#### Direktur Utama

Periode Jabatan: 11 Februari 2020-RUPS 2025,  
Periode Pertama

#### President Director

Term of Office: February 11, 2020-AGM 2025,  
First Period

### Personal Data

Indonesian citizens  
54 years old as of December 31, 2020  
Born Flores, August 4, 1966

### Domicile

Depok, West Java, Indonesia

### Appointment History

Robertus Billitea was appointed as President Director based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020.

### Educational Background

- Master (S2) in Business Law from Padjadjaran University, 2009
- Bachelor (S1) of Law from Krisnadipati University, 1990

### Work Experience

Robertus Billitea previously served as Independent Commissioner of PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) (2020), Legal Executive Director (2012 – 2020) and Acting Chief Executive at the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) (2013 – 2014). Previously, he also served as Legal Director of the National Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999 – 2004). In addition, Robertus Billitea has also worked as a professional lawyer.

### Concurrent Position

President Commissioner of PT Bahana Sekuritas

### Affiliations

Has no affiliation either with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.


**Data Pribadi**

Warga Negara Indonesia  
 Usia 46 tahun per 31 Desember 2020  
 Kelahiran Surabaya, 24 Juni 1974

**Domisili**

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

**Riwayat Penunjukan**

Rizal Ariansyah diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.

**Riwayat Pendidikan**

- Magister (S2) Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sarjana (S1) Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

**Pengalaman Kerja**

Selain menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum Perusahaan, beliau juga menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris pada anak perusahaan, sebelum bergabung dengan IFG, Rizal Ariansyah pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2019-2020), Wakil Komisaris Utama PT Jakarta International Container Terminal (2018-2020), Komisaris Utama PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia (2018-2020), Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Koordinator Sekretaris Tetap Pelindo I, II, III dan IV PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Sekretaris Perusahaan/Executive Vice President PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016-2017), Sekretaris Perusahaan/Executive Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2012-2016), Partner Law Firm Radjiman Bilitea & Partners (2009-2012), Kepala Bagian Hukum/2Kepala Group/Senior Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2005-2009), Kepala Sub Bagian Hukum/Senior Manager PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2005), dan Kepala Group Hukum/Vice President (1999-2004).

**Rangkap Jabatan**

- Komisaris Utama PT Grahaniaga Tatautama (Juni 2020-sekarang)
- Komisaris PT Bahana Kapital Investa (April 2020-sekarang)

**Hubungan Afiliasi**

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung

**Rizal Ariansyah**
**Direktur Keuangan dan Umum**

Periode Jabatan: 11 Februari 2020-RUPS 2025,  
 Periode Pertama

**Director of Finance and General Affairs**

Term of Office: February 11, 2020-AGM 2025,  
 First Period

**Personal Data**

Indonesian citizens  
 46 years old as of December 31, 2020  
 Born in Surabaya, June 24, 1974

**Domicile**

Bekasi, West Java, Indonesia

**Appointment History**

Rizal Ariansyah was appointed as Director of Finance and General Affairs based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020.

**Educational Background**

- Master (S2) of Law, University of Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bachelor (S1) of Law, University of Indonesia, Jakarta, 1996.

**Work Experience**

In addition to serving as Director of Finance and General Affairs of the Company, he also serves on the Board of Commissioners of subsidiaries. Prior to joining IFG, Rizal Ariansyah served as President Commissioner of PT Pendidikan Maritim and Logistik Indonesia (2019-2020), Deputy President Commissioner of PT Jakarta International Container Terminal (2018-2020), President Commissioner of PT Rumah Sakit Pelabuhan Indonesia (2018-2020), HR Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Coordinator of Permanent Secretary of Pelindo I, II, III and IV of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2017-2020), Corporate Secretary/Executive Vice President of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2016-2017), Corporate Secretary/Executive Vice President of PT Perusahaan Pengelola Asset (Persero) (2012-2016), a Partner in the Radjiman Bilitea & Partners Law Firm (2009-2012), Head of Legal Division-2/Head of Group/ Senior Vice President of PT Perusahaan Pengelola Asset (Persero) (2005-2009), Head of Legal Sub-Section/Senior Manager of PT Perusahaan Pengelola Asset (Persero) (2004-2005), and Head of Legal Group/Vice President (1999-2004).

**Concurrent Position**

- President Commissioner of PT Grahaniaga Tatautama (June 2020-present)
- Commissioner of PT Bahana Kapital Investa (April 2020-present)

**Affiliations**

Has no affiliation either with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly



#### Data Pribadi

Warga Negara Indonesia  
Usia 44 tahun per 31 Desember 2020  
Kelahiran Jakarta, 25 September 1976

#### Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

#### Riwayat Penunjukan

Pantro Pander Silitonga diangkat menjadi Direktur Bisnis berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020.

#### Riwayat Pendidikan

- Magister (S2), MBA in Finance, Strategy and Venture Capital, The University of Chicago, USA, 2007.
- Sarjana (S1), Bachelor of Science in Process Re-engineering, Operations & Accounting, Indiana University Bloomington, USA, 1998.

#### Pengalaman Kerja

Pantro Pander pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Mandiri Capital, sebuah perusahaan modal ventura milik PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Sebelum bekerja di Mandiri Capital (2019-2020), beliau menjabat sebagai Senior Vice President Bank Mandiri. Pantro Pander juga pernah bekerja selama 7 tahun di PT XL Axiata Tbk (EXCL) sebagai Vice President untuk 4G LTE (2009-2016). Beliau juga pernah bekerja sebagai Konsultan di The Boston Consulting Gorup (2007-2009).

#### Rangkap Jabatan

- Komisaris Utama PT Bahana TCW Investment Management (Desember 2020-sekarang)

#### Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pantro Pander Silitonga

##### Direktur Bisnis

Periode Jabatan: 11 Februari 2020-RUPS 2025,  
Periode Pertama

##### Director of Business

Term of Office: February 11, 2020-AGM 2025,  
First Period

#### Personal Data

Indonesian citizens  
44 years old as of 31 December 2020  
Born in Jakarta, September 25, 1976

#### Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

#### Appointment History

Pantro Pander Silitonga was appointed as Director of Business based on a copy of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020.

#### Educational Background

- Master (S2), MBA in Finance, Strategy and Venture Capital, The University of Chicago, USA, 2007.
- Bachelor (S1) of Science in Process Re-engineering, Operations & Accounting, Indiana University Bloomington, USA, 1998.

#### Work Experience

Pantro Pander served as President Commissioner of Mandiri Capital, a venture capital company owned by PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Prior to working at Mandiri Capital (2019 – 2020), he served as Senior Vice President of Bank Mandiri. Pantro Pander has also worked for 7 years at PT XL Axiata Tbk (EXCL) as Vice President for 4G LTE (2009 – 2016). He has also worked as a Consultant at The Boston Legal Consulting Group (2007 – 2009).

#### Concurrent Position

- President Commissioner of PT Bahana TCW Investment Management (December 2020 – present)

#### Affiliations

Has no affiliation either with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors, as well as with the main and controlling shareholders, either directly or indirectly.



# PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

## EXECUTIVE OFFICER PROFILE


**Oktarina Dwidya Sistha**

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

Menjabat sejak 14 Desember 2020/Term of Office: December 14, 2020

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	:	39 tahun per 31 Desember 2020 39 years old as of December 31, 2020
<b>Domisili</b> Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
<b>Bergabung di IFG</b> Joining IFG	:	14 Desember 2020 December 14, 2020
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2019)</li> <li>• Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (2001)</li> <li>• Master of Law from the University of Indonesia (2019)</li> <li>• Bachelor of Law from University of Indonesia (2001)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experience	:	<i>Legal Head Division</i> di LPS Legal Head Division at the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b> Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 056/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2020 Decree of the Board of Directors No. 056/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2020


**Fariana Deniwaty**

Kepala Unit Audit Internal/Head of Internal Audit Unit

Menjabat sejak 2 Maret 2020/Term of Office: March 2, 2020

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	:	49 tahun per 31 Desember 2020 49 years old as of December 31, 2020
<b>Domisili</b> Domicile	:	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia
<b>Bergabung di IFG</b> Joining IFG	:	21 November 1994 November 21, 1994
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Magister Management in General Management</i>, IPMI Business School, Jakarta, September 2009</li> <li>• <i>Post Graduate Diploma Intercultural Management</i>, Japan American Institute Management &amp; Science (JAIMS), Honolulu, Juli 2003</li> <li>• Sarjana Sosial Ekonomi Perikanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Mei 1994</li> <li>• Master of Management in General Management, IPMI Business School, Jakarta, September 2009</li> <li>• Post Graduate Diploma in Intercultural Management, Japan American Institute Management &amp; Science (JAIMS), Honolulu, July 2003</li> <li>• Bachelor of Fisheries Socio-Economic, Bogor Agricultural University (IPB), Bogor, May 1994</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Risk Management Group Head</i> di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2012–2018</li> <li>• <i>General Affair Head</i> di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2019</li> <li>• Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Mei 2019</li> <li>• Risk Management Group Head at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2012 – 2018</li> <li>• Head of General Affairs at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2019</li> <li>• Head of the Internal Audit Unit at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), May 2019</li> </ul>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b> Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/BPUI/SDM/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 Decree of the Board of Directors No. 001/SK-DIR/BPUI/SDM/III/2020 dated March 2, 2020



### **Andy Samuel**

SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan/SEVP of Subsidiary Management  
Menjabat sejak 18 September 2020/Term of Office: September 18, 2020

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	:	47 tahun per 31 Desember 2020 47 years old as of December 31, 2020
<b>Domisili</b> Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
<b>Bergabung di IFG</b> Joining IFG	:	18 September 2020 September 18, 2020
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Graduate Diploma in Insurance, Glasgow Caledonian University, 1999</li> <li>• Sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997</li> <li>• Post Graduate Diploma in Insurance, Glasgow Caledonian University (1999)</li> <li>• Bachelor of Political Science from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (1997)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experience	:	<p>Direktur Teknik PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk, 2015–2020</p> <p>Technical Director of PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (2015 – 2020)</p>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b> Legal Basis of Appointment	:	<p>Surat Keputusan Direksi No. 033/SKDIR/BPUI/SDM/IX/2020 tanggal 18 September 2020</p> <p>Decree of the Board of Directors No. 033/SKDIR/BPUI/SDM/ IX/2020 dated 18 September 2020</p>



### **Teguh Permana**

SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan/SEVP of Risk Management and Finance  
Menjabat sejak 6 Oktober 2020/Term of Office: October 6, 2020

<b>Kewarganegaraan</b> Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian
<b>Usia</b> Age	:	46 tahun per 31 Desember 2020 46 years old as of December 31, 2020
<b>Domisili</b> Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
<b>Bergabung di IFG</b> Joining IFG	:	6 Oktober 2020 October 6, 2020
<b>Riwayat Pendidikan</b> Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Advanced Diploma in General Insurance, Malaysian Insurance Institute, 2006</li> <li>• Magister Management dari Universitas Indonesia, 2001</li> <li>• Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan Bandung, 1997</li> <li>• Advanced Diploma in General Insurance, Malaysian Insurance Institute (2006)</li> <li>• Master of Management from the University of Indonesia (2001)</li> <li>• Bachelor of Civil Engineering from Parahyangan University, Bandung (1997)</li> </ul>
<b>Pengalaman Kerja</b> Work Experience	:	<p>Technical Director/Chief Underwriting Officer PT Asuransi Allianz Utama, 2016–2020</p> <p>Technical Director/Chief Underwriting Officer at PT Asuransi Allianz Utama (2016 – 2020)</p>
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b> Legal Basis of Appointment	:	<p>Surat Keputusan Direksi No. 036/SKDIR/BPUI/ SDM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020</p> <p>Decree of the Board of Directors No. 036/SKDIR/ BPUI/SDM/X/2020 dated October 6, 2020</p>

# DEMOGRAFI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

## Demografi Karyawan

Per 31 Desember 2020, karyawan Perusahaan tercatat sebanyak 77 orang, mengalami peningkatan 84% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2019 yang sebanyak 48 orang. Hal ini dikarenakan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) mendapatkan mandat dari KBUMN menjadi *holding* asuransi dan penjaminan.

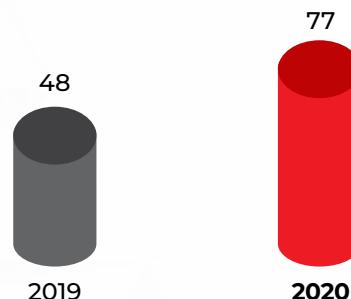
Profil demografi karyawan Perusahaan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

## Employee Demographics

As of December 31, 2020, there were 77 employees of the Company, which was an increase of 84% compared to the number of employees as of December 31, 2019, which was 48 people. This was because PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) received a mandate from the Ministry of SOEs to become a holding company of insurance and guarantee SOEs.

The demographic profile of the Company's employees can be seen in the following table and chart.

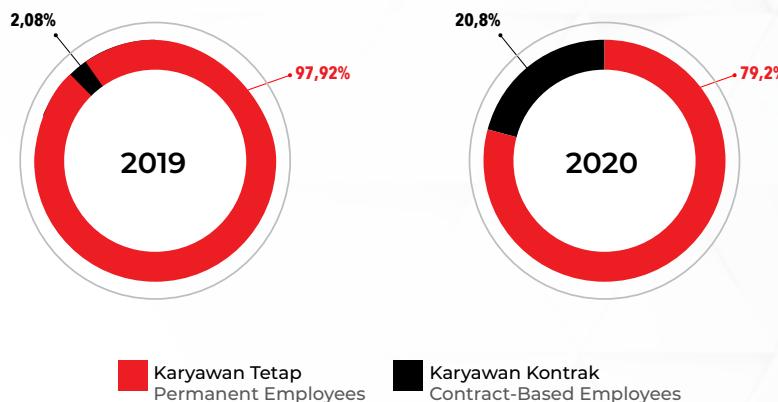
**Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir 2019-2020**  
 The Trend of the Number of Employees in the Last 2 (Three) Years 2019-2020



**Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)**  
 Demographics of Employees Based on Employment Status (in number of people)

Status Kepegawaian Employment Status	2020				2019			
	L	P	Jumlah Total	Percentase (%)	L	P	Jumlah Total	Percentase (%)
Karyawan Tetap Permanent Employees	36	25	61	79,2	25	22	47	97,92 ↑
Karyawan Kontrak Contract-Based Employees	5	11	16	20,8	1	-	1	2,08 ↑
<b>Jumlah Total</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>100,00</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>

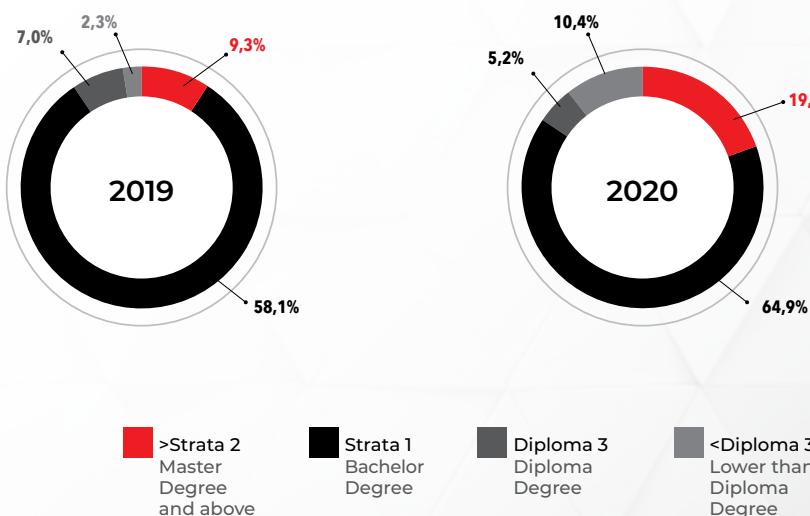
L = Laki-laki/P = Perempuan/M = Male/F = Female



**Demografi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)**  
Employee Demographics by Education Level (in number of people)

Jenjang Pendidikan Education Level	2020				2019			
	L	P	Jumlah Total	Percentase (%)	L	P	Jumlah Total	Percentase (%)
>Strata 2 Master Degree and above	10	5	15	19,5	8	4	12	9,3
Strata 1 Bachelor Degree	22	28	50	64,9	10	15	25	58,1
Diploma 3 Diploma Degree	3	1	4	5,2	2	2	4	7,0
<Diploma 3 Lower than Diploma Degree	6	2	8	10,4	6	1	7	2,3
<b>Jumlah Total</b>	<b>41</b>	<b>36</b>	<b>77</b>	<b>100,00</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>

L = Laki-laki/P = Perempuan/M = Male/F = Female

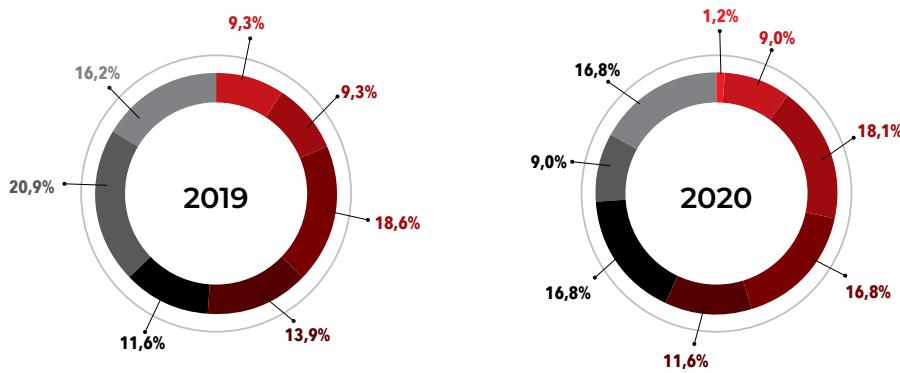


### Demografi Karyawan Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Employee Demographics by Age Range (in number of people)

Rentang Usia Age Range	2020				2019			
	L	P	Jumlah Total	Percentase (%)	L	P	Jumlah Total	Percentase (%)
> 55 tahun/years old	1	0	1	1,4	0	0	0	2,3
51 – 55 tahun/years old	6	2	8	11,0	4	1	5	9,1
46 – 50 tahun/years old	10	4	14	19,2	8	6	14	9,1
41 – 45 tahun/years old	8	4	12	16,4	6	5	11	18,2
36 – 40 tahun/years old	4	5	9	12,3	2	2	4	13,6
31 – 35 tahun/years old	5	7	12	16,4	3	6	9	11,4
26 – 30 tahun/years old	2	4	6	8,2	1	1	2	20,5
21 – 25 tahun/years old	5	6	11	15,1	2	1	3	15,9
< 20 tahun/years old	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Total</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>73</b>	<b>100,00</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>

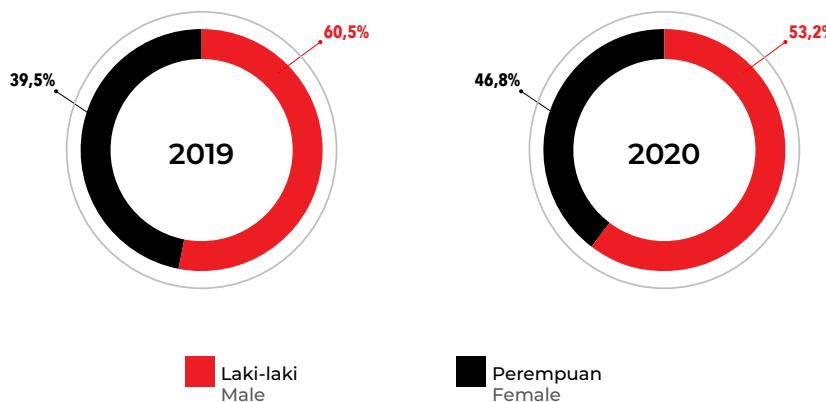
L = Laki-laki/P = Perempuan/M = Male/F = Female



### Demografi Karyawan Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)

Employee Demographics by Gender (in number of people)

Gender/Jenis Kelamin	2020		2019	
	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage	Jumlah Total	Percentase (%) Percentage
Laki-laki Male	41	53,2	26	60,5
Perempuan Female	36	46,8	22	39,5
<b>Jumlah Total</b>	<b>77</b>	<b>100,00</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>

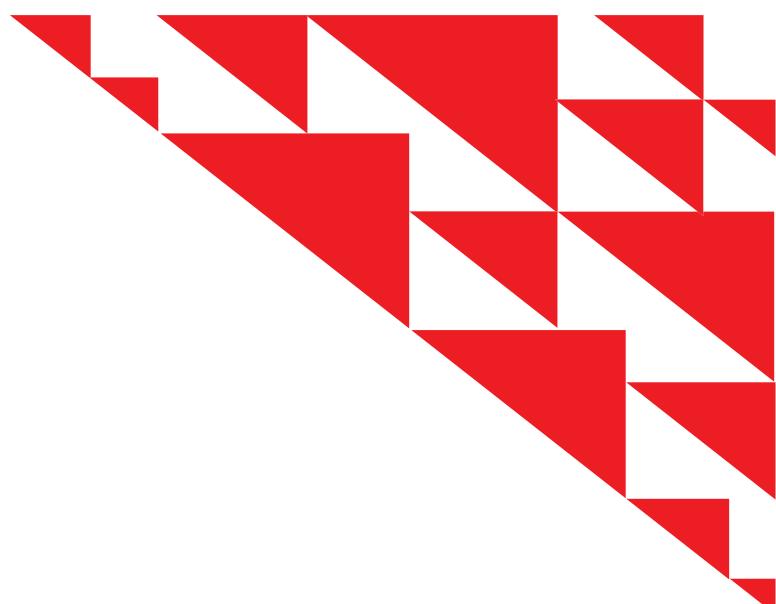


## BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perusahaan sangat mendukung program pengembangan karyawannya, dengan terus menganggarkan biaya pengembangan karyawan secara berkala. Realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.270.000.000, menurun 46,22% atau sebesar Rp1.091.385.304 dibandingkan tahun 2019. Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

## EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT COST

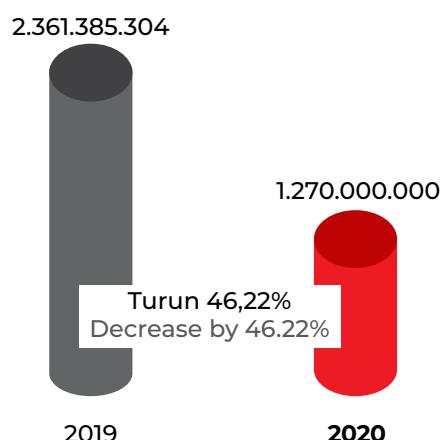
The Company strongly supports the employee development program, by continuing to provide budget for employee development costs on a regular basis. The realization of employee competency development costs in 2020 was recorded at IDR1,270,000,000, which was a decrease of 46.22% or IDR1,091,385,304 when compared to 2019. The total cost of developing employee competency can be seen in the following table.



### Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Costs

	<b>2020</b> (Rp)	<b>2019</b> (Rp)	<b>Peningkatan (Penurunan)</b> Increase (Decrease)	
			<b>Selisih (Rp)</b> Difference	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	1.270.000.000	2.361.385.304	(1.091.385.304)	(46,22) ↓

### Perbandingan Biaya Pengembangan Kompetensi (Rp) Comparison of Competency Development Costs (Rp/IDR)



Uraian lengkap terkait kebijakan IFG dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi SDM dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia di bab Fungsi Penunjang Bisnis dalam Laporan Tahunan ini.

A complete description of IFG's policies in managing and developing HR competencies can be seen in the discussion on Human Resources Section in the Business Support Functions chapter of this Annual Report.



# STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

## STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS

### Struktur dan Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan

### Company Share Ownership Structure and Composition

#### Struktur Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2020 Company Shareholder Structure as of December 31, 2020

Pemegang Saham Shareholder/s	Jumlah Saham (lembar) Number of shares (Shares)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully-Paid Capital (Rp/IDR)	Percentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000/lembar saham Nominal value of shares = IDR1,000,000/share			
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	67.163.537	67.163.537.000.000	100,00

#### Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2020 Company Shareholder Composition as of December 31, 2020



### Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Kelompok Pemegang Saham Masing-masing di Bawah 5 (Lima) Persen

Hingga 31 Desember 2020, Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Manajemen, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Pertama Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas. Sehingga, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

### Information About Share Ownership by the Company's Management and Group of Shareholders, Each Below 5 (Five) Percent Ownership

As of December 31, 2020, the Company does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and Management Stock Ownership Program (MSOP) policy. The Company also does not conduct an Initial Public Offering which allows the public to own the Company's shares. All share ownership is in accordance with the explanation above. Therefore, there are no Company officials or employees who own the Company's shares.



## Informasi tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali

**“Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari Perusahaan dengan kepemilikan sebesar 100,00%.”**

**“The Government of the Republic of Indonesia is the main and controlling shareholder as well as the ultimate owner of the Company with an ownership of 100.00%.”**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, per 31 Desember 2020 sebanyak 67.163.537 lembar saham Perusahaan seluruhnya atau 100,00% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Penyertaan Modal Negara. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari Perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; Kuasa Pemegang Saham Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## Information on Main/Controlling Shareholders

As previously explained, as of December 31, 2020, 67,163,537 shares of the Company were entirely or 100.00% owned by the Government of the Republic of Indonesia through State Equity Participation. Thus, the Government of the Republic of Indonesia acts as the main and controlling shareholder as well as the ultimate owner of the Company.

Based on Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties and Authorities of the Minister of Finance to Company (Persero), Public Companies (PERUM) and Service Companies (PERJAN), to the State Minister for State-Owned Enterprises, and Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, along with the State Gazette of the Republic of Indonesia; The Proxy of the Company's Shareholders is the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN).

**Pemerintah Republik Indonesia/Kepresidenan**  
 Government of the Republic of Indonesia/Presidency

**Kementerian Badan Usaha Milik Negara**  
 Ministry of State-Owned Enterprises

**Istana Negara**  
 Jl. Medan Merdeka Utara No. 3  
 RT. 2/RW. 3, Kel. Gambir  
 Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat  
 DKI Jakarta 10110, Indonesia

**Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia**  
 Jl. Veteran No. 17-18  
 Jakarta Pusat 10110  
 DKI Jakarta, Indonesia  
 Telp. +62 21 3845627  
[www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

**Kantor Kementerian BUMN**  
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13  
 Jakarta Pusat 10110  
 DKI Jakarta, Indonesia  
 Telp. +62 21 29935678  
 Fax. +62 21 29935740  
[www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)

**National Palace**  
 Jl. Medan Merdeka Utara No. 3  
 RT. 2/RW. 3, Gambir District.  
 Gambir, Central Jakarta City  
 DKI Jakarta 10110, Indonesia

**Office of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia**  
 Jl. Veteran No. 17-18  
 Central Jakarta 10110  
 DKI Jakarta, Indonesia  
 Telephone: +62 21 3845627  
[www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

**Ministry of SOEs**  
 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13  
 Central Jakarta 10110  
 DKI Jakarta, Indonesia  
 Telephone: +62 21 29935678  
 Fax. +62 21 29935740



## DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI, VENTURA BERSAMA, DAN KERJA SAMA OPERASI

LIST OF SUBSIDIARIES AND ASSOCIATE ENTITIES, JOINT VENTURES, AND COOPERATIVE OPERATIONS

**“Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan memiliki 10 (sepuluh) entitas anak dan tidak memiliki entitas asosiasi, ventura bersama, maupun kerja sama operasi”**

**“Until the end of 2020, the Company has 10 (ten) subsidiaries and has no associates, joint ventures, or joint operations”**

**ENTITAS ANAK/SUBSIDIARIES**

Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Domicili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Kepemilikan oleh IFG (%) Ownership by IFG (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) (Rp-juta/in IDR million)		Status Operasi Operational Status
					2020	2019	2020	2019	
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)	Asuransi Insurance	Jakarta	1960	1960	99,99%	-	17.309.567	16.927.196	Beroperasi In operation
PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)	Penjaminan Guarantee	Jakarta	1970	1970	99,99%	-	19.122.829	16.770.270	Beroperasi In operation
PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)	Asuransi Insurance	Jakarta	1971	1971	99,99%	-	30.134.909	26.639.188	Beroperasi In operation
PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	Asuransi Insurance	Jakarta	1973	1973	99,99%	-	13.914.348	13.643.564	Beroperasi In operation
PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)	Mutual Fund, Discretionary Fund, Alternative Investment	Jakarta	1991	1991	60,0%	60,0%	446.549	419.841	Beroperasi In operation
PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)	Building Management, Hospitality Management	Jakarta	1989	1993	52,8%	52,8%	808.963	805.720	Beroperasi In operation
PT Bahana Artha Ventura (BAV)	Pembentukan Produktif, Penyertaan Saham, Obligasi, Konversi Productive Financing, Investments/ Participation in Shares, Bonds, Conversions	Jakarta	1991	1991	64,6%	64,6%	2.378.823	2.137.626	Beroperasi In operation
PT Bahana Sekuritas (BS)	Perantara Perdagangan Efek, Penjamin Emisi Efek, Penasihat Keuangan Securities Brokerage, Underwriter, Financial Advisor	Jakarta	1993	1993	99,2%	99,2%	1.136.759	651.509	Beroperasi In operation
PT Bahana Kapital Investama (BKI)	Investment, penasihat keuangan Investment, Financial Advisor	Jakarta	1993	1993	99,9%	99,9%	47.747	45.287	Beroperasi In operation

**ENTITAS ANAK/SUBSIDIARIES**

<b>Nama</b> Name	<b>Bidang Usaha</b> Line of Business	<b>Domisili</b> Domicile	<b>Tahun Berdiri</b> Year of Establishment	<b>Tahun Beroperasi Komersial</b> Year of Commercial Operation	<b>Kepemilikan oleh IFG (%)</b> Ownership by IFG (%)		<b>Jumlah Aset (Rp-juta)</b> (Rp-juta/in IDR million)		<b>Status Operasi</b> Operational Status
					<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
PT Bahana Mitra Investa (BMI)	Dormant Company	Jakarta	1997	1997	99,1%	99,1%	2.368	2.752	Beroperasi In operation
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)	Asuransi Insurance	Jakarta	2020	-	99,99%	-	153.511	-	Belum Beroperasi Not yet operation

## ENTITAS ANAK

### PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)



## SUBSIDIARIES

### PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)

#### Riwayat Singkat

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), selanjutnya disebut "Jasa Raharja" atau "Perusahaan", berdiri pada tanggal 1 Januari 1960. Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Di bidang asuransi kerugian, penerbitan UU tersebut dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.

Selanjutnya pada tahun 2020, seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), Jasa Raharja bergabung ke dalam *holding* asuransi dan penjaminan BUMN di mana IFG bertindak sebagai *holding* asuransi BUMN dengan anggota PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

#### Brief History

PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), hereinafter referred to as "Jasa Raharja" or the "Company", was established on January 1, 1960. The history of the establishment of Jasa Raharja is inseparable from the government's policy to nationalize Dutch-owned companies with the enactment of Law no. 86 of 1958 concerning the Nationalization of Dutch Companies. In the field of loss insurance, the issuance of the Act is described through Government Regulation (PP) No. 3 of 1960 concerning the Determination of a Dutch Loss Insurance Company subject to Nationalization.

Further, in 2020, along with the issuance of Government Regulation (PP) No. 20 of 2020 concerning the Addition of State Equity Participation in the Share Capital of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), Jasa Raharja joined the SOEs Holding insurance and guarantee, in which IFG acts as the holding company for Insurance SOEs with PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Asuransi Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) and PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) as its members.



### Keunggulan

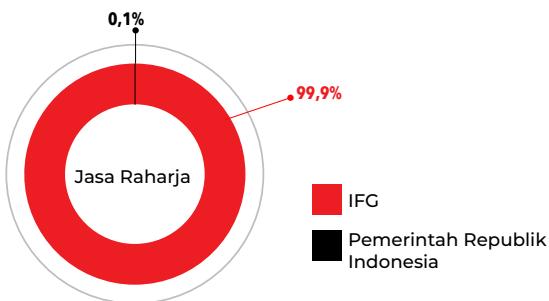
Jasa Raharja turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi, jaminan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi kerugian dengan menyelenggarakan program asuransi sosial, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

### Excellence

Jasa Raharja participates in implementing and supporting Government policies and programs in the fields of economy, social security and national development in general, particularly in the field of general insurance by organizing social insurance programs, and optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and highly competitive services in order to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

### Kepemilikan Saham Jasa Raharja per 31 Desember 2020

Jasa Raharja's Share Ownership as of December 31, 2020



### Manajemen Kunci Jasa Raharja per 31 Desember 2020

Key Management of Jasa Raharja as of December 31, 2020

#### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Budi Setiyadi
Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antonius</li> <li>• Dyah Kartika Rini</li> <li>• Rimawan Pradiptyo</li> </ul>
Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suprianto</li> <li>• Humania</li> <li>• Setya Utama</li> </ul>

#### Direksi/Board of Directors

Direktur Utama President Director	Budi Rahardjo Slamet
Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Director of Risk Management and Information Technology Director	M. Wahyu Wibowo
Direktur Keuangan Director of Finance	Myland
Direktur Operasional Director of Operations	Amos Sampetoding
Direktur SDM dan Umum Director of HR and General Affairs	Dewi Aryani Suzana

### **Kinerja Keuangan Jasa Raharja 2020-2019**

**Jasa Raharja's Financial Performance 2020-2019**

	2020 (Rp-miliar/In IDR billion)	2019 (Rp-miliar/In IDR billion)	
Jumlah Pendapatan Total Revenue	6.282,50	6.997,10	↓
Jumlah Beban Total Expenses	4.430,58	5.092,09	↓
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	1.851,91	1.905,00	↓
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(343,02)	(346,00)	↓
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	1.508,89	1.559,00	↓

### **PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)**



A member of 

### **Riwayat Singkat**

Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan guna meningkatkan peran Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

### **Brief History**

Jamkrindo was established in the mid 1970s as the Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK). At that time the development of cooperatives was still lagging behind compared to state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to a Public Company for Cooperative Financial Development (Perum PKK) through Government Regulation no. 51 of 1981 dated December 23, 1981 which was enhanced by Government Regulation no. 27 of 1985 dated May 31, 1985 concerning the Public Company for the Development of Cooperative Finance.

In 2018, the Government issued Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Public Company (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia, this regulation was issued to increase Jamkrindo's role in the national guarantee industry as an effort to succeed in the Government's policies and programs in the field of economy and national development. The government views that Jamkrindo needs to develop its business by increasing the Company's business activities in accordance with current developments and needs, to support the Government's policies and programs in the field of economy and national development.



Pada tahun 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No. 11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484. AH..01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian di 9 April 2020, Akta Pendirian PT Jamkrindo (Persero) No. 25 tanggal 24 Februari 2020 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo.

### Keunggulan

Perusahaan memiliki tujuan untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan.

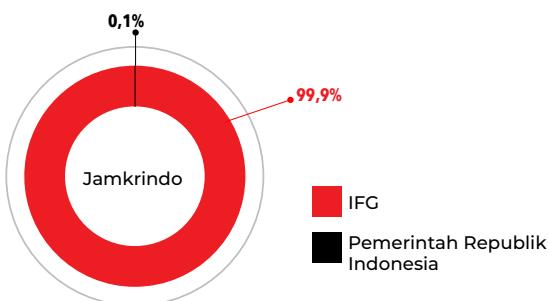
In 2020 the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, officially changed the legal entity of the Public Company of Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo into a Limited Liability Company through Government Regulation No. 11/2020 which was promulgated on February 17, 2020. This decision was confirmed by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484. AH..01.01 of 2020 concerning the Ratification of the Establishment of the Legal Entity of The Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia was signed at the Jakarta on February 24, 2020.

Then on April 9, 2020, the Deed of Establishment of PT Jamkrindo (Persero) No. 25 dated February 24, 2020 underwent an amendment with the issuance of the Deed of the Shareholders' Resolution of the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia concerning Amendments to the Articles of Association No. 2 on April 9, 2020, which changed the status and name of Jamkrindo to PT Jamkrindo.

### Excellence

The Company's objective is to carry out Guarantee business activities for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Guarantee for Cooperatives, for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System, and other guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of corporate governance.

**Kepemilikan Saham Jamkrindo per 31 Desember 2020**  
Jamkrindo Share Ownership as of December 31, 2020



**Manajemen Kunci Jamkrindo per 31 Desember 2020**  
**Jamkrindo Key Management as of December 31, 2020**

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Komisaris Utama President Commissioner	Sri Mulyanto
---	--------------

Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diah Natalisa</li> <li>• Noor Ida Khomsiyati</li> <li>• Ari Wahyuni</li> <li>• M. Muchlas Rowi</li> </ul>
---------------------------	--

**Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama President Director	Putrama Wahyu Setyawan
--------------------------------------	------------------------

Direktur Operasional dan Jaringan merangkap Direktur Bisnis Penjaminan Director of Operations and Network concurrently Director of Guarantee Business	Kadar Wisnuwarman
--	-------------------

Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan Director of HR, General Affairs, and Compliance	Sulis Usdoko
---	--------------

Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu
--	----------------

**Kinerja Keuangan Jamkrindo 2020-2019**  
**Jamkrindo's Financial Performance 2020-2019**

	<b>2020 (Rp-miliar)/In IDR billion</b>	<b>2019*</b> (Rp-miliar)/In IDR billion)	
Pendapatan IJP Bruto Gross Guarantee Fee Revenue	2.826,52	2.313,61	↑
Pendapatan IJP Neto Net Guarantee Fee Revenue	2.633,39	2.152,07	↑
Beban Klaim Claim Expenses	1.830,40	1.737,95	↑
Pendapatan Subrogasi Subrogation Revenue	(518,76)	(504,80)	↑
Penjaminan Bersih Net Guarantee	802,99	414,11	↑
Pendapatan Investasi Investment Revenue	799,21	782,81	↑
Beban Usaha Operating Expenses	(903,67)	(991,75)	↓
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Revenue (Expenses)	51,13	24,61	↑
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	722,46	181,63	↑
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Profit for the Year	456,13	198,91	↑

\*disajikan kembali/restatement



## PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

## PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)



### Riwayat Singkat

PT Asuransi Kredit Indonesia, selanjutnya disebut "Askrindo" didirikan pada tanggal 6 April 1971, sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit dengan pemegang saham Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Maksud dan tujuan didirikannya Askrindo adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke sistem perkreditan perbankan, agar UMKM dapat lebih memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Dalam perjalannya, Askrindo telah mengalami beberapa kali perubahan status kepemilikan saham, di mana pada awal pendiriannya pemegang saham Askrindo adalah Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia, kemudian sejak tahun 2010, Bank Indonesia telah melepaskan seluruh sahamnya kepada Pemerintah RI, sehingga Pemegang Saham menjadi hanya Departemen Keuangan RI. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Askrindo bergabung dengan Holding BUMN asuransi dan penjaminan, atau Indonesia Financial Group (IFG) di mana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia IFG bertindak sebagai *holding*. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa

### Brief History

PT Asuransi Kredit Indonesia, hereinafter referred to as "Askrindo", was established on April 6, 1971, as a follow-up to the issuance of Government Regulation (PP) No. 1 of 1971 dated January 11, 1971 concerning the State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Company in the Credit Insurance Sector with Bank Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia as shareholders. The goals and objectives of the establishment of Askrindo is to provide solutions to the problems faced by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in gaining access to the banking credit system, so that MSMEs can have a greater role in supporting national economic growth.

In its journey, Askrindo has undergone several changes in the status of share ownership, whereas at the beginning of its establishment, the shareholders of Askrindo were Bank Indonesia and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. However, since 2010, Bank Indonesia has released all of its shares to the Government of Indonesia, so that the sole Shareholder was the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Further, on March 31, 2020, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN), PT Askrindo joined the SOEs Holding on Insurance and Guarantee, or the Indonesia Financial Group (IFG) whereas PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) acts as the parent holding company. This is in line with the issuance of Government Regulation (PP) No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 regarding the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia which originated from the transfer of all B Series shares owned by the Republic of Indonesia to the Company (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa

Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

### Keunggulan

Askrindo memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang asuransi dengan menjalankan usaha asuransi kerugian, termasuk dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

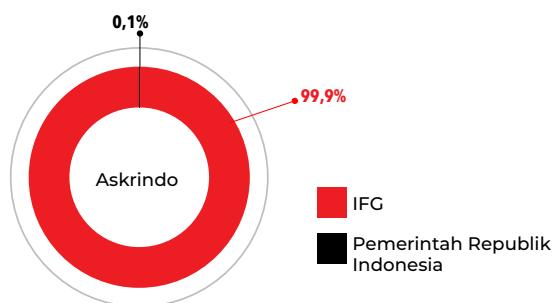
Indonesia, the Limited Liability Company (Persero) PT Asuransi Jasa Raharja, and the Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.

### Excellence

Askrindo has the intent and purpose to conduct business in the insurance sector by conducting a loss insurance business which includes sharia principles as well as the optimization of the Company resources to produce high quality and highly competitive services to gain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Company principle.

### Kepemilikan Saham Askindo per 31 Desember 2020

Askindo Share Ownership as of December 31, 2020



### Manajemen Kunci Askindo per 31 Desember 2020

Askindo Key Management as of December 31, 2020

#### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Widodo Ekatjahjana
Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agustina Murbaningsih</li> <li>• Encep Sudarwan</li> <li>• M. Khoerur Roziqin</li> </ul>
Komisaris Independen Independent Commissioner	Iskandar Simorangkir

#### Direksi/Board of Directors

Direktur Utama President Director	Dedi Sunardi
Direktur Kepatuhan dan SDM Director of Compliance and HR	Kun Wahyu Wardana
Direktur Keuangan Director of Finance	Liston Simanjuntak
Direktur Operasional Komersil Director of Commercial Operations	Dwi Agus Sumarsono



**Manajemen Kunci Askrindo per 31 Desember 2020**  
Askrindo Key Management as of December 31, 2020

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Direktur Operasional Ritel Director of Retail Operations	Anton Fadjar A. Siregar
Direktur Teknik Director of Technic	Vincentius Wilianto

**Kinerja Keuangan Askrindo 2020-2019**  
Askrindo's Financial Performance 2020-2019

	2020 (Rp-miliar/ln IDR billion)	2019* (Rp-miliar/ln IDR billion)	
Premi Bruto Gross Premium	6.356,55	5.896,37	↑
Pendapatan Premi-Bersih Premium Revenue-Net	8.824,16	8.071,83	↑
Pendapatan Underwriting Underwriting Revenue	1.551,10	1.636,56	↓
Pendapatan Investasi-Bersih Investment Revenue-Net	831,26	856,54	↓
Beban Usaha Operating Expenses	(981,40)	(1.325,78)	↓
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	948,49	575,14	↑
Laba komprehensif tahun berjalan Comprehensive Profit for the Year	703,53	277,84	↑

\*disajikan kembali/restatement

**PT Asuransi Jasa Indonesia  
(Jasindo)**

**PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)**



A member of **IFG**

**Riwayat Singkat**

PT Asuransi Jasa Indonesia, yang selanjutnya disebut juga dengan Asuransi Jasindo yang bergerak di bidang jasa asuransi umum, merupakan anak perusahaan dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan status baru yang berlaku sejak tahun 2020 tersebut, walau masih merupakan bagian dari BUMN dan masih terdapat kepemilikan negara, Asuransi Jasindo tidak lagi menggunakan kata "Persero" sebagai nama resmi perusahaan.

**Brief History**

PT Asuransi Jasa Indonesia, hereinafter referred to as Asuransi Jasindo, which is engaged in general insurance services, is a subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) which is a State-Owned Enterprise (BUMN). With the new status in effect since 2020, even though it is still part of the SOE and still has state ownership, Asuransi Jasindo no longer uses the word "Persero" in its official name.



Asuransi Jasindo merupakan hasil nasionalisasi terhadap dua perusahaan asuransi, yaitu NV Assurantie Maatschappij de Nederlander dan Bloom Vander. Kebijakan nasionalisasi terhadap kedua perusahaan asuransi tersebut diikuti dengan perubahan nama keduanya menjadi PT Asuransi Bendasraya yang bergerak di bidang Asuransi Umum dalam Rupiah dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) yang bergerak pada bidang Asuransi Umum dalam valuta asing. Kehadiran PT Asuransi Bendasraya bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat dan memperkokoh keamanan serta perekonomian negara.

Dalam perkembangannya, melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 764/MK/IV/12/1972 tertanggal 9 Desember 1972, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan *merger* antara PT Asuransi Bendasraya dan PT Umum Internasional Underwriters (UIU) menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Asuransi Umum. Penggabungan disahkan melalui Akta Notaris Mohamad Ali No.1 tanggal 2 Juni 1973.

Selanjutnya pada tahun 2020, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan melakukan transformasi *brand* menjadi Indonesia Financial Group (IFG).

### **Keunggulan**

Asuransi Jasindo melakukan usaha di bidang asuransi kerugian dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Asuransi Jasindo is the result of the nationalization of two insurance companies, namely NV Assurantie Maatschappij de Nederlander and Bloom Vander. The nationalization policy of the two insurance companies was followed by the change of their names to PT Asuransi Bendasraya which operates in General Insurance in Indonesian Rupiah, and PT Umum Internasional Underwriters (UIU) which operates in General Insurance in foreign currencies. The presence of PT Asuransi Bendasraya aims to provide maximum benefits to the community and strengthen security and the country's economy.

In its development, through the Decree of the Minister of Finance No. 764/MK/IV/12/1972 dated December 9, 1972, the Indonesian government decided to merge PT Asuransi Bendasraya and PT Umum Internasional Underwriters (UIU) to become PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN) which operates in the general insurance business. The merger was legalized through Mohamad Ali's Notary Deed No. 1 on 2 June 1973.

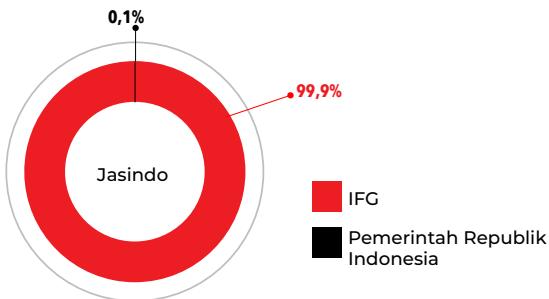
Further, in 2020, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOES undertook a brand transformation into the Indonesia Financial Group (IFG).

### **Excellence**

Asuransi Jasindo conducts business in the field of loss insurance and the like, in accordance with prevailing laws and regulations, as well as optimizes the use of Company resources to produce high quality and highly competitive services to gain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies. ..



**Kepemilikan Saham Jasindo per 31 Desember 2020**  
**Jasindo Share Ownership as of December 31, 2020**



**Manajemen Kunci Jasindo per 31 Desember 2020**  
**Jasindo Key Management as of December 31, 2020**

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Komisaris Utama President Commissioner	Ngalim Sawego
Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ahmad Fuad Rahmany</li> <li>• Yulian Noor</li> </ul>
Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imam Bustomi</li> <li>• Agustina Arumsari</li> </ul>

**Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama President Director	Didit Mehta Pariadi
Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment	Bayu Rafisukmawan
Direktur Operasional Director of Operations	Dodi Susanto
Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development	Diwe Novara
Direktur Bisnis Strategis Director of Strategic Business	Syah Amondaris
Direktur Sumber Daya Manusia & Umum Director of Human Resources & General Affairs	Linggarsari Suharso

**Kinerja Keuangan Jasindo 2020-2019**  
**Jasindo's Financial Performance 2020-2019**

	2020 (Rp-miliar/ln IDR billion)	2019* (Rp-miliar/ln IDR billion)
Pendapatan Premi Bersih Net Premium Income	2.410,98	2.333,31
Beban Underwriting Underwriting Expenses	(2.260,35)	(2.392,13)
Hasil Underwriting Underwriting Income	150,63	(58,82)
Hasil Investasi Investment Income	211,18	196,91
Beban Usaha Operating Expenses	(578,72)	(300,83)
Laba Usaha Operating Profit	(216,90)	(162,74)



**Kinerja Keuangan Jasindo 2020-2019**  
**Jasindo's Financial Performance 2020-2019**

	<b>2020 (Rp-miliar/in IDR billion)</b>	<b>2019*</b> (Rp-miliar/in IDR billion)	
Hasil (Beban) Lain-lain Other Income (Expense)	125,66	8,06	↑
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	(91,32)	(154,68)	↑
Pajak Penghasilan Income Tax	(161,60)	36,20	↑
Laba Setelah Pajak Profit After Tax	(252,93)	(118,47)	↓

\*disajikan kembali/restatement

**PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)**

**PT Bahana TCW Investment Management (BTIM)**



**Riwayat Singkat**

Sebagai lini bisnis IFG di bidang manajemen investasi, BTIM memperoleh izin operasi sebagai perusahaan manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) tertanggal 21 Juni 1994.

BTIM merupakan perusahaan patungan antara IFG (dengan kepemilikan saham 60%) dengan TCW Capital Investment Company LLC (dengan kepemilikan saham 40%), salah satu lembaga keuangan manajer investasi terkemuka di Amerika Serikat.

Paska terjadinya *massive redemption* pada industri Reksa Dana pada tahun 2005, sejak saat itu sampai dengan akhir tahun 2020, industri reksa dana semakin bergairah dengan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sehingga dana kelolaan BTIM mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp51,40 triliun.

**Brief History**

As IFG's line of business in investment management, BTIM obtained an operating license as an investment manager from the Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (Bapepam and LK) on June 21, 1994.

BTIM is a joint venture company of IFG (with 60% shareholding) and TCW Capital Investment Company LLC (with 40% shareholding), one of the leading investment management financial institutions in the United States.

After the massive redemption of the Mutual Funds industry in 2005, until the end of 2020, the mutual fund industry is getting more excited by the recovery of public confidence in the capital market, so that BTIM's managed funds have increased to IDR51.40 trillion.



Sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, BTIM telah dipercaya sebagai Manajer Investasi untuk mengelola Asian Bond Fund yang dihimpun oleh Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), yang merupakan lembaga kerja sama bank-bank sentral dinegara-negara Asia Timur dan Pasifik.

### **Keunggulan**

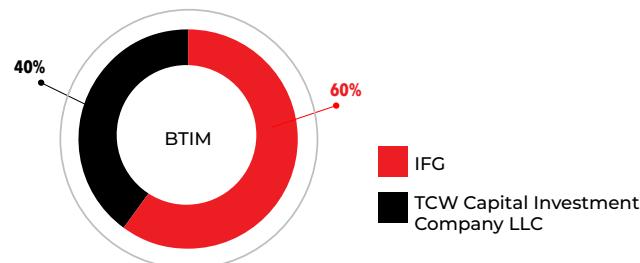
Seperti di tahun-tahun sebelumnya, BTIM dipercaya dalam pengelolaan investasi dari beberapa institusi besar multinasional, yang mana hal ini menunjukkan pengakuan pasar dan investor atas reputasi dan kinerja BTIM sebagai manajer investasi dalam mengelola investasi jangka panjang. Kepercayaan internasional yang diemban BTIM direfleksikan oleh mandat dari Executives Meeting for East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) untuk mengelola sebagian dana bank-bank sentral Asia Pasifik. Sejak 2005 BTIM adalah satu-satunya Manajer Investasi yang dipercaya untuk mengelola Reksa Dana Asian Bond Fund-Indonesia Bond Index Fund (ABF-IBI Fund), serta menjadi pelopor dalam industri Reksa Dana sebagai Manajer Investasi pertama yang mampu menciptakan inovasi produk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis portofolio Obligasi Pemerintah RI yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode efek R-ABFII (Unit Penyertaan Reksa Dana ABF yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia). Pada tahun 2008, BTIM sebagai manajer investasi pertama yang mampu menerbitkan produk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis portofolio efek bersifat ekuitas pada Perseroan Tertutup sektor infrastruktur yang bergerak di bidang Pelabuhan Umum, dan sebagai Manajer Investasi pertama di Indonesia yang memiliki fitur produk investasi berbasis endowment fund.

Since 2005 until present, BTIM has been trusted as the Investment Management Unit to manage the Asian Bond Fund which was collected by the Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), which is a cooperative institution for central banks in East Asia countries and the Pacific.

### **Excellence**

As in previous years, BTIM was trusted to manage investments from several large multinational institutions, which shows market and investor recognition of BTIM's reputation and performance as an investment management Institution in managing long-term investments. BTIM's international trust is reflected in the mandate of the Executives Meeting for East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) to manage some of the funds of Asia Pacific central banks. Since 2005, BTIM is the only Investment Management Institution which has been given trust to manage the Asian Bond Fund-Indonesia Bond Index Fund (ABF-IBI Fund), as well as being a pioneer in the Mutual Fund industry as the first Investment Management Institution capable of creating innovative Exchange Traded Fund (ETF) products based on a portfolio of Indonesian Government Bonds listed on the Indonesia Stock Exchange with the stock code R-ABFII ( Participation in ABF Mutual Funds Unit that can be traded on the Indonesia Stock Exchange). In 2008, BTIM became the first investment management Institution capable of issuing Limited Participation Mutual Funds (RDPT) products based on a portfolio of equity securities in a Private Company in the infrastructure sector engaged in Public Ports, and also became the first Investment Management Institution in Indonesia with endowment fund based investment product features.

**Kepemilikan Saham BTIM per 31 Desember 2020**  
BTIM's Share Ownership as of December 31, 2020





**Manajemen Kunci BTIM per 31 Desember 2020**  
**BTIM Key Management as of December 31, 2020**

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Komisaris Utama President Commissioner	Pantro Pander Silitonga
Komisaris Commissioner	Marc Irwin Stem
Komisaris Independen Independent Commissioner	Edgar Ekaputra

**Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama President Director	Rukmi Proborini
Direktur Riset & Investasi Alternatif Director of Research and Alternative Investment	Soni Kusumo Wibowo
Direktur Strategi Investasi & Makro Director of Macro and Investment Strategy	Budi Hikmat

**Kinerja Keuangan BTIM 2020-2019**  
**BTIM's Financial Performance 2020-2019**

	<b>2020 (Rp-miliar)</b>	<b>2019 (Rp-miliar)</b>	
Pendapatan usaha Operating Revenue	163,44	178,70	↓
Beban Usaha Operating Expenses	101,02	107,14	↓
Laba Usaha Operating Profit	62,42	71,56	↓
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih Other Revenue (Expenses) Bersih	4,43	(5,08)	↑
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	66,85	66,48	↑
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	50,83	50,58	↑



FUNGI PENUNJANG  
BISNIS

Business Supporting Function



ANALISIS DAN  
PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion  
and Analysis



TATA KELOLA  
PERUSAHAAN

Good Corporate Governance



TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

## PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)



### Riwayat Singkat

GNTU merupakan salah satu anak perusahaan IFG yang kegiatan usahanya terutama bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan dan penyewaan gedung-gedung atau bagian gedung-gedung untuk dipergunakan sebagai ruangan kantor, tempat usaha dan keperluan lainnya.

Usaha komersial GNTU dimulai sejak tanggal 1 Juni 1993 dengan didirikannya gedung Graha CIMB Niaga, sebuah gedung perkantoran yang terletak di kawasan perkantoran terkemuka, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman ("SCBD"), di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, dengan luas lantai 65.119 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 28 lantai dan 3 basement serta area yang disewakan (*rentable area*) seluas kurang lebih 32.247,24 m<sup>2</sup>.

### Keunggulan

Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, Manajemen GNTU berpedoman pada Sistem Manajemen Mutu (*The Quality Management System*) ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan (*The Environment Management System*) ISO 14001:2015, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). GNTU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti pertama di kawasan Jakarta Selatan yang menyandang sertifikat ISO 14001:2015 tersebut. GNTU memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 tersebut dari lembaga sertifikasi Internasional Lloyd's Register *Quality Assurance Limited*, serta mendapat akreditasi dari UKAS Quality Management dan KAN (Komite Akreditasi

## PT Grahaniaga Tatautama (GNTU)

### Brief History

GNTU is a subsidiary of IFG whose business activities are mainly engaged in the ownership, management and rental of buildings or parts of buildings to be used as office space, place of business and other purposes.

GNTU's commercial business began on June 1, 1993 with the establishment of the Graha CIMB Niaga building, an office building located in a leading office area, Sudirman Commercial Business District ("SCBD"), on Jl. General Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, with a floor area of 65,119 m<sup>2</sup> consisting of 28 floors and 3 basements and a rentable area of approximately 32,247.24 m<sup>2</sup>.

### Excellence

In conducting the daily operational activities, GNTU Management is guided by the Quality Management System ISO 9001:2015, The Environment Management System ISO 14001:2015, as well as the Occupational Health and Safety Management System (SMK3). GNTU is the first property company in the South Jakarta area to hold the ISO 14001:2015 certificate. GNTU obtained the ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certifications from the International Lloyd's Register Quality Assurance Limited certification body, and accreditation from UKAS Quality Management and KAN (National Accreditation Committee) of Quality System Certification Institute. GNTU also obtained Green Building Certification with Platinum predicate on

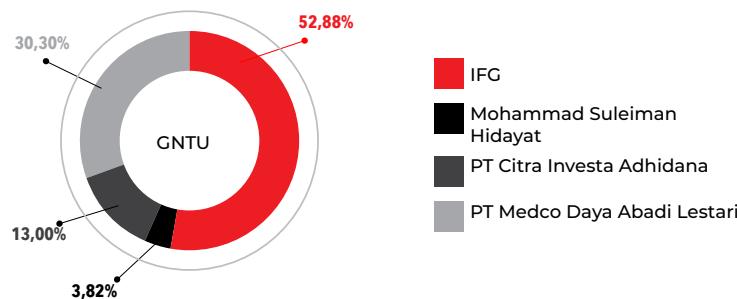


Nasional) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu. GNTU juga memperoleh Sertifikasi *Green Building* dengan predikat Platinum pada tanggal 13 Maret 2019 dan *Green Office* dengan predikat *Gold* pada tanggal 21 April 2016 dari Building and Construction Authority International (BCAI) Singapore.

March 13, 2019 and Green Office with Gold predicate on April 21, 2016 from Building and Construction Authority International (BCAI) Singapore.

### Kepemilikan Saham GNTU per 31 Desember 2020

GNTU's Share Ownership as of December 31, 2020



<b>Pemegang Saham</b> Shareholders	<b>Jumlah (Rp)</b> Total (IDR)		<b>Jumlah Lembar Saham</b> Number of Shares		<b>%</b>
	Seri A A Series	Seri B B Series	Seri A A Series	Seri B B Series	
IFG	23.014.062.500	183.750.000.000	4.468.750	8.750.000	52,88%
Mohammad Suleiman Hidayat	4.924.687.500		956.250		3,82%
PT Citra Investa Adhidana	16.737.500.000		3.250.000		13,00%
PT Medco Daya Abadi Lestari	39.011.250.000		7.575.000		30,30%
<b>Total</b>	<b>267.437.500.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>8.750.000</b>	<b>100%</b>

### Manajemen Kunci GNTU per 31 Desember 2020

GNTU Key Management as of December 31, 2020

#### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Rizal Ariansyah
Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dedi Sjahrir Panigoro</li> <li>• Adriansyah Hendarmin</li> <li>• Ariful Yaqin</li> </ul>

#### Direksi/Board of Directors

Direktur Utama President Director	Chairul Tri Hardinarno
--------------------------------------	------------------------



**Kinerja Keuangan GNTU 2020-2019**  
GNTU's Financial Performance 2020-2019

	2020 (Rp-miliar/In IDR billion)	2019 (Rp-miliar/In IDR billion)
Pendapatan Usaha Operating Revenue	157,80	184,18
Beban Operasional Operating Expenses	96,63	109,06
Laba Usaha Operating Profit	61,16	75,11
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	125,42	84,81
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	113,69	83,76

**PT Bahana Artha Ventura (BAV)**

**PT Bahana Artha Ventura (BAV)**



**Riwayat Singkat**

Pendirian BAV sangat terkait dengan penugasan awal Pemerintah kepada IFG untuk membina dan menggerakkan sektor UMKM. Sejalan dengan perkembangan bisnis IFG, penugasan tadi diserahkan kepada BAV dan menjadikan BAV sebagai ujung tombak IFG dalam pembiayaan dan pembinaan sektor UMKM di Indonesia.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk memperluas sebaran pergerakan sektor riil secara nasional, BAV telah mendirikan 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dengan mengajak mitra lokal dan beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia sebagai pemegang saham di masing-masing daerah untuk memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang dibinanya. Bermula dari hanya 7 (tujuh) Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) pada tahun 1994, BAV menargetkan untuk memiliki PMVD di setiap provinsi. Pada tahun 1998 target ini tercapai dengan memiliki PMVD di 27 propinsi. Saat ini, sejak ditutupnya kantor PMVD di Timor Timur pada tahun 1999 dan pelepasan PMVD NTT serta likuidasi PMVD Sumsel, pada akhirnya BAV memiliki 25 PMVD di 24 provinsi.

**Brief History**

The establishment of BAV is closely related to the Government's initial assignment to IFG to foster and mobilize the MSME sector. In line with IFG's business development, the assignment was handed over to BAV and made BAV as the spearhead of IFG in financing and fostering the MSME sectors in Indonesia.

To support government policies in encouraging regional economic growth and to expand the distribution of real sector movements nationally, BAV has established 27 Regional Venture Capital Companies (PMVD), spread across 26 provinces in Indonesia by inviting local partners and several leading companies in Indonesia as shareholders in each region to strengthen the network and expand the MSME basis which is fostered. Starting from only 7 (seven) Regional Venture Capital Companies (PMVD) in 1994, BAV targets to have PMVD in every province. In 1998 this target was achieved by having PMVD in 27 provinces. At present, since the closure of the PMVD office in East Timor in 1999 and the release of the PMVD in East Nusa Tenggara, and the liquidation of the South Sumatra PMVD, BAV only has 25 PMVDs in 24 provinces.

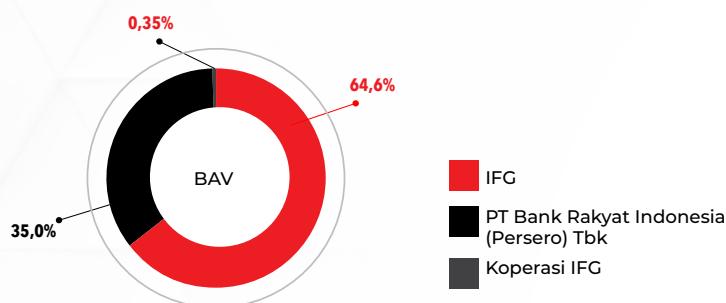
## Keunggulan

BAV saat ini adalah perusahaan modal ventura yang memiliki jaringan terluas di Indonesia. Oleh karena itu, BAV mampu menjangkau dan terbukti efektif untuk mengembangkan UMKM di hampir seluruh daerah di Indonesia, dengan produk pembiayaan pola bagi hasil, penyertaan saham dan obligasi konversi.

## Excellence

BAV is currently a venture capital company with the widest network in Indonesia. Therefore, BAV is able to reach out and has been proven effective in developing MSMEs in almost all regions in Indonesia, with profit-sharing financing products, equity participation, and convertible bonds.

### Kepemilikan Saham BAV per 31 Desember 2020 BAV's Share Ownership as of December 31, 2020



Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Jumlah Lembar Saham / Number of Shares	%
IFG	131.521.000.000	131.521	64,6%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	71.207.000.000	71.207	35,0%
Koperasi IFG IFG Cooperative	721.000.000	721	0,35%
<b>Total</b>	<b>203.449.000.000</b>	<b>203.449</b>	<b>100%</b>

### Manajemen Kunci BAV per 31 Desember 2020 BAV Key Management as of December 31, 2020

#### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Listiarini Dewajanti
Komisaris Commissioner	Pantro Pander Silitonga
Komisaris Independen Independent Commissioner	Hafiz Arief

#### Direksi/Board of Directors

Direktur Pembinaan Usaha merangkap Plt. Direktur Utama Director of Business Development concurrently Acting President Director	Agus Wicaksono
Direktur Keuangan dan Operasional merangkap Direktur Investasi dan Pembiayaan Director of Finance and Operations concurrently Director of Investment and Financing	Bagas Pebru Sadriadi



**Kinerja Keuangan BAV 2019-2020**  
BAV Financial Performance 2020-2019

	2020 (Rp-miliar/in IDR billion)	2019 (Rp-miliar/in IDR billion)	
Pendapatan Operasional Operational Revenue	191,80	215,24	<span style="color: red;">↓</span>
Beban Usaha Operating Expenses	203,63	201,72	<span style="color: green;">↑</span>
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(11,82)	13,51	<span style="color: red;">↓</span>
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih Other Revenue (Expenses) Bersih	11,79	7,96	<span style="color: green;">↑</span>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	(28,03)	21,48	<span style="color: red;">↓</span>
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	(2,47)	16,86	<span style="color: red;">↓</span>

**PT Bahana Sekuritas (BS)**

**PT Bahana Sekuritas (BS)**



**Riwayat Singkat**

BS memperoleh persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek pada tanggal 26 Juli 1989 dan kegiatan perantara pedagang efek pada tanggal 20 Februari 1992. Sejak saat itu BS secara konsisten memberikan komitmen dan kontribusi nyata dalam membantu upaya pemerintah untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia.

Selain aktif dalam perdagangan saham dan obligasi di pasar sekunder dan menjadi penjamin emisi efek berbagai perusahaan di Indonesia, BS juga berperan aktif dalam menangani proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta nasional guna membantu mereka menjadi perusahaan yang lebih sehat dan kuat, yang memiliki kemampuan untuk bersaing pada era globalisasi.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, BS memiliki visi menjadi perusahaan jasa Pasar Modal dan penasihat Keuangan Nasional yang Terkemuka di Indonesia melalui inovasi, keahlian, kepemimpinan, dan komitmen terhadap harapan pemangku kepentingan dan perkembangan

**Brief History**

BS obtained approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia to conduct activities as an underwriter on July 26, 1989 and securities trading intermediary activities on February 20, 1992. Since then, BS has consistently made commitments and real contributions in assisting the government's efforts to develop the capital market in Indonesia.

In addition to being active in trading stocks and bonds in the secondary market and being the underwriter of various companies in Indonesia, BS also performs an active role in handling the restructuring process of national state-owned and private companies to assist them become healthier and stronger companies, which have the ability to compete in the era of globalization.

In conducting the business activities, BS has a vision to become a leading Capital Market and National Financial advisory service company in Indonesia through innovation, expertise, leadership, and commitment to stakeholder expectations and the sustainable development of the capital market

berkesinambungan pasar modal di Indonesia. Visi ini diaktualisasikan melalui misi perusahaan yaitu untuk Menyediakan Solusi Jasa Pasar Modal dan penasihat Keuangan Yang Inovatif, Berkualitas, Aman dan Terpercaya untuk mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Di pasar saham, BS telah menangani berbagai transaksi yang menjadi *landmark* pasar modal Indonesia.

### Keunggulan

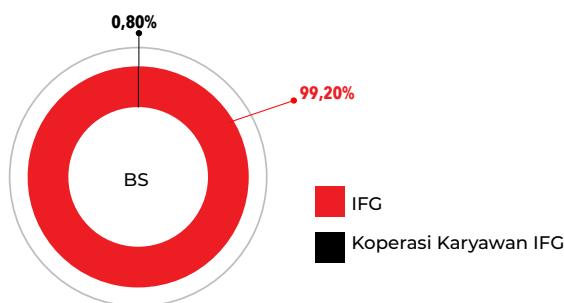
BS telah berhasil menunjukkan eksistensinya di pasar modal dan keuangan Indonesia, dengan menjadi salah satu perusahaan sekuritas terkemuka dan disegani di Indonesia. Pengakuan atas eksistensi dan peranan BS tidak saja berasal dari pelaku bisnis dalam negeri, tetapi juga diperoleh dari pelaku bisnis di dunia keuangan internasional. Berbagai penghargaan telah diterima BS dari sejumlah media maupun lembaga terkemuka baik nasional maupun internasional yang mana menegaskan posisi BS pada sektor industri keuangan Indonesia.

in Indonesia. This vision is actualized through the Company's mission, namely to provide Capital Market Service Solutions and Financial advisory which are Innovative, Quality, Safe and Reliable to support Indonesia's Economic Growth. In the stock market, BS has handled various transactions that have become landmarks of the Indonesian capital market.

### Excellence

BS has successfully demonstrated its presence in the Indonesian capital and financial markets, by becoming one of the leading and respected securities company in Indonesia. Recognition of the existence and role of BS does not only come from domestic business actors, but also from business actors in the international financial sector. BS has received various awards from a number of media and leading institutions, both national and international, which confirms BS' position in the Indonesian financial industry sector.

### Kepemilikan Saham BS per 31 Desember 2020 BS' Share Ownership as of December 31, 2020



### Manajemen Kunci BS per 31 Desember 2020 BS Key Management as of December 31, 2020

#### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Robertus Billitea
---	-------------------

Komisaris Independen Independent Commissioner	Hari Gursida
--	--------------

#### Direksi/Board of Directors

Direktur Utama President Director	Edward Parlindungan Lubis
Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelwin Aldriansyah</li> <li>• Susilo Zulfachmi</li> <li>• Ermawati Agustina</li> </ul>



**Kinerja Keuangan BS 2020-2019**  
BS Financial Performance 2020-2019

	2020 (Rp-miliar/in IDR billion)	2019 (Rp-miliar/in IDR billion)
Pendapatan Usaha Operating Revenue	(154,28)	163,54
Beban Usaha Operating Expenses	178,21	162,17
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(23,93)	1,37
Pendapatan (Beban) lain-lain Other Revenue (Expenses)	(6,37)	0,98
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	(30,56)	0,56

**PT Bahana Kapital Investa (BKI)**

**PT Bahana Kapital Investa (BKI)**



**Riwayat Singkat**

BKI merupakan anak perusahaan IFG yang bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasihat keuangan (*advisory*). BKI melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal baik secara langsung maupun melalui *instrument* keuangan lainnya pada perusahaan dan menyediakan layanan jasa konsultasi kepada perusahaan-perusahaan seperti penggabungan usaha dan peleburan usaha (*merger & acquisition*), studi kelayakan (*feasibility study*), strategi perusahaan (*corporate strategy*), maupun perencanaan pengembangan bisnis (*corporate planning*).

**Keunggulan**

Pada tahun 2020, dalam rangka mendukung pencapaian visi BKI sebagai perusahaan investasi dan *advisory* yang menjadi solusi bagi kebutuhan investor dan investee, pada tahun 2020 BKI mendukung IFG sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan dalam melakukan ekspansi bisnis asuransi jiwa melalui pendirian PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life"). Pada tanggal 22 Oktober 2020, BKI berpartisipasi dalam penempatan modal sebanyak 1 lembar saham atau sebesar 0,0007% dari total saham IFG Life.

**Brief History**

BKI is a subsidiary of BPUI which is engaged in investment and financial advisory services and has only been reactivated since June 2018. BKI invests in the form of equity participation either directly or through other financial instruments in the companies and provides consulting services to companies such as on business mergers and acquisitions, feasibility studies, corporate strategy, as well as business development planning (corporate planning).

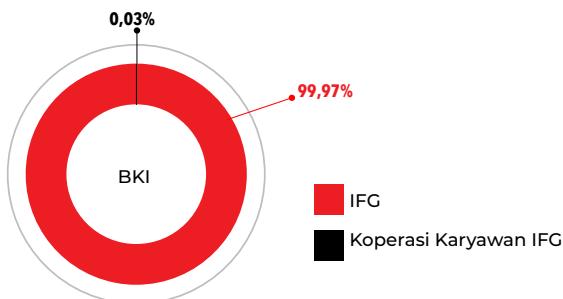
**Excellence**

In 2020, to support the achievement of BKI's vision as an investment and advisory company which becomes a solution to the needs of investors and investees, BKI supports BPUI as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs in expanding the life insurance business through the establishment of PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life"). On October 22, 2020, BKI participated in the placement of 1 share or 0.0007% of the total shares of IFG Life.



### **Kepemilikan Saham BKI per 31 Desember 2020**

BKI's Share Ownership as of December 31, 2020



### **Manajemen Kunci BKI per 31 Desember 2020**

BKI Key Management as of December 31, 2020

#### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris  
Commissioner Rizal Ariansyah

#### Direksi/Board of Directors

Direktur  
Director Syahruddin Ikhsan Dongoran

### **Kinerja Keuangan BKI 2020-2019**

BKI Financial Performance 2020-2019

	<b>2020</b> <b>(Rp-miliar/in IDR billion)</b>	<b>2019</b> <b>(Rp-miliar/in IDR billion)</b>	
Pendapatan Usaha Operating Revenue	13,76	19,77	↓
Beban Operasional Operating Expenses	11,86	13,29	↓
Laba Usaha Operating Profit	1,89	6,48	↓
Beban lain-lain bersih Other Expenses - Net	0,85	(1,22)	↓
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	1,03	5,28	↓
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	1,56	5,10	↓



## PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)

## PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)



### Riwayat Singkat

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) didirikan pada tanggal 22 Oktober 2020 melalui Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris Hadijah, S.H. IFG Life menjadi bagian dari IFG sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa, Untuk memperluas cakupan bisnis IFG dalam memenuhi seluruh kebutuhan asuransi dan penjaminan di Indonesia, IFG Life diharapkan dapat menjadi perusahaan yang besar dan *sustain* terutama di sektor asuransi jiwa.

IFG Life berdiri sebagai perusahaan asuransi perlindungan (jiwa dan kesehatan) untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN *holding* asuransi dan penjaminan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif, yang dilandasi oleh tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah.

IFG Life mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 07 April 2021.

### Keunggulan

IFG Life berdiri sebagai Perusahaan Asuransi Perlindungan (Jiwa dan Kesehatan) untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN *holding* Asuransi dan Penjaminan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat, dan komprehensif, yang dilandasi oleh Tata Kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi dapat diberikan secara maksimal kepada nasabah.

### Brief History

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) was established on October 22, 2020 through the Deed of Establishment of a Limited Liability Company by Notary Hadijah, S.H. IFG Life is a subsidiary of IFG which engaged in life insurance. To expand IFG's business coverage in meeting all insurance and guarantee needs in Indonesia, IFG Life is expected to become a large and sustainable company, especially in the life insurance sector.

IFG Life was established as a protection insurance company (for life and health) to complement and strengthen the IFG's ecosystem as a Holding Company for Insurance and Guarantee SOEs that has a strategic position in developing maximum, healthy, and comprehensive protection insurance products and services, which are based on good governance and strong and prudent risk management, as well as optimizing the use of technology to expand service access so that maximum protection services can be provided to customers.

IFG Life obtained an operational permit from the Financial Services Authority (OJK) on April 7, 2021.

### Excellence

IFG Life was established as a Protective Insurance Company (of Life and Health) to complement and strengthen the IFG ecosystem as a Holding Company of Insurance and Guarantee SOE which has a strategic position in developing maximum, healthy, and comprehensive protective insurance products and services, which are based on good governance and strong and prudent risk management, as well as optimizing the use of technology to expand service access so that protective services can be provided to the maximum for customers.



**Kepemilikan Saham IFG Life per 31 Desember 2020**  
**IFG Life's Share Ownership as of December 31, 2020**

- |   |  |
|---|--|
| 1. IFG: 149.999 lembar saham. masing-masing per lembar saham senilai Rp1.000.000<br>2. PT BKI: 1 (satu) Saham | 1. IFG : 149,999 shares. each per share worth IDR 1,000,000<br>2. PT BKI : 1 (one) Share |
|---|--|

**Manajemen Kunci IFG Life per 31 Desember 2020**  
**IFG Life Key Management as of December 31, 2020**

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Komisaris Utama President Commissioner	Pantro Pander Silitonga
---	-------------------------

Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabam Hutajulu</li> <li>• Yasril Rasyid</li> </ul>
--	---

**Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama President Director	Andy Samuel
--------------------------------------	-------------

Direktur Keuangan & Operasional Director of Finance & Operations	Yusman Dedy Kusuma
---	--------------------

Direktur Kepatuhan, SDM & TI Director of Compliance, HR & IT	Eli Wijanti
---	-------------

**Kinerja Keuangan IFG Life 2020-2019**  
**IFG Life Financial Performance 2020-2019**

	<b>2020 (Rp-miliar/In IDR billion)</b>	<b>2019 (Rp-miliar/In IDR billion)</b>
Jumlah Pendapatan Total Revenue	332,8	-
Jumlah Beban Total Expenses	608,6	-
Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits	2,6	-
Rugi Bersih Periode Berjalan Net Loss for the Period	273,2	-
Jumlah Komprehensif Periode Berjalan Total Comprehensive of the Period	273,2	-



## PT Bahana Mitra Investa (BMI)

### Riwayat Singkat

PT Bahana Mitra Investa ("BMI") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 14, tanggal 15 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Sari Bhirawati, S.H., pada waktu itu pengganti dari Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2062.HT.01.01 tanggal 23 Maret 1998. Anggaran Dasar BMI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bahana Mitra Investa No.2 tanggal 14 Juni 2019 dibuat dihadapan Hengky Antolis, S.H, MKn, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU- 0031361.AH.01.02 tahun 2019. BMI memulai operasinya sejak 15 Mei 1997. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, bisnis BMI adalah untuk memberikan jasa keuangan dan non-keuangan dalam bidang Investasi.

### Keunggulan

BMI sampai dengan akhir tahun 2020 belum melakukan kegiatan usaha, dana yang ada hanya didepositokan ke Bank.

## PT Bahana Mitra Investa (BMI)

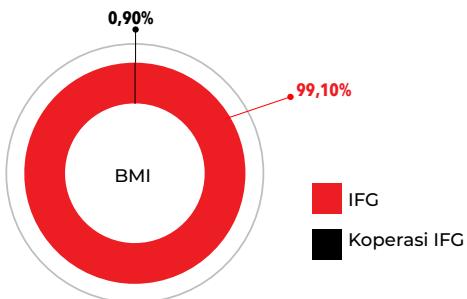
### Brief History

PT Bahana Mitra Investa ("BMI") was established based on Notarial Deed No. 14, dated May 15, 1997 which was drawn up before Notary Sari Bhirawati, S.H., at that time a substitute for Zacharias Omawele, S.H., a Notary in Jakarta, whose deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. C2-2062.HT.01.01 dated March 23, 1998. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently with the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Bahana Mitra Investa No.2 dated June 14, 2019 which was drawn up before Hengky Antolis, SH, MKn, a Notary in Jakarta , whose deed has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights through Decree No. AHU-0031361.AH.01.02 in 2019. BMI started its operations on May 15, 1997. In accordance with the Company's Articles of Association, BMI's business is to provide financial and non-financial services in the investment sector.

### Excellence

Until the end of 2020, BMI did not conduct business activities, the existing funds were only deposited in the Bank.

**Kepemilikan Saham BMI per 31 Desember 2020**  
BMI's Share Ownership as of December 31, 2020





**Manajemen Kunci BMI per 31 Desember 2020**  
**BMI's Key Management as of December 31, 2020**

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners**

Komisaris Utama  
President Commissioner

Robertus Bilitea

**Direksi/Board of Directors**

Direktur Utama  
President Director

Rianto Dwiatmodjo

**Kinerja Keuangan BMI 2020-2019**  
**BMI Financial Performance 2020-2019**

	<b>2020</b> <b>(Rp-miliar/In IDR billion)</b>	<b>2019</b> <b>(Rp-miliar/In IDR billion)</b>	
Pendapatan Operasional Operating Revenue	-	-	-
Beban Usaha Operating Expenses	(643,58)	(722,20)	↓
Pendapatan Non Operasional Bersih Non-Operating Revenue - Net	142,30	207,32	↓
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax	(501,28)	(514,87)	↓
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the year	(501,28)	(514,87)	↓



## ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, JARINGAN KAWASAN, SERTA INFORMASI TENTANG KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

ADDRESS OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATE ENTITIES, REGIONAL NETWORKS, AND INFORMATION ABOUT BRANCH OFFICES AND REPRESENTATIVE OFFICES

### KANTOR PUSAT/HEADQUARTERS

#### **Graha CIMB Niaga, Lantai 18**

Jl. Jendral Sudirman Kav. 58  
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190  
Telp. : +62 21 2505080  
Surel: cs@ifg.id  
Situs web: [www.ifg.id](http://www.ifg.id)

### ALAMAT ENTITAS ANAK/ADDRESS OF SUBSIDIARIES

#### **PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-2, Kuningan, Jakarta 12920  
Telp: +6281210500500  
Fax: +62 21 522084  
Surel: pusat@jasaraharja.co.id  
Web: [www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

#### **PT Jaminan Kredit Indonesia**

Gedung Jamkrindo  
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar  
Kemayoran,  
Jakarta Pusat 10610,  
Telp: +62 21 6540335  
Surel: contact@jamkrindo.co.id  
Web: [www.jamkrindo.co.id](http://www.jamkrindo.co.id)

#### **PT Asuransi Kredit Indonesia**

Jl. Angkasa Blok B-9, Kav. B Kota Baru Bandar  
Kemayoran  
Jakarta 10610  
Telp: +62 21 6546471-72  
Fax: +62 21 6546483-84  
Surel: askrindo@askrindo.co.id  
Web: [www.askrindo.co.id](http://www.askrindo.co.id)

#### **PT Asuransi Jasa Indonesia**

Mulia Business Park  
Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 58-60, Jakarta 12780  
Telp: +62 21 7994508, 7987908  
Surel: contactcenter@asuransijasindo.co.id  
Web: [www.jasindo.co.id](http://www.jasindo.co.id)

#### **PT Bahana TCW Investment Management**

Graha CIMB Niaga, Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190-Indonesia  
Telp: +62 21 250 5585  
Surel: support.bahanatcw@bahana.co.id  
Web: [www.link.bahanatcw.com](http://www.link.bahanatcw.com)

#### **PT Grahaniaga Tatautama**

Graha CIMB Niaga, Lantai B1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 Indonesia  
Telp: +62 21 2505250  
Fax: +62 21 2505150  
Web: [www.grahaniaga.co.id](http://www.grahaniaga.co.id)

#### **PT Bahana Artha Ventura**

Gedung Wisma Prima Lantai 2  
JL. Kapten Tendean No. 34 Jakarta Selatan 12790  
Telp: +62 21 7918 2688  
Fax: +62 21 7918 2687  
Web: [www.bahanaventura.com](http://www.bahanaventura.com)

#### **PT Bahana Sekuritas**

Graha CIMB Niaga, Lantai 19  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia  
Telp: +62 21 250 5678  
Fax: +62 21 250 5087  
Surel: cs@bahana.co.id  
Web: [www.bahanasekuritas.id](http://www.bahanasekuritas.id)

#### **PT Bahana Kapital Investa**

Graha CIMB Niaga, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190-Indonesia  
Telp: +62 21 2505080  
Surel: adminbki@bahana.co.id  
Web: [www.bahanakapitalinvesta.id](http://www.bahanakapitalinvesta.id)

#### **PT Asuransi Jiwa IFG**

Graha CIMB Niaga Lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta – 12190  
Telp: +62 21 1500 176  
Surel: customer\_care@ifg-life.id  
Web: [www.ifg-life.id](http://www.ifg-life.id)



## STRUKTUR GRUP IFG

IFG GROUP STRUCTURE



Produk Keuangan dan Pasar Modal Manajemen Aset  
Sekuritas dan Investasi  
Financial Products and Capital Market of Securities  
and Investment Asset Management



Manajemen Investasi  
Investment Management  
**60,0%**



Investasi  
Investment  
**99,9%**



Penjaminan dan  
Perdagangan  
Guarantee and Trade  
**99,2%**



Model Ventura  
Venture Model  
**64,6%**



Manajemen Properti  
Property Management  
**52,8%**

Asuransi Umum dan Penjaminan  
General Insurance and Guarantee



Asuransi Sosial  
Social Insurance



Penjaminan  
Kredit, Termasuk  
Penjaminan KUR  
Credit Guarantee,  
Including KUR  
Guarantee  
**99,99%**



Asuransi Umum  
Tersusuk  
Penjaminan KUR  
General Insurance,  
Including KUR  
Guarantee  
**99,99%**



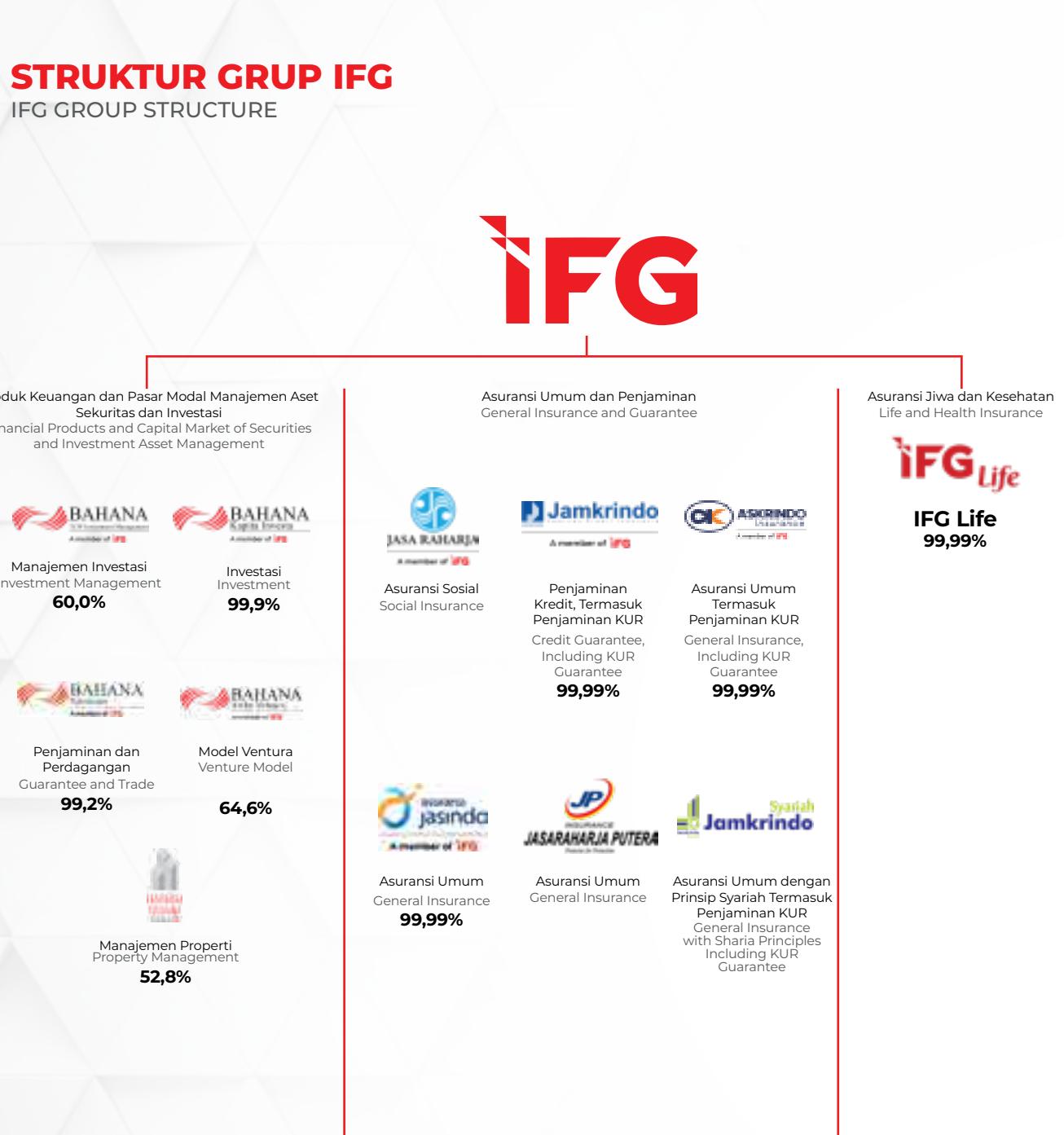
Asuransi Umum  
General Insurance  
**99,99%**



Asuransi Umum  
General Insurance



Asuransi Umum dengan  
Prinsip Syariah Tersusuk  
Penjaminan KUR  
General Insurance  
with Sharia Principles  
Including KUR  
Guarantee





## KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perusahaan belum melakukan perdagangan saham kepada publik dan pencatatan saham di bursa efek baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham mencakup tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan nama bursa di mana saham dicatatkan.

As of December 31, 2020, the Company has not traded shares to the public and listed shares on stock exchanges, both in Indonesia and abroad. Therefore, there is no information related to stock trading including the year of issuance of shares, number of shares, nominal value of shares, and share offering price for each corporate action; number of registered shares after each corporate action; and the name of the exchange in which the shares are listed.

## KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak menerbitkan efek seperti obligasi, sukuk, obligasi konversi atau efek lainnya di bursa efek baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

Until the end of 2020, the Company did not issue securities such as bonds, sukuk, convertible bonds or other securities on stock exchanges, both in Indonesia and abroad. Accordingly, there is no information regarding the names of other securities, year of issuance of other securities, interest rates/returns on other securities, and maturity dates of other securities; value of other securities offerings; the name of the exchange in which other securities are listed; and effect rating.

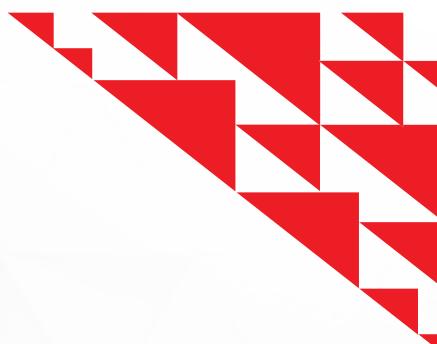


## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

**Daftar Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan**  
 List of the Company's Supporting Institutions and Professions

Nama dan Alamat Name and Address	Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Services	Biaya Fee	Periode Penugasan Assignment Period
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm  Alamat: WTC3, Floors 33-43 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, 12920 Indonesia Telp: 021-50992901/31192905 Address: WTC3, Floors 33-43 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, 12920 Indonesia Telephone: 021-50992901/31192905	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Beserta Entitas Anak Perusahaan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020  Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its Subsidiaries and Annual Report on the Implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) for Fiscal Year 2020	Rp2.547.000.000	30 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2022 December 30, 2020 to January 13, 2022
Pemeringkat Efek Securities Rating  Alamat: Panin Tower-Senayan City 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. (62-21) 727 82380 Fax. (62-21) 727 82370 Address: Panin Tower-Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Africa Lot.19 Jakarta 10270, Indonesia Tel. (62-21) 727 82380 Fax. (62-21) 727 82370	Memberikan pemeringkatan perusahaan, yaitu kajian menyeluruh atas kelayakan kredit Perusahaan atau kemampuan Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya. IFG berhasil mendapatkan rating korporasi idAAA. Prospek untuk peringkat Perusahaan adalah "stabil". Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo.  Provide a corporate rating, which is a comprehensive review of the Company's creditworthiness or the Company's ability to meet all of its financial obligations. IFG managed to get an idAAA corporate rating. The outlook for the corporate rating is "stable". An obligor rated idAAA is the highest rating given by Pefindo.	Rp192.500.000	16 Desember 2020 sampai dengan 1 Agustus 2021 December 16, 2020 to August 1, 2021





## INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE



Website resmi Perusahaan merupakan sarana pemenuhan keterbukaan informasi publik, yang memberikan informasi yang komunikatif dan up-to-date mengenai Perusahaan yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan dan publik sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, melalui website resmi Perusahaan www.ifg.id. Perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan, meliputi:

1. Informasi Umum Perusahaan;
2. Informasi Produk dan Layanan;
3. Informasi Publik; dan
4. Informasi Lainnya.

The Company's official website is a means of fulfilling public information disclosure, which provides communicative and up-to-date necessary information about the Company to all interested parties and the public in accordance with the principles of transparency and information disclosure, through the Company's official website www.ifg.id. The Company makes every effort to fulfill the required information, including:

1. General Company Information;
2. Product and Service Information;
3. Public Information; and
4. Other Information.



## PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN KEPALA AUDIT INTERNAL

EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, AND HEAD OF INTERNAL AUDIT

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Kepala Audit Internal, di sepanjang tahun 2020.

The following is information about the competency improvement program for the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Supporting Organs for the Board of Commissioners' Committees, the Corporate Secretary, and the Head of Internal Audit, throughout 2020.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners				
Hotbonar Sinaga	Diskusi Discussion	Skandal Dugaan Korupsi pada Perusahaan Asuransi Negara The Alleged Corruption Scandal at the State Insurance Company	Kampus UI Salemba/29 Januari 2020 UI Salemba Campus/ January 29, 2020	Polici Center ILUNI UI
	Diskusi Discussion	Quo Vadis Industri Asuransi Nasional Quo Vadis National Insurance Industry	Hotel JS Luwansa Jakarta/27 Februari 2020 Hotel JS Luwansa Jakarta/ February 27, 2020	Dewan Asuransi Indonesia Indonesia Insurance Council
<b>Direksi</b> Board of Directors				
Selama tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki program khusus pengembangan bagi Direksi. Namun demikian, Direksi tetap melakukan pengembangan diri secara mandiri dengan mengikuti berbagai pelatihan maupun seminar sesuai bidangnya masing-masing. In 2020, the Company did not have a special development program for the Board of Directors. However, the Board of Directors continues to develop themselves independently by participating in various trainings and seminars according to their respective fields.				
<b>Sekretaris Perusahaan</b> Corporate Secretary				
I Gede Suhendra, Plt. Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan I Gede Suhendra, Acting Head of Corporate Communications Department	Webinar	Produk Knowledge BAV BAV Product Knowledge	IFG/7 Februari 2020 IFG, February 7, 2020	Bahana
	Webinar	Webinar Marketeers Hangout Marketeers Hangout Webinar	IFG/17 – 18 Juni 2020 IFG, June 17-18, 2020	PT Markplus Indonesia
Ambarwita W, Staf Sekretaris Perusahaan Ambarwita W, Corporate Secretary Staff	Pelatihan Training	Pelatihan Dasar Asuransi Basic Insurance Training	IFG/12 Maret 2020 IFG, March 12, 2020	Bahana
Dewa Agung Rudy, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Pelatihan Training	Pelatihan Dasar Asuransi Basic Insurance Training	IFG/12 Maret 2020 IFG, March 12, 2020	Bahana



<b>Nama dan Jabatan</b> Name and Position	<b>Jenis Pendidikan dan Pelatihan</b> Type of Education and Training	<b>Materi Pendidikan dan Pelatihan</b> Education and Training Materials	<b>Tempat/Tanggal</b> Place/Date	<b>Penyelenggara</b> Organizer
Dewa Agung Rudy, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan	Webinar	Webinar <i>Installing Optimism</i>	IFG/5 Juni 2020 IFG, June 5, 2020	ILM
	Pelatihan Training	Biaya Pelaksanaan Pelatihan <i>Leader as Mening Maker</i> Training Cost of Leader as Mening Maker Training	IFG/19 September 2020 IFG, September 19, 2020	ESQ Membersip Center
<b>Kepala Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern</b> Head of Internal Audit Unit				
Fariana Deniwaty	Pelatihan Training	Pelatihan Dasar Asuransi Basic Insurance Training	IFG/10 Maret 2020 IFG, March 10, 2020	Bahana
	Pelatihan Training	Investigasi Forensik Forensic Investigation	IFG/26 Oktober – 27 Oktober 2020 IFG, October 10, 2020	Visi Integritas
	Pelatihan Training	Program <i>qualified internal auditor</i> Qualified internal auditor program	IFG/03 September – 4 September 2020 IFG, September 3-4, 2020	Bahana
	Pelatihan Training	CFE Exam Preparation Course secara online Online CFE Exam Preparation Course	IFG/05 Oktober – 09 Oktober 2020 IFG, October 5-9, 2020	ACFE Indonesia Chapter
	Seminar	Memahami Pentingnya <i>Investigative Auditing</i> dan <i>Forensic Accounting</i> dalam kontribusinya untuk pembentukan Indonesia Maju Paska COVID-19 Understanding the Importance of Investigative Auditing and Forensic Accounting in their contribution to the establishment of an Advanced Indonesia Post COVID-19	IFG/31 Oktober 2020 IFG, October 31, 2020	ACFE Indonesia Chapter



## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

### AWARDS AND CERTIFICATION

#### Penghargaan di Tahun 2020

##### Awards Received in 2020

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Diberikan Oleh Awarded By
-	-	-

#### Sertifikasi yang Masih Berlaku Hingga Tahun 2020

Valid Certification Until 2020

No	Divisi Division	Jenis Sertifikat 1 Type of Certification 1	Jenis Sertifikat 2 Type of Certification 2	Jenis Sertifikat 3 Type of Certification 3	Jenis Sertifikat 4 Type of Certification 4	Jenis Sertifikat 5 Type of Certification 5
1	Teknologi Informasi Information Technology	ITIL4	COBIT5	CCNP	ITIL – IT Service Management Certified	COBIT5 Certified
2	Keuangan Perusahaan Corporate Finance	CFA	CFA Level 1	Brevet A dan B (Taxation)	ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)	Certified Professional Management Accountant
3	Capital Market dan Investasi Capital Market and Investment	WPEE	ERMCP			
4	SKAI Internal Audit Unit	Associate Certified Public Accountant (ACPA)	Computer Hecking Forensic Investigator (CHFI)	Qualified Internal Auditor (QIA)	Oxygen Forensic Detective Expert User	CLI (Certified Life Insurance)
5	Manajemen Risiko Risk Management	CRMO	ISO 9001:2015 Quality Management System Lead Auditor	ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System Auditor	CDS (Certified Digital Speakers)	QRMP
6	Pengadaan dan Umum Procurement and General Affairs	ERMAP (Enterprise Risk Management Associate Professional)				
7	Asuransi dan Penjaminan Insurance and Guarantee	Ahli Manajemen Risiko Perasuransian (AMRP) dari AAMAI Certified Risk Management Expert from Indonesian Insurance Institute (AAMAI)	Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian dari BNSP Insurance Company Risk Management Competency Certificate from BNSP			
8	Pengembangan Bisnis Business Development	WPEE	Brevet AB			



Jenis Sertifikat <b>6</b> Type of Certification 6	Jenis Sertifikat <b>7</b> Type of Certification 7	Jenis Sertifikat <b>8</b> Type of Certification 8	Jenis Sertifikat <b>9</b> Type of Certification 9	Jenis Sertifikat <b>10</b> Type of Certification 10	Jenis Sertifikat <b>11</b> Type of Certification 11	Jenis Sertifikat <b>12</b> Type of Certification 12
--	--	--	--	--	--	--

Financial Risk Analyst for Corporation	Akuntan Beregister (Ak) Registered Accountant	Sertifikat Akuntan Teknisi Certified Accounting Technician	WMI (Wakil Manajer Investasi) WMI (Investment Manager Representative)			
Certified Public Accountant	Wakil Penjamin Emisi Efek Underwriter Representative	Wakil Perantara Perdagangan Efek Broker-Dealer Representative	Register Akuntan Negara State Registered Accountants	Chartered Accountant Indonesia	Penilaian Properti P1-P2 Property Valuation P1-P2	Brevet AB (Taxation)

FSAI



## **Fungsi Penunjang Bisnis**

Business  
Supporting  
Function

**Perusahaan senantiasa berfokus pada pembentukan SDM yang kompeten, berintegritas tinggi, serta menjunjung sikap dan perilaku yang luhur berdasarkan budaya "AKHLAK".**

The Company always focuses on the development of competent human resources, with high integrity, and upholds noble attitudes and behavior based on the "AKHLAK" culture.



## SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES



### KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

IFG menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu aset berharga dan juga menjadi kekuatan utama dalam rangka mendukung ketercapaian visi, misi dan, tujuan yang telah Perusahaan canangkan. SDM yang dimiliki oleh IFG sebagai motor dalam menggerakan roda bisnis Perusahaan, maka dari itu IFG senantiasa untuk terus berkomitmen dalam mengembangkan potensi-potensi SDM yang dimilikinya.

Selain itu, Perusahaan secara berkelanjutan juga memberikan program-program pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan kualitas individu yang handal dan kompeten baik dari sisi *soft competencies* maupun *hard competencies*. IFG senantiasa mengedepankan pendekatan *human capital* yang berarti karyawan merupakan aset yang sangat berharga bagi Perusahaan. Bagi IFG, karyawan merupakan partner strategis yang harus dikelola dan dikembangkan dalam mendukung laju pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang.

### HR MANAGEMENT AND DEVELOPMENT POLICIES

Indonesia Financial Group (IFG) realizes that Human Resources (HR) is one of the valuable assets and is also a major force in supporting the achievement of the vision, mission and goals that have been set by the Company. The human resources owned by IFG are the motor in moving the wheels of the Company's business, therefore IFG is always committed to develop the potential of its human resources.

In addition, the Company also continuously provides competency development programs as an effort to improve the quality of reliable and competent individuals, both in terms of soft competencies and hard competencies. IFG always prioritizes a human capital approach, which means that employees are a very valuable asset for the Company. For IFG, employees are strategic partners which must be managed and developed to support the Company's growth rate in the future.



Perusahaan secara progresif melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan, dan senantiasa berupaya untuk menciptakan SDM yang unggul, loyal dan berkompeten di bidangnya. Perusahaan meyakini bahwa kompetensi SDM, termasuk kinerja yang unggul, produktivitas, fleksibilitas, terhadap perubahan organisasi, inovasi dan kemampuan untuk menghasilkan layanan yang baik dari setiap individu, dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Untuk itu, Perusahaan berfokus pada pembentukan SDM yang kompeten, berintegritas tinggi, serta menjunjung sikap dan perilaku yang luhur berdasarkan budaya "AKHLAK".

Perusahaan melakukan pengelolaan dan pengembangan SDM yang terintegrasi dengan strategi Perusahaan dan senantiasa mempertimbangkan pengaruh perkembangan global dan nasional baik perkembangan industri, teknologi, maupun perkembangan ekonomi. Untuk itu, Perusahaan menerapkan strategi pengelolaan SDM yang berkualitas untuk menciptakan perkembangan bisnis yang dinamis, berdasarkan prinsip "*the right man on the right place*".

## PENGELOLA SDM PERUSAHAAN

Sebagai upaya dalam mengelola SDM yang dimiliki IFG membentuk Unit *Human Capital*. Tujuan pembentukan Unit *Human Capital* ini agar pengelolaan SDM dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga Unit *Human Capital* melakukan pengelompokan tugas menjadi 2 (dua) bagian yakni *Compensation & Benefit* dan *Organization Development*.

Bagian *Compensation & Benefit* menangani kegiatan yang berhubungan dengan remunerasi, *benefit*, *Manpower Planning* dan hubungan industrial. Bagian *Organization Development* menangani kegiatan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, *performance management*, *talent management*, *people data base* dan manajemen organisasi.

Unit *Human Capital* IFG memiliki tugas dan fungsi di antaranya:

1. Melakukan pembayaran remunerasi karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan;

The Company progressively implements HR management and development based on the needs and development of the Company, and always strives to create superior, loyal and competent human resources in their fields. The Company believes that HR competencies, including superior performance, productivity, flexibility, to organizational change, innovation and the ability to produce good service from each individual, can provide added value in increasing competitiveness to face any existing challenges. Therefore, the Company focuses on the establishment of competent human resources, with high integrity, and upholds noble attitudes and behavior based on the "AKHLAK" culture.

The Company manages and develops HR that is integrated with the Company's strategy and always considers the influence of global and national developments, both industrial, technological and economic developments. Therefore, the Company implements a quality HR management strategy to create dynamic business development, based on the principle of "the right man in the right place".

## HR MANAGEMENT OF THE COMPANY

As an effort to manage human resources owned by IFG, the Company established a Human Capital Unit. The purpose of establishing this Human Capital Unit is so that HR management can run effectively and efficiently, so that the Human Capital Unit divides tasks into 2 (two) parts, namely Compensation & Benefit and Organization Development.

The Compensation & Benefit Division handles activities related to remuneration, benefits, Manpower Planning and industrial relations. The Organization Development division handles recruitment, training and development activities, performance management, talent management, people database and organizational management.

IFG's Human Capital Unit has the following duties and functions:

1. Conduct employee remuneration payments in accordance with company policies and the provisions of applicable laws;
2. Make HR planning according to company needs;

3. Melakukan seleksi, rekrutmen, rotasi, mutasi dan pelatihan karyawan;
4. Mengkoordinir kegiatan penilaian kinerja karyawan;
5. Mengukur tingkat keterikatan karyawan secara berkala;
6. Membuat laporan profil dan pengelolaan SDM perusahaan secara berkala;
7. Melakukan pengelolaan database karyawan, sistem absensi dan sistem pengelolaan SDM secara terintegrasi;
8. Mengelola pelaksanaan *talent management* di holding dan anak perusahaan.

3. Conduct employee selection, recruitment, rotation, transfer and training;
4. Coordinate employee performance assessment activities;
5. Measure the level of employee engagement on a regular basis;
6. Make company profile and HR management reports regularly;
7. Manage employee database, attendance system and HR management system in an integrated manner;
8. Manage the implementation of talent management in the parent and subsidiary companies.

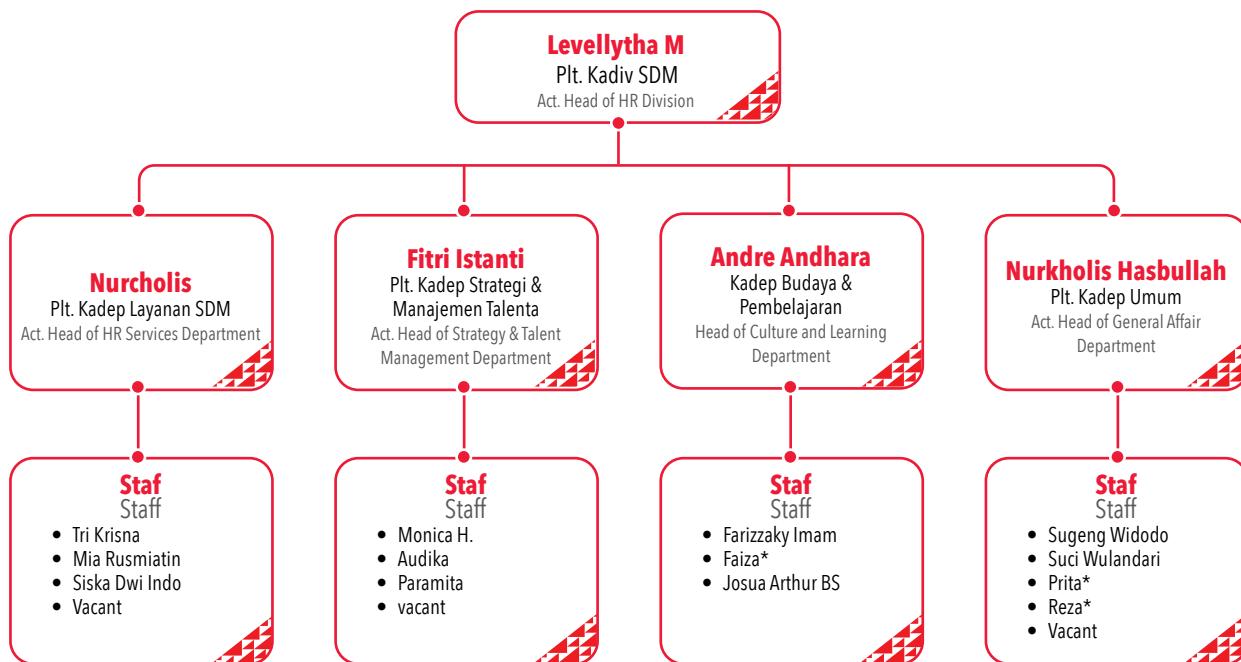
### Struktur Organisasi Unit Human Capital

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 021/SKDIR/CORP/BPUI/VII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, maka yang secara struktur Unit Human Capital berada dibawah Direktur Keuangan.

### Organizational Structure of Human Capital Unit

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 021/SKDIR/CORP/BPUI/VII/2020 dated 18 August 2020, structurally the Human Capital Unit is under the Director of Finance.

**Struktur Unit Human Capital**  
 Human Capital Unit Structure



\*karyawan penugasan/\*Seconded Employee



### Jumlah Karyawan Unit Human Capital

Untuk mendukung tercapainya tujuan dari pengelolaan SDM yang dimiliki IFG, maka Unit *Human Capital* memiliki total 15 karyawan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Jabatan Position Name	Jumlah Total
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division	1
Kepala Departemen Layanan SDM Head of HR Services Department	1
Kepala Departemen Umum Head of General Affair Department	1
Kepala Departemen Strategi SDM Head of HR Strategy Department	1
Kepala Departemen Budaya & Pembelajaran Head of Culture and Learning Department	1
Staf Budaya dan Pembelajaran Culture and Learning Staff	2
Staf Layanan SDM HR Services Staff	3
Staf Strategi SDM HR Strategy Staff	3
Staf Umum General Affairs Staff	2
<b>Total</b>	<b>15</b>

### Program Kerja Unit Human Capital 2020

Program kerja Unit *Human Capital* tahun 2020 antara lain:

1. Pembuatan *Roadmap* Sumber Daya Manusia periode tahun 2020-2024;
2. Review kebijakan dan prosedur terkait sumber daya manusia;
3. Peningkatan kapabilitas organisasi dalam *design* struktur organisasi;
4. Pemenuhan kapasitas karyawan dalam program perekrutan karyawan;
5. Melakukan pengembangan dan pelatihan khususnya di bidang asuransi dan kepemimpinan;
6. Menyusun *roadmap* budaya Akhlak periode tahun 2020-2024;
7. Sosialisasi dan penguatan budaya AKHLAK;
8. Pemenuhan pengurus anak perusahaan;
9. Persiapan renovasi dan relokasi ruang kerja.

### Human Capital Unit Work Program 2020

Human Capital Unit work programs in 2020 include:

1. Make Human Resources Roadmap for the period of year 2020 – 2024;
2. Review of policies and procedures related to human resources;
3. Increase organizational capability in the design of organizational structures;
4. Fulfillment of employee capacity in employee recruitment programs;
5. Conduct development and training, particularly in the field of insurance and leadership;
6. Prepare AKHLAK culture roadmap for the period 2020 – 2024;
7. Socialization and strengthening of AKHLAK culture;
8. Fulfillment of subsidiary management;
9. Preparation for renovation and relocation of workspaces.



## STRATEGI PENGELOLAAN SDM 2020

Perusahaan memiliki visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan SDM. Pedoman tersebut mengharuskan segenap insan Perusahaan untuk dapat bersinergi sesuai dengan arah perkembangan bisnis Perusahaan.

Nilai-nilai Perusahaan, yang dituangkan dalam budaya "AKHLAK", diinternalisasi oleh masing-masing karyawan menjadi panduan dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan fungsinya untuk kelangsungan usaha Perusahaan. Pengenalan dan pemahaman nilai-nilai tersebut telah dimulai sejak awal karyawan bergabung dengan Perusahaan.

Perusahaan terus berupaya melakukan peningkatan kualitas manajemen SDM agar dapat mendukung strategi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan visi dan misi Perusahaan dalam rangka merespon kebutuhan bisnis dan perkembangan Perusahaan. Di tahun 2020, Perusahaan telah menyusun program strategis pengelolaan SDM, sebagai berikut:

1. Pembuatan Kamus Kompetensi;
2. HC Blue print;
3. Tax Planning PPH 21 Bahana Group;
4. Asesmen Senior level by Konsultan;
5. Salary survey;
6. Program MT.

## MANAJEMEN SDM PERUSAHAAN

### Sistem Pengembangan Organisasi

Pengelolaan dan pengembangan SDM dimulai dari perancangan Struktur Organisasi yang selalu disesuaikan dengan arah bisnis dan strategi Perusahaan, berdasarkan evaluasi unit kerja terhadap efektivitas proses bisnis, serta mempertimbangkan aspek efisiensi. Pengembangan organisasi adalah penjabaran strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang sesuai dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.

Seiring dengan perkembangan Perusahaan, dan ditetapkannya IFG sebagai BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan, Perusahaan telah melakukan perubahan dan penyesuaian struktur organisasi, khususnya dalam menghadapi tantangan industri jasa keuangan dan asuransi yang semakin dinamis. Untuk memperkuat hal tersebut, Perusahaan

## 2020 HR MANAGEMENT STRATEGIES

The Company has a vision, mission and corporate values as guidelines in managing HR. These guidelines require all Company personnel to be able to synergize in accordance with the direction of the Company's business development.

The Company's values, which are embodied in the "AKHLAK" culture, are internalized by each employee as a guide in attitude and behavior when carrying out their functions for the continuity of the Company's business. The introduction and understanding of these values has been started since the employee join the Company.

The Company strives to improve the quality of HR management so that it can support strategies and business plans which are integrated with the Company's vision and mission in order to respond to business needs and Company developments. In 2020, the Company has compiled a strategic program for HR management, as follows:

1. Making a Competency Dictionary;
2. HC Blueprint;
3. Article 21 income tax planning of Bahana Group;
4. Senior level assessment by Consultant;
5. Salary surveys;
6. MT program.

## COMPANY HR MANAGEMENT

### Organizational Development System

HR management and development begins with the design of the Organizational Structure which is always adjusted to the business direction and strategy of the Company, based on the evaluation of the work unit on the effectiveness of business processes, as well as considering the efficiency aspect. Organizational development is the elaboration of short, medium and long term strategies in accordance with the vision, mission and values of the Company.

Along with the development of the Company, and with the establishment of the Holding Copany of Insurance and Guarantee SOEs or IFG, the Company has made changes and adjustments to the organizational structure, particularly in facing the challenges of the increasingly dynamic financial and insurance services industry. To strengthen this,



melakukan pengembangan organisasi yang selaras dengan komitmen IFG untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas.

### **Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen Karyawan**

Dalam melaksanakan rekrutmen karyawan Perusahaan senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, selain untuk meningkatkan dan memperkuat lini bisnis Perusahaan. Program perekrutan karyawan dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang diperlukan Perusahaan, dan senantiasa berupaya untuk menempatkan orang yang tepat pada fungsi yang tepat, sehingga tercipta SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.

Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan arah pengembangan bisnis jangka panjang, produktivitas, kapasitas dan kapabilitas Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menerapkan beberapa strategi pemenuhan SDM yang tepat, akurat dan cepat namun dengan tetap memperhatikan kualitas ataupun kompetensi dasar para kandidat. Untuk memenuhi kebutuhan karyawan, Perusahaan merekrut lulusan baru maupun tenaga berpengalaman melalui proses yang tidak memandang unsur SARA, jenis kelamin dan sebagainya melainkan berdasarkan pengalaman dan kompetensi para pelamar. Informasi lowongan kerja disebarluaskan melalui media *online*, kanal karier situs *online* Perusahaan dan media lainnya.

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan melakukan rekrutmen karyawan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, atau mengalami kenaikan sebesar 84% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut lebih disebabkan oleh kebutuhan organisasi dalam pemenuhan kapasitas karyawan dengan penugasan pemerintah perusahaan menjadi *holding* asuransi dan penjaminan.

Berikut pelaksanaan rekrutmen karyawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

the Company conducts organizational development that is in line with IFG's commitment to bring about changes in the financial sector, particularly insurance, investment, and guarantee that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full of integrity.

### **Employee Recruitment Policy and Implementation**

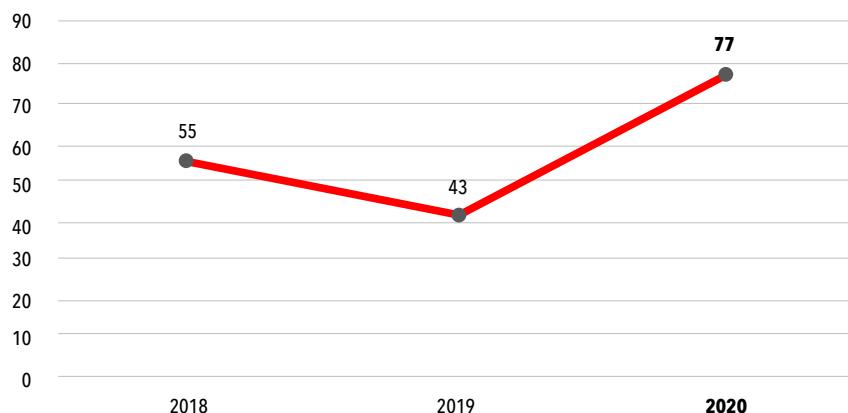
In conducting employee recruitment, the Company always adapts to the needs of the organization, in addition to improve and strengthen the Company's business lines. The employee recruitment program is carried out by referring to the projected employee needs for the current year and referring to the competency standards as stated in the Company's Articles of Association to achieve the Company's vision and mission. Recruitment is conducted openly in accordance with the needs and qualifications required by the Company, and always strives to place the right people in the right functions, so as to create qualified and competent human resources in their fields.

This effort is conducted by considering the direction of long-term business development, productivity, capacity and capability of the Company. Therefore, the Company implements several strategies for fulfilling HR that are precise, accurate and fast but with due regard to the quality or basic competencies of the candidates. To meet the needs of employees, the Company recruits new graduates and experienced personnel through a process which does not look at ethnicity, religion, race, gender and so on, but is based on the experience and competence of the applicants. Information on job vacancies is disseminated through online media, career channels on the Company's online website and other media.

Throughout 2020, the Company recruited 36 (thirty six) employees, or an increase of 84% compared to the previous year. The increase was mainly due to the organization's need to fulfill employee capacity by considering the assignment from the government to the company as an insurance and guarantee holding company.

The following is the implementation of employee recruitment in the last 3 (three) years, as attached below.

Uraian Description	2020	2019	2018
Jumlah Karyawan Total Employees	77	43	55
Karyawan Masuk Employee Joined	36	1	3



## Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi dilandaskan pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu. Sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi ini dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Perusahaan senantiasa mengembangkan kompetensi dari SDM yang dimilikinya, dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik secara internal maupun melalui pihak eksternal Perusahaan.

Di sepanjang tahun 2020 ini Perusahaan telah menganggarkan biaya pelatihan karyawan sebesar Rp1.270.000.000,- menurun 54% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.361.385.304,-. Adapun realisasi biaya pelatihan karyawan di tahun 2020 adalah sebesar Rp156.755.700,- dengan rincian sebagai berikut.

## Program and Policies of Competency Development

The competency-based HR development system is based on information on job competency needs and individual competencies. This competency-based HR development system is carried out in order to provide results in accordance with predetermined performance standards. The Company continues to develop the competence of its human resources, by providing trainings which are held both internally and through external parties of the Company.

Throughout 2020, the Company has invested in employee training costs of IDR 1,270,000,000, a decrease of 54% from the previous year which was IDR 2,361,385,304. The realization of employee training costs in 2020 was IDR 156,755,700, with the following details.

### Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 Training and Learning Implementation in 2020

Judul Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta (Orang) Total Participants (People)	Tanggal Pelatihan Date of Training	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (IDR)
Product Knowledge BPUI, BKI & Nilai-Nilai Bahana BPUI, BKI Product Knowledge & Bahana Values	3	24 Januari 2020 24 January 2020	Bahana	-



**Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020**  
Training and Learning Implementation in 2020

Judul Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta (Orang) Total Participants (People)	Tanggal Pelatihan Date of Training	Penyelenggara Organizer	Biaya (Rp) Cost (IDR)
Bimbingan Teknis Pengisian E-LHKPN Technical Guidance to fill in E-LHKPN (Electronic Wealth Reports of State Administrators)	9	28 Januari 2020 28 January 2020	Bahana	18.779.202
Product Knowledge BS Product Knowledge of BS	3	30 Januari 2020 30 January 2020	Bahana	-
Product Knowledge BAV Product Knowledge of BAV	6	07 Februari 2020 07 February 2020	Bahana	-
Sosialisasi Anggaran Dasar PT Bahana Artha Ventura Socialization of the Articles of Association of PT Bahana Artha Ventura	1	07 Februari 2020 07 February 2020	Bahana	-
Smart Credit Scoring for Digital Banking	1	20-21 Februari 20 20-21 February 2020	n/a	-
Product Knowledge GNTU Product Knowledge of GNTU	4	28 Februari 2020 28 February 2020	Bahana	-
Brevet AB & E-SPT Brevet AB & E-SPT (Electronic Annual Tax Return)	1	29 Februari-15 Agustus 2020 29 February – 15 August 2020	PPA FEB UI	4.950.000
Pelatihan Dasar Asuransi Insurance Basic Training	16	10 Maret 2020 10 March 2020	Bahana	4.210.528
Pelatihan Dasar Asuransi Insurance Basic Training	22	12 Maret 2020 12 March 2020	Bahana	5.789.476
Ontological Coaching	3	21 April 20 21 April 2020	Tower Wilson	-
Aspek Hukum dari PHK, Unpaid Leave, WFH,THR serta Kewajiban Pengusaha Terhadap Pekerja di saat situasi pandemic COVID-19 Legal Aspects of Layoffs, Unpaid Leave, WFH, Religious Holiday Allowance (THR) and Employers' Obligations to Workers during the COVID-19 pandemic	1	22 April 20 22 April 2020	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	-
Manajer Performance Community Development Center Telkom Telkom's Performance Community Development Center Manager	1	02 Mei 2020 02 May 2020	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	-



**Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020**  
**Training and Learning Implementation in 2020**

<b>Judul Pelatihan</b> Training Name	<b>Jumlah Peserta (Orang)</b> Total Participants (People)	<b>Tanggal Pelatihan</b> Date of Training	<b>Penyelenggara</b> Organizer	<b>Biaya (Rp)</b> Cost (IDR)
Webinar Arbitrase Tematik Arbitrage Thematic Webinar	1	20 Mei 2020 20 May 2020	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	-
Webinar - Installing Optimism Installing Optimism Webinar	3	05 Juni 2020 05 June 2020	Arvan Pradiansyah - ILM	625.527
Webinar Crisis Inspires Innovation Crisis Inspires Innovation Webinar	1	15 Juni 2020 15 June 2020	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	-
Webinar Marketeers Hangout Marketeers Hangout Webinar	1	17-18 Juni 2020 17-18 June 2020	PT Markplus Indonesia	520.883
Webinar Basic Financial Modeling Basic Financial Modeling Webinar	5	19 Juni 20 19 June 2020	PT Esensi Inti Indonesia	2.409.090
Webinar Financial Dashboard - Sensitivities and Scenario Analysis Using Excel Financial Dashboard - Sensitivities and Scenario Analysis Using Excel Webinar	6	20 Juni 2020 20 June 2020	PT Esensi Inti Indonesia	2.890.908
Webinar Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) "Bisakah Berbinis Tanpa Suap" Webinar on Application of Anti-Bribery Management System (SMAP) "Can You Do Business Without Bribery"	5	10 Juli 2020 10 July 2020	PT Mitra Bhadra Consulting	375.000
Arahan Wakil Menteri BUMN II Kepada Holding Perasuransi & Penjaminan dan Sosialisasi Core Value " Akhhlak" Directions of the Deputy Minister of SOEs II to Holding Insurance & Guarantee and Dissemination of Core Values "Akhhlak"	6	20 Juli 2020 20 July 2020	Bahana	-



**Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020**  
Training and Learning Implementation in 2020

<b>Judul Pelatihan</b> Training Name	<b>Jumlah Peserta (Orang)</b> Total Participants (People)	<b>Tanggal Pelatihan</b> Date of Training	<b>Penyelenggara</b> Organizer	<b>Biaya (Rp)</b> Cost (IDR)
Webinar Tax Forum BUMN 2020: Implementasi Insentif Pajak Dalam Rangka COVID-19 sesuai Perppu 01/2020; PMK 28/2020; dan PMK No. 86/2020 SOE 2020 Tax Forum Webinar: Implementation of Tax Incentives in the Context of COVID-19 in accordance with Government Regulation in Lieu of Acts 01/2020; PMK 28/2020; and PMK No. 86/2020	1	26 Agustus 2020 26 August 2020	Tax Forum BUMN SOE Tax Forum	99.000
Biaya e-Certificate Seminar Online PAII (webinar remote auditing) PAII Online Seminar e-Certificate Fee (remote auditing webinar)	1	29 Agustus 2020 29 August 2020	Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) Indonesian Internal Auditors Association (PAII)	150.000
Program qualified internal auditor Program qualified internal auditor	1	3-4 September 2020 3-4 September 2020	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	300.000
Workshop Standar Internal & Kode Etik Profesi (SAKEP) Workshop on Internal Standards & Professional Code of Ethics (SAKEP)	1	3-4 September 2020 3-4 September 2020	YPIA	2.000.000
Biaya Pelaksanaan Pelatihan Leaders as Mening Maker/Akhhlak No. SPK 009/Depum-SPK/BPUI/IX/2020 Cost of Implementation of the Leaders as Mening Maker/Akhhlak Training No. SPK 009/Depum-SPK/BPUI/IX/2020	12	19 September 2020 19 September 2020	ESQ Membership Center	12.999.996
Qualified Internal Auditor (QIA) tingkat lanjutan Angkatan ke-26 26th Qualified Internal Auditor (QIA) advanced level	1	21 September-3 Oktober 2020 21 September - 3 October 2020	YPIA	15.000.000
CFE Exam Preparation Course secara online CFE Exam Preparation Course online	1	5-9 Oktober 2020 5-9 October 2020	ACFE Indonesia Chapter	25.000.000
Workshop Design Thinking Design Thinking Workshop	1	16-17 Oktober 2020 16-17 October 2020	Forum Teknologi Informasi BUMN SOE Information Technology Forum	1.500.000
Investigasi Forensik Forensic Investigation	2	26-27 Oktober 2020 26-27 October 2020	Visi Integritas	3.000.000



**Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020**  
**Training and Learning Implementation in 2020**

<b>Judul Pelatihan</b> Training Name	<b>Jumlah Peserta (Orang)</b> Total Participants (People)	<b>Tanggal Pelatihan</b> Date of Training	<b>Penyelenggara</b> Organizer	<b>Biaya (Rp)</b> Cost (IDR)
Memahami Pentingnya Investigative Auditing dan Forensic Accounting dalam kontribusinya untuk pembentukan Indonesia Maju Paska COVID-19 Understanding the Importance of Investigative Auditing and Forensic Accounting in their contribution to the establishment of Advanced Indonesia Post COVID-19	1	31 Oktober 2020 31 October 2020	ACFE Indonesia Chapter	900.000
Pembayaran Pelaksanaan Internalisasi Akhlak for Millenial Indonesia Financial Group (IFG) Payment for Implementation of AKHLAK Internalization for Millenial Indonesia Financial Group (IFG)	18	28 November 2020 28 November 2020	ILM	45.256.410
<b>TOTAL JUMLAH PESERTA</b> <b>TOTAL OF PARTICIPANT</b>	<b>139</b>			
<b>TOTAL BIAYA</b> <b>COST TOTAL</b>		<b>156.755.700</b>		

**Realisasi Pelatihan Karyawan berdasarkan Jam Pelatihan**  
**Employee Training Realization based on Training Hours**

<b>Jam Pelatihan</b> Training Hour	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jumlah Jam Pelatihan Softskill Total Hours for Softskill Training	368	3.454
Jumlah Jam Pelatihan Teknikal Total Hours for Technical Training	912	8.813
<b>Jumlah Jam Pelatihan</b> <b>Total Training Hours</b>	<b>1.280</b>	<b>12.267</b>

### Penilaian Kinerja

Guna menghadapi perkembangan bisnis yang semakin kompetitif, Perusahaan melaksanakan kegiatan penilaian kinerja yang dilakukan untuk dapat memudahkan Perusahaan dalam melakukan penempatan karyawan sesuai dengan posisi yang tepat dan sesuai juga dengan kebutuhan Perusahaan. Program penilaian ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka melakukan penggalian potensi dan talenta para karyawan yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan pengembangan dan pengisian level-level jabatan tertentu.

### Performance assessment

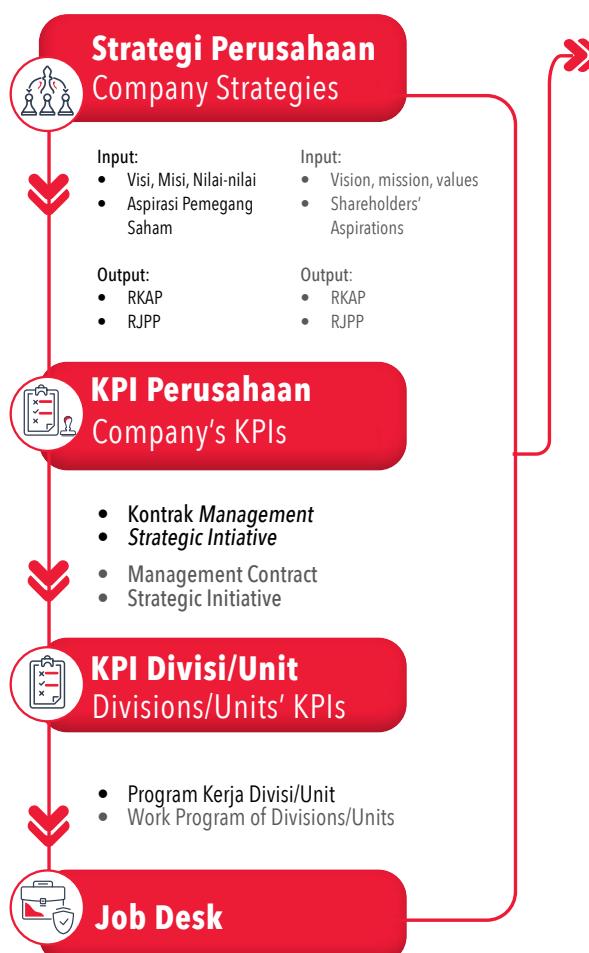
In order to face increasingly competitive business developments, the Company implements performance assessment activities carried out to facilitate the Company in placing employees in accordance with the right position and according to the Company's needs. This assessment program is conducted regularly and continuously in order to explore the potential and talents of employees, the results of which will be used as a basis for determining the development and assigning of certain job levels.



Perusahaan sendiri secara internal telah melakukan penilaian kinerja yang dikenal sebagai program manajemen kinerja, program ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur kesesuaian kinerja karyawan dengan kinerja yang diharapkan perusahaan pada periode tertentu dan dengan mengacu kepada standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan manajemen kinerja meliputi kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja. Dengan kegiatan penilaian kinerja, semua level jabatan mulai dari pimpinan hingga karyawan akan mendapatkan umpan balik atas hasil kinerja dalam suatu periode penilaian kinerja, dan mereka dapat meningkatkan kinerja serta pencapaian mereka di masa mendatang.

The Company itself has internally conducted a performance assessment known as a performance management program, this program is an effort to measure the suitability of employee performance with the expected performance of the company in a certain period and with reference to the standards that have been previously set. Performance management activities include planning and performance evaluation activities. With performance assessment activities, all levels of positions from leaders to employees will get feedback on performance results in a performance assessment period, and they can improve their performance as well as achievements in the future.

### KERANGKA MANAJEMEN KINERJA PERFORMANCE MANAGEMENT FRAMEWORK



### Tahap Perencanaan Kinerja Performance Planning Stage

KPI INDIVIDU  
INDIVIDUAL KPIs

KONTRAK KINERJA INDIVIDU  
INDIVIDUAL PERFORMANCE CONTRACT

Penentuan Target, Perencana Pengembangan Kompetensi, Program Kerja

Determination of Targets, Competency Development Plans, Work Programs

### Tahap Monitoring Kinerja Performance Monitoring Stage

MID YEAR EVALUATION  
MID YEAR EVALUATION

Coaching, Counseling, Pelaksanaan Training  
Coaching, Counseling, Training Implementation

### Tahap Monitoring Kinerja Performance Monitoring Stage

MID YEAR EVALUATION  
MID YEAR EVALUATION

Coaching, Counseling, Pelaksanaan Training  
Coaching, Counseling, Training Implementation

### Tahap Tindak Lanjut

(Remunerasi, Pengembangan Kompetensi, Rencana Karir, Suksesi)

### Follow-Up Stage

(Remuneration, Competency Development, Career Planning, Succession)

## Program Pengembangan Karier dan Promosi

Kegiatan pengembangan karir dan promosi, diberlakukan dengan maksud memberikan pengalaman menyeluruh kepada setiap karyawan tentang keseluruhan operasional dan bisnis yang dikembangkan Perusahaan. Dalam rangka mengembangkan dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, implementasi program pengembangan karir yang dilakukan Perusahaan sejalan dengan kebutuhan bisnis dan pemenuhan target kinerja Perusahaan.

Program pengembangan karir dan promosi dilakukan untuk membentuk para pemimpin masa depan Perusahaan serta untuk menempatkan karyawan pada beberapa level tertentu yang disesuaikan dengan kompetensi dan *skill* yang dimiliki sehingga proses regenerasi karyawan pada level organisasi Perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pada tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan program pengembangan karir dan promosi terhadap 6 (enam) orang karyawan atau mencapai 8% dari total jumlah karyawan Perusahaan.

## Program Pensiu

Perusahaan telah mempersiapkan program yang diharapkan dapat membantu karyawan yang telah memasuki usia masa persiapan pensiun, sebagai bentuk perhatian Perusahaan terhadap karyawan yang telah mengabdi maupun yang masa kerjanya akan/telah selesai. Perusahaan memiliki kebijakan untuk masa persiapan pensiun yakni bagi karyawan yang telah masuk usia 55 tahun. Sementara usia pensiun karyawan adalah karyawan yang telah berusia 55 tahun. Program pensiun yang diberikan Perusahaan meliputi program pesangon, program persiapan memasuki usia pensiun dan pemberian logam mulia.

Imbalan pasca kerja dan program pensiun diberikan kepada para karyawan sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk memberikan rasa aman dan jaminan hari tua kepada karyawan. Melalui program tersebut, karyawan akan mampu memberikan kontribusi optimalnya kepada Perusahaan, sekaligus menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan.

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tercatat sebanyak 2 (dua) orang karyawan yang pensiun.

Berikut pergerakan jumlah karyawan yang pensiun dalam 3 (tiga) tahun terakhir, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

## Career Development and Promotion Program

Career development and promotion activities are implemented with the aim of providing a comprehensive experience to every employee regarding the overall operations and business developed by the Company. In order to develop and motivate employees to improve their performance, the implementation of career development programs conducted by the Company is in line with business needs and meeting the Company's performance targets.

Career development and promotion programs are carried out to establish future leaders of the Company and to place employees at certain levels that are adjusted to their competencies and skills so that the employee regeneration process at the Company's organizational level can run well. In 2020, the Company has implemented career development and promotion programs for 6 (six) employees or up to 8% of the total number of Company employees.

## Retirement Program

The Company has prepared a program which is expected to assist employees who have entered the pre-retirement age, as a form of the Company's attention to employees who have served or whose tenure is about to be completed. The Company has a policy for the pre-retirement period, namely for employees who have entered the age of 55 years. Meanwhile, the retirement age for employees is those who are 55 years old. The retirement plans provided by the Company include severance pay, preparation for retirement age program and provision of precious metals.

Post-employment benefits and retirement plans are provided to employees as part of the Company's commitment to provide security and old age guarantee to the employees. Through this program, employees will be able to give their optimal contribution to the Company, while at the same time fostering employee loyalty to the Company.

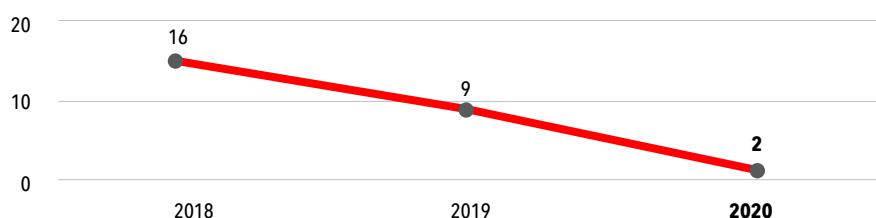
Throughout 2020, the Company recorded as many as 2 (two) employees who retired.

The following is the number of employees who have retired in the last 3 (three) years, is as attached below.



### Jumlah Karyawan Pensiun di Tahun 2018-2020 Total Retired Employees in 2018-2020

Uraian Description	2020	2019	2018
Karyawan Pensiun Retired Employees	2	9	16



### Program Kesejahteraan

Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan IFG, Perusahaan telah memiliki kebijakan yang mengatur besaran remunerasi bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *fair/adil* secara internal, kompetitif secara eksternal dan motivatif.

Selain itu, Perusahaan juga telah senantiasa berupaya memenuhi hak-hak kesejahteraan karyawan yang lainnya, misalnya mengikutsertakan karyawan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Kematian, dan lainnya).

Dalam hal sistem remunerasi, Perusahaan melakukan penyempurnaan sistem remunerasi, dengan mengacu kepada prinsip 3P, *Pay for Person*, *Pay for Position* dan *Pay for Performance*. Struktur Remunerasi perusahaan meliputi *Fixed Pay*, *Variable Pay* dan *Non-Cash Benefit*. Dalam pelaksanaannya kebijakan remunerasi mengacu kepada Peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan memberikan jaminan dan manfaat kerja kepada karyawan yang diatur dan dikukuhkan melalui Peraturan Perusahaan (PP). PP mengatur mekanisme kesejahteraan Karyawan, upah lembur, uang pensiun, tunjangan kesehatan, dan kesempatan pendidikan yang adil dan merata.

IFG dapat memastikan bahwa komposisi penghasilan yang diperoleh Karyawan saat ini telah melebihi standar upah minimum yang ditetapkan Pemerintah. Perusahaan telah memiliki skala upah yang dibuat dengan mempertimbangkan data market dan kemampuan dari Perusahaan.

### Welfare Program

As an effort to improve the welfare of IFG's employees, the Company has a policy which regulates the amount of remuneration for employees in accordance with the prevailing laws and regulations, which is fair internally, externally competitive and motivating.

In addition, the Company has always strived to fulfill the welfare rights of other employees, for example by enrolling employees in the Workforce Social Security program (Old Age Security, Occupational Accident Insurance, Death Insurance, and others).

In terms of the remuneration system, the Company makes improvements to the system, by referring to the 3P principles, Pay for Person, Pay for Position and Pay for Performance. The Company's remuneration structure includes Fixed Pay, Variable Pay and Non-Cash Benefit. In practice, the remuneration policy refers to the Company Regulations and the prevailing laws and regulations. The Company provides work guarantees and benefits to employees which are regulated and confirmed through Company Regulations (PP). PP regulates employee welfare mechanisms, overtime pay, pensions, health benefits, and educational opportunities that are fair and equitable.

IFG can ensure that the composition of income earned by employees currently exceeds the minimum wage standards set by the Government. The Company already has a wage scale which is made by considering market data and the capabilities of the Company.

**Jumlah Remunerasi Karyawan Tahun 2018-2020 (dalam Rupiah)**  
**Total Employees Remuneration in 2018-2020 (In IDR)**

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Remunerasi Karyawan Employee Remuneration	66.928	41.912	40.605

### **Pengelolaan Hubungan Industrial**

Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengelola dan memelihara hubungan yang seimbang antara Perusahaan dengan seluruh karyawan, baik dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penyediaan mekanisme dan forum diskusi dan aspirasi, maupun kecukupan intensitas komunikasi dan engagement antara kedua belak pihak. Oleh sebab itu, Perusahaan berupaya membangun hubungan ketenagakerjaan yang sehat sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam rangka menjamin hubungan industrial yang harmonis, perusahaan telah merumuskan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang semuanya jelas tertuang dalam peraturan perusahaan dan telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan Surat No. KEP. 1308/PHIJSK-PK/PP/X/2018.

Hubungan harmonis yang telah terjalin antara Perusahaan dan karyawan selama ini, tercermin dengan tidak pernah terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh para karyawan selama Perusahaan berdiri hingga saat ini. Hubungan yang harmonis antara karyawan dan Perusahaan tercipta melalui kebijakan Perusahaan yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi karyawan dalam menyalurkan aspirasi mereka yang disampaikan melalui diskusi yang terjalin dengan baik antara karyawan dan Manajemen Perusahaan.

### **Rencana Pengembangan SDM ke Depan**

Strategi pengembangan SDM disusun menyesuaikan dengan perkembangan bisnis dan perkembangan organisasi, yakni sebagai berikut:

1. Program perekrutan SDM muda berkualitas melalui jalur *special hire* program;
2. Penambahan komisaris independen;
3. Penyesuaian gaji karyawan terhadap tingkat inflasi;
4. Implementasi *Integrated Talent Management System* (ITMS);
5. Penggunaan sumber daya secara bersama-sama (*shared resources*) untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis seperti pengelolaan *Human Capital*.

### **Industrial Relations Management**

The Company always strives to manage and maintain a balanced relationship between the Company and all employees, both in terms of fulfilling rights and obligations, providing mechanisms and forums for discussion and aspirations, as well as the adequacy of the intensity of communication and engagement between the two parties. Therefore, the Company strives to build a healthy employment relationship in accordance with the applicable rules as regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.

In order to ensure harmonious industrial relations, the company has formulated labor provisions, all of which are clearly stated in company regulations and have been registered to the Directorate General of Industrial Relations and Labor Social Security of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia based on Letter No. KEP. 1308/PHIJSK-PK/PP/X/2018

The harmonious relationship that has existed between the Company and its employees so far is reflected in the absence of demonstrations by employees during the Company's existence until now. A harmonious relationship between employees and the Company is created through the Company's policy of providing the widest possible space for employees to present their aspirations which are conveyed through well-established discussions between the union and the Company's Management.

### **Future HR Development Plan**

The HR development strategy is prepared in accordance with business developments and organizational developments, as follows:

1. Recruitment program for young quality Human Resources (HR) through the special hire program;
2. Addition of independent commissioners;
3. Adjustment of employee salaries to the inflation rate;
4. Implementation of *Integrated Talent Management System* (ITMS);
5. The use of shared resources to improve the efficiency of business processes such as the management of Human Capital.



## TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY



### KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TI

Perusahaan menyadari bahwa perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini, telah membawa pergeseran pada segala aspek, salah satunya adalah pergeseran perilaku konsumen yang menginginkan kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan pelayanan yang optimal. Pengelolaan TI secara umum adalah memastikan kesiapan pengelolaan strategi dan kebijakan sistem infomasi terpadu Perusahaan secara optimal dan terintegrasi dalam mendukung kinerja Perusahaan. Dengan TI yang terintegrasi, diharapkan dapat menciptakan proses bisnis yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa kepada konsumen, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Perusahaan senantiasa berupaya untuk menyelaraskan antara strategi

### MANAGEMENT POLICIES AND IT DEVELOPMENT

The Company realizes that the current development of Information Technology (IT), has brought a shift in all aspects, one of which is a shift in consumer behavior that wants speed, accuracy, efficiency, and optimal service. IT management in general is to ensure the readiness of the Company's integrated information system strategy and policy management in an optimal and integrated manner to support the Company's performance. With integrated IT, it is expected to create efficient, effective and highly competitive business processes.

Technology is the main key that enables the Company to provide products and services to consumers, measure and track business performance, and make the right management decisions for the continuity of its business. The Company always strives to align its information technology strategy with the established business strategy to achieve



TI dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Sistem TI Perusahaan telah di desain untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan melakukan otomasi berbagai proses operasi serta untuk meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif dengan mengedepankan inovasi berkelanjutan dan senantiasa mempertimbangkan kebutuhan bisnis Perusahaan pada lini operasional maupun fungsional. Sistem TI Perusahaan juga dilengkapi dengan SDM-SDM unggul yang bertugas dalam mengawasi dan mengendalikan sistem tersebut.

## PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki unit khusus yang mengelola TI di lingkup Perusahaan. Unit ini juga bertindak sebagai fasilitator dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan implementasi TI di masing-masing anak perusahaan, terutama bila terdapat penggunaan sumber daya secara bersama (*resources sharing*). Sinergi terus diupayakan untuk optimalisasi sumber daya guna mencapai hasil yang terbaik. Peningkatan kehandalan layanan dasar dan kapasitas sistem dalam menunjang operasional juga dilakukan sejalan dengan proses TIGovernance untuk menjaga tata kelola Perusahaan secara benar.

Perusahaan telah menyusun strategi pengelolaan TI jangka panjang dalam rangka menunjang perkembangan bisnis Perusahaan sebagaimana yang tertuang dalam *IT Master Plan 2019-2021* yang telah disahkan oleh Komite TI pada bulan Februari 2019.

the Company's vision and mission. The Company's information technology system has been designed to improve work efficiency by automating various operating processes as well as to increase competitiveness and competitive advantage by prioritizing sustainable innovation and always taking into account the Company's business needs in operational and functional lines. The Company's IT system is also equipped with superior human resources in charge of supervising and controlling the system.

## COMPANY INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT

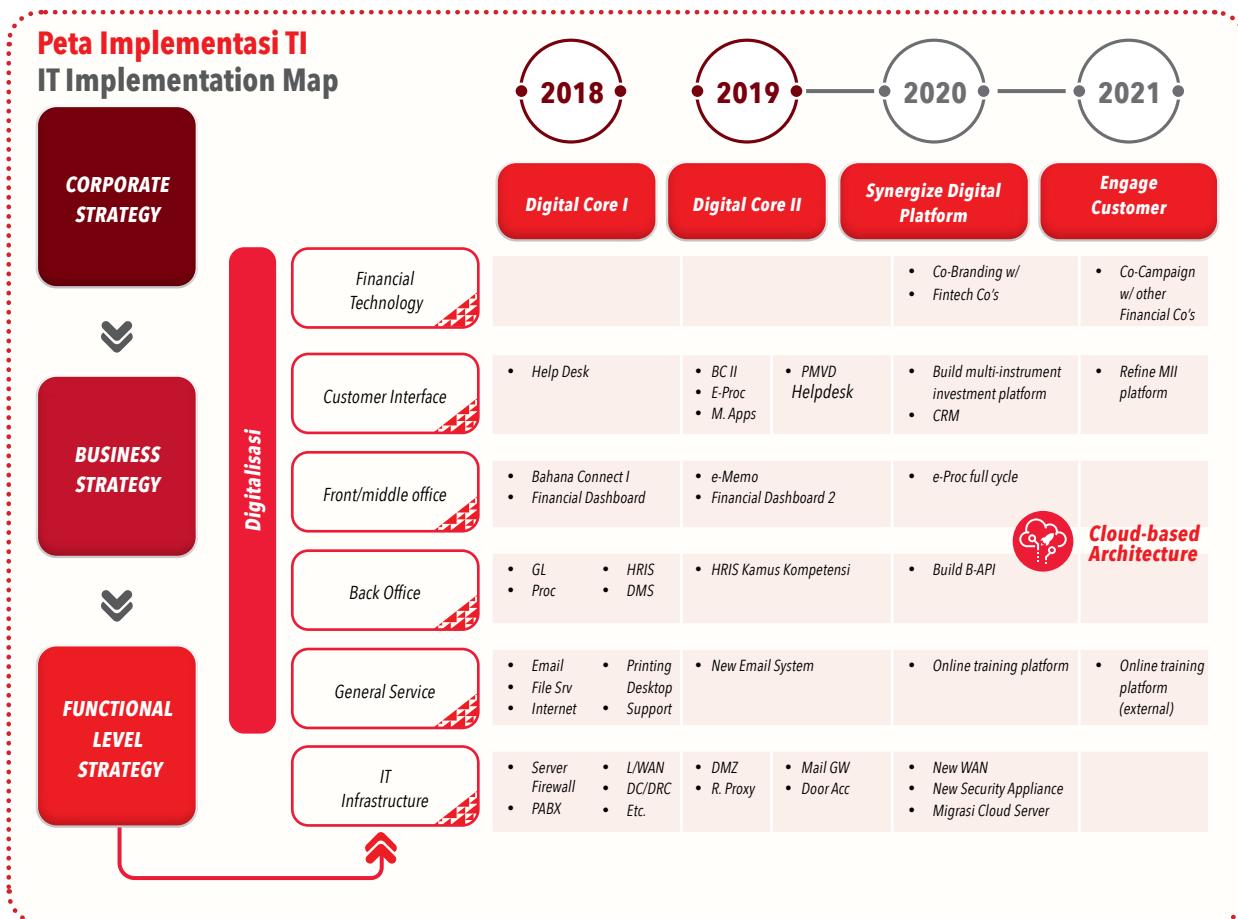
The Company already has a special unit which manages information technology within the Company. This unit also acts as a facilitator in various activities related to IT implementation in each subsidiary, especially when there is a resources sharing. Synergy continues to be pursued to optimize resources in order to achieve the best results. Improvements in the reliability of basic services and system capacity to support operations are also conducted in line with the IT Governance process to maintain proper corporate governance.

The Company has developed a long-term information technology management strategy in order to support the Company's business development as stated in the 2019-2021 IT Master Plan which was approved by the IT Committee in February 2019.



### IT Master Plan 2019-2021

2019-2021 IT Master Plan



Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola TI Kementerian BUMN, penyusunan dan pengesahan IT Master Plan 2019-2021 menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan kan dalam proses TI Governance. Berdasarkan IT Master Plan 2019-2021, di tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Peningkatan IT Governance Maturity Level;
2. Peningkatan Layanan TI, Kapasitas & Kualitas Layanan Jaringan dan Keamanan TI;
3. Pengembangan Lanjutan Sunfish Human Resource Management System;
4. Penyusunan Kebijakan TI Holding Asuransi & Penjaminan;
5. Koordinasi TI Holding;
6. Inisiatif Strategi TI Holding-Shared Services (Quick Win);
7. Pengembangan Data Warehouse;
8. Penyusunan Masterplan/Roadmap IT Holding;
9. Migrasi Data Center.

Sementara itu, sebagai bagian dari proses kontrol terhadap seluruh kegiatan unit TI, telah dilakukan asesmen dan audit internal dengan menggunakan framework ISO 9001:2015 dan COBIT 2019. Secara umum posisi tata kelola berada pada tingkat *Performed* dimana Perusahaan telah menjaga konsistensi pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan.

## MANAJEMEN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Kegiatan operasional TI meliputi penyelenggaraan layanan dasar TI (internet, email, file server, dan lainnya) dan penyediaan layanan sistem aplikasi, yang terdiri dari kegiatan monitoring, perawatan, perbaikan serta penyediaan dukungan teknis kepada seluruh karyawan. Berikut kegiatan pengelolaan sistem TI Perusahaan yang dilakukan di tahun 2020.

- **System Up time**

System up time digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan layanan dasar TI dan layanan sistem aplikasi, dengan komitmen *up time rate* adalah 99% dari waktu operasional. Waktu operasional layanan-layanan tersebut adalah 99% selama 7x24 jam dalam 1 tahun, dengan memperhitungkan seluruh *down time* baik yang direncanakan maupun tidak (misalnya untuk perawatan rutin).

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2018 concerning the Information Technology Governance Principles of the Ministry of SOEs, the preparation and ratification of the 2019-2021 IT Master Plan is an integral part of the IT Governance process. Based on the IT Master Plan 2019 – 2021, in 2020, the Company has implemented the following programs:

1. Improvement of IT Governance Maturity Level;
2. Improvement of IT Services, Capacity & Quality of Network Services and IT Security;
3. Advanced Development of Sunfish Human Resource Management System;
4. IT Policy formulation of Insurance & Guarantee Holding;
5. Coordination of IT Holding;
6. Strategic Initiatives for IT Holding – Shared Services (Quick Win);
7. Data Warehouse Development;
8. Formulation of the IT Holding Masterplan/ Roadmap;
9. Data Center Migration.

Meanwhile, as part of the control process for all IT unit activities, an internal assessment and audit has been conducted using the ISO 9001:2015 and COBIT 2019 framework. In general, the governance position is at the *Performed* level in which the Company has maintained the consistency of the implementation of the procedures that have been set.

## COMPANY'S INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT

IT operational activities include the provision of basic IT services (internet, email, file servers, and others) and the provision of application system services, which consist of monitoring, maintenance, repair and technical support activities to all employees. The following are the Company's information technology system management activities carried out in 2020.

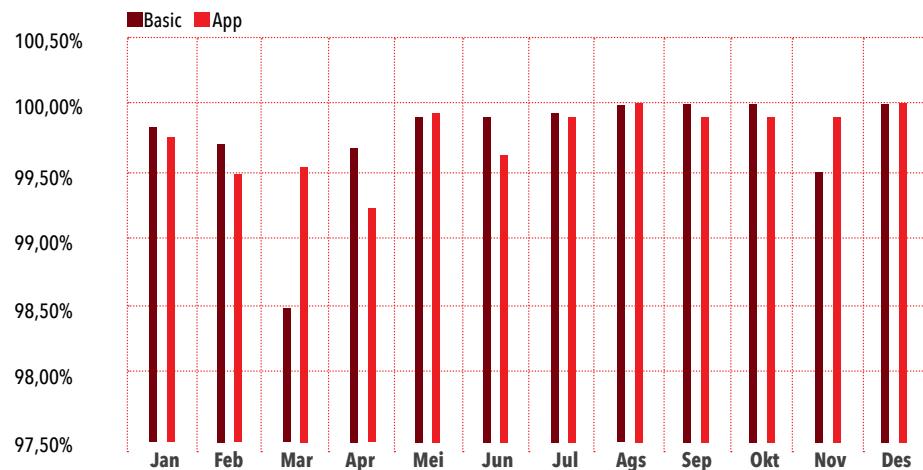
- **System Uptime**

System uptime is used to measure the performance of basic IT services and application system services, with a committed uptime rate of 99% of the operational time. The operational time of these services is 99% for 7x24 hours in 1 year, taking into account all downtimes, whether planned or not (e.g for routine maintenance).



*Up time rate rata-rata untuk layanan dasar (*basic services*) sepanjang tahun 2020 secara *trend* stabil pada *range* 98,49%-100%. Khusus layanan aplikasi, rata-rata *uptime* sepanjang tahun 2020 secara *trend* stabil pada *range* 99,22%-100%. Diharapkan kondisi ini dapat terus ditingkatkan pada tahun 2021.*

The average uptime rate for basic services throughout 2020 has a stable trend in the range of 98.49%-100%. Specifically for application services, the average uptime throughout 2020 has a stable trend in the range of 99.22%-100%. It is hoped that this condition can continue to be improved in 2021.



- **Helpdesk Response & Resolution Time**

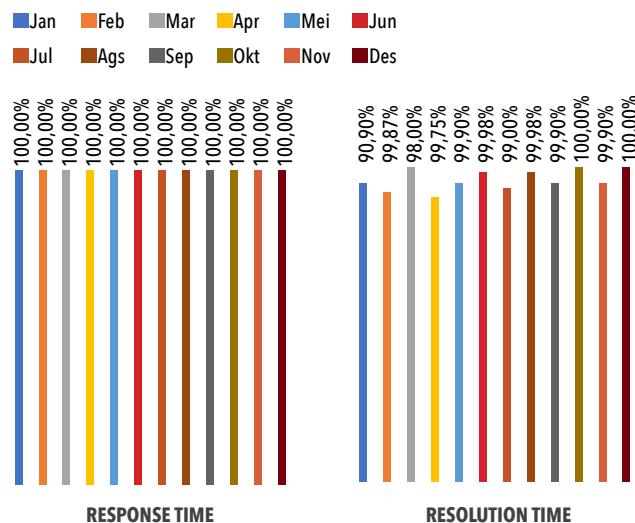
*Helpdesk response time digunakan untuk mengukur kecepatan organisasi TI dalam merespon permintaan bantuan dari user/karyawan. Komitmen terhadap *response time* adalah rata-rata 2 jam (dalam 1 bulan) setiap permintaan dukungan teknis/bantuan dapat direspon dan ditindaklanjuti. Helpdesk resolution time digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian masalah terhadap permintaan bantuan yang diterima TI. Komitmen terhadap *resolution time* ini adalah bahwa seluruh pemintaan bantuan yang diterima dalam 1 pekan dapat diselesaikan minimal 90% dari total permintaan yang diterima.*

Pada akhir tahun 2020, *response time* dan *resolution time* dalam tren stabil. *Response time* rata-rata mencapai 100% dan *resolution time* 98%-100%. *Resolution time* bervariasi, tergantung pada permasalahan yang ditangani, terlebih bila tergantung pada vendor/pihak ketiga. Namun tetap diupayakan sesuai dengan target KPI yang telah ditetapkan >98%. Untuk *Response Time* di tahun ini sudah meningkat dari target yang sudah ditetapkan di tahun lalu. Diharapkan tahun depan sesuai dengan KPI pencapaian *Helpdesk Resolution Time* dapat meningkat dengan rata-rata >99.15%.

- **Helpdesk Response & Resolution Time**

Helpdesk response time is used to measure the speed with which IT organizations respond to requests for help from users/employees. Commitment to response time is an average of 2 hours (in 1 month) each request for technical support/assistance can be responded to and followed up. Helpdesk resolution time is used to measure the level of problem solving on requests for assistance received by IT. The commitment to this resolution time is that all requests for assistance received within 1 week can be completed at least 90% of the total requests received.

At the end of 2020, response time and resolution time were in a stable trend. The average response time is 100% and the resolution time is 98% - 100%. Resolution time varies, depending on the problem being handled, especially if it depends on the vendor/third party. However, efforts are still being made in accordance with the KPI target that has been set >98%. The Response Time this year has increased from the target set last year. It is expected that next year according to the KPI, the achievement of Helpdesk Resolution Time can increase by an average of >99.15%.

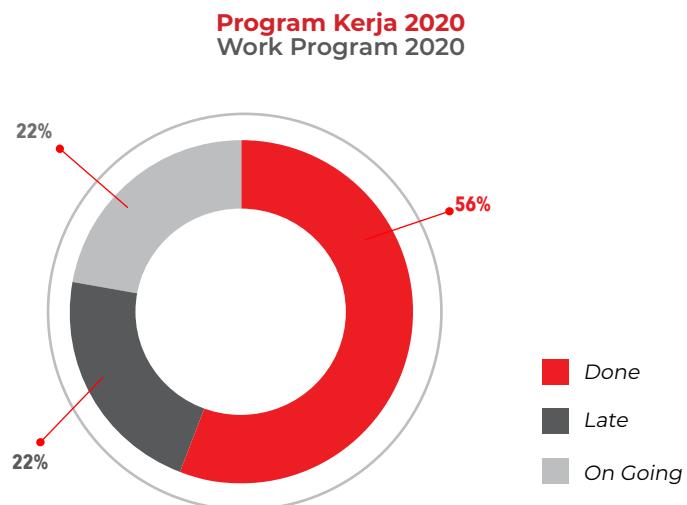


- **Monitoring Proyek**

Hingga akhir tahun 2020 ini telah diselesaikan sebanyak 5 program (56%), 2 program (22%) selesai namun mengalami keterlambatan dan 2 program (22%) masih berjalan sesuai rencana.

- **Project Monitoring**

Until the end of 2020, 5 programs (56%), 2 programs (22%) were completed but experienced delays and 2 programs (22%) were still running as planned.





No.	Program Program	KPI Divisi Division KPIs	Target Target	Output	Keterangan Information
1	Peningkatan <i>IT Governance Maturity</i> Improvement of IT Governance Maturity	Implementasi Kebijakan Tata Kelola TI IT Governance Policy Implementation	100% selesai di Desember 2020 100% completed in December 2020	100% selesai 100% completed	
2	Peningkatan layanan TI, kapasitas & kualitas layanan jaringan dan keamanan TI Improvement of IT services, capacity & quality of network services and IT security	Ketersediaan Layanan TI 24x7 IT Service Availability 24x7	100% selesai di Desember 2020 100% completed in December 2020	Layanan dasar: 99.93% up time Aplikasi: 99.84% up time Basic service: 99.93% uptime Application: 99.84% uptime	
3	Pengembangan lanjutan <i>Sunfish Human Resource Management System</i> Advanced development of Sunfish Human Resource Management System	Peningkatan Fitur Layanan Aplikasi Improved Application Service Features	100% selesai di November 2020 100% completed in November 2020	100% selesai 100% completed	
4	Penyusunan kebijakan <i>TI Holding Perasuransi &amp; Penjaminan</i> IT Policy formulation of Insurance & Guarantee Holding;	Kebijakan Strategis <i>TI Holding</i> IT Holding Strategic Policy	100% selesai di Desember 2020 100% completed in December 2020	100% selesai 100% completed	
5	Koordinasi <i>TI Holding</i> Coordination of IT Holding	Koordinasi <i>TI Holding</i> IT Holding Coordination	Desember 2020 December 2020	100% selesai 100% completed	
6	Inisiatif Strategis <i>TI Holding-shared services (quick win)</i> Strategic Initiatives for IT Holding – Shared Services (Quick Win)	Solusi Bisnis Perusahaan Enterprise Business Solutions	100% selesai di Desember 2020 100% completed in December 2020	100% selesai 100% completed	Ditargetkan 100% selesai di April 2021 Targeted to be 100% completed in April 2021
7	Pengembangan <i>data warehouse</i> Data warehouse development	Solusi Bisnis Perusahaan Enterprise Business Solutions	100% selesai di Desember 2020 100% completed in December 2020	Telah dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kick-off meeting</li> <li>• Penajaman data laporan dari anggota holding dan Divisi Strategi Perusahaan</li> </ul> Has been implemented: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kick-off meeting</li> <li>• Sharpening of report data from members of holding and Corporate Strategy Division</li> </ul>	Ditargetkan 100% selesai di Maret 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard design</li> <li>• Laporan akhir desain <i>data warehouse</i></li> </ul> Targeted to be 100% completed in March 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard designs</li> <li>• Data warehouse design final report</li> </ul>
8	Penyusunan <i>Masterplan/Roadmap TI Holding</i> Formulation of IT Holding Masterplan/ Roadmap	Implementasi Kebijakan Tata Kelola TI IT Governance Policy Implementation	100% selesai di April 2021 100% completed in April 2020	Telah dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjukan konsultan</li> <li>• Kick-off meeting</li> </ul> Has been implemented: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appointment of consultant</li> <li>• Kick-off meeting</li> </ul>	Ditargetkan 100% selesai di April 2021
9	Migrasi <i>data center</i> Data center migration	Peningkatan Layanan Dasar TI IT Basic Service Improvement	100% selesai di April 2021 100% completed in April 2020	Telah dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan vendor</li> </ul> Has been Implemented <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendor Arrangement</li> </ul>	Ditargetkan 100% selesai di April 2021 Targeted to be 100% completed in April 2021



## PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PERUSAHAAN

Perusahaan terus berupaya melakukan pengembangan sistem TI untuk menunjang dan menyediakan kebutuhan dari dan perkembangan bisnis Perusahaan. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perusahaan melalui penyediaan aplikasi dan perangkat keras serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Di tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan program dan inisiatif pengembangan TI sebagai berikut:

- **Pengembangan dan Implementasi Aplikasi**  
Hingga tahun 2020 ini Divisi TI melakukan pengembangan dan implementasi aplikasi di antaranya (1) Pengembangan lanjutan *Sunfish Human Resource Management System* yang mencakup *Online Recruitment*, *Modul Training*, *Mobile-App Greatday*, *Modul Performace*, serta (2) Pengembangan *Data Warehouse & Analytic* yang meliputi penajaman data laporan dari anggota *holding* dan Divisi Strategi Perusahaan, terakhir (3) Inisiatif strategis TI *Holding-shared service (quick win)* yang meliputi API Management, Project Monitoring System dan Sistem PKBL.
- **Pengembangan dan Implementasi Infrastruktur**  
Di tahun 2020, Divisi TI telah melakukan pengembangan infrastruktur seperti Layanan *Remote Office/Work From Home*, Tanda tangan digital, Migrasi email & website ifg.id, *Security Enhancement*, *Wifi network enhancement*, *PABX enhancement*, *Redundant Active Directory*, sampai dengan finalisasi kesiapan migrasi data center diawal tahun 2021, sebagai bagian dari persiapan integrasi infrastruktur TI seluruh anggota *holding*.
- **IT Governance**  
Sepanjang tahun 2020 Divisi TI juga melakukan (1) peningkatan IT Governance Maturity Level meliputi asesmen COBIT 2019 skor 1 (*Performed*), Asesment Kapabilitas Teknologi; skor 3.62 (*Mature*), Gartner-IT Score: 3- (*Operation*), 2 (*Applicantions*), Uji Coba *Bussines Continuity Plan*, Indi 4.0 Score, selanjutnya (2) penyusunan kebijakan TI *Holding* Asuransi & Penjaminan yang meliputi pedoman koordinasi antar anak perusahaan, dan dokumen kebijakan TI *Holding*, serta (3) Koordinasi TI *Holding* yang kegiatannya meliputi Evaluasi kinerja 2020, Penyusunan

## CORPORATE INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM DEVELOPMENT

The Company strives to develop IT systems to support and provide for the needs and development of the Company's business. This effort is conducted in order to improve the efficiency and effectiveness of the Company's operations through the provision of applications and hardware as well as infrastructure needed to produce more optimal performance. In 2020, the Company has implemented the following IT development programs and initiatives:

- **Application Development and Implementation**  
Until 2020, the IT Division has developed and implemented applications including (1) further development of the Sunfish Human Resource Management System which includes Online Recruitment, Training Module, Mobile-App Greatday, Performance Module, and (2) Data Warehouse & Analytic Development which includes sharpening of report data from holding members and the Corporate Strategy Division, lastly (3) IT Holding strategic initiatives – shared service (quick win) which includes API Management, Project Monitoring System and PKBL System.
- **Infrastructure Development and Implementation**  
In 2020, the IT Division has developed infrastructure such as Remote Office/Work From Home Services, Digital signatures, e-mail & website migration ifg.id, Security Enhancement, Wifi network enhancement, PABX enhancement, Redundant Active Directory, up to the finalization of data center migration in early 2021, as part of preparation for IT infrastructure integration for all holding members.
- **IT Governance**  
Throughout 2020, the IT Division also carried out (1) improvement of IT Governance Maturity Level including COBIT 2019 assessment score 1 (*Performed*), Technology Capability Assessment; score 3.62 (*Mature*), Gartner-IT Score: 3- (*Operation*), 2 (*Applications*), Business Continuity Plan Trial, Indi 4.0 Score, then (2) IT Policy formulation of Insurance & Guarantee Holding which include guidelines for coordination between subsidiaries, and IT Holding policy documents, as well as (3) Coordination of IT Holding which activities



anggaran TI 2021, Konsolidasi asesmen mandiri IT Maturity seluruh anggota holding.

include 2020 performance evaluation, 2021 IT budget preparation, Consolidation of IT Maturity independent assessments of all holding members.

## INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI

Kegiatan pengadaan dan pengembangan sistem TI Perusahaan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

## INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT

The Company's information technology system procurement and development activities in 2020 are as follows:

**Biaya Pengembangan TI Tahun 2020**  
Cost of Information Technology Development in 2020

No	Pengadaan Procurement	Biaya Cost
1	Komputer dan Perangkatnya Computers and Devices	Rp374.770.000
2	Inventaris Kantor Lainnya Other Office Inventory	Rp137.912.335
3	Software dan Program Software and Programs	Rp786.056.000
4	Aktiva Lain-lain Other assets	Rp261.970.778
5	Perlengkapan Komputer dan Printer Computer and Printer Equipment	Rp76.330.000
6	Perangkat Lunak (Software) Software	Rp301.381.152
7	Internet Internet	Rp204.358.038
8	Biaya Sewa Lain-lain Miscellaneous Rental Fees	Rp223.910.408
9	Perangkat Lunak TI IT Software	Rp446.257.634
10	Perangkat Keras TI IT Hardware	Rp796.690.399
11	Inventaris Kantor Office inventory	Rp85.784.200
12	Instalasi TI IT Installation	Rp584.000
13	Biaya Pelatihan Karyawan Employee Training Fee	Rp16.500.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>Rp3.685.504.944</b>



## RENCANA TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAM

Untuk mewujudkan rencana jangka panjang perusahaan, Divisi Strategi Perusahaan telah merumuskan tema besar secara perusahaan di tahun 2021 sebagai tahun Konsolidasi dan Teknologi. Khusus pada bidang TI, agenda yang diusung adalah membangun kapabilitas *digital*/dan optimalisasi penggunaan infrastruktur TI secara *group*.

Divisi TI menindaklanjuti agenda tersebut dengan 4 (empat) inisiatif strategis yang akan dilakukan di tahun 2021.

### 1. IFG Net

Mengintegrasikan seluruh infrastruktur TI, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada.

### 2. Share Service

Menggunakan solusi TI terbaik diantara perusahaan yang telah berjalan.

### 3. Cost Sharing

Melakukan pengembangan dan implementasi solusi layanan TI secara bersama dengan biaya yang efisien.

### 4. Corporate Deal

Mendapatkan harga kompetitif dan terbaik untuk layanan pihak ketiga secara korporasi.

Untuk memastikan kembali agenda diatas dapat berjalan dengan baik, perusahaan telah memberikan arahan khusus terkait dengan bidang TI. Arahannya menjadi acuan bagi seluruh anak perusahaan dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2021.

## INFORMATION TECHNOLOGY PLAN FOR THE FUTURE

To realize the Company's long-term plans, the Corporate Strategy Division has formulated a major corporate theme for 2021 as the year of Consolidation and Technology. Specifically in the field of Information Technology, the agenda carried is to build digital capabilities and optimize the use of IT infrastructure as a group.

The IT Division is following up on the agenda with 4 (four) strategic initiatives that will be conducted in 2021.

### 1. IFG Net

Integrate the entire IT infrastructure, so as to optimize existing resources.

### 2. Share Service

Use the best IT solutions among existing companies.

### 3. Cost Sharing

Develop and implement IT service solutions together at an efficient cost.

### 4. Corporate Deal

Get the best and competitive prices for third party services on a corporate basis.

To ensure that the above agenda can run well, the Company has given special directions related to the Information Technology. This directive is a reference for all subsidiaries in carrying out their work programs in 2021.



Arahan yang diberikan sebagai berikut:

1. Memastikan Memastikan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan TI Anak Perusahaan sejalan dengan RJPP IFG, termasuk apabila dibutuhkan revisi dari rencana yang sudah ada berbasis integrasi, sinergi dan efisiensi;
2. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada guna menunjang terciptanya produk dan/atau jasa yang unggul serta kompetitif berbasis teknologi;
3. Memastikan penggunaan aplikasi/layanan TI Unggulan yang telah dimiliki oleh *Holding* dan Anak Perusahaan sehingga memberikan manfaat finansial kepada perusahaan (kriteria: mudah diterapkan, efisien dan diimplementasikan dalam waktu singkat);
4. Melaksanakan asesmen IT Maturity Level serta asesmen INDI 4.0 dengan konsultan kredibel yang dikordinasikan oleh *holding*;
5. Membangun Tata Kelola TI yang merupakan satu kesatuan Tata Kelola secara group.

Pada tahun 2021 juga ditargetkan perusahaan telah memiliki IT Master Plan baru, sebagai turunan inisiatif strategis perusahaan yang telah memiliki visi dan misi baru. Dokumen ini menjadi rujukan utama perusahaan dalam pengembangan TI secara bersama dengan seluruh anggota *holding* Asuransi dan penjaminan.

The directions given are as follows:

1. Ensuring that the Subsidiary's IT Long-Term and Annual Work Plans are in line with the Parent Company's Long-Term Plan, including if necessary revisions of existing plans are based on integration, synergy and efficiency;
2. Optimizing all existing potential resources to support the establishment of superior and competitive technology-based products and/or services;
3. Ensuring the use of Leading IT applications/services owned by the Parent company and Subsidiaries so as to provide financial benefits to the Company (criteria: easy to implement, efficient and implemented in a short time);
4. Conducting an IT Maturity Level assessment as well as an INDI 4.0 assessment with a credible consultant coordinated by the holding;
5. Establishing IT Governance which is a unit of Governance as a group.

In 2021, it is also targeted that the Company has a new IT Masterplan, as a derivative of the company's strategic initiatives that already have a new vision and mission. This document becomes the company's main reference in developing IT together with all members of the insurance and guarantee holding.



## **Analisis dan Pembahasan Manajemen**

**Management  
Discussion and  
Analysis**

**Jumlah Aset Perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,87% atau sebesar Rp14,66 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas di 2020 dibandingkan 2019.**

The Company's total assets in 2020 increased by 18.87% or IDR 14.66 trillion compared to the previous year, which was due to an increase in cash and cash equivalents in 2020 compared to 2019.



## TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

OVERVIEW OF THE ECONOMY AND INDUSTRY



### ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Ketidakpastian ekonomi kembali muncul pada awal tahun 2020 yang dipicu oleh merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 ("COVID-19"). Pandemi COVID-19 yang pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Tiongkok, terus menyebar ke hampir seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Seperti dikutip dari Laporan Kebijakan Moneter Kuartal IV 2020 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Perkembangan tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi COVID-19 di banyak negara untuk membangun *herd immunity* dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi di negara maju ditopang terutama oleh Amerika Serikat (AS), sedangkan di negara berkembang didorong oleh perbaikan ekonomi Tiongkok dan India.

### GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS

Economic uncertainty resurfaced in early 2020 triggered by the outbreak of the Corona Virus Disease 2019 ("COVID-19") pandemic. The COVID-19 pandemic, which was first detected at the end of 2019 in China, continues to spread to almost all countries in the world, including Indonesia. As quoted from the Quarter IV 2020 Monetary Policy Report released by Bank Indonesia, it is stated that the global economic recovery is expected to improve. These developments are in line with the implementation of COVID-19 vaccination in many countries to build herd immunity and encourage mobility, as well as the continuation of fiscal and monetary policy stimulus. The higher global economic recovery in developed countries was supported mainly by the United States (US), while in developing countries it was driven by economic improvements in China and India.



Kinerja positif sejumlah indikator pada Januari 2021 mengonfirmasi berlanjutnya pemulihan ekonomi global tersebut. *Purchasing Manager's Index (PMI)* manufaktur dan jasa di AS, Tiongkok dan India melanjutkan fase ekspansi. Selain itu, penjualan ritel di Tiongkok dan keyakinan konsumen di India juga terus meningkat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diperkirakan mencapai 5,1%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,0%. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat sehingga mendukung perbaikan kinerja eksport negara *emerging*, termasuk Indonesia. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global diperkirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian dunia. Kondisi likuiditas global juga tetap besar dan suku bunga tetap rendah sejalan dengan stimulus kebijakan moneter yang masih berlanjut. Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

## IKLIM PEREKONOMIAN NASIONAL

Implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional diperkirakan akan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional ke depan. Pada kuartal IV 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 2,19% (yoY), terutama karena masih lemahnya konsumsi swasta dan investasi bangunan sebagai dampak masih terbatasnya mobilitas akibat pandemi COVID-19. Meskipun lebih rendah dari perkiraan, ekonomi pada kuartal IV-2020 membaik dengan kontraksi yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 3,49% (yoY). Secara keseluruhan tahun 2020 ekonomi terkontraksi 2,07%. Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan berlanjut sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan akselerasi program vaksin nasional oleh Pemerintah. Perbaikan kinerja eksport terus berlanjut pada beberapa komoditas, seperti CPO, batu bara dan besi baja, serta sejumlah produk manufaktur seperti kimia organik, kendaraan bermotor, dan alas kaki, yang kemudian akan mendorong kinerja sektoral.

The positive performance of a number of indicators in January 2021 confirmed the continuation of the global economic recovery. Manufacturing and services Purchasing Manager's Index (PMI) in the US, China and India continued the expansion phase. In addition, retail sales in China and consumer confidence in India also continued to increase. With these developments, global economic growth in 2021 is estimated to reach 5.1%, which is higher than the previous estimate of 5.0%. In line with the improvement in the global economy, the volume of trade and world commodity prices continued to increase, thus supporting the improvement of export performance of emerging countries, including Indonesia. Meanwhile, uncertainty in global financial markets is expected to decrease in line with expectations of an improvement in the world economy. Global liquidity conditions also remained high and interest rates remained low, which was in line with the ongoing monetary policy stimulus. These developments encourage continued capital flows to developing countries and support the strengthening of the currencies of various countries, including Indonesia.

## NATIONAL ECONOMIC CLIMATE

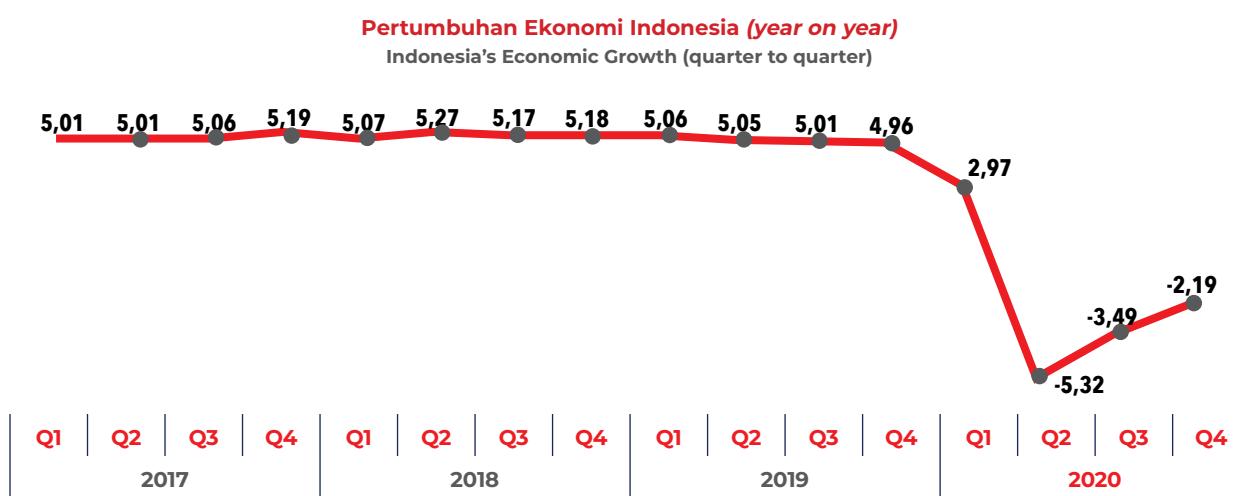
Vaccination implementation and national policy synergies are expected to boost the momentum of national economic recovery going forward. In the fourth quarter of 2020, the Indonesian economy contracted by 2.19% (yoY), mainly due to weak private consumption and construction investment as a result of limited mobility due to the COVID-19 pandemic. Although lower than expected, the economy in the fourth quarter of 2020 improved with a contraction that was lower than the previous quarter of 3.49% (yoY). Overall, in 2020 the economy contracted 2.07%. Looking ahead, the improvement in the domestic economy is expected to continue, in line with the global economic recovery and the acceleration of the national vaccine program by the Government. Improvements in export performance continued in several commodities, such as CPO, coal and steel, as well as a number of manufactured products such as organic chemicals, motor vehicles, and footwear, which in turn would boost sectoral performance.

Perbaikan kinerja ekspor tercatat di sejumlah wilayah, khususnya Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Jawa, dan Sumatera. Sementara itu, untuk mendorong masih lemahnya permintaan domestik, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif dan aman, (ii) akseleksi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM. Untuk keseluruhan tahun 2021, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,3%-5,3%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada kisaran 4,8%-5,8% sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2020.

Di sisi lain, BPS juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 masih terkontraksi sebesar -2,19% (yoY), tetapi mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kuartal III-2020 yang terkontraksi sebesar -3,49% (yoY), sebagaimana bagan berikut ini:

Improvements in export performance were recorded in a number of regions, particularly in Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Java and Sumatra. Meanwhile, to encourage the still weak domestic demand, the synergy of national economic policies continues to be strengthened. Policy synergy covers five aspects, namely: (i) opening of productive and safe sectors, (ii) acceleration of fiscal stimulus, (iii) distribution of bank credit from the side of demand and supply, (iv) continuation of monetary and macroprudential stimulus, and (v) acceleration of economic and financial digitization, particularly related to the development of MSMEs. Overall, in 2021, Bank Indonesia estimates Indonesia's economic growth in the range of 4.3%-5.3%, which is lower than the previous estimate of 4.8%-5.8%. This is in line with the realization of economic growth in the fourth quarter of 2020.

On the other hand, BPS also recorded that the economic growth in 4th Quarter of 2020 was still contracted by -2.19% (yoY), but it also experienced improvement compared to economic growth in 3rd Quarter of 2020 which was contracted by -3.49% (yoY), as shown in the following chart:





**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (quarter to quarter)**  
Indonesia's Economic Growth (quarter to quarter)



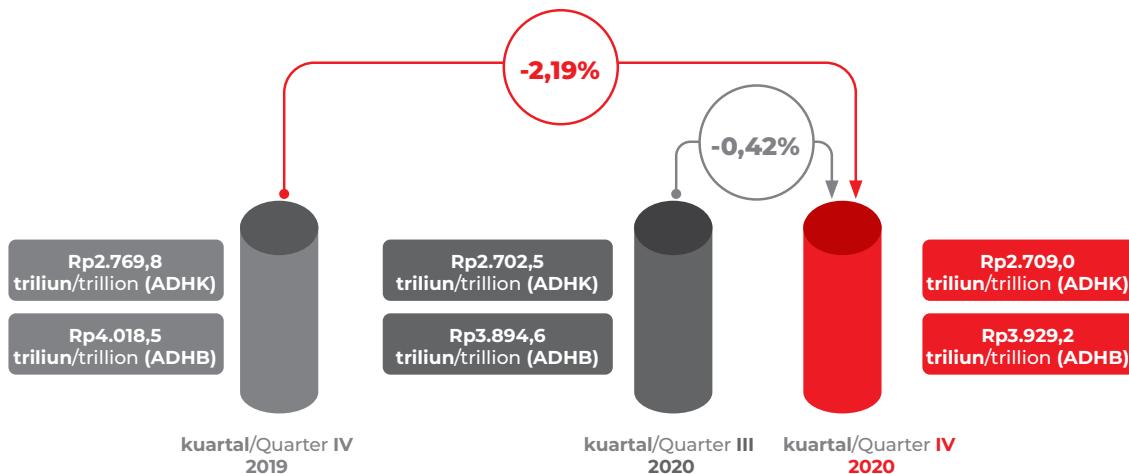
Sumber: Badan Pusat Statistik

Source: Statistics Indonesia

Pada kuartal IV tahun 2020, terjadi inflasi sebesar 0,79% (qtq), namun jika dibandingkan dengan posisi Desember 2019, terjadi inflasi sebesar 1,68% (yoy). Optimisme di 2020 muncul dengan adanya realisasi APBN yang meningkat hingga investasi yang membaik sehingga menstimulus perbaikan ekonomi nasional. Realisasi belanja Negara (APBN) kuartal IV tahun 2020 mencapai Rp732,74 triliun, naik dibanding realisasi kuartal IV tahun 2019 yang hanya Rp704,22 triliun. Sedangkan realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM (PMA dan PMDN) selama kuartal IV tahun 2020 sebesar Rp214,7 triliun, atau naik sebesar 2,7% (qtq) dan naik 3,1% (yoy).

In the fourth quarter of 2020, there was inflation of 0.79% (qtq), but when compared to the position in December 2019, there was inflation of 1.68% (yoy). Optimism in 2020 appeared with the realization of the increasing APBN so that investment improved. This stimulated the improvement of the national economy. Realization of State Budget (APBN) in the fourth quarter of 2020 reached IDR 732.74 trillion, which was an increase from the realization of the fourth quarter of 2019 which was only IDR 704.22 trillion. Meanwhile, the realization of investment recorded at Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) (Foreign Investment/PMA and Domestic Investment/PMDN) during the fourth quarter of 2020 amounted to IDR 214.7 trillion, which was an increase of 2.7% (qtq) and an increase of 3.1% (yoy).

**Ekonomi Indonesia Kuartal IV 2020 Terkontraksi 2,19 % (YoY)**  
Indonesia's Economy Quarter IV 2020 Contracted by 2.19% (YoY)



Sumber: Badan Pusat Statistik  
\* ADHK : Atas dasar Harga Konstan  
\* ADBH : Atas dasar Harga Berlaku

Source: Statistics Indonesia  
\* ADHK : Based on constant price  
\* ADBH : Based on the current price



## NPI DAN NILAI TUKAR RUPIAH

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. NPI keseluruhan 2020 diperkirakan mengalami surplus, ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang menurun. Kinerja terkini menunjukkan aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik terus berlanjut, tercermin dari investasi portofolio yang mencatat *net inflows* sebesar 8,5 miliar dolar AS dari periode Januari hingga 16 Februari 2021. Sementara itu, neraca perdagangan pada Januari 2021 mencatat surplus sebesar 1,96 miliar dolar AS, melanjutkan surplus yang telah terjadi sejak Mei 2020. Kinerja positif itu dipengaruhi oleh ekspor yang kembali mencatat kenaikan sebesar 12,24% (yoY), ditopang terutama oleh permintaan dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, serta kenaikan harga komoditas global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar 138,0 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 10,5 bulan impor atau 10,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap rendah yaitu sekitar 1,0%-2,0% dari PDB pada tahun 2021, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

## ANALISA SEGMENT INDUSTRI

Sepanjang tahun 2020, pasar modal kerap dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam kondisi Pandemi COVID-19. Kendati demikian, regulator pasar modal mampu beradaptasi secara dinamis dan terus berupaya menjawab kebutuhan pasar, serta kembali mencatatkan sejumlah pencapaian yang mendukung kemajuan Pasar Modal Indonesia. Seperti dikutip dari siaran pers Bursa Efek Indonesia dengan PR No. 114/BEI.SPR/12-2020, di tengah Pandemi COVID-19, minat perusahaan untuk masuk ke pasar modal tidak surut. Hingga 30 Desember 2020, telah terdapat 51 perusahaan yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sehingga, sampai dengan saat ini terdapat 713 perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI. Indonesia pun masih menjadi Bursa dengan jumlah IPO terbanyak di ASEAN.

## BOP AND RUPIAH EXCHANGE RATE

Indonesia's Balance of Payments (BOP) is expected to remain well, thus supporting the resilience of the external sector. The overall BOP in 2020 is estimated to be in a surplus, supported by an increasing capital and financial transactions and a declining current account deficit. Recent performance shows that foreign capital inflows to the domestic financial market have continued, as reflected in portfolio investment which recorded a net inflow of USD 8.5 billion from January to February 16, 2021. Meanwhile, the trade balance in January 2021 recorded a surplus of USD 1.96 billion, continuing the surplus that has occurred since May 2020. This positive performance was influenced by exports which again recorded an increase of 12.24% (yoY), supported mainly by demand from China, the United States and Japan, as well as rising global commodity prices. The position of Indonesia's foreign exchange reserves at the end of January 2021 was recorded at 138.0 billion US dollars, or equivalent to financing 10.5 months of imports, or 10.0 months of imports and servicing the Government's foreign debt, and was above the international adequacy standard of about 3 months of imports. Looking ahead, the current account deficit is estimated to remain low at around 1.0%-2.0% of GDP in 2021, thereby supporting the resilience of the external sector of the Indonesian economy.

## INDUSTRY SEGMENT ANALYSIS

Throughout 2020, the capital market was often faced with various challenges during the COVID-19 pandemic. Nevertheless, the capital market regulator is able to adapt dynamically and continuously strives to respond to market needs, and has again recorded a number of achievements which support the progress of the Indonesian Capital Market. As quoted from the press release of the Indonesia Stock Exchange with the number PR No. 114/BEI.SPR/12-2020, in the midst of the COVID-19 Pandemic, companies' interest in entering the capital market did not subside. As of December 30, 2020, there have been 51 companies that have conducted Initial Public Offerings (IPOs) and listed shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Thus, up to now there are 713 companies that have listed their shares on the IDX. Indonesia is still the stock exchange with the highest number of IPOs in ASEAN.



Aktivitas perdagangan BEI pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang tercermin dari kenaikan rata-rata frekuensi perdagangan yang tumbuh 32% menjadi 619 ribu kali per hari di bulan November 2020 dan menjadikan likuiditas perdagangan saham BEI lebih tinggi diantara Bursa-bursa lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pada periode yang sama, Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) berangsur-angsur pulih dan mencapai nilai Rp9,18 triliun.

Sepanjang tahun 2020, jumlah investor di Pasar Modal Indonesia yang terdiri atas investor saham, obligasi, maupun reksadana, mengalami peningkatan sebesar 56% mencapai 3,87 juta *Single Investor Identification* (SID) sampai dengan 29 Desember 2020. Kenaikan investor ini 4 kali lipat lebih tinggi sejak 4 tahun terakhir dari 894 ribu investor pada tahun 2016. Selain itu, investor saham juga naik sebesar 53% menjadi sejumlah 1,68 juta SID. Kemudian, jika dilihat dari jumlah investor aktif harian, hingga 29 Desember 2020 terdapat 94 ribu investor atau naik 73% dibandingkan akhir tahun lalu. Peningkatan jumlah investor serta aktivitas transaksi investor harian tentu merupakan hasil upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama *Self-Regulatory Organization* (SRO) dalam mengedepankan sosialisasi dan edukasi terkait investasi di pasar modal kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya partisipasi investor ritel domestik, rekor transaksi perdagangan baru berhasil dicapai pada tahun 2020 ini, yaitu frekuensi transaksi harian saham tertinggi pada 22 Desember 2020 sebanyak 1.697.537 transaksi.

Di sisi lain, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan industri asuransi jiwa mencatat adanya tren peningkatan kinerja di Kuartal IV Tahun 2020, yaitu peningkatan pada Pendapatan, Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Pembayaran Klaim dan Manfaat kepada nasabah. Peningkatan kinerja pada Kuartal IV tahun 2020 didorong oleh membaiknya ekonomi makro, peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan asuransi jiwa, mulai adanya sosialisasi vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah dan dampak atas strategi industri asuransi jiwa sepanjang tahun 2020. Data perbandingan Kuartal IV Tahun 2019 dan Kuartal IV tahun 2020 masih menunjukkan sedikit perlambatan di beberapa kategori, seperti Total Pendapatan, dan Total Klaim akibat pandemi COVID-19, namun AAJI optimis akan perkembangan industri asuransi jiwa.

IDX trading activity in 2020 also increased as reflected in the increase in the average trading frequency which grew by 32 percent to 619 thousand times per day in November 2020 and made IDX stock trading liquidity higher among other exchanges in the Southeast Asia region. In the same period, the Average Daily Transaction Value (RNTH) gradually recovered and reached a value of IDR 9.18 trillion.

Throughout 2020, the number of investors in the Indonesian Capital Market, which consists of stock, bond and mutual fund investors, increased by 56 percent to reach 3.87 million Single Investor Identification (SID) as of December 29, 2020. The increase in number of investors was 4 times higher than the last 4 years from 894 thousand investors in 2016. In addition, stock investors also rose by 53 percent to 1.68 million SID. Further, when viewed from the number of daily active investors, until December 29, 2020, there were 94,000 investors, which was an increase of 73 percent when compared to the end of last year. The increase in the number of investors and daily investor transaction activities is certainly the efforts' result of the Financial Services Authority (OJK) together with the Self-Regulatory Organization (SRO) in promoting socialization and education related to investment in the capital market to the public. Along with the increasing participation of domestic retail investors, a new record for trading transactions was achieved in 2020, namely the highest daily transaction frequency of shares on December 22, 2020, totaling 1,697,537 transactions.

On the other hand, the Indonesian Life Insurance Association (AAJI) stated that the life insurance industry recorded a trend of improving performance in the fourth quarter of 2020, namely an increase in income, premium income, investment returns and payment of claims and benefits to customers. Improved performance in the fourth quarter of 2020 was driven by improved macroeconomics, increased public awareness of the need for life insurance protection, the socialization of COVID-19 vaccination by the government and the impact on the life insurance industry strategy throughout 2020. Comparative data for the fourth quarter of 2019 and the fourth quarter of 2020 still shows a slight slowdown in several categories, such as Total Revenue, and Total Claims due to the COVID-19 pandemic. However, AAJI is optimistic about the development of the life insurance industry.



Data AAJI menunjukkan peningkatan pendapatan dari Kuartal III Tahun 2020 ke Kuartal IV Tahun 2020 sebesar 81,7%, dari Rp50,56 triliun di Kuartal III Tahun 2020, menjadi Rp91,86 triliun di Kuartal IV Tahun 2020. Perbaikan lain terlihat pada investasi, dimana jika dibandingkan dengan Kuartal III Tahun 2020, selama Kuartal IV tahun 2020 AAJI mencatatkan Hasil Investasi sebesar Rp35,52 triliun. Meskipun pendapatan industri asuransi jiwa dari Kuartal III Tahun 2020 ke Kuartal IV Tahun 2020 meningkat, jika Kuartal IV Tahun 2020 dibandingkan dengan Kuartal IV Tahun 2019, tercatat perlambatan Total Pendapatan sebesar 8,6% dimana Kuartal IV Tahun 2019 tercatat sebesar Rp235,80 triliun dan di Kuartal IV Tahun 2020 tercatat Rp215,42 triliun. Sedangkan untuk Hasil Investasi, sebesar Rp17,95 pada Kuartal IV Tahun 2020 tercatat melambat dibandingkan Rp23,53 triliun pada Kuartal IV Tahun 2019 yang disebabkan oleh kondisi pasar modal di Indonesia yang kurang kondusif hingga Q4 2020, ditandai dengan adanya koreksi yang cukup dalam dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yaitu sebesar 5,1% dibandingkan Q4 2019.

Sementara itu, kinerja asuransi umum melemah pada tahun 2020, hal tersebut selaras dengan lini bisnis utama yang belum pulih. Industri asuransi umum mengalami penurunan perolehan premi dan kenaikan klaim sepanjang tahun 2020. Lini bisnis asuransi kendaraan bermotor masih mengalami penurunan kinerja, sehingga porsi preminya disalip oleh asuransi kredit. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) per tahun 2020, perolehan premi industri tercatat sebesar Rp76,8 triliun. Nilainya menurun 3,6% (yoY) dari sebelumnya senilai Rp79,8 triliun. Perolehan premi terbesar masih berasal dari lini bisnis utama asuransi kerugian, yakni asuransi properti. Sepanjang tahun 2020, Lini bisnis ini memperoleh premi Rp21,03 triliun atau tumbuh tipis 0,8% (yoY) dari sebelumnya Rp20,8 triliun.

AAJI data shows an increase in revenue from the third quarter of 2020 to the fourth quarter of 2020 by 81.7%, from IDR 50.56 trillion in the third quarter of 2020 to IDR 91.86 trillion in the fourth quarter of 2020. Another improvement is seen in investment, in which when compared to the third quarter of 2020, in the fourth quarter of 2020, AAJI recorded an investment return of IDR 35.52 trillion. However, even though the life insurance industry's revenue from the third quarter of 2020 to the fourth quarter of 2020 increased, when comparing the fourth quarter of 2020 to the fourth quarter of 2019, there was a slowdown in total revenue of 8.6%. In the fourth quarter of 2019, the total revenue was recorded at IDR 235.80 trillion while in the fourth quarter of 2020, it was recorded at IDR 215.42 trillion. As for Investment Returns, which amounted to IDR 17.95 trillion in the fourth quarter of 2020, it was recorded to slow down compared to IDR 23.53 trillion in the fourth quarter of 2019. This was due to the unfavorable condition of the capital market in Indonesia until Q4 2020, marked by a fairly deep correction in The Jakarta Composite Index (JCI) of 5.1% when compared to Q4 2019.

Meanwhile, the performance of general insurance weakened in 2020; this was in line with the main business lines that have not yet recovered. The general insurance industry experienced a decline in premium income and an increase in claims throughout 2020. The motor vehicle insurance business line was still experiencing a decline in performance, so that the premium portion was overtaken by credit insurance. Based on data from the Indonesian General Insurance Association (AAUI) as of 2020, the acquisition of industrial premiums was recorded at IDR 76.8 trillion. Its value decreased by 3.6% (year-on-year/yoY) from the previous IDR 79.8 trillion. The largest premium income still came from the main line of loss insurance business, namely property insurance. Throughout 2020, this line of business received a premium of IDR 21.03 trillion or grew slightly by 0.8% (yoY) from the previous IDR 20.8 trillion.



Lini bisnis asuransi kendaraan bermotor yang sebelumnya ada di urutan kedua mengalami penurunan premi cukup dalam. Pada tahun 2020, lini bisnis ini membukukan premi Rp14,7 triliun atau anjlok 21,3% (yoY) dari 2019 senilai Rp18,7 triliun. Kinerja asuransi kredit mengalami pertumbuhan 5,9% (yoY) pada tahun 2020 dengan premi Rp16,4 triliun, naik dari tahun sebelumnya senilai Rp15,5 triliun. Hal tersebut membuat kontribusi premi asuransi kredit menjadi terbesar kedua, menyalip posisi asuransi kendaraan bermotor sebelumnya.

Adapun, sepanjang tahun 2020, industri asuransi kerugian membayarkan klaim Rp36,1 triliun. Nilainya turun 3,3% (yoY) dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp37,3 triliun. Pembayaran klaim terbesar berasal dari asuransi kredit senilai Rp10,7 triliun atau mencapai 48,5% dari total klaim industri. Pembayaran itu melebihi total klaim dua lini bisnis utama asuransi umum, yakni properti senilai Rp6,9 triliun (19,1%) dan kendaraan bermotor senilai Rp7,01 triliun (19,4%).

The motor vehicle insurance business line, which was previously in second place, experienced a steep decline in premiums. In 2020, this business line posted a premium of IDR 14.7 trillion, or a drop of 21.3% (yoY) from 2019 which was valued at IDR 18.7 trillion. Credit insurance performance grew by 5.9% (yoY) in 2020 with a premium of IDR 16.4 trillion, which was an increase from the previous year of IDR 15.5 trillion. This generates the contribution of credit insurance premiums as the second largest, overtaking the previous position of motor vehicle insurance.

Meanwhile, throughout 2020, the loss insurance industry paid claims of IDR 36.1 trillion. Its value decreased by 3.3% (yoY) from the same period last year of IDR 37.3 trillion. The largest claim payments came from credit insurance worth IDR 10.7 trillion or 48.5% of the industry's total claims. This payment exceeds the total claims of the two main general insurance business lines, namely property insurance worth IDR 6.9 trillion (19.1%) and motor vehicles worth IDR 7.01 trillion (19.4%).



# RENCANA STRATEGIS 2020

2020 STRATEGIC PLAN

## STRATEGI PERUSAHAAN TAHUN 2020

Penunjukkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG sebagai *Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan* mendasari Perusahaan untuk mengambil strategi inisiatif.

Berdasarkan penunjukkan tersebut, Perusahaan mengambil langkah untuk memperkuat fondasinya sebagai *Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan* dengan melakukan beberapa strategi inisiatif seperti:

1. Menyelesaikan pembentukan organisasi *Holding* beserta tanggungjawabnya (manajemen risiko, dan lain-lain.) untuk memastikan operasional yang *prudent*;
2. Menyelaraskan area fokus bisnis Anak Perusahaan, termasuk penetapan aturan pelibatan (*rule of engagements*); dan
3. Finalisasi strategi produk dan desain ekosistem, khususnya untuk Asuransi Kendaraan bermotor dan Properti.

Dengan menjadi BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, Perusahaan juga melakukan transformasi *brand* menjadi Indonesia Financial Group (IFG). IFG merupakan *holding* yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan.

IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas.

## CORPORATE STRATEGY 2020

The appointment of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) or IFG as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs underlies the Company to take strategic initiatives.

Based on this appointment, the Company took steps to strengthen its foundation as a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs by conducting several strategic initiatives such as:

1. Completing the establishment of the Holding organization and its responsibilities (risk management, etc.) to ensure prudent operations;
2. Aligning the business focus areas of the Subsidiaries, including establishing the rules of engagements; and
3. Finalization of product strategy and ecosystem design, especially for Motor Vehicle and Property Insurance.

By becoming a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs the Company also transformed its brand into the Indonesia Financial Group (IFG). IFG is a holding established to perform a role in national development through the development of a complete and innovative financial industry through investment, insurance and guarantee services.

IFG is committed to bringing changes in the financial sector, especially insurance, investment, and guarantees that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full of integrity.



Sebagai *Holding* BUMN Asuransi dan Penjaminan, saat ini Perusahaan memiliki 10 (sepuluh) anak perusahaan yang masih aktif melakukan kegiatan operasional, yakni terdiri dari 5 (lima) anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan dan 5 (lima) anak perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal dan investasi.

## ASPEK PEMASARAN

IFG merupakan *holding* non operasional, sehingga proses pemasaran dilakukan oleh anak perusahaan.

As a SOE Holding Insurance and Guarantee, currently, the Company has 10 (ten) subsidiaries that are still actively conducting operational activities, which consist of 5 (five) subsidiaries engaged in insurance and guarantee and 5 (five) subsidiaries engaged in capital market and investment sector.

## MARKETING ASPECT

IFG is a non-operational holding, so the marketing process is carried out by subsidiaries of IFG.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### OVERVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT

Hingga 31 Desember 2020, Perusahaan belum memiliki segmen usaha yang sesuai dengan kriteria dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Penyesuaian 2015) yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, segmen usaha dalam pembahasan ini, Perusahaan membaginya berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan melalui 10 (sepuluh) anak perusahaannya, yakni sebagai berikut:

1. Jasa Keuangan Non-Asuransi & Penjaminan;
2. Asuransi Umum dan Reasuransi;
3. Penjaminan;
4. Asuransi Jiwa dan Kesehatan.

## SEGMENT OPERASI

### Jasa Keuangan Non-Asuransi & Penjaminan

#### Penjelasan Segmen Usaha

Segmen jasa keuangan non-asuransi & penjaminan merupakan kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan melalui 5 (lima) anak perusahaan, yakni PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), dan PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). Sementara itu, terdapat 1 (satu) anak perusahaan segmen jasa keuangan non-asuransi & penjaminan yang tidak melakukan kegiatan operasional atau dalam kondisi dormant, yakni PT Bahana Mitra Investa (BMI).

#### Strategi Tahun 2020

Pasar keuangan masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian makro ekonomi global terkait dampak pandemi global penyebaran virus COVID-19. Dampak ketidakpastian kondisi makro ekonomi dan geopolitik global telah menciptakan perilaku ekonomi yang semakin sulit diprediksi, dan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja IHSG dan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Hal ini berdampak langsung pada iklim pasar modal di Indonesia, yang mengakibatkan nilai transaksi mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Penurunan nilai transaksi juga terjadi dari pasar obligasi maupun ekuitas.

Perusahaan dari sisi *brokerage* dan manajer investasi akan melakukan Pengembangan pasar retail dengan basis digital bekerja sama dengan berbagai *online platform* dan penambahan *distribution channel* baru. Perusahaan akan mendorong anak

As of December 31, 2020, the Company does not have a business segment which meets the criteria in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (2015 Adjustment) applicable in Indonesia. For this reason, in terms of business segments, the Company divides them based on the business activities performed by the Company through its 10 (ten) subsidiaries, which are as follows:

1. Non-Insurance & Guarantee Financial Services;
2. General Insurance and Reinsurance;
3. Guarantee Service;
4. Life and Health Insurance.

## OPERATING SEGMENT

### NON-INSURANCE & GUARANTEE FINANCIAL SERVICES

#### Description of Business Segments

The non-insurance & guarantee financial services segment is a business activity of the Company which is operated through 5 (five) subsidiaries, namely PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), and PT Grahaniaga Tata Utama (GNTU). Meanwhile, there is 1 (one) subsidiary of the non-insurance & guarantee financial services segment that does not carry out operational activities or is in a dormant condition, namely PT Bahana Mitra Investa (BMI).

#### Strategy for 2020

Financial markets are still overshadowed by the risk of global macroeconomic uncertainty related to the impact of the global pandemic on the spread of the COVID-19 virus. The impact of uncertainty in global macroeconomic and geopolitical conditions has created economic behavior that is increasingly difficult to predict, and has had a significant impact on JCI performance and the depreciation of the Rupiah against the US Dollar. This has a direct impact on the capital market climate in Indonesia, resulting in a decrease in transaction value compared to last year. The decline in transaction value also occurred in the bond and equity markets.

Companies, in terms of brokerage and investment managers, will develop retail markets on a digital basis in collaboration with various online platforms and add new distribution channels. The Company will encourage subsidiaries engaged in the advisory



perusahaan yang bergerak pada bidang *advisory* untuk secara aktif melakukan penjajakan pada pasar jasa *advisory capital market* maupun *non-capital market* meliputi transaksi M&A, *debt and corporate restructuring*, *feasibility study*, serta jasa *financial advisory* lainnya. Penggalian potensi proyek jasa *advisory* dilakukan atas proyek dan klien baru serta juga dengan turut melakukan pengembangan pada proyek-proyek yang dijalankan mulai dari tahun sebelumnya. Lini bisnis modal ventura akan melakukan proses investasi pada UMKM dengan melalui penyertaan saham serta melakukan pembiayaan mikro. Sedangkan dari manajemen property akan berusaha untuk mempertahankan okupansi *rate* dari Gedung Graha CIMB Niaga, dan melakukan sinergi dengan anggota *holding* IFG.

### Produktivitas Segmen

#### 1. PT BAHANA SEKURITAS (BS)

BS merupakan anak perusahaan IFG yang bergerak di bidang pasar modal dengan ruang lingkup usaha meliputi perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek, jasa penasihat keuangan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diijinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sejak didirikan, perusahaan telah menunjukkan kontribusi nyata dan komitmennya dalam membantu upaya Pemerintah untuk mengembangkan pasar modal Indonesia dan secara aktif mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan milik negara dan swasta. Berbagai transaksi penjaminan emisi saham (IPO) maupun emisi obligasi, *strategic placement*, *financial advisory* dan terus bertumbuhnya volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia adalah merupakan bagian dari kontribusi yang telah diberikan oleh perusahaan terhadap perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2020, total penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan sebanyak 7 penghargaan, antara lain 3 penghargaan dari The Asset Triple A Country Awards sebagai *Best Corporate and Institutional Adviser* kategori Domestik 2019, *Best IPO 2019* dan *Best Equity 2019*. Selain itu, perusahaan mendapatkan 2 penghargaan dari Alpha Southeast Asia dengan kategori *Best FCY Sovereign Bond Deal in Southeast Asia 2019* dan *Best LCY Bond Deal in Indonesia 2019*. Perusahaan juga mendapatkan penghargaan dari Finance Asia atas kategori *Best Islamic Finance Bond*

sector to actively explore the capital market and non-capital market advisory services, including M&A transactions, debt and corporate restructuring, feasibility studies, and other financial advisory services. The exploration of potential advisory service projects conducted on new projects and clients as well as by participating in developing projects that have been carried out, starting from the previous year. The venture capital business line will perform the investment process in MSMEs through equity participation and micro-financing. Meanwhile, property management will try to maintain the occupancy rate of the CIMB Building, and synergize with members of the IFG holding.

### Segment Productivity

#### 1. PT BAHANA SEKURITAS (BS)

PT Bahana Sekuritas (the Company) is a subsidiary of IFG which is engaged in the capital market with a scope of business covering securities brokerage and underwriting, financial advisory services and other activities permitted by the Financial Services Authority. Since its establishment, the Company has demonstrated a tangible contribution and commitment to assisting the Government's efforts to develop the Indonesian capital market and actively encouraging the growth of state-owned and private companies. Various transactions of underwriting shares (IPO) as well as bond issuance, strategic placement, financial advisory and the continued growth of trading volume on the Indonesia Stock Exchange are parts of the contribution that has been given by the Company to the Indonesian economy.

In 2020, the Company received a total of 7 awards, including 3 awards from The Asset Triple A Country Awards as Best Corporate and Institutional Adviser for the Domestic category 2019, Best IPO 2019 and Best Equity 2019. In addition, the Company received 2 awards from Alpha Southeast Asia in the Best FCY Sovereign Bond Deal in Southeast Asia 2019 and Best LCY Bond Deal in Indonesia 2019. The Company also received an award from Finance Asia for the Best Islamic Finance Bond 2019 category and International Finance as the Most Innovative Brokerage House in Indonesia 2020.



2019 dan International Finance sebagai *Most Innovative Brokerage House in Indonesia 2020*.

Berbagai tantangan dan kondisi eksternal yang terjadi di sepanjang tahun 2020 turut mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan. Pendapatan operasional Perusahaaan di tahun 2020 sebesar Rp155,4 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,2% dibanding pendapatan tahun 2019 yang sebesar Rp165,6 miliar.

Various external challenges and conditions that occurred throughout 2020 also affected the achievement of the Company's performance. The Company's operating revenue in 2020 was IDR 155.4 billion, which was a decrease of 6.2% compared to revenue in 2019 which was IDR 165.6 billion.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas BS 2019-2020**  
 Bahana Sekuritas's Income and Profitability Table 2019-2020

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Pendapatan Income	154,29	163,54	(9,25)	(5,6)
Laba Bersih Net Profit	(30,57)	(0,57)	(31,14)	(5,491,0)

Pada tahun 2020 Perusahaan membukukan pendapatan operasional sebesar Rp154,2 miliar, lebih rendah 5,6% dibandingkan periode sebelumnya. *Market share* perusahaaan dari kegiatan perantara perdagangan efek bersifat ekuitas mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2020 sebesar 1,05% terhadap 2019 sebesar 1,34%). Kondisi penurunan *market share* tersebut berdampak terhadap penurunan pendapatan dari kegiatan perantara perdagangan efek sebesar 6,3% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dari lini bisnis penjaminan emisi efek bersifat ekuitas, Perusahaan mencatat pendapatan pada tahun 2020 yang berasal dari proyek *private placement* saham PT Merdeka Cooper Gold (MDKA) dengan total pendapatan sebesar Rp2,4 miliar.

In 2020 the Company posted operating revenue of IDR 154.2 billion, which is 5.6% lower than the previous period. The Company's market share from equity securities trading brokerage activities has decreased compared to the previous year (1.05% in 2020 against 1.34% in 2019). The declining condition in market share resulted in a 6.3% decrease in income from securities brokerage activities compared to 2019. From the equity securities underwriting business line, the Company recorded revenue in 2020 from the private placement project of PT Merdeka Cooper Gold (MDKA) shares with a total revenue of IDR 2.4 billion.

## 2. PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT (BTIM)

BTIM memiliki kegiatan bisnis inti sebagai manajer investasi yang bidang usahanya meliputi pengelolaan dana dan penasihat investasi milik investor. Pada akhir tahun 2020, BTIM mengelola 135 portofolio dana kelolaan dalam bentuk Reksa Dana sebanyak 122 produk, dan Kontrak Pengelolaan Dana sebanyak 13 akun portofolio yang terdiri dari 8 akun

## 2. PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT (BTIM)

BTIM has a core business activity as an investment management company whose line of business includes fund management and investment advisory owned by investors. At the end of 2020, BTIM managed 135 portfolios of funds under management in the form of 122 Mutual Funds products, and Fund Management Contracts of 13 portfolio accounts consisting of



portofolio nasabah Dana Pensiun dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, 4 akun portofolio Perusahaan Jasa Asuransi, serta 1 akun portofolio Yayasan Kesejahteraan Karyawan.

BTIM mampu menunjukkan kinerja yang baik di tengah kondisi pandemi COVID-19, yang tentunya merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, eksternal dan internal. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator kinerja seperti jumlah Asset Under Management (AUM) dan jumlah investor. Meskipun di tengah situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19, AUM yang dimiliki BTIM tetap tumbuh positif, dimana pada akhir tahun tercatat sebesar Rp51,9 triliun atau meningkat sebesar 6% dari posisi akhir tahun 2019. Sementara itu, jumlah investor juga mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu tumbuh 38,9% dari sebelumnya 46.124 investor menjadi 64.044 investor. Di sisi keuangan, BTIM berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp50,8 miliar di tengah pandemi COVID-19.

8 customer portfolio accounts of Pension Funds and Financial Institution Pension Funds, 4 Insurance Services Company portfolio accounts, and 1 portfolio account for the Employee Welfare Foundation.

BTIM was able to demonstrate good performance in the midst of the COVID-19 pandemic, which certainly was the result of a combination of various external and internal factors. This is reflected in a number of performance indicators such as the number of Assets Under Management (AUM) and the number of investors. Eventhough in the midst of a difficult situation due to the COVID-19 pandemic, AUM owned by BTIM continued to grow positively, in which at the end of the year it was recorded at IDR 51.9 trillion or an increase of 6% from the position at the end of 2019. Meanwhile, the number of investors also experienced a significant increase, which grew 38.9% from the previous 46,124 investors to 64,044 investors. On the financial side, BTIM managed to record a net profit of IDR 50.8 billion in the midst of the COVID-19 pandemic.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas BTIM 2019-2020**  
BTIM Income and Profitability Table 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019 (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan Income	163,45	178,71	(15,26)	(8,54)
Laba Bersih Net Profit	50,83	50,58	0,25	0,49

Pendapatan tahun 2020 dicapai sebesar Rp163,45 miliar, menurun 8,54% jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 sebesar Rp178,71 miliar. Penurunan tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat munculnya pandemi COVID-19 mengakibatkan gangguan terhadap perekonomian dan bisnis, yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan harga instrument investasi sehingga menyebabkan penurunan secara drastis valuasi dana investor yang dikelola oleh BTIM. Beban tahun 2020 terealisasi sebesar Rp101,03 miliar, menurun 5,70% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp107,14 miliar. Perusahaan

Operating Revenue in 2020 was at IDR 163.45 billion, which was a decrease of 8.54% when compared to the position at the end of 2019 of IDR 178.71 billion. This decline is natural considering the emergence of the COVID-19 pandemic causing disruption to the economy and business, which in turn has an impact on the price of investment instruments, causing a drastic decline in the valuation of investment funds managed by Bahana TCW. Expenses in 2020 were realized at IDR 101.03 billion, or decreased by 5.70% from the realization in 2019 of IDR 107.14 billion. The Company took a number of efficiency measures to anticipate

melakukan sejumlah langkah efisiensi guna mengantisipasi dampak pandemi COVID-19, antara lain dilakukan dengan mengurangi anggaran biaya tunjangan kinerja karyawan. Laba sebelum pajak penghasilan tahun berjalan tahun 2020 tercapai sebesar Rp66,86 miliar, meningkat 0,57% dari tahun 2019 sebesar Rp66,48 miliar. Realisasi laba bersih tahun berjalan tahun 2020 tercapai sebesar Rp50,83 miliar, meningkat 0,49% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp50,58 miliar.

### 3. PT BAHANA ARTHA VENTURA (BAV)

BAV yang merupakan anak usaha IFG memfokuskan bisnisnya pada sektor pengembangan UMKM dan merupakan mitra Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas sebaran pergerakan sektor *riil* secara nasional. Melalui anak usaha Perusahaan Modal Ventura Daerah yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia maka BAV dapat memperkuat jaringan kerja dan memperluas basis UMKM yang ada di setiap daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2020, BAV dan seluruh jaringan PMVD telah melakukan pembiayaan kepada 67,6 ribu PU berskala mikro, kecil dan menengah di berbagai sektor usaha yang menyerap sekitar 4,3 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Selama tahun 2020, kegiatan usaha BAV masih menghadapi berbagai tantangan antara lain dampak pandemi COVID-19, ketatnya persaingan dalam bisnis inti dan perolehan sumber pendanaan baru yang sesuai dengan segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

the impact of the COVID-19 pandemic, among others, by reducing the budget for employee performance allowances. Profit before income tax for the current year in 2020 was IDR 66.86 billion, or an increase of 0.57% from 2019 of IDR 66.48 billion. Realization of net profit for the current year in 2020 was IDR 50.83 billion, or an increase of 0.49% from the realization in 2019 of IDR 50.58 billion.

### 3. PT BAHANA ARTHA VENTURA (BAV)

PT Bahana Artha Ventura, which is a subsidiary of IFG, focuses its business on the MSME development sector and is a partner of the Government in promoting economic growth and expanding the distribution of real sector movements nationally. Through subsidiaries of Regional Venture Capital Companies spread across 24 provinces in Indonesia, BAV can strengthen its network and expand the existing MSME base in each region.

By the end of 2020, BAV and the entire PMVD network had financed 67.6 thousand micro, small and medium-scale PUs in various business sectors, which absorbed around 4.3 million direct and indirect workers.

In 2020, BAV's business activities still faced various challenges, including the impact of the COVID-19 pandemic, intense competition in core business and in obtaining new funding sources in line with the Micro, Small and Medium Enterprises segment.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas BAV 2019-2020**  
 BAV Income and Profitability Table 2019-2020

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Persentase (%)</b> Percentage
Pendapatan Usaha Operating Revenue	191,80	215,20	(23,4)	(10,9)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(2,48)	(16,86)	(19,3)	(114,7)



Pendapatan usaha BAV pada tahun 2020 sebesar Rp191,8 miliar, mengalami penurunan Rp23,4 miliar atau turun 10,9% jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun 2019 yang membukukan penerimaan sebesar Rp215,2 miliar, Penurunan pendapatan usaha terjadi di PMVD seiring dengan adanya penurunan jumlah pembiayaan baru, Adanya COVID-19 memberikan dampak besar terhadap kinerja PMVD, selain karena faktor keterbatasan PMVD untuk melakukan ekspansi usaha, tekanan juga terjadi terhadap kinerja PU existing PMVD yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan pembayaran kewajiban ke PMVD karena terganggunya operasional usaha dari PU di PMVD.

#### 4. PT BAHANA KAPITAL INVESTA (BKI)

Pada tahun 2020 kegiatan *monitoring* kerja sama investasi (*investment*) dan pengembangan jasa penasihat keuangan (*advisory*) yang dilakukan oleh BKI masih menghadapi berbagai tantangan antara lain penetrasi pasar yang potensial dan sesuai, serta meningkatkan aspek sinergitas dengan anak perusahaan IFG lainnya.

Pada awalnya, pendirian BKI bertujuan unruk melengkapi portfolio bisnis keuangan grup IFG saat ini, khususnya pada subsektor *private equity and investment*, Oleh karena itu, BKI diharapkan mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan investasi yang terkemuka dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan arus investasi di Indonesia serta, memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

BKI secara konsisten terus melakukan upaya terbaik agar ke depannya kinerja perusahaan dapat terus meningkat, di samping upaya berkelanjutan demi mewujudkan visinya sesuai dengan perkembangan grup IFG dan arahan Pemegang Saham, Pencapaian BKI selama tahun 2020 adalah menyelesaikan 5 (lima) proyek *advisory*, masih dalam pelaksanaan 1 (satu) proyek *advisory*, penyerapan 6 (enam) orang SDM dan penerbitan 5 (lima) kebijakan untuk mendukung aktivitas BKI.

BAV's operating revenue in 2020 was IDR 191.8 billion, or a decrease of IDR 23.4 billion, or a decrease of 10.9%, when compared to operating revenues in 2019 which was recorded at IDR 215.2 billion. The decline in operating revenue occurred in PMVD; in line with a decrease in the number of new financing. COVID-19 had a major impact on PMVD performance. Apart from the limitations of PMVD to expand its business, there is also pressure on the performance of existing PMVD PU which has difficulty in fulfilling its obligations to PMVD due to disruption of business operations from PU in PMVD.

#### 4. PT BAHANA KAPITAL INVESTA (BKI)

In 2020, monitoring activities of investment cooperation and the development of financial advisory services performed by BKI still faced various challenges, including potential and appropriate market penetration, as well as increasing aspects of synergy with other subsidiaries of IFG.

Initially, the establishment of BKI was aimed at complementing the current IFG group's financial business portfolio, particularly in the private equity and investment sub-sector. Therefore, BKI is expected to be able to grow and develop into a leading investment company and can contribute to increasing the growth of investment flows in Indonesia as well as to have a positive impact on the national economy.

In addition to continuous efforts to realize its vision in accordance with the development of the BPUI group and the direction of the Shareholders, BKI consistently continues to make best efforts so that in the future the Company's performance can continue to improve. BKI's achievements for the period January to December 2020 were the completion of 5 (five) advisory project, the still-in-preparation of 1 (one) advisory project, absorption of 6 (six) human resources and issuance of 5 (five) policies to support BKI activities,



**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas BKI 2019-2020**  
**BKI Income and Profitability Table 2019-2020**

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Pendapatan Income	13,76	19,78	(6,02)	(30,43)
Laba Bersih Net Profit	1,57	5,10	(3,54)	(69,22)

Pendapatan tahun 2020 dicapai sebesar Rp13,76 miliar yang terdiri dari pendapatan investasi sebesar Rp6,66 miliar dan pendapatan *advisory* sebesar Rp11,23 miliar, menurun 36,77% jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2019 sebesar Rp19,78 miliar. Beban tahun 2020 terealisasi sebesar Rp11,87 miliar, menurun 10,68% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp13,29 miliar. Laba sebelum pajak penghasilan tahun berjalan tahun 2020 tercapai sebesar Rp1,04 miliar, menurun 80,23% dari tahun 2019 sebesar Rp5,26 miliar. Penurunan yang cukup signifikan tersebut dikarenakan dampak dari COVID-19, sehingga bisnis kurang berjalan dengan optimal. Realisasi laba bersih tahun berjalan pada 2020 tercapai sebesar Rp1,57 miliar menurun 69,22% dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp5,1 miliar.

Income in 2020 was achieved at IDR 13.76 billion, consisting of investment income of IDR 6.66 billion and advisory income of IDR 11.23 billion, which is a decrease of 36.77% when compared to the position at the end of 2019 of IDR 19.78 billion. Expenses in 2020 were realized at IDR 11.87 billion, or a decrease of 10.68% from the realization in 2019 of IDR 13.29 billion. Profit before income tax for the current year in 2020 was IDR 1.04 billion, or a decrease of 80.23% from 2019 of IDR 5.26 billion. This significant decrease was due to the impact of COVID-19, so that the business was not running optimally. The realization of net profit for the year in 2020 was IDR 1.57 billion, or a decrease of 69.22% from the realization in 2019 of IDR 5.1 billion.

## 5. PT GRAHANIAGA TATA UTAMA (GNTU)

Pada 2020 Indonesia mengalami resesi yang sangat besar dikarenakan oleh pandemi COVID-19 dan berdampak terhadap bisnis properti, penurunan sektor properti khususnya perkantoran di Indonesia sangat besar dikarenakan pandemi COVID-19. Beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan sektor properti rentan dipengaruhi sejumlah faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pada tahun 2020 sektor properti perkantoran belum mengalami perbaikan karena pandemi COVID-19, namun demikian PT GNTU dengan melaksanakan program-programnya sampai dengan akhir tahun 2020 dapat mempertahankan tingkat hunian pada kisaran 96% lebih tinggi dari rata-rata tingkat hunian Gedung di CBD Jakarta.

## 5. PT GRAHANIAGA TATA UTAMA (GNTU)

In 2020 Indonesia experienced a very large recession due to the COVID-19 pandemic and it impacted the property business. The decline in the property sector, especially offices in Indonesia, was very significant due to the COVID-19 pandemic. In recent years, the growth of the property sector is vulnerable to a number of factors such as slowing economic growth. In 2020, the office property sector has not improved due to the COVID-19 pandemic, however, by implementing its programs, PT GNTU, until the end of 2020, can maintain occupancy rates at around 96% higher than the average building occupancy rate in the Jakarta CBD.



**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas GNTU 2019-2020**  
GNTU Income and Profitability Table 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019 (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan Income	157,80	184,18	(26,38)	-14,32
Laba Bersih Net Profit	113,70	83,76	29,94	35,47

PT GNTU membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk tahun 2020 sebesar Rp113,7 miliar atau sekitar Rp29,9 miliar 35,7% lebih tinggi daripada tahun 2019. Pendapatan jasa pengelolaan gedung terealisasi sebesar Rp155,4 miliar lebih rendah dibandingkan tahun 2019, namun GNTU melakukan divestasi pada anak perusahaan PT Griyacanggu Tatautama (GCTU) dengan pendapatan dari divestasi aset sebesar Rp52,1 miliar.

PT GNTU recorded a net profit attributable to the parent entity in 2020 of IDR 113.7 billion or around IDR 29.9 billion (35.7%) higher than 2019. Revenue from building management services was realized at IDR 155.4 billion, which is lower than in 2019. However, GNTU, through divestment of assets of its subsidiary, PT Griyacanggu Tatautama (GCTU), recorded a revenue amounting to IDR 52.1 billion.

## 6. PT BAHANA MITRA INVESTA (BMI)

Pada Tahun 2020, BMI tidak melakukan kegiatan usaha atau dalam kondisi *dormant*.

## 6. PT BAHANA MITRA INVESTA (BMI)

In 2020, BMI did not carry out business activities or is in a dormant condition.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas BMI 2019-2020**  
BMI Income and Profitability Table 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019 (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan (Beban) Non-Operasional Non-operational Revenue (Expenses)	0,14	0,21	(0,07)	(31,4)
Rugi Bersih Net Loss	(0,50)	(0,52)	(0,01)	(2,7)

Pendapatan non-operasional pada 2020 terealisasi sebesar Rp0,14 miliar yang terdiri dari pendapatan bunga deposito, giro, dan pedapatan lainnya. jumlah tersebut mengalami penurunan Rp0,07 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya penempatan deposito bank dan turunnya tingkat bunga deposito bank.

Non-operational revenue in 2020 was realized at IDR 0.14 billion, consisting of interest revenue from time deposits, demand deposits, and other revenue. The decrease of IDR 0.07 billion was mainly due to reduced bank deposit placements and lower bank deposit interest rates.

## Pendapatan dan Profitabilitas Segmen

Pendapatan dan profitabilitas segmen jasa keuangan non-asuransi & penjaminan, adalah sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Jasa Keuangan Non-Asuransi & Penjaminan 2019-2020**  
 Table of Income and Profitability of the Non-Insurance and Guarantee Financial Services Segments in 2019-2020

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Pendapatan Usaha Operating Revenue	681,11	761,45	(80,34)	(10,55)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(132,55)	(156,37)	(23,82)	(15,23)

## Prospek dan Strategi Tahun 2021

Walaupun pandemi masih akan membayangi Indonesia di tahun 2021, pelaksanaan program vaksinasi diharapkan dapat meredam penyebaran virus COVID-19 sehingga memulihkan dunia usaha di tahun 2021. Sementara itu kondisi global yang diproyeksikan membaik serta suku bunga yang diprediksi tetap rendah juga akan memicu sentimen positif untuk berinvestasi di pasar modal. Perusahaan berharap pertumbuhan bisnis akan tetap terjaga di tahun 2021. Lini *brokerage* diharapkan tumbuh dengan baik didukung oleh kondisi perekonomian makro yang lebih kondusif. Investor *retail* diperkirakan masih akan mendominasi pertumbuhan transaksi di pasar modal.

Selain itu, lini *underwriting* juga diproyeksikan akan mencatat kinerja yang baik, antara lain ditopang oleh dilaksanakannya rencana aksi korporasi yang sempat tertunda di tahun 2020. Perusahaan juga berharap dapat terus meningkatkan kinerja bisnis *advisory* untuk membantu perusahaan-perusahaan yang terdampak negatif dari pandemi melalui solusi keuangan yang tepat dan inovatif untuk mengatasinya. Sisi bisnis manajer investasi akan didukung oleh peningkatan minat investor *retail* untuk berinvestasi di reksa dana seiring bunga deposito perbankan yang diproyeksikan akan tetap rendah.

Menurut perkiraan, prospek bisnis properti akan lebih positif pada tahun 2021, didorong oleh sentimen positif yang dihasilkan dari dimulainya pemulihan pada kuartal keempat tahun 2020, peluncuran program vaksinasi COVID-19 oleh

## Segment's Income and Profitability

The income and profitability of the non-insurance & guarantee financial services segments are as follows:

## Prospects and Strategies for 2021

Although the pandemic will still overshadow Indonesia in 2021, the implementation of the vaccination program is expected to reduce the spread of the COVID-19 virus so as to restore the business world in 2021. Meanwhile, global conditions that are projected to improve and interest rates that are predicted to remain low will also trigger positive sentiment for investment in the capital market. The Company hopes that the Company's business growth will be maintained in 2021. The brokerage line is expected to grow well, supported by more conducive macroeconomic conditions. Retail investors are expected to continue to dominate transaction growth in the capital market.

In addition, the underwriting business line is also projected to record good performance, among others supported by the implementation of the corporate action plan which was delayed in 2020. The Company also hopes to continue to improve its advisory business performance to help companies, that have been negatively affected by the pandemic, through appropriate and innovative financial solutions to overcome them. The investment management business line will be supported by increased retail investor interest in investing in mutual funds as bank deposit rates are projected to remain low.

According to forecasts, the outlook for the property business will be more positive in 2021, driven by positive sentiment resulting from the start of the recovery in the fourth quarter of 2020, the launch of the government's COVID-19 vaccination program,



pemerintah, dan pelonggaran bertahap terhadap pembatasan kegiatan usaha dan sosial.

## Asuransi Umum dan Reasuransi

### Penjelasan Segmen Usaha

Segmen asuransi umum dan reasuransi merupakan kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan melalui 3 (tiga) anak perusahaan, yakni PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

- A. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) merupakan perusahaan yang menerima penugasan melaksanakan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- B. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) memiliki anak perusahaan yaitu PT Jasa Raharja Putera yang memasarkan produk Asuransi Umum, Asuransi Kredit dan Suretyship.
- C. PT Asuransi Jasa Indonesia atau biasa disingkat menjadi Jasindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum.
- D. PT Asuransi Kredit Indonesia atau biasa disingkat Askrindo merupakan perusahaan Asuransi yang bergerak sebagai Lembaga Penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh Perbankan dan juga mempunyai lini bisnis di Asuransi Umum.
- E. PT Askrindo memiliki anak perusahaan yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia atau disingkat Nasional Re. Perusahaan tersebut mempunyai lini bisnis di Reasuransi (Konvensional dan Syariah).

### Strategi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Industri Asuransi mencatatkan perlambatan kinerja akibat tekanan ekonomi selama pandemi COVID-19. Namun, Aset industri asuransi umum tumbuh 5,60% dibanding periode tahun 2019, dimana pada periode tahun 2019 asuransi umum mencatat total aset sebesar Rp157,93 triliun menjadi Rp166,78 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2020, industri asuransi umum membukukan premi Rp76,89 triliun mengalami penurunan 4,04% (oy) dari sebelumnya Rp80,12 triliun. Seiringan dengan penurunan dari premi terjadi peningkatan dari sisi klaim industri asuransi umum sebesar 3,41% yang menyebabkan laba setelah pajak dari industri asuransi umum mengalami penurunan sebesar 15,92%.

and the gradual easing of restrictions on business and social activities.

## General Insurance and Reinsurance

### Description of Business Segments

The general insurance and reinsurance segment is a business activity of the Company which is operated through 3 (three) subsidiaries, namely PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), and PT Asuransi Kredit Indonesia.

- A. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja is a company that received an assignment to implement Law No. 33 of 1964 concerning the Passenger Accident Compulsory Insurance Fund and Law No. 34 of 1964 concerning the Road Traffic Accident Fund.
- B. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja) has a subsidiary, namely PT Jasa Raharja Putera which markets General Insurance, Credit Insurance, and Suretyship products.
- C. PT Asuransi Jasa Indonesia, or commonly abbreviated as Jasindo, is a company engaged in General Insurance
- D. PT Asuransi Kredit Indonesia, or commonly abbreviated as Askrindo, is an insurance company that operates as a guarantee institution for loans disbursed by banks and also has a business line in general insurance.
- E. PT Askrindo has a subsidiary, namely PT Reasuransi Nasional Indonesia or commonly abbreviated as National Re. The company has a business line in Reinsurance (both Conventional and Sharia).

### Strategy for 2020

In 2020, the Insurance Industry recorded a slowdown in performance due to economic pressures during the COVID-19 pandemic. However, general insurance industry assets grew by 5.60% compared to the period in 2019, in which in the 2019 period, general insurance recorded total assets of IDR 157.93 trillion to IDR 166.78 trillion in 2020. In 2020, the general insurance industry recorded a premium of IDR 76.89 trillion, or decreased by 4.04% (year-on-year/oy) from the previous year's number of IDR 80.12 trillion. Along with the decrease in premiums, there was an increase in claims from the general insurance industry by 3.41% which caused profit after tax from the general insurance industry to decrease by 15.92%.



Sedangkan dari aset industri reasuransi umum tumbuh 9,25% dibanding periode tahun 2019, dimana pada periode tahun 2019 reasuransi mencatat total aset sebesar Rp24,71 triliun menjadi Rp26,99 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2020, industry reasuransi membukukan premi Rp27,12 triliun mengalami peningkatan 23,46% (yoY) dari sebelumnya Rp21,97 triliun. Seiringan dengan peningkatan dari premi terjadi peningkatan dari sisi klaim industri reasuransi yang lebih tinggi sebesar 67,28% disebabkan kondisi pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan laba setelah pajak dari industri reasuransi umum mengalami penurunan sebesar 42,89%.

Strategi perusahaan sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah berusaha dalam melakukan perbaikan portofolio bisnis bertujuan untuk mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan. Penjualan produk dilakukan secara selektif sesuai dengan tingkat profitabilitasnya. Adapun beberapa produk atau *Line of Business* (LoB) yang mengalami kerugian akibat dari hasil *underwriting* yang negatif telah dilakukan restrukturisasi. Selain itu perusahaan telah melakukan *customer focus* dilakukan perusahaan agar dapat memberikan pelayanan prima yang bernilai tambah. Hal itu tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepuasan konsumen sehingga mampu mendorong tumbuhnya komitmen serta kepercayaan pelanggan. Dari sisi inisiatif operasional perusahaan terus melakukan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan-layanan TI. Kemudian perusahaan juga mengembangkan aplikasi pendukung serta aplikasi *surrounding* yang dibutuhkan unit bisnis untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

### Produktivitas Segmen

Produktivitas segmen Asuransi Umum dan reasuransi di tahun 2020 dibanding tahun 2019 (produktivitas produk atau jasa/layanan). Secara keseluruhan di tahun 2020, pangsa pasar Industri Asuransi mengalami kenaikan sebesar 4,3% dibandingkan Tahun sebelumnya (2020 premi sebesar Rp499 triliun dan 2019 premi sebesar Rp478,55 triliun).

Khususnya pada pangsa pasar Asuransi Umum, terdapat penurunan premi sebesar 4,04% dibandingkan Tahun sebelumnya (2020 premi sebesar Rp77 triliun dan 2019 premi sebesar Rp80 triliun). Sedangkan pada Reasuransi terdapat kenaikan premi sebesar 23,46% dibandingkan Tahun

Meanwhile, the general reinsurance industry assets grew by 9.25% compared to the period in 2019, in which in the 2019 period, reinsurance recorded total assets of IDR 24.71 trillion to IDR 26.99 trillion in 2020. In 2020, the reinsurance industry recorded a premium of IDR 27.12 trillion, or an increase of 23.46% (year-on-year/yoY) from the previous number of IDR 21.97 trillion. Along with the increase in premiums, there was an increase in the reinsurance industry claims which was higher by 67.28% due to the COVID-19 pandemic condition. This generated the profit after tax from the general reinsurance industry to decrease by 42.89%.

The Company's strategy throughout 2020 was to strive to improve the business portfolio aimed at supporting the increase in Company profitability. Product sales are carried out selectively according to the level of profitability. As for several products or Line of Business (LoB) which suffered losses due to negative underwriting results, a restructuring was carried out. In addition, the Company has conducted a customer focus in order to provide value-added excellent service. This will certainly affect the level of customer satisfaction so that it can encourage the growth of customer commitment and trust. In terms of operational initiatives, the Company continues to develop and maintain applications for IT services. The Company also develops supporting applications and surrounding applications that are required by the business unit to support the Company's operational activities.

### Segment Productivity

Productivity of the General Insurance and reinsurance segments in 2020 compared to 2019 (product or service productivity). Overall in 2020, the market share of the Insurance Industry increased by 4.3% when compared to the previous year (2020 premiums of IDR 499 trillion and 2019 premiums of IDR 478.55 trillion).

Particularly in the general insurance market share, there was a 4.04% decrease in premiums compared to the previous year's (2020's premiums of IDR 77 trillion and 2019's premiums of IDR 80 trillion). Meanwhile, in Reinsurance, there was an increase in premiums of 23.46% when compared to the previous



sebelumnya (2020 premi sebesar Rp27 triliun dan 2019 premi sebesar Rp22 triliun).

### Pendapatan dan Profitabilitas Segmen

Pendapatan dan profitabilitas segmen Asuransi Umum dan Reasuransi, adalah sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Asuransi Umum dan Reasuransi 2019-2020 PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Konsolidasi**

Table of Income and Profitability of General Insurance and Reinsurance Segments  
Of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja in 2019-2020, Consolidated

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019 (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan Usaha/Premi Bruto Operating Revenue/Gross Premium	5.385,06	6.114,98	(729,91)	(12)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	1.508,90	1.559,00	50,10	(3)

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap penurunan Premi Bruto (GWP) sebesar 12%, dimana laba bersih juga terkoreksi sebesar 3% dibandingkan tahun sebelumnya, yang diantaranya disebabkan oleh penurunan pada lini bisnis Iuran Wajib, *Accident and Health*, asuransi Kendaraan Bermotor dan *Public Liability*.

year's (2020's premiums of IDR 27 trillion and 2019's premiums of IDR 22 trillion).

### Segment's Income and Profitability

The income and profitability of the General Insurance and Reinsurance segments are as follows:

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Asuransi Umum dan Reasuransi 2019-2020 PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Konsolidasi**

Table of Income and Profitability of General Insurance and Reinsurance Segments  
Of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja in 2019-2020, Consolidated

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019 (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan Usaha/Premi Bruto Operating Revenue/Gross Premium	5.385,06	6.114,98	(729,91)	(12)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	1.508,90	1.559,00	50,10	(3)

The COVID-19 pandemic resulted in a decrease in Gross Premium (GWP) by 12%, in which the net profit was also corrected by 3% when compared to the previous year's. It was partly due to a decline in the Compulsory Premium, Accident and Health business lines, Motor Vehicle insurance and Public Liability.

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Asuransi Umum dan Reasuransi 2019-2020 PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Konsolidasi**

Table of Income and Profitability of General Insurance and Reinsurance Segments  
Of PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) in 2019-2020, Consolidated

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019 (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan Usaha/Premi Bruto Operating Revenue/Gross Premium	4.303,07	5.391,67	(1.088,60)	(20)
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(252,93)	(118,48)	134,46	113

Pendapatan Premi Bruto (GWP) terjadi penurunan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan performa di lini bisnis Asuransi Kredit, Kendaraan Bermotor, *Engineering* dan Kebakaran, sehingga hal diatas mempengaruhi kenaikan kerugian sebesar 113%.

Gross Premium Income (GWP) decreased by 20% compared to the previous year, which was generated by a decrease in performance in the Credit Insurance, Motor Vehicles, Engineering and Fire business lines, so that the above affected an 113% increase in losses.



## Prospek dan Strategi Tahun 2021

Di industri asuransi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 memaksa pelaku bisnis asuransi mengurangi operasional kantor sehingga membuat perusahaan harus membuat penyesuaian bisnis. Penerapan *work from home* (WFH) di satu sisi menghambat operasional bisnis, tetapi di sisi lain meningkatkan penggunaan teknologi menjadi lebih optimal. Oleh sebab itu, AAUI mengimbau pelaku bisnis asuransi umum untuk mengoptimalkan transformasi digital yang selama ini sudah dilakukan. Pada saat kondisi pandemi seperti ini terdapat banyak orang yang membutuhkan layanan kesehatan. Namun, di satu sisi mereka tidak mau datang ke rumah sakit. Oleh sebab itu, layanan *telemedicine* akan menjadi sangat populer. AAUI menilai tidak ada pilihan lain bagi pelaku bisnis asuransi untuk tidak mengadopsi teknologi karena hingga akhir tahun 2020 dan 2021 mendatang beberapa pemain asuransi sudah menyiapkan layanan khusus yang menanamkan teknologi untuk operasional bisnisnya. Perusahaan asuransi diperkirakan akan segera memperluas layanan dan bisnisnya di sektor *insurance technology* (insurtech).

## PENJAMINAN

### Penjelasan Segmen Usaha

Segmen penjaminan merupakan kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan melalui anak perusahaan, yakni PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

PT Jaminan Kredit Indonesia merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Lingkup usaha PT Jamkrindo meliputi melakukan penjaminan kepada UMKM dan Koperasi serta melakukan penjaminan penugasan pemerintah;

### Strategi Tahun 2020

Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/

## Prospects and Strategies for 2021

In the insurance industry, the Indonesian General Insurance Association stated that the COVID-19 pandemic forced insurance business players to reduce office operations, thus forcing companies to create business adjustments. The implementation of work from home (WFH) on the one hand hampers business operations, but on the other hand increases the use of technology to be more optimal. Therefore, AAUI urges general insurance business players to optimize the digital transformation that has been conducted so far. During this pandemic, there are many people who need health services. However, on the one hand, they do not want to come to the hospital. Therefore, telemedicine services will become very popular. AAUI considers that insurance business players have to adopt technology because until the end of 2020 and 2021, several insurance players have prepared special services that embed technology in their business operations. Insurance companies are expected to soon expand their services and businesses in the insurance technology (insurtech) sector.

## GUARANTEE

### Description of Business Segments

The guarantee segment is the Company's business activity which is operated through subsidiaries, namely PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

PT Jaminan Kredit Indonesia is a company engaged in credit guarantee. PT Jamkrindo's scope of business includes guaranteeing SMEs and cooperatives as well as guaranteeing government assignments.

### 2020 Strategy

In order to deal with threats that endanger the national economy and/or Financial System Stability, the Government has stipulated Government Regulation Number 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in Support of State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic and/or in Facing Threats That Endanger



atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional ("PP 23/2020") atau yang dikenal dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN"). Untuk melaksanakan Program PEN tersebut Pemerintah dapat melakukan:

1. PMN;
2. Penempatan Dana;
3. Investasi Pemerintah; dan/atau
4. Penjaminan.

Selain itu Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka Penjaminan, Pemerintah dapat melakukannya: a) secara langsung; dan/atau melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk, dalam hal ini Pemerintah akan menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia untuk melakukan Penjaminan.

Adapun Penjaminan yang dimaksud diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam hal PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas Penjaminan untuk melaksanakan penugasan tersebut, Pemerintah dapat memberikan PMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas Penjaminan tersebut Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa pembayaran imbal jasa Penjaminan, Penjaminan balik, *loss limit*, atau dukungan pembagian risiko lainnya yang dibutuhkan, dan atas dukungan Penjaminan tersebut, Pemerintah dapat mengenakan imbal jasa Penjaminan sesuai dengan porsi dukungan yang diberikan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peranan yang diberikan oleh Negara kepada Jamkrindo dan Askrindo dalam program PEN sangat penting. Sehingga Jamkrindo dan Askrindo telah mengerahkan segenap sumber daya yang dimilikinya dan dengan dukungan Pemerintah untuk dapat segera membantu pemulihan kondisi sosial ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Di samping itu, dunia perbankan yang menjadi mitra Jamkrindo dan Askrindo tetap berkomitmen untuk menyalurkan kredit untuk UMKM, seperti HIMBARA yang menjadi mitra

the National Economy and/or Financial System Stability and Saving the National Economy ("PP 23/2020"), or known as the National Economic Recovery ("PEN") Program. To implement the PEN Program, the Government may conduct the followings:

1. State Equity Participation (PMN);
2. Fund Placement;
3. Government Investment; and/or
4. Guarantee.

In addition, the Government can also perform policies through state spending in accordance with the provisions of laws and regulations. Within the framework of the Guaranteee, the Government may: a) operate it directly; and/or through a designated Guarantee company, which is in this case, the Government will assign PT Jaminan Kredit Indonesia and/or PT Asuransi Kredit Indonesia to carry out the guarantee operation.

The guarantee referred to is given to business players in the form of guarantee for venture capital loans provided by banks. In the event that PT Jaminan Kredit Indonesia and/or PT Asuransi Kredit Indonesia requires an increase in the capacity of the Guaranteee to conduct the assignment, the Government may provide State Equity Participation (PMN) in accordance with the provisions of the legislation.

For such guarantee, the government can provide support in the form of payment of guarantee fees, back guarantee, loss limits, or other required risk sharing support, and for the support of the guarantee operation, the government can charge a guarantee fee in accordance with the portion of the support provided.

Therefore, it can be understood that the role given by the State to Jamkrindo and Askrindo in the PEN program is very important. For this reason, Jamkrindo and Askrindo have mobilized all their resources and with the support of the Government to be able to immediately assist the recovery of Indonesia's socio-economic conditions affected by the COVID-19 pandemic. In addition, the banking sector, which becomes a partner of Jamkrindo and Askrindo, remains committed to extending credit to MSMEs, such as HIMBARA, which has become the main partner for guarantee companies, and



terbesar bagi perusahaan penjaminan terus menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM lewat KUR.

### Produktivitas Segmen

Sebagai inisiatif untuk mendorong kegiatan ekonomi, pemerintah menjalankan program penjaminan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Askrindo dan Jamkrindo memiliki peran yang besar dalam menjamin kedua program pemerintah tersebut.

1. KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur/individu ataupun badan usaha. Pada tahun 2020, penyaluran volume penjaminan KUR Jamkrindo adalah sebesar Rp113 Triliun dan Askrindo adalah sebesar Rp111 Triliun;
2. PEN merupakan salah satu rangkaian program pemerintah untuk mengurangi dampak COVID-19 terdapat perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020, penyaluran volume penjaminan PEN Jamkrindo adalah sebesar Rp6,2 Triliun dan Askrindo adalah sebesar Rp7,8 Triliun.

### Pendapatan dan Profitabilitas Segmen

Pendapatan dan profitabilitas segmen penjaminan, adalah sebagai berikut:

continues to channel financing to MSME players through KUR.

### Segment Productivity

As an initiative to encourage economic activity, the government operates a KUR (People's Business Credit) and PEN (National Economic Recovery) guarantee program. Askrindo and Jamkrindo have a big role in guaranteeing these two government programs.

1. KUR is credit/financing for venture capital to individuals debtors or business entities. In 2020, the distribution of Jamkrindo's KUR guarantee volume is IDR 113 Trillion and Askrindo is IDR 111 Trillion.
2. PEN is one of a series of government programs to reduce the impact of COVID-19 on the Indonesia's economy. In 2020, Jamkrindo's PEN guarantee volume distribution is IDR 6.2 Trillion and Askrindo's is IDR 7.8 Trillion

### Segment's Income and Profitability

The income and profitability of the guarantee segment are as follows:

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Penjaminan 2019-2020 PT Jaminan Kredit Indonesia Konsolidasi**

Table of Income and Profitability of the Guarantee Segment In 2019-2020 of PT Jaminan Kredit Indonesia, Consolidated

<b>Uraian</b> Description	<b>2020 (Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019 (Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> <b>Growth</b>	
			<b>Nominal (Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Pendapatan Usaha/IJP Bruto Operating Revenue/Gross Guarantee Fee	3.326,82	2.645,11	681,70	26
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	456,13	198,91	257,22	129

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) terjadi kenaikan sebesar 26% dibandingkan tahun sebelumnya, yang diantaranya disebabkan oleh peningkatan pada lini bisnis KUR, PEN dan Penjaminan Konsumtif. Hal ini berdampak kepada kenaikan laba bersih secara signifikan sebesar 129% dibandingkan tahun sebelumnya.

The revenue from Guarantee Fee (IJP) increased by 26% compared to the previous year, which was generated by an increase in the KUR, PEN and Consumptive Guarantee business lines. This resulted in a significant increase in net profit of 129% compared to the previous year.



### **Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Penjaminan 2019-2020 PT Asuransi Kredit Indonesia Konsolidasi**

Table of Income and Profitability of the Guarantee Segment In 2019-2020 of PT Asuransi Kredit Indonesia, Consolidated

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019 (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan Usaha Operating Revenue	13.155,45	12.974,68	180,77	1
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	603,62	468,98	134,64	29

Pendapatan Usaha di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang diantaranya disebabkan oleh peningkatan pada lini bisnis KUR, PEN dan Asuransi Umum. Hal ini berdampak positif kepada kenaikan Laba Bersih yang signifikan sebesar 29% dibandingkan tahun lalu.

Gross Premium Income (GWP) in 2020 increased compared to the previous year, which was partly due to an increase in the KUR, PEN and General Insurance business lines. This has a positive impact on a significant increase in Net Profit of 29% compared to last year.

### **Prospek dan Strategi Tahun 2021**

Menyikapi kondisi sosial ekonomi Indonesia yang terdampak cukup berat dari penyebaran COVID-19 tersebut, Bank Indonesia menyampaikan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Masih terjadi *net inflows* investasi portofolio ke Indonesia. Berdasarkan data transaksi harian nonresiden, baik dari SBN maupun saham dalam periode 13-20 April 2020, terjadi *inflow* asing terhadap SBN sebesar Rp4,37 triliun dan *outflow* saham sebesar Rp2,8 triliun, sehingga secara keseluruhan tercatat *net inflow* sebesar Rp1,57 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara bertahap kepercayaan kepada Indonesia khususnya dalam investasi portofolio *fixed income*, berangsur-angsur mengalami kenaikan, didorong oleh:
  - a. Imbal hasil investasi portofolio dalam bentuk SBN cukup menarik, diukur dari beberapa indikator, antara lain *yield spread* sebesar 7,1% atau, 713 bps antara obligasi Pemerintah Indonesia 10 tahun dengan US treasury 10 tahun dan *yield* secara riil sebesar 4,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan India, Meksiko dan negara asia lainnya;
  - b. Indikator premi risiko yaitu indeks volatilitas pasar keuangan (VIX) sebelum COVID-19 berada pada level 18,8, pada saat puncak yaitu sekitar minggu II-III Maret 2020 pada level 83,2 dan data terakhir menunjukan VIX pada level 43,8, artinya kepanikan pasar keuangan global berangsur-angsur mereda. Ke depan, dengan perbedaan suku bunga tinggi dan premi risiko yang berangsur-angsur membaik serta langkah-langkah

### **Prospects and Strategies for 2021**

Responding to Indonesia's socio-economic conditions which were quite severely affected by the spread of COVID-19, Bank Indonesia conveyed the following 3 (three) statements, namely:

1. There are still net inflows of portfolio investment to Indonesia. Based on data on daily non-resident transactions, both from SBN and stocks, for the period 13-20 April 2020, there was a foreign inflow of IDR 4.37 trillion to SBN and an outflow of shares of IDR 2.8 trillion, bringing a total net inflow of IDR 1.57 trillion. This shows that, gradually, trust in Indonesia, particularly in fixed income portfolio investment, is gradually increasing. This is driven by:
  - a. The return on portfolio investment in the form of SBN, which is quite attractive. It was measured by several indicators, including the yield spread of 7.1% or, 713 bps between 10-year Indonesian Government bonds and 10-year US treasuries and a real yield of 4.6%, which is higher than India, Mexico and other Asian countries.
  - b. The risk premium indicator, namely the financial market volatility index (VIX) before COVID-19, which was at the level of 18.8. At its peak period, which was around week II-III of March 2020, it was at the level of 83.2 and the latest data showed the VIX at the level of 43.8. This means that the global financial market panic has gradually subsided. Going forward, with the difference in high interest rates and a gradually improving risk premium



kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait akan meningkatkan daya tarik investasi portofolio di Indonesia dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

2. Nilai tukar Rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat mengarah ke Rp15.000 pada akhir tahun Pergerakan nilai tukar Rupiah dipengaruhi 2 (dua) faktor, yaitu:
  - a. Faktor fundamental yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah Secara fundamental, nilai tukar Rupiah masih *undervalued*, didukung oleh inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran sasaran  $3\pm1\%$ , defisit transaksi berjalan kuartal I akan lebih rendah dari 1,5% PDB dan secara keseluruhan pada tahun 2020 akan lebih rendah dari 2% PDB, serta langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, pemerintah dan otoritas terkait termasuk stimulus fiskal dan moneter yang memperkuat kepercayaan kepada Indonesia;
  - b. Faktor teknikal akan memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah dari hari ke hari, antara lain dari sisi global yaitu harga minyak turun, perselisihan Rusia dan Arab Saudi, dan faktor geopolitik, seperti isu Korea Utara, pembukaan *lockdown* AS, dan sisi domestik seperti langkah penanganan COVID-19, termasuk penerapan PSBB di Indonesia.
3. Inflasi terkendali dan rendah Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai dengan minggu ketiga April 2020, menunjukan bahwa harga-harga di pasar terkendali dan rendah. Inflasi bulan April 2020 diperkirakan sekitar 0,22% (mtm) atau 2,82% (yo). Komoditas penyumbang inflasi yaitu bawang merah, emas perhiasan, dan gula pasir. Sementara itu, komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai merah, daging ayam dan telur.

Penilaian lembaga rating Standard and Poor's (S&P) yang merevisi *outlook* menjadi negatif terhadap Indonesia pada 17 April 2020 lalu, mencerminkan ekspektasi S&P bahwa dalam beberapa waktu ke depan Indonesia menghadapi kenaikan risiko eksternal dan fiskal akibat meningkatnya kewajiban luar negeri dan beban utang Pemerintah untuk membiayai penanganan Pandemi COVID-19. Terkait hal ini,

as well as Bank Indonesia policy measures, the Government and relevant authorities will increase the attractiveness of portfolio investment in Indonesia and support the stability of the Rupiah exchange rate.

2. The Rupiah exchange rate which tends to trend in a stable condition and strengthen towards IDR 15,000 at the end of the movement of the Rupiah exchange rate. This was influenced by 2 (two) factors,
  - a. Fundamental factors that will affect the movement of the Rupiah exchange rate. Fundamentally, the Rupiah is still undervalued; supported by low and controlled inflation within the target range of  $3\pm1\%$ , the current account deficit in Quarter I will be lower than 1.5% of GDP and overall in 2020 will be lower than 2% of GDP as well as the policies regulated by Bank Indonesia, the government and relevant authorities, including fiscal and monetary stimulus, strengthens confidence in Indonesia.
  - b. Technical factors will affect the movement of the Rupiah exchange rate from day to day. This includes global aspects such as falling oil prices, the dispute between Russia and Saudi Arabia, and geopolitical factors, such as the issue of North Korea, the opening of the US lockdown, as well as domestic aspects, such as measures to deal with COVID-19, which includes the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Indonesia.
3. Controlled and low inflation Based on the Price Monitoring Survey (SPH), which was conducted by Bank Indonesia up to the third week of April 2020, shows that prices in the market are under control and low. Inflation in April 2020 was estimated at around 0.22% (mtm) or 2.82% (yo). Commodities contributing to inflation were shallots, gold jewelry and sugar. Meanwhile, commodities contributing to deflation were red chilies, chicken meat and eggs.

The rating agency Standard and Poor's (S&P) assessment which revised the outlook for Indonesia to negative on April 17, 2020, reflects S&P's expectation that in the future Indonesia will face increased external and fiscal risks due to increased foreign obligations and the Government's debt burden to finance the handling of the COVID-19 pandemic crisis. In this regard, Bank Indonesia sees that the condition of Indonesia's External Debt (ULN)



Bank Indonesia melihat bahwa kondisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih aman, terkendali serta produktif.

Pemerintah juga akan meluncurkan berbagai stimulus guna tetap memberdayakan pelaku UMKM agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi situasi yang cukup berat pada saat ini. Menteri Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) skema yang dilakukan Pemerintah untuk melakukan mitigasi yaitu memberikan stimulus moneter untuk UMKM yang masih dapat berkegiatan usaha, dan mekanisme bantuan sosial untuk UMKM yang tidak dapat lagi menjalankan kegiatannya.

Stimulus moneter yang dilakukan antara lain dengan insentif perpajakan bagi para pelaku UMKM yang masih memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun dengan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh). Penundaan angsuran dan subsidi bunga kepada usaha mikro penerima kredit dari lembaga pengelola dana bergulir, LPDB, kemudian penundaan angsuran dan dana subsidi bunga kepada para penerima permodalan dari beberapa kementerian.

## Asuransi Jiwa dan Kesehatan

### Penjelasan Segmen Usaha

Segmen asuransi jiwa dan kesehatan merupakan kegiatan usaha Perusahaan yang dijalankan melalui 1 (satu) anak perusahaan, yakni PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") yang didirikan pada bulan Oktober tahun 2020 untuk melengkapi portofolio layanan asuransi dan penjaminan serta mempertimbangkan peluang bisnis. Untuk memperluas cakupan bisnis IFG dalam memenuhi seluruh kebutuhan asuransi dan penjaminan di Indonesia, IFG Life diharapkan dapat menjadi perusahaan yang besar dan *sustain* terutama di sektor asuransi jiwa dan kesehatan. IFG Life akan berdiri sebagai perusahaan asuransi perlindungan (jiwa dan kesehatan) untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG sebagai *holding* Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") asuransi dan penjaminan yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan produk dan layanan asuransi proteksi yang maksimal, sehat dan komprehensif yang dilandasi oleh tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang kuat dan penuh kehati-hatian, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses layanan sehingga layanan proteksi bisa diberikan secara maksimal kepada Pemegang Polis.

is still safe, under control and productive.

The government will also launch various stimuli to continue empowering MSMEs so that they can survive in facing a fairly difficult situation. The Minister of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises said that there are 2 (two) schemes conducted by the Government to perform mitigation, namely providing monetary stimulus for MSMEs that can still carry out business activities, and a social assistance mechanism for MSMEs that can no longer carry out their business activities.

The monetary stimulus conducted included tax incentives by lowering the income tax rate (PPH) for MSMEs who still has a turnover of below IDR 4.8 billion per year. Other stimuli included postponement of installments and interest subsidies to micro-enterprises that receive credit from the revolving fund management agency, LPDB, and postponement of installments and interest subsidy funds to recipients of venture capital from several ministries.

## Life and Health Insurance

### Description of Business Segments

The life and health insurance segment is a business activity of the Company which is operated through 1 (one) subsidiary, namely PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") which was established in October 2020 to complete the insurance and guarantee service portfolio and consider business opportunities. To expand the business scope of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI") in meeting all insurance and guarantee needs in Indonesia, IFG Life is expected to become a large and sustainable company, especially in the life and health insurance sectors. IFG Life will be established as a life and health insurance company to complement and strengthen the BPUI ecosystem as an SOE Holding of Insurance and Guarantee that has a strategic position in developing maximum, healthy and comprehensive protection insurance products and services which is supported by good governance and strong and prudent risk management, as well as optimization of the use of technology to expand service access so that maximum protection services can be provided to Policyholders.



Ruang lingkup usaha perusahaan meliputi asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Selain itu, juga terdapat lini usaha Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang akan dibentuk oleh IFG Life untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") bagi perseorangan maupun kumpulan di tahun yang akan datang.

#### 1. Asuransi Jiwa

Merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode masa asuransi yang dipertanggungkan, dan/atau apabila tertanggung hidup pada akhir masa asuransi.

#### 2. Lini Usaha Anuitas

Merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat pembayaran rutin secara bulanan kepada pemegang polis dan/ atau tertanggung, dimana manfaat anuitas tersebut akan dibayarkan setelah memasuki masa pensiun.

#### 3. Lini Usaha Asuransi Kesehatan

Merupakan produk asuransi yang memberikan jaminan kepada pemegang polis dan/atau tertanggung untuk mengganti setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan dan biaya obat-obatan apabila pemegang polis dan/ atau tertanggung mengalami jatuh sakit atau mengalami kecelakaan.

#### 4. Lini Usaha Asuransi Kecelakaan Diri

Merupakan produk asuransi yang menjamin pemegang polis dan/atau tertanggung akibat dari suatu kecelakaan (akibat dari luar) yang menimpa dirinya dalam periode pertanggungan tertentu, misalnya selama satu tahun atau selama satu perjalanan.

Pendirian IFG Life merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penugasan IFG dari Kementerian BUMN sebagaimana Surat No. S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penugasan Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") bahwa Kementerian BUMN memberikan mandat kepada IFG untuk membantu dan melakukan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam program penyelamatan dan penyehatan (restrukturisasi) Jiwasraya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian BUMN juga telah memberikan persetujuan pendirian anak perusahaan asuransi

The Company's business scope, which covers life insurance sector, includes annuity business line, health insurance business line, and personal accident insurance business line. In addition, there is a Financial Institution Pension Fund ("DPLK") line of business which will be established by IFG Life to organize a Defined Contribution Pension Program ("PPIP") for individuals and groups in the coming year.

#### 1. Life insurance

It is an insurance product that provides benefits to the insured in the event that the insured passes away within the insurance period, and/or benefits given to the insured at the end of the insurance period.

#### 2. Annuity Business Line

It is a life insurance product that provides regular monthly payment benefits to policyholders and/or the insured, in which the annuity benefits will be paid after the insured entering retirement period.

#### 3. Health Insurance Business Line

It is an insurance product that provides guarantees to policyholders and/or the insured to replace any medical expenses, which include hospital treatment costs, surgery costs and medical expenses in the event that the policyholder and/or the insured falls ill or has an accident.

#### 4. Personal Accident Insurance Business Line

It is an insurance product that guarantees the policyholder and/or the insured in the event of an accident (outside causes) that befall the insured/policy holders within a certain coverage period, for example for one year or during a trip.

The establishment of IFG Life is a form of implementation of the BPUI assignment from the Ministry of SOEs as stated in its Letter No. S-187/MBU/03/2020 dated March 23, 2020 regarding the Assignment of Financial Restructuring of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") that is mandated to BPUI, by the Ministry of SOEs, to assist in and to take steps deemed necessary in the rescue and health program (restructuring) of Jiwasraya in accordance with the prevailing laws and regulations. The Ministry of SOEs has also given approval for the establishment of a life insurance subsidiary based on letter number S-921/MBU/10/2020 dated October



jiwa berdasarkan surat No. S-921/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Asuransi Jiwa.

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 39 tanggal 22 Oktober 2020 oleh Notaris Hadijah, S.H. pada Pasal 3 ayat 1 maka kegiatan usaha utama Perusahaan sebagai berikut:

1. Menutup pertanggungan berbagai program asuransi jiwa termasuk anuitas, asuransi kesehatan, *unit link*, *bancassurance* dan asuransi kecelakaan diri baik dilakukan sendiri maupun bersama dengan perusahaan asuransi lain (koasuransi), untuk ditanah sendiri dan/atau mereasuransikan risiko-risiko asuransi tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyelenggarakan lini usaha anuitas termasuk namun tidak terbatas pada menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
3. Melakukan kegiatan investasi dan kegiatan penyertaan saham dan kegiatan-kegiatan lainnya yang lazim dilakukan perusahaan asuransi jiwa dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan IFG Life dapat memperkuat peran IFG sebagai instrumen Pemerintah untuk memberikan perlindungan masyarakat secara luas dan diharapkan menjadi perusahaan yang sehat, terpercaya, dan menguntungkan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi serta menciptakan sinergi bagi *holding* BUMN asuransi dan penjaminan juga BUMN lainnya. Pembentukan IFG Life, diharapkan dapat tercapai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi BUMN, melalui proposisi *brand* dan produk yang disruptif;
2. Menjadi *champion* perusahaan untuk Asuransi Jiwa dalam negeri;
3. Memperkuat ekosistem *holding* BUMN asuransi dan penjaminan yang memberikan layanan "one stop shop";
4. Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya proteksi jiwa;

21, 2020 regarding Approval for Establishing a Life Insurance Subsidiary.

In accordance with the Deed of Establishment of a Limited Liability Company Number 39 dated October 22, 2020 by Notary Hadijah, S.H. in Article 3 paragraph 1, the main business activities of the Company are as follows:

1. Covering various life insurance programs, including annuities, health insurance, unit link, bancassurance and personal accident insurance, which is conducted either by itself, or together with other insurance companies (coinsurance), to be covered by itself and/or reinsured the insurance risks by considering the Company's ability and the prevailing laws and regulations;
2. Organizing annuity business lines which includes, but not limited to, organizing Financial Institution Pension Funds (DPLK);
3. Performing investment activities and equity participation activities and other activities that are commonly carried out by life insurance companies by taking into account the provisions of the prevailing laws and regulations; and
4. Conducting other business activities in the context of optimizing the utilization of the Company's resources by considering the provisions of laws and regulations.

The establishment of IFG Life can strengthen BPUI's role as an instrument of the Government to provide protection for the wider community and it is expected that it will become a healthy, trusted and profitable company by utilizing technological capabilities and creating synergies for SOE Holding of Insurance and Guarantee as well as other SOEs. The establishment of IFG Life is expected to achieve the following benefits:

1. Increase public trust in SOE-based Insurance Companies, through disruptive brand and product propositions;
2. Become a corporate champion for domestic Life Insurance;
3. Strengthen the SOE Holding of Insurance and Guarantee ecosystem that provides "one stop shop" services;
4. Increase public awareness of the importance of life protection;



5. Mendorong penyerapan produk asuransi, melalui penawaran produk yang inovatif serta didukung dengan kapabilitas digital.

IFG Life memiliki obyektif utama untuk memberikan proteksi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui penawaran produk asuransi jiwa dan dapat memperkuat posisi *holding* BUMN asuransi dan penjaminan di Indonesia serta memberikan dan meningkatkan layanan terhadap masyarakat.

### Strategi Tahun 2020

Pada tahun 2020, Industri Asuransi Jiwa mencatatkan perlambatan kinerja akibat tekanan ekonomi selama pandemi COVID-19. Namun, secara kuartalan, terjadi perbaikan secara bertahap hingga kuartal akhir tahun lalu. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada 2020, industri membukukan premi Rp187,59 triliun. Jumlah tersebut menurun 6,1% (yoY) dari sebelumnya Rp199,87 triliun. Data AAJI juga menunjukkan peningkatan pendapatan dari kuartal III-2020 ke kuartal IV-2020 sebesar 81,7%, dari Rp50,56 triliun di kuartal IV-2020, menjadi Rp91,86 triliun di kuartal IV-2020. Peningkatan ini menimbulkan optimisme yang cukup tinggi di industri asuransi nasional. Peningkatan kapasitas industri kemudian menjadi fokus besar untuk membantu pemulihhan ekonomi. Lebih lanjut, tahun 2020 IFG Life dibentuk dengan modal awal Rp150,0 miliar.

Pembentukan perusahaan asuransi jiwa baru (IFG Life) memberikan peluang besar untuk memenuhi aspirasi *holding* serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Besarnya peluang pasar asuransi jiwa di Indonesia, di mana kondisi pasar masih didominasi oleh perusahaan non-BUMN ditunjukkan dengan pangsa pasar 69% asuransi jiwa di Indonesia yang didominasi oleh pemain asing. Pasar asuransi jiwa di Indonesia diproyeksikan akan terus bertumbuh dan berkembang dengan CAGR<sup>2</sup> sebesar 6% hingga 2024, di mana hal ini juga didukung oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya proteksi asuransi jiwa dan kesehatan terutama setelah krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 di tahun 2020, serta 75% penduduk Indonesia belum memiliki perlindungan asuransi.

Melihat dari kondisi internal saat ini, belum ada anggota IFG yang bergerak dalam asuransi jiwa. Hal ini mendorong IFG untuk melakukan pengembangan usaha melalui pembentukan

5. Encourage the integration of insurance products, through innovative product offerings supported by digital capabilities.

IFG Life's main objective is to provide protection for all levels of Indonesian society through the offering of life insurance products and to strengthen the position of SOE Holding of Insurance and Guarantee in Indonesia, as well as to provide and improve services to the community.

### 2020 Strategy

In 2020, the Life Insurance Industry recorded a slowdown in performance due to economic pressures during the COVID-19 pandemic. However, on a quarterly basis, there was a gradual improvement until the final quarter of last year. Based on data from the Indonesian Life Insurance Association (AAJI) in 2020, the industry posted premiums of IDR 187.59 trillion. This number decreased by 6.1 percent (year-on-year/yoY) from the previous year's number of IDR 199.87 trillion. AAJI data also shows an increase in revenue from the third quarter of 2020 to the fourth quarter of 2020 by 81.7%, from IDR 50.56 trillion in the third quarter of 2020 to IDR 91.86 trillion in the fourth quarter of 2020. This increase has generated a high level of optimism in the national insurance industry. Increasing industrial capacity became a big focus to aid in the economic recovery. Further, in 2020 IFG Life was established with an initial venture capital of IDR 150.0 billion.

The establishment of a new life insurance company by BPUI, namely IFG Life, provides a great opportunity to fulfill the Holding's aspirations and provide benefits to the community. There is a huge opportunity for the life insurance market in Indonesia, in which the market conditions are still dominated by foreign players with 69% market share in Indonesia. The life insurance market in Indonesia is projected to continue to grow and develop with a CAGR<sup>2</sup> of 6% until 2024. This is supported by increasing household income, increasing public awareness of the importance of life and health insurance protection, especially after the economic crisis and the COVID-19 pandemic in 2020, and the fact that 75% of Indonesia's population does not have insurance coverage.

Looking at the current internal conditions, there are no BPUI members engaged in life insurance. This encourages BPUI to develop its business through the establishment of a new subsidiary which is



entitas anak baru yang bergerak dalam bidang usaha asuransi jiwa dan kesehatan untuk memperkuat peran IFG sebagai instrumen pemerintah untuk memberikan perlindungan masyarakat secara luas. Rencana IFG adalah untuk melakukan ekspansi bisnis melalui pembentukan IFG Life yang sehat, terpercaya, dan menguntungkan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi serta menciptakan sinergi bagi holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, dan BUMN lainnya.

Di tengah tantangan persaingan bisnis yang semakin meningkat, dan juga untuk menghadapi perubahan-perubahan di pasar yang berubah cepat dan dinamis, bisnis asuransi jiwa dan kesehatan harus mampu menghadirkan inovasi, terutama yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, sesuai dengan kebutuhan dan profilnya masing-masing. Juga dengan terus berupaya untuk melakukan penetrasi yang lebih dalam di kanal *Bancassurance* dengan melakukan inisiasi kerja sama dengan HIMBARA untuk dapat mendorong peningkatan penjualan yang berkualitas. Grup asuransi kesehatan dan jiwa juga berupaya untuk memitigasi risiko *mis-selling* pada kanal ini dengan melakukan standarisasi atas kompetensi tenaga pemasar, standarisasi *tools* yang digunakan dalam proses pemasaran, dan standarisasi proses pemasaran.

### Produktivitas Segmen

Dikarenakan IFG Life belum mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tahun 2020, maka IFG Life belum memiliki pendapatan *underwriting* sehingga produktivitas produk atau jasa/layanan untuk tahun 2020 belum dapat diukur.

### Pendapatan dan Profitabilitas Segmen

Pendapatan dan profitabilitas segmen asuransi jiwa dan kesehatan, adalah sebagai berikut:

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Asuransi Jiwa dan Kesehatan IFG Life 2019-2020**  
Table of Income and Profitability of Life and Health Insurance Segment in 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp-juta) (in IDR million)	2019 (Rp-juta) (in IDR million)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp-juta) (in IDR million)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan Usaha Operating Revenue	333	-	333	-

**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Asuransi Jiwa dan Kesehatan IFG Life 2019-2020**  
 Table of Income and Profitability of Life and Health Insurance Segment in 2019-2020

<b>Uraian</b> Description	<b>2020 (Rp-juta)</b> (in IDR million)	<b>2019 (Rp-juta)</b> (in IDR million)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal (Rp-juta)</b> (in IDR million)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	(273)	-	(273)	-

Di tahun 2020, IFG Life membukukan pendapatan usaha sebesar Rp333 juta. Namun, berdasarkan laporan laba rugi, IFG life mengalami rugi tahun berjalan sebesar Rp273 juta yang dihasilkan dari hasil investasi sebesar Rp101,91 juta, pendapatan lain-lain sebesar Rp230,91 juta dan beban usaha sebesar Rp608,64 juta. Adapun beban pajak penghasilan sebesar -Rp2,65 juta. IFG Life belum memiliki pendapatan underwriting pada tahun 2020 yang disebabkan belum mendapatkan izin operasional dari OJK.

### Prospek dan Strategi Tahun 2021

Di tahun 2021, IFG Life akan tetap mengedepankan rencana bisnis yang baik agar dapat menjadi perusahaan asuransi jiwa yang *going concern* dan mampu bersaing di kancah industri asuransi jiwa nasional. Pendirian perusahaan asuransi jiwa tersebut dapat memperkuat bisnis *holding* melalui penjualan *bundling/cross-selling* dengan anak-anak perusahaan lainnya, sehingga muncul nilai tambah dari sinergi *holding*. Oleh karena itu, inisiatif ini diharapkan dapat menjadikan IFG sebagai *holding* perusahaan asuransi yang kuat di Indonesia.

Saat ini, perusahaan asuransi jiwa yang berkembang di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan asuransi asing dan/atau swasta. Industri asuransi jiwa merupakan industri asuransi yang paling besar di Indonesia dengan total GWP (*Gross Written Premium*) hampir 3x lebih besar dibandingkan industri asuransi umum dan asuransi kesehatan. Selain itu, tingkat penetrasi pasar asuransi jiwa di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata negara *emerging market* Asia dan rata-rata negara seluruh Asia.

Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah peluang bagi IFG Life untuk mendapatkan pasar yang besar di industri asuransi jiwa Indonesia. Pengembangan bisnis IFG Life dapat dilakukan melalui ekosistem BUMN, di mana perusahaan BUMN, karyawan dan klien dari BUMN dapat menjadi target awal penjualan produk asuransi jiwa.

In 2020, IFG Life posted operating revenues of IDR 333 million. However, Based on the realization of the profit and loss statement, IFG Life in 2020 experienced a loss for the year of IDR 273 million resulting from investment of IDR 101.91 million, other income of IDR 230.91 million and operating expenses of IDR 608.64 million. The income tax expense is - IDR 2.65 million. IFG Life does not have any underwriting income in 2020 due to not having obtained an operational permit from the OJK.

### Prospects and Strategies for 2021

In 2021, IFG Life will continue to prioritize a good business plan so that it can become a going concern life insurance company and be able to compete in the national life insurance industry. The establishment of the life insurance company can strengthen the holding business through bundling/ cross-selling with other subsidiaries, thereby creating added value from holding synergies. Therefore, this initiative is expected to make BPUI or IFG as a strong insurance company group in Indonesia.

Currently, the developing life insurance companies in Indonesia are still dominated by foreign and/or private insurance companies. The life insurance industry is the largest insurance industry in Indonesia with a total GWP (Gross Written Premium) of almost 3x greater than the general insurance and health insurance industries. In addition, the penetration rate of the life insurance market in Indonesia is still very low compared to the average Asian emerging market countries and the average throughout Asia.

Therefore, this provides an opportunity for IFG Life to gain a large market in the Indonesian life insurance industry. IFG Life's business development can be carried out through the SOE ecosystem, in which the SOEs employees and clients can become the initial targets for selling life insurance products.



## TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dengan opini "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

#### ASET

The financial reviews described below refer to the Consolidated Financial Statements for the years ended December 31, 2019 and 2020 and have been audited by the Public Accounting Office Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners with an opinion of "the financial statements present fairly, in all material respects". The consolidated Financial Statements for the year ended on December 31, 2019 and 2020 which are presented in this Annual Report, are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

### CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

#### ASSET

**Tabel Aset 2019-2020**  
Table of Assets 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019* (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	25.625	14.526	11.099	76,41
Investasi Investments	26.533	27.193	(660)	(2,43)
Piutang premi bersih Net premium receivable	7.772	6.937	835	12,04
Piutang Klaim Claims receivable	2.665	2.400	265	11,04
Piutang pembiayaan modal ventura Venture capital financing receivables	1.920	1.650	270	16,36
Piutang hasil investasi Investment Receivables	173	304	(131)	(43,09)
Piutang Usaha Accounts receivable	981	467	514	110,06
Beban terkait penjaminan kredit dibayar dimuka Expenses related to prepaid credit guarantee	895	950	(55)	(5,79)
Piutang lain-lain Other receivables	216	167	49	29,34
Aset reasuransi Reinsurance assets	12.417	11.185	1.232	11,01
Aset retrosesi Retrocession	1.475	1.581	(106)	(6,70)



**Tabel Aset 2019-2020**  
 Table of Assets 2019-2020

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019*</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase</b> (%) Percentage
Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes	188	156	32	20,51
Uang Muka Advances	33	30	3	10,00
Aset tetap Fixed assets	1.930	1.985	(55)	(2,77)
Properti investasi Investment property	446	457	(11)	(2,41)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	3.612	3.897	(285)	(7,31)
Aset Hak Guna Sewa Right to Rent	185	-	185	100,00
Beban akuisisi tangguhan Deferred acquisition expense	1.362	1.386	(24)	(1,73)
Aset lain-lain Other assets	3.911	2.410	1.501	62,28
<b>JUMLAH ASET</b> <b>Total Assets</b>	<b>92.339</b>	<b>77.681</b>	<b>14.658</b>	<b>18,87</b>

\*Disajikan kembali/\*Restatement

Jumlah Aset Perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,87% atau sebesar Rp14,66 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh kas dan setara kas di 2020 dibandingkan 2019. Kinerja Aset Perusahaan secara garis besar dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut.

### **Kas dan setara kas**

Peningkatan pada kas dan setara kas sebesar Rp11,09 triliun terutama dari penyertaan modal negara sebesar Rp6 triliun. Faktor lain yang juga mempengaruhi meningkatnya kas dan setara kas, dikontribusi dari peningkatan penerimaan premi dan penurunan pembayaran klaim pada tahun 2020. Selain itu juga dipengaruhi pada tahun berjalan secara net penempatan efek utang dan surat berharga lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

### **Piutang Premi Bersih**

Peningkatan pada piutang premi bersih sebesar Rp0,83 triliun terutama dari peningkatan pada piutang premi dari *line of business* kredit ("LOB kredit") pada tahun 2020, yang sejalan dengan peningkatan pada pendapatan premi asuransi dan jasa penjaminan bruto "LOB Kredit".

The Company's Total Assets in 2020 increased by 18.87% or IDR 14.66 trillion compared to the previous year. This was generated by cash and cash equivalents in 2020 compared to 2019. The Company's asset performance was broadly influenced by the following factors.

### **Cash and cash equivalents**

An increase in cash and cash equivalents of IDR 11.09 trillion was mainly from state equity participation of IDR 6 trillion. Another factor that also affected the increase in cash and cash equivalents was contributed by the increase in premium revenue and the decrease in claim payments in 2020. In addition, it was also influenced by the net placement of debt securities and marketable securities in the previous year.

### **Net premium receivable**

The increase in net premium receivables by IDR 0.83 trillion was mainly from an increase in premium receivables from the *line of business* credit ("Credit LOB") in 2020, which was in line with the increase in insurance premium revenue and gross underwriting services of "Credit LOB".



## Aset reasuransi

Peningkatan pada aset reasuransi sebesar Rp1,23 triliun didominasi oleh peningkatan pada aset reasuransi – premi yang belum merupakan pendapatan “LOB kredit” tahun berjalan. Dengan meningkatnya bisnis “LOB kredit” pada tahun berjalan, maka juga meningkatkan premi reasuransi “LOB kredit” yang memiliki efek domino pada aset reasuransi – premi yang belum merupakan “LOB kredit”.

## Aset lain-lain

Peningkatan pada aset lain-lain sebesar Rp1,50 triliun paling signifikan berasal dari peningkatan pada *restricted cash* di entitas anak, Jamkrindo, sebesar Rp0,48 triliun dan adanya uang muka yang diterima terkait pembelian Cilandak Town Square sebesar Rp0,7 triliun.

## LIABILITAS

## Reinsurance assets

The increase in reinsurance assets of IDR 1.23 trillion was dominated by an increase in reinsurance assets – unearned premiums of “Credit LOB” income for the year. The increase in the “Credit LOB” in the current year also increases the “Credit LOB” reinsurance premium which has a domino effect on reinsurance assets – unearned premiums of “Credit LOB”.

## Other assets

The increase in other assets of IDR 1.50 trillion most significantly came from an increase in restricted cash in its subsidiary, Jamkrindo, of IDR 0.48 trillion, and an advance received related to the purchase of Cilandak Town Square of IDR 0.7 trillion.

## LIABILITY

**Tabel Liabilitas 2019-2020**  
Table of Liabilities 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019* (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Utang klaim Claims payable	538	485	53	10,93
Utang premi Premium payable	1.770	2.359	(589)	(24,97)
Beban yang masih harus dibayar Accrued Expense	1.172	909	263	28,93
Liabilitas kontrak asuransi Insurance contract liability	31.839	29.407	2.432	8,27
Liabilitas kontrak penjaminan Guarantee contract liabilities	7.826	6.666	1.160	17,40
Pinjaman dari Pemerintah Government Loan	982	1.252	(270)	(21,57)
Utang Bank Bank Payables	163	249	(86)	(34,54)
Utang Medium Term Notes (MTN) Medium Term Notes	14	14	-	0,00
Utang pajak Taxes payable	945	597	348	58,29
Utang usaha Accounts payable	966	537	429	79,89
Pendapatan diterima dimuka Accounts payable	10	22	(12)	(54,55)
Liabilitas Sewa Prepaid income	147	-	147	100,00



**Tabel Liabilitas 2019-2020**  
 Table of Liabilities 2019-2020

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019*</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase</b> <b>(%)</b> Percentage
Liabilitas imbalan kerja Rent Liabilities	1.329	1.381	(52)	(3,77)
Utang lain-lain Other payables	7.124	4.555	2.569	56,40
<b>Total Liabilitas</b> Other payables	<b>54.636</b>	<b>48.321</b>	<b>6.315</b>	<b>13,07</b>
<b>Dana Tabarru</b>	<b>(189)</b>	<b>(112)</b>	<b>(77)</b>	<b>68,75%</b>

\*Disajikan kembali/\*Restatement

Jumlah Liabilitas Perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan 13,20 atau sebesar Rp6,39 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan pada tahun berjalan. Kinerja Liabilitas Perusahaan secara garis besar didominasi oleh faktor sebagai berikut:

### Liabilitas Kontrak Asuransi

Peningkatan pada tahun berjalan sebesar Rp2,32 triliun didominasi oleh peningkatan pada premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim retensi sendiri dari "LOB kredit". Dengan meningkatnya bisnis kredit pada tahun berjalan maka memiliki dampak langsung pada cadangan premi (premi yang belum merupakan pendapatan) dan cadangan klaim (estimasi klaim retensi sendiri) "LOB kredit".

### Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan

Peningkatan sebesar Rp1,16 triliun pada liabilitas kontrak jaminan keuangan terkait dengan peningkatan liabilitas kontrak jaminan keuangan anak perusahaan, Jamkrindo yang didominasi oleh Kredit Usaha Rakyat ("KUR").

### Utang Lain-lain

Peningkatan utang lain-lain sebesar Rp2,49 terutama disebabkan peningkatan pada titipan premi imbal jasa penjaminan dan peningkatan pada pinjaman non-bank pada tahun berjalan. Peningkatan pinjaman non-bank dikontribusi oleh anak perusahaan, Bahana Artha Ventura ("BAV"), terkait dengan utang kepada Pusat Investasi Pemerintah yang merupakan pembiayaan ultra

The Company's total liabilities in 2020 increased by 13.20% or IDR 6.39 trillion compared to the previous year, which was mainly due to the increase in liabilities for insurance and guarantee contracts in the current year. In general, the Company's Liability Performance is dominated by the following factors:

### Insurance contract liability

The increase in the current year of IDR 2.32 trillion was dominated by an increase in unearned premiums and the estimated self-retention claims from the "Credit LOB". With the increase in the credit business in the current year, it has a direct impact on premium reserves (unearned premiums) and claims reserves (estimated self-retention claims) "credit LOB".

### Financial guarantee contract liability

The IDR 1.16 trillion increase in financial guarantee contract liabilities was related to the increase in financial guarantee contract liabilities of its subsidiary, Jamkrindo, which was dominated by Kredit Usaha Rakyat ("KUR").

### Other Payables

The increase in other payables by IDR 2.49 was mainly due to an increase in deposit guarantee fee premiums and an increase in non-bank loans in the current year. The increase in non-bank loans was contributed by the subsidiary, Bahana Artha Ventura ("BAV"), which is related to the payables to the Government Investment Center which is an ultra-micro financing whose use is intended



mikro yang penggunaannya ditujukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro melalui koperasi. Selain itu juga terdapat kontribusi dari peningkatan titipan premi dari anak perusahaan, Askrindo pada tahun 2020.

to provide financing facilities to micro-enterprises through cooperatives. In addition, there was also a contribution from an increase in premium deposits from a subsidiary, Askrindo, in 2020.

## EKUITAS

## EQUITY

**Tabel Ekuitas 2019-2020**  
Table of Equity 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019* (Rp miliar) (in IDR billion)	Pertumbuhan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Modal Saham Capital stock	67.164	273	66.891	24.502,20
Saldo Laba Retained earning	1.160	156	1.004	643,59
Penghasilan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income	1.510	33	1.477	4475,76
Selisih Transaksi Ekuitas Sepengendali Difference in Equity Transactions under Common Control	(32.999)	27.972	(60.971)	(217,97)
Kepentingan non Pengendali Non-controlling Interests	868	926	(58)	(6,26)
<b>Total Ekuitas Total Equity</b>	<b>37.703</b>	<b>29.360</b>	<b>8.343</b>	<b>28,42</b>

\*Disajikan kembali/\*Restatement

Jumlah Ekuitas Perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan 28,42% atau sebesar Rp8,34 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh adanya Penyertaan Modal Negara Tunai sebesar Rp6 triliun serta Penyertaan Modal Negara dari konversi hutang sebesar Rp268 miliar yang berasal dari konversi piutang pokok negara berupa Subsidiary Loan Agreement (SLA).

Total Company Equity in 2020 increased by 28.42% or IDR 8.34 trillion when compared to 2019; this was due to the existence of Cash State Equity Participation of IDR 6 Trillion and State Equity Participation from debt conversion of IDR 268 billion which originated from the conversion of state's principal receivables in the form of a Subsidiary Loan Agreement (SLA).

# LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

**Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2019-2020**  
 Table of Profit and Loss and Other Comprehensive Income 2019-2020

Uraian Description	<b>2020 (Rp miliar) (in IDR billion)</b>	<b>2019*(Rp miliar) (in IDR billion)</b>	<b>Pertumbuhan Growth</b>	
			<b>Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)</b>	<b>Percentase (%) Percentage</b>
<b>Pendapatan underwriting Underwriting revenue</b>				
Pendapatan premi asuransi dan jasa penjaminan bruto Insurance premium income and gross insurance services income	24.648	26.021	(1.373)	(5,28)
Premi reasuransi/penjaminan ulang keluar Reinsurance/retrocession premiums	(6.110)	(6.870)	760	11,06
Kenaikan/penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan Increase/decrease in unearned premiums reserves	(147)	(1.476)	1.329	90,04
<b>Jumlah pendapatan underwriting Total underwriting income</b>	<b>18.391</b>	<b>17.675</b>	<b>716</b>	<b>4,05</b>
<b>Beban underwriting Underwriting expenses</b>				
Beban klaim asuransi dan jasa penjaminan bruto Insurance claim expenses and gross underwriting service expenses	(14.577)	(15.042)	465	3,09
Klaim reasuransi/penjaminan Reinsurance/retrocession claims	3.724	4.088	(364)	(8,90)
Kenaikan/penurunan estimasi liabilitas klaim Increase/decrease in estimated claims liabilities	(1.737)	(1.160)	(577)	(49,74)
Pendapatan subrogasi Subrogation income	973	1.072	(99)	(9,24)
Beban komisi neto Net commission expenses	(2.015)	(2.306)	291	12,62
Kenaikan/penurunan beban akuisisi Increase/decrease in acquisition expenses	(11)	(5)	(6)	120,00
<b>Jumlah beban underwriting Total underwriting expenses</b>	<b>(13.643)</b>	<b>(13.353)</b>	<b>290</b>	<b>2,17</b>



**Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2019-2020**  
Table of Profit and Loss and Other Comprehensive Income 2019-2020

Uraian Description	2020 (Rp miliar) (in IDR billion)	2019* (Rp miliar) (in IDR billion)	Perkembangan Growth	
			Nominal (Rp miliar) (in IDR billion)	Percentase (%) Percentage
Pendapatan (bebannya) <i>underwriting</i> lain-lain (neto) Other underwriting revenues (expenses) (net)	51	(74)	125	(168,92)
<b>Hasil <i>underwriting</i> Underwriting Income</b>	<b>4.799</b>	<b>4.248</b>	<b>551</b>	<b>12,97</b>
Pendapatan jasa keuangan Financial management services income	485	543	(58)	(10,68)
Pendapatan hasil pengelolaan gedung Building management income	177	197	(20)	(10,15)
Hasil investasi Investment income	2.852	2.922	(70)	(2,40)
<b>Jumlah pendapatan usaha Total operating income</b>	<b>8.313</b>	<b>7.910</b>	<b>403</b>	<b>5,09</b>
Beban karyawan Employee expenses	(2.774)	(3.123)	(349)	(11,18)
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(2.671)	(2.484)	187	7,00
Beban penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization expenses	(366)	(245)	121	33,06
<b>Laba usaha Operating profit</b>	<b>2.502</b>	<b>2.058</b>	<b>444</b>	<b>17,75</b>
Pendapatan/(bebannya) lain-lain – neto Other income/(expenses) – net	728	464	264	36,26
<b>Laba sebelum pajak Profit before tax</b>	<b>3.230</b>	<b>2.522</b>	<b>708</b>	<b>21,92</b>
Taksiran pajak penghasilan Estimated income tax	(1.027)	(283)	744	72,44
<b>Laba/rugi tahun berjalan Profit/loss for the year</b>	<b>2.203</b>	<b>2.239</b>	<b>(36)</b>	<b>(1,63)</b>
Laba/rugi tahun berjalan porsi induk Parent entity's portion of profit/loss for the year	2.130	2.158	(28)	(1,31)
Laba/rugi tahun berjalan porsi non pengendali Non-controlling portion of profit/loss for the year	73	81	(8)	(10,96)



**Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2019-2020**  
**Table of Profit and Loss and Other Comprehensive Income 2019-2020**

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019*</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Pendapatan/beban komprehensif lain Other comprehensive income/expenses	165	(3)	168	101,82
<b>Laba/rugi komprehensif tahun berjalan</b> <b>Comprehensive profit/loss for the year</b>	<b>2.368</b>	<b>2.236</b>	<b>132</b>	<b>5,57</b>
Laba/rugi komprehensif porsi induk Parent entity portion of comprehensive profit/loss	2.295	2.157	138	6,01
Laba/rugi komprehensif porsi non pengendali Non-controlling portion of comprehensive profit/loss	73	79	(6)	(8,22)

\*Disajikan kembali/\*Restatement

Jumlah Laba tahun berjalan perusahaan di tahun 2020 mengalami penurunan 1,63% atau sebesar Rp0,036 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan pada pendapatan premi asuransi dan jasa penjaminan bruto, penurunan estimasi liabilitas klaim.

### **Pendapatan Premi Asuransi dan Jasa Penjaminan Bruto**

Penurunan pada pendapatan premi asuransi dan jasa penjaminan bruto sebesar Rp1,37 triliun dikontribusi hampir merata pada penurunan pendapatan premi asuransi beberapa *Line Of Business* ("LOB") yaitu pada LOB Aneka, Harta Benda, Suretyship, Kendaraan Bermotor, dan Rekayasa.

### **Premi Reasuransi/Penjaminan Ulang Keluar**

Penurunan pada premi reasuransi/penjaminan ulang keluar sebesar Rp0,76 triliun dikontribusi dari penurunan beberapa LOB premi reasuransi seperti premi reasuransi Aneka, Suretyship, Harta Benda dan Kredit.

The Company's total income for the year in 2020 decreased by 1.63% or IDR 0.036 trillion when compared to 2019, this was due to several factors such as a decrease in gross insurance premium and guarantee fee revenue, as well as a decrease in estimated claims liability.

### **Gross insurance premium and guarantee services revenue**

The decrease in insurance premium income and gross guarantee fee of IDR 1.37 trillion was contributed almost evenly to the decrease in insurance premium income for several Line Of Business ("LOB"), namely in Aneka, Assets, Suretyship, Motor Vehicles, and Engineering.

### **Reinsurance/ retrocession premium**

The decrease in reinsurance/retrocession premiums by IDR 0.76 trillion was contributed by a decrease in several LOB reinsurance premiums such as Aneka, Suretyship, Property and Credit reinsurance premiums.



### Kenaikan/Penurunan Cadangan atas Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

Peningkatan pada kenaikan/penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp1,32 triliun terutama dikontribusi dari peningkatan porsi reasuransi-premi yang belum merupakan pendapatan dari LOB kredit.

### Kenaikan/Penurunan Estimasi Liabilitas Klaim

Peningkatan pada kenaikan/penurunan estimasi liabilitas klaim sebesar Rp0,57 triliun dikontribusi oleh peningkatan porsi *gross-premi* yang belum merupakan pendapatan dari LOB Aneka dan Suretyship.

### Taksiran Pajak Penghasilan

Peningkatan pada taksiran pajak penghasilan didominasi oleh beberapa hal seperti perubahan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% memiliki kontribusi cukup signifikan dari beberapa anak Perusahaan seperti Askrindo, Jasindo dan Jamkrindo. Selain itu untuk Jamkrindo juga dengan adanya peningkatan laba sebelum pajak Jamkrindo di tahun 2020 sehingga meningkatkan *taxable income* pada 2020. Dan juga terdapat efek meningkatnya beban pajak tangguhan pada Jasindo terutama dari peningkatan beban pajak tangguhan dari liabilitas kontrak asuransi.

### Increase/decrease in unearned premium reserves

The decrease in the increase/decrease in unearned premium reserves of IDR 1.32 trillion was mainly contributed by the increase in the portion of reinsurance - unearned premiums from credit LOB

### Increase/decrease in estimated claim liabilities

The decrease in the increase/decrease in estimated claims liabilities of IDR 0.57 trillion was contributed by a decrease in the gross-unearnerd premium from LOB Aneka and Suretyship.

### Estimated income tax

The increase in the estimated income tax was dominated by several aspects, such as the change in the corporate tax rate from 25% to 22%, which had a significant impact on several subsidiaries such as Askrindo, Jasindo and Jamkrindo. In addition, in the case of Jamkrindo, there was also an increase in Jamkrindo's profit before tax in 2020; thereby increasing taxable income in 2020. In addition, there was also the effect of increasing deferred tax expenses on Jasindo, especially from an increase in deferred tax expenses from insurance contract liabilities.

# LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

## CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

**Tabel Arus Kas 2019-2020**  
 Table of Cash Flow 2019-2020

<b>Uraian</b> Description	<b>2020</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>2019*</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Pertumbuhan</b> Growth	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp miliar)</b> (in IDR billion)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	3.392	1.882	1.510	80,25%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	1.514	(1.545)	3.059	198,03
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	6.194	(818)	7.011	857,31
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	11.100	(481)	11.581	2.408,94
Dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas The net effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents	-	(5)	5	(100%)
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year	14.526	15.011	(485)	(3,23%)
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	25.625	14.526	11.099	76,41%

\*Disajikan kembali/\*Restatement

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Peningkatan pada arus kas dari aktivitas operasi terutama dikontribusi oleh meningkatnya penerimaan pendapatan premi asuransi dari tertanggung dan penurunan pada pembayaran klaim pada tertanggung pada tahun berjalan

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Peningkatan pada arus kas dari aktivitas investasi paling signifikan dikontribusi oleh menurunnya penempatan investasi pada efek utang dan surat berharga di tahun 2020 apabila dibandingkan tahun 2019.

### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Peningkatan pada arus kas aktivitas pendanaan terutama dari penyertaan modal negara sebesar Rp6 triliun.

Berdasarkan KMK RI No. 146/ KMK.06 2020, pada tanggal 31 Maret 2020, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia memberikan

### Cash Flow from Operating Activities

The increase in cash flow from operating activities was mainly contributed by the increase in insurance premium income from the insured and a decrease in the settlement of claims to the insured in the current year.

### Cash Flow from Investment Activities

The most significant increase in cash flow from investment activities was contributed by a decrease in investment placements in debt securities and marketable securities in 2020 when compared to 2019.

### Cash Flow from Financing Activities

An increase in cash flow from financing activities was mainly from state equity participation of IDR 6 trillion.

Based on KMK RI No. 146/ KMK.06 2020, as of March 31, 2020, and based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 20 of 2020, the Government of the Republic of Indonesia provides



penyertaan modal dalam bentuk pengalihan seluruh saham seri B milik Pemerintah Republik Indonesia pada perusahaan Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja, dan Jamkrindo kepada Perusahaan.

Terkait dengan transaksi ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menerima jumlah imbalan yang dialihkan dalam bentuk penerbitan saham baru oleh Perusahaan sebanyak 60.623.019 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau sebesar Rp60.623.019.459.595 (nilai penuh).

Transaksi di atas dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" karena Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja dan Jamkrindo merupakan entitas sepengendali dibawah Pemerintah Republik Indonesia.

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas. Ekuitas dari Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja dan Jamkrindo sebelum tanggal penggabungan disajikan sebagai "ekuitas merging entities" pada bagian ekuitas.

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian sedemikian rupa seolah-olah anak perusahaan yaitu Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja, dan Jamkrindo telah terkonsolidasi pada periode 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018.

Manajemen juga telah menyajikan kembali akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan beban pajak penghasilan sebagai akibat perubahan atas implementasi PSAK 38 yang telah dijelaskan di atas.

Jumlah penyajian kembali juga termasuk dampak dari perubahan kebijakan akuntansi dan ketidakakuratan dalam penyusunan laporan keuangan Jasindo, Askrindo dan Jamkrindo. Jasindo telah mengubah metode penghitungan cadangan premi yang belum merupakan pendapatan dari metode agregat menjadi metode harian karena metode ini menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih relevan dan Jamkrindo telah mengubah metode pengukuran aset tetap dari model revaluasi menjadi model biaya agar selaras dengan kebijakan akuntansi dari perusahaan induk barunya. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan Jasindo, Askrindo

state equity participation in the form of the transfer of all B series shares owned by the Government of the Republic of Indonesia in Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja, and Jamkrindo to the Company.

In relation to this transaction, the Government of the Republic of Indonesia has received the amount of compensation transferred in the form of issuance of new shares by the Company of as many as 60,623,019 shares with a par value of IDR 1,000,000 (full rupiah) or IDR 60,623,019,459,595 (full rupiah).

The above transactions are accounted for using the pooling of interest method in accordance with PSAK 38 (2012 Revision) on "Business Combination of Entities Under Common Control" because Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja and Jamkrindo are entities under common control under the Government of the Republic of Indonesia.

The difference between the amount transferred and the carrying amount of the investment obtained from this transaction is recorded in the "additional paid-in capital" account in the equity section. The equity of Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja and Jamkrindo prior to the merger date is presented as "equity of merging entities" in the equity section.

The Company restated the consolidated financial statements in such a way as if the subsidiaries, namely Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja, and Jamkrindo had been consolidated for the period 31 December 2019 and 1 January 2019/31 December 2018.

Management has also restated the accounts related to assets, liabilities and income tax expense as a result of changes to the implementation of PSAK 38 as described above.

The restatement amount also includes the impact of changes in accounting policies and inaccuracies in the preparation of the financial statements of Jasindo, Askrindo and Jamkrindo. Jasindo has changed the method of calculating unearned premium reserves from the aggregate method to the daily method because this method produces financial reports that provide more relevant information, and Jamkrindo has changed the method of measuring fixed assets from a revaluation model to a cost model to be in line with the new parent company's accounting policies. In addition, in the preparation of the financial statements of Jasindo, Askrindo and Jamkrindo, the Company's



dan Jamkrindo, manajemen menemukan kesalahan yang berkaitan dengan perhitungan cadangan teknis, pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai, dan pengakuan/pengukuran akun seperti pendapatan premi, aset jaminan ulang, kontrak penjaminan, biaya perolehan yang ditangguhkan.

management discovered errors related to the calculation of technical reserves, measurement of allowance for impairment losses, and recognition/measurement of accounts such as premium income, reguarantee assets, guarantee contracts, and deferred acquisition costs.

## **KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG**

SOLVENCY AND COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES

### **KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG**

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya tercermin dalam rasio solvabilitas yang berada pada 168,4% sehingga untuk tahun 2020 perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajibannya dengan total aset yang dimiliki saat ini.

### **SOLVENCY**

The Company's ability to fulfill all of its obligations is reflected in the solvency ratio which is at 168.4%. It means that, in 2020, the Company was able to fulfill all its obligations with the total assets currently owned.



# STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

## STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Terdapat tambahan modal saham sepanjang tahun 2020 dengan detail sebagai berikut:

1. Sesuai dengan KMK RI No. 146/KMK.06/2020, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60.623.019 (dalam jutaan rupiah) atau 60.623.019 lembar saham ke dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Askrindo, Jamkrindo, Jasa Raharja, dan Jasindo dalam rangka membentuk *holding* asuransi dan penjaminan.
2. Pada 20 November 2020, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Akta Notaris Hadijah, S.H., No. 98 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham sebesar Rp 268.017 (dalam jutaan rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 melalui konversi piutang pokok negara berupa Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada Perusahaan berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman/SLA No. SLA-919/DP3/1996 tanggal 12 Desember 1996 sebagaimana telah diubah dengan:
  - a. Perjanjian Perubahan (Amandemen) No. AMA-322/SLA-919/DP3/2008 tanggal 13 Juni 2008; dan
  - b. Perjanjian Perubahan (Amandemen) Nomor AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 tanggal 13 Desember 2019.Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 2021 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0003515.
3. Pada 8 Januari 2021, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan oleh Akta Notaris Hadijah, S.H., No. 05 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham sebesar Rp6.000.001 (dalam jutaan rupiah) yang seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal Perusahaan ke dalam modal saham PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2021 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0015270.

## COMPANY CAPITAL STRUCTURE

There was additional share capital throughout 2020 with the following details:

1. In accordance with KMK RI No. 146/KMK.06/2020, the Government of the Republic of Indonesia provides State Equity Participation (PMN) of IDR 60,623,019 (in IDR million) or 60,623,019 shares into PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) from the transfer of all B series shares owned by the Republic of Indonesia to Askrindo, Jamkrindo, Jasa Raharja, and Jasindo in order to establish an insurance and guarantee holding.
2. On November 20, 2020, there was an amendment to the Company's Articles of Association with the Notarial Deed of Hadijah, S.H., No. 98 regarding changes in authorized capital, issued and paid-up capital and share ownership of IDR 268,017 (in IDR million) originated from the State Budget for Fiscal Year 2020 through conversion of the state's principal receivables in the form of a Subsidiary Loan Agreement (SLA) to the Company based on a Loan Continuation Agreement. /SLA Number SLA-919/DP3/1996 dated December 12, 1996 as amended by:
  - a. Amendment to the Agreement Number AMA-322/SLA-919/DP3/2008 dated June 13, 2008; and
  - b. Amendment to the Agreement Number AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 dated December 13, 2019.Those amendment were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on January 6, 2021 through Decree No. AHU-AH.01.03-0003515.
3. On January 8, 2021, there was an amendment to the Company's Articles of Association by Notarial Deed of Hadijah, S.H., No. 05 regarding changes in the authorized capital, issued and paid-up capital and share ownership of IDR 6,000,001 (in IDR million), all of which are addition to the Company's equity participation in the share capital of PT Asuransi Kredit Indonesia and PT Jaminan Kredit Indonesia. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on January 12, 2021 through Decree No. AHU-AH.01.03-0015270.



	Jumlah Saham Number of Shares	2020 Persentasi Kepemilikan Ownership Percentage	Nilai* Value*
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	Saham Seri A Dwiwarna A Series Dwiwarna Shares	1 0,0002%	1
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	Saham Seri B B Series Shares	67.163.536 99,9998%	67.163.536
<b>Total</b>		<b>67.163.537</b>	<b>67.163.537</b>

\*nilai dalam jutaan rupiah/\*value in IDR million

## KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perusahaan dan entitas anak perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham atau obligasi baru maupun menjual aset untuk mengurangi liabilitas.

Sesuai dengan perusahaan lain dalam industri sejenis, Perusahaan dan entitas anak memonitor modal berdasarkan rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah hutang dengan total modal. Utang merupakan jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Modal terdiri dari seluruh komponen ekuitas yang sebagaimana jumlah dalam posisi keuangan konsolidasian. Perusahaan menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar memaksimalkan nilai Perusahaan.

## MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

In order to maintain or adjust their capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or bonds, or sell assets to reduce liabilities.

In accordance with other companies in similar industries, the Company and its subsidiaries monitor capital based on debt to equity ratio. This ratio is calculated by dividing the total debt by the total capital. Debt represent total liabilities in the consolidated statement of financial position. Capital consists of all components of equity which are the same as the amount in the consolidated financial position. The Company determines the optimal capital structure policy in order to maximize the value of the Company.



## REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

### REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Realisasi investasi barang modal Perusahaan berikut jenis investasi, tujuan dan nilai investasi di tahun 2020, dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

The realization of the Company's capital goods investment along with the types of investments, objectives, and investment value in year 2020, can be seen in the table below.

Jenis Investasi Barang Modal Types of Capital Goods Investment	Nilai (Rp-miliar) Nominal Value (in IDR billion)
Software, Program & Aset tak Berwujud Software, Programs & Intangible Assets	Rp33,7
Renovasi Kantor Office renovation	Rp22,0
Kendaraan Operational Vehicles	Rp5,7
Inventaris Kantor, Perabot Kantor, Mesin & Perlengkapan Lainnya Office Inventory, Office Furniture, Machinery and Other Equipment	Rp44,8
Tanah & Bangunan Land and buildings	Rp75,6
Komputer & Perangkatnya Computers & Devices	Rp59,1
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp240,9</b>

Perbandingan nilai investasi barang modal Perusahaan tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The comparison of the value of the Company's capital goods investment in 2019 and 2020 can be seen in the table below.

	2020 (Rp-miliar) (in IDR billion)	2019* (Rp-miliar) (in IDR billion)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal (Rp-miliar) (in IDR billion)	Persentase (%) Percentage		
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	Rp240	Rp31	Rp209	674

\*) sebelum IFG menjadi holding asuransi dan penjaminan

\*) before IFG became a holding company of insurance and guarantee SOEs



# INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT HAPPENED AFTER THE ACCOUNTING PERIOD

## 1. Undang-undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja. IFG menilai pada umumnya, peraturan pelaksana tersebut tidak akan memiliki dampak buruk terhadap bisnis dan operasional Perusahaan. Pada saat laporan keuangan diotorisasi, IFG masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

## 2. Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, susunan Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

### Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Komisaris Utama/President Commissioner	:	Mohamad Fauzi M. Ichsan
Komisaris/Commissioner	:	Masyita Crystallin
Komisaris/Commissioner	:	Nasrudin <sup>1)</sup>
Komisaris/Commissioner	:	Sumiyati <sup>3)</sup>
Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Hotbonar Sinaga

### Dewan Direksi/Board of Directors

Direktur Utama/President Director	:	Robertus Billitea
Wakil Direktur Utama/Deputy President Director	:	Hexana Tri Sasongko <sup>2)</sup>
Direktur Bisnis/Director of Business	:	Pantro Pander Silitonga
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	:	Rizal Ariansyah
Direktur Teknik/Director of Technic	:	Rianto Ahmadi <sup>4)</sup>

### Komite Audit/Audit Committee

Ketua/Head	:	Mohamad Fauzi M. Ichsan <sup>5)</sup>
Anggota/Member	:	Masyita Crystallin <sup>5)</sup>
Anggota/Member	:	Maliki Heru Santosa
Anggota/Member	:	Sumiyati <sup>5)</sup>
Anggota/Member	:	Nandang Supriyadi

<sup>1)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 29 April 2021

<sup>2)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 4 Juni 2021

<sup>3)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 30 Juli 2021

<sup>4)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 20 September 2021

<sup>5)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 29 September 2021

## 1. Job Creation Law

In February 2021, the Government officially promulgated 49 implementing regulations for the Job Creation Law. IFG considers that in general, the implementing regulations will not have a negative impact on the IFG's business and operations. At the time the financial statements are authorized, IFG was still studying the impact that may arise from the implementing regulations of the Job Creation Law, as well as their effect on the Company's financial statements.

## 2. Board of Commissioners and Directors

At the time the financial statements were authorized, the composition of the Company's Board of Directors and Commissioners is as follows:

Komisaris Utama/President Commissioner	:	Mohamad Fauzi M. Ichsan
Komisaris/Commissioner	:	Masyita Crystallin
Komisaris/Commissioner	:	Nasrudin <sup>1)</sup>
Komisaris/Commissioner	:	Sumiyati <sup>3)</sup>
Komisaris Independen/Independent Commissioner	:	Hotbonar Sinaga

Direktur Utama/President Director	:	Robertus Billitea
Wakil Direktur Utama/Deputy President Director	:	Hexana Tri Sasongko <sup>2)</sup>
Direktur Bisnis/Director of Business	:	Pantro Pander Silitonga
Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	:	Rizal Ariansyah
Direktur Teknik/Director of Technic	:	Rianto Ahmadi <sup>4)</sup>

Ketua/Head	:	Mohamad Fauzi M. Ichsan <sup>5)</sup>
Anggota/Member	:	Masyita Crystallin <sup>5)</sup>
Anggota/Member	:	Maliki Heru Santosa
Anggota/Member	:	Sumiyati <sup>5)</sup>
Anggota/Member	:	Nandang Supriyadi

<sup>1)</sup> Effectively appointed on April 29, 2021

<sup>2)</sup> Effectively appointed on June 4, 2021

<sup>3)</sup> Effectively appointed on July 30, 2021

<sup>4)</sup> Effectively appointed on September 20, 2021

<sup>5)</sup> Effectively appointed on September 29, 2021



3. Penyertaan Modal Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2021, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan, dengan nilai penambahan sebesar Rp20.000.000.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai penambahan modal Perusahaan ke dalam modal saham IFG Life.

4. Restrukturisasi Utang Bunga Rekening Dana investasi ("RDI") dan Utang Penerusan Pinjaman ("SLA")

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas piutang bunga Rekening Dana Investasi ("RDI") No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 dan piutang Penerusan Pinjaman ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 diangsur selama 20 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun yaitu tahun 2021-2022.

5. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") dan PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")

Pada tanggal 20 Mei 2021, BPUI, Jiwasraya, dan IFG Life menandatangani Perjanjian Induk Pengalihan Portofolio (Aset dan Kewajiban) Jiwasraya kepada IFG Life dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Jiwasraya ("Perjanjian Induk Awal") yang mengatur rencana pengalihan aset dan kewajiban Jiwasraya kepada IFG Life sehubungan dengan upaya penyelamatan pemegang polis Jiwasraya sebagaimana ditugaskan kepada IFG berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penugasan IFG dalam rangka Penyehatan Keuangan Jiwasraya.

3. State Equity Participation

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 102 of 2021, dated October 6, 2021 regarding the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in the Company's Shares, with an additional value of IDR 20,000,000,000,000 (full amount) originating from the State Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021. With the issuance of this Government Regulation, the Company has obtained approval from the Government of the Republic of Indonesia regarding the addition of the Company's capital into IFG Life's share capital.

4. Restructurization of Investment Fund Accounts' ("RDI") Debt Interest and Subsidiary Loan Agreement ("SLA")

Based on the Decree of the Ministry of Finance No. S-110/MK.5/2021 dated November 29, 2021, the Government has approved the rescheduling of interest receivables from the Investment Fund Account ("RDI") No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 and Subsidiary Loan Agreement ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 in 20 years installment, including a grace period of 2 years, namely in 2021-2022.

5. Amendment and Restatement of the Master Agreement between PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") and PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")

On May 20, 2021, BPUI, Jiwasraya, and IFG Life signed a Master Agreement for the Transfer of Jiwasraya's Portfolio (Assets and Liabilities) to IFG Life for the purpose of resolving Jiwasraya's Problems (the "Initial Master Agreement") which regulates the plan for the transfer of Jiwasraya's assets and liabilities to IFG Life in relation to efforts to rescue Jiwasraya policyholders as assigned to IFG, based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-187/MBU/03/2020 dated March 23, 2020 regarding the Assignment of IFG in the context of Jiwasraya Financial Health Restructuring.



Perjanjian Induk Awal telah diubah dan dinyatakan kembali oleh BPUI, Jiwasraya, dan IFG Life ke dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk No. 10 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H, Notaris di Jakarta Selatan (“Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk”) yang antara lain melengkapi ketentuan-ketentuan peralihan aset dan portofolio serta jenis aset-aset dan liabilitas yang akan dialihkan dari Jiwasraya kepada IFG Life.

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk, perjanjian tersebut akan terus berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan seluruh persyaratan pendahuluan yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi. Aset-aset serta liabilitas Jiwasraya akan dialihkan kepada IFG Life berdasarkan perjanjian tambahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi masing-masing jenis aset serta liabilitas Jiwasraya tersebut.

The Initial Master Agreement has been amended and restated by BPUI, Jiwasraya, and IFG Life in the Deed of Amendment and Restatement of the Master Agreement No. 10 dated December 15, 2021, drawn up before Lenny Janis Ishak, SH, Notary in South Jakarta (“Amendment and Restatement of Master Agreement”) which, among other things, completes the provisions for the transfer of assets and portfolios as well as the types of assets and liabilities to be transferred from Jiwasraya to IFG Life.

Based on the Amendment and Restatement of the Master Agreement, the agreement will continue to be valid and binding for the parties until all the preliminary requirements stipulated in the agreement have been fulfilled. Jiwasraya's assets and liabilities will be transferred to IFG Life based on additional agreements in accordance with the mechanism that applies to each type of Jiwasraya's assets and liabilities.



# PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATIONS,  
AND PROJECTIONS ONE YEAR AHEAD

## PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2020

### Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Perumusan Target Tahun 2020

Untuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020, Perusahaan melakukan revisi RKAP yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 22 September 2020. Usulan Perubahan Revisi atas RKAP 2020 ini adalah merujuk kepada Surat Edaran Wakil Menteri BUMN II dengan No. S-46/Wk2.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Perubahan RKAP 2020 BUMN Binaan Wakil Menteri BUMN II untuk melakukan penyesuaian akibat adanya Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh Negara di dunia, termasuk di Indonesia dan hal ini sangat berdampak terhadap kinerja finansial dan operasional.

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam perumusan RKAP Revisi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 diperkirakan tumbuh sebesar 2,3%;
2. Laju inflasi selama tahun 2020 diperkirakan berada di bawah level 3,9%;
3. Tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia tahun 2020 akan berada pada 3,5% di akhir tahun;
4. Kurs Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2020 diproyeksikan pada kisaran Rp 15.500.

### Pencapaian Realisasi Tahun 2020 terhadap Target

Berikut disampaikan pencapaian realisasi tahun 2020 terhadap target dengan menggunakan Revisi RKAP Tahun 2020.

## ACHIEVEMENT OF THE TARGET IN 2020

### Assumptions Used in Formulating 2020 Targets

For the Company's 2020 Work Plan and Budget (RKAP), the Company has revised the RKAP which was signed with the Board of Commissioners and the Board of Directors on September 22, 2020. The proposed Revised 2020 RKAP refers to the Circular Letter of the Second Deputy Minister of SOEs Number S- 46/Wk2.MBU/06/2020 dated June 4, 2020 regarding the Amendment to the 2020 RKAP of SOEs under the guidance of the Second Deputy Minister of SOEs to make adjustments in relation to the COVID-19 Pandemic that occurred in almost all countries in the world, including in Indonesia, and this greatly affected the Financial and operational performance.

The assumptions used in the formulation of the 2020 Revised RKAP are as follows:

1. Gross Domestic Product (GDP) in 2020 is estimated to grow slightly by 2.3%;
2. Inflation rate in 2020 is estimated to be below the level of 3.9%;
3. Bank Indonesia's 2020 benchmark interest rate will be at 3.5% at the end of the year;
4. The Rupiah exchange rate against USD at the end of 2020 is projected at around Rp 15,500.

### Actual Achievement in 2020 compared to the Target

The following shows comparison between actual achievement of the 2020 using the 2020 Revised RKAP and 2020 target.

**Tabel Pencapaian Realisasi Tahun 2020 terhadap Target**  
 Realization in 2020 compared to 2020 Target

<b>Uraian</b> Description	<b>Realisasi 2020</b> <b>(Rp-miliar)</b> Realization 2020 (in IDR billion)	<b>RKAP 2020</b> <b>(Rp-miliar)</b> 2020 RKAP (in IDR billion)	<b>Pencapaian</b> <b>Realisasi</b> <b>Terhadap</b> <b>Target (%)</b> Realization Percentage Against the 2020 Target (%)
	(1)	(2)	(1:2)
Pendapatan <i>Underwriting</i> Underwriting Revenue	18.391	16.725	110,3
Hasil <i>Underwriting</i> Underwriting Income	4.799	5.132	93,5
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	2.203	1.819	121,1
Jumlah Aset Total Assets	92.339	81.156	113,8
Jumlah Liabilitas dan Dana Tabarru Total Liabilities	54.636	36.346	150,3
Jumlah Ekuitas Total Equity	37.703	44.810	84,1

## Analisa Laporan Laba Rugi Realisasi terhadap Target 2020

### Pendapatan *underwriting*

Terealisasi diatas RKAP sejalan dengan lebih tingginya pendapatan premi asuransi dan penjaminan di Anak-Anak Perusahaan khususnya Askindo dan Jamkrindo. Volume penjaminan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) & Pemulihan Ekonomi Negara (PEN) serta realisasi pendapatan premi usaha Non KUR terealisasi di atas RKAP. Di samping itu, luran Wajib dan Sumbangan Wajib di tahun 2020 juga terealisasi diatas RKAP 2020. Pencapaian pendapatan *underwriting* ini juga dikontribusi oleh lebih rendahnya pencadangan premi atas pendapatan dibandingkan asumsi RKAP 2020.

### Beban *underwriting*

Terealisasi diatas RKAP terutama dikontribusi dari realisasi beban klaim yang lebih tinggi dibandingkan asumsi RKAP baik dari KUR maupun Non KUR. Di samping itu beban klaim reasuransi terealisasi lebih rendah dibandingkan asumsi RKAP serta lebih tingginya realisasi estimasi liabilitas klaim dibandingkan asumsi RKAP 2020.

## Analysis of Profit Loss Statement Realization on 2020 Target

### Underwriting Income

The realization of underwriting income is above the RKAP, which is in line with the higher insurance and guarantee premium income in the Subsidiaries, especially in Askindo and Jamkrindo. The volume of guarantee in the People's Business Credit (KUR) & State Economic Recovery (PEN) program as well as the realization of non-KUR business premium income was realized above the RKAP. In addition, Mandatory Premium and Mandatory Contributions in 2020 were also realized above the 2020 RKAP. The achievement of this underwriting income was also contributed by the Unearned premium reserve which is lower than the 2020 RKAP assumption.

### Underwriting Expenses

The realization of underwriting expenses is above the RKAP, which was mainly contributed by the realization of claims expense, from both KUR and Non KUR, which was higher than the assumed RKAP. In addition, the realized reinsurance claim expense was lower than the RKAP assumption and the estimated claim liability was higher than the 2020 RKAP assumption.



## Hasil investasi

Terealisasi diatas RKAP terutama dikontribusi oleh membaiknya kondisi pasar di akhir kuartal IV 2020 serta lebih tingginya rata-rata modal ditempatkan dibandingkan asumsi RKAP.

## Beban usaha

Terealisasi diatas RKAP terutama dikontribusi oleh lebih tingginya biaya umum dan administrasi terutama di PT Jasindo atas peningkatan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (CKPN) akibat dampak dari penerapan PSAK 71 di Jasindo dan Jasa Raharja serta peningkatan biaya imbalan pasca kerja di Jasindo. Disisi lain biaya karyawan terealisasi dibawah RKAP 2020 di hampir semua entitas anak perusahaan.

## Pendapatan (beban) lain-lain

Terealisasi diatas RKAP terutama dikontribusi oleh Jasa Raharja atas lebih tingginya realisasi denda keterlambatan pelunasan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan administrasi sertifikasi/kartu dana serta lebih tingginya keuntungan selisih kurs di tahun 2020, rate pada 31 Desember 2020 sebesar Rp14.105 (2019 : Rp13.901).

## Beban pajak penghasilan

Terealisasi diatas RKAP sejalan dengan peningkatan beban pajak tangguhan akibat perubahan tarif pajak (dari 25% menjadi 22%) serta lebih tingginya laba sebelum pajak dibandingkan asumsi RKAP 2020.

## Analisa Neraca Realisasi terhadap Target 2020

### Aset

Realisasi total aset diatas RKAP 2020 terutama dikontribusi oleh:

1. Kas dan setara kas serta investasi sejalan dengan lebih tingginya pendapatan premi dan hasil investasi dibandingkan asumsi RKAP;
2. Piutang premi dan piutang jasa penjaminan sejalan dengan lebih tingginya volume penjaminan khususnya KUR dan PEN;
3. Aset reasuransi terkait lebih tingginya realisasi liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan;

## Investment Income

The realization of investment income is above the RKAP, which was mainly contributed by improving market conditions at the end of the fourth quarter of 2020 and the average issued capital which was higher than the RKAP assumption.

## Operating expenses

The realization of operating expenses is above the RKAP, which was mainly contributed by higher general and administrative costs, especially at PT Jasindo, that account for the increase in costs of Allowance Impairment of Trade Receivables (CKPN) due to the impact of the implementation of PSAK 71 at Jasindo and Jasa Raharja, as well as the increase in post-employment benefits costs at Jasindo. On the other hand, employee costs are realized under the 2020 RKAP in almost all subsidiaries.

## Other income (expenses)

The realization of other income (expenses) is above the RKAP, which was mainly contributed by Jasa Raharja in relation to the higher realization of fines for late payment of mandatory contribution of the road traffic accident funds and administration of certificates/fund cards, as well as higher foreign exchange gains in 2020, in which the rate on December 31, 2020 was IDR 14,105 (2019 : IDR 13,901).

## Income Tax expense

Income tax expense is realized above the RKAP, which is in line with the increase in deferred tax expense due to changes in tax rates (from 25% to 22%), and profit before tax which was higher than the 2020 RKAP assumption.

## Analysis on the Realization of Balance on 2020 Target

### Assets

The realization of total assets, which is above the 2020 RKAP, was mainly contributed by:

1. Cash and cash equivalents, as well as investments, which was in line with premium income and investment income which was higher than the RKAP assumption;
2. Premium receivables and guarantee fee receivables, which was in line with higher volume of underwriting, especially KUR and PEN;
3. Reinsurance assets, which was related to higher realization of insurance and guarantee contract liabilities;



4. Aset pajak tangguhan terkait lebih tingginya realisasi liabilitas imbalan pasca kerja, cadangan premi, estimasi liabilitas klaim, cadangan kerugian penurunan nilai dan provisi atas kerugian klaim;

Di sisi lain beberapa aset terealisasi dibawah RKAP terutama atas beban terkait penjaminan kredit dibayar dimuka, aset tetap, piutang klaim dan aset retrosesi.

### Utang

Realisasi total utang diatas RKAP 2020 terutama dikontribusi oleh :

1. Liabilitas kontrak asuransi terutama di Askindo sejalan dengan peningkatan produksi premi untuk mengantisipasi potensi klaim serta di Jasindo yang terealisasi lebih besar dibandingkan asumsi RKAP 2020;
2. Beban yang masih harus dibayar dan utang lain-lain terutama di Askindo atas titipan premi, kelebihan penerimaan premi dan uang jaminan serta di Jamkrindo atas lebih tingginya premi yang belum teridentifikasi (IJP belum teridentifikasi, IJP yang sudah diterima di Jamkrindo namun belum teridentifikasi) dibandingkan asumsi RKAP.

Di sisi lain beberapa utang terealisasi dibawah RKAP terutama atas utang klaim dan utang bank sejalan dengan tidak terealisasinya utang bank di IFG sesuai asumsi RKAP 2020.

### Ekuitas

Realisasi total ekuitas dibawah RKAP 2020 terutama dikontribusi oleh lebih tingginya selisih nilai aset bersih dengan modal disetor pemerintah atas inbreng 4 anak perusahaan asuransi dan penjaminan di tahun 2020 (RKAP : Rp 25,4 triliun, Realisasi : Rp 33,0 triliun).

4. Deferred tax assets, which was related to higher realization of post-employment benefit liabilities, premium reserves, estimated claims liabilities, allowance for impairment losses and provision for loss of claims;

On the other hand, several assets were realized under the RKAP, especially for expenses related to prepaid credit guarantees, fixed assets, claims receivables, and retrocession assets.

### Liabilities

The realization of total liabilities was above the 2020 RKAP; this was mainly contributed by:

1. Insurance contract liabilities, especially at Askindo, which are in line with the increase in premium production to anticipate potential claims, and at Jasindo, in which the realization of insurance contract liabilities is greater than the 2020 RKAP assumption;
2. Accrued expenses and other payables, especially in Askindo for premiums deposit, excess receipts of premiums and security deposits, as well as in Jamkrindo in terms of unidentified premiums (unidentified guarantee fee, guarantee fee which has been received at Jamkrindo but has not been identified) which was higher than the RKAP assumption.

On the other hand, several liabilities were realized under the RKAP, especially for claims payable and bank debts, which was in line with the unrealized bank debts in the assumptions of the 2020 RKAP.

### Equity

The realization of total equity was under the 2020 RKAP, which was mainly contributed by the higher difference between the net asset value and the government's paid-in capital for the 4 insurance and guarantee subsidiaries in 2020 (RKAP : IDR 25.4 trillion, Realization : IDR 33.0 trillion).



## PROYEKSI TAHUN 2021

PROJECTIONS FOR 2021

### Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Perumusan Proyeksi Tahun 2021

Rencana kerja dan proyeksi kinerja Perusahaan untuk tahun 2021, tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021, dengan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia yang akan sangat bergantung pada penanganan Pemerintah terhadap pandemi virus corona yang telah menekan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020.

Adapun asumsi-asumsi yang digunakan dalam perumusan RKAP Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 diperkirakan kembali ke level 4,3% - 5,5%;
2. Laju inflasi selama tahun 2021 diperkirakan akan meningkat ke level 3,0%;
3. Tingkat suku bunga acuan BI tahun 2021 akan berada pada 4,0% di akhir tahun;
4. Kurs Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2021 diproyeksikan pada kisaran Rp 14.600.

### Perbandingan Proyeksi Tahun 2021 terhadap Realisasi Tahun 2020

Berikut disampaikan realisasi pencapaian kinerja tahun 2020 dibanding proyeksi tahun 2021 dengan menggunakan RKAP Tahun 2021.

### Assumptions Used in Formulating Projections for 2021

The Company's work plan and performance projections for 2021 are contained in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2021, taking into account the condition of the Indonesian economy, which will greatly depend on the Government's handling of the coronavirus pandemic which has suppressed the Indonesian economy throughout 2020.

The assumptions used in the formulation of the 2021 RKAP are as follows:

1. Gross Domestic Product (GDP) growth in 2021 is expected to return to the level of 4.3% - 5.5%;
2. Inflation rate in 2021 is expected to increase to the level of 3.0%;
3. The BI benchmark interest rate in 2021 will be at 4.0% at the end of the year;
4. The Rupiah exchange rate against USD at the end of 2021 is projected to be in the range of IDR 14,600.

### Comparison of Projections for 2021 to Realization in 2020

The following compares the Projections for 2021 to Realization in 2020 using the 2021 RKAP.



**Tabel Perbandingan Proyeksi Tahun 2021 terhadap Realisasi Tahun 2020**  
 Comparison of Projections for 2021 to Realization in 2020

<b>Uraian</b> Description	<b>Realisasi 2020</b> <b>(Rp-juta)</b> Realization in 2020	<b>RKAP 2021</b> <b>(Rp-juta)</b>	<b>Proyeksi 2021</b> terhadap Realisasi 2020 (%)
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2:1)</b>
Pendapatan <i>Underwriting</i> Underwriting Revenue	18.391.910	20.533.391	11,64
Hasil <i>Underwriting</i> Underwriting Income	4.799.800	5.696.620	118,68
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	2.202.807	2.517.434	114,28
Jumlah Aset Total Assets	92.339.132	127.913.947	138,53
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	54.824.975	85.179.408	155,37
Jumlah Ekuitas Total Equity	37.703.011	42.734.539	113,35

## ASPEK PERPAJAKAN

TAXATION ASPECTS

**Realisasi Aspek Perpajakan 2019-2020**  
 Realization of Taxation Aspects in 2019-2020

<b>Jenis Pajak</b> Types of Tax	<b>2020</b> <b>(Rp-juta)</b> (in IDR million)	<b>2019</b> <b>(Rp-juta)</b> (in IDR million)	<b>Kenaikan (Penurunan)</b> Increase (Decrease)	
			<b>Nominal</b> <b>(Rp-juta)</b> (in IDR million)	<b>Percentase (%)</b> Percentage
<b>1. PAJAK DIBAYAR DI MUKA/PREPAID TAXES</b>				
A. Pajak Penghasilan Badan A. Corporate Income Tax	166.263	152.660	3.603	8,91
B. Pajak Lain-lain B. Other Taxes	22.158	3.103	19.055	614,08
<b>TOTAL PAJAK DIBAYAR DI MUKA</b> TOTAL PREPAID TAXES	<b>188.421</b>	<b>155.763</b>	<b>32.658</b>	<b>20,97</b>
<b>2. UTANG PAJAK/TAX PAYABLES</b>				
A. Pajak Penghasilan Badan A. Corporate Income Tax	870.910	458.387	412.523	89,99
B. Pajak Lain-lain B. Other Taxes	73.652	138.854	(65.202)	-46,96
<b>TOTAL UTANG PAJAK</b> TOTAL TAX PAYABLES	<b>944.562</b>	<b>597.241</b>	<b>347.321</b>	<b>58,15</b>



## INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

INFORMATION ABOUT EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM  
(ESOP/MSOP)

Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100,00% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP) yang dilakukan Perusahaan.

The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is 100.00% owned by the Government. Therefore, there is no information regarding the Employee (ESOP) and/or Management (MSOP) Share Ownership Program conducted by the Company.

## INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION REGARDING THE USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS

Hingga akhir tahun 2020, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham di bursa efek. Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100,00% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menyajikan informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, baik total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana, maupun tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

Until the end of 2020, the Company has never conducted an Initial Public Offering on the stock exchange. The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) which is 100.00% owned by the Government. Therefore, the Company does not present information on the use of the proceeds from the public offering, which may include total proceeds of funds, planned use of funds, details of the use of funds, balance of funds, as well as the date of approval of the GMS for changes in the use of funds.

## INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL

**MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING**

Pada tahun 2020, Pemerintah melalui PP No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *Holding* Asuransi dan Penjaminan sehingga terdapat empat anggota baru yang terdiri dari PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Berdasarkan pembentukan *holding* tersebut, lingkup usaha Perusahaan berkembang menjadi perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain dan penanaman dan/atau penyertaan pada anak-anak perusahaan.

Dengan menjadi BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) melakukan transformasi *brand* menjadi Indonesia Financial Group (IFG). IFG merupakan *holding* yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Di bulan Desember 2020, Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke IFG untuk mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. Pendirian IFG Life tersebut dapat memperkuat bisnis *holding* melalui penjualan *bundling cross-selling* dengan anak-anak perusahaan IFG lainnya, sehingga muncul nilai tambah dari sinergi *holding*.

In 2020, the Government, through PP No. 20 of 2020 dated March 16, 2020, stipulates PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, which resulted in there are four new members in the holding, namely PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Based on the establishment of the holding, the Company's business scope has developed into a holding company in the financial and investment sectors as well as in management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties and investment and/or equity participation in subsidiaries.

By becoming a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) has transformed its brand into the Indonesia Financial Group (IFG). IFG is a holding established to perform a role in national development through the development of a complete and innovative financial industry through investment, insurance and guarantee services. IFG is committed to bringing changes in the financial sector, especially in insurance, investment, and guarantees sectors that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full of integrity. In December 2020, the Government made a State Equity Participation (PMN) to IFG to establish PT Asuransi Jiwa IFG or IFG Life. The establishment of IFG Life can strengthen the holding business through cross-selling bundling sales with other IFG subsidiaries, thereby creating added value from the holding synergies.



## INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/  
OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES/RELATED PARTIES



Perusahaan telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi sebagai bagian dari kebijakan akuntansi penting terkait hubungan afiliasi (Pihak Berelasi), yang dapat dilihat pada Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 2020.

### Definisi Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak, yaitu yang diidentifikasi sebagai:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang:
  - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
  - b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau
  - c. Merupakan personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.
2. Entitas yang memenuhi salah satu hal berikut:
  - a. Entitas dan Perusahaan serta entitas anak adalah anggota dari kelompok usaha yang sama merupakan entitas asosiasi;
  - b. Suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan entitas anak, atau entitas lain yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak;

The Company has disclosed all the nature and transactions with Affiliated Parties as part of the important accounting policies related to Affiliated Party relationships, which can be seen in the 2020 Consolidated Financial Statements.

### Definition of Affiliated Party

An affiliated party is a person or company related to the Company and its subsidiaries, which are identified as:

1. Person or next of kin who:
  - a. Has control or joint control over the Company and its subsidiaries;
  - b. Has significant influence over the Company and its subsidiaries; or
  - c. Is a key management personnel of the Company and its subsidiaries.
2. An entity that meets one of the following:
  - a. The Entity and the Company and its subsidiaries are members of the same business group as associates;
  - b. Is a post-employment benefit plan for employee benefits from the Company and its subsidiaries, or other entities related to the Company and its subsidiaries;



- c. Dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang (individu) yang diidentifikasi dalam butir pertama;
- d. Orang yang diidentifikasi memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak memiliki pengaruh signifikan atas personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak.

Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemegang saham tunggal Perusahaan. Dengan demikian, entitas yang merupakan Pihak-pihak yang Berelasi bagi Perusahaan adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya.

Di samping itu, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai manajemen kunci juga menjadi pihak berelasi bagi Perusahaan.

## **Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi**

Tabel di bawah ini mengungkapkan Pihak-pihak yang Berelasi dan sifat hubungan serta sifat transaksi untuk periode tahun buku 2020.

- c. The entity is controlled or jointly controlled by the person (individual) identified in the first item;
- d. A Person identified as having control or joint control over the Company, and its subsidiaries have significant influence over the key management personnel of the Company and its subsidiaries.

The Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia is the sole shareholder of the Company. Thus, entities that are considered as Affiliated Parties to the Company are entities that are controlled, jointly controlled, or significantly influenced by the Government, namely State-Owned Enterprises (BUMN) and their subsidiaries.

In addition, the Board of Commissioners and the Board of Directors as key management are also affiliated parties for the Company.

## **Name of the Transactional Party and Nature of Affiliated Relationship**

The table below discloses the Affiliated Parties and the nature of the relationship as well as the nature of the transactions for the 2020 fiscal year period.

**Pengungkapan Pihak Berelasi**  
 Disclosure of Affiliated Parties

<b>Pihak yang Berelasi</b> Affiliated Parties	<b>Sifat Hubungan</b> Nature of Relationship	<b>Sifat Transaksi</b> Nature of Transactions
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	Pemegang Saham Akhir Ultimate Shareholders	Pemegang saham, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, utang penjaminan ulang, pendapatan imbal Jasa penjaminan Shareholders, Insurance and reinsurance premium receivables, Guarantee fees receivables, Re-guarantee payables, Guarantee fee revenue
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Kas di bank, deposito berjangka, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, utang bank, pendapatan premi asuransi bruto, pendapatan imbal Jasa penjaminan, beban klaim asuransi bruto, beban klaim penjaminan bruto, dan pendapatan hasil investasi Cash in banks, Time deposits, Insurance and reinsurance premium receivables, Guarantee fee receivables, Insurance and reinsurance claims payable, Guarantee claims payable, Bank loans, Gross insurance premium revenue, Guarantee fee revenue, Gross insurance claim expense, Gross guarantee claim expense , and Return on investment



**Pengungkapan Pihak Berelasi**  
Disclosure of Affiliated Parties

<b>Pihak yang Berelasi</b> Affiliated Parties	<b>Sifat Hubungan</b> Nature of Relationship	<b>Sifat Transaksi</b> Nature of Transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Kas di bank, deposito berjangka, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, utang bank, pendapatan premi asuransi bruto, pendapatan imbal Jasa penjaminan, beban klaim asuransi bruto, beban klaim penjaminan bruto, dan pendapatan hasil investasi Cash in banks, Time deposits, Insurance and reinsurance premium receivables, Guarantee fee receivables, Insurance and reinsurance claims payable, Guarantee claims payable, Bank loans, Gross insurance premium revenue, Guarantee fee revenue, Gross insurance claim expense, Gross guarantee claim expense , and Return on investment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Kas di bank, deposito berjangka, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, pendapatan premi asuransi bruto, pendapatan imbal Jasa penjaminan, beban klaim asuransi bruto, beban klaim penjaminan bruto, dan pendapatan hasil investasi Cash in banks, Time deposits, Insurance and reinsurance premium receivables, Guarantee fee receivables, Insurance and reinsurance claims payable, Guarantee claims payable, Bank loans, Gross insurance premium revenue, Guarantee fee revenue, Gross insurance claim expense, Gross guarantee claim expense , and Return on investment
SKK Migas	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi, dan pendapatan premi asuransi bruto Insurance and reinsurance claims payable, and gross insurance premium revenue
Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ministry of Agriculture Republic of Indonesia	Pihak berelasi Affiliated Party	Piutang premi asuransi dan reasuransi, utang klaim asuransi dan reasuransi, pendapatan premi asuransi bruto, dan beban klaim asuransi bruto Insurance and reinsurance premium receivables, Insurance and reinsurance claims payable, Gross insurance premium revenue, and gross insurance claim expense
PT Bank Mandiri Taspen POS	Pihak berelasi Affiliated Party	Deposito berjangka Time deposits
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Piutang premi asuransi dan reasuransi Insurance and reinsurance premium receivables
PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Piutang premi asuransi dan reasuransi, utang klaim asuransi dan reasuransi, pendapatan premi asuransi bruto, dan beban klaim asuransi bruto Insurance and reinsurance premium receivables, insurance and reinsurance claims payable, gross insurance premium revenue, and gross insurance claim expense
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi, dan pendapatan premi asuransi bruto Insurance and reinsurance claims payable, and Gross insurance premium revenue
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Kas di bank, deposito berjangka, piutang imbal jasa penjaminan, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, pendapatan premi asuransi bruto, pendapatan imbal Jasa penjaminan, beban klaim asuransi bruto, beban klaim penjaminan bruto, dan pendapatan hasil investasi Cash in banks, Time deposits, Guarantee fee receivables, Insurance and reinsurance claims payable, Guarantee claims payable, Gross insurance premium revenue, Guarantee fee revenue, Gross insurance claim expense, Gross guarantee claim expense, and Return on investment

**Pengungkapan Pihak Berelasi**  
**Disclosure of Affiliated Parties**

Pihak yang Berelasi Affiliated Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Pegadaian (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, pendapatan premi asuransi bruto, pendapatan imbal jasa penjaminan, beban klaim asuransi bruto, beban klaim penjaminan bruto, dan pendapatan hasil investasi  Insurance and reinsurance claims payable, Guarantee claims payable, Gross insurance premium revenue, Guarantee fee revenue, Gross insurance claim expense, Gross guarantee claim expense, and Return on investment
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Piutang premi asuransi dan reasuransi, dan pendapatan premi asuransi bruto  Insurance and reinsurance premiums receivable, and Gross insurance premium revenue
Telekomunikasi Satelit (Telkomsat by Telkom Indonesia)	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan premi asuransi bruto  Gross insurance premium revenue
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan premi asuransi bruto  Gross insurance premium revenue
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan premi asuransi bruto, beban klaim asuransi bruto, dan pendapatan hasil investasi  Gross insurance premium revenue, Gross insurance claim expense, and Return on investment
PT Mandiri Tunas Finance	Pihak berelasi Affiliated Party	Beban klaim penjaminan bruto  Gross guarantee claim expense
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Piutang klaim reasuransi dan retrosepsi, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang premi reasuransi dan retrosepsi, pendapatan premi asuransi bruto, beban klaim asuransi bruto, dan pendapatan hasil investasi  Reinsurance and retrocession claims receivable, Insurance and reinsurance claims payable, Reinsurance and retrocession premium payable, Gross insurance premium revenue, Gross insurance claim expense, and Return on investment
PT Pupuk Kalimantan Timur	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan premi asuransi bruto  Gross insurance premium revenue
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan premi asuransi bruto  Gross insurance premium revenue
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan premi asuransi bruto  Gross insurance premium revenue
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, pendapatan imbal jasa penjaminan, beban klaim penjaminan, dan pendapatan hasil investasi  Insurance and reinsurance claims payable, Guarantee claim payable, Guarantee fee revenue, Guarantee claim expense, and Return on investment
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Kas di bank, Deposito berjangka, dan pendapatan imbal jasa penjaminan  Cash in banks, Time deposits, and Guarantee fee revenue
PT Bank Syariah Mandiri	Pihak berelasi Affiliated Party	Kas di bank, deposito berjangka, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang bank, pendapatan imbal jasa penjaminan, beban klaim penjaminan, dan pendapatan hasil investasi.  Cash in banks, Time deposits, Insurance and reinsurance claims payable, Bank loans, Guarantee fee revenue, Insurance claim expenses, and Return on investment
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan imbal jasa penjaminan  Guarantee fee revenue



### Pengungkapan Pihak Berelasi Disclosure of Affiliated Parties

Pihak yang Berelasi Affiliated Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transactions
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan premi asuransi bruto Gross insurance premium revenue
PT BRI Asuransi Indonesia	Pihak berelasi Affiliated Party	Beban klaim asuransi bruto Gross insurance claim expense
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Beban klaim asuransi bruto Gross insurance claim expense
PT Asuransi BRI Life	Pihak berelasi Affiliated Party	Beban klaim asuransi bruto Gross insurance claim expense
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Beban klaim asuransi bruto dan pendapatan hasil investasi Gross insurance claim expense and Return on investment
PT Timah (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Piutang premi asuransi dan reasuransi, utang klaim asuransi dan reasuransi, beban klaim asuransi bruto Insurance and reinsurance premium receivables, Insurance and reinsurance claims payable, Gross insurance claim expense
PT Pelabuhan Indonesia II (persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi dan beban klaim asuransi bruto Insurance and reinsurance claims payable, and Gross insurance claim expense
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Piutang premi asuransi dan reasuransi, utang klaim asuransi dan reasuransi, dan beban klaim asuransi bruto Insurance and reinsurance premium receivables, Insurance and reinsurance claims payable, and Gross insurance claim expense
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi dan beban klaim asuransi bruto Insurance and reinsurance claims payable, and Gross insurance claim expense
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi dan beban klaim asuransi bruto Insurance and reinsurance claims payable, and Gross insurance claim expense
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Pihak berelasi Affiliated Party	Utang klaim asuransi dan reasuransi Insurance and reinsurance claims payable
PT Danareksa (Persero)	Pihak berelasi Affiliated Party	Pendapatan hasil investasi Return on investment

### Alasan Dilakukannya Transaksi Pihak Berelasi dan Kewajaran Transaksi

Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi sudah sesuai dengan definisi dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi" dan telah termasuk pengungkapan jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada personel manajemen kunci. Sampai dengan akhir tahun 2020, semua transaksi dilakukan secara wajar berdasarkan prinsip *arms length transactions* sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

### Reasons for Conducting Transactions with Affiliated Party and Fairness of Transactions

Transactions conducted by the Company with affiliated parties are in accordance with the definition in PSAK No. 7 concerning "Disclosures of Affiliated Parties" and includes disclosure of the amount of compensation paid by the Company to key management personnel. Until the end of 2020, all transactions are conducted fairly based on the principle of '*arms length transactions*' in accordance with the established mechanism.



# PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN LEGISLATIONS THAT SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE COMPANY

Berikut perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI") di tahun 2020.

The following are changes in legislations that have a significant effect on PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI") in 2020.

Perubahan Peraturan/ Perundang-undangan Changes in Legislations	Penjelasan Description	Dampaknya terhadap Perusahaan Its Significance to the Company
Terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional	<p>Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IFG, menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud dan tujuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan <i>holding</i> di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</li> <li>• Kegiatan Usaha Utama:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a.aktivitas perusahaan holding termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan-badan lain;</li> <li>b.aktivitas kantor pusat;</li> <li>c.investasi langsung maupun tidak langsung;</li> <li>d.aktivitas restrukturisasi perusahaan/ aset; dan</li> <li>e.aktivitas konsultasi manajemen.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Selain itu, dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.</p>	<p>Adanya perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IFG, dengan penambahan "kegiatan perusahaan <i>holding</i> di bidang keuangan dan investasi sebagai maksud dan tujuan yang baru dari IFG, yang mengakibatkan perubahan kegiatan usaha IFG, yaitu adanya penambahan "aktivitas perusahaan <i>holding</i>, aktivitas kantor pusat, investasi dan aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset" sebagai kegiatan usaha utama yang baru dari IFG.</p>
The issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Companies in the Field of National Private Business Development	<p>Changes in the aims and objectives as well as business activities of IFG, to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Purpose and objectives:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Carrying out activities as a holding company in finance and investment sector, as well as in management consulting for the benefit of affiliated companies or other parties, including micro, small and medium enterprises, and optimizing the utilization of the Company resources based on the principles of good corporate governance.</li> <li>• Main Business Activities:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a.Holding company activities including establishing or participating in other entities;</li> <li>b.Head office activities;</li> <li>c.direct or indirect investment;</li> <li>d.Company/asset restructuring activities; and</li> <li>e.Management consulting activities.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>In addition, it can conduct other business activities in the context of optimizing the utilization of its resources.</p>	<p>A change in the aims and objectives, as well as business activities of IFG, with the addition of "Holding company activities in finance and investment" as the new aims and objectives of IFG, which resulted in changes in IFG's business activities, namely the addition of "Holding company activities, head office activities, investment activities, and corporate/asset restructuring activities" as the new main business activities of IFG.</p>



Perubahan Peraturan/ Perundang-undangan Changes in Legislations	Penjelasan Description	Dampaknya terhadap Perusahaan Its Significance to the Company
Terbitnya Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Negara RI melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham IFG, yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara RI pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero);</li> <li>• PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero);</li> <li>• PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero);</li> <li>• PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) berubah menjadi PT biasa;</li> <li>• IFG menjadi pemegang saham pada Jasa Raharja, Askrindo, Jasindo dan Jamkrindo;</li> <li>• IFG berada dalam pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</li> </ul>
The issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2020 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	The Republic of Indonesia conducts additional equity participation into the share capital of IFG, which originates from the transfer of all B Series shares owned by the Republic of Indonesia to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Asuransi Jasa Raharja (Persero);</li> <li>• PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero);</li> <li>• PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero);</li> <li>• PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A change in the status of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), and PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) into an ordinary limited liabilities company;</li> <li>• IFG becomes a shareholder in Jasa Raharja, Askrindo, Jasindo and Jamkrindo;</li> <li>• IFG is under the regulation and supervision of the Financial Services Authority.</li> </ul>

## PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES TO ACCOUNTING POLICY AND THEIR IMPACT TO THE COMPANY



Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dilakukan seperti yang dipersyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Perusahaan telah menerapkan standar dan interpretasi baru/ amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang menjadi efektif pada tahun 2020. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang dipersyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";

Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations. The Company adopted new standards and interpretations/amendments to the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") which became effective in 2020. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in each respective standard.

- PSAK 71 on "Financial Instruments";
- PSAK 72 on "Revenue from Contracts with Customers";
- PSAK 73 on "Leases";
- Amendment to PSAK 1 on "Presentation of Financial Statements";
- Amendments to PSAK 15 on "Investments in Associates and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 25 on "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors";
- Amendments to PSAK 62 on "Insurance Contracts";



- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55 dan Amendemen PSAK 60 tentang “Reformasi Acuan Suku Bunga”;
- Amandemen PSAK 73 “Sewa” tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”;
- ISAK 35 “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non laba”;
- ISAK 101 “Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”;
- ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang Murabahah”;
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”;
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap Kerangka Konseptual 2019.
- Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55 and Amendment to PSAK 60 concerning “Reform of Interest Rate Reference”;
- Amendment to PSAK 73 on “Leases” regarding lease concessions related to COVID-19;
- Amendments to PSAK 102 on “Accounting for Murabaha”;
- ISAK 35 on “Presentation of Financial Statements of Non-Profit-Oriented Entities”;
- ISAK 101 on “Recognition of Murabaha Liability Revenue without Significant Risks Related to Inventory Ownership”;
- ISAK 102 on “Impairment of Murabahah Receivables”;
- 2019 annual adjustments to PSAK 1 on “Presentation of Financial Statements”;
- PPSAK 13 on the Revocation of PSAK 45 on Financial Statements of Non-Profit Entities; and
- 2020 annual adjustments to the 2019 Conceptual Framework.

PSAK 71 dan 73 di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PSAK lainnya yang tersebut di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

Berikut disampaikan perubahan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), baik Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) maupun Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang mulai diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2020 yang dianggap relevan, serta penjelasan dampaknya bagi Perusahaan.

## PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak

PSAK 71 and 73 had a significant impact on the amounts reported for the current and previous years. Meanwhile, the other PSAKs mentioned above did not have a significant impact on the amounts reported for the current year or previous years.

Below are the changes to Financial Accounting Standards (SAK), which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which have been implemented since January 1, 2020 which are considered relevant, as well as the explanations of their impact on the Company.

## PSAK 71 on “Financial Instruments”

PSAK 71 replaces PSAK 55 on “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and introduces new arrangements for the classification and measurement of financial instruments based on the valuation of the business model and contractual cash flows, the recognition and measurement of allowance for impairment losses on financial instruments using the expected loss model, which replaces models of credit losses incurred as well as provides a simpler approach to hedge accounting.

In accordance with the transitional requirements of PSAK 71, the Group opted for retrospective application with a cumulative effect on initial implementation recognized on January 1, 2020 and



menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp501.747 (bersih setelah pajak) yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian instrumen keuangan.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020. Peraturan baru atas akuntansi lindung nilai juga tidak berdampak terhadap Grup dimana saat ini, Grup tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

Entitas anak asuransi telah menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (deferral approach) sampai dengan 1 Januari 2025 karena memenuhi kriteria seperti tertuang di dalam standar. PSAK 71 akan diterapkan oleh entitas anak bersamaan dengan penerapan PSAK 74 "Kontrak Asuransi" di masa yang akan datang.

### **PSAK 73 “Sewa”**

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai “sewa operasi” berdasarkan prinsip PSAK 30: “Sewa”, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

did not restate comparative information. The Group has made adjustments to the retained earnings at the beginning of 2020 amounting to IDR 501,747 (net after tax) which originated from an increase in allowance for losses on financial instruments.

Based on an assessment of the business model and contractual cash flows, the new regulation on PSAK 71 for the classification and measurement of financial instruments has no impact on the carrying amount of financial assets and liabilities as of January 1, 2020. The new regulations on hedge accounting also have no impact on the Group which is currently not in any transactions related to hedge accounting.

The insurance subsidiary has applied a temporary exemption from PSAK 71 (deferral approach) until January 1, 2025 because it meets the criteria as stated in the PSAK 71 standard, which will be applied by the subsidiaries along with the implementation of PSAK 74 on “Insurance Contracts” in the future.

### **PSAK 73 on “Leases”**

In relation to the implementation of PSAK 73, the Group as a lessee recognizes right-of-use assets and lease liabilities related to leases previously classified as “operating leases” under the principles of PSAK 30 on “Leases”, except for short-term leases or leases with low-value assets. .



Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga, Grup juga mempertimbangkan faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73, Grup memilih penerapan secara prospektif, sehingga tidak terdapat dampak kumulatif terhadap saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020 dan Grup tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah membukukan akumulasi beban depresiasi atas aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa pada “beban umum dan administrasi”.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis yang dizinkan oleh standar dengan cara menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.

Lease liabilities are measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the incremental borrowing rate on January 1, 2020. In determining the interest rate, the Group also considers the following main factors, the Group's corporate credit risk, the term of the lease, the term of the lease payments, the time in which the lease is entered, and the currency in which the lease payments are determined. Right-of-use assets are measured at the same amount as the lease liability, adjusted for the amount of the advance payment.

In accordance with the transitional requirements of PSAK 73, the Group chose to apply it prospectively, so that there is no cumulative effect on the opening balance of retained earnings as of January 1, 2020 and the Group does not restate comparative information. The Group has recorded accumulated depreciation expense on right-of-use assets and interest expense on lease liabilities under “general and administrative expenses” category.

In applying PSAK 73 for the first time, the Group applied the practical approach permitted by the standard, by applying a single discount rate to a portfolio of leases with fairly similar characteristics.

## TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

COMPANY SOUNDNESS LEVEL



Evaluasi kinerja atas tingkat kesehatan Perusahaan IFG diukur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992 dan penggolongan kategori tingkat kesehatan menurut Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.

Tingkat kesehatan IFG pada tahun 2020 berada pada peringkat "Sehat (AAA)" dengan skor 117,75. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang mencapai skor 104,37. Perbandingan tingkat kesehatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Performance evaluation on the soundness level of IFG is measured based on the Decree of the Minister of Finance No. 826/KMK.013/1992 dated July 24, 1992 and the classification of the category of soundness level according to the Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002.

IFG's soundness level in 2020 was ranked "Healthy (AAA)" with a score of 117.75. This achievement is higher than in 2019 which reached a score of 104.37. The comparison of the soundness level in the last 3 (three) years can be seen in the table below.

**Perbandingan Tingkat Kesehatan IFG**  
 IFG Soundness Level Comparison

Tingkat Kesehatan Soundness level		
2018	2019	2020
101,61	104,37	117,75
Sehat (AAA) Healthy (AAA)	Sehat (AAA) Healthy (AAA)	Sehat (AAA) Healthy (AAA)



## INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

### INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

#### Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Perekonomian global mengalami tekanan sangat besar dengan adanya Pandemi COVID-19 yang melanda lebih dari 200 negara di dunia. Dalam laporan World Economic Outlook Januari 2021, IMF memperkirakan perekonomian global tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 3,5%. Pelemahan signifikan aktivitas ekonomi global dipengaruhi oleh kebijakan *lockdown* atau pembatasan mobilitas masyarakat untuk meredam penyebaran virus yang mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi secara tiba-tiba di berbagai negara. Kondisi perekonomian global telah memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak krisis moneter di tahun 1998. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,07% (YoY).

Kami melihat bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2020 terpengaruh oleh dampak *lockdown* dari COVID-19, disertai melambatnya ekonomi rekan perdagangan Indonesia. Berbagai negara, termasuk Indonesia, berusaha menstimulasi perekonomian lewat operasi moneter dan fiskalnya namun kemungkinan belum akan cukup untuk pemulihian ekonomi secara cepat. Di sektor riil, pemulihan ekonomi kemungkinan tidak bersifat V-shape namun lebih ke W- atau L-shape (pemulihian membutuhkan waktu yang lebih panjang) Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan Bank Indonesia pada tahun 2020 antara lain:

1. Menurunnya pertumbuhan ekonomi secara struktural, terutama konsumsi dan investasi, selama vaksin COVID-19 belum ditemukan (masyarakat masih akan menjaga *social distancing*);
2. Perlambatan ekonomi negara-negara besar, terutama akibat menurunnya permintaan akibat *lockdown* yang menurunkan aktivitas ekonomi, yang dapat berakibat negatif pada ekspor Indonesia;
3. Meningkatnya angka pengangguran yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan;

#### Matters That Potentially Have Significant Influence on Business Continuity

The global economy is under enormous pressure with the COVID-19 pandemic that has hit more than 200 countries in the world. In its January 2021 World Economic Outlook report, the IMF estimates that the global economy in 2020 will be contracted by 3.5%. The significant weakening of global economic activity was influenced by the lockdown policy or restrictions on public mobility to reduce the spread of the virus which resulted in the sudden cessation of economic activity in various countries. Global economic conditions have had a major impact on the Indonesian economy. The Indonesian economy experienced a recession for the first time since the monetary crisis in 1998. In 2020, the Indonesian economy recorded a contraction of 2.07% (YoY).

We observe that the Indonesian economy in 2020 is affected by the impact of the COVID-19 lockdown, accompanied by a slowdown in the economy of Indonesia's trading partners. Various countries, including Indonesia, are trying to stimulate the economy through their monetary and fiscal operations, but this may not be enough for a rapid economic recovery. In the real sector, economic recovery may not be a V-shape but more of a W- or L-shape (which means that recovery will take a longer time). Challenges faced by the government and Bank Indonesia in 2020 include:

1. Structural decline in economic growth, especially in consumption and investment, and this shall continue as long as a COVID-19 vaccine has not been found (people will still maintain social distancing).
2. The economic slowdown in major countries, mainly due to reduced demand due to the lockdown which reduced economic activity, which could have a negative impact on Indonesia's exports.
3. The increase in the unemployment rate which resulted in a decrease in the purchasing power of the people as a whole.



4. Kesulitan untuk mengundang investasi asing untuk masuk ke Indonesia dikarenakan perlambatan ekonomi Indonesia dan penurunan secara struktural;
5. Memburuknya situasi geopolitik akibat meningkatnya tensi antara AS dan Tiongkok. Kombinasi dari hal-hal tersebut di atas berpotensi untuk menurunkan level pertumbuhan nasional, yang pada akhirnya dapat menaikkan angka pengangguran. Dalam hal ini, Pemerintah perlu menghilangkan aturan-aturan yang menghambat investasi sektor privat, terutama dari investor luar negeri, untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini, investor berharap adanya perkembangan positif dari wacana untuk menghidupkan kembali revisi UU Tenaga Kerja melalui Omnibus Law Ketenagakerjaan.
4. Difficulty in attracting foreign investment to Indonesia due to Indonesia's economic slowdown and structural decline.
5. Deteriorating geopolitical situation due to rising tensions between the US and China. The combination of the above has the potential to reduce the level of national growth, which in turn can increase the unemployment rate. In this case, the Government needs to eliminate regulations that hinder private sector investment, especially those from foreign investors. This is to increase employment. In this case, investors hope that there will be positive developments from the discourse to revive the revision of the Manpower Law through the Job Creation Omnibus Law.

## **Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan**

IFG senantiasa melakukan penilaian atas kemampuan *Holding* dan anak perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa grup memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Assessment Manajemen dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan. Analisis ini tercermin dalam penilaian tingkat kesehatan. Berdasarkan hasil assessment, tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Di samping itu, Manajemen secara rutin melakukan evaluasi dan assessment terkait dengan kemampuan dan pencapaian target kinerja dari seluruh unit sesuai dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah disusun. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk setiap level meliputi produktivitas, profitabilitas serta indikator-indikator utama yang tertuang dalam *Key Performance Indicators (KPI)* Perusahaan sampai dengan unit kerja terkecil. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi yang rutin dilakukan secara berkala, Manajemen *holding* berkeyakinan bahwa *holding* memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha di masa mendatang. *Holding* tidak memiliki ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan *holding* untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

## **Assumptions Used by Management in Conducting Assessment of Matters that Potentially Have Significant Impact on the Company's Business Continuity**

IFG constantly assesses the ability of Holding and its subsidiaries to continue their business and believes that the group has the resources to continue its business in the future. Management assessment is conducted based on various factors such as an analysis of the strength of financial and non-financial conditions. This analysis is reflected in the assessment of the Company soundness level. Based on the results of the assessment, there are no elements that have a significant effect on business continuity. In addition, the Management routinely evaluates and assesses the capabilities and achievement of performance targets of all units in accordance with the determined Company's business plan. Evaluation is carried out periodically for each level covering productivity, profitability as well as the main indicators contained in the Company's Key Performance Indicators (KPI) up to the smallest work unit. Based on the results of regular assessments and evaluations carried out on a regular basis, the management of the Holding believes that the Holding has sufficient resources to perform business activities in the future. The Holding does not have material uncertainties that could cast significant doubt on the Holding's ability to continue its business.



## PROSPEK USAHA TAHUN 2021

BUSINESS PROSPECTS IN 2021

### Gambaran Umum Kondisi Perekonomian Tahun 2021

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan sangat bergantung pada penanganan pemerintah terhadap pandemi virus corona yang telah menekan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020. Salah satu katalis untuk perekonomian Indonesia di tahun depan adalah vaksin virus corona yang saat ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah untuk dapat didistribusikan di tahun 2021. Katalis kedua untuk perekonomian Indonesia adalah diterbitkannya Omnibus Law yang diharapkan dapat mendorong investasi asing di tahun depan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pemulihan ekonomi melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan UMKM, pemberian insentif pajak kepada korporasi serta realisasi dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi katalis kunci bagi outlook ekonomi Indonesia di 2021.

Selain itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diterbitkan oleh pemerintah pada kuartal IV 2020 diharapkan dapat menarik investasi baru, mendukung industrialisasi, dan mengerek ekonomi melalui jalur Pembentukan Tetap Modal Bruto (PMTB) di sepanjang tahun 2021. Berdasarkan sisi pengeluaran pemerintah, naiknya anggaran untuk sektor infrastruktur dan peningkatan stimulus untuk UMKM dan korporasi besar di tengah pandemi diperkirakan akan mendukung perekonomian.

Sementara itu, walaupun inflasi masih terkendali selama 2020, diprediksi tingkat inflasi akan naik di kisaran 3,0% pada tahun 2021 sejalan dengan meningkatnya tekanan harga dari sisi permintaan (*demand-side*) maupun penawaran (*supply-side*). Dari sisi permintaan, pola konsumsi masyarakat perlahan akan meningkat seiring dengan kembalinya aktivitas perekonomian yang dapat mendorong pendapatan dan daya beli masyarakat paska pandemi COVID-19. Dari sisi penawaran,

### Overview of Economic Conditions in 2021

The Indonesian economy in 2021 is estimated to be very dependent on the government's handling of the corona virus pandemic which has suppressed the Indonesian economy throughout 2020. One of the catalysts for the Indonesian economy next year is the corona virus vaccine which is currently being strived for by the government to be distributed in 2021. The second catalyst for the Indonesian economy is the issuance of the Omnibus Law which is expected to encourage foreign investment next year. In addition, the government is committed to continuing to encourage economic recovery through the provision of social assistance to the community and MSMEs, and the provision of tax incentives to corporations as well as the realization of the National Economic Recovery (PEN) budget to become a key catalyst for Indonesia's economic outlook in 2021.

In addition, the Omnibus Law on the Job Creation Law issued by the government in the fourth quarter of 2020 is expected to attract new investment, support industrialization, and promote the economy through the Gross Fixed Capital Formation (GFCF) throughout 2021. Based on the government's expenditure, the increase in the budget for infrastructure sector and increased stimulus for MSMEs and large corporations amid the pandemic are expected to support the economy.

Meanwhile, although inflation is still under control in 2020, it is predicted that the inflation rate will rise in the range of 3.0% in 2021; this is in line with the pressures from both supply and demand to increase price. In terms of demand, public consumption patterns will slowly increase in line with the return of economic activity that can boost people's income and purchasing power after the COVID-19 pandemic. In terms of supply, it is estimated that there will be an increase in inflation as a result of Bank Indonesia's



diperkirakan akan terjadi peningkatan inflasi sebagai dampak dari kebijakan monetisasi hutang Bank Indonesia (BI) di tahun 2020, yang sejauh ini sudah mengerek pertumbuhan uang beredar (*money supply M2 growth*) dengan cukup pesat. Kebijakan pemerintah dan BI yang menetapkan BI untuk tetap menjadi *standby buyer* atas surat hutang pemerintah di tahun 2021 juga menimbulkan risiko terhadap melonjaknya tingkat inflasi ke depan.

Pemulihan ekonomi diharapkan dapat mengembalikan *risk-appetite investor*, baik domestik maupun asing, terhadap aset di Indonesia dan kemudian mendorong nilai tukar Rupiah hingga mencapai level Rp14.600/USD, atau lebih kuat dari level sekarang yaitu Rp14.700/USD. Surplus pada neraca perdagangan (*trade balance*), neraca transaksi berjalan (*current-account balance*), dan neraca pembayaran (*balance of payments*) sangat mungkin tetap berlanjut dan akan meningkatkan devisa dalam negeri dan memberikan ketabilan bagi nilai tukar rupiah.

## Sasaran dan Strategi Perusahaan terkait Prospek Usaha di Tahun 2021

Di tahun 2020, Perusahaan ditunjuk sebagai *Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Penambahan modal tersebut telah dilakukan, sehingga Perusahaan saat ini memiliki 10 (sepuluh) Anak Perusahaan yang terdiri dari Anak Perusahaan bidang asuransi dan penjaminan; dan Anak Perusahaan bidang Keuangan dan Pasar Modal.

Anak Perusahaan dibidang asuransi dan penjaminan yaitu PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Sementara anak Perusahaan dibidang keuangan dan pasar modal yaitu PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), PT Bahana Mitra Investa (BMI) dan PT Grahaniaga Tatautama (GNTU). Pada tahun 2020, Perusahaan

(BI) debt monetization policy in 2020, which so far has promoted the money supply M2 growth quite rapidly. The government and BI policies that set BI to remain a standby buyer for government debt securities in 2021 also pose a risk to the inflation rate soaring in the future.

The economic recovery is expected to attract both domestic and foreign risk-appetite investors to assets in Indonesia which will push the Rupiah exchange rate to reach the level of IDR 14,600/USD, or stronger than the current level of IDR 14,700/USD. Surpluses in the trade balance, current-account balance and balance of payments are very likely to continue and will increase domestic foreign exchange and provide stability to the Rupiah exchange rate.

## Company Goals and Strategies related to Business Prospects in 2021

In 2020, the Company was appointed as the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, in accordance with Government Regulation No. 20 dated March 17, 2020 regarding the addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The capital increase has been made, so that the Company currently has 10 (ten) Subsidiaries consisting of Subsidiaries in the insurance and guarantee sector and Subsidiaries in Finance and Capital Markets.

Subsidiaries in the insurance and guarantee sector are PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) and PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Meanwhile, the subsidiaries in finance and capital market are PT Bahana Sekuritas (BS), PT Bahana TCW Investment Management (BTIM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), PT Bahana Kapital Investa (BKI), PT Bahana Mitra Investa (BMI) and PT Graha Niaga Tata Utama (GNTU). In 2020, the Company has also established PT Asuransi Jiwa IFG



juga telah mendirikan PT Asuransi Jiwa IFG untuk melengkapi portofolio layanan asuransi dan penjaminan serta mempertimbangkan peluang bisnis.

Dengan menjadi BUMN *Holding* Asuransi dan Penjaminan, Perusahaan yang telah melakukan transformasi *brand* menjadi Indonesia Financial Group (IFG), berkomitmen untuk menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, *prudent*, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu tonggak utama penggerak industri finansial di Indonesia, IFG berfungsi penting dalam menopang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional. Mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan antar BUMN, IFG bertujuan untuk melakukan transformasi menuju ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2021 ini, secara umum IFG Group ingin bertumbuh secara signifikan dengan fokus pada beberapa program kerja utama salah satunya adalah dengan memperkuat sinergi antar anak Perusahaan dalam memanfaatkan setiap peluang usaha.

to complete its portfolio of insurance and guarantee services and consider business opportunities.

By becoming a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, the Company, that has transformed its brand into the Indonesia Financial Group (IFG), is committed to bringing changes in the financial sector, especially in insurance, investment, and guarantees sector that are accountable, prudent, and transparent with good corporate governance and full of integrity. The collaborative spirit with transparent corporate governance is the foundation for IFG to become a leading, trusted, and integrated provider of insurance, guarantee, and investment services. IFG is the future of the financial industry in Indonesia. It is a time to move forward with IFG as a driving force for an inclusive and sustainable ecosystem.

As one of the main pillars of driving the financial industry in Indonesia, IFG has an important function in supporting the national economy, as well as increasing national financial stability and inclusion. Prioritizing synergies and collaboration with the government and between SOEs, IFG aims to transform towards an inclusive and sustainable ecosystem. In 2021, in general, IFG Group wants to grow significantly by focusing on several main work programs. One of which is strengthening the synergy between subsidiaries in taking advantage of every business opportunity.

## Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate  
Governance

**IFG memiliki kebijakan GCG yang mengadopsi standar terbaik yang berlaku dan senantiasa melakukan penguatan infrastruktur GCG yang dimiliki.**

IFG possesses a GCG policy that adopts the best prevailing standards and continues to strengthen its GCG infrastructure.





## PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE



### Komitmen dan Konsistensi Penerapan GCG Secara BerkelaJutan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan merupakan salah satu pilar utama yang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Indonesia Financial Group (IFG) berkomitmen tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis. Dengan demikian, melalui penerapan prinsip GCG di lingkungan Perusahaan diharapkan tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik dan benar serta mampu melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya pemegang saham.

### Commitment and Consistency of Sustainable GCG Implementation

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) in a company is one of the main pillars intended to encourage the establishment of healthy competition and a conducive business climate. Indonesia Financial Group (IFG) is highly committed to implementing GCG principles to maintain sustainable business growth in facing the increasingly dynamic business competition. Therefore, through the implementation of GCG principles within the Company, it is expected that corporate governance is carried out properly and is able to protect the interests of stakeholders, particularly the shareholders.



Perusahaan secara penuh berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara sistematis dan konsisten agar dapat memacu perkembangan bisnis Perusahaan, akuntabilitas serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui praktik GCG yang secara berkesinambungan dilakukan oleh IFG merupakan wujud dari komitmen Perusahaan untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implementasi GCG di lingkup internal keorganisasian Perusahaan, di mana hal ini memberikan kepercayaan diri kepada IFG dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif.

Dalam kesehariannya, prinsip-prinsip dan kebijakan GCG ditempatkan sebagai pedoman bagi Manajemen dan seluruh insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional di lingkup Perusahaan. IFG memiliki kebijakan GCG yang mengadopsi standar terbaik yang berlaku dan senantiasa melakukan penguatan infrastruktur GCG yang dimiliki, termasuk meningkatkan sistem dan prosedur bisnis dengan penerapan struktur tata kelola yang mendukung pelaksanaan GCG di lingkup Perusahaan.

### **Governance Framework**

Melalui peran aktif seluruh Insan IFG serta dengan penerapan GCG yang tepat dan sesuai dengan standar *best practice* yang berlaku, Perusahaan berupaya mengoptimalkan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan dengan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (kewajaran).

The Company is fully committed to implementing GCG principles systematically and consistently in order to spur the Company's business development, accountability and create sustainable added value for the interests of shareholders in the long term without neglecting the interests of other stakeholders.

The continuous GCG practices which are conducted by IFG is a manifestation of the Company's commitment to continue innovating in improving the implementation of GCG within the Company's internal organizational, whereas this gives confidence to IFG in facing every challenge ahead and becoming a business entity with competitive competencies.

In its daily implementation, GCG principles and policies are used as guidelines for the Management and Company's employees in performing business and operational activities within the Company. IFG has a GCG policy which adopts the best applicable standards and continues to strengthen the GCG infrastructure, including improving business systems and procedures by implementing a governance structure which supports the GCG implementation within the Company.

### **Governance Framework**

Through the active role of all IFG Personnel, as well as the proper implementation of GCG and in accordance with prevailing best practice standards, the Company strives to optimize the implementation of GCG principles within the Company by referring to the 5 (five) basic principles as stated in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG), namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.



Dalam menjalankan setiap aktivitasnya Perusahaan senantiasa menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG (TARIF) sebagai upaya dalam memberikan keyakinan bahwa Perusahaan dikelola untuk melindungi kepentingan stakeholders sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG.

### **Dasar Penerapan GCG**

Penerapan GCG di lingkup Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia
  - » Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - » Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - » Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003;
  - » Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

In conducting each of its activities, the Company always applies the 5 (five) basic principles of GCG (abbreviated as TARIF) as an effort to provide confidence that the Company is managed to protect the interests of stakeholders in line with the laws and regulations and the GCG principles

### **The Basis of GCG Implementation**

The implementation of GCG within the Company refers to several regulations/laws that apply in Indonesia, including:

- Laws of the Republic of Indonesia
  - » Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
  - » Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption;
  - » Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003;
  - » Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);



- » Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- » Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- » Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
- » Peraturan Menteri Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
- » Salinan Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN;
- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05 MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-15/ MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah pertama berdasar Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-06/MBU/2012 dan perubahan kedua berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-16/MBU/2012;
- » Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- » Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions; Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions;
- » Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No. PER-09/ MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
- » Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/ MBU/05/2019 dated May 31, 2019 regarding the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of SOEs;
- » A copy of the Decree of the Secretary of the State Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/ Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs;
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05 MBU/2006 concerning the Audit Committee for State-Owned Enterprises;
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-15/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05/ MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises;
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2012 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises as first amended based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-06/MBU/2012 and the second amendment based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-16/MBU/2012



- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN beserta perubahannya yang dimuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-21/MBU/11/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-19/MBU/10/2014;
- » Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance tanggal 17 Oktober 2006 ("Pedoman Umum GCG Indonesia KNKG");
- *Principles of Corporate Governance* oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004.
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Preparation of Information Technology Management for State-Owned Enterprises;
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of SOEs along with the amendments contained in the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-21/MBU/11/2014 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-19/MBU/10/2014;
- » Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/05/2019 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
- General Guidelines for Good Corporate Governance in Indonesia in 2006 issued by the National Committee on Governance Policy on October 17, 2006 ("General Guidelines for GCG Indonesia KNKG");
- Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 2004.

### Tujuan Penerapan GCG

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga *Holding Asuransi dan Penjaminan*, IFG berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan mengacu pada tujuan penerapan GCG BUMN yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, yakni:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat dan andal, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan;

### The Objectives of GCG Implementation

As part of a State-Owned Enterprise (BUMN) which is also an Insurance and Guarantee Holding Company, IFG is committed to implementing GCG principles consistently by referring to the objectives of implementing SOE GCG as stated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as amended by Regulation of the Minister of BUMN No. PER-09/MBU/2012, namely:

1. Optimizing the value of the Company so that the Company has strong and reliable competitiveness, both nationally and internationally, therefore it is able to maintain its existence and is able to sustainably achieve the Company's goals and objectives;



2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
2. Encouraging professional, effective and efficient Company management, as well as empowering functions and increasing the independence of Company organs;
3. Encouraging Company organs to make decisions and perform actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the existence of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the Company;
4. Increasing the Company's contribution to the national economy;
5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

Tujuan penerapan GCG di lingkungan BUMN tersebut selaras dengan penerapan GCG di lingkup Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian hasil usaha serta memberikan nilai tambah bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga terus berupaya untuk memenuhi tujuan GCG yang dideklarasikan oleh otoritas/regulator, di mana penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat mendorong korporasi di Indonesia agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan di kawasan ASEAN.

These objectives of implementing GCG within the scope of the SOE is in line with the implementation of GCG in the Company which aims to improve the achievement of business results and provide added value for Shareholders and other Stakeholders in order to realize the Company's vision and mission. In addition, the Company also strives to fulfill the GCG objectives determined by the authorities/regulators, in which the implementation of GCG principles is expected to encourage corporations in Indonesia to compete with companies in the ASEAN region.



# PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

## Penanggung Jawab Penerapan GCG di Lingkungan Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG di lingkungan Perusahaan berada di bawah Divisi Sekretaris Perusahaan, sehingga penanggung jawab dalam penerapan GCG di lingkungan Perusahaan adalah Divisi Sekretaris Perusahaan.

## Assessment GCG tahun 2020

Guna mendukung penerapan GCG, Perusahaan setiap tahunnya melaksanakan assessment GCG. Melalui assessment GCG ini merupakan wujud komitmen seluruh karyawan dan manajemen IFG untuk senantiasa meningkatkan penerapan GCG di lingkup Perusahaan.

## Person in Charge for GCG Implementation in the Company

The implementation of good corporate governance or GCG within the Company is under the Corporate Secretary Division, so that the person in charge of implementing GCG within the Company is the Corporate Secretary Division.

## GCG Assessment 2020

In order to support the implementation of GCG, the Company annually conducts a GCG assessment. This GCG assessment is a manifestation of the commitment of IFG's all employees and management to continuously improve the implementation of GCG within the Company.

### Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2020

Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2020

<b>Jenis Penilaian</b> Types of Assessent	:	Assessment
<b>Assessor/Penilai</b>	:	Independen (PT RSM Indonesia Konsultan) Independent (PT RSM Indonesia Konsultan)
<b>Periode Penerapan</b> Assessment Period	:	1 Januari-31 Desember 2020 January 1-December 31, 2020
<b>Tahun Buku</b> Fiscal Year	:	2020
<b>Tempat</b> Location	:	Kantor Pusat Indonesia Financial Group Indonesia Financial Group Head Office
<b>Waktu Pengukuran</b> Assessment Date	:	8 Maret 2021 – 20 April 2021 March 8, 2021 –April 20, 2021
<b>Waktu Terbit Laporan</b> Report Publication Date	:	20 April 2021 April 20, 2021

Di tahun 2020 ini assessment GCG IFG dilaksanakan secara independen oleh PT RSM Indonesia Konsultan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 001/PU-SPK/BPUI/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 antara IFG dengan RSM Indonesia. Assessment GCG ini dilakukan dari tanggal 8 Maret hingga 20 April 2021. Laporan hasil assessment penerapan GCG tahun 2020 telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada 20 April 2021 Berikut pencapaian hasil assessment GCG Perusahaan di tahun 2020.

In 2020, the assessment on IFG's GCG was carried out independently by PT RSM Indonesia Konsultan based on Work Order No. 001/PU-SPK/BPUI/III/2021 dated March 8, 2021, between PT BPUI and RSM Indonesia. This GCG assessment was conducted from March 8 to April 20, 2021. The report on the results of the assessment regarding the implementation of GCG in 2020 was signed by the President Director and President Commissioner on April 20, 2021. Followings is the achievement of the Company's GCG Assessment in 2020.



### Pencapaian Assessment GCG Perusahaan tahun 2020

Achievement of the Company's GCG Assessment in 2020

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Aspects of Assessment/Indicators/Parameters	Bobot Weight	Capaian tahun 2020 Achievement in 2020	
		Skor Score	% Capaian Achievement
I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara BerkelaJutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,65	95,00%
II Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	6,74	74,89%
III Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	32,07	91,63%
IV Direksi Board of Directors	35,00	28,52	81,49%
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	6,17	68,56%
VI Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	N/A	N/A
<b>Skor Keseluruhan Total Score</b>	<b>100,00</b>	<b>80,15</b>	<b>80,15%</b>
<b>Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Classification on GCG Implementation Quality</b>	<b>BAIK GOOD</b>		

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik

Description:

0-50 : Bad | 50-60 : Not Good | 60-75 : Fairly Good | 75-85 : Good | 85-100 : Very Good

Hasil assessment penerapan GCG Perusahaan periode tahun 2020 mencapai total skor 80,15 dari total bobot sebesar 100,00 dengan klasifikasi "BAIK", mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 88,41. Dari hasil assessment penerapan GCG untuk tahun buku 2020, terdapat 12 rekomendasi sebagai *Area of Improvement* (Aoi), yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun selanjutnya. Rekomendasi penilaian penerapan GCG tahun buku 2020 adalah sebagai berikut:

The results of the assessment of the Company's GCG implementation for the 2020 period reached a total score of 80.15 out of a total weight of 100.00 with a "GOOD" classification. This was a decrease from the previous year which was recorded at 88.41. From the results of the GCG implementation assessment for the 2020 fiscal year, there were 12 recommendations classified as Areas of Improvement (Aoi), which need to be followed up as an effort to improve the quality of GCG implementation in the following year. The recommendations for the assessment of the GCG implementation in the 2020 fiscal year are as follows:



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
1	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukannya pemutakhiran Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) untuk menambahkan pengaturan terkait penandatanganan secara berkala atas kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku oleh Karyawan.</li> <li>• Karyawan menandatangi secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku sesuai dengan yang diatur dalam Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>).</li> <li>• Dilakukannya sosialisasi GCG yang di dalamnya menyosialisasikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, kemudian melakukan uji pemahaman di akhir pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta sosialisasi.</li> <li>• Dilakukannya sosialisasi GCG yang di dalamnya menyosialisasikan kebijakan Pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan, kemudian melakukan uji pemahaman di akhir pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta sosialisasi.</li> <li>• Terdapat pengaturan mengenai kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>)</li> <li>• Terdapatnya kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistleblowing system</i> kepada Stakeholders Perusahaan</li> <li>• Melengkapi website Perusahaan dengan pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) yang dapat diunduh oleh stakeholders.</li> <li>• Terdapatnya mekanisme penanganan keluhan stakeholders (permasok, karyawan, dan lain- lain) yang dijalankan dengan konsisten dan efektif.</li> <li>• Dilakukannya sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan secara menyeluruh.</li> </ul>			√	√



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
1	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Updates of the Code of Conduct to add arrangements related to the regular signing of compliance with the Code of Conduct by Employees.</li> <li>• That employees periodically sign a statement of compliance with the Code of Conduct in accordance with the Code of Conduct.</li> <li>• That there are dissemination on GCG, which includes regular dissemination on the Good Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct to the Board of Commissioners, Board of Directors and employees. This is then followed up with a comprehension test at the end of the dissemination to determine the level of understanding of the participants joining the dissemination.</li> <li>• That there are dissemination on GCG, which includes periodical dissemination on Gratification Control policies to the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees. This is then followed up with a comprehension test at the end of the dissemination to determine the level of understanding of the participants joining the dissemination.</li> <li>• The existence of regulations regarding the obligation to report violations in the Whistleblowing System Guidelines.</li> <li>• That there are activities to disseminate the whistleblowing system policy to the Company's Stakeholders.</li> <li>• The inclusion of the Whistleblowing System guidelines in the Company's website which can be downloaded by stakeholders.</li> <li>• That there is a mechanism for handling complaints from stakeholders (suppliers, employees, etc.) that is carried out consistently and effectively.</li> <li>• That there are thorough dissemination of the policy on the mechanisms to prevent the action of taking of personal benefits for the Board of Directors and Company's structural officers</li> </ul>				
2	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukannya pemaparan atas usulan RJPP oleh Direksi kepada RUPS dan didokumentasikan ke dalam risalah rapat.</li> <li>• Dilakukannya pemaparan/pemberian tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran dari Dewan Komisaris atas usulan RJPP kepada RUPS.</li> <li>• Terdapatnya koordinasi dengan Pemegang Saham untuk memastikan Pemegang Saham menyetujui rancangan RJPP atau revisi RJPP yang disampaikan oleh IFG secara tepat waktu yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya.</li> <li>• Rancangan RJPP atau Revisi RJPP secara lengkap atau sebelum tahun periode RJPP atau Revisi RJPP berjalan.</li> <li>• Terdapatnya pengaturan perihal jangka waktu atas tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris di dalam Pedoman Umum GCG dan/atau pedoman pola hubungan kerja (<i>Board Manual</i>).</li> <li>• Terdapatnya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP dari Dewan Komisaris kepada RUPS/Pemilik Modal yang diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan.</li> <li>• Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan dan/atau Dewan Komisaris sebelum 30 September tahun berjalan.</li> <li>• Dilakukannya sosialisasi terkait dengan RJPP kepada seluruh karyawan Perusahaan.</li> </ul>	√	√	√	

No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
1	<p>IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That the Board of Directors present the Company Long Term Plan (RJPP) proposal to the GMS and documents RJPP proposal in the minutes of the meeting.</li> <li>• That there is a written presentation/response in the form of opinions and suggestions from the Board of Commissioners on the RJPP proposal to the GMS</li> <li>• That there is coordination with the Shareholders to ensure that the Shareholders approve the RJPP draft or revision submitted by BPUI in a timely manner, i.e. no later than 60 (sixty) days after the receipt</li> <li>• A Complete RJPP or Revised RJPP draft or before the current year of the current RJPP or RJPP Revision period.</li> <li>• That there are arrangements regarding the time period for the response to the RJPP draft by the Board of Commissioners in the GCG General Guidelines and/or the guidelines for working relationships (Board Manual).</li> <li>• That there is a written response in the form of opinions and suggestions regarding the RJPP draft from the Board of Commissioners to the GMS/Capital Owners given within the period stated in the provisions.</li> <li>• That the Board of Directors submits the RJPP draft to the GMS on October 31 before the current year's RJPP period and/or the Board of Commissioners before September 30 of the current year.</li> <li>• That there are dissemination related to RJPP to all employees of the Company.</li> </ul>				
3	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya koordinasi dengan Pemegang Saham untuk memastikan Pemegang Saham menyetujui rancangan RKAP yang disampaikan oleh IFG secara tepat waktu yaitu paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.</li> <li>• Terdapatnya ketentuan terkait jangka waktu atas tanggapan rancangan RKAP Dewan Komisaris di dalam pedoman umum GCG dan/atau pedoman pola hubungan kerja (Board Manual).</li> <li>• Terdapatnya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP yang disertai dengan kesimpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP kepada RUPS/Pemilik Modal.</li> <li>• RKAP Perusahaan merupakan penjabaran tahunan RJPP.</li> <li>• Dilakukannya sosialisasi terkait dengan RKAP kepada seluruh karyawan Perusahaan.</li> </ul> <p>IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That there is coordination with the Shareholders to ensure that the Shareholders approve the Company Work Plan and Budget (RKAP) draft submitted by BPUI in a timely manner, namely, at the latest, at the end of the year before the current fiscal year.</li> <li>• That there are provisions related to the time period for the response to the RKAP draft of the Board of Commissioners in the general GCG guidelines and/or the guidelines for working relationship patterns (Board Manual).</li> <li>• That there is a written response in the form of opinions and suggestions regarding the RKAP draft accompanied by the conclusion that the RKAP draft is in line with and/or not in line with the RJPP to the GMS/Capital Owner.</li> <li>• That the Company's RKAP is the elaboration of the annual RJPP.</li> <li>• That there are disseminations related to RKAP to all employees of the Company.</li> </ul>	√	√	√	



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>IFG melakukan koordinasi dengan Pemegang Saham untuk memastikan Pemegang Saham memberikan penilaian atas kinerja Direksi secara kolegial dan individu, berdasarkan laporan kinerja Direksi serta mempertimbangkan tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.</li> <li>IFG memastikan terdapat penilaian dari Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.</li> <li>Berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi baik secara kolegial maupun individu dengan realisasi pencapaian masing-masing, yang disampaikan kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.</li> <li>IFG coordinates with Shareholders to ensure that Shareholders evaluate the performance of the Board of Directors collegially and individually, based on the performance report of the Board of Directors and consider the Board of Commissioners' response to the performance of the Board of Directors.</li> <li>IFG ensures that there is an assessment from the Board of Commissioners on the performance of the Board of Directors</li> <li>Based on a review of the criteria, targets and main performance indicators included in the Management Contract of the Board of Directors, both collegially and individually with the realization of each achievement, which is submitted to the GMS in the semi-annual and annual report on the supervisory duties of the Board of Commissioners.</li> </ul>		✓	✓	
5	<p>IFG memastikan Dewan Komisaris melakukan telaah dan memberikan arahan kepada Direksi atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan mutu.</li> <li>Kinerja kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.</li> <li>Pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.</li> <li>Penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.</li> </ul> <p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapatnya rencana kerja penunjukan calon auditor disertai dengan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris.</li> <li>Dewan Komisaris menindaklanjuti seluruh area of improvement hasil assessment/review GCG yang menjadi kewenangannya.</li> <li>Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan.</li> <li>Disusunnya piagam nominasi dan remunerasi.</li> <li>Program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit memuat telaah: <ul style="list-style-type: none"> <li>Efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;</li> <li>Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI;</li> <li>Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan SPI;</li> <li>Telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan; dan</li> <li>Self-assessment kinerja Komite Audit.</li> </ul> </li> </ul>		✓		



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
6	<p>IFG ensures that the Board of Commissioners reviews and provides guidance to the Board of Directors on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quality policy.</li> <li>• Performance of activities/efforts to resolve litigation and non-litigation cases.</li> <li>• Complaints relating to SOEs received by the Board of Commissioners.</li> <li>• Research/evaluation of the candidates for the Board of Directors proposed by the Board of Directors, before being submitted to the Shareholders.</li> </ul> <p>IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That there is a work plan for the appointment of prospective auditors accompanied by an external audit budget in the Annual Work Plan and Budget (RKAT) of the Board of Commissioners.</li> <li>• That the Board of Commissioners follows up on all areas of improvement on the results of the assessment/review GCG under its authority.</li> <li>• That the Board of Commissioners reviews the remuneration of the Board of Directors by considering the results of the Board of Directors' performance assessment (KPI) and the achievement of the Company's health level.</li> <li>• The draft of nomination and remuneration charter.</li> <li>• That the Audit Committee's annual work program shall at least contain a review of:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Effectiveness of the management control system and provide recommendations for improvement of the management control system and its implementation;</li> <li>b. The effectiveness of the implementation of the duties of the external auditor and the Internal Audit Unit;</li> <li>c. Assessment on the implementation of activities as well as the results of audits carried out by external auditors and the Internal Audit Unit;</li> <li>d. A satisfactory review procedure for all information issued by the Company; and</li> <li>e. Self-assessment of the performance of the Audit Committee.</li> </ul> </li> </ul>				
6	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rapat Dewan Komisaris dan agenda yang dibahas sesuai dengan yang direncanakan.</li> <li>• Terdapat surat kuasa yang dibuat oleh anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir dalam rapat Dewan Komisaris disertai penjelasan ketidakhadiran dalam rapat tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan.</li> <li>• Terdapatnya pembahasan terkait hasil rapat Dewan Komisaris pada rapat sebelumnya dan memastikan bahwa hasil rapat tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya.</li> <li>• Bahan-bahan rapat disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.</li> </ul>		✓		



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
	<p>IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That the number of meetings of the Board of Commissioners and the agenda discussed are as planned.</li> <li>• That there is a power of attorney made by a member of the Board of Commissioners who is unable to attend the meeting of the Board of Commissioners accompanied by an explanation of his/her absence from the meeting, which is stated and documented in the Minutes of Meeting.</li> <li>• That there are discussions regarding the results of the Board of Commissioners meeting at the previous meeting and ensure that the results of the meeting have been fully followed up</li> <li>• Meeting materials are provided and delivered to the meeting participants no later than 3 (three) days prior to the meeting.</li> </ul>				
7	<p>IFG memastikan terdapat laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.</p> <p>IFG ensures that there are quarterly and annual reports of the Committee to the Board of Commissioners, at least containing a comparison of the realization of activities with the annual work program as well as the substance of the results of activities and recommendations.</p>			✓	
8	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya ketentuan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan direksi di dalam pedoman pola hubungan kerja (<i>Board Manual</i>).</li> <li>• Terdapatnya ketentuan standar waktu tentang kesegeraan Direksi untuk mengkomunikasikan keputusan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani di dalam pedoman pola hubungan kerja (<i>Board Manual</i>).</li> <li>• Terdapatnya KPI dan melakukan penilaian KPI untuk pencapaian kinerja Direksi baik secara kolegial maupun individual.</li> <li>• Pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI).</li> <li>• Terdapat penyampaian laporan manajemen kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu sebelum penyampaian laporan manajemen kepada Pemegang Saham.</li> <li>• Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.</li> <li>• Penyampaian Laporan Perusahaan Tahunan dilakukan tepat waktu kepada Pemegang Saham yaitu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.</li> </ul>				✓

No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
IFG ensures:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• That there is a provision on the standard time for the immediacy level of decision making by the Board of Directors in the guidelines for the employment relationship pattern (Board Manual).</li> <li>• That there is a provision on the standard time regarding the immediateness of the Board of Directors to convey the decision to the organizational level below the Board of Directors, a maximum of 7 days since it was ratified/signed in the guidelines for the employment relationship pattern (Board Manual).</li> <li>• That there are KPIs and KPI assessment for the achievement of the Board of Directors' performance, both collegially and individually.</li> <li>• That the proposal for the Board of Directors' performance tantiem/incentive takes into account the results of the Board of Directors' performance assessment (KPI).</li> <li>• A timely submission of management reports to the Board of Commissioners prior to the submission of management reports to Shareholders.</li> <li>• That the Board of Directors submits a quarterly management report which has been signed by all members of the Board of Directors as well as an annual management report and an annual report signed by all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to Shareholders.</li> <li>• That the Company's Annual Report is submitted on time to the Shareholders, which is no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year.</li> </ul>				
9	IFG melalui Sekretaris Perusahaan memastikan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat program pengenalan Perusahaan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dengan disertai dengan absensi daftar hadir.</li> <li>• Terdapat program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat dengan disertai dengan absensi daftar hadir.</li> <li>• Terdapat rencana pelatihan bagi anggota Direksi di dalam RKAP.</li> <li>• Penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan (Laporan Realisasi RKAP) kepada Dewan Komisaris dilakukan tepat waktu.</li> <li>• Terdapat rencana kerja mengenai program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat, baik dalam Program Kerja Sekretaris Perusahaan ataupun Program Kerja Direksi.</li> </ul>			

Through its Corporate Secretary, IFG ensures:

- That there is a Company introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners, accompanied by the attendance list.
- That there is an introduction program for newly appointed members of the Board of Directors, accompanied by the attendance list.
- That there is a training plan for members of the Board of Directors in the RKAP.
- Timely submission of the Quarterly Management Report (RKAP Realization Report) to the Board of Commissioners.
- That there is a work plan regarding the Company introduction program to newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners, both in the Corporate Secretary Work Program or the Board of Directors Work Program



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
9	<p>IFG melalui SDM memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya rencana sukses untuk setiap level dalam organisasi perusahaan, berupa database (<i>list</i>) orang yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan.</li> <li>• Terdapat pembahasan terkait dengan rencana promosi dan mutasi yang dibahas melalui Rapat Komite <i>Human Capital</i> dan disampaikan ke Dewan komisaris.</li> <li>• Terdapat KPI untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran dan jabatan (struktural) dalam organisasi.</li> <li>• SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka.</li> <li>• Terdapat KPI dan melakukan penilaian kinerja (<i>performance appraisal</i>) bagi karyawan.</li> <li>• Terdapat kebijakan mengenai keterbukaan informasi kepada karyawan dan melaksanakan praktik dari kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten.</li> <li>• Terdapat penetapan jenis kebijakan perusahaan yang telah dikomunikasikan kepada karyawan dan melibatkan karyawan di dalam perumusannya.</li> <li>• Terdapat kebijakan terkait dengan kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survei kepuasan karyawan.</li> </ul> <p>IFG melalui Pengadaan memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman/kebijakan pengadaan dapat diakses oleh pemasok/calon pemasok.</li> <li>• Rencana pengadaan barang dan jasa telah disusun secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan.</li> <li>• Terdapat dokumentasi atas survei tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan serta hasil survei terkait dengan tingkat kepuasan pemasok terhadap <i>fairness</i> dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan.</li> </ul> <p>IFG melalui Manajemen Risiko memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukannya evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari program yang memiliki relevansi dengan K3.</li> <li>• Terdapat kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur serta Kebijakan yang mencakup Perusahaan sebagai penjamin (<i>avalist</i>).</li> </ul> <p>IFG melalui SPI memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada tingkatan di bawah direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas laporan keuangannya akan dikonsolidasikan.</li> <li>• Terdapatnya <i>internal control report</i> yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai;</li> <li>b. Suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaan.</li> </ul> </li> <li>• Jumlah personel yang ditugaskan di SPI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas SPI.</li> </ul>				Sekretaris Perusahaan, SDM, Pengadaan, Manajemen Risiko, SPI √



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
9	<p>Through its HRD, IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That there is a succession plan for each level in the Company's organization, in the form of a database (list) of people who have the skills and competencies as well as sufficient experience to conduct targeted assignments which can be available in every position in the company.</li> <li>• That there are discussions related to the promotion and transfer plans which were discussed through the Human Capital Committee Meeting and submitted to the Board of Commissioners.</li> <li>• That there are KPIs for each position in the organizational structure in accordance with the scope of duties and roles and positions (structural) in the organization.</li> <li>• That SOPs and SPMs are communicated openly.</li> <li>• That there are KPIs and performance appraisals for all employees</li> <li>• That there is a policy regarding information disclosure to employees and consistently implement the practices of the information disclosure policy.</li> <li>• That there is a determination of the type of Company policy that has been communicated to employees and involves employees in its formulation.</li> <li>• That there are policies related to assessment methods to measure employee satisfaction and to conduct employee satisfaction surveys.</li> </ul> <p>Through procurement division, IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The availability of procurement guidelines/policies which can be accessed by suppliers/potential suppliers.</li> <li>• That the plan for the procurement of goods and services has been optimally prepared based on the calculation of the Company's needs.</li> <li>• That there is documentation of a survey on the level of supplier satisfaction towards the Company, as well as survey results related to the level of supplier satisfaction with the fairness and transparency of the implementation of procurement systems and procedures</li> </ul> <p>Through Risk Management, IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That there is an evaluations and a follow-up on said evaluation results from programs that have relevance to OHS</li> <li>• That there is a policy regarding the protection of the rights and interests of creditors as well as a policy that includes the Company as guarantor (avalist).</li> </ul> <p>Through its Internal Audit Unit, IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That there is cascading of certification towards financial statements to the levels below the Board of Directors who become the accounting entities and ensures that the reporting of financial statements will be consolidated.</li> <li>• That there is an internal control report which includes:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. A statement saying that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures;</li> <li>b. An assessment of the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the Company's fiscal year.</li> </ol> </li> <li>• That the number of personnel assigned to Internal Audit Unit is in accordance with the needs for the implementation of Internal Audit Unit's duties.</li> </ul>				Corporate Secretary, Human Resources, Procurement, Risk Management, Internal Audit Unit



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
10	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat pengaturan terkait dengan risalah rapat Direksi yang memuat evaluasi (pemantauan progres) terhadap keputusan hasil rapat Direksi sebelumnya dan tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris yang dilaksanakan oleh Direksi.</li> <li>• Terdapat jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan.</li> <li>• Penyelenggaraan rapat Direksi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</li> <li>• Kehadiran anggota Direksi dalam rapat dengan Direksi dengan Dewan Komisaris, dan terdapatnya surat kuasa yang dibuat oleh anggota Direksi apabila berhalangan hadir dalam rapat tersebut.</li> <li>• Dalam setiap rapat Direksi dilakukan pemantauan progres terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan didokumentasikan dalam risalah rapat Direksi.</li> </ul> <p>IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That there are arrangements related to the minutes of the Board of Directors meeting which contain evaluation (monitoring progress) of the decisions of the previous Board of Directors meetings and follow-up on the guidance and/or decisions of the Board of Commissioners conducted by the Board of Directors.</li> <li>• That there is a number of meetings that are planned as needed, at least once a month.</li> <li>• That the holding of the Board of Directors Meeting is in accordance with the predetermined plan.</li> <li>• The presence of members of the Board of Directors in meetings with the Board of Directors and the Board of Commissioners, and a power of attorney made by members of the Board of Directors if they are unable to attend the meeting.</li> <li>• That in every meeting of the Board of Directors, progress is monitored on the implementation of the decisions of the previous meeting and is documented in the minutes of the Board of Directors meeting.</li> </ul>			✓	Sekretaris Perusahaan



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
11	<p>IFG memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya pemutakhiran atas Kebijakan Komunikasi No. 029/SK-DIR-CORP/BPUI/IV/2018 untuk memastikan terdapat pengaturan mengenai prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i>.</li> <li>• Terdapatnya kebijakan terkait pengelolaan dan pemutakhiran website yang antara lain mengatur ketersediaan Laporan Tahunan dalam website dan memastikan apa saja kebijakan yang harus dipublikasikan.</li> <li>• Pengelolaan website sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.</li> <li>• Terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCC Code), <i>Board Manual</i>, dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.</li> <li>• Terdapat media lain untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan lain kepada <i>stakeholders</i> seperti majalah internal, <i>bulletin</i>, dan sebagainya.</li> <li>• Pelaksanaan pertemuan/<i>gathering</i> dengan <i>stakeholders</i> dan bentuk lainnya.</li> <li>• Dalam pelaksanaan pemutakhiran website, informasi yang sudah ada dalam website tidak dihilangkan dan memastikan Laporan Tahunan disajikan dalam website sesuai ketentuan yang diatur dalam kebijakan pengelolaan dan pemutakhiran website.</li> <li>• Laporan Tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan.</li> <li>• Laporan Tahunan disajikan dalam website sesuai ketentuan yang diatur dalam kebijakan pengelolaan dan pemutakhiran website.</li> <li>• Laporan Tahunan memuat informasi terkait keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun.</li> <li>• Melengkapi Laporan Tahunan dengan informasi nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).</li> </ul>				



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
	<p>IFG ensures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• That there is an update on Communication Policy No. 029/SK-DIR-CORP/BPUI/IV/2018 to ensure that there are arrangements regarding the procedures for disclosing company information to stakeholders.</li> <li>• That there are policies related to website management and updating, which include regulating the availability of the Annual Report on the website and ensuring what policies must be published.</li> <li>• That the website is managed in accordance with the established policies consistently.</li> <li>• That there are published policies, including: Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Code), Board Manual, and Code of Conduct, and the Company's Gratification Control Program.</li> <li>• That there are other media to communicate the Company's other important information policies to stakeholders such as internal magazines, bulletins, and so on.</li> <li>• Implementation of meetings/gathering with stakeholders and other forms.</li> <li>• That in the implementation of website updating, information that already exists on the website is not removed and ensures that the Annual Report is presented on the website in accordance with the provisions stipulated in the website management and updating policy.</li> <li>• That the Annual Report is presented in Indonesian and English side by side.</li> <li>• That the Annual Report is presented on the website in accordance with the provisions stipulated in the website management and updating policy.</li> <li>• That the Annual Report contains financial-related information (statement of financial position, statement of comprehensive profit loss, financial ratios in general and those which are relevant to the Company's industry) in the form of a 5-year comparison.</li> <li>• Completion of the Annual Report with information on names, positions, and brief curriculum vitae of members of the Board of Commissioners (age, education and work experience).</li> </ul>				



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melengkapi Laporan Tahunan dengan informasi nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Direksi (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).</li> <li>• Informasi mengenai berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan dan belum menyertakan besarnya <i>fee audit</i> dan juga jasa lain yang diberikan oleh akuntan publik tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan IFG.</li> <li>• Melengkapi Laporan Tahunan dengan alamat seluruh anak perusahaan.</li> <li>• Informasi mengenai prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan IFG.</li> <li>• Laporan Tahunan IFG sudah mengungkapkan informasi mengenai pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi, frekuensi pertemuan, tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan dan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.</li> <li>• Laporan Tahunan IFG sudah mengungkapkan informasi mengenai riwayat hidup singkat anggota Komite Audit, uraian tugas dan tanggung jawab, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit, laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan independensi anggota Komite Audit.</li> <li>• Laporan Tahunan IFG sudah mengungkapkan informasi mengenai uraian tentang tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: nama dan riwayat jabatan singkat Sekretaris Perusahaan dan uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.</li> <li>• Laporan Tahunan IFG sudah mengungkapkan informasi mengenai uraian tentang tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen dan biaya yang telah dikeluarkan.</li> <li>• Informasi mengenai sertifikasi atas pengelolaan lingkungan diungkapkan dalam Laporan Tahunan IFG.</li> <li>• Informasi mengenai perkara yang dihadapi oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan IFG. Dalam hal anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</li> <li>• Laporan Tahunan IFG sudah mengungkapkan informasi mengenai: keberadaan pedoman perilaku, isi pedoman perilaku, penyebaran pedoman perilaku kepada karyawan dan upaya penegakkannya dan pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan.</li> <li>• Meningkatkan praktik CSR dan sejenisnya dan berpartisipasi dalam penghargaan untuk CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya.</li> <li>• Meningkatkan publikasi dan keterbukaan informasi Perusahaan dan berpartisipasi dalam penghargaan untuk publikasi dan keterbukaan informasi Perusahaan.</li> </ul>			✓	Sekretaris Perusahaan



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Completion of the Annual Report with information on names, positions, and brief curriculum vitae of members of the Board of Directors (age, education and work experience).</li> <li>• There is information regarding the number of audit periods had been conducted by the public accountant on the Company's financial statements; not including the disclosure of the amount of audit fees and other services provided by the public accountant in the IFG's Annual Report.</li> <li>• Completion of the Annual Report with the addresses of all subsidiaries.</li> <li>• There is information regarding the determination procedure and the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners disclosed in the IFG's Annual Report.</li> <li>• That the IFG's Annual Report has disclosed information regarding the disclosure of the determination procedure and the amount of remuneration for members of the Board of Directors, the frequency of meetings, the level of attendance of members of the Board of Directors in meetings and training programs in order to improve the competency of the Board of Directors.</li> <li>• The IFG's Annual Report has disclosed information regarding brief curriculum vitae of members of the Audit Committee, job descriptions and responsibilities, frequency of meetings and attendance of the Audit Committee, brief reports on the implementation of the Audit Committee's activities and the independence of members of the Audit Committee.</li> <li>• That the IFG's Annual Report has disclosed information regarding the description of the duties and functions of the Corporate Secretary, including, among others: the name and brief position history of the Corporate Secretary and a description of the implementation of the Corporate Secretary's duties.</li> <li>• That the IFG's Annual Report has disclosed information regarding the description of corporate social responsibility, especially regarding the Company's commitment to consumer protection, including information on the establishment of a Consumer Complaints Center and the costs incurred.</li> <li>• That information regarding certification of environmental management is disclosed in the IFG's Annual Report.</li> <li>• That information regarding cases faced by the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is disclosed in the IFG's Annual Report. In the event that members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors do not have important matters, they must be disclosed.</li> <li>• That the IFG's Annual Report has disclosed information on: the existence of the code of conduct, the content of the code of conduct, the dissemination of the code of conduct to employees and their enforcement efforts and statements regarding the Company's corporate culture.</li> <li>• Improvement in CSR practices and the like and participations in awards for CSR (Sustainability Reporting Award) and the like.</li> <li>• Increased publication and disclosure of Company information and participation in awards for the publication and disclosure of Company information.</li> </ul>				Corporate Secretary



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
12	<p>IFG melakukan koordinasi dengan Pemegang Saham untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendokumentasikan Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi.</li> <li>• Memastikan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh Bakal Calon anggota Direksi yang disetujui oleh Menteri Negara dan didokumentasikan.</li> <li>• Memastikan terdapat penetapan hasil akhir UKK dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Menteri Negara BUMN.</li> <li>• Terdapat Tim yang dibentuk untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan serta menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.</li> <li>• Memastikan bahwa anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.</li> <li>• Memastikan rencana pemberhentian diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</li> <li>• Memastikan bahwa anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim.</li> <li>• Memastikan bahwa Pemegang Saham melaksanakan penilaian terhadap calon Dewan Komisaris yang mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan) dan didokumentasikan dalam Berita Acara Penilaian.</li> <li>• Penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian.</li> <li>• Mengkaji ulang kebutuhan jumlah Dewan Komisaris dan Direksi agar sesuai dengan SK-16/S.MBU/2012 yaitu jumlah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi.</li> <li>• Mengkaji ulang Anggaran Dasar atau melakukan pemutakhiran Pedoman Pola Hubungan Kerja IFG (<i>Board Manual</i>) untuk menambahkan ketetapan terkait jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris.</li> <li>• Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan laporan tahunan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.</li> <li>• Menetapkan tingkat signifikansi atas penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang perlu disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Pemegang Saham dan ditindaklanjuti oleh Pemegang Saham.</li> </ul>				



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
	<p>IFG coordinates with Shareholders to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Document the List of Prospective Candidates approved by the Minister of State-Owned Enterprises containing the names obtained through the screening process in order to obtain prospective members of the Board of Directors.</li> <li>• Ensure that the fit and proper test is conducted and documented in accordance with the prevailing provisions for all prospective members of the Board of Directors approved by the Minister of State.</li> <li>• Ensure that there is a determination of the final results of UKK and Evaluation by the Team and submit the results to the Minister of State for SOEs.</li> <li>• Ensure that there is a team established to carry out a fit and proper test as well as to assess all the assessment criteria for the Board of Directors set out in the statutory provisions.</li> <li>• Ensure that members of the Board of Directors are included in the determination of UKK and Evaluation results submitted by the Team.</li> <li>• Ensure that the termination plan is notified to the relevant member of the Board of Directors.</li> <li>• Ensure that members of the Board of Directors are included in the determination of UKK and Evaluation results submitted by the Team.</li> <li>• Ensure that the Shareholders conduct an assessment of the candidate for the Board of Commissioners which includes all the assessment criteria for the Board of Commissioners stipulated in the provisions of the legislation in the SOE sector (assessment of the requirements for integrity, dedication, understanding of company management issues related to one of the management functions and having adequate knowledge in the Company's line of business) and document the result of the assessment in the Minutes of Appraisal.</li> <li>• Determine the establishment of the elected Board of Commissioners based on the final results of the assessment.</li> <li>• Review the need for the number of the Board of Commissioners and the Board of Directors to comply with SK-16/S.MBU/2012, namely to have the number of the Board of Commissioners/Supervisory Board to be the same as the maximum number of members of the Board of Directors.</li> <li>• Review the Articles of Association or update the BPUI Work Relations Pattern Guidelines (Board Manual) to add provisions regarding the maximum number of positions on the Board of Commissioners that may be held by a member of the Board of Commissioners.</li> <li>• Ensure that the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the annual report is carried out on time in accordance with the provisions, which is no later than 6 (six) months after the end of the previous fiscal year.</li> <li>• Determine the level of significance for the decrease in performance and/or loss of the Company that needs to be conveyed by the Board of Commissioners/ Supervisory Board and/or Board of Directors to the Shareholders and followed up by the Shareholders.</li> </ul>				



No	Usulan Rekomendasi Recommendations	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pihak Terkait Lainnya Other Related Parties
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan Pemegang Saham memberikan respon/tanggapan atas informasi mengenai penurunan kinerja dan/atau kerugian perusahaan yang signifikan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau Direksi bentuk respon/tanggapan, dapat berupa pemanggilan untuk penjelasan mengenai penurunan kinerja, permintaan informasi/clarifikasi, dan sebagainya.</li> <li>• Memastikan pengesahan RKAP oleh RUPS dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan.</li> <li>• Memastikan pengesahan RJPP oleh RUPS dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berikut berjalan.</li> <li>• Memastikan pengesahan Laporan Tahunan dilaksanakan tepat waktu, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun yang lampau.</li> <li>• Ensure that the Shareholders provide a response to information regarding the decline in performance and/or significant company losses submitted by the Board of Commissioners/Supervisory Board and/or the Board of Directors in the form of a response, which can be in the form of a summons for an explanation regarding the decline in performance, requests for information/clarification, etc.</li> <li>• Ensure that the approval of the RKAP by the GMS is conducted no later than the end of the year before the current fiscal year.</li> <li>• Ensure that the ratification of the RJPP by the GMS is carried out no later than 60 days after the receipt of the complete RJPP draft or before the next RJPP period starts.</li> <li>• Ensure that the ratification of the Annual Report is carried out on time, which is no later than 6 (six) months after the end of the previous year.</li> </ul>		√		

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang merupakan *Area of Improvement* (Aoi) atas hasil assessment penerapan GCG untuk tahun buku 2020, yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait dalam rangka meningkatkan penerapan praktik GCG dengan memperhatikan perkembangan terkini *best practice* yang berlaku.

The Company is committed to follow-up on the recommendations which are Areas of Improvement (Aoi) on the results of the GCG implementation assessment for the 2020 fiscal year, which is based on the commitment of all relevant parties in order to improve the implementation of GCG practices by taking into account the latest developments in applicable best practices.



## STRUKTUR DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

### STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola Perusahaan merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG atau mendukung perkembangan bisnis Perusahaan. Sedangkan mekanisme tata kelola Perusahaan merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan.

Struktur tata kelola Perusahaan memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Perusahaan yang didukung oleh perangkat kebijakan yang dimiliki Perusahaan agar sesuai dengan tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG. Sementara mekanisme tata kelola Perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perusahaan, sehingga menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Di mana proses penerapan GCG melekat pada struktur tata kelola Perusahaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa Organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik

### ORGAN STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

The corporate governance structure is an organ or device owned by the Company. It can be either an organ or device established due to compliance with prevailing laws and regulations, as well as an organ or device formed due to internal needs in order to improve the implementation of GCG or support the Company's business development. Meanwhile, the corporate governance mechanism is a series of processes, customs, rules, and institutions that affect the overall management of the Company.

The corporate governance structure has several main aspects which perform a role to support the strengthening of control and management of the Company which are supported by the policies owned by the Company to be in accordance with the objectives of implementing GCG principles. Meanwhile, the corporate governance mechanism is the process of implementing the principles of corporate governance supported by the adequacy of the structure and infrastructure of corporate governance, so as to produce achievements that are in line with the expectations of shareholders and other stakeholders. The process of implementing GCG is attached to the corporate governance structure.

In accordance with Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in Article 1 of Chapter I concerning General Provisions, it is stated that the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners, with the following details:

1. General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as GMS, is a Company Organ which has authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association;
2. The Board of Directors is a Company Organ which is authorized and is fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Perusahaan telah memiliki ketiga organ utama tersebut, Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris sebagai pengawas jalannya pengelolaan perusahaan dan Direksi sebagai pengelola perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dan diharapkan memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan.

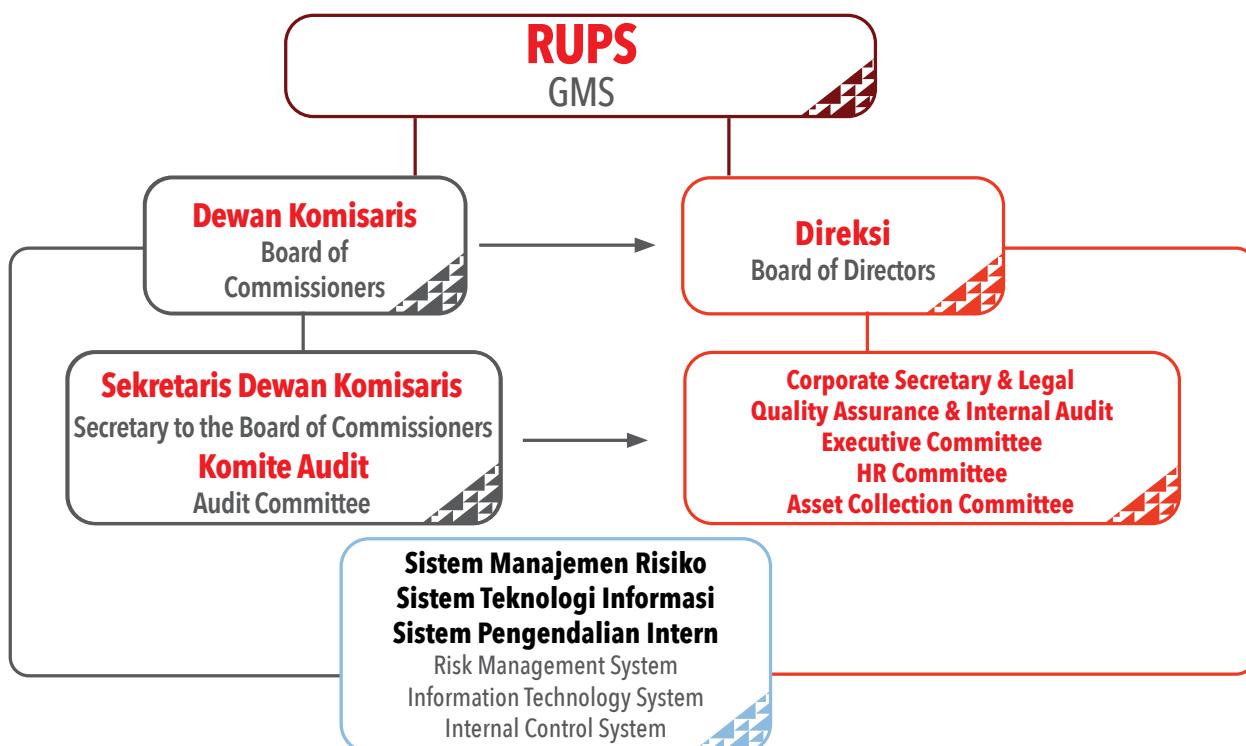
Struktur tata kelola Perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan berlaku bagi Perusahaan, adalah:

and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association;

3. The Board of Commissioners is the Company's Organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

The Company is equipped with these three main organs, the Shareholders, through the General Meeting of Shareholders (GMS) as the highest decision-making forum for Shareholders, the Board of Commissioners as supervisor of the management of the Company and the Board of Directors as the manager of the Company. The Board of Commissioners and the Board of Directors have clear authority and responsibility according to their respective functions. in accordance with the Articles of Association and laws and regulations and are expected to have a common perception of the vision, mission and values of the Company.

The Company's governance structure is based on the Regulation of the Minister of SOEs Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and applies to the Company, namely:





### 1.9 Struktur Tata Kelola Eksternal Perusahaan

Dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya, Perusahaan harus:

- » 1.9.1 Memperhatikan aspek-aspek pengaturan yang berasal dari pihak eksternal Perusahaan dan implikasinya bagi pelaksanaan kegiatan usahanya
- » 1.9.2 Mematuhi kebijakan/regulasi/pengaturan Instansi Pemerintah Terkait
- » 1.9.3 Dalam hal Pemerintah ingin memberikan penugasan kepada Perusahaan dalam rangka pelaksanaan sebagai tugas Pemerintah, maka penugasan tersebut wajib dilaksanakan dengan terlebih dahulu dikaji oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta mendapat persetujuan Menteri BUMN

## SOFT STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Proses dan mekanisme GCG menjadi bagian penting dalam pengelolaan hubungan kerja yang faktual dan terkelola antar organ GCG. Proses dan mekanisme ini dituangkan dalam *soft structure* GCG yang terdiri dari berbagai peraturan dan pedoman atau kebijakan yang mengatur lingkup tanggung jawab organ GCG, dan hubungan kerja antar organ GCG; termasuk dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Agar penerapan prinsip tata kelola Perusahaan dapat berjalan dengan baik, IFG melakukan penyempurnaan kelengkapan *soft structure* GCG guna mendukung penerapannya, didasari dengan adanya pembaharuan atas beberapa peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### 1.9 The Company's External Governance Structure

In conducting its business activities, the Company must:

- » 1.9.1 Pay attention to regulatory aspects originating from external parties of the Company and their implications for the implementation of its business activities
- » 1.9.2 Comply with the policies/regulations/provisions of the Relevant Government Agencies
- » 1.9.3 In the event that the Government wishes to delegate an assignment to the Company in the context of implementing it as a Government task, the assignment must be carried out by first being reviewed by the Board of Commissioners and the Board of Directors and obtaining approval from the Minister of SOEs

## SOFT STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

GCG processes and mechanisms are important parts of managing factual and managed working relationships between GCG organs. This process and mechanism is outlined in the GCG soft structure which consists of various regulations and guidelines or policies which regulate the scope of responsibility of the GCG organs, and the working relationship between GCG organs; including internal and external stakeholders.

To ensure great implementation of good corporate governance principles, IFG has made improvements to the completeness of the GCG soft structure to support its implementation, based on the renewal of several applicable laws and regulations.



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS menjadi wadah bagi para Pemegang Saham untuk mempergunakan wewenang dan hak-haknya dalam pengambilan keputusan strategis dan menentukan arah Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus sepenuhnya didasarkan pada kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

## Pemegang Saham dan Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali, hingga Entitas Pemilik Akhir

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan. Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama/Pengendali dan Pemegang Saham lainnya yang merupakan pendiri Perusahaan.

Berikut disampaikan komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2020.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company Organ that has authority which is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. The GMS is a forum for Shareholders to exercise their authority and rights in making strategic decisions and determining the direction of the Company.

Decisions taken at the GMS must be fully based on the interests of the Company in the long and short term. The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and the laws and regulations; including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and or the Board of Directors.

## Shareholders and Information About the Main/Controlling Shareholders, to the Ultimate Owner

Shareholders are individuals or legal entities that legally own one or more shares in the Company. Shareholders as capital owners have rights and responsibilities in accordance with the laws and regulations as well as the Company's Articles of Association. The Company's Shareholders consist of Main/Controlling Shareholders and other Shareholders who are the founders of the Company.

The following is the composition of the Company's Shareholders as of December 31, 2020.



### Komposisi Pemegang Saham IFG per 31 Desember 2020

IFG Shareholder Composition as of December 31, 2020



Seluruh saham Perusahaan atau 100,00% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Penyertaan Modal Negara. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama dan pengendali sekaligus pemilik akhir dari Perusahaan.

All or 100.00% of the Company's shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia originating from State Equity Participation. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia acts as the main and controlling shareholder as well as the ultimate owner of the Company.

### Jenis-jenis RUPS

Perusahaan menjamin untuk memberikan segala keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan kepada Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Keputusan dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan.

### Types of GMS

The Company guarantees the provision of all information related to the Company to Shareholders, as long as it does not conflict with the interests of the Company and the laws and regulations. Decisions in the GMS are based on the Company's interest. The GMS cannot intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise its rights in accordance with the articles of association and regulations.

### Jenis RUPS yang Diselenggarakan Perusahaan Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Types of GMS Organized by the Company According to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

#### RUPS Tahunan

RUPS Tahunan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir

#### Annual GMS

The Annual GMS must be held at least 1 (one) time a year, no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year

#### RUPS Lainnya

RUPS Lainnya, dapat dilakukan setiap saat apabila dipandang perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham

#### Other GMS

Other GMS, can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors and/or Board of Commissioners, and/or shareholders



Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap Manajemen Perusahaan.

Selain kedua RUPS tersebut di atas, Pemegang Saham Perusahaan juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh Pemegang Saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Wewenang RUPS**

Dalam RUPS, pemegang saham berhak menerima informasi tentang Perusahaan, sepanjang hal itu berkaitan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS juga memiliki wewenang yaitu:

1. Menetapkan perubahan anggaran dasar Perusahaan;
2. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal Perusahaan;
3. Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
4. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perusahaan;
5. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan anggota Direksi dalam hal Direksi terdiri dari 2 orang atau lebih;
6. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
7. Memutuskan penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
8. Menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

Both the Annual GMS and the Other GMS have the highest authority in the Corporate Governance structure as well as being the main forum for Shareholders to exercise their rights and authority over the Company's Management.

In addition to the two GMS mentioned above, the Company's Shareholders also have a Circular Decision mechanism, namely making decisions by the Shareholders outside the GMS mechanism. Circular Decisions have the same legal force as the GMS Resolutions, provided that all Shareholders give written approval of the proposal to be decided on Circular Decisions. This is in accordance with Article 91 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

### **GMS Authority**

In the GMS, shareholders have the right to receive information about the Company, as long as it relates to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company. Based on the provisions of the Company's Articles of Association, the GMS also has the following authorities:

1. Determine changes to the articles of association of the Company;
2. Approve the addition and reduction of the Company's capital;
3. Approve the annual report; including the ratification of the financial statements as well as the report on the supervisory duties of the Board of Commissioners;
4. Approve the merger, consolidation, acquisition, or separation, submission of application for bankruptcy, extension of the period of establishment, and dissolution of the Company;
5. Determine the division of duties and authorities in the management of members of the Board of Directors in the event that the Board of Directors consists of 2 or more people;
6. Appoint members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
7. Decide on the replacement and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;
8. Determine the salary and allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;



9. Memberikan persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perusahaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

9. Give approval to transfer the Company's assets or make collateral for the Company's assets debt which is more than 50% of the total net assets of the Company in 1 or more transactions, whether related to each other or not.

### Hak Pemegang Saham

Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki hak dengan ruang lingkup yang terdiri atas penerimaan manfaat permodalan, pengawasan atas jalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh Direksi serta hak-hak lainnya. Hak dari Pemegang Saham pada penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Pemegang Saham juga mempunyai hak untuk memimpin penyelenggaraan berjalannya RUPS.

Direksi Perusahaan menjamin hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:

1. Penyelenggaraan RUPS tahunan (menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan dan rencana kerja Perusahaan (RKAP dan RJPP)) serta RUPS luar biasa sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT. RUPS tahunan juga dapat menetapkan pembagian dari keuntungan Perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya;
2. Peran sekretaris perusahaan sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dan pemegang saham dalam kaitannya hak pemegang saham untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS juga informasi lainnya yang dibutuhkan pemegang saham;
3. Penyampaian laporan-laporan kepada pemegang saham atas segala hal yang berhubungan dengan hak pemegang saham dalam memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur;
4. Untuk tindakan-tindakan transaksional perusahaan mempersyaratkan persetujuan RUPS sebagai kontrol pemegang saham atas tindakan Direksi;

### Shareholders' Rights

Shareholders, as regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, has the rights to receive capital benefits, the rights to supervise operational activities conducted by the Board of Directors, and other rights. The right of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS) is to attend and cast votes at the GMS. Shareholders also have the right to lead the implementation of the GMS.

The Company's Board of Directors guarantees the rights of Shareholders in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, by:

1. Organizing the annual GMS (approving and ratifying the annual report and work plan of the Company (RKAP and RJPP)) as well as the extraordinary GMS in accordance with the Articles of Association and UUPT. The annual GMS may also determine the distribution of the Company's profits to shareholders in the form of dividends and other profit sharing.
2. Having the role of the Corporate Secretary as a liaison officer between the Company and shareholders in relation to the rights of shareholders to obtain complete and accurate information regarding the holding of the GMS as well as other information needed by shareholders.
3. Submitting reports to shareholders on all matters relating to the rights of shareholders to obtain material information about the Company in a timely and orderly manner.
4. For transactional actions, requiring the Company to have approval of the GMS as shareholder control over the actions of the Board of Directors.



5. Pemegang saham memiliki mekanisme penilaian kinerja perusahaan dan penilaian kinerja masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi.

Direksi bersikap mandiri dan memperlakukan sebagai masukan yang tidak mengikat setiap campur tangan Pemegang Saham dalam kegiatan operasional yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2020, Hasil Keputusan dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen**

#### 1. RUPS Tahunan

Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 21 menyatakan bahwa RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, meliputi RUPS mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan RUPS mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat di setiap bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan Laporan Tahunan. RUPS Tahunan untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan, di mana Direksi menyampaikan: (i) Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi laporan keuangan yang sekurang-kurangnya memuat misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan, anggaran Perusahaan yang dirinci untuk setiap anggaran program kerja/kegiatan, proyeksi keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya, program kerja Dewan Komisaris, program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan (ii) hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan 2019 diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2019 dan menyetujui RKAP 2020 pada tanggal 22 Januari 2020, dengan ikhtisar hasil keputusan dijabarkan dalam tabel berikut:

5. Equipping shareholders with a mechanism for evaluating the Company's performance and evaluating the performance of each of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Board of Directors is independent and treats any intervention by the Shareholders in operational activities, on which are the responsibility of the Board of Directors, as input that is not binding, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

### **Implementation of the GMS in 2020, Resolutions and Follow-ups by Management**

#### 1. Annual GMS

Article 21 of the Articles of Association of PT BPUI states that the Annual GMS is held every year, including the GMS regarding the approval of the Annual Report and the GMS regarding the approval of the Company's Work Plan and Budget.

The Annual GMS to approve the Annual Report must be held no later than every June after the close of the fiscal year, and at said meeting, the Board of Directors submits the Annual Report. The Annual GMS to approve the Company's Work Plan and Budget is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year, in which the Board of Directors submits: (i) the Company's Draft Work Plan and Budget, including financial statement projections that at least contain the mission, business objectives, business strategy, company policies and work/activity programs, the Company's budget detailed for each work program/activity, financial projections of the Company and its subsidiaries, the work program of the Board of Commissioners, social and environmental responsibility programs; and (ii) other matters which need approval from the GMS for the benefit of the Company that have not been included in the Company's Draft Work Plan and Budget.

The Annual GMS to approve the 2019 Annual Report was held on July 2, 2019, and approved the 2020 RKAP on January 22, 2020, with an overview of the results described in the following table:



RUPS Tahunan Annual GMS	Hasil Keputusan Resolutions	Tidak Lanjut Follow-up Actions
Pengesahan RKAP 2020	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 termasuk di dalamnya Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.</p> <p>2. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 sebagaimana telah dibahas dan disampaikan oleh Asisten Deputi (Asdep) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui hasil telaahan No. RIS-33/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 19 November 2019.</p> <p>3. Menetapkan indikator aspek operasional Tahun 2020.</p> <p>4. Menyetujui dan mengesahkan <i>Key Performance Indicators (KPI)</i> yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Direksi dan Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dengan Pemegang Saham sebagaimana diajukan dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini.</p> <p>5. Persetujuan optimalisasi aset tetap di Jl. Teuku Cik Ditiro No.23, Jakarta, milik PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)</p> <p>a. Menyetujui permohonan Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk melakukan optimalisasi aset tetap tanah seluas 2008 m<sup>2</sup> dan bangunan kantor seluas 874 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro No.23 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat melalui kerja sama penyewaan aset kepada PT Bundamedik (Rumah Sakit Bunda) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Rp1,80 miliar per tahun pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga; dan</li> <li>» Rp1,89 miliar per tahun pada tahun keempat sampai dengan tahun kelima.</li> </ul> <p>b. Dalam pelaksanaan optimalisasi aset tetap tanah dan bangunan kantor melalui penyewaan aset sebagaimana butir 1 di atas, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Skema kerja sama yang telah disepakati PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dengan PT Bundamedik agar menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.</li> <li>» Kerja sama yang akan dilakukan harus memberikan keuntungan yang optimal bagi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance (GGC)</i> serta SOP tentang kerja sama yang ditetapkan Direksi.</li> <li>» Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus tercantum secara jelas dalam perjanjian kerja sama untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.</li> <li>» PT Bundamedik wajib memelihara aset kerja sama sehingga pada saat berakhirnya kerja sama, PT Bundamedik wajib menyerahkan aset yang menjadi objek kerja sama kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga.</li> <li>» Kajian pendayagunaan aset yang dilakukan Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.</li> <li>» Pakta Integritas yang telah ditandatangani seluruh Direksi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dalam rangka optimalisasi aset tanah dan bangunan kantor melalui penyewaan aset tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini.</li> <li>» Pelaksanaan kerja sama tersebut agar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 No. PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.</li> </ul>	Seluruh hasil keputusan RUPS Tahunan dengan agenda pengesahan RKAP 2020 telah ditindaklanjuti sebagaimana tertuang dalam Risalah RUPS tanggal 22 Januari 2022.

RUPS Tahunan Annual GMS	Hasil Keputusan Resolutions	Tidak Lanjut Follow-up Actions
Approval of 2020 RKAP	<p>1. Approved and ratified the Company's 2020 Work Plan and Budget (RKAP) including the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.</p> <p>2. Approved and ratified the Work Plan and Budget for the 2020 Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) as discussed and submitted by the Assistant Deputy (Asdep) for Social and Environmental Responsibility through the results of the study Number RIS-33/D7.MBU.3/11/2019 November 19, 2019.</p> <p>3. Established operational aspect indicators for 2020.</p> <p>4. Approved and ratified the Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2020 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the Shareholders as proposed at the GMS and become an integral part of the resolutions of this GMS.</p> <p>5. Approved the optimization of fixed assets on Jl.Teuku Cik Ditiro No.23, Jakarta, owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)</p> <p>a. Approved the request of the Board of Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to optimize the fixed assets of a land area of 2008 m<sup>2</sup> and an office building covering an area of 874 m<sup>2</sup> located on Jl. Cik Ditiro No.23 Gondangdia, Menteng, Central Jakarta through an asset rental agreement with PT Bundamedik (Rumah Sakit Bunda) for a period of 5 (five) years with the following rental values:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» IDR 1.80 billion per year in the first year to the third year; and</li> <li>» IDR 1.89 billion per year in the fourth year to the fifth year.</li> </ul> <p>b. In the context of optimizing fixed assets, land and office buildings through asset leasing as referred to in point 1 above, the following points should be considered:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» The cooperation scheme that has been agreed by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) with PT Bundamedik to serve as a guideline for its implementation.</li> <li>» The cooperation that will be conducted must provide optimal benefits for PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and be carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the SOP on cooperation set by the Board of Directors.</li> <li>» The rights and obligations of each party must be clearly stated in the cooperation agreement to avoid potential legal problems in the future.</li> <li>» PT Bundamedik is obliged to maintain the assets of the cooperation so that at the end of the cooperation, PT Bundamedik is obliged to hand over the assets that are the object of the cooperation to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in good condition/function. PT Bundamedik must also guarantee that the asset is free from any lawsuits from third parties.</li> <li>» The assessment of the utilization of assets by the Board of Directors is an integral part of this agreement.</li> <li>» The Integrity Pact which has been signed by all Directors of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) in the context of optimizing land and office building assets through the rental of these assets, is an integral part of this agreement.</li> <li>» The implementation of the cooperation must be carried out in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/08/2017 dated August 14, 2017 No. PER-04/MBU/09/2017 dated September 13, 2017 concerning Guidelines for Cooperation of State-Owned Enterprises.</li> </ul>	All resolutions of the Annual GMS with the agenda of ratifying the 2020 RKAP have been followed up as stated in the Minutes of the GMS on January 22, 2022.



RUPS Tahunan Annual GMS	Hasil Keputusan Resolutions	Tidak Lanjut Follow-up Actions
Pengesahan Laporan Tahunan 2019	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Buku 2019 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryantor, Mawar &amp; Rekan sesuai laporan No. 00068/2.1030/AU.1/09/0181-2/1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan pendapat menyajikan secara "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan.</p> <p>2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Rekan sesuai dengan laporan No. 00067/2.1030/AU.2/12/0181-2/1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dengan pendapat menyajikan secara "wajar dalam semua hal yang material" posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2019, sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.</p> <p>3. Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan Tahun Buku 2019 sebesar Rp 124.901.958.469,- seluruhnya sebagai cadangan.</p> <p>4. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan ditetapkan secara tersendiri.</p> <p>5. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. KAP yang diusulkan untuk mendapatkan penetapan RUPS harus merupakan KAP yang memiliki dukungan kuat dari <i>global network</i> bereputasi, baik dalam hal metodologi, pengalaman, kompetensi personel dan review mutu.</p>	<p>1. Perusahaan telah menyerahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar &amp; Rekan.</p> <p>2. Perusahaan telah menyerahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar &amp; Rekan</p> <p>3. RUPS telah menetapkan penggunaan laba bersih seluruhnya dialokasikan sebagai cadangan.</p> <p>4. Penentuan pemberian tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan secara tersendiri.</p> <p>5. RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Rekan sebagai auditor yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam SK berdasarkan surat No. 26/DK-BPUI/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat S-1154/MBU/12/2020.</p>



RUPS Tahunan Annual GMS	Hasil Keputusan Resolutions	Tidak Lanjut Follow-up Actions
Ratification of the 2019 Annual Report	<p>1. Approved the 2019 Fiscal Year Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and also ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which had been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryantor, Mawar &amp; Rekan in accordance with the report Number: 00068/2.1030 /AU.1/09/0181-2/I/II/2020 dated February 24, 2020 with the statement "present fairly, in all material respects", and granted full discharge and release of responsibility (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board Commissioner of the Company for the management and supervisory actions that have been conducted in the Fiscal Year ending on December 31, 2019, as long as the Action is not a criminal act and is reflected in the Company's report books.</p> <p>2. Approved and ratified the Annual Report of the Partnership and Community Development Program for the 2019 Fiscal Year including the Financial Report of the Partnership and Community Development Program which had been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &amp; Partners in accordance with report Number 00067/2.1030/AU.2/12/0181- 2/I/II/2020 dated February 24, 2020 with the statement "present fairly, in all material respects" for the financial position of the Partnership and Community Development Program of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as of 31 December 2019, as well as its activities and cash flows for the year which ends on that date in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP), as well as granting full discharge and release of responsibility (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of managing and supervising the Partnership and Community Development Program for the fiscal year 2019, as long as the action is not a criminal act and is reflected in said report.</p> <p>3. Determined the use of all Company's net profit for the 2019 Fiscal Year amounting to IDR124,901,958,469,- as a reserve</p> <p>4. Determined separately the remuneration (salary/honorarium as well as other facilities and allowances) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020 as well as bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for the performance of Fiscal Year 2019.</p> <p>5. Carried out separately the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2020 and Financial Reports of the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2020 and Financial Reports of the Partnership and Community Development Program for Fiscal Year 2020 by the Minister of SOEs as the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners. . The KAP proposed for approval by the GMS must be a KAP that has strong support from a reputable global network, both in terms of methodology, experience, personnel competence and quality review.</p>	<p>1. The Company has submitted the its Financial Statements for the 2019 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar &amp; Partners.</p> <p>2. The Company has submitted the Financial Statement of the Partnership and Community Development Program for the 2019 Financial Year which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar &amp; Partners</p> <p>3. The GMS has determined that the use of net profit is entirely allocated as a reserve.</p> <p>4. The resolution concerning the awarding of bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined separately.</p> <p>5. The GMS appointed the Public Accounting Firm (KAP) of Tanudiredja, Wibisana, Rintis &amp; Partners as the party to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program for the year ending December 31, 2020 as stated in the Decree which is based on letter No. 26/DK-BPUI/XI/2020 dated November 16, 2020 which has been approved by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) through letter number S-1154/MBU/12/2020.</p>



## 2. RUPS Luar Biasa

Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 22 menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan. Selama tahun 2020, diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) kali pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang seluruhnya dilakukan secara sirkuler, dengan beberapa agenda di antaranya sebagai berikut:

## 2. Extraordinary GMS

Article 22 of the Articles of Association of PT BPUI (Persero) states that the Extraordinary GMS can be held at any time based on the need for the benefit of the Company. In 2020, there were 7 (seven) Extraordinary General Meetings of Shareholders which were all conducted in a circular manner, with several agendas including the following:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	11 Februari 2020 February 11, 2020	Pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Dismissal, change of position nomenclature, and appointment of members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
2	23 Maret 2020 March 23, 2020	Penugasan Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Assignment of PT Asuransi Jiwasraya Financial Restructuring.
3	6 Agustus 2020 August 6, 2020	Persetujuan Perubahan Brand dan Logo IFG. Approval of IFG Brand and Logo Changes.
4	20 Oktober 2020 October 20, 2020	Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
5	21 Oktober 2020 October 21, 2020	Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Asuransi Jiwa IFG. Approval of Establishment of Subsidiary of IFG Life Insurance.
6	25 November 2020 November 25, 2020	Ralat atas keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No.SK 337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Revise the decision of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia number SK 337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020 concerning the Appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bahana Indonesian Business Development.
7	30 Desember 2020 December 30, 2020	Pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah salah satu Organ Perusahaan yang diangkat melalui RUPS yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara, di mana tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

## BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is one of the Company's organs appointed through the GMS in charge of supervising and providing advice to the Board of Directors in conducting the management of the Company. The position of each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, is equal, whereas the task of the President Commissioner as 'primus inter pares' is to coordinate the activities of the Board of Commissioners.



Tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Anggaran Dasar mengatur bahwa Dewan Komisaris IFG beranggotakan lebih dari 2 (dua) orang anggota atau lebih, Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis IFG sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk pemberhentian sewaktu-waktu.

### Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah memiliki panduan yang tertuang dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2020 yang telah ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 9 September 2019. Pedoman tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang dan dimutakhirkan secara berkala. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris menjadi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dalam penerapan GCG di Perusahaan yang meliputi:

- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan;
- Tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan;
- Pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan Perusahaan;
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

The duties and authorities of the Board of Commissioners are regulated in the Articles of Association and the Board Manual which have been ratified by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Articles of Association stipulate that the Board of Commissioners of IFG consists of more than 2 (two) members or more, the Board of Commissioners is an assembly and each member of the Board of Commissioners cannot act alone, but based on the decisions of the Board of Commissioners.

The composition and number of members of the Board of Commissioners is determined by the GMS by taking into account the vision, mission and strategic plans of PT BPUI so as to enable effective, precise and fast decision making and can act independently.

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period starting from their appointment until the closing of the next fifth annual GMS and may be reappointed for 1 (one) term of office without reducing the right of the GMS to dismiss at any time.

### Board of Commissioners Guidelines and Code of Conduct

In conducting the supervisory duties, the Board of Commissioners has the guidelines contained in the General Guidelines for Good Corporate Governance (GCG) 2020, which was signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on September 9, 2019. These guidelines are prepared based on the applicable laws and regulations and are regularly reviewed and updated. The guidelines and work rules of the Board of Commissioners serve as practical guidelines for the Board of Commissioners in implementing GCG in the Company, which include:

- Compliance with laws and regulations and/or the Company's Articles of Association;
- Responsibility and authority to supervise the management policies;
- Monitoring and providing advice collectively for the benefit of the Company;
- Preparation of the Annual Work Plan and Budget (RKAT) which is an integral part of the Company's Work Plan and Budget (RKAP).



## Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 atau 5 tahun setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu.

## Jumlah, Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2020

Di tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut kronologi perubahan komposisi dan susunan Anggota Dewan Komisaris, per 31 Desember 2020.

## Term of Office of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed for a period starting from the date determined by the GMS until the closing of the 5th Annual GMS or 5 years after the date of appointment and may be reappointed for the next 1 (one) period, without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time.

## The Number and Composition of the Board of Commissioners in 2020

In 2020, there was a change in the composition of the members of the Board of Commissioners based on the Decision of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders (GMS). The following is a chronology of changes in the composition of the members of the Board of Commissioners, as of December 31, 2020.

### Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2020

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners throughout 2020

Periode 1 Januari – 20 Oktober 2020 January 1 – October 20, 2020	Periode 20 Oktober – 30 Desember 2020 October 20 – December 30, 2020	Periode 30-31 Desember 2020 December 30 – 31, 2020	Keterangan Description
Gatot Darmasto (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Gatot Darmasto (Komisaris Utama) (President Commissioner)		Gatot Darmasto tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 30 Desember 2020 Gatot Darmasto no longer serves as President Commissioner since December 30, 2020
	Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/ Independen) (President/ Independent Commissioner)		Fauzi Ichsan diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 30 Desember 2020 Fauzi Ichsan has been appointed as President Commissioner since December 30, 2020
Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf (Komisaris) (Commissioner)	Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf (Komisaris) (Commissioner)		Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 30 Desember 2020 Gellwynn Daniel Hamzah Yusuf no longer serves as Commissioner of the Company since December 30, 2020
	Masyita Crystallin (Komisaris) (Commissioner)		Masyita Crystallin diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 30 Desember 2020 Masyita Crystallin has been appointed as Commissioner of the Company since December 30, 2020
Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	Meirijal Nur diangkat sebagai Komisaris Perusahaan sejak 7 Januari 2019 Meirijal Nur has been appointed as Commissioner of the Company since January 7, 2019

### Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2020

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Commissioners throughout 2020

<b>Periode 1 Januari –20 Oktober 2020 January 1 – October 20, 2020</b>	<b>Periode 20 Oktober – 30 Desember 2020 October 20 – December 30, 2020</b>	<b>Periode 30-31 Desember 2020 December 30 – 31, 2020</b>	<b>Keterangan Description</b>
	Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Hotbonar Sinaga diangkat sebagai Komisaris Independen Perusahaan sejak 20 Oktober 2020 Hotbonar Sinaga has been appointed as the Company's Independent Commissioner since October 20, 2020
	Arief Budiman (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)		Arief Budiman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen sejak Februari 2021 Arief Budiman no longer serves as an Independent Commissioner since December 30, 2020

Per 31 Desember 2020, Dewan Komisaris Perusahaan berjumlah 5 (lima) orang dan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Pemegang Saham guna menjamin calon Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lainnya dan pengalaman serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2020, there were 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners who have passed a fit and proper test by the Shareholders. The fit and proper test is to ensure that the candidates for the Board of Commissioners have integrity, competence, reputation, and are free from affiliation or other conflicts of interest. The members must also have the experience and expertise needed in carrying out their respective functions and duties. The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 is as follows:

### Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan Position</b>	<b>Masa Jabatan Tenure</b>	<b>Periode Jabatan Term of Office</b>	<b>Dasar Pengangkatan Basis of Appointment</b>
Fauzi Ichsan	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	30 Desember 2020- RUPS Tahun 2025 December 30, 2020- AGM 2025	Ke-1 1 <sup>st</sup> Term	Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-400/ MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as President Commissioner since December 30, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT BPUI No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020.
Masyita Crystallin	Komisaris Commissioner	30 Desember 2020- RUPS Tahun 2025	Ke-1 1 <sup>st</sup> Term	Diangkat sebagai Komisaris sejak 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-400/ MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed as Commissioner since December 30, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT BPUI No. SK-400/ MBU/12/2020 dated December 30, 2020.



### Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020

Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Meirijal Nur	Komisaris Commissioner	Januari 2019-sekarang January 2019-now	Ke-1 1st Term	Diangkat sebagai Komisaris sejak 7 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-06/MBU/01/2019 Appointed as Commissioner since January 7, 2019 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT BPUI No. Number SK-06/MBU/01/2019
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen Independent Commissioner	20 Oktober 2020- RUPS Tahun 2025 October 20, 2020- AGM 2025	Ke-1 1st Term	Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 20 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Appointed as Independent Commissioner since October 20, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT BPUI No. SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020.
Gatot Darmasto	Komisaris Utama President Commissioner	Januari 2019-Desember 2020 January 2019-December 2020	Ke-2 2nd Term	Diangkat melalui SK-06/MBU/01/2019 tanggal 7 Januari 2019 dan diberhentikan dengan hormat melalui SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed through SK-06/MBU/01/2019 on January 7, 2019 and respectfully dismissed through SK-400/MBU/12/2020 on December 30, 2020.
Arief Budiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Oktober 2020-Februari 2021 October 2020-February 2021	Ke-1 1st Term	Diangkat melalui SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 tanggal 26 November 2020 ralat atas SK-337/MBU/10/2020. Appointed through SK-337/MBU/10/2020 on October 20, 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 on November 26, 2020, revision on SK-337/MBU/10/2020.
Gellwynn Jusuf	Komisaris Utama President Commissioner	September 2018-Desember 2020 September 2018-December 2020	Ke-1 1st Term	Diangkat melalui SK-247/MBU/09/2018 tanggal 25 September 2018 dan diberhentikan dengan hormat melalui SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020. Appointed through SK-247/MBU/09/2018 dated September 25, 2018 and respectfully dismissed through SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

The profiles of all members of the Board of Commissioners can be seen in the Company Profile chapter of this Annual Report.

### Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Berikut disampaikan pengungkapan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris Perusahaan sebagai bagian dari

### Share Ownership of the Board of Commissioners

The following is the disclosure of share ownership above 5% in other companies by the Company's Board of Commissioners as part of the transparency



transparansi pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkup Perusahaan.

in managing potential conflicts of interest within the Company.

**Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**  
 Table on Board of Commissioners Share Ownership

<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners	<b>Kepemilikan Saham</b> Share Ownership
	<b>Perusahaan Lain (&gt;5%)</b> In Other Companies (>5%)
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen) (President/Independent Commissioner)	
Masyita Crystallin (Komisaris) (Commissioner)	
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	
Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	Nihil Nil
Arief Budiman (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	
Gatot Darmasto (Komisaris Utama) (President Commissioner)	
Gellwynn Jusuf (Komisaris Utama) (President Commissioner)	

Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham oleh manajemen dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

The Company does not have a policy regarding share ownership by management and does not trade its shares to the public. Therefore, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors owns the Company's shares.

### Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan antar anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain dalam periode tahun 2020.

### Concurrent Position of Board of Commissioners

The following table shows the managerial relationship between members of the Board of Commissioners in other companies in the 2020.

<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners	<b>Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain</b> Managerial Positions at Other Companies/Institutions		
	<b>Sebagai Anggota Dewan Komisaris</b> As a Member of the Board of Commissioners	<b>Sebagai Anggota Direksi</b> As a Member of the Board of Directors	<b>Jabatan Lainnya</b> Other Positions
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/Independen) (President/Independent Commissioner)	✓	X	✓
Masyita Crystallin (Komisaris) (Commissioner)	X	X	✓



Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Managerial Positions at Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	X	X	X
Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	X	X	✓
Arief Budiman (Komisaris) (Commissioner)	X	X	X

✓ = ada | x = tidak ada

✓ = Having position in other companies | x = Not having position in other companies

Penjelasan terkait rangkap jabatan Dewan Komisaris yang tercatat di Perusahaan lain adalah sebagai berikut.

The description regarding the concurrent positions of the Board of Commissioners registered in other companies is as follows.

Nama Name	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Agencies
Fauzi Ichsan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Independen PT AKR Corporindo</li> <li>Komisaris Independen PT Manulife Investment Management Indonesia</li> <li>Senior Advisor A.T Kearney</li> <li>Independent Commissioner of PT AKR Corporindo</li> <li>Independent Commissioner of PT Manulife Investment Management Indonesia</li> <li>Senior Advisor A.T Kearney</li> </ul>
Masyita Crystallin	Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Special Staff to the Minister of Finance for Fiscal Policy and Macroeconomics
Meirijal Nur	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Director of Separated State Assets Department, Directorate General of State Assets

## Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Utama/Pengendali.

## Board of Commissioners Affiliation Relations

The Controlling Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors respect each other in the implementation of their respective duties, responsibilities and authorities in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors have guidelines and work procedures that include, among other things, their respective responsibilities, obligations, authorities and rights.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company do not have any affiliation, either financially or familial, with each other, as well as between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or Major/Controlling Shareholders.

Hubungan afiliasi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama/Pengendali tercermin pada tabel sebagai berikut:

The affiliation relationship between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Main/Controlling Shareholders is reflected in the table as follows:

<b>Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners	<b>Hubungan Keluarga Dengan</b> Familial Relationship			<b>Hubungan Keuangan Dengan</b> Financial Relationship		
	<b>Dewan Komisaris Lainnya</b> Other Board of Commissioners	<b>Direksi</b> Board of Directors	<b>Pemegang Saham Utama/ Pengendali</b> Main/ Controlling Shareholders	<b>Dewan Komisaris lainnya</b> Other Board of Commissioners	<b>Direksi</b> Board of Directors	<b>Pemegang Saham Utama/ Pengendali</b> Main/ Controlling Shareholders
Fauzi Ichsan (Komisaris Utama/ Independen) (President/ Independent Commissioner)	X	X	X	X	X	X
Masyita Crystallin (Komisaris) (Commissioner)	X	X	X	X	X	X
Hotbonar Sinaga (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	X	X	X	X	X	X
Meirijal Nur (Komisaris) (Commissioner)	X	X	X	X	X	X
Arief Budiman (Komisaris) (Commissioner)	X	X	X	X	X	X
Gatot Darmasto (Komisaris Utama) (President Commissioner)	X	X	X	X	X	X
Gellwynn Jusuf (Komisaris Utama) (President Commissioner)	X	X	X	X	X	X

✓ = terdapat hubungan | x = tidak terdapat hubungan  
 ✓ = there is relationship | x = there is no relationship

## Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan;
- Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana jangka Panjang

## Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

- Provide advice to the Board of Directors in the implementation of managing the Company;
- Research and review as well as sign the Company's Long-Term Plan and Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;
- Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long-term Plan and



Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
11. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain;
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;

Company's Work Plan and Budget regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the Company's Long-term Plan and Company's Work Plan and Budget;

4. Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company;
5. Report immediately to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance;
6. Research and review periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report;
7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested;
8. Prepare an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget;
9. Establish an Audit Committee;
10. Propose a Public Accountant Office to the GMS;
11. Make the minutes of the Board of Commissioners meeting and keep a copy thereof;
12. Report to the Company regarding their share ownership and/or their family in the Company and other companies;
13. Provide a report on the supervisory duties of the Board of Commissioners to the GMS; and
14. Carry out other obligations in the context of supervisory and advisory duties, as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/or the resolutions of the GMS.

The authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. To review records, letters, and other documents, check cash for verification and other purposes, check securities and Company's assets;
2. To enter the compound, buildings, and offices used by the Company;
3. To request explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
4. To be informed of all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;
5. To request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend the Board of Commissioners meeting;
6. To appoint the Secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary;



7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

### **Pelaksanaan Tugas, Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2020**

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab tersebut antara lain dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun 2020, antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dengan agenda antara lain pembahasan kinerja keuangan bulanan serta agenda strategis lainnya;
2. Pelaksanaan rapat internal Dewan Komisaris membahas hal-hal yang perlu menjadi keputusan Dewan Komisaris;
3. Penyusunan surat Dewan Komisaris atas hal-hal yang memerlukan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris;
4. Mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi Dewan Komisaris.

7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
8. To establish other Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;
9. To hire experts for certain matters within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. To take actions to manage the Company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. To attend Board of Directors meetings and provide considerations on the matters discussed; and
12. To authorize as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/or the resolutions of the GMS.

### **Implementation of Duties, Approval and Recommendations of the Board of Commissioners in 2020**

Throughout 2020, the Board of Commissioners has conducted the duties and responsibilities in supervising the management policies and the Company's management which are determined based on the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association and Work Plans that were established at the beginning of the year. These duties, obligations and responsibilities are among others performed through the Board of Commissioners' Meeting, the Board of Commissioners' Meeting with the Board of Directors, or the Joint Meeting and Evaluation of the committees under the Board of Commissioners.

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners in 2020 included:

1. Implementation of joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, with the agenda including the discussion of monthly financial performance and other strategic agendas;
2. The implementation of internal meetings of the Board of Commissioners to discuss matters that need to be decided by the Board of Commissioners;
3. Preparation of a letter from the Board of Commissioners on matters that require the approval/response of the Board of Commissioners;
4. Participation in activities to improve the competence of the Board of Commissioners



Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atau tanggapan serta rekomendasi kepada Pemegang Saham dan Direksi. Persetujuan atau tanggapan serta rekomendasi Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihat yang telah dijalankan antara lain sebagai berikut:

Throughout 2020, the Board of Commissioners has given approval or feedback as well as recommendations to Shareholders and Directors. The approval or response and recommendations of the Board of Commissioners regarding the implementation of the supervisory and advisory functions that have been conducted include the

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Concerning
1.	01/DK-BPUI/I/2020	20 Januari 2020 January 20, 2020	Revisi Tanggapan Dewan Komisaris Atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Program Bina Lingkungan (RKAP dan RKAPKBL) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Tahun 2020 Revision of the Board of Commissioners' Response to the Company's Work Plan and Budget and the Community Development Program (RKAP and RKAPKBL) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia in 2020
2.	02/DK-BPUI/II/2020	26 Februari 2020 February 26 2020	Tanggapan Pengangkatan Dewan Komisaris Anak-Anak Perusahaan Response to the Appointment of Board of Commissioners of Subsidiaries
3.	03/DK-BPUI/II/2020	28 Februari 2020 February 28 2020	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Approval of Changes in Organizational Structure
4.	04/DK-BPUI/III/2020	6 Maret 2020 March 6, 2020	Tanggapan Atas Usulan Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Komisaris Independen PT Bahana Sekuritas Response to Proposal for Temporary Extension of Term of Office of Independent Commissioner of PT Bahana Sekuritas
5.	05/DK-BPUI/III/2020	13 Maret 2020 March 13, 2020	Tanggapan Atas Usulan Pengangkatan Komisaris pada Anak Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Response to the Proposal for Appointment of Commissioners at the Subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
6.	06/DK-BPUI/III/2020	26 Maret 2020 March 26, 2020	Tanggapan Dewan Komisaris Atas Usulan Perubahan RKAP 2020 dalam rangka Rencana Investasi Pembelian Aset Cilandak Town Square (Citos) Menggunakan Pinjaman Bank Response of the Board of Commissioners to the Proposed Change of RKAP 2020 in the context of the Investment Plan for the Purchase of Cilandak Town Square (Citos) Assets Using Bank Loans
7.	07/DK-BPUI/IV/2020	27 April 2020 April 27, 2020	Tanggapan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun Buku 2019 IFG Response to the IFG 2019 Audited Consolidated Financial Statements
8.	08/DK-BPUI/IV/2020	27 April 2020 April 27, 2020	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2019 2019 Board of Commissioners Supervisory Duty Report

No	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Concerning
9.	09/DK-BPUI/V/2020	08 Mei 2020 May 8, 2020	Usulan Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dalam RUPS Pertanggungjawaban Laporan Keuangan IFG Tahun 2019 Proposal of the Determination of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2019 Fiscal Year, in the Accountability GMS of the 2019 IFG Financial Statements
10.	10/DK-BPUI/V/2020	10 Mei 2020 May 10, 2020	Tanggapan Dewan Komisaris Atas Laporan Manajemen TW I/2020 The Board of Commissioners' Response to the Q1/2020 Management Report
11.	11/DK-BPUI/V/2020	28 Mei 2020 May 28, 2020	Tanggapan Atas Usulan Pengangkatan Direksi PT Bahana TCW Investment Management. Response to Proposal for Appointment of the Board of Directors of PT Bahana TCW Investment Management
12.	12/DK-BPUI/V/2020	28 Mei 2020 May 28, 2020	Tanggapan Atas Usulan Pengangkatan Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Response to the Proposed Appointment of the President Director of PT Bahana Sekuritas
13.	13/DK-BPUI/VI/2020	25 Juni 2020 June 25, 2020	Usulan Penetapan Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dalam RUPS Pertanggungjawaban Laporan Keuangan IFG Tahun 2019 Proposal of the Determination of the Salary of the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners for the Fiscal Year of 2020, in the Accountability GMS of the 2019 IFG Financial Statements

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris Perusahaan juga melakukan kunjungan kerja ke unit usaha. Kunjungan ke lapangan ini merupakan kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan unit usaha Perusahaan untuk mengidentifikasi hambatan, kendala, dan permasalahan-permasalahan di lapangan yang dapat menghambat kinerja operasional perusahaan dan/atau berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan perusahaan.

Output kegiatan kunjungan ke Unit Usaha atau peninjauan proyek ini berupa hasil observasi ke lapangan, pendapat, saran dan usulan Dewan Komisaris terkait permasalahan-permasalahan strategis pelaksanaan proyek untuk disampaikan kepada Direksi dalam rangka perbaikan atau peningkatan kinerja Perusahaan.

In addition to performing the supervisory function, the Company's Board of Commissioners also conducted working visits to business units. This field visit is an activity to monitor the implementation of the activities of the Company's business units to identify obstacles, constraints, and problems in the field that can hinder the Company's operational performance and/or affect the decline in the Company's financial performance.

The outputs of the visit to the Business Unit or project review are in the form of results of field observations, opinions, suggestions and proposals from the Board of Commissioners regarding strategic issues in project implementation to be submitted to the Board of Directors in order to improve the Company's performance.



## Program Orientasi Bagi Dewan Komisaris Baru

Perusahaan memiliki kebijakan program pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru menjabat agar Dewan Komisaris dapat bekerja selaras dengan organ Perusahaan yang lain. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada Dewan Komisaris baru terkait organisasi dan operasional Perusahaan khususnya terkait bidang tugas pengawasan yang diberikan kepada Dewan Komisaris yang baru. Penanggung jawab program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru berada pada fungsi Sekretaris Perusahaan.

## Kriteria dan Prosedur Pengangkatan serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Seperti halnya Direksi, Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan oleh satu-satunya pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN. Oleh karena itu informasi mengenai kriteria pengangkatan anggota Dewan Komisaris, sepenuhnya adalah wewenang Kementerian BUMN.

## Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib bersifat independen dan terlepas dari pihak-pihak lain yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan. Masing-masing anggota Dewan Komisaris wajib mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan dari pihak manapun termasuk hubungan keluarga dengan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam hal penyelesaian permasalahan bisnis serta pelaksanaan aksi korporasi. Sikap profesionalisme kerja ini secara tegas diatur dan menjadi bagian dalam *Board Manual*.

## Penilaian atas Kinerja Komite dan Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris selaku organ pendukung Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit. Untuk penilaian kinerja organ pendukung dan komite di bawah Dewan Komisaris merupakan penilaian berdasarkan kriteria berupa pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekretaris Dewan Komisaris dan komite di bawah Dewan Komisaris.

## Orientation Program for New Board of Commissioners

The Company has an introduction program policy for the newly appointed Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can work in harmony with other Company organs. The program aims to provide more knowledge to the new Board of Commissioners regarding the organization and operations of the Company, particularly related to the supervisory duties assigned to the new Board of Commissioners. The person in charge of the introduction program for new members of the Board of Commissioners is in the Corporate Secretary function.

## Criteria and Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

As with the Board of Directors, the Board of Commissioners is elected and appointed by the sole shareholder, namely the Ministry of SOEs. Therefore, information regarding the criteria for the appointment of members of the Board of Commissioners is fully under the authority of the Ministry of SOEs.

## Independence of the Board of Commissioners

Each member of the Board of Commissioners must be independent from other parties that have a potential conflict of interest with the Company. Each member of the Board of Commissioners is required to put aside personal interests and avoid conflicts of interest from any party, including family relationships with members of the Board of Directors and the Board of Commissioners in terms of resolving business problems and implementing corporate actions. The attitude of work professionalism is strictly regulated and becomes part of the *Board Manual*.

## Assessment of the Performance of Committees and Supporting Organs under the Board of Commissioners

In conducting the duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners as a supporting organ for the Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners is also assisted by the Audit Committee. The performance appraisal of the supporting organs and committees under the Board of Commissioners is an assessment based on criteria in the form of target achievement set in the Annual Work Plan of the Secretary to the Board of Commissioners and the committees under the Board of Commissioners.



Uraian lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Sekretaris Dewan Komisaris serta komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada pembahasan tentang Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

### **Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris**

Program pengembangan kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggung-jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kepengurusan Perusahaan dan memberikan nasihat strategis pada Direksi untuk kemajuan Perusahaan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Further description regarding the performance appraisal of the Secretary to the Board of Commissioners and the committees under the Board of Commissioners can be seen in the discussion concerning the Secretary to the Board of Commissioners and the Audit Committee.

### **Board of Commissioners Competency Training and Improvement**

The competency development program is intended as a form of program to increase the insight and knowledge of the Board of Commissioners in order to increase the ability to conduct their duties, functions and responsibilities in supervising the management of the Company and providing strategic advice to the Board of Directors for the advancement of the Company. The list of training and competency improvement activities which the Board of Commissioners participated in throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report.



## KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atau pemonitoran atas pengelolaan Perusahaan.

Keberadaan Komisaris Independen ini diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Dengan demikian Komisaris Independen diharapkan dapat menciptakan iklim yang objektif, independen, dan menjaga *fairness* untuk kepentingan Perusahaan dan tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan Perusahaan dikarenakan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat.

### Komposisi Komisaris Independen Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, jumlah Komisaris Independen Perusahaan adalah sebanyak 3 (orang) orang yakni Fauzi Ichsan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, Hotbonar Sinaga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan 2020 dan Arief Budiman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 tanggal 26 November 2020. Komposisi Komisaris Independen Perusahaan tersebut adalah 40% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 5 (lima) orang, melebihi apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang menegaskan bahwa paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

## INDEPENDENT COMMISSIONER

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholder or with a company that may hinder his/her position to act independently in accordance with the principles of GCG principles. The Independent Commissioner is responsible for supervising or monitoring the management of the Company.

The presence of this Independent Commissioner is regulated in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. Thus, the Independent Commissioner is expected to be able to create an objective, independent climate and maintain fairness for the benefit of the Company and is not bound by the influence of parties who have interests that may differ from the interests of the Company because their supervisory function can be conducted by voicing independent opinions in meetings.

### Composition of Independent Commissioners in 2020

As of December 31, 2020, the number of Independent Commissioners of the Company was 2 (people) namely Fauzi Ichsan who was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-400/MBU/12/2020 dated December 30, 2020 and Hotbonar Sinaga who was appointed based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020. The composition of the Company's Independent Commissioners is 40% of the total 5 (five) members of the Board of Commissioners; This exceeded what has been stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 which confirms that at least 20% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.



## Kriteria Penentuan dan Pemenuhan Independensi Komisaris Independen

Kriteria independensi Dewan Komisaris merujuk kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan menetapkan beberapa kriteria dalam mengangkat Komisaris Independen. Kriteria tersebut yaitu:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi pada Perusahaan terafiliasi;
2. Tidak bekerja kepada Pemerintah termasuk departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
3. Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau Perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya; dan
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan luar BUMN yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup BUMN.

Dengan demikian, ketiga Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Criteria for Determining and Fulfilling the Independence of Independent Commissioners

The criteria for the independence of the Board of Commissioners refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 and its amendment No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, the Company sets several criteria in appointing Independent Commissioners. These criteria are:

1. Not serving as a member of the Board of Directors in an affiliated company;
2. Has not worked for the Government, including its departments, institutions, and the military within the last three years;
3. Has not worked in the relevant SOEs or affiliate within the last three years;
4. Has no financial relationship, either directly or indirectly, with the relevant SOEs or companies that provide services and products to the relevant SOE and its affiliates; and
5. Free from business interests and activities that may hinder or interfere with the ability of Independent Commissioners, who is appointed from outside the SOEs concerned, to act or think freely within the scope of the SOE.

The three Independent Commissioners of the Company have met the criteria in accordance with applicable regulations.



## DIREKSI

Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disahkan melalui Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi pada tanggal 9 September 2019.

*Board Manual* ini berisi petunjuk tata laksana kerja Direksi serta penjelasan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten. *Board Manual* Perusahaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan pemegang saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

*Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Direksi senantiasa dikaji secara berkala, yang di dalamnya mengatur antara lain:

- Peran Direksi dalam melaksanakan tugasnya dengan itikad baik;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan, serta prinsip-prinsip GCG;
- Keterbukaan informasi;
- Kehadiran dalam rapat Perusahaan;
- Pengelolaan laporan Perusahaan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Kegiatan Perusahaan, dan Laporan GCG;
- Peranan Direksi dalam menyiapkan RJPP, RKAP, dan RKAT.

### Masa Jabatan Anggota Direksi

Prosedur penunjukan Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS, anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 atau 5 tahun setelah

## BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company's Organ that is fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company for the benefit of the Company and represents the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association.

### Board of Directors' Guidelines and Work Rules

The Board of Directors is guided by the Work Guidelines for the Board of Commissioners and the Board of Directors which have been ratified through a Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors on September 9, 2019.

This Board Manual contains instructions for the work governance of the Board of Directors as well as an explanation of the activities' stages in a structured, systematic, easy to understand and consistent manner. The Company's Board Manual is prepared based on the principles of corporate law, the provisions of the Articles of Association, prevailing laws and regulations, shareholder guidance as well as GCG best practices.

The Board Manual as a guideline and work order for the Board of Directors is reviewed periodically, which regulates the followings:

- The role of the Board of Directors in conducting their duties in good faith;
- Compliance with laws and regulations and/or the Company's Articles of Association, as well as GCG principles;
- Information disclosure;
- Attendance at Company meetings;
- Management of Company reports including Annual Reports, Corporate Activity Reports, and GCG Reports;
- The role of the Board of Directors in preparing Company Long Term Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), and Annual Work Plan and Budget (RKAT).

### Term of Office for Members of the Board of Directors

The procedure for the appointment of the Board of Directors is carried out through the GMS mechanism, in which the members of the Board of Directors are appointed for a period starting from the date determined by the GMS until the closing



tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan melalui keputusan pemegang saham di luar RUPS, maka mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut dimuat dalam keputusan pemegang saham tersebut. Dalam hal keputusan pemegang saham di luar RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut berlaku sejak keputusan pemegang saham tersebut ditetapkan.

### **Jumlah, Komposisi dan Susunan Direksi Tahun 2020**

Di tahun 2020, terdapat perubahan komposisi dan susunan Anggota Direksi berdasarkan hasil keputusan RUPS dengan kronologi sebagai berikut:

of the 5th Annual GMS or 5 years after the date of appointment and may be reappointed for the next 1 (one) period, without reducing the right of the GMS to dismiss the relevant members of the Board of Commissioners at any time.

In the event that the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is conducted through a shareholder's decision outside the GMS, the appointment and dismissal shall take effect in the shareholder's resolution. In the event that the resolution of the shareholders outside the GMS does not stipulate it, the appointment and dismissal of the members of the Board of Directors is effective as of the resolution of the shareholders.

### **Number, Composition and Structure of the Board of Directors in 2020**

In 2020, there was a change in the composition and structure of the members of the Board of Directors based on the resolutions of the GMS with the following chronology:

#### **Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2020**

Chronology of Changes in the Composition of the Board of Directors throughout 2020

<b>Periode 1 Januari-11 Februari 2020</b> Period January 1-31 February, 2020	<b>Periode 11 Februari-31 Desember 2020</b> Period February 11-31 December, 2020	<b>Keterangan</b> Description
Marciano H. Herman (Direktur Utama) (President Director)		Marciano H. Herman tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak 11 Februari 2020 Marciano H. Herman no longer serves as President Director since February 11, 2020
	Robertus Billitea (Direktur Utama) (President Director)	Robertus Billitea mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak 11 Februari 2020 Robertus Billitea has been serving as President Director since February 11, 2020
Dwijanti Tjahjaningsih (Direktur) (Director)		Dwijanti Tjahjaningsih tidak lagi menjabat sebagai Direktur sejak 11 Februari 2020 Dwijanti Tjahjaningsih no longer serves as Director since February 11, 2020
	Rizal Ariansyah (Direktur Keuangan dan Umum) (Director of Finance and General Affairs)	Rizal Ariansyah mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum sejak 11 Februari 2020 Rizal Ariansyah has been serving as Director of Finance and General Affairs since February 11, 2020
	Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) (Director of Business)	Pantro Pander Silitonga mulai menjabat sebagai Direktur Bisnis sejak 11 Februari 2020 Pantro Pander Silitonga has been serving as Director of Business since February 11, 2020



### Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Structure and Composition of the Board of Directors as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Robertus Billitea	Direktur Utama President Director	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1 <sup>st</sup>	Diangkat sebagai Direktur Utama sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/ MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as President Director since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT BPUI No. SK-46/ MBU/02/2020 dated February 11, 2020
Rizal Ariansyah	Direktur Keuangan dan Umum Director of Finance and General Affairs	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1 <sup>st</sup>	Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Umum sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/ MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as Director of Finance and General Affairs since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of PT BPUI No. SK-46/MBU/02/2020 dated February 11, 2020
Pantro Pander Silitonga	Direktur Bisnis Director of Business	11 Februari 2020-RUPS Tahun 2025 February 11, 2020-AGM 2025	Ke-1 1 <sup>st</sup>	Diangkat sebagai Direktur Bisnis sejak 11 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan IFG No. SK-46/ MBU/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 Appointed as Director of Business since February 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs as the GMS of PT BPUI No. SK-46/ MBU/02/2020 dated February 11, 2020

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profiles of all Directors can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

### Uji Kelayakan dan Kepatutan Direksi

Seluruh calon anggota Direksi Perusahaan wajib lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi Direksi Perusahaan, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

1. Pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan;

### Board of Directors' Fit and Proper Test

All prospective members of the Company's Board of Directors must pass the fit and proper test conducted by the Shareholders before being appointed as the Company's Board of Directors, as explained below:

1. The appointment of the Board of Directors is determined by the GMS in accordance with the mechanisms and provisions of the laws and regulations and is conducted through a fit and proper test mechanism;

2. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

2. Candidates for members of the Board of Directors who have been declared to have passed the fit and proper test are required to sign an Integrity Pact prior to their appointment as members of the Board of Directors.

### Kepemilikan Saham Direksi

Berikut disampaikan pengungkapan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Direksi sebagai bagian dari transparansi pengelolaan potensi benturan kepentingan di lingkup Perusahaan.

### Board of Directors' Share Ownership

The following is the disclosure of share ownership in other companies above 5% by the Board of Directors as part of the transparency in managing potential conflicts of interest within the Company.

**Tabel Kepemilikan Saham Direksi**  
 Table Board of Directors' Share Ownership

Direksi Board of Directors	Kepemilikan Saham Share Ownership
	Perusahaan Lain (>5%) In Other Companies (>5%)
Robertus Billitea (Direktur Utama) (President Director)	
Rizal Ariansyah (Direktur Keuangan dan Umum) (Director of Finance and General Affairs)	Nihil Nil
Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) (Director of Business)	

Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait kepemilikan saham oleh manajemen, dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Dengan demikian, tidak terdapat Dewan Komisaris maupun Direksi yang memiliki saham Perusahaan.

The company does not have a policy regarding share ownership by management, and does not trade its shares to the public. Therefore, neither the Board of Commissioners nor the Board of Directors owns the Company's shares.

### Rangkap Jabatan Direksi

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan antar anggota Direksi pada perusahaan lain dalam periode tahun 2020.

### Concurrent Position of the Board of Directors

The following table shows the managerial relationship between members of the Board of Directors in other companies in the 2020 period.

Direksi Board of Directors	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Managerial Positions at Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Robertus Billitea (Direktur Utama) (President Director)	X	X	X
Rizal Ariansyah (Direktur Keuangan dan Umum) (Director of Finance and General Affairs)	✓	X	X



		Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Managerial Positions at Other Companies/Institutions		
Direksi Board of Directors		Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) (Director of Business)		✓	X	X

✓ = ada | x = tidak ada

✓ = Having position in other companies | x = Not having position in other companies

Penjelasan terkait rangkap jabatan Direksi yang tercatat di Perusahaan lain adalah sebagai berikut.

The explanation regarding the concurrent positions of the Board of Directors in other companies is as follows.

Nama Name	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain Position in Other Companies/Institutions
Rizal Ariansyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris Utama PT Grahaniaga Tatautama</li> <li>Komisaris PT Bahana Kapital Investa</li> <li>President Commissioner of PT Graha Niaga Tata Utama</li> <li>Commissioner of PT Bahana Kapital Investa</li> </ul>
Pantro Pander Silitonga	<p>Komisaris Utama PT Bahana TCW Investment Management (Desember 2020 – sekarang)</p> <p>President Commissioner of PT Bahana TCW Investment Management (December 2020-present)</p>

### Hubungan Afiliasi Direksi

### Board of Directors' Affiliation

Direksi Board of Directors	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationship			Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship		
	Dewan Komisaris Lainnya Other Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Main/ Controlling Shareholders	Dewan Komisaris lainnya Other Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/ Pengendali Main/ Controlling Shareholders
Robertus Billitea (Direktur Utama) (President Director)	X	X	X	X	X	X
Rizal Ariansyah (Direktur Keuangan dan Umum) (Director of Finance and General Affairs)	X	X	X	X	X	X
Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis) (Director of Business)	X	X	X	X	X	X

✓ = terdapat hubungan | x = tidak terdapat hubungan

✓ = there is relationship | x = there is no relationship



## Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Direksi

Tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, budaya dan strategi Perusahaan;
2. Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru dan menyelenggarakan program pelatihan/pembelajaran dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi secara berkelanjutan yang direalisasikan sesuai RKAP;
3. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai tata kelola Perusahaan;
4. Menjadikan praktik GCG lingkungan Perusahaan sebagai contoh atau *benchmark* bagi Perusahaan lainnya, baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta;
5. Menghindari terjadinya penyimpangan penerapan prinsip-prinsip GCG sesuai pedoman GCG pada BUMN, pedoman umum GCG Indonesia dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya;
6. Melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaksanakan kebijakan/SOP tentang pengelolaan terhadap kepatuhan dan penyampaian LHKPN;
7. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai program pengendalian gratifikasi;
8. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan mengenai sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*whistleblowing system*);
9. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang pengembangan karier;
10. Memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan Perusahaan, pendayagunaan aset dan pemanfaatan lainnya dalam lingkup kewenangan Direksi dengan melakukan identifikasi hal-hal yang memberikan peluang bisnis dan mengambil keputusan (setuju atau tidak setuju) atas usulan tersebut serta Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris usulan peluang bisnis disertai dengan studi kelayakan yang memadai untuk dimintakan arahan;

## Duties, Authorities, Obligations and Rights of the Board of Directors

The duties of the Board of Directors are as follows:

1. Establish the vision, mission, culture and strategy of the Company;
2. Organize an introduction program for new members of the Board of Directors and organize training/learning programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors on an ongoing basis which is implemented in accordance with the RKAP;
3. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding corporate governance;
4. Create the Company's environmental GCG practices as an example or benchmark for other companies, both for other SOEs and private companies;
5. Avoid the occurrence of deviations from the implementation of GCG principles in accordance with the GCG guidelines for SOEs, general Indonesian GCG guidelines and practice standards and other provisions;
6. Coordinate the management of administrative funds for the State Administrators Wealth Report (LHKPN) and implement policies/SOPs regarding the management of compliance and submission of LHKPN;
7. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the gratification control program;
8. Implement and evaluate consistently and continuously the Company's policies regarding the reporting system for alleged irregularities in the Company (whistleblowing system);
9. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding career development;
10. Provide a response to the proposed business opportunity that has the potential to increase the Company's income and efficiency, utilize assets and other uses within the authority of the Board of Directors by identifying matters that provide business opportunities and make decisions (of whether to agree or disagree) on the proposal. The Board of Directors submits the proposal of said business opportunities accompanied by adequate feasibility studies for referrals to the Board of Commissioners;



11. Melaksanakan program/kegiatan Perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
12. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja Perusahaan sesuai dengan *shareholders* aspiration yang digunakan sebagai dasar penilaian kontrak manajemen yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan RKAP;
13. Menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP untuk jabatan struktural secara berjenjang sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan struktural dilengkapi dengan kontrak kinerja setiap unit/jabatan;
14. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja untuk unit/jabatan (struktural) di dalam organisasi secara berkala, tepat waktu dan berjenjang serta melakukan pembahasan dengan unit/jabatan yang tidak/belum mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan;
15. Melaksanakan penilaian kinerja (*performance appraisal*) bagi karyawan secara konsisten sesuai dengan indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan;
16. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem TI;
17. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan;
18. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem pengadaan barang dan jasa Perusahaan;
19. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan;
20. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang akuntasi dan penyusunan laporan keuangan (triwulan dan tahunan) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK);
21. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang manajemen risiko Perusahaan;
22. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kebijakan Perusahaan tentang sistem pengendalian intern Perusahaan serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan;
11. Carry out the Company programs/activities in accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
12. Strive for the achievement of the Company's performance targets in accordance with the shareholders' aspiration which is used as the basis for evaluating the management contract stipulated in the GMS for the ratification of the RKAP;
13. Set performance targets based on RKAP for structural positions in tiered basis in accordance with the capacity of roles and potential of tasks of structural units and positions, complemented by a performance contract for each unit/position;
14. Carry out analysis and evaluation of the development of performance achievements for units/positions (structural) within the organization on a regular, timely and tiered basis and conduct discussions with units/positions that do not/have not achieved the performance according to the set targets;
15. Hold performance appraisals for employees consistently in accordance with individual performance indicators and set targets;
16. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding information technology systems;
17. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the product and service quality improvement system;
18. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the Company's goods and services procurement system;
19. Develop Human Resources (HR), assess performance and provide appropriate remuneration and build an effective HR environment to support the Company's achievements;
20. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding accounting and preparation of financial statements (quarterly and annually) in accordance with Financial Accounting Standards (SAK);
21. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the Company's risk management;
22. Implement and evaluate consistently and continuously on the Company's policies regarding the Company's internal control system and conduct continuous evaluations;



23. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal dan auditor eksternal (KAP dan BPK) serta melakukan *monitoring* tingkat penyelesaian (*progress*) pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi Satuan Pengawas Internal dan auditor eksternal pada tahun yang bersangkutan. Hasil tindak lanjut disampaikan kepada Dewan Komisaris;
  24. Menerapkan dan melakukan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap mekanisme dan fungsi; dan
  25. Menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga sesuai dengan cakupan yang diatur pada Pedoman Pola Hubungan Kerja IFG.
23. Follow up on the results of the inspections of the Internal Audit Unit and external auditors (KAP and BPK) as well as monitor the progress of the follow-up implementation regarding the recommendations of the Internal Audit Unit and external auditors in the relevant year. The results of the follow-up are submitted to the Board of Commissioners;
  24. Implement and evaluate consistently and continuously on mechanisms and functions; and
  25. Implement laws and regulations and agreements with third parties in accordance with the scope stipulated in the Guidelines for the Pattern of Employment Relations of IFG.

Wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan struktur/susunan organisasi yang dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab untuk semua tingkat jabatan;
2. Melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja Direksi kepada Dewan Komisaris dan pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegial Direksi maupun pencapaian target kinerja masing-masing Direksi berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen;
3. Menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris. Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (IPK);
4. Menetapkan dan mengatur mekanisme tertulis untuk menampung dan menyelesaikan keluhan-keluhan Pemangku Kepentingan secara tuntas;
5. Menetapkan dan mengatur mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu terdiri dari pengambilan keputusan melalui rapat Direksi dan pengambilan keputusan di luar rapat Direksi;
6. Membuat dan menyampaikan laporan manajemen (kuartal dan tahunan);
7. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi;

The authorities of the Board of Directors are as follows:

1. Establish an organizational structure/composition designed to ensure the achievement of organizational goals and objectives, and in accordance with the Company's needs, which is complemented with job descriptions and responsibilities for all levels of position;
2. Report the implementation of the performance management system of the Board of Directors to the Board of Commissioners and the achievement of the Company's performance based on the collegial targets of the Board of Directors as well as the achievement of the performance targets of each Director based on the targets in the management contract;
3. Submit to the GMS regarding the proposed performance incentives for the Board of Directors which have been approved by the Board of Commissioners. Determination of the proposed performance incentives for the Board of Directors reflects the suitability of the performance achieved (GPA);
4. Establish and manage a written mechanism to accommodate and resolve Stakeholder complaints thoroughly;
5. Establish and regulate the decision-making mechanism for the corporate action in accordance with the provisions of the legislation and in a timely manner, consisting of decision making through the Board of Directors meeting and decision making outside the Board of Directors meeting;
6. Prepare and submit management reports (quarterly and annually);
7. Regulate the delegation of powers of the Board of Directors;



8. Menetapkan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan;
9. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
10. Mengangkat dan memberhentikan pejabat Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui ketetapan Direksi;
11. Mengatur ketentuan tentang karyawan perusahaan termasuk penempatan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan, memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan serta penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau Keputusan RUPS;
13. Menyampaikan usulan Anggaran Dasar Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
14. Menetapkan kegiatan kerja sama atau kontrak dengan nilai kontrak atau penggunaan/perolehan aset yang melebihi kewenangan Direktur seperti yang diatur dalam kebijakan keuangan;
15. Menetapkan kebijakan keuangan yang secara periodik perlu ditinjau oleh Direksi misalnya *Cash Management, Expenditure Authority* dan *Payment Authority*; dan
16. Bersama Dewan Komisaris mengusulkan kepada RUPS mengenai penetapan besaran dan jenis penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti program pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat oleh Perusahaan;
2. Mengikuti program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan;
3. Menyiapkan RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

The obligations of the Board of Directors are as follows:

1. Participate in an introduction program for newly appointed members of the Board of Directors by the Company;
2. Participate in training programs in order to improve the competence of members of the Board of Directors as needed;
3. Prepare Company Long Term Plan (RJPP), which is a strategic plan that contains goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years;



4. Menyiapkan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari RJPP;
5. Menyampaikan RJPP untuk mendapat pengesahaan RUPS disertai dengan penjelasan yang lengkap dan jelas kepada Dewan Komisaris;
6. Memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai RKAP dalam hal persetujuan RKAP merupakan kewenangan RUPS atau memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai RKAP dalam hal persetujuan RKAP merupakan kewenangan Dewan Komisaris;
7. Melaksanakan kewajiban kepada negara tepat waktu dalam hal pembayaran kewajiban pajak (PPh karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan Rampung dan PBB) serta penyampaian dokumen wajib pada lembaga regulator;
8. Meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan melalui pencapaian target-target yang disepakati serta mampu meningkatkan kinerja Perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya;
9. Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung berkelanjutan operasi Perusahaan dan untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh produk, pelayanan dan proses operasional dari Perusahaan;
10. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
11. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
12. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, laporan Tahunan dan dokumen Keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya;
13. Menyusun dan mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Direksi untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;
14. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Direksi, menghadiri rapat Dewan Komisaris dan menghadiri rapat gabungan baik yang diselenggarakan oleh Direksi maupun yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris; dan
4. Prepare Company Work Plan and Budget (RKAP) as the annual elaboration of the Company Long Term Plan (RJPP);
5. Submit the RJPP for approval of the GMS accompanied by a complete and clear explanation to the Board of Commissioners;
6. Provide an explanation to the General Meeting of Shareholders regarding the RKAP in the event that the approval of the RKAP is the authority of the GMS or provide an explanation to the Board of Commissioners regarding the RKAP in the event that the approval of the RKAP is the authority of the Board of Commissioners;
7. Conduct obligations to the state on time in terms of payment of tax obligations (employee income tax, corporate income tax, period and completed VAT and property tax) as well as submission of mandatory documents to regulatory agencies;
8. Increase shareholder value consistently and sustainably through the achievement of agreed targets and by being able to improve the Company's performance from previous years;
9. Carry out corporate social responsibility to support the Company's sustainable operations and to anticipate negative impacts on society caused by the Company's products, services and operational processes;
10. Submit the Balance Sheet and Profit and Loss Report which has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights;
11. Submit a report on changes in the composition of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights;
12. Create and maintain the Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Meeting of the Board of Commissioners and Minutes of Meeting of the Board of Directors, Annual reports and Company Financial documents and other Company documents;
13. Prepare and propose Board of Directors Performance Achievement Indicators for approval from the Board of Commissioners and the GMS;
14. Organize and attend Board of Directors meetings, attend Board of Commissioners meetings and attend the joint meetings both held by the Board of Directors and those held by the Board of Commissioners; and



15. Memenuhi KPI yang jelas, lengkap, dan berimbang, serta terukur dengan menggunakan sistem Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) untuk mencapai misi dan tujuan Perusahaan.

Hak Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menerima gaji berikut tunjangan lain dan/ atau fasilitas, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan;
2. Bila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima tantiem sebagai imbalan atas prestasi kerja yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
3. Memperoleh cuti sesuai ketentuan Perusahaan; dan
4. Menggunakan sarana dan tenaga profesional.

15. Fulfill clear, complete, balanced, and measurable KPIs using the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) system to achieve the Company's mission and goals.

The rights of the Board of Directors are as follows:

1. Receive salary along with other allowances and/or facilities, including post-employment benefits, the amount of which is determined by the GMS with due observance of the laws and regulations;
2. If the Company reaches a profit level, the Board of Directors can receive bonuses as compensation for work performance, the amount of which is determined by the GMS;
3. Rights of leave in accordance with the provisions of the Company; and
4. Use professional facilities and personnel.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi**

1. Tugas Pokok dan Fungsi (tanggung jawab utama) Direktur Utama yaitu:
  - a. Sebagai Pimpinan Perusahaan:
    - Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi dalam memberikan arahan dalam menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
    - Memberikan arahan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP;
    - Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas pencapaian RJPP dan RKAP, kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan budaya korporasi, citra positif Perusahaan dan tata kelola Perusahaan (*good corporate governance*) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi misi Perusahaan;
    - Memimpin dan menetapkan strategi/ program kerja selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas RJPP dan 1(satu) tahun berbasis RKAP kegiatan sekretariat Perusahaan, satuan pengawasan internal, dan dukungan aspek hukum Perusahaan;

### **Duties and Responsibilities of Each Director**

1. Main Duties and Functions (main responsibilities) of the President Director, namely:
  - a. As Company Leader:
    - Act as the leader of the members of the Board of Directors in providing guidance in preparing the Company's Long-Term Plan (RJPP) and carrying out the Company's business activities as stipulated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP);
    - Provide guidance and control the implementation of the Company's policies, vision, mission and strategies that have been set out in the RJPP;
    - Direct and control all activities of the Company including but not limited to planning, implementing, controlling and evaluating the achievement of RJPP and RKAP, activities in order to improve corporate culture, positive image of the Company and good corporate governance in order to achieve the goals and objectives of the Company, in accordance with the Company's vision and mission;
    - Lead and determine a strategy/work program for 5 (five) years as an elaboration of the RJPP and 1 (one) year based on the RKAP for the activities of the Company's secretariat, the internal control unit, and support for the legal aspects of the Company;



- Menandatangani seluruh Keputusan Direksi yang diputuskan di dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan, kecuali atas kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait;
  - Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan;
  - Memimpin Rapat Direksi dan rapat korporasi lainnya serta mengkoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - Memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang Perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders).
- b. Sebagai Pimpinan Direktorat Utama:
- Memimpin dan menetapkan strategi/ program kerja selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas RJPP dan program kerja selama 1 (satu) tahun berbasis RKAP dalam kegiatan sekretariat Perusahaan, satuan pengawasan internal, dan dukungan aspek hukum;
  - Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan;
  - Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal berupa audit operasional dan audit/review dengan tujuan tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit/review untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan;
  - Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan dukungan aspek hukum Perusahaan;
- Sign all decisions of the Board of Directors which are decided at the meeting of the Board of Directors and outside the meeting of the Board of Directors which are conducted in accordance with the provisions in the articles of association of the Company, except for the authority that has been delegated based on the relevant policies and Standard Operating Procedures (SOP);
  - Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company in accordance with the authorities stipulated in the articles of association of the Company;
  - Chair the Board of Directors Meeting and other corporate meetings and coordinate the Board of Directors for the implementation of the Board of Commissioners meeting/General Meeting of Shareholders; and
  - Provide information related to everything about the Company to stakeholders.

b. As the Head of the Main Directorate:

- Lead and determine a strategy/work program for 5 (five) years as an elaboration of the RJPP and a work program for 1 (one) year based on the RKAP in the activities of the Company secretariat, internal control unit, and support for legal aspects;
- Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of the Corporate Secretary's activities;
- Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of internal control activities in the form of operational audits and reviews with specific objectives carried out effectively, as well as monitor follow-ups on the recommendations of audit/review results to assist the Board of Directors in assessing the effectiveness of the implementation of internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's objectives;
- Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of support for the Company's legal aspects;



- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan Sekretaris Perusahaan, dukungan aspek hukum dan pengawasan internal; dan
  - Memastikan pelaksanaan pembinaan karyawan di seluruh korporasi sesuai dengan kebijakan/pedoman di bidang sumber daya manusia.
2. Tugas pokok dan fungsi (tanggung jawab utama) Direktur Keuangan dan Umum yaitu:
- a. Memimpin dan menetapkan strategi/ program kerja selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas RJPP dan program kerja selama 1 (satu) tahun berbasis RKAP Perusahaan di bidang strategi sumber daya manusia, manajemen risiko, keuangan, TI, pengadaan barang dan jasa dan rumah tangga Perusahaan serta mengawasi/ mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan;
  - b. Bertanggung jawab dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis dari masing-masing direktorat di Perusahaan;
  - c. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM yang selaras dengan RKAP dan RJPP;
  - d. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan manajemen risiko serta pengendalian mutu Perusahaan secara baik dan hati-hati;
  - e. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan kuartal, semester dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu;
  - f. Melaksanakan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan Perusahaan;
  - g. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimalisasi dana Perusahaan secara akuntabel dan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan penempatan dana pada Bank dan/atau instrument pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan dana guna membiayai kegiatan operasional Perusahaan;
  - Coordinate and evaluate activities for the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SOP) related to the activities of the Corporate Secretary, support for legal aspects and internal control; and
  - Ensure the implementation of employee development throughout the corporation in accordance with policies/guidelines in the area of human resources.

2. The main duties and functions (main responsibilities) of the Director of Finance and General Affairs are:

    - a. Lead and determine a strategy/work program for 5 (five) years as an elaboration of the RJPP and a work program for 1 (one) year based on the Company's RKAP in the areas of human resource strategy, risk management, finance, information technology, procurement of goods and services, and the Company's household as well as supervising/evaluating the established strategy;
    - b. Is responsible for compiling, coordinating, controlling and evaluating the achievement of RKAP based on the needs and strategic plans of each directorate in the Company;
    - c. Coordinate, control and evaluate human resource management policy development activities in order to improve the competence and productivity of human resources, to be in line with the RKAP and RJPP;
    - d. Coordinate, control and evaluate the Company's risk management and quality control activities properly and carefully;
    - e. Coordinate, control and evaluate the activities of recording financial transactions and preparing quarterly, semester and annual reports, in accordance with applicable accounting standards, in a timely manner;
    - f. Carry out the fulfillment of taxation aspects related to the Company's activities;
    - g. Coordinate, control and evaluate the activities of optimizing the Company's funds in an accountable manner and paying attention to the principle of prudence through the activities of placing funds in Banks and/or other money market instruments including administrative activities to ensure the availability of funds to finance the Company's operational activities;



- h. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga guna membiayai kegiatan Perusahaan sehingga dapat bertumbuh dan mencapai tujuan/strategi yang ditetapkan;
- i. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penggunaan anggaran Perusahaan (fungsi controller) serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiatan Perusahaan;
- j. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan di bidang akuntansi, perpendaharaan dan keuangan sesuai dengan RKAP, RJPP dan/atau rencana bisnis Perusahaan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang akuntansi;
- l. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pemenuhan sarana/prasarana kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk memelihara dan mengadministrasikan aset-aset Perusahaan yang dipergunakan untuk operasional rutin Perusahaan secara akuntabel;
- m. Mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memberikan dukungan yang optimal pada kegiatan Perusahaan;
- n. Mengkoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan SPO terkait kegiatan sumber daya manusia, manajemen risiko, keuangan, TI, dan operasional Perusahaan;
- o. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas keuangan atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
- p. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
- q. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Direktur Utama dan/atau Direksi;
- h. Coordinate, control and evaluate activities or efforts to obtain financing from third parties in order to finance the Company's activities so that it can grow and achieve the stated goals/strategies;
- i. Coordinate, control and evaluate the use of the Company's budget (controller function) as well as conduct and control payment and collection activities to other parties related to the Company's activities;
- j. Coordinate, control and evaluate developments in accounting, treasury and finance in accordance with the RKAP, RJPP and/or the Company's business plan;
- k. Coordinate the implementation of evaluating and approving the recording, administration and documentation activities as well as the preparation of the Company's management reports related to the accounting area;
- l. Coordinate, control and evaluate activities for fulfilling work facilities/infrastructure in order to support the implementation of the Company's activities including maintaining and administering the Company's assets that are used for the Company's routine operations, in an accountable manner;
- m. Coordinate, control and evaluate the activities of the procurement of goods and services to provide optimal support for the Company's activities;
- n. Coordinate and evaluate the preparation and implementation of Policies and SOPs related to the activities of human resources, risk management, finance, information technology, and Company operations;
- o. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, especially in the field of financial tasks or based on the authority that has been delegated in the related policies and SOPs;
- p. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, for certain matters, based on the power of attorney from the President Director on behalf of the Board of Directors;
- q. Report the tasks as mentioned above to the President Director and/or the Board of Directors;



- r. Memastikan pelaksanaan pembinaan/karyawan di Direktorat Keuangan dan Umum sesuai kebijakan/pedoman di bidang sumber daya manusia; dan
  - s. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan pada setiap bidang di bawah Direktorat Keuangan dan Umum yang dijalankan di Anak Perusahaan.
3. Tugas pokok dan fungsi (tanggung jawab utama) Direktur Bisnis yaitu:
- a. Memimpin dan menyusun RJPP Perusahaan;
  - b. Memimpin dan menetapkan strategi/program kerja selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran atas RJPP dan program kerja selama 1 (satu) tahun berbasis RKAP dalam kegiatan strategi perusahaan, pengembangan Perusahaan, pengelolaan Anak Perusahaan serta potensi pendapatan lainnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bagi Perusahaan;
  - c. Menetapkan, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi perencanaan strategi Anak Perusahaan, kinerja Anak Perusahaan, dan pengembangan bisnis baru Anak Perusahaan, termasuk mengkoordinasikan penyusunan RJPP dan RKAP Anak Perusahaan secara konsolidasi serta pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan baik luar biasa atau tahunan, kecuali RUPS terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi/Pengurus/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Anak Perusahaan/afiliasi/penyertaan serta remunerasi dan/atau fasilitasnya;
  - d. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi kerja sama bisnis, mitra dan investor baik dalam rangka implementasi strategi perusahaan dan melaksanakan tugas dari pemerintah;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang bisnis secara baik, akurat, aman dan tepat waktu baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perusahaan;
  - f. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
  - r. Ensure the implementation of coaching/employees training at the Directorate of Finance and General Affairs in accordance with policies/guidelines in the field of human resources; and
  - s. Coordinate and evaluate policies and activities in each field under the Directorate of Finance and General Affairs which are conducted in Subsidiaries.
3. The main duties and functions (main responsibilities) of the Director of Business are:
- a. Lead and prepare the Company's RJPP;
  - b. Lead and establish a strategy/work program for 5 (five) years as an elaboration of the RJPP and work program for 1 (one) year based on the RKAP in corporate strategy activities, Company development, management of Subsidiaries and other potential income with the aim of optimizing revenue for the Company;
  - c. Determine, coordinate, control and evaluate the strategic planning of the Subsidiaries, the performance of the Subsidiaries, and the development of new businesses of the Subsidiaries, including coordinating the preparation of the consolidated RJPP and RKAP of the Subsidiaries as well as the implementation of the Subsidiary's GMS, either extraordinary or annual, except for the GMS related to the appointment and/or dismissal of the Board of Directors/Management/Supervisory Board/Board of Commissioners of Subsidiaries/affiliates/participation as well as remuneration and/or facilities;
  - d. Coordinate, control and evaluate activities to fulfill the optimization of business cooperation, partners and investors both in the context of implementing corporate strategy and conducting tasks from the government;
  - e. Coordinate the implementation, evaluate and approve the recording, administration and documentation activities as well as the preparation of the Company's management reports related to the business field in a good, accurate, safe and timely manner for both internal and external purposes of the Company;
  - f. Provide approval or business decisions in accordance with the delegation of authority from the Board of Directors;

- g. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan bidang bisnis;
- h. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan khususnya dalam bidang tugas bisnis atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
- i. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
- j. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Direktur Utama dan/ atau Direksi;
- k. Memastikan pelaksanaan pembinaan karyawan di Direktorat Bisnis sesuai kebijakan/pedoman di bidang sumber daya manusia; dan
- l. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang-bidang dibawah Direktorat Bisnis yang dijalankan di Anak Perusahaan.

### **Program Orientasi Bagi Direksi Baru**

Perusahaan memiliki kebijakan program pengenalan bagi Direksi yang baru menjabat agar Direksi dapat bekerja selaras dengan organisasi Perusahaan secara keseluruhan. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih kepada Direksi baru terkait organisasi dan operasional Perusahaan khususnya terkait pengelolaan Perusahaan yang diberikan kepada Direksi yang baru. Penanggung jawab program pengenalan bagi anggota Direksi baru berada pada fungsi Sekretaris Perusahaan.

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi dan susunan Direksi di tahun 2020, Perusahaan menggelar pengenalan Direksi baru pada tanggal 11 Februari 2020 yang bertempat di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

### **Kriteria dan Prosedur Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi**

Seperti halnya Dewan Komisaris, Direksi Perusahaan dipilih dan ditetapkan oleh satu-satunya pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN. Oleh karena itu informasi mengenai kriteria pengangkatan Direksi Perusahaan, sepenuhnya adalah wewenang Kementerian BUMN.

- g. Coordinate and evaluate the preparation and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SOP) related to business activities;
- h. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in the field of business tasks or based on the authority that has been delegated in related policies and SOPs;
- i. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, for certain matters, based on the power of attorney from the President Director, on behalf of the Board of Directors;
- j. Report the tasks as mentioned above to the President Director and/or the Board of Directors;
- k. Ensure the implementation of employee development in the Directorate of Business in accordance with policies/guidelines in the field of human resources; and
- l. Coordinate and evaluate policies and activities in the areas under the Directorate of Business which are operated in Subsidiaries.

### **Orientation Program for New Directors**

The Company has an introduction program policy for newly appointed Directors so that the Directors can work in harmony with the Company's organization as a whole. The program aims to provide more knowledge to the new Directors regarding the organization and operations of the Company, especially regarding the management of the Company which is given to the new Directors. The person in charge of the introduction program for new members of the Board of Directors is in the Corporate Secretary function.

Related to the change in the composition of the Board of Directors in 2020, the Company held the introduction of the new Board of Directors on February 11, 2020 at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

### **Criteria and Procedures for Appointment and Dismissal of Directors**

As with the Board of Commissioners, the Company's Directors are elected and appointed by the sole shareholder, namely the Ministry of SOEs. Therefore, information regarding the criteria for the appointment of the Company's Directors is fully under the authority of the Ministry of SOEs.



## Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 pelaksanaan tugas Direksi di luar pelaksanaan tugas rutin dan yang bersifat teknis, dapat dilihat pada keputusan yang dikeluarkan. Berikut adalah rincian Surat Keputusan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

## Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2020

Throughout 2020, the implementation of the duties of the Board of Directors outside the implementation of routine and technical tasks can be seen in the issued decree. The following are the details of the Decree related to the implementation of the duties of the Board of Directors.

### Keputusan Direksi Tahun 2020

Board of Directors Decree in 2020

No	Nomor Surat Keputusan Decree Number	Perihal Regarding
1.	002/SK-DIR/CORP/BPUI/I/2020	Penunjukan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Appointment of the management unit for the State Administrator Wealth Report at the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
2.	009/SK-DIR/CORP/BPUI/IV/2020	Kewenangan Transaksi dengan Bank Authorities for Transaction with Bank
3.	016/SK-DIR/CORP/BPUI/VI/2020	Kewenangan Persetujuan Transaksi Pembayaran dan Kewenangan Transaksi dengan Bank Authorities for Approval of Payment Transactions and Authorities for Transactions with Banks

## Informasi tentang Penilaian Kinerja Organ Pendukung di Bawah Direksi

Dalam menjalan tugasnya, Direksi Perusahaan dibantu oleh Komite Talenta dan Komite TI. Selain itu, Direksi juga memiliki organ pendukung lainnya yaitu Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal/ Satuan Pengawasan Intern. Penilaian terhadap organ pendukung Direksi tersebut dilakukan berdasarkan pencapaian target pelaksanaan tugas masing-masing organ pendukung.

## Information on Performance Assessment of Supporting Organs Under the Board of Directors

In conducting their duties, the Company's Board of Directors is assisted by the Talent Committee and the Information Technology Committee. In addition, the Board of Directors also has other supporting organs, namely the Corporate Secretary and Internal Audit Unit. The assessment of the supporting organs of the Board of Directors is carried out based on the achievement of the targets, for carrying out the duties of each supporting organ.



## PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Penilaian Penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai organ utama dalam Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan. Assessment atas kedua organ ini menjadi sebuah kewajiban, terutama karena Perusahaan merupakan anak usaha dari BUMN yang diarahkan untuk menerapkan prinsip GCG pada standar BUMN sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal bab ini, Perusahaan melakukan evaluasi dan pemantauan Hasil Tata Kelola, atau *Governance Outcome* melalui mekanisme Assessment atau penilaian penerapan GCG secara periodik. Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG melalui penilaian penerapan GCG berlandaskan pendekatan BUMN. Sebagai bagian BUMN, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG dengan menggunakan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Metode penilaian tersebut di atas, memiliki kriteria penilaian yang mencakup aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Pada penilaian penerapan GCG melalui Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012, terdapat penilaian terhadap aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan aspek Direksi.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, di awal bab Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini, pelaksanaan penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2020, dilakukan secara assessment oleh RSM Indonesia. Hasil assessment untuk tahun buku 2020 menunjukkan hasil dengan predikat “Baik” yang mencapai skor sebesar 80,15% Khusus untuk aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing mencapai skor sebesar 32,07 dan 28,52.

## PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

### ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION FOR ASPECTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As the main organs in the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors have a central role in the movement of the Company's growth. Assessment of these two organs is an obligation, especially since the Company is a subsidiary of a SOE that is directed to apply GCG principles based on SOEs standards as well as an assessment towards the implementation.

As explained at the beginning of this chapter, the Company evaluates and monitors Governance Results, or *Governance Outcomes*, through an Assessment mechanism or periodic assessment of GCG implementation. The Company assesses the implementation of GCG through an assessment of the GCG implementation based on the SOE approach. As part of the SOE, the Company assesses the GCG implementation by using a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

The assessment method mentioned above has assessment criteria that cover aspects of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In assessing the implementation of GCG through a copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012, there is an assessment of aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board and aspects of the Board of Directors.

As described in the Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance, at the beginning of the Corporate Governance chapter in this annual report, the implementation of the GCG implementation assessment for the 2020 fiscal year was conducted by RSM Indonesia. The results of the assessment for the 2020 fiscal year showed results with the category “Good” which achieved a score of 80.15%. Specifically, for the aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board and Board of Directors, each achieved a score of 32.07 and 28.52.



## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan menerapkan konsep *Balanced Scorecard* dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang disesuaikan dengan bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi. Pengukuran keberhasilan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perusahaan, merupakan hasil kerja kolegial dari masing-masing kedua organ utama Perusahaan tersebut.

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain berdasarkan Laporan Tugas Pengawasan, penilaian atau evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris juga dilaksanakan berdasarkan realisasi *Key Performance Indicators* (KPI), yang merupakan pengukuran keberhasilan kinerja Dewan Komisaris atas hasil kerja kolegial dari seluruh Dewan Komisaris. Pencapaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2020, berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

## Performance Assessment Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out by applying the concept of the Balanced Scorecard and Key Performance Indicators (KPI) which are adjusted to the business operated by the Company. The performance assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted regularly every year as an evaluation regarding the implementation of the Board of Commissioners and the Board of Directors' duties. The measurement towards the success of the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, which have a central role in the Company's growth, is the result of the collegial work of each of the two main organs of the Company.

### Board of Commissioners Performance Assessment

Performance assessment of the Board of Commissioners is conducted regularly every year as an evaluation of the implementation of the duties of the Board of Commissioners. In addition to the Supervisory Task Report, assessment or evaluation of the performance of the Board of Commissioners is also carried out based on the realization of Key Performance Indicators (KPI), which is a measure of the success of the performance of the Board of Commissioners on the collegial work of the entire Board of Commissioners. The performance achievements of the Board of Commissioners in 2020, based on the Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners, are as follows:

No	ASPEK DAN PARAMETER ASPECTS AND PARAMETERS	PERIODE ASSESSMENT PERIOD	SATUAN UNIT OF ASSESSMENT	BOBOT WEIGHT	RENCANA PLAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. Aspek Infrastruktur</b> <b>I. Aspects of Infrastructure</b>					
1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Prepare work plans and budgets as well as KPIs for the Board of Commissioners					
<b>Sub Total I</b> Subtotal I		Tahunan Annually	Dokumen Document	10	1
<b>II. Aspek Pengawasan dan Nasehat</b> <b>II. Aspects of Supervision and Advice</b>					
<b>10</b>					



No	ASPEK DAN PARAMETER ASPECTS AND PARAMETERS	PERIODE ASSESSMENT PERIOD	SATUAN UNIT OF ASSESSMENT	BOBOT WEIGHT	RENCANA PLAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap : Provide feedback/recommendations to shareholders on:				
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) a. Company Work Plan and Budget	Tahunan Annually	Surat Letter	4	1
	b. Laporan Tahunan b. Annual Report	Tahunan Annually	Surat Letter	4	1
	c. Analisis kinerja triwulan c. Analisis kinerja triwulan	Triwulan Quarterly	Surat Letter	4	4
2.	Memberikan persetujuan atau pendapat atas usulan Direksi yang merupakan wewenang Dewan Komisaris Give approval or opinion on the proposal of the Board of Directors which is the authority of the Board of Commissioners	Setahun One Year	%	5	100
3.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Meeting				
	a. Jumlah rapat a. Number of Meetings	Bulanan Monthly	kali Number of Times	8	12
	b. Kehadiran Rapat b. Meeting Attendance	Bulanan Monthly	%	6	100
	c. Penyelesaian risalah rapat c. Completion of minutes of meeting	Bulanan Monthly	Risalah Minutes	2	12
4.	Memberi nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris Provide advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners	Setahun One Year	Surat/Risalah Letter/ Minutes	6	12
5.	Rapat Komite Audit dengan Unit SPI (QAIA) Audit Committee meeting with SPI unit (QAIA)	Tahunan Annually	Risalah Minutes	6	12
6.	Kunjungan ke Lapangan Field Visits	Setahun One Year	Kunjungan Number of Visits	2	3
7.	Realisasi rencana kerja Komite Dewan Komisaris Realization of the work plan of the Board of Commissioners committee	Setahun One Year	%	2	100
<b>Sub Total II</b>					<b>49</b>
Subtotal II					
<b>III. Aspek Pelaporan</b>					
<b>III. Aspects of Reporting</b>					
1.	Laporan pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the implementation of the Board of Commissioners' KPIs	Triwulan Quarterly	Laporan Number of Reports	5	4
2.	Laporan pengawasan tahunan Annual Monitoring Report	Tahunan Annually	Laporan Number of Reports	10	1
<b>Sub Total III</b>					<b>15</b>
Subtotal III					
<b>IV. Aspek Dinamis</b>					
<b>IV. Aspects of Dynamicity</b>					
1.	Hasil self assessment GCG Dewan Komisaris The results of the Board of Commissioners' GCG self-assessment	Tahunan Annually	Skor	5	25



No	ASPEK DAN PARAMETER ASPECTS AND PARAMETERS	PERIODE ASSESSMENT PERIOD	SATUAN UNIT OF ASSESSMENT	BOBOT WEIGHT	RENCANA PLAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Peningkatan Kompetensi melalui seminar, workshop dll Increased competence through seminars, workshops, etc.	Setahun One Year	kali Number of Times	6	3
3.	Pembagian Tugas Dewan Komisaris Division of duties of the Board of Commissioners	Setahun One Year	kali Number of Times	3	1
4	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham External Auditor's Proposal to Shareholders	Tahunan Annually	Surat Letter	4	1
5	Penunjukan Assessor GCG Appointment of GCG Assessor	Dua Tahunan Biennially	Surat Letter	3	1
6	Tindak lanjut rekomendasi hasil Assessment GCG Follow-up to the recommendations of the GCG Assessment results	Setahun One Year	%	5	100
<b>Sub Total IV</b>					<b>26</b>
<b>Subtotal IV</b>					
<b>TOTAL (I+II+ III+IV)</b>					<b>100</b>
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>					

## Penilaian Kinerja Direksi

Di awal tahun 2020, Direksi menerima target pencapaian KPI dari Dewan Komisaris, di mana KPI tersebut kemudian menjadi KPI Perusahaan yang melekat sebagai KPI Direksi. Sementara Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas KPI yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial dari seluruh anggota Direksi dalam melakukan pengelolaan Perusahaan. Evaluasi terhadap kinerja Direksi dilakukan secara reguler melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta melalui *Working Group Meeting* yang dilakukan setiap bulan. Kriteria yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah pencapaian kinerja di bidang keuangan, operasional, pelanggan serta SDM dan sistem.

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi, antara lain meliputi:

1. Pencapaian kinerja Perusahaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu serta penyelesaian permasalahan Perusahaan (pengambilan keputusan);
4. Ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan;

## Board of Directors Performance Assessment

In early 2020, the Board of Directors received the KPI achievement target from the Board of Commissioners, whereas the KPI later became the Company's KPI which was attached as the Board of Directors' KPI. Meanwhile, the Board of Commissioners is in charge of supervising the established KPIs. The measurement of the success of the performance of the Board of Directors is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors in managing the Company. Evaluation of the performance of the Board of Directors is carried out regularly through meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as through Working Group Meetings which are held every month. The criteria used in conducting the evaluation are the achievement of performance in the fields of finance, operations, customers as well as human resources and systems.

The GMS determines the performance criteria for the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, which include:

1. Achievement of the Company's performance in accordance with the targets which have been set;
2. Implementation of duties and responsibilities;
3. Involvement in certain assignments and the resolution of Company problems (decision making);
4. Compliance with prevailing laws and regulations, as well as Company policies;



5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan;
6. Tingkat kehadiran dalam masing-masing rapat internal maupun dengan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi beserta rapat dengan Komite-komite Pendukung di bawah Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Direksi berdasarkan indikator kinerja, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Direksi berhasil menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Berikut indikator yang digunakan dalam KPI dan hasil KPI Direksi Perusahaan di tahun 2020. Adapun KPI Direksi untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

5. Commitment in advancing the interests of the Company;
6. The level of attendance in each internal meeting as well as with joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as meetings with the Supporting Committees under the Board of Commissioners.

The performance assessment of the Board of Directors is based on performance indicators, indicating that, in general, the Board of Directors has been successful in conducting the functions and duties properly. The following are the indicators used in the KPIs and the results of the Company's Board of Directors' KPIs in 2020. The Board of Directors' KPIs for 2020 are as follows:

No	Indikator Indicators	Satuan Unit	Formula Formulation	Bobot Weight(%)	Target KPI KPI Targets 2020
<b>I Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia</b> Economic and Social Values for Indonesia					
					27
	Financial Financial				
I.1	EBITDA	Rp IDR	Laba sebelum bunga, depresiasi dan amortisasi Profit before interest, depreciation and amortization	6	Rp2.363 miliar IDR 2,363 billion
I.2	BOPO	%	Biaya Operasional / Pendapatan Operasional Operating Expenses / Operating Income	5	71%
I.3	Underwriting Yield	%	Hasil Underwriting Bersih / Premi bruto Net Underwriting Yield/Gross Premium	6	16%
I.4	Skor GCG GCG Score	Skor Score	Skor Implementasi GCG GCG Implementation Score	5	88
I.5	Pembayaran Cicilan Bunga RDI & Jexim RDI & Jexim Interest Installments	Rp IDR	Jumlah Cicilan Bunga RDI & Jexim yang dibayarkan Total RDI & Jexim Installment Interest paid	5	Rp2,7 miliar IDR 2,7 billion
					15
	Sosial Social				
I.6	Pemenuhan Target PKBL Fulfillment of Partnership and Community Development Program (PKBL) Targets	%	Total Dana PKBL yang disalurkan / Total Dana PKBL yang tersedia Total PKBL Funds disbursed / Total available PKBL Funds	5	90
I.7	Sinergi Antar BUMN Synergy between SOEs	Jumlah Number of Cooperation	Jumlah Kerjasama dalam Ekosistem BUMN Number of Cooperation in SOEs Ecosystem	5	1
I.8	Penugasan Pemerintah Government Assignment	Rp IDR	Imbal Jasa Penjaminan Bruto KMK PEN KMK PEN Gross Guarantee Fee	5	Rp500 miliar IDR 500 billion
<b>II Inovasi Model Bisnis</b> Business Model Innovation					
					16
II.1	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	%	Tingkat Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Level	9	75%
II.2	Loss Ratio	%	Klaim disetujui / Premi Bruto Claim approved / Gross Premium	7	80%



No	Indikator Indicators	Satuan Unit	Formula Formulation	Bobot Weight(%)	Target KPI KPI Targets 2020
III	Kepemimpinan Teknologi Technological Leadership			16	
III.1	Inovasi Produk & Layanan Product and Service Innovation	Unit	Jumlah Produk / Layanan Baru Number of New Products/Services	7	8
III.2	Proses Penyelesaian Klaim Claim Settlement Process	%	Jumlah Penyelesaian Klaim yang sesuai SLA / Jumlah penyelesaian klaim Amount of Claim Settlement according to SLA / Amount of claim settlement	9	80%
IV	Peningkatan Investasi Investment Increase			11	
IV.1	Yield On Investment	%	Hasil Investasi / Rata - Rata Total Investasi Yield on Investment/Total Investment Average	5	4%
IV.2	Pendapatan Operasional Operating Income	Rp (Miliar) IDR (billion)	Pendapatan Operasional Operating Income	6	Rp6.997 miliar IDR 6,997 billion
V	Pengembangan Talenta Talent Development			15	
V.1	Produktifitas Pegawai Employee Productivity	Rp IDR	Laba Tahun Berjalan / Jumlah Pegawai Profit for the Year/Total Nuber of Employee	4	Rp303 juta IDR 303 million
V.2	Indeks Keterikatan Pegawai Employee Engagement Index	%	Tingkat Keterikatan Pegawai Employee Engagement Level	5	70%
V.3	Pengesahan Pembentukan Klaster/Subklaster BUMN Institute Ratification of the Establishment of the BUMN Institute Cluster/Sub-cluster	Waktu Time	Terselenggaranya soft launch IFG Corp The holding of the IFG Corp soft launch	3	Desember 2020 December 2020
V.4	Persetujuan untuk Program Pengembangan Talenta Suksesi Direksi dan Pengembangan Top Talent Muda (<40 tahun) Approval for the Board of Directors Succession Talent Development Program and Young Top Talent Development (<40 years)	Waktu Time	Terlaksananya pengembangan talenta BOD dan talenta milenial The implementation of BOD talent and millennial talent development	3	Desember 2020 December 2020

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, dan memiliki dampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Keberagaman ini diharapkan dapat memperkaya sudut pandang dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan baik di tubuh Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi aspek operasional dan usaha Perusahaan, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perusahaan.

## DIVERSITY OF COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors is part of the Company's efforts to encourage a decision-making process that is more objective, comprehensive, optimal, and has a positive impact on the supervision and management of the Company. This diversity is expected to enrich the viewpoints and interests in the decision-making process both within the Board of Commissioners and the Board of Directors, so as to be able to provide added value to the operational and business aspects of the Company, as well as the implementation of Good Corporate Governance within the Company.

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan secara tertulis mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan unsur keberagaman dari sisi pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, jenis kelamin dan usia.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

In writing, the policy for diversity in the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Articles of Association, the provisions of the Shareholders and the prevailing laws and regulations, by taking into account the elements of diversity in terms of education, expertise, work experience, gender and age.

The various compositions of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2020 are as follows.

Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
<b>Dewan Komisaris Board of Commissioners</b>					
Fauzi Ichsan <sup>1</sup>	Indonesia	S2 <i>Development Studies</i> Master of Development Studies	Ekonomi Economy	50 tahun 50 Years Old	Laki-laki Male
Masyita Crystallin <sup>1</sup>	Indonesia	S3 Ekonomi Doctor of Economy	International Monetary and Finance International Monetary and Finance	39 tahun 39 Years Old	Perempuan
Hotbonar Sinaga <sup>2</sup>	Indonesia	S1 Ekonomi Bachelor of Economy	Asuransi Insurance	71 tahun 71 Years Old	Laki-laki Male
Meirijal Nur <sup>3</sup>	Indonesia	S2 Administrasi Bisnis Master of Business Administration	Bisnis Keuangan Finance Business	52 tahun 52 Years Old	Laki-laki Male
Arief Budiman <sup>4</sup>	Indonesia	S2 Administrasi Bisnis Master of Business Administration	Bisnis Keuangan Finance Business	46 tahun 46 Years Old	Laki-laki Male
<b>Direksi Board of Directors</b>					
Robertus Billitea <sup>5</sup>	Indonesia	S2 Hukum Master of Law	Hukum Law	54 tahun 54 Years Old	Laki-laki Male
Rizal Ariansyah <sup>5</sup>	Indonesia	S2 Hukum Master of Law	Hukum Law	46 Tahun 46 Years Old	Laki-laki Male



Nama Name	Kewarganegaraan Citizenship	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Keahlian Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Pantro Pander Silitonga <sup>5</sup>	Indonesia	S2 Administrasi Bisnis Master of Business Administration	Bisnis Business	44 tahun 44 Years Old	Laki-laki Male

<sup>1</sup> Diangkat melalui SK- 400/MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

<sup>2</sup> Diangkat melalui SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 tanggal 26 November 2020 ralat atas SK-337/MBU/10/2020.

<sup>3</sup> Diangkat melalui SK-06/MBU/01/2019 tanggal 7 Januari 2019.

<sup>4</sup> Diangkat melalui SK-337/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 tanggal 26 November 2020 ralat atas SK-337/MBU/10/2020 dan mengundurkan diri pada tanggal 16 Februari 2021.

<sup>5</sup> Diangkat melalui SK-247/MBU/09/2018 tanggal 25 September 2018 dan diberhentikan dengan hormat melalui SK- 400/  
MBU/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

<sup>1</sup> Appointed through SK-400/MBU/12/2020 on December 30, 2020.

<sup>2</sup> Appointed through SK-337/MBU/10/2020 dated October 20, 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 dated November 26, 2020 revision of  
SK-337/MBU/10/2020.

<sup>3</sup> Appointed through SK-06/MBU/01/2019 dated January 7, 2019.

<sup>4</sup> Appointed through SK-337/MBU/10/2020 on October 20, 2020, SK-87/MBU/S/11/2020 on November 26, 2020, revision of SK-337/  
MBU/10/2020 and resigned on February 16, 2021.

<sup>5</sup> Appointed through SK-247/MBU/09/2018 on September 25, 2018, and respectfully dismissed through SK-400/MBU/12/2020 on  
December 30, 2020.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

### Kebijakan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan selalu mengedapankan prinsip kehati-hatian serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Seperti yang diketahui bahwa remunerasi merupakan imbal jasa yang diberikan Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas kinerja yang telah ditunjukkan.

Hal tersebut juga telah disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Pasal 96 ayat (2), menyebutkan bahwa kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan Pasal 113 disebutkan bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Sebagai bagian dari BUMN, terkait penetapan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, ditetapkan berdasarkan keputusan Pemegang Saham yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri

## Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

### Policy for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Company always prioritizes the precautionary principle and refers to the prevailing laws and regulations in providing remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors. As it is known, remuneration is a reward for services provided by the Company to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the performance that has been given.

This has also been mentioned in Article 96 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In it, the amount of salary and allowances for the Board of Directors is determined based on the resolution of the GMS. Article 96 paragraph (2) states that the authority can be delegated to the Board of Commissioners. Meanwhile, Article 113 states that the provisions regarding the amount of salary and honorarium as well as allowances for members of the Board of Commissioners are determined by the GMS.

As part of the SOE, regarding the determination of the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, it is determined based on the decision of the Shareholders which is adjusted to the Ministerial



BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Secara internal Perusahaan melakukan penyempurnaan sistem remunerasi, dengan mengacu kepada prinsip 3 P, *Pay for Person*, *Pay for Position* dan *Pay for Performance*. Hal tersebut tertuang dalam SK Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 025/SK-DIR/CORP/BPUI/IV/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Struktur Remunerasi perusahaan meliputi *Fixed Pay*, *Variable Pay* dan *Non Cash Benefit*. Perusahaan telah memiliki skala upah yang dibuat dengan mempertimbangkan data market dan kemampuan perusahaan.

Regulation of the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 regarding the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs.

Internally, the Company made improvements to the remuneration system, by referring to the 3 P principles, namely *Pay for Person*, *Pay for Position* and *Pay for Performance*. This is stated in the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 025/SK-DIR/CORP/BPUI/IV/2018 concerning Guidelines for Determining the Income of the Directors and Board of Commissioners of the Subsidiary PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The Company's remuneration structure includes *Fixed Pay*, *Variable Pay* and *Non-Cash Benefits*. It is ensured that the composition of income earned by employees currently exceeds the minimum wage standard set by the Government. The Company already has a wage scale that is created by considering market data and the Company's capabilities.

### **Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

1. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/incentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan;
4. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Anak Perusahaan.

### **Procedure for Proposing to Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors**

1. The income of the Board of Directors and the Board of Commissioners is determined by the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. Determination of income in the form of salary or honorarium, allowances and facilities that are permanent in nature is carried out by considering factors of business scale, business complexity factor, inflation rate, Company's financial condition and capability, and other relevant factors, and may not conflict with the laws and regulations;
3. Determination of income in the form of variable performance bonuses/incentives (*merit rating*) is conducted by considering the performance and financial capabilities of the Company, as well as other relevant factors;
4. The income of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Subsidiary is budgeted as an expense in the Subsidiary's Work Plan and Budget (RKAP).



## Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada SK Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 025/SK-DIR/CORP/BPUI/IV/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

1. Penghasilan Direksi Perusahaan terdiri dari:
  - a. Gaji/Honorarium;
  - b. Tunjangan; yang terdiri atas 1) Tunjangan Hari Raya, 2) Tunjangan Perumahan, 3) Asuransi Purna Jabatan;
  - c. Fasilitas yang terdiri atas; 1) Fasilitas kendaraan, 2) Fasilitas kesehatan, 3) Fasilitas bantuan hukum;
  - d. Tantiem/Insentif Kinerja;
2. Penghasilan Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari:
  - a. Gaji/Honorarium;
  - b. Tunjangan; yang terdiri atas 1) Tunjangan Hari Raya, 2) Tunjangan transport, 3) Asuransi Purna Jabatan;
  - c. Fasilitas yang terdiri atas; 1) Fasilitas kesehatan, 2) Fasilitas bantuan hukum;
  - d. Tantiem/Insentif Kinerja;

## Pengungkapan Indikator serta Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menetapkan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, digunakan indikator kinerja manajemen seperti yang telah disampaikan sebelumnya tentang penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Indikator kinerja manajemen tercantum dalam kontrak manajemen antara Direksi dengan Dewan Komisaris yang berisi target-target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk target Key Performance Indicator (KPI) dengan indikator, pembobotan, serta target. Selain itu, penetapan besarnya remunerasi juga memperhitungkan pasar tenaga kerja di Indonesia, serta kemampuan Perusahaan.

## Structure and Components Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

The remuneration structure of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 025/SK-DIR/CORP/BPUI/IV/2018 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Based on these regulations, the components of the income of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

1. The income of the Company's Directors consists of:
  - a. Salary/Honorarium;
  - b. Allowances; which consists of 1) Holiday Allowance, 2) Housing Allowance, 3) Post-Service Insurance;
  - c. Facilities consisting of; 1) Vehicle facilities, 2) Health facilities, 3) Legal aid facilities;
  - d. Tantiem/Performance Incentives;
2. The income of the Company's Board of Commissioners consists of:
  - a. Salary/Honorarium;
  - b. Allowances; which consists of 1) Holiday Allowance, 2) Transport Allowance, 3) Post-Service Insurance;
  - c. Facilities consisting of; 1) Health facilities, 2) Legal aid facilities;
  - d. Tantiem/Performance Incentives;

## Disclosure of Indicators and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

In determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors, management performance indicators are used as previously described regarding the performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors. Management performance indicators are listed in the management contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners which contains the targets of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) including Key Performance Indicators (KPI) targets with indicators, weighting, and targets. In addition, the determination of the amount of remuneration also takes into account the market workforce in Indonesia, as well as the Company's capabilities.



**Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi  
(Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019)**

Calculation of the Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors  
(According to SOE Minister Regulation No. PER-01/MBU/05/2019)

<b>Direktur Utama</b> President Director	: 100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Pemegang Saham) 100% (determined using internal guidelines set by the Shareholders)
<b>Wakil Direktur Utama</b> Deputy President Director	: Sebesar 95% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 95% of the Salary/Tantiem/Performance Incentive of the President Director
<b>Direktur bidang Sumber Daya Manusia</b> Director of Human Resources	: Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 90% of the Salary/Tantiem/Performance Incentive of the President Director
<b>Direksi Lainnya</b> Other Director	: Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 85% of the Salary/Tantiem/Performance Incentive of the President Director
<b>Komisaris Utama</b> President Commissioner	: Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama 45% of the Salary/Tantiem/Performance Incentive of the President Director
<b>Komisaris Lainnya</b> Other Commissioner	: Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama 90% of Honorarium/Tantiem/Performance Incentive for President Commissioner

**Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di Tahun 2020**

Rincian jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan struktur remunerasi adalah sebagai berikut:

**Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020**

Details of the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the remuneration structure are as follows:

**Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020**

Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

<b>Uraian</b> Description	<b>Jumlah</b> <b>(Rp juta)</b> Amount (Rp/IDR)	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020 Total Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020	13.617	14.545

**Rapat Dewan Komisaris dan Direksi**

**Rapat Dewan Komisaris**

Ketentuan rapat Dewan Komisaris dimuat dalam Anggaran Dasar, yang menyatakan:

1. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;

**Meetings of The Board of Commissioners and Board of Directors**

**Board of Commissioners' Meeting**

The provisions of the Board of Commissioners meeting are contained in the Articles of Association, which states:

1. The Board of Commissioners holds a meeting at least 1 (one) time every month and in that meeting the Board of Commissioners may invite the Board of Directors;



2. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha utamanya di wilayah negara Republik Indonesia. Apabila diselenggarakan di tempat lain, dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat, panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat;
4. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan; dan
5. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat gabungan dengan Direksi.

### Rapat Internal Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris merupakan kegiatan rutin untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja bulanan Indonesia Financial Group(IFG), dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam

In addition, the Board of Commissioners may also hold joint meetings with the Board of Directors.

### Internal Meeting of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners meeting is a routine activity to analyze and evaluate the monthly performance of Indonesia Financial Group (IFG). It is held at least once a month. The purpose of



satu bulan. Tujuan dari Rapat Internal adalah untuk melakukan koordinasi antara Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap kegiatan operasional Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat internal.

Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal yang diselenggarakan di tahun 2020.

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat internal Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini:

the Internal Meeting is to coordinate between the Board of Commissioners in order to increase the effectiveness of the implementation of the supervisory function and provide advice to the Board of Commissioners on the Company's operational activities conducted by the Board of Directors. Throughout 2020, the Board of Commissioners has held 12 (twelve) internal meetings.

The following are the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance rate of the Board of Commissioners in internal meetings held in 2020.

A summary of the attendance of members of the Board of Commissioners at the internal meeting of the Board of Commissioners can be seen below:

#### Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal

Recapitulation of Attendance of the Board of Commissioners at Internal Meetings

<b>Nama</b> <b>Name</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan Rapat Internal</b> Internal Meeting Dates												<b>Jumlah</b> <b>Total</b>	<b>Persentase</b> <b>Percentage</b>	
	23 Januari 20	27 Maret 20	8 Mei 20	28 Mei 20	29 April 20	3 Agustus 20	6 Agustus 20	17 Agustus 20	6 Oktober 20	6 November 20	16 November 20	18 Desember 20			
Gatot Darmasto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	100	
Gelvynn Jusuf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	10	83	
Meirijal Nur	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	91	
Arief Budiman <sup>1</sup>											✓	✓	✓	3	100
Hotbonar Sinaga <sup>1</sup>											✓	✓	✓	3	100
Fauzi Ichsan <sup>2</sup>															
Masyita Crystallin <sup>2</sup>															

<sup>1</sup> diangkat sebagai Komisaris pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan SK 337/MBU/10/2020

<sup>2</sup> diangkat sebagai Komisaris pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan SK 400/MBU/12/2020

<sup>1</sup>Appointed as Commissioner on October 20, 2020 based on SK 337/MBU/10/2020

<sup>2</sup>Appointed as Commissioner on October 20, 2020 based on SK 400/MBU/12/2020



## Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Selain rapat internal, Dewan Komisaris juga dapat melakukan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha Perusahaan serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat terkait pengurusan Perusahaan oleh Direksi. Rapat Gabungan juga menjadi forum bagi Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan arahan Dewan Komisaris dalam rapat yang dilakukan sebelumnya.

Rapat Gabungan Bersama Direksi dan Direksi Anak Perusahaan Bahana Group merupakan kegiatan rutin yang dijadwalkan setiap bulan. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat Bersama ini difokuskan untuk membahas kinerja Bulanan atau Triwulan Perusahaan, serta hal-hal strategis lain terkait dengan kegiatan perusahaan yang memerlukan konsultasi, arahan, pertimbangan dan/atau Keputusan Dewan Komisaris. Bilamana diperlukan, Dewan Komisaris dapat mengikutsertakan Komite Audit untuk memberikan masukan, melakukan klarifikasi atau melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Output Rapat Gabungan Bersama dengan Direksi dan Direksi Anak Perusahaan berupa Risalah Rapat Bersama tentang hal-hal tersebut di atas (pencapaian kinerja Bulanan atau Kuarter Perusahaan) atau sesuai dengan agenda rapat yang tercantum dalam undangan Rapat. Output ini sekaligus menjadi konsep bahan rapat dengan Pemegang Saham.

Rekapitulasi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan dapat dilihat di bawah ini.

## Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners may also hold Joint Meetings by inviting the Board of Directors as a form of coordination in order to discuss the periodic reports of the Board of Directors and discuss the conditions and business prospects of the Company as well as provide responses, notes and advice regarding the management of the Company by the Board of Directors. The Joint Meeting also serves as a forum for the Board of Commissioners to evaluate the decisions, policies, and implementation of the Board of Commissioners' guidance in previous meetings.

Joint Meetings with the Board of Directors and Board of Directors of Subsidiaries of Bahana Group are routine activities that are scheduled every month. In 2020, the Board of Commissioners held 11 (eleven) joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. This Joint Meeting is focused on discussing the Company's Monthly or Quarterly performance, as well as other strategic matters related to Company activities that require consultation, guidance, consideration and/or Decision of the Board of Commissioners. If necessary, the Board of Commissioners may involve the Audit Committee to provide input, clarify or conduct direct field visits.

The output of the Joint Meeting with the Board of Directors and Board of Directors of the Bahana Group Subsidiaries is in the form of Minutes of the Joint Meeting on the above matters (Monthly or Quarterly performance achievements of the Company) or in accordance with the meeting agenda stated in the Meeting summons. This output is also a concept material for meetings with Shareholders.

A recapitulation of the attendance of members of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Joint Meeting can be seen below,



### Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Recapitulation of Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the Joint Meeting

<b>Nama Name</b>	<b>Tanggal Pelaksanaan Rapat Internal</b> Internal Meeting Dates												<b>Jumlah Total</b>	<b>Percentase Percentage</b>	
	23 Januari 20	5 Maret 20	13 April 20	30 April 20	10 Juni 20	21 Juli 20	6 Agustus 20	19 Agustus 20	8 Oktober 20	18 November 20	21 Desember 20	18 Desember 20			
Gatot Darmasto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	100	
Gelvynn Jusuf	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	10	83	
Meirijal Nur	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	91	
Arief Budiman <sup>1</sup>											✓	✓	✓	2	100
Hotbonar Sinaga <sup>1</sup>											✓	✓	✓	2	100
Fauzi Ichsan <sup>2</sup>															
Masyita Crystallin <sup>2</sup>															

<sup>1</sup>dianugat sebagai Komisaris pada tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan SK 337/MBU/10/2020

<sup>2</sup>dianugat sebagai Komisaris pada tanggal 30 Desember 2020 SK- 400/MBU/12/2020

<sup>1</sup>Appointed as Commissioner on October 20, 2020 based on SK 337/MBU/10/2020

<sup>2</sup>Appointed as Commissioner on December 30, 2020 based on SK 400/MBU/12/2020

### Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diadakan oleh Direksi dan dipimpin oleh Direktur Utama atau anggota Direksi yang diberi kuasa. Ketentuan rapat Direksi dimuat dalam Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut:

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi;
2. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan
3. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir. Yang berisi hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi jika ada) dan hal yang diputuskan;
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
  - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

### Board of Directors Meeting

The Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors and chaired by the President Director or an authorized member of the Board of Directors. The provisions of the Board of Directors' meeting are contained in the Articles of Association, namely as follows:

1. All decisions of the Board of Directors are taken at the meeting of the Board of Directors;
2. Decisions can also be taken outside the meeting of the Board of Directors as long as all members of the Board of Directors agree on the method and material being decided
3. In every meeting of the Board of Directors, minutes of the meeting must be drawn up which shall be signed by the Chairman of the Meeting of the Board of Directors and all members of the Board of Directors present. It contains the matters discussed (including the statement of dissenting opinion of members of the Board of Directors if any) and the matters decided;
4. Meetings of the Board of Directors may be held at any time if:
  - a. deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;
  - b. At the written request of one or more members of the Board of Commissioners; or



- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia;
6. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;
7. Dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
8. Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat;
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah;
10. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir, dan menyetujui penambahan mata acara rapat;
11. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
12. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
13. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;
14. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat; dan
15. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Di sepanjang tahun 2020, Direksi melaksanakan rapat internal sebanyak 15 (lima belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

- c. At the written request of 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.
5. Meetings of the Board of Directors are considered valid if they are held at the domicile of the Company or in other places within the territory of the Republic of Indonesia;
6. Summon to the Board of Directors Meeting is made in writing by a member of the Board of Directors who is entitled to represent the Company and is delivered no later than 3 (three) days before the meeting is held or in a shorter time if in an urgent situation, without taking into account the date of the summon and the date of the meeting;
7. The summons for the meeting must include the agenda, date, time, and place of the meeting;
8. Summons for a meeting in advance are not required if all members of the Board of Directors are present at the meeting;
9. Meetings of the Board of Directors are valid and have the right to make binding decisions if attended by more than (one half) of the number of members of the Board of Directors or their legal representatives;
10. In other agendas, the meeting of the Board of Directors is not entitled to make decisions unless all members of the Board of Directors or their legal representatives are present and agree to the addition of the agenda of the meeting;
11. All Board of Directors meetings are chaired by the President Director;
12. All decisions in the meeting of the Board of Directors are taken by deliberation for consensus;
13. In the event that a decision cannot be made by consensus, then the decision is taken by ordinary majority vote;
14. A blank vote (*abstain*) is deemed to have approved the result of the meeting's decision; and
15. Invalid votes are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at the meeting.

Throughout 2020, the Board of Directors held 15 (fifteen) internal meetings. Below is the agenda and minutes of meetings, attendance, and a recapitulation of the level of attendance of the Board of Directors in these meetings.



**Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal**  
 Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

<b>Tanggal</b> Date	<b>Tempat</b> Location	<b>Agenda</b> Agenda	<b>Peserta</b> Participants	<b>Alasan</b> <b>Ketidakhadiran</b> Reason for Absence
12 Februari 2020 February 12, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tugas Direksi; 2. Masa Jabatan Direksi Anak Perusahaan IFG; 3. Lain-lain. 1. Changes in the Organizational Structure and Duties of the Board of Directors; 2. Term of Office of the Directors of IFG's Subsidiaries; 3. Others.	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis dan Sekretaris Perusahaan President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, and Corporate Secretary	-
14 Februari 2020 February 14, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Persetujuan Prinsip untuk Menjalankan Aksi Transaksi Pembelian Aset Jiwasraya; dan 2. Persetujuan Prinsip Pengadaan Konsultan dalam rangka Penunjukkan Bahana sebagai Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan. 1. Approval for Principle to Execute Jiwasraya Asset Purchase Transaction Action; and 2. Principle approval of Procurement of Consultant in the Appointment of Bahana as Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs.	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Corporate Strategy, Manajemen Risiko, Hukum, BTIM, dan BS President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Corporate Strategy, Risk Management, Legal, BTIM, and BS	-
20 April 2020 April 20, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	Pembahasan Cadangan Teknis PT Askindo	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Direktur Utama PT Askindo, Direktur Keuangan PT Askindo, Direktur Teknis PT Askindo, dan Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Corporate Strategy, Risk Management, Legal, BTIM, and BS	-



**Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal**  
 Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
8 Mei 2020 May 8, 2020	Zoom Video Conference	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk PT Askindo Appointment of Public Accounting Firm for PT Askindo	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Dewan Komisaris PT Askindo, Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Askindo. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Board of Commissioners of PT Askindo, Head of Accounting and Reporting Division, and Secretary of the Board of Commissioners of PT Askindo.	-
2 Juni 2020 June 2, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Rencana Pemenuhan GAP atas Kebutuhan Pendanaan IFG Tahun 2020; 2. Update Branding atau Launching IFG; 3. Update Proses Pengadaan KAP untuk PT Asuransi Jasa Indonesia; 4. Tata Kelola dan Manajemen Risiko; dan 5. Skenario New Normal. 1. Plan for Fulfillment of GAP on IFG Funding Needs in 2020; 2. Update of IFG Branding or Launching; 3. Update on the Procurement Process of Public Accounting Firm for PT Asuransi Jasa Indonesia; 4. Governance and Risk Management; and 5. New Normal Scenario	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan & Pengelolaan Anak Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepada Departemen TI. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy & Subsidiary Management Division, Head of Business Development Division, Head of Risk Management Division, Head of HR Division, Head of AKP Division , Head of IT Department.	-



### Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
23 Juni 2020 June 23, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Pengelolaan Aset; 2. Update Progress Inisiasi Kerja sama IFG dengan BPJS Kesehatan; 3. Update Launching IFG; dan 4. Usulan Revisi Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan SK Menteri BUMN yang Terbaru.  1. Asset Management; 2. Update on the progress of the initiation of collaboration between IFG and BPJS Kesehatan; 3. IFG Launching Update; and 4. Proposed Revision of the Guidelines for the Procurement of Goods and Services in accordance with the Latest Decree of the Minister of SOEs.	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan & Pengelolaan Anak Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepada Departemen TI, President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy & Subsidiary Management Division, Head of Business Development Division, Head of Risk Management Division, Head of HR Division, Head of AKP Division , Head of IT Department.	-
16 Juli 2020 July 16, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	Pendirian Nusantara Life Establishment of Nusantara Life	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan & Pengelolaan Anak Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, dan Staf Divisi Pengelolaan Anak Perusahaan. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy & Subsidiary Management Division, Head of Business Development Division, Head of Risk Management Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, and Staff of Subsidiary Management Division.	



### Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
23 Juli 2020 July 23, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Inisiatif Bisnis Strategis IT; dan 2. PMN Tahun 2021 Rp20T. 1. Initiative of IT Strategic Business; and 2. State Equity Participation in 2021 of IDR 20 Trillion.	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan & Pengelolaan Anak Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, dan Staf Divisi Pengembangan Bisnis. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy & Subsidiary Management Division, Head of Business Development Division, Head of Risk Management Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, and Staff of Business Development Division.	-
29 Juli 2020 July 29, 2020	Zoom Video Conference	1. Revisi RKAP IFG Konsolidasi Tahun Buku 2020; 2. Perkenalan Direksi Baru IFG; 3. Diskusi terkait Dibentuknya Holding Asuransi dan Penjaminan; dan 4. Progres Kinerja BTIM. 1. Revision of Consolidated IFG's Work Plan and Budget for Fiscal Year 2020; 2. Introduction of the New Board of Directors of IFG; 3. Discussions related to the establishment of the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs; and 4. Progress on BTIM Performance.	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan & Pengelolaan Anak Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi TI, dan Direksi dan Dewan Komisaris BTIM. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy & Subsidiary Management Division, Head of Business Development Division, Head of Risk Management Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, Head of IT Division, and the Board of Directors and Board of Commissioners of BTIM.	-



### Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
4 Agustus 2020 August 4, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Usulan Agenda Rapat Dewan Komisaris Bulan Agustus; 2. Skema Pengadaan bersama <i>Holding</i> dan Anak Perusahaan; dan 3. Update Akuisisi Inhealth. 1. Proposed Agenda for the Board of Commissioners Meeting in August; 2. Joint Procurement Scheme of Holding and Subsidiaries; and 3. Update on Inhealth Acquisition Update	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan & Pengelolaan Anak Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, dan Kepala Departemen Bagian Umum. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy & Subsidiary Management Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, and Head of General Affairs Division.	-
11 Agustus 2020 August 11, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Persiapan Rapat Dewan Komisaris, Agenda Kinerja Semester I; dan 2. Revisi RKAP tahun 2020, RJPP tahun 2020-2024 1. Preparation of the Board of Commissioners Meeting, Performance Agenda for the First Semester; and 2. Revision of 2020 Workplan and Budget, Company's Long Term Plan 2020-2024	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan dan SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan dan SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, Head of Risk Management Division, and Head of Capital Market and Investment Division, Head of Insurance and Guarantee Division, Head of Corporate Finance Division, SEVP of Subsidiary Management, and SEVP of Risk Management and Finance.	-



### Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
15 September 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi RKAP Tahun 2021; dan</li> <li>2. Presentasi H+K perihal <i>Launching IFG</i>.</li> <li>1. Dissemination of the 2021 Work Plan and Budget; and</li> <li>2. H+K presentation regarding IFG Launching.</li> </ul>	<p>Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan dan SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan dan SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan.</p> <p>President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, Head of Risk Management Division, Head of Capital Market and Investment Division, Head of Insurance and Guarantee Division, Head of Corporate Finance Division and SEVP of Subsidiary Management and SEVP of Risk Management and Finance.</p>	-



### Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

<b>Tanggal</b> Date	<b>Tempat</b> Location	<b>Agenda</b> Agenda	<b>Peserta</b> Participants	<b>Alasan</b> <b>Ketidakhadiran</b> Reason for Absence
13 Oktober 2020 October 13, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Logo IFG Life; 2. IFG Platform; 3. Relokasi dan Renovasi Kantor IFG; dan 4. Akuisisi Nasre. 1. IFG Life Logo; 2. IFG Platform; 3. Relocation and Renovation of IFG Offices; and 4. Acquisition of Nasre*	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan dan SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan dan SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, Head of Risk Management Division, Head of Capital Market and Investment Division, Head of Insurance and Guarantee Division, Head of Corporate Finance Division and SEVP of Subsidiary Management and SEVP of Risk Management and Finance.	-
4 November 2020 November 4, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. Penunjukkan Konsultan untuk Penyusunan Authority Delegation; 2. BUMN Employee Value Proposition; 3. IT Roadmap; dan 4. Update tentang Pengadaan KAP untuk Tahun Buku 2020. 1. Appointment of Consultants for Preparation of Authority Delegation; 2. SOEs' Employee Value Proposition; 3. IT Roadmap; and 4. Update on Procurement of Public Accounting Firm for Fiscal Year 2020.	Direktur Utama, Direktur Bisnis, dan Sekretaris Perusahaan. President Director, Director of Business, and Corporate Secretary.	-



### Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
11 November 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18	1. Update kerja sama IFG dengan Bank BTN 2. Akuisisi Inhealth; 3. Corporate University; 4. IFG Annual Offside Meeting; 5. Rencana Fundraising Rp6,6T Untuk Penguatan IFG Life; 6. Update terkait Perkembangan Audit PT Askindo oleh PwC; dan 7. Asuransi Jiwa Kredit. 1. Update on IFG's collaboration with Bank BTN 2. Acquisition of Inhealth; 3. Corporate University; 4. IFG Annual Offside Meeting; 5. Fundraising Plan (IDR6,6 Trillion) to Strengthen IFG Life; 6. Update on PT Askindo's Audit Progress by PwC; and 7. Credit Life Insurance.	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Departemen TI, Kepala Departemen Umum, Kepala Departemen Pengembangan Bisnis, Staf Divisi Sekretaris Perusahaan, dan SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan dan SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, Head of Risk Management Division, Head of Capital Market and Investment Division, Head of Insurance and Guarantee Division, Head of Corporate Finance Division, Head of IT Department, Head of General Affairs Department, Head of Business Development Division, Staff of the Corporate Secretary Division, SEVP of Subsidiary Management, and SEVP of Risk Management and Finance.	-
November 11, 2020	IFG Meeting Room, 18th Floor			



**Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal**  
 Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

<b>Tanggal</b> Date	<b>Tempat</b> Location	<b>Agenda</b> Agenda	<b>Peserta</b> Participants	<b>Alasan Ketidakhadiran</b> Reason for Absence
24 November 2020 November 24, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. SOP Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; 2. SOP Penyertaan Modal Negara; 3. Whistleblowing System IFG Terintegrasi; 4. Task Force International Financial Reporting Standart (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan); 5. KPI Tahun 2021; and 6. Update MoU dengan Kejaksaan Agung RI  1. SOP for the Company's Work Plan and Budget; 2. SOP for State Equity Participation; 3. Integrated IFC Whistleblowing System; 4. Task Force International Financial Reporting Standard (Statement Financial Accounting Standards); 5. 2021 KPIs; and 6. Update the MoU with the Indonesian Attorney General	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Departemen TI, Kepala Departemen Umum, Kepala Departemen Pengembangan Bisnis, Staf Divisi Sekretaris Perusahaan, dan SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan dan SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan	President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of PPA Division, Head of Risk Management Division and Head of Capital Market and Investment Division, Head of Insurance and Guarantee Division, Head of Corporate Finance Division, Head of IT Department, Head of General Affairs Department, Head of Business Development Department, Staff of the Corporate Secretary Division, and SEVP of Subsidiary Management and SEVP of Risk Management and Finance



### Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reason for Absence
14 Desember 2020 dan 15 Desember 2020 December 14 and December 15, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Presentasi IFG Life kepada Wakil Menteri BUMN II;</li> <li>2. Rencana Strategic Plan Akuisisi Inhealth;</li> <li>3. Update Peninjauan Kembali Rating IFG; dan</li> <li>4. Permohonan Persetujuan Investment Policy and Strategy IFG.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Presentation of IFG Life to the Deputy II of the Minister of SOEs;</li> <li>2. Strategic Plan for the Acquisition of Inhealth;</li> <li>3. IFG Rating Review Update; and</li> <li>4. Application for IFG Investment Policy and Strategy Approval.</li> </ul>	<p>Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Departemen TI, Kepala Departemen Umum, Kepala Departemen Pengembangan Bisnis, Staf Divisi Sekretaris Perusahaan, dan SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan dan SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan</p> <p>President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of PPA Division, Head of Risk Management Division and Head of Capital Market and Investment Division, Head of Insurance and Guarantee Division, Head of Corporate Finance Division, Head of IT Department, Head of General Affairs Department, Head of Business Development Department, Staff of the Corporate Secretary Division, and SEVP of Subsidiary Management and SEVP of Risk Management and Finance</p>	



**Risalah dan Kehadiran Direksi pada Rapat Internal**  
 Minutes and Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

<b>Tanggal</b> Date	<b>Tempat</b> Location	<b>Agenda</b> Agenda	<b>Peserta</b> Participants	<b>Alasan</b> <b>Ketidakhadiran</b> Reason for Absence
22 Desember 2020 December 22, 2020	Ruang Rapat IFG Lantai 18 IFG Meeting Room, 18th Floor	1. IT Shared Service, E-Procurement, and I-Office; 2. Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap, ISO 37001; 3. MoU dengan Bank BTN terkait Divestasi PMPD dan House Financing melalui Bahana Sekuritas; 4. Update MoU dengan Kejaksaan Agung RI; and 5. Update SOP RKAP dan PMN. 1. IT Shared Service, E-Procurement, and I-Office; 2. Implementation of Anti-Bribery Management System, ISO 37001; 3. MoU with Bank BTN related to PMPD Divestment and House Financing through Bahana Sekuritas; 4. Update on the MoU with the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia; and 5. Update on the SOPs for Work Plan and Budget and State Equity Participation.	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Strategi Perusahaan, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi SDM, Kepala Divisi AKP, Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepala Divisi Capital Market dan Investasi, Kepala Divisi Asuransi dan Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan Perusahaan, Kepala Departemen TI, Kepala Departemen Umum, Kepala Departemen Pengembangan Bisnis, Staf Divisi Sekretaris Perusahaan, and SEVP Pengelolaan Anak Perusahaan dan SEVP Manajemen Risiko dan Keuangan. President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Strategy Division, Head of Business Development Division, Head of HR Division, Head of AKP Division, Head of Risk Management Division, Head of Capital Market and Investment Division, Head of Insurance and Guarantee Division, Head of Corporate Finance Division, Head of IT Department, Head of General Affairs Department, Head of Business Development Division, Staff of the Corporate Secretary Division, SEVP of Subsidiary Management, and SEVP of Risk Management and Finance.	-



Rekapitulasi kehadiran Direksi pada Rapat Internal Direksi dapat dilihat di bawah ini,

A summary of the attendance of the Board of Directors at the Internal Meeting of the Board of Directors can be seen below,

### Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal

Recapitulation of Attendance of the Board of Directors at Internal Meetings

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Percentase Kehadiran Attendance Percentage
Robertus Billitea (Direktur Utama/President Director)	18	18	100%
Rizal Ariansyah (Direktur Keuangan dan Umum/Director of Finance and General Affairs)	18	17	93,33%
Pantro Pander Silitonga (Direktur Bisnis/Director of Business)	18	17	93,33%
<b>Rata-rata</b> <b>Average</b>			<b>95,55%</b>

### Rencana Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi di Tahun 2021

Sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi, telah diatur ketentuan mengenai pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi, yakni bahwa baik Rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Direksi dilaksanakan minimal sekali setiap 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan setiap waktu apabila dibutuhkan.

Untuk lebih meningkatkan koordinasi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif, maka untuk tahun 2021, sesuai Program Kerja Dewan Komisaris, Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi akan dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) bulan. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris tersebut direncanakan dilakukan setiap minggu ke-3 pada bulan berjalan dengan agenda rapat di antaranya membahas tentang Laporan Bulanan Kinerja Manajemen, Evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan Rapat Dewan Komisaris sebelumnya serta Tindak lanjut atas arahan dan/atau keputusan Dewan Komisaris dan/atau Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Direksi serta hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Sementara untuk Rapat Direksi di tahun 2021 direncanakan dilaksanakan minimal sekali setiap 1 (satu) bulan. Agenda rapat di antaranya membahas tentang Laporan Bulanan masing-masing Direktorat, penetapan kebijakan strategis Perusahaan, kinerja operasional, strategi Perusahaan serta hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai tugas dan fungsi Direksi.

### Planned Board of Commissioners and Board of Directors Meetings in 2021

The Company's Articles of Association and the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors has stipulated provisions regarding the implementation of the Board of Commissioners' Meeting and the Board of Directors' Meeting, namely that both the Board of Commissioners' Meeting and the Board of Directors' Meeting are held at least once every 1 (one) month and can be held at any time if needed.

To further improve coordination and make more effective decisions, for the 2021 period, according to the Work Program of the Board of Commissioners, the Internal Meeting of the Board of Commissioners and the Meeting of the Board of Commissioners inviting the Board of Directors will be held once in 1 (one) month. The meeting of the Board of Commissioners is planned to be held every 3rd week of the current month with the meeting agenda including discussing the Monthly Management Performance Report, Evaluation of the implementation of the decisions of the previous Board of Commissioners' Meeting and Follow-up on the guidance and/or decisions of the Board of Commissioners and/or Follow-up Actions actions conducted by the Board of Directors as well as other matters deemed necessary in accordance with the duties and supervisory functions of the Board of Commissioners.

Meanwhile, the Board of Directors Meeting in 2021 is planned to be held at least once every 1 (one) month. The meeting agenda includes discussing the Monthly Reports of each Directorate, the determination of the Company's strategic policies, operational performance, Company strategies and other matters deemed necessary in accordance with the duties and functions of the Board of Directors.



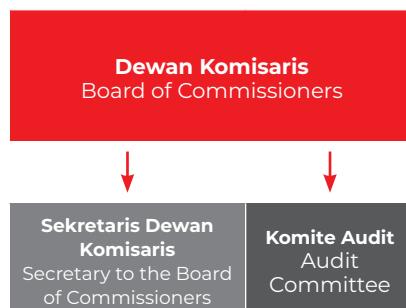
## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas kepengurusan Perusahaan oleh Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh 2 (dua) organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dasar pembentukan organ pendukung Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

## SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing the supervisory function of the Company's management by the Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by 2 (two) supporting organs, namely the Secretary to the Board of Commissioners and the Audit Committee. The basis for establishing the supporting organs of the Board of Commissioners is the Company's Articles of Association and the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

**Dewan Komisaris dan Organ Pendukung**  
 Board of Commissioners and Its Supporting Organs



### Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris adalah fungsi struktural Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya. Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan administrasi dan kesekretariatan dalam rangka mendukung tugas pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris berperan memastikan bahwa Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan praktik terbaik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Secretary of The Board of Commissioners

Secretary to the Board of Commissioners is a structural function of the Board of Commissioners whose task is to assist the Board of Commissioners in carrying out its functions. The Secretary to the Board of Commissioners has duties and functions related to the management of administrative and secretarial activities in order to support the supervisory duties of the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners. In addition, the Secretary to the Board of Commissioners has a role in ensuring that the Board of Commissioners applies GCG principles in accordance with best practices and prevailing laws and regulations.



## Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Sukendar berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/SK-DEKOM/BPUI/X/2019 ditetapkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2019

## Secretary to the Board of Commissioners

The current secretary of the Board of Commissioners is Sukendar, who is appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. 04/SK-DEKOM/BPUI/X/2019 determined in Jakarta on October 25, 2019

### Sukendar

**Sekretaris Dewan Komisaris | Secretary to the Board of Commissioners**  
**Periode Jabatan: 25 Oktober 2019 | Term of Office: October 25, 2019**

#### Data Pribadi

Warga negara Indonesia  
Usia 39 tahun

#### Personal Data

Indonesian citizens  
39 years old

#### Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

#### Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

#### Pendidikan

- Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006
- Magister hukum ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2018.

#### Education

- Bachelor of Law from Universitas Gadjah Mada in 2006
- Masters of Economic Law from the University of Indonesia in 2018.

#### Pengalaman Kerja

Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN.

#### Work Experience

He has held several positions including a position in the Business Competition Supervisory Commission, and Assistant Deputy for Legislation at the Ministry of SOEs.

## Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;
7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menetapkan prinsip-prinsip GCG;
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;

## Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

In conducting its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners. The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Prepare meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
2. Prepare minutes of the Board of Commissioners' meeting in accordance with the Articles of Association;
3. Administer the documents of the Board of Commissioners, such as incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare a draft work plan and budget for the Board of Commissioners;
5. Prepare draft reports for the Board of Commissioners;
6. Carry out other duties of the Board of Commissioners;
7. Ensure that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and establishes the principles of GCG;
8. Provide information needed by the Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested;



9. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
10. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain; dan
11. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

9. Coordinate members of the Committee, if necessary in order to accelerate the duties of the Board of Commissioners;
10. Act as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties; and
11. Ensure that the documents for the implementation of activities of the Board of Commissioners are stored properly in the Company.

### Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Program pengembangan kompetensi dimaksudkan sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Sekretaris Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan.

### Competency Development of the Secretary of the Board of Commissioners

The competency development program is intended as a form of program to increase the insight and knowledge of the Secretary to the Board of Commissioners in order to improve the competence. This program is expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Corporate Secretary's performance.

### Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris, yakni sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;
2. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
3. Menyusun dokumen surat keluar Dewan Komisaris;
4. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
5. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris;
6. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
7. Melakukan fungsi penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain; dan
8. Memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan.

### Task Implementation Report in 2020

Throughout 2020, the Secretary to the Board of Commissioners has conducted the functions and duties in assisting and supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners, namely as follows:

1. Prepare the meeting, including the meeting materials for the Board of Commissioners;
2. Prepare the minutes of the Board of Commissioners' meeting in accordance with the provisions of the Articles of Association;
3. Prepare outgoing letters of the Board of Commissioners;
4. Administer the documents of the Board of Commissioners, in the forms of incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
5. Prepare a draft of work plan and budget of the Board of Commissioners;
6. Prepare draft of the Board of Commissioners' reports;
7. Perform duties as the liaison officer function of the Board of Commissioners with other parties; and
8. Ensure that documents for the implementation of activities within the Board of Commissioners are properly archived in the Company.



## KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam pengawasan kinerja perusahaan sesuai dengan Program Kerja Komite Audit yang disusun secara terpisah dari Program Kerja Dewan Komisaris. Komite Audit tersebut akan melanjutkan pelaksanaan tugasnya pada tahun berjalan dengan memperhatikan hasil temuan Komite Audit dan Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada tahun sebelumnya secara berkelanjutan.

### Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat dilakukan secara maksimal, terarah, dapat dipercaya dan independen, Perusahaan mengesahkan *charter/ piagam tertulis* yang telah disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit ini secara berkala dikaji ulang secara untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut senantiasa sejalan dengan kebutuhan, peraturan perundangan yang berlaku dan *best practices*. Piagam Komite Audit yang dibuat Perusahaan berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 2 Desember 2013.

Piagam Komite Audit merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Manajemen Perusahaan dan Unit terkait lainnya.

Piagam Komite Audit mencakup:

1. Visi dan Misi Komite Audit;
2. Maksud dan Tujuan Komite Audit;
3. Organisasi Komite Audit;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit;
5. Masa Jabatan Komite Audit;
6. Persyaratan Anggota Komite Audit;
7. Penghasilan Anggota Komite Audit;
8. Kode Etik Komite Audit;
9. Kewenangan Komite Audit;
10. Tugas Komite Audit;

## AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is tasked with assisting the implementation of the Board of Commissioners' duties in supervising the Company's performance in accordance with the Audit Committee Work Program which is prepared separately from the Board of Commissioners' Work Program. The Audit Committee will continue to conduct the duties in the current year by taking into account the findings of the Audit Committee and the Internal Audit Division (SPI) in the previous year on an ongoing basis.

### Work Guidelines: Audit Committee Charter

For the implementation of the duties of the Audit Committee to be carried out optimally, directed, trustworthy and independent, the Company ratifies a written charter that has been agreed upon by the Board of Commissioners and the Board of Directors, as a reference for the implementation of the Audit Committee's duties. The Audit Committee Charter is regularly reviewed to ensure that the scope of the guidelines is always in line with the Company's needs, prevailing laws and regulations and best practices. The Audit Committee Charter made by the Company is effective since it was agreed and signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors on December 2, 2013.

The Audit Committee Charter is a written document that specifically regulates the position, authority, duties, and responsibilities of the Audit Committee. This charter also provides boundaries and regulates the working relationship between the Audit Committee and the Board of Commissioners, the Company's Management and other related units.

The Audit Committee Charter includes:

1. Vision and Mission of the Audit Committee.
2. Goals and Objectives of the Audit Committee.
3. Organization of the Audit Committee.
4. Appointment and Dismissal of the Audit Committee.
5. Term of Office of the Audit Committee.
6. Requirements for members of the Audit Committee.
7. Income of Audit Committee Members.
8. Code of Ethics for the Audit Committee.
9. Authority of the Audit Committee.
10. Duties of the Audit Committee.



11. Rapat Komite Audit;
12. Hubungan Kerja Komite Audit;
13. Rencana Kerja Komite Audit;
14. Evaluasi Kinerja Komite Audit;
15. Pelaporan Komite Audit;
16. Dokumentasi Komite Audit.

### **Kriteria Keanggotaan Komite Audit**

Keanggotaan Komite Audit memiliki beberapa kriteria di antaranya:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi dengan efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;
5. Memiliki komitmen dalam melaksanakan tugasnya;
6. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

### **Masa Jabatan**

Masa jabatan Ketua atau anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, sama dengan masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris. Sementara masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan tersebut dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### **Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2020**

Per 31 Desember 2020, susunan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/SK-DEKOM/BPUI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Pengangkatan dan Perubahan Susunan Komite Audit PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), susunan Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

11. Audit Committee Meetings.
12. Working Relations of the Audit Committee.
13. Audit Committee Work Plan.
14. Performance Evaluation of the Audit Committee.
15. Audit Committee Reporting.
16. Audit Committee Documentation.

### **Audit Committee Membership Criteria**

Membership of the Audit Committee has several criteria including:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the area of supervision/inspection.
2. Do not have any personal interests/relationships which can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to complete the task.
5. Have a commitment in carrying out their duties.
6. Meet other requirements set by the Board of Commissioners.

### **Tenure**

The tenure of the head or members of the Audit Committee who is a member of the Board of Commissioners is the same as his tenure as a member of the Board of Commissioners. Meanwhile, the tenure for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners is 3 (three) years, starting from the date of stipulation of the decree without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

### **Number, Composition and Structure of the Audit Committee in 2020**

As of December 31, 2020, the composition of the Audit Committee consists of 1 (one) chairperson and 2 (two) members. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 05/SK-DEKOM/BPUI/XI/2019 dated November 20, 2019 regarding the Appointment and Changes in the Composition of the Audit Committee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee as of December 31, 2020 is as follows:



### Susunan Komite Audit per 31 Desember 2020

Audit Committee Composition as of December 31, 2020

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Ketua/ Komisaris Chairman/ Commissioner	Meirijal Nur	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/SK-DEKOM/BPUI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Decree of the Board of Commissioners No. 05/SK-DEKOM/BPUI/XI/2019 dated November 20, 2019	1 Desember 2019 s.d. 30 November 2022 December 1, 2019 to November 30, 2022	Ke-1 1 <sup>st</sup>
Anggota Member	Maliki Heru Santosa	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/SK-DEKOM/BPUI/XI/2020 tanggal 24 November 2020 Decree of the Board of Commissioners No. 04/SK-DEKOM/BPUI/XI/2020 on November 24, 2020	24 November 2020 s.d. 23 November 2022 November 24, 2020 to November 23, 2022	Ke-2 2 <sup>nd</sup>
Anggota Member	Nandang Supriyadi	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05/SK-DEKOM/BPUI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 Decree of the Board of Commissioners No. 05/SK-DEKOM/BPUI/XI/2019 dated November 20, 2019	1 Desember 2019 s.d. 30 November 2022 December 1, 2019 to November 30, 2022	Ke-1 1 <sup>st</sup>

### Profil Komite Audit

### Audit Committee Profile

#### Meirijal Nur

#### Ketua Komite Audit

Chairman of the Audit Committee

Profil Ketua Komite Audit, Meirijal Nur telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

The profile of the Chairman of the Audit Committee, Meirijal Nur, has been presented in the Company Profile chapter in the Board of Commissioners' profile section in this Annual Report

#### Maliki Heru Santosa

#### Anggota Komite Audit

Audit Committee Member

#### Menjabat sejak 2019

In position since 2019

Meraih gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1988, dilanjutkan dengan program MBA di Saint Mary's University Canada tahun 1992 dan Doktor Manajemen Bisnis IPB tahun 2016. Karier Maliki Heru Santosa antara lain Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah, Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi, Direktur Pengawasan BUMN Badan Usaha Agrobisnis Jasa Konstruksi dan Perdagangan, Direktur Pengawasan BUMN Jasa Keuangan dan Manufaktur, Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Inspektor Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Auditor Utama BPKP.

He earned an Accountant degree from the State College of Accountancy in 1988, followed by an MBA program at Saint Mary's University Canada in 1992 and a Doctorate in Business Management from IPB in 2016. Maliki Heru Santosa's careers include Director of Supervision of Government Institutions, Director of Fiscal and Investment Supervision, Director of Supervision of SOEs for Business Entities Agribusiness, Construction Services and Trade, Director of Supervision of SOEs for Financial Services and Manufacturing, Head of DKI Jakarta BPKP Representative, Inspector General of the Ministry of Home Affairs and Main Auditor of BPKP.



**Nandang Supriyadi**  
**Anggota Komite Audit**  
 Audit Committee Member  
**Menjabat sejak 2019**  
 In position since 2019

Menyelesaikan pendidikan strata S1 Ilmu Administrasi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) tahun 2006, dan Magister Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gajah Mada tahun 2010. Karier Nandan Supriyadi antara lain Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Tasikmalaya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan.

Completed his undergraduate education in Administration Science at the College of Administrative Sciences, Institute of State Administration (STIA LAN) in 2006, and Master in Development Economics at the Faculty of Economics and Business at Universitas Gajah Mada in 2010. Nandan Supriyadi's careers include the State Service Office and Auction in Tasikmalaya, The Directorate General of State Assets (DJKN), the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Directorate of Separated State Assets.

### **Independensi Komite Audit**

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kriteria independensi Komite Audit, terlampir dalam tabel berikut:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Meirijal Nur (Ketua) (Chairperson)	Maliki Heru Santosa (Anggota) (Member)	Nandang Supriyadi (Anggota) (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Have a familial relationship with the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	X	X	X
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Have a direct and indirect business relationship with the Company	X	X	X
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, non-audit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	X	X	X
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	X	X	X

v = ada | x = tidak ada  
v = Yes | x = No

### **Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Peran dan tanggung jawab Komite Audit seperti tercantum dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;

### **Independence of the Audit Committee**

The Audit Committee conducts the functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the criteria for the independence of the Audit Committee are attached in the following table:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Meirijal Nur (Ketua) (Chairperson)	Maliki Heru Santosa (Anggota) (Member)	Nandang Supriyadi (Anggota) (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Have a familial relationship with the Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	X	X	X
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Have a direct and indirect business relationship with the Company	X	X	X
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir Is an individual who provides audit, non-audit, or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months	X	X	X
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan Is an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the activities of the Company	X	X	X

### **Audit Committee's Roles and Responsibilities**

The role and responsibility of the audit committee as stated in the Audit Committee Charter are as follows:

1. Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and effectiveness of the implementation of the external and internal auditors' tasks;



2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh internal auditor maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
6. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya;
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
8. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
9. Mengkaji kecukupan fungsi internal audit, termasuk jumlah dan kompetensi auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan;
10. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit.
2. Assess the implementation of activities and audit results carried out by internal and external auditors;
3. Provide recommendations on improving management control systems and implementation;
4. Ensure that there has been a satisfying review procedure for all information issued by the Company;
5. Identify aspects that need the attention of the Board of Commissioners and other Board of Commissioners' duties;
6. Review information about the Company, as well as long-term plans, Company's work plans and budget, management reports and other information;
7. Review the Company's obedience to laws and regulations related to the Company's activities;
8. Review complaints relating to the Company;
9. Assess the adequacy of internal audit functions, including the number and competency of the auditor, the annual work plan and assignment that has been implemented;
10. Assess the adequacy of the implementation of external audits including audit planning.

### Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sebagaimana tertulis dalam Piagam Komite Audit. Rapat dapat diadakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota Komite. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang telah disepakati sebelum rapat dilaksanakan. Setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat. Isi notulen mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Salinan atas notulen atau risalah dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Di tahun 2020, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat-rapat tersebut.

### Audit Committee's Meeting

The Audit Committee held a periodic meeting as written in the Audit Committee Charter. Meetings can be held if attended by at least half of the number of committee members. The meeting was held based on the summon and agenda that had been agreed upon before the meeting was held. Every meeting must be made minutes of the meeting. The contents of the minutes include the time and place of the meeting, the meeting agenda, the participants present, topics discussed, dissenting opinions, (if any) and meeting resolutions. A copy of the minutes is submitted to the Secretary of the Board of Commissioners to be reported to the Board of Commissioners.

In 2020, the Audit Committee held 21 (twenty one) meetings. The following is the agenda and minutes of the meeting, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the Audit Committee in these meetings.



### **Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit**

Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

<b>Tanggal</b> Date	<b>Tempat</b> Location	<b>Agenda</b> Agenda
10 Januari 2020 January 10, 2020	IFG, Jakarta	Rapat dengan KAP AAJ RSM membahas <i>Progress Audit</i> Meeting with AAJ RSM Public Accounting Firm to discuss the Audit Progress
16 Januari 2020 January 16, 2020	IFG, Jakarta	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit
28 Januari 2020 January 28, 2020	IFG, Jakarta	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit
17 Februari 2020 February 17, 2020	IFG, Jakarta	Rapat <i>closing audit</i> dengan Tahun Buku 2019 dengan KAP RSM Closing Audit Meeting of the 2019 Fiscal Year with RSM Public Accounting Firm
2 Maret 2020 March 2, 2020	IFG, Jakarta	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit
21 April 2020 April 21, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit
2 Juli 2020 July 2, 2020	IFG, Jakarta	Rapat Fisik membahas laporan keuangan konsolidasi <i>Holding IFG</i> Face-to-face Meeting to discuss the consolidated financial statements of the IFG holding
22 Juli 2020 July 22, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat Persiapan Pengadaan Bersama KAP Preparation Meeting with Public Accounting Firm
30 Juli 2020 July 30, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat Pembahasan Revisi RKAP IFG 2020 Meeting to discuss the IFG RKAP 2020 Revision
15 Agustus 2020 August 15, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat dengan SPI, perlunya penguatan SPI dan mempererat komunikasi anak perusahaan dan <i>holding</i> Meeting with the Internal Audit Unit on the need to strengthen the Internal Audit Unit and strengthen communication between subsidiaries and holding
22 Agustus 2020 August 22, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat dengan SPI, adanya hasil audit BPKP di anak perusahaan asuransi, agar ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada pemegang saham (KBUMN) untuk dapat menindaklanjuti hasil audit tersebut Meeting with the Internal Audit Unit on the results of the BPKP audit in an insurance subsidiary, to be followed up by submitting a letter to shareholder (KBUMN) to follow up on the results of the audit
5 September 2020 September 5, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat dengan SPI, agar dilakukan penatausahaan transaksi antar anak perusahaan, hal lainnya agar segera menyusun kebijakan pengadaan barang dan jasa Meeting with the Internal Audit Unit to conduct an administration of transactions between subsidiaries and to discuss other matters to immediately develop policies for the procurement of goods and services
26 September 2020 September 26, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat dengan SPI, Perlunya penyelarasan tata kelola dan manajemen risiko anak dan <i>holding</i> Meeting with the Internal Audit Unit on the need for alignment of risk management of subsidiaries and holding
3 Oktober 2020 October 3, 2020	IFG, Jakarta	Rapat dengan KAP AAJ RSM membahas <i>Progress Audit</i> Meeting with AAJ RSM Public Accounting Firm to discuss the Audit Progress
10 Oktober 2020 October 10, 2020	IFG, Jakarta	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit



**Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Audit**  
Minutes and Attendance of Audit Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda
17 Oktober 2020 October 17, 2020	IFG, Jakarta	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit
24 Oktober 2020 October 24, 2020	IFG, Jakarta	Rapat closing audit dengan Tahun Buku 2019 dengan KAP RSM Closing Audit Meeting of the 2019 Fiscal Year with RSM Public Accounting Firm
26 Oktober 2020 October 26, 2020	IFG, Jakarta	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit
7 November 2020 November 7, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat bulanan Komite Audit dengan SPI Monthly Meeting of the Audit Committee with the Internal Audit Unit
28 November 2020 November 28, 2020	IFG, Jakarta	Rapat Fisik membahas laporan keuangan konsolidasi Holding IFG Face-to-face Meeting to discuss the consolidated financial statements of the IFG holding
19 Desember 2020 December 19, 2020	Via Zoom Using ZOOM	Rapat Persiapan Pengadaan Bersama KAP Preparation Meeting with Public Accounting Firm

**Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat**  
Recapitulation of Attendance of the Audit Committee at the Meeting

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Meirjal Nur	22	20	91%
Maliki Heru Santosa	22	22	100%
Nandang Supriyadi	22	22	100%
<b>Rata-rata</b> <b>Average</b>			<b>97%</b>

**Pengembangan Kompetensi Komite Audit**

Perusahaan mengikutsertakan Komite Audit dalam kegiatan pengembangan kompetensi sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

**Kebijakan Remunerasi Bagi Komite Audit**

Penentuan jumlah remunerasi Komite Audit ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa penghasilan anggota Komite, yakni berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan

**Audit Committee Competency Development**

The Company includes the audit committee in competency development programs as a form of activities to add insight and knowledge. The list of training activities and competencies improvement programs participated by the Audit Committee throughout 2020 can be seen in the Company's profile chapter in this annual report.

**Remuneration Policy for the Audit Committee**

The Audit Committee Remuneration is determined by referring to Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/2012 concerning supporting organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises which regulate the income of committee members, namely the maximum honorarium of 20% (twenty percent) of the salary of the Company's President Director with



ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut.

### **Rencana Program Kerja Komite Audit Tahun 2020**

Komite Audit telah menyusun rencana program kerja Komite Audit tahun 2020 dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, sebagai berikut:

1. Rapat dengan Divisi SPI Perusahaan, membahas progres pelaksanaan Rencana Kerja Audit (RKA) SPI dan temuan audit, kendala dan upaya yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan RKA SPI;
  
2. Rapat dengan SPI dan auditee (anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)) untuk membahas tindak lanjut hasil audit dari SPI dan BPK, serta upaya dan kendala yang dihadapi;
  
3. Melakukan pembahasan dan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja perusahaan secara berkala (minimal per semester) dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
4. Rapat dengan SPI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membahas progres pelaksanaan dan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan IFG Tahun Buku 2019;
  
5. Rapat dengan SPI, *Financial Control* IFG & Anak Perusahaan dengan KAP untuk membahas *Draft Final (Audited)* Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2019;
  
6. Melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke unit usaha atau proyek perusahaan yang sedang berlangsung atas penugasan Dewan Komisaris;
7. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja KAP atas pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasi IFG & Anak Perusahaan Tahun Buku 2019, dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris;
  
8. Menyampaikan usulan penunjukan KAP untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasi IFG & Anak Perusahaan Tahun Buku 2020 kepada Dewan Komisaris;

Tax Provisions borne by the Company. The Audit Committee is not allowed to receive other income than the honorarium. Members of the Board of Commissioners who are chairman/member of the Audit Committee are not given additional income from the position.

### **2020 Audit Committee Work Program Plan**

The Audit Committee has planned the 2020 Audit Committee Work Program in supporting the effectiveness of the implementation of its duties, as follows:

1. Have meetings with the Company's Internal Audit division to discuss the progress for implementing the Audit Work Plan (RKA) of the Internal Audit Unit and audit findings, as well as the constraints and efforts needed related to the implementation of the Audit Work Plan of the Internal Audit Unit.
2. Have meetings with the Internal Audit Unit and Auditee (a subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)) to discuss the follow-up regarding the audit results from the Internal Audit Unit and Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), as well as on efforts made and obstacles faced.
3. Conduct Discussion and Review on financial statements and Company performance reports regularly (minimum per semester) and report the results to the Board of Commissioners.
4. Have meetings with the Internal Audit Unit and the Public Accountant Firm (KAP) to discuss the progress of the implementation and results of the Audit of Public Accountant Firm for the financial statements of PT BPUI in 2019.
5. Have meetings with the Internal Audit Unit, IFG's Financial Control & Subsidiaries with Public Accountant Firm to discuss the Audited Final Draft of the Audit Financial Statements of the 2019 fiscal year.
6. Conduct a field work visit to a business unit or project that is ongoing on the assignment of the Board of Commissioners.
7. Conduct assessment and evaluation of the performance of the Public Accountant Firm over the implementation of the audit of the consolidated financial statements of IFG & Subsidiaries in the 2019 fiscal year, and submit the reports to the Board of Commissioners.
8. Deliver the proposed appointment of Public Accountant Firm for the audit of the consolidated financial statements of PT BPUI & subsidiaries in the 2020 fiscal year to the Board of Commissioners.



9. Rapat dengan SPI dan *Financial Control* IFG untuk persiapan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi IFG & Anak Perusahaan Tahun Buku 2019;
10. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit tahun 2021 dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
11. Menyusun Laporan Triwulanan tentang pelaksanaan kegiatan Komite Audit;
12. Mengikuti Seminar, *Workshop*, *Training* terkait dengan tugas Komite Audit;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.
9. Have meetings with the Internal Audit Unit and IFG's Financial Control for preparation for the audit of consolidated financial statements of IFG & subsidiaries for the 2019 fiscal year.
10. Develop a work plan of the 2021 Audit Committee and convey it to the Board of Commissioners.
11. Prepare a quarterly report on the implementation of the Audit Committee's activities.
12. Participate in seminars, workshops, training related to the assignment of the Audit Committee.
13. Conduct other tasks from the Board of Commissioners.

### Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman Kerja Komite Audit serta Program Kerja Komite Audit Tahun 2020. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2020 di antaranya:

1. Efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas eksternal dan internal auditor serta penguatan tata kelola Perusahaan;
2. Memberi masukan atas perihal tertentu yang perlu perhatian Dewan Komisaris;
3. *Monitoring* dan evaluasi kinerja IFG.

### Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2021

Kegiatan Komite Audit umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kegiatan rutin dan kegiatan non rutin. Adapun rencana kerja Komite Audit di tahun 2021 antara lain:

1. Rapat dengan Divisi SPI Perusahaan, membahas progres pelaksanaan RKA SPI dan temuan audit, kendala dan upaya yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan RKA SPI;
2. Rapat dengan SPI dan *auditee* (anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk membahas tindak lanjut hasil audit dari SPI dan BPK, serta upaya dan kendala yang dihadapi;
3. Melakukan pembahasan dan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja perusahaan secara berkala (minimal per semester) dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;

### Brief Report on Duties and Activities of the Audit Committee in 2020

Throughout 2020, the Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the work guidelines for the Audit Committee and the Audit Committee Work Program in 2020. The realization of the assignment of the Audit Committee in 2020 are:

1. The effectiveness of the internal control system and the effectiveness of external and internal auditors, as well as the strengthening of corporate governance.
2. Provided input to a certain matter that needs the attention of the Board of Commissioners.
3. IFG's performance monitoring and evaluation.

### Audit Committee's Work Plan in 2021

In general, the audit committee activities are divided into 2 (two), namely routine activities and non-routine activities. The Audit Committee Work Plan in 2021 includes:

1. Have meetings with the Company's Internal Audit division to discuss the progress of the implementation of the Work Plan and Budget (RKA) of the Internal Audit Unit and audit findings as well as the constraints and efforts needed related to the implementation of the Work Plan and Budget (RKA) of the Internal Audit Unit.
2. Have meetings with the Internal Audit Unit and *Auditee* (a subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to discuss the follow-up of the audit results from the Internal Audit Unit and Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), as well as on efforts made and obstacles faced.
3. Conduct Discussion and Review on financial statements and Company performance reports regularly (minimum per semester) and report the results to the Board of Commissioners.



4. Rapat dengan SPI dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk membahas progress pelaksanaan dan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan IFG Tahun Buku 2020;
5. Rapat dengan SPI, *Financial Control* IFG & Anak Perusahaan dengan KAP untuk membahas *Draft Final (Audited)* Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2019;
6. Melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke unit usaha atau proyek perusahaan yang sedang berlangsung atas penugasan Dewan Komisaris;
7. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja KAP atas pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasi IFG & Anak Perusahaan Tahun Buku 2020, dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris;
8. Menyampaikan usulan penunjukan KAP untuk pelaksanaan audit Laporan Keuangan Konsolidasi IFG & Anak Perusahaan Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris;
9. Rapat dengan SPI dan *Financial Control* IFG untuk persiapan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi IFG & Anak Perusahaan Tahun Buku 2020;
10. Menyusun Rencana Kerja Komite Audit tahun 2022 dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris;
11. Menyusun Laporan Triwulanan tentang pelaksanaan kegiatan Komite Audit;
12. Mengikuti Seminar, *Workshop*, *Training* terkait dengan tugas Komite Audit;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Dewan Komisaris.
4. Have meetings with the Internal Audit Unit and the Public Accountant Firm (KAP) to discuss the implementation progress and the audit results of the Public Accountant Firm regarding the financial statements of IFG for the 2020 Fiscal Year.
5. Have meetings with the Internal Audit Unit, IFG's Financial Control & Subsidiaries with Public Accountant Firm to discuss the Audited Final Draft of the Audit Financial Statements of the 2019 fiscal year.
6. Conduct a field work visit to a business unit or project that is ongoing on the assignment of the Board of Commissioners.
7. Conduct assessment and evaluation of the performance of the Public Accountant Firm over the implementation of the audit of the consolidated financial statements of PT BPUI & subsidiaries in the 2020 fiscal year, and submit the reports to the Board of Commissioners.
8. Submit the proposed appointment of the Public Accountant Firm for the implementation of the audit of the Consolidated Financial Statement of PT BPUI & subsidiaries in the 2022 fiscal year to the Board of Commissioners.
9. Have meetings with the Internal Audit Unit and IFG's Financial Control for preparation for the audit of PT BPUI's consolidated financial statements of IFG & subsidiaries for the 2020 fiscal year.
10. Develop a work plan of the 2022 Audit Committee and convey it to the Board of Commissioners.
11. Prepare a quarterly report on the implementation of the Audit Committee's activities.
12. Participate in seminars, workshops, training related to the assignment of the Audit Committee.
13. Carry out other tasks from the Board of Commissioners.

## Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020 sebagai bentuk pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang baik di lingkungan Perusahaan. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 51 No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 23 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.05/2014 tentang Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan

## Nomination and Remuneration Committee

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee on April 20, 2020 based on Decree No. 01/SK-Dekom/BPUI/IV/2020 as a form of implementation of good corporate governance (GCG) in the Company. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the Financial Services Authority Regulation Article 51 No.73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies on December 23, 2016 and Circular of the Financial Services Authority No.16/SEOJK.05/2014 regarding the



Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah tanggal 9 Desember 2014.

Peraturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 27 Desember 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah tanggal 22 Juli 2019.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang ketua yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, seorang anggota dari Komisaris Independen atau anggota dari Pejabat Eksekutif Perusahaan yang membawahi SDM atau perwakilan karyawan.

### Pedoman Kerja: Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Agar pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan secara maksimal, terarah, dapat dipercaya dan independen, Perusahaan mengesahkan *charter/piagam* tertulis yang telah disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala dikaji ulang secara untuk memastikan bahwa cakupan pedoman tersebut senantiasa sejalan dengan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices*. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibuat Perusahaan berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris pada tanggal 20 April 2020.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Dewan Komisaris, Manajemen Perusahaan dan Unit terkait lainnya.

Committee of the Board of Commissioners of the Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Islamic Reinsurance Companies on December 9, 2014.

The latest regulations of the Financial Services Authority is No. 43/POJK.05/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulations No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies on December 27, 2019 and Circular of the Financial Services Authority No. 14/SEOJK.05/2019 concerning the establishment, membership composition, and tenure of the committee on the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies on July 22, 2019.

The composition of the Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) people consisting of a chairman who is concurrently a member of the Board of Commissioners, a member who is an Independent Commissioner, or member of the Company's executive officers who oversees HR, or representatives of employees.

### Work Guidelines: Charter of the Nomination and Remuneration Committee

For the implementation of the Tasks of the Nomination and Remuneration Committee to be conducted optimally, directed, trustworthy and independent, the Company ratifies the written charter that has been agreed upon by the Board of Commissioners and Board of Directors. This Charter of the Nomination and Remuneration Committee is regularly reviewed to ensure that the coverage of the guidelines is in accordance with the Company's needs, applicable legislation and the best practices. The Charter of the Nomination and Remuneration Committee created by the Company has been implemented since it is agreed upon and signed by the Board of Commissioners and Directors on April 20, 2020.

The Charter of the Nomination and Remuneration Committee is a written document that regulates primarily regarding the position, authority, task, and responsibility of the Nomination and Remuneration Committee. The charter also provides limits and regulates work relationships between the Nomination and Remuneration Committee with the Board of Commissioners, with the Company's management, and other related units.



## Masa Jabatan

Masa jabatan Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari unsur Dewan Komisaris mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris. Sementara masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

## Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Per 31 Desember 2020, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK-Dekom/BPUI/IV/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020.

## Tenure

The tenure of the Chairman or Member of the Nomination and Remuneration Committee who is also a member of the Board of Commissioners, is the same as his term as a member of the Board of Commissioners. Whereas the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee that is not a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, and can be extended once for 2 (two) years of tenure, without reducing the rights of Board of Commissioners to dismiss him/her at any time.

## Number, Composition and Structure of the 2020 Nomination and Remuneration Committee

As of December 31, 2020, the composition of the Nomination and Remuneration Committee consists of 1 (one) Chairman and 2 (two) members. Based on the Board of Commissioners Decree No. 01/SK-Dekom/BPUI/IV/2020 dated April 20, 2020 concerning the Establishment and Determination of the composition of the Membership of Nomination and Remuneration Committee of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, the composition of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2020, is as follows:

### Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020

The Composition of the Nomination and Remuneration Committee As of December 31, 2020

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Ketua/ Komisaris Chairman/ Commissioner	Gatot Darmasto*	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK- DEKOM/BPUI/IV/2020 Decree of the Board of Commissioners No. 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020	April 2020	Ke-1 1 <sup>st</sup>
Anggota Member	Sukendar	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK- DEKOM/BPUI/IV/2020 Decree of the Board of Commissioners No. 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020	April 2020	Ke-1 1 <sup>st</sup>
Anggota Member	Gellwynn Jusuf*	Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SK- DEKOM/BPUI/IV/2020 Decree of the Board of Commissioners No. 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020	April 2020	Ke-1 1 <sup>st</sup>

\* Tidak lagi menjabat per 30 Desember 2020

\* No longer served as of December 30, 2020



## Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

## Profile of the Nomination and Remuneration Committee

### Gatot Darmasto

#### Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Chairperson of the Nomination and Remuneration Committee

#### Menjabat sejak 20 April 2020

In position since April 20, 2020

Profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Gatot Darmasto telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Profile of Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Gatot Darmasto, is presented in the Company Profile chapter on the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report

### Sukendar

#### Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of Nomination and Remuneration Committee

#### Menjabat sejak 20 April 2020

In position since April 20, 2020

Profil Sukendar telah disajikan pada bab GCG di profil Sekretaris Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini  
Sukendar's profile is presented in the GCG chapter in the Profile of the Secretary of the Board of Commissioners section in this Annual Report

### Gellwynn Jusuf

#### Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Member of Nomination and Remuneration Committee

#### Menjabat sejak 20 April 2020

In position since April 20, 2020

Profil Gellwynn Jusuf telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dibagian profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Gellwynn Jusuf's profile is presented in the Company Profile chapter in the profile of the Board of Commissioners in this annual report

## Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, kriteria independensi Komite Nominasi dan Remunerasi, terlampir dalam tabel berikut:

## Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee conduct their functions and duties professionally and independently, without interference from any parties that are not in accordance with legislation. In accordance with the Charter of the Nomination and Remuneration Committee, the independence criteria for the Nomination and Remuneration Committee can be seen in the following table:

Aspek Independensi Aspects of Independence	Gatot Darmasto (Ketua) (Chairperson)	Sukendar (Anggota) (Member)	Gellwynn Jusuf (Anggota) (Member)
Memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, serta Direksi Has a familial relationships with shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors	x	x	x
Memiliki hubungan usaha secara langsung dan tidak langsung kepada Perusahaan Have a direct and indirect business relationship with the company	x	x	x



<b>Aspek Independensi</b> Aspects of Independence	<b>Gatot Darmasto (Ketua)</b> (Chairperson)	<b>Sukendar (Anggota)</b> (Member)	<b>Gellwynn Jusuf (Anggota)</b> (Member)
Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir  Is an individual who provided audit, non-audit, or other consultant services to the Company within the last 6 (six) months	x	x	x
Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan  Is an individual who has authority and responsibility for planning, leading or controlling the Company activities	x	x	x

✓ = ada | x = tidak ada  
✓ = Yes | x = No

## Peran dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Peran dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi seperti tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 01/SK-DEKOM/BPUI/IV/2020 adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - Komposisi jabatan anggota Direksi;
    - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
    - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi;
    - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
    - Menyampaikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
    - Menyediakan "talent pool" berupa data dan profil calon anggota Direksi;
    - Menyampaikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Direksi Anak Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
    - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dari/atau anggota Dewan Komisaris;

## Role and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The role and responsibility of the Nomination and Remuneration Committee as stated in the Decree of the Company's Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 01/SK-Dekom/BPUI/IV/2020 are as follows:

1. In relation to nomination functions
  - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
    - The composition of the position of members of the Board of Directors;
    - Policies and Criteria needed in the process of nomination,
    - Performance evaluation policies for members of the Board of Directors;
    - Assist the Board of Commissioners conduct the performance assessment of members of the Board of Directors based on the benchmarks that have been prepared as evaluation materials;
    - Submit proposed candidates who qualified as members of the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
    - Provide "Talent Pool" in the form of data and profile of prospective members of the Board of Directors;
    - Submit recommendations on prospective members of the Board of Commissioners of Subsidiaries and/or Board of Directors of Subsidiaries to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS;
    - Provide recommendations for the Board of Commissioners regarding the development program of members of the Board of Directors from/or members of the Board of Commissioners;



2. Terkait dengan fungsi nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan struktur remunerasi serta saran besaran remunerasi di lingkungan IFG termasuk Anak Perusahaannya;
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan analisa kesesuaian antara remunerasi yang diusulkan/diterimakan dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala sebagaimana tertulis dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat dapat diadakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang telah disepakati sebelum rapat dilaksanakan. Setiap rapat harus dibuat notulen atau risalah rapat. Isi notulen mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Salinan atas notulen atau risalah dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Di tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rapat-rapat tersebut.

2. In relation to nomination function
  - a. Provide recommendations for the Board of Commissioners regarding the policies and structures of the remuneration and the suggestions of the amount of remuneration in PT IFG including its subsidiaries.
  - b. Assist the Board of Commissioners conduct conformity analysis between the proposed/given remuneration and performance of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
3. Carry out the duties and other obligations provided by the Board of Commissioners.

### Meeting of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee held a periodic meeting as written in the Charter of the Nomination and Remuneration Committee. Meetings can be held if attended by at least half of the number of Nomination and Remuneration Committee members. The meeting was held based on the summon and agenda that had been agreed upon before the meeting was held. Every meeting must be made minutes of the meeting. The contents of the minutes include the time and place of the meeting, the meeting agenda, the participants present, topics discussed, dissenting opinions (if any) and meeting resolutions. A copy of the minutes is submitted to the Secretary of the Board of Commissioners to be reported to the Board of Commissioners.

In 2020, the Nomination and Remuneration Committee held 8 meetings. The following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the Nomination and Remuneration Committee in these meetings.

#### Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Minutes and Attendance of Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
23 Januari 2020 January 23, 2020	Eksternal External	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-
27 Maret 2020 March 27, 2020	Eksternal External	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-

**Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi**  
 Minutes and Attendance of Meetings of the Nomination and Remuneration Committee

<b>Tanggal</b> Date	<b>Tempat</b> Location	<b>Agenda</b>	<b>Peserta</b> Participants	<b>Alasan Ketidakhadiran</b> Reasons for Absence
29 April 2020 April 29, 2020	Online Meeting	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-
8 Mei 2020 May 8, 2020	Eksternal External	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-
28 Mei 2020 May 28, 2020	Online Meeting	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-
3 Agustus 2020 August 3, 2020	Online Meeting	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-
6 Oktober 2020 October 6, 2020	Online Meeting	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-
18 Desember 2020 December 18, 2020	Online Meeting	Rapat internal KNR Internal Meeting of the Nomination and Remuneration Committee	Seluruh anggota KNR All members of the Nomination and Remuneration Committee	-



### Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat

Recapitulation of the Attendance of the Nomination and Remuneration Committee at the Meeting

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Percentase Kehadiran Attendance Percentage
Gatot Darmasto	8	8	100%
Sukendar	8	8	100%
Gellwynn Jusuf	8	8	100%
<b>Rata-rata</b> Average			<b>100%</b>

### Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perusahaan mengikutsertakan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi sebagai bentuk program untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

### Kebijakan Remunerasi Bagi Komite Nominasi dan Remunerasi

Penentuan jumlah remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa penghasilan anggota Komite, yakni berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/ anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut.

### Development of Competence Committee Nomination and Remuneration

The Company involves the Nomination and Remuneration Committee in competency development programs as a form of activities to add insight and knowledge. The list of training activities and competency improvement followed by the Nomination and Remuneration Committee throughout 2020 can be seen in the Company profile chapter in this annual report.

### Remuneration Policy for the Nomination and Remuneration Committee

The remuneration of the Nomination and Remuneration Committee is determined by referring to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning supporting organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises which regulate the income of committee members, namely the maximum honorarium of 20% (twenty percent) of the salary of the Company's President Director with Tax Provisions borne by the Company. The Nomination and Remuneration Committee is not allowed to receive other income than the honorarium. Members of the Board of Commissioners who are chairman/member of the Nomination and Remuneration Committee are not given additional income from the position.



## ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Direksi memiliki organ pendukung yang menjalankan fungsi bisnis serta perencanaan dan kontrol terhadap berbagai aspek. Fungsi perencanaan dan kontrol terhadap berbagai aspek, didukung oleh Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern serta Komite pendukung lainnya. Dasar pembentukan organ pendukung Dewan Komisaris adalah Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

### Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung dalam struktur organ tata kelola Perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, Sekretaris Perusahaan berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perusahaan, dan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekretaris Perusahaan juga memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, perencanaan serta memastikan efektivitas dan transparansi komunikasi perusahaan, hubungan kelembagaan, hubungan investor dengan tetap memperhatikan prinsip standar etika Perusahaan, prinsip tata kelola Perusahaan, dan nilai-nilai Perusahaan.

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### Pejabat Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 056/SK-DIR/BPUI/SDM/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Perusahaan telah menunjuk Oktarina Dwidya Sistha sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

## THE BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGANS

The Board of Directors is equipped with supporting organs who conduct business functions as well as planning and control of various aspects. Planning and control functions for various aspects, supported by the Corporate Secretary and Internal Audit/ Internal Supervision Unit and other supporting committees. The basis of the establishment of supporting organs of the Board of Commissioners is the Articles of Association of the Company and Regulation of the Minister of State for BUMN No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and its amendment in No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

### Corporate Secretary

The Corporate Secretary is a supporting organ in the structure of corporate governance organs which have an important role in ensuring the Company compliance with regulations regarding openness requirements which is in line with GCG principles. In addition, the Corporate Secretary performs a role in facilitating communication between corporate organs, and is a connecting entity that bridges the interests between the Company and shareholders, regulators, and other stakeholders.

The Corporate Secretary also has the responsibility in preparing policy, planning and ensuring the effectiveness and transparency of corporate communication, institutional relations, investor relations by regard to the principle of company ethical standards, the principle of corporate governance, and Corporate values.

### Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is directly responsible to the Board of Directors and is appointed and dismissed based on the Decree of the Board of Directors based on the Company's internal mechanism with the approval from the Board of Commissioners.

### Corporate Secretary Officials

Based on Directors Decree No. 056/SK-Dir/BPUI/SDM/XII/2020 dated December 14, 2020, the Company has appointed Oktarina Dwidya Sistha as Head of the Corporate Secretary Division.



## Oktarina Dwidya Sistha

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

Menjabat sejak 14 Desember 2020 | In position since December 14, 2020

### Data Pribadi

Warga negara Indonesia  
Usia 39 tahun  
Kehadiran Jakarta

### Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

### Pendidikan

- Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2019)
- Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (2001)

### Pengalaman Kerja

Legal Head Division di LPS

### Personal Data

Indonesian citizens  
39 years old  
Born in Jakarta

### Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

### Education

- Bachelor of Law from University of Indonesia (2001)
- Master of Law from University of Indonesia (2019)

### Work Experience

Legal Head Division in LPS

## Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan administrasi dalam pengambilan keputusan Perusahaan, menjalankan fungsi komunikasi korporat, juga bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Sehingga Sekretaris Perusahaan memiliki peran yang strategis dalam penerapan kebijakan tata kelola Perusahaan.

Sebagaimana bentuk komitmen terhadap transparansi bagi semua pemangku kepentingan, Perusahaan menunjuk seorang Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dan Direksi serta mengikuti prosedur yang mengatur kegiatan kerja masing-masing maupun interaksi di antara keduanya, menjadi penghubung Perusahaan dengan regulator dan berbagai lembaga terkait, menyiapkan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada Direksi, mengoordinasikan penyelenggaraan RUPS, dan mengadministrasikan dokumen Perusahaan antara lain Risalah Rapat.

Tugas Sekretaris Perusahaan meliputi:

- Membuat, melaksanakan dan memonitor kebijakan dan program kerja di Divisi Sekretaris Perusahaan terkait komunikasi Perusahaan, penerapan tata kelola korporasi, protokoler dan tata usaha Direksi, dan hubungan lembaga dan pelayanan masyarakat;
- Memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;

## Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary has the duties and responsibilities to ensure administrative compliance in the Company's decision making, operating the function of corporate communication, and act as a liaison (Liaison Officer) between the Company and stakeholders. For that reason, the Corporate Secretary has a strategic role in implementing the Company Governance Policy.

As a form of commitment to transparency for all stakeholders, the Company appoints a Corporate Secretary who is responsible for assisting the Board of Commissioners and Board of Directors and following the procedures that regulate their respective work activities and interactions between the two, becomes the Company's liaison with regulators and various related institutions, prepare reports on the accountability of its duties to the Board of Directors, coordinate the implementation of the GMS, and administer Company documents, which includes the minutes of the meeting.

The duty of the Corporate Secretary includes:

- Creating, implementing, and monitoring work policies and programs in the Corporate Secretary Division related to corporate communication, the implementation of corporate governance, protocols and administration of the Board of Directors, relationship between institutions, and community services;
- Ensuring compliance with regulations regarding the requirements of information transparency which is in line with the implementation of good corporate governance principles;



3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka pemenuhan GCG di antaranya penyelenggaraan asesmen GCG, menyelenggarakan Rapat Direksi, mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perusahaan dan RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) termasuk penyiapan bahan/materi rapat-rapat tersebut;
4. Melakukan pengelolaan informasi dan strategi komunikasi Perusahaan untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemegang saham (*Shareholders*) dengan tetap memperhatikan informasi rahasia Perusahaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, termasuk menjadi juru bicara Perusahaan;
5. Melakukan pengelolaan informasi dan strategi komunikasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan termasuk di antaranya penyelenggaraan kegiatan hari raya keagamaan, kegiatan hari nasional, kegiatan ulang tahun Perusahaan dan Anak Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan menyampikannya kepada Regulator terkait secara tepat waktu, serta memonitor penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Anak Perusahaan;
7. Menjadi penghubung (*liaison officer*) untuk membina hubungan dengan lembaga/Instansi Pemerintah dan/atau non-Pemerintah pada skala Nasional;
8. Membuat, menatausaha dan/atau menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah Rapat Direksi, risalah Rapat Dewan Komisaris dan risalah RUPS Perusahaan;
9. Melakukan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat;
10. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembentukan citra Perusahaan pada baik internal ataupun eksternal;
11. Menyusun dan mengimplementasikan pedoman Good Corporate Governance (GCG), pedoman hubungan Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*), dan Kode Etik Perusahaan;
3. Conducting corporate activities in the framework of GCG fulfillment, including the implementation of the GCG assessment, organize the Board of Directors' meetings, coordinate the implementation of the meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, and the Company's Annual General Meeting of Shareholders (GMS), and GMS on the Company's Budget Work Plan (RKAP) which includes preparation of materials of these meetings;
4. Management of information and company communication strategies to be submitted to stakeholders and shareholders while still paying attention to the Company's confidential information regularly and/or at any time when prompted, including becoming a spokesperson for the Company;
5. Managing information and communication strategies between the Company and subsidiaries, including the implementation of religious holiday activities, national day activities, corporate and subsidiaries' anniversary activities;
6. Compiling annual reports and corporate sustainability reports, and delivering it to regulators in a timely manner, and monitoring the submission of annual reports and sustainability reports of subsidiaries;
7. Acting as a liaison (Liaison Officer) to foster relationships with government and/or non-government institutions on a national scale;
8. Creating, administering and/or archiving the Company's documents, including but not limited to, list of shareholders, special listings, minutes of the Board of Directors 'Meeting, Minutes of the Board of Commissioners' Meeting and Minutes of the Company's GMS;
9. Conducting a Company's introduction program to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have just been appointed;
10. Planning, implementing and evaluating the Company's image establishment program both internally or externally;
11. Compiling and implementing the Good Corporate Governance (GCG) guidelines, guidelines on the relationship of the Board of Directors and Board of Commissioners (*Board Manual*), and the Company's code of ethics;



12. Mengelola program kegiatan sosial kemasyarakatan, baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
  13. Mengelola tata usaha (*office of the board*) yang mencakup ketersediaan informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris Direksi, Protokoler dan/atau *Personal Assistant*;
  14. Mengelola remunerasi, fasilitas, dan pelatihan Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris;
  15. Mengelola hubungan lembaga dengan Instansi Pemerintah dan/atau non-Pemerintah Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;
  16. Bertanggung jawab dalam pemenuhan dan pemutakhiran atas setiap perizinan korporasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  17. Mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anak Perusahaan terkait kegiatan kesekretariatan Perusahaan di Anak Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama;
  18. Membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sekretaris Perusahaan kepada Direktur Utama secara berkala;
  19. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap karyawan-karyawan di dalam Divisi Sekretaris Perusahaan; dan
  20. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit.
12. Managing community social activity programs, both through the Partnership and Community Development Program (PKBL) or through Corporate Social Responsibility (CSR) in the Company and Subsidiaries;
  13. Managing Administration (Office of the Board) which includes the availability of information in the framework of the smooth implementation of the activities of the Board of Commissioners and Board of Directors, including coordinating the implementation of the duties of the Secretary of the Board of Directors, Protocol Officials and/or Personal Assistants;
  14. Managing Remuneration, Facilities and the trainings of the Board of Directors, Board of Commissioners and Organs of the Board of Commissioners;
  15. Managing the relationship with government institutions and/or non-governmental institutions, including facilitating communication with potential partners/investors;
  16. Being responsible for the fulfillment and updates of every corporate licensing in accordance with applicable regulations;
  17. Submitting, preparing, and creating analysis and internal memo related to a request from a subsidiary concerning the Company's secretarial activities in subsidiaries to be followed up to the President Director;
  18. Writing reports related to activities carried out by the Corporate Secretary Division to the President Director regularly;
  19. Conducting direct coaching and supervision of employees in the Corporate Secretary Division; and
  20. Completing any pending matters and the follow-up on audit findings.

Sekretaris Perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan memastikan Perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi peraturan tersebut. Sekretaris Perusahaan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta.

The Corporate Secretary must always keep up with the development of prevailing regulations and ensure that the Company fulfills and complies with these regulations. The Corporate Secretary will provide information relating to the implementation of the duties to the Board of Directors regularly and to the Board of Commissioners if requested.

## Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan memiliki kewenangan yang memadai. Adapun

## Organizational Structure of the Corporate Secretary

Structurally, the Corporate Secretary is responsible to the President Director or member of the Board of Directors appointed by the President Director who has adequate authority. The description of

gambaran tentang cakupan fungsi Sekretaris Perusahaan sebagaimana yang terlampir pada bagan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan berikut ini:



### Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2020

Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan program kerja dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan 2020 sesuai dengan pembagian bidang dalam struktur organisasi Sekretaris Perusahaan, meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja terkait komunikasi perusahaan dan hubungan lembaga;
2. Memastikan ketepatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
3. Melakukan pengelolaan informasi dan strategi komunikasi Perusahaan untuk disampaikan kepada stakeholders dan shareholders dengan tetap memperhatikan informasi rahasia Perusahaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
4. Melakukan pengelolaan informasi dan strategi komunikasi antara Perusahaan dan Anak Perusahaan;
5. Menjadi penghubung (*liason officer*) untuk membina hubungan dengan lembaga/Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah pada skala Nasional;

the coverage of the Corporate Secretary function is as attached to the Chart of the Organizational Structure of the following Corporate Secretary.

### Implementation of the Corporate Secretary Duties in 2020

The Corporate Secretary has implemented a work program and submitted a report in the form of a 2020 Corporate Secretary report in accordance with the distribution of area in the organizational structure of the Corporate Secretary, which includes:

1. Develop and implement work programs related to corporate communications and institutional relations;
2. Ensure that the compliance with regulations regarding information disclosure is in line with the implementation of the Good Corporate Governance Principles;
3. Manage the Company's information and communication strategies to be conveyed to stakeholders and shareholders while taking into account the Company's confidential information periodically and/or at any time if requested;
4. Manage information and communication strategies between the Company and its Subsidiaries;
5. Become a liaison officer to build relationships with government and/or non-government institutions/agencies on a national scale;



6. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembentukan citra Perusahaan, baik internal ataupun eksternal;
7. Menyusun dan mengimplementasikan pedoman GCG dan Kode Etik Perusahaan;
8. Mengelola hubungan dengan Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;
9. Melakukan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat;
10. Membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan untuk disampaikan kepada Direktur Utama secara berkala;
11. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit;
12. Menyusun dan melaksanakan program kerja terkait penerapan tata kelola korporasi serta protokoler dan tata usaha Direksi;
13. Memastikan ketaatan dalam mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan informasi sejalan dengan penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
14. Melaksanakan kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka pemenuhan GCG di antaranya penyelenggaraan asesmen GCG, menyelenggarakan Rapat Direksi, mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, RUPS Tahunan Perusahaan dan RUPS RKAP, termasuk penyiapan bahan/materi rapat-rapat tersebut;
15. Menyelenggarakan seluruh RUPS Anak Perusahaan serta berkoordinasi dengan Divisi terkait dalam hal penyiapan bahan/materi RUPS tersebut;
16. Membuat, menatausahakan dan/atau menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah rapat Direksi, risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah RUPS;
17. Mengelola tata usaha (*office of the board*) yang mencakup ketersediaan informasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris dan Direksi termasuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris Direksi, Protokoler dan/atau *Personal Assistant*;
18. Mengelola remunerasi, fasilitas, dan pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Dewan Komisaris;
6. Plan, implement, and evaluate the Company's image establishment program, both internally and externally;
7. Develop and implement GCG guidelines and the Company's Code of Ethics;
8. Manage relationships with Government and/or non-National Government Agencies, including facilitating communication with potential partners/investors;
9. Hold Company introduction program to newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
10. Prepare reports related to activities which have been carried out to be submitted to the President Director on a regular basis;
11. Complete all pending matters and complete follow-up on audit findings;
12. Develop and implement work programs related to the implementation of corporate governance as well as protocols and administration of the Board of Directors;
13. Ensure that compliance with regulations regarding information disclosure is in line with the implementation of the Good Corporate Governance Principles;
14. Perform corporate activities in fulfilling GCG, including conducting GCG assessments, holding Board of Directors Meetings, coordinating the implementation of the Board of Commissioners and Directors Meetings, the Company's Annual GMS and RKAP GMS, including the preparation of materials for these meetings;
15. Organize the entire GMS of Subsidiaries and coordinate with the relevant Divisions in terms of preparing the materials for the GMS;
16. Create, administer and/or keep Company documents, including but not limited to the list of shareholders, special register, minutes of the Board of Directors meeting, minutes of the Board of Commissioners meeting and minutes of the GMS;
17. Manage the administration (*office of the board*) which includes the availability of information for the smooth implementation of the activities of the Board of Commissioners and the Board of Directors including coordinating the implementation of the duties of the Secretary to the Board of Directors, Protocol and/or Personal Assistant;
18. Manage remuneration, facilities, and training for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Organs of the Board of Commissioners;



19. Menyusun dan mengimplementasikan pedoman GCG, pedoman hubungan Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*), dan Kode Etik Perusahaan;
20. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan, dan menyampaikannya kepada Regulator terkait secara tepat waktu, serta memonitor penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Anak Perusahaan;
21. Mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa, dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anak Perusahaan terkait kegiatan kesekretariatan Perusahaan di Anak Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama;
22. Bertanggung jawab dalam pemenuhan dan pemutakhiran atas setiap perizinan korporasi sesuai ketentuan yang berlaku;
23. Membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan untuk disampaikan kepada Direktur Utama secara berkala.
19. Develop and implement GCG guidelines, guidelines for the relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners (*Board Manual*), and the Company's Code of Ethics;
20. Compile Annual Reports and Company Sustainability Reports, and submit them to the relevant Regulators in a timely manner, as well as monitor the submission of Annual Reports and Sustainability Reports of Subsidiaries;
21. Submit, prepare, analyze, and make Internal Memos in connection with requests from Subsidiaries regarding secretarial activities of the Company in Subsidiaries to be followed up to the President Director;
22. Is responsible for the fulfillment and updating of every corporate license in accordance with applicable regulations;
23. Prepare reports related to activities which have been carried out to be submitted to the President Director on a regular basis.

### **Program Pengembangan Kompetensi**

Perusahaan mengikutsertakan sumber daya manusia dalam lingkup organ Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi, untuk menunjang pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Sementara, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Kepala Bagian dan Staf dalam lingkup organ Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **Competency Development Program**

The Company involves human resources within the scope of the Corporate Secretary organ in the competency development activities, to support the implementation of the Corporate Secretary function. The list of training and competency improvement activities that the Corporate Secretary participated in throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report. Meanwhile, the competency development programs followed by the Head of Sections and Staff within the scope of the Corporate Secretary organs throughout 2020 are as follows:



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
I Gede Suhendra, Plt. Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan I Gede Suhendra, Acting Head of Corporate Communications Department		Produk Knowledge BAV BAV Product Knowledge	IFG/7 Februari 2020 IFG, February 7, 2020	Bahana
	Webinar	Webinar <i>Marketeers</i> <i>Hangout</i> Marketeers Hangout Webinar	IFG/17 – 18 Juni 2020 IFG, June 17-18, 2020	PT Markplus Indonesia
Ambarwita W, Staf Sekretaris Perusahaan Ambarwita W, Corporate Secretary Staff	Pelatihan Training	Pelatihan Dasar Asuransi Basic Insurance Training	IFG/12 Maret 2020 IFG, March 12, 2020	Bahana
	Pelatihan Training	Pelatihan Dasar Asuransi Basic Insurance Training	IFG/12 Maret 2020 IFG, March 12, 2020	Bahana
Dewa Agung Rudy, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Dewa Agung Rudy, Head of Corporate Secretary Division	Webinar	<i>Webinar Installing</i> <i>Optimism</i> Installing Optimism Webinar	IFG/5 Juni 2020 IFG, June 5, 2020	ILM
	Pelatihan Training	Biaya Pelaksanaan Pelatihan <i>Leader as</i> <i>Mening Maker</i> Training Cost of Leader as Mening Maker Training	IFG/19 September 2020 IFG, September 19, 2020	ESQ Membership Center

## Unit Audit Internal

Audit Internal merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal khususnya terkait pengendalian di level operasional Perusahaan. Fungsi Audit Internal di lingkup Perusahaan dijalankan oleh Unit Audit Internal yang merupakan bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan.

Audit Internal bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consultative management*) secara independen dan objektif dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola Perusahaan serta memberikan saran perbaikan, sesuai dengan SK struktur organisasi yang berlaku per 31 Desember 2020 adalah SK 005/SK-DIR/CORP/BPUI/III/2020 tanggal 2 Maret 2020.

## Internal Audit Unit

Internal audit is an important part of the internal control system, especially related to control at the Company's operational level. The internal audit function in the Company is managed by an Internal Audit Unit, a part of internal control, which is significantly aimed at assisting management to realize objectives/targets through examining adequacy and implementation of the internal control process, risk management and corporate governance.

The Internal Audit Unit's duties and responsibilities are to conduct the audit (*assurance*) and consultation (*consultative management*) independently and objectively in assessing the effectiveness of the internal control system, risk management and the process of corporate governance, as well as provide advice on improvement, in accordance with the decree concerning organizational structure that applies per 31 Dec 2020 which was SK 005/SK-DIR/CORP/ BPUI/III/2020 on March 2, 2020.



## Pejabat Unit Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/BPUI/SDM/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, Perusahaan telah menunjuk Fariana Deniwaty sebagai Kepala Unit Audit Internal.

## Internal Audit Unit Official/s

Based on Directors Decree No. 001/SK-DIR/BPUI/SDM/III/2020 dated March 2, 2020, the Company has appointed Fariana Deniwaty as the Head of the internal Audit Unit.

### Fariana Deniwaty

**Kepala Unit Audit Internal | Head of Internal Audit Unit  
Menjabat sejak 2 Maret 2020 | In position since March 2, 2020**

#### Data Pribadi

Warga negara Indonesia  
Usia 49 tahun  
Kelahiran Jakarta, 3 Mei 1971

#### Domisili

Tangerang Selatan, Ciputat Timur, Indonesia

#### Pendidikan

- Magister Management in General Management, IPMI Business School, Jakarta, September 2009
- Post Graduate Diploma Intercultural Management, Japan American Institute Management & Science (JAIMS), Honolulu, Juli 2003
- Sarjana Sosial Ekonomi Perikanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Mei 1994

#### Sertifikasi

- Qualified Internal Auditor (QIA)
- Enterprise Risk Management Certified for Professional (ERMCP)
- Certified Enterprise Risk Governance (CERG)
- Wakil Manajer Investasi (WMI)

#### Pengalaman Kerja

- Investment Analyst, Remedial & Restructuring di PT Bahana Artha Ventura, 1994-2001
- Risk Management & Compliance di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2001-2005
- Satuan Pengawas Internal di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2005-2007
- Risk Management & Compliance di PT Bahana Sekuritas & PT Bahana TCW Investment Management, 2007 to 2008
- Risk Management & Compliance di PT Bahana Artha Ventura & PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2009-2012
- Risk Management Group Head di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2012-2018
- General Affair Head di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2019
- Kepala Divisi Satuan Pengawas Internal di PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Mei 2019 sampai sekarang

#### Personal Data

Indonesian citizens  
49 years old  
Born in Jakarta, May 3, 1971

#### Domicile

South Tangerang, Ciputat Timur, Indonesia

#### Education

- Bachelor of Fisheries Social Economics, Bogor Agricultural Institute (IPB), Bogor, May 1994
- Post Graduate Diploma on Intercultural Management, Japan American Institute Management & Science (JAIMS), Honolulu, July 2003
- Master of Management, specializing in General Management, IPMI Business School, Jakarta, September 2009

#### Certification

- Qualified Internal Auditor (QIA)
- Enterprise Risk Management Certified for Professional (ERMCP)
- Certified Enterprise Risk Governance (Cerg)
- Investment Manager Representative

#### Work Experience

- Investment Analyst, Remedial & Restructuring at PT Bahana Artha Ventura, 1994-2001
- Risk Management & Compliance at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2001-2005
- Internal Audit Unit at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2005-2007
- Risk Management & Compliance at PT Bahana Sekuritas & PT Bahana TCW Investment Management, 2007-2008
- Risk Management & Compliance at PT Bahana Artha Ventura & PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2009-2012
- Risk Management Group Head at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2012-2018
- General Affair Head at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), 2019
- Head of Internal Audit Unit Division at PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), May 2019-Now

## Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Unit Audit Internal memiliki tugas untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Berikut rincian tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal:

## Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

The internal audit unit has the duties to assist the organization to achieve its objectives, through a systematic and regular approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, as well as control and governance process. The following are the details of the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit:



1. Membuat, melaksanakan, dan memonitor kebijakan dan program kerja terkait kegiatan Pengawas Internal;
2. Membuat dan mengusulkan Piagam Audit Internal (PAI) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, serta mengevaluasi PAI secara berkala;
3. Membuat program kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko dan mencakup pengawasan pada Perusahaan dan melakukan review atas PKAT Anak Perusahaan;
4. Menyusun, me-review, dan/atau melakukan evaluasi Pedoman Strategis kegiatan Internal Audit yang akan diberlakukan di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
5. Melaksanakan pemeriksaan kinerja operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikannya sesuai PKAT untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan praktik tata kelola, termasuk pelaksanaan audit khusus sesuai permintaan Direktur Utama;
6. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
7. Melakukan evaluasi dan review atas praktik tata kelola Perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko dan pengendalian internal;
8. Memberikan konsultasi terkait kegiatan usaha Perusahaan yang berhubungan dengan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dalam memperbaiki kegiatan operasional Perusahaan;
9. Sebagai pendamping auditor eksternal namun tidak terbatas kepada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
10. Mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anak Perusahaan terkait kegiatan internal audit di Anak Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Utama;
11. Melaporkan hasil aktivitas pekerjaan kepada Direktur Utama secara berkala;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap karyawan-karyawan di dalam Divisi Satuan Pengawas Internal; dan
13. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit.
1. Draft, implement, and monitor policies and work programs related to internal supervisory activities;
2. Draft and propose Internal Audit Charter (PAI) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, and evaluate PAI regularly;
3. Create a Risk-based Annual Audit Work Program (PKAT) and include supervision of the Company and conduct a review of PKAT of subsidiaries;
4. Compile, review, and/or evaluate Strategic Guidelines for internal audit activities which will be applied in the Company and subsidiaries;
5. Conduct operational and financial performance evaluation, assess control, management and implementation as well as provide advice on improvement according to PKAT to increase internal control activities, risk management and governance practices, including the implementation of special audits according to the request of the President Director;
6. Monitor follow-up on the results of both internal and external examinations;
7. Conduct evaluation and review of Good Corporate Governance (GCG), Risk Management and Internal Control practices;
8. Provide consultation related to Company business activities related to governance, risk management, and internal control in improving Company operational activities;
9. Act as the partner to the external auditor but it is not limited to the examination by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) and Financial and Development Agency (BPKP);
10. Submit, prepare, make an analysis and internal memo in relation to a request from subsidiaries regarding internal audit activities in subsidiaries to be followed up to the President Director;
11. Report the results of work activities to the President Director regularly;
12. Conduct direct coaching and supervision towards employees in the Internal Audit Unit Division; and
13. Complete any pending matters and the follow-up of audit findings.

## Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Unit Audit Internal

Jabatan Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

## Struktur Organisasi Unit Audit Internal

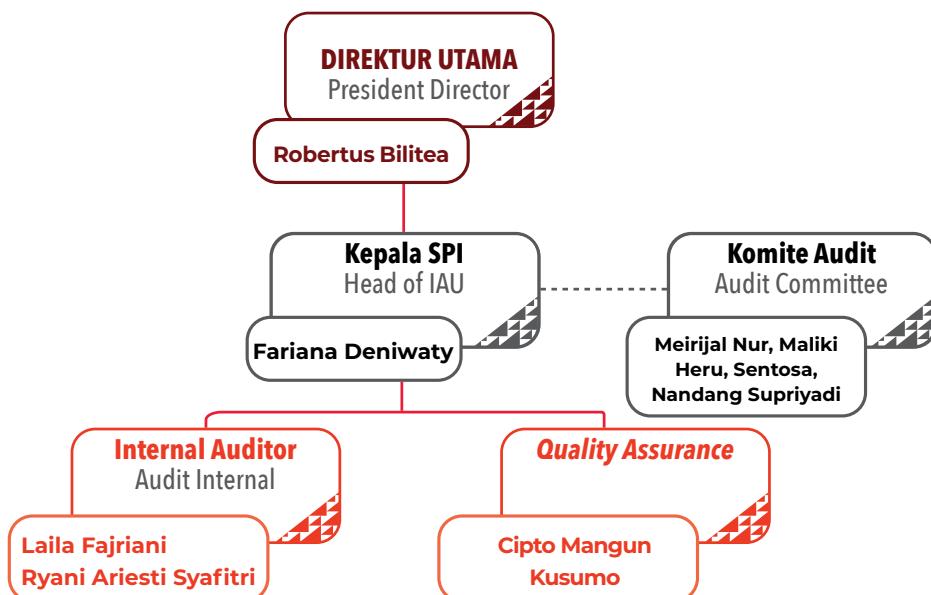
Unit Audit Internal Perusahaan dipimpin oleh Kepala Unit Audit Internal dan dibantu oleh 3 orang. Struktur Organisasi Unit Audit Internal terlihat pada bagan keorganisasian sebagai berikut ini:

## Appointment and Dismissal of the Head of the Internal Audit Unit

The Head of the Internal Audit Unit was appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

## Internal Audit Unit Organizational Structure

The Company's internal audit unit is led by the Head of the Internal Audit Unit and is assisted by 3 members. The internal audit unit organizational structure is seen in the following organizational chart:



## Sertifikasi Profesi Unit Audit Internal

Dalam rangka terus meningkatkan mutu dan kompetensi auditor internal, Perusahaan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Program tersebut dilakukan dengan mengikutisertakan auditor internal dalam program sertifikat. Daftar staf Unit Audit Internal yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut:

## Professional Certification of Internal Audit Unit

To continue in improving the quality and competence of internal auditors, the Company conducts a systematic and tiered auditor competency development program. The program is carried out by involving internal auditors in the certification programs. The list of internal audit unit staff who have participated in the certification programs are as follows:

Sertifikasi Profesi Professional Certifications	Jumlah Auditor Number of Auditors
QIA	1
CPA	1
ACPA	1
CA	1



## Rapat Unit Audit Internal

Di tahun 2020, Unit Audit Internal menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Unit Audit Internal dalam rapat-rapat tersebut.

## Internal Audit Unit's Meetings

In 2020, the internal audit unit held 8 meetings. The following is the agenda and minutes of the meetings, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the internal audit unit in these meetings.

### Risalah dan Kehadiran Rapat Unit Audit Internal

Minutes of Meetings and Attendance of the Internal Audit Unit meetings

Tanggal Date	Agenda Agenda
8 April 2020 April 8, 2020	Draft LKA Probity Audit Draft LKA Probity Audit
19 Mei 2020 May 19, 2020	Pembahasan Tindak Lanjut Cobit-5 yang telah jatuh tempo The discussion of the follow-up of Cobit-5 which has due
20 Mei 2020 May 20, 2020	Diskusi Audit Transaksi Citos Discussion of the Citos Transaction Audit
2 Juni 2020 June 2, 2020	LKA Citos Citos LKA
11 Juni 2020 June 11, 2020	Audit Transaksi Citos Citos Transaction Audit
3 Juli 2020 July 3, 2020	Diskusi LKA Citos Citos LKA Discussion
7 Juli 2020 July 7, 2020	Diskusi LKA Citos Citos LKA Discussion
18 November 2020 November 18, 2020	Rapat Internal SPI Internal Audit Unit's Internal Meeting

## Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Tahun 2020

Di tahun 2020, Unit Audit Internal melaksanakan program kerja pengawasan yang rencana dan realisasinya beserta temuan dan tindak lanjut hasil audit adalah sebagai berikut.

## Brief Report on the Implementation of Duties of the Internal Audit Unit in 2020

In 2020, the Internal Audit Unit implemented the supervisory work program whose plans and realization as well as the findings and follow-up of the audit's results were as follows.

### Rencana dan Realisasi Program Kerja Unit Audit Internal per 31 Desember 2020

Plan and Realization of Internal Audit Unit Working Program As of December 31, 2020

Rencana Plans	Realisasi Realizations	Pencapaian Achievement
<b>Audit</b> In the Context of Audit		
Audit Divisi Sumber Daya Manusia Audit of the Human Resources Division	Audit Divisi Sumber Daya Manusia Audit of the Human Resources Division	100%
Probity Audit I (Pengadaan Konsultan IFG) Probity Audit I (Procurement of IFG Consultants)	Probity Audit I (Pengadaan Konsultan IFG) Probity Audit I (Procurement of IFG Consultants)	100%
Audit pembelian aset Cilandak Town Square (CITOS) Audit on Cilandak Town Square (Citos) Asset Purchase	Audit pembelian aset Cilandak Town Square (CITOS) Audit on Cilandak Town Square (Citos) Asset Purchase	100%
Audit DTT PT Bahana Sekuritas DTT Audit PT Bahana Sekuritas	Audit DTT PT Bahana Sekuritas DTT Audit PT Bahana Sekuritas	100%


**Rencana dan Realisasi Program Kerja Unit Audit Internal per 31 Desember 2020**

Plan and Realization of Internal Audit Unit Working Program As of December 31, 2020

<b>Rencana</b> Plans	<b>Realisasi</b> Realizations	<b>Pencapaian</b> Achievement
Audit DTT PT Bahana Kapital Investa DTT Audit PT Bahana Kapital Investa	Audit DTT PT Bahana Kapital Investa DTT Audit PT Bahana Kapital Investa	100%
Probity Audit II Probity Audit II	Probity Audit II Probity Audit II	100%
Audit pendirian IFG Life Audit on IFG Life Establishment	Audit pendirian IFG Life Audit on IFG Life Establishment	100%
<b>Review</b> <b>In the Context of Review</b>		
Review Laporan Keuangan Kuartal Review of Quarterly Financial Statements	Review Laporan Keuangan Kuartal Review of Quarterly Financial Statements	100%
<b>Pendampingan Audit</b> <b>In the Context of Audit Accompaniment</b>		
Pendampingan audit internal ISO 9001 ISO 9001 Internal Audit Accompaniment	Pendampingan audit internal ISO 9001 ISO 9001 Internal Audit Accompaniment	100%
Pendampingan audit internal ISO 37001 ISO 37001 Internal Audit Accompaniment	Sertifikasi sebagai auditor ISO 37001 ISO 37001 Internal Audit Accompaniment	100%
<b>Konsultasi</b> <b>In the Context of Consultation</b>		
Konsultasi dengan Divisi di IFG dan Anak-anak Perusahaan Consultation with the Divisions at IFG and Subsidiaries	Konsultasi dengan Divisi di IFG dan Anak-anak Perusahaan Consultation with the Divisions at IFG and Subsidiaries	100%
<b>Pedoman Strategis</b> <b>In the Context of Strategic Guidelines</b>		
Subsidiary Governance Internal Audit IFG IFG's Subsidiary Governance Internal Audit	Subsidiary Governance Internal Audit IFG IFG's Subsidiary Governance Internal Audit	100%*
Internal Audit Charter IFG IFG's Internal Audit Charter	Internal Audit Charter IFG BPUI's Internal Audit Charter	100%*
Kebijakan SOP SPI Internal Audit Unit's SOP Policy	Kebijakan SOP SPI Internal Audit Unit's SOP Policy	0%**
<b>Digitalisasi</b> <b>In the Context of Digitalization</b>		
Audit Management System (AMS)	Audit Management System (AMS)	100%
<b>Asesmen</b> <b>In the Context of Assessment</b>		
Internal Control Maturity Level (ICML)	Internal Control Maturity Level (ICML)	100%
Internal Auditor Capability Model (IACM)	Internal Auditor Capability Model (IACM)	100%
Good Corporate Governance (GCG)	Good Corporate Governance (GCG)	100%
<b>Monitoring Tindak Lanjut</b> <b>In the Context of Follow Up Monitoring</b>		
Monitoring Tindak Lanjut Internal Internal Follow-Up Monitoring	Monitoring Tindak Lanjut Internal Internal Follow-Up Monitoring	100%
Monitoring Tindak Lanjut BPK 2015 BPK 2015 Follow-Up Monitoring	Monitoring Tindak Lanjut BPK 2015 BPK 2015 Follow-Up Monitoring	100%
Monitoring Tindak Lanjut BPK 2019 BPK 2019 Follow-Up Monitoring	Monitoring Tindak Lanjut BPK 2019 BPK 2019 Follow-Up Monitoring	100%
Monitoring Tindak Lanjut Hasil Asesmen IACM Follow-up Monitoring on the Results of IACM Assessment	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Asesmen IACM Follow-up Monitoring on the Results of IACM Assessment	100%



## Rencana dan Realisasi Program Kerja Unit Audit Internal per 31 Desember 2020

Plan and Realization of Internal Audit Unit Working Program As of December 31, 2020

Rencana Plans	Realisasi Realizations	Pencapaian Achievement
Monitoring Tindak Lanjut ISO 9001, ISO 37001, ICML dan GCG Follow-Up Monitoring on ISO 9001, ISO 37001, ICML and GCG	Monitoring Tindak Lanjut ISO 9001, ISO 37001, ICML dan GCG Follow-Up Monitoring on ISO 9001, ISO 37001, ICML and GCG	100%
<b>Sosialisasi</b> <b>In the Context of Dissemination</b>		
Sosialisasi Internal Audit Charter Dissemination of Internal Audit Charter	-	0%**
Sosialisasi Whistleblowing System Dissemination of Whistle Blowing System	Sosialisasi Whistleblowing System Dissemination of Whistle Blowing System	100%

\*SPI telah menyelesaikan program kerja ini namun sampai saat ini kedua program tersebut belum disahkan karena masih dalam tahap finalisasi pedoman strategis holding secara keseluruhan.

\*\*Belum direalisasikan.

\* The Internal Audit Unit has completed this work program but until now the two programs have not been ratified because they are still in the final stages of strategic holding guidelines as a whole.

\*\* Has not yet been realized.

## Realisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) per 31 Desember 2020

Realization of the Follow-Up Plan (RTL) As of December 31, 2020

Rencana Tindak Lanjut (RTL) Follow-Up Plan (RTL)	Temuan Findings	Percentase Percentage
RTL Close	14 Temuan 14 findings	82%
RTL Open	3 Temuan 3 findings	18%
Total	17 Temuan 17 findings	100%

## Komite Talenta

Komite Talenta adalah komite yang dibentuk oleh Direksi IFG dalam rangka untuk melakukan evaluasi, penilaian, penetapan, dan memberikan arahan strategis di bidang manajemen talenta IFG. Pengklasifikasian talenta merupakan kegiatan menetapkan kategori talenta berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan hasil assessment kompetensi yang telah dilakukan oleh Divisi SDM IFG, yang dimaksud talenta IFG adalah seluruh karyawan tetap IFG.

## Talent Committee

The Talent Committee is a committee established by IFG's Board of Directors in order to conduct evaluations, assessment, determination, and provide strategic guidance in the IFG talent management. The classification of talents is an activity to determine the talent category based on the results of performance measurement and the results of the competency assessment which has been conducted by the IFG HR Division. What is meant by IFG's Talents are all permanent employees of IFG.

## Struktur Keanggotaan Komite Talenta

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK-DIR/CORP/BPUI/IV/2020 tanggal 15 April 2020, Perusahaan telah menunjuk Direktur Utama sebagai Ketua Komite Talenta Perusahaan dibantu oleh Direktur yang membidangi SDM sebagai Sekretaris Komite dan Direksi lainnya sebagai anggota komite.

## Talent Committee Membership Structure

Based on Directors Decree No. 010/SK-DIR/CORP/BPUI/IV/2020 dated April 15, 2020, the Company has appointed the President Director as Head of the Talent Committee of the Company. He is assisted by Directors in charge of HR as the Secretary of the Committee and other Directors as members of the Committee.



## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Talenta

Tugas dan tanggung jawab Komite Talenta adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan strategis terkait manajemen talenta di IFG dan Anak Perusahaan;
2. Menetapkan kebijakan dan program terkait manajemen talenta di IFG yang diusulkan oleh Direktur yang membidangi SDM;
3. Menetapkan talenta IFG untuk diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan;
4. Melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala atas talenta yang telah ditetapkan;
5. Dalam rangka untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas Komite Talenta dapat meminta Divisi SDM untuk menyediakan tenaga ahli atau konsultan di bidang SDM;
6. Ketua Komite Talenta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pengambilan keputusan Komite Talenta;
7. Sekretaris Komite Talenta bertanggung jawab mengusulkan calon talenta berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi yang telah ditetapkan untuk dibahas bersama seluruh Anggota Komite Talenta;
8. Anggota Komite Talenta bertanggung jawab memberikan masukan dalam penetapan talenta.

## Rapat Komite Talenta

Komite Talenta mengadakan rapat secara berkala sebagaimana tertulis dalam SK Penetapan Komite Talenta yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat dapat diadakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota Komite. Komite Talenta dapat sewaktu-waktu menyelenggarakan rapat berdasarkan usulan dari Ketua Komite atau Sekretaris Komite atau minimal 2 (dua) Anggota Komite.

Di tahun 2020, Komite Talenta menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Talenta dalam rapat-rapat tersebut.

## Duties and Responsibilities of the Talent Committee

The duties and responsibilities of the Talent Committee are as follows:

1. Provide strategic guidance related to talent management at BPUI and its subsidiaries;
2. Establish Policies and Programs related to Talent Management in BPUI proposed by Director in charge of HR;
3. Establish Talent of BPUI to be proposed to the Nomination and Remuneration Committee and to meet the needs of the Company;
4. Perform evaluations and assessments regularly for the talent that has been chosen;
5. In order to carry out the duties as referred to above, the Talent Committee can request the HR Division to provide experts or consultants in the HR;
6. The Head of the Talent Committee is responsible to lead and coordinate the decision making of the Talent Committee;
7. The Secretary of the Talent Committee is responsible for proposing candidates for talent based on the qualifications and classifications that have been set to be discussed with all members of the Talent Committee;
8. The Talent Committee member is responsible for providing input in the selection of the talent.

## Talent Committee Meeting

The Talent Committee holds a regular meeting as written in the Decree of the Talent Committee, which is at least 1 (one) time in 1 (one) month. The meetings can be held if attended by at least 50% of the number of committee members. The Talent Committee can hold meetings at any time based on the proposal from the Head of the Committee, Committee's Secretary, or at least 2 (two) committee members.

In 2020, the Talent Committee held 4 meetings. The following is the agenda and minutes of the meeting, attendance, and recapitulation of the attendance level of the talent committee members in these meetings.



**Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Talenta**  
**Minutes and Attendance of Talent Committee Meetings**

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
24 April 2020 April 24, 2020	Zoom Meeting	Pembahasan Terkait Hasil Klasifikasi Talenta IFG (BOD-1) sebagai Tindak Lanjut Surat Menteri BUMN No. S-254/MBU/04/2020 Discussion related to the results of the IFG Talent Classification (BOD-1) as a follow-up to the SOE Minister's Letter No. S-254/MBU/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Keuangan dan Umum</li> <li>Direktur Bisnis</li> <li>Kepala Divisi SDM</li> <li>President Director</li> <li>Director of Finance and General Affairs</li> <li>Director of Business</li> <li>Head of HR Division</li> </ul>	-
29 April 2020 April 29, 2020	Ruang Meeting 1 IFG, Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18 Ruang Meeting 1, IFG, Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18 Meeting Room 1, IFG, Graha CIMB Niaga Building 18th Floor	Pembahasan Terkait Usulan Pengisian Jabatan Kepala Divisi di IFG Discussion Regarding the Proposal to Fill in the Position of Division Heads at IFG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Keuangan dan Umum</li> <li>Direktur Bisnis</li> <li>Kepala Divisi SDM</li> <li>President Director</li> <li>Director of Finance and General Affairs</li> <li>Director of Business</li> <li>Head of HR Division</li> </ul>	-
11 Mei 2020 May 11, 2020	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengisian Jabatan Direktur Utama PT Bahana Sekuritas</li> <li>Pengisian Jabatan Direksi PT Bahana TCW Investment Management</li> <li>Filling the position of President Director of PT Bahana Sekuritas</li> <li>Filling the Position of the Board of Directors of PT Bahana TCW Investment Management</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Keuangan dan Umum</li> <li>Direktur Bisnis</li> <li>President Director</li> <li>Director of Finance and General Affairs</li> <li>Director of Business</li> </ul>	--
9 Juni 2020 June 9, 2020	Ruang Meeting 1 IFG, Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18 Meeting Room 1, IFG, Graha CIMB Niaga Building 18th Floor	<ol style="list-style-type: none"> <li>Usulan Perubahan Komposisi dan Review Nomenklatur Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)</li> <li>Usulan Perubahan Komposisi dan Review Nomenklatur Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jasa Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)</li> <li>Usulan Perubahan Komposisi dan Review Nomenklatur Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)</li> <li>Proposal on the Changes in Composition and Review of the Nomenclature of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)</li> <li>Proposal on the Changes in Composition and Review of the Nomenclature of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Asuransi Jasa Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja)</li> <li>Proposal on the Changes in Composition and Review of the Nomenclature of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Keuangan dan Umum</li> <li>Direktur Bisnis</li> <li>Kepala Divisi SDM</li> <li>President Director</li> <li>Director of Finance and General Affairs</li> <li>Director of Business</li> <li>Head of HR Division</li> </ul>	-



## Pelaksanaan Tugas Komite Talenta 2020

Komite Talenta telah melaksanakan program kerja dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Komite Talenta 2020 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yang meliputi:

1. Memberikan arahan strategis terkait manajemen talenta di IFG dan Anak Perusahaan;
2. Menetapkan kebijakan dan program terkait manajemen talenta di IFG yang diusulkan oleh Direktur yang membidangi SDM;
3. Menetapkan talenta IFG untuk diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan;
4. Melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala atas talenta yang telah ditetapkan.

## Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi adalah komite yang dibentuk oleh Direksi IFG untuk memastikan penerapan tata kelola TI yang efektif dalam rangka *Good Corporate Governance (GCG)* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("IFG"), maka dibutuhkan Komite Teknologi Informasi IFG yang dapat mendukung dalam memberikan keputusan yang bersifat strategis terkait rencana pengembangan dan pengelolaan TI perusahaan.

### Struktur Keanggotaan Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 069/SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, Perusahaan telah menunjuk Direktur Utama sebagai Ketua Komite Teknologi Informasi dibantu oleh Staff TI Perusahaan sebagai Sekretaris Komite dan Direktur lainnya serta Kepala Divisi TI Perusahaan sebagai anggota komite.

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi

Tugas dan tanggung jawab Komite TI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan menetapkan rencana strategis pengembangan TI perusahaan yang dituangkan ke dalam *IT Master Plan* Perusahaan, yang juga meliputi setiap sumber daya TI yang terkait yaitu antara lain *software*, *hardware*, sumber daya manusia, dan anggaran;

## The Implementation of Duties of the Talent Committee in 2020

The Talent Committee has implemented work programs and submitted reports in the form of a 2020 Talent Committee report according to their duties and responsibilities, which include:

1. Provide strategic guidance related to talent management at IFG and its Subsidiaries;
2. Establish policies and programs related to talent management at IFG proposed by the Director in charge of HR;
3. Determine IFG talents to be proposed to the Nomination and Remuneration Committee to meet the Company's needs;
4. Conduct periodic evaluations and assessments of the talents that have been assigned.

## Information Technology Committee

The Information Technology Committee is a committee established by the IFG's Board of Directors to ensure the implementation of effective information technology governance in the context of GCG in the Company (Persero) of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ("BPUI"). The Information Technology Committee of PT BPUI is required to provide strategic decisions related to the development and management plan of the Company's information technology ("IT").

### The Company's Information Technology Committee Membership Structure

Based on Directors Decree No. 069 /SK-DIR/CORP/BPUI/XII/2018 Date December 17, 2018, the Company has appointed the President Director as Head of the Company's Information Technology Committee assisted by IT staff of the Company as Secretary of the Committee and other Directors and IT Head of the Company as a member of the Committee.

### Duties and Responsibilities of the Information Technology Committee

The duties and responsibilities of the Information Technology Committee are as follows:

1. Providing guidance and establishing a strategic plan for the Company's information technology development, which is detailed into the Company's Information Technology Master Plan, which also includes any related information technology resources, including software, hardware, human resources, and budget;



2. Menetapkan prioritas dari program-program kerja TI perusahaan;
3. Memutuskan dan menetapkan implementasi suatu sistem TI untuk digunakan secara penuh di lingkungan perusahaan.

### Rapat Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi mengadakan rapat secara berkala sebagaimana tertulis dalam SK Penetapan yakni paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Komite Teknologi Informasi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Komite Teknologi Informasi. Dalam setiap rapat Komite Teknologi Informasi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Komite Teknologi Informasi serta memuat hal-hal yang diputuskan.

Di tahun 2020, Komite Teknologi Informasi menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Komite Teknologi Informasi dalam rapat-rapat tersebut.

2. Establishing priorities of the Company information technology work programs;
3. Deciding and setting the implementation of an information technology system to be used within the Company.

### Information Technology Committee's Meetings

The Information Technology Committee holds a regular meeting as written in the decree, which is at least 2 (two) times in 1 (one) year. Information Technology Committee Meeting is legitimate and entitled to make a binding decision if attended by the Head and all members of the Information Technology Committee. In each Information Technology Committee meeting, minutes of meetings must be made and signed by the Chairperson and all members of the Information Technology Committee and the minutes must contain the meetings resolutions and decisions.

In 2020, the Information Technology Committee held 3 meetings. The following is the agenda and minutes of the meeting, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the Information Technology Committee members in these meetings.

### Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Teknologi Informasi

Minutes and Attendance of Information Technology Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
26 Mei 2020 May 26, 2020	Ruang Rapat IFG IFG Meeting Room	Pemaparan Kondisi TI saat ini, Target TI dalam holding, dan Rencana Jangka Pendek, Menengah Panjang Exposure to current IT conditions, Holding's IT targets and short, medium, and long-term plans	Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Umum, Direktur Bisnis, Kadiv TI, Staff TI President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, Head of IT Division, IT Staff	-
4 November 2020 November 4, 2020	Ruang Rapat 1 IFG IFG Meeting Room 1 of IFG	Persetujuan Prinsip MPTI Information Technology Master Plan Principles Approval	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Kadiv SDM, Kadiv TI, Kadiv Keuangan, Kadiv Sekretaris Perusahaan President Director, Director of Business, Head of HR Division, Head of Finance Division, Head of IT Division, Head of Corporate Secretary Division	Direktur Keuangan tidak hadir karena Meeting dengan Pejabat Kejaksaan Agung Director of Finance and General Affairs was not present due to meeting with the Attorney General's official



### Risalah dan Kehadiran Rapat Komite Teknologi Informasi

Minutes and Attendance of Information Technology Committee Meetings

Tanggal Date	Tempat Location	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidakhadiran Reasons for Absence
22 Desember 2020 December 22, 2020	Ruang Rapat IFG IFG Meeting Room	Persetujuan Prinsip Share Service e-Procurement dan I-Office  Approval of e-Procurement and I-Office Share Service Principles	Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Keuangan dan Umum, SEVP PAP, SEVP MR, Kadiv SKAI, Kadiv Hukum, Kadiv Sekper, Kadiv SDM dan Umum, Kadiv Keu, Kadiv TI, Kadiv CorpStra, Kadiv BisDev, Kadiv AP, Kadiv CMI  President Director, Director of Finance and General Affairs, Director of Business, PAP SEVP, MR SEVP, Head of SKAI Division, Head of Legal Division, Head of Corporate Secretary Division, Head of HR and General Affairs Division, Head of Finance Division, Head of IT Division, Head of CorpStra, Head of Business Development, Head of AP Division, Head of CMI Division	-

### Pelaksanaan Tugas Komite Teknologi Informasi 2020

Komite Teknologi Informasi telah melaksanakan program kerja dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas Komite Teknologi Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yang meliputi:

- Memberikan arahan dan menetapkan rencana strategis pengembangan TI perusahaan yang dituangkan ke dalam *IT Master Plan* Perusahaan, yang juga meliputi setiap sumber daya TI yang terkait yaitu antara lain *software*, *hardware*, sumber daya manusia, dan anggaran;
- Menetapkan prioritas dari program-program kerja TI Perusahaan;
- Memutuskan dan menetapkan implementasi suatu sistem TI untuk digunakan secara penuh di lingkungan Perusahaan.

### Implementation of Duties of the Information Technology Committee in 2020

The Information Technology Committee has implemented work programs and submitted reports in the form of reports on the implementation of duties of the Information Technology Committee in accordance with their duties and responsibilities, which include:

- Providing guidance and establishing a strategic plan for the Company's Information Technology development which is detailed into the Company's Information Technology Master Plan, which also includes any related information technology resources, including software, hardware, human resources, and budget;
- Establishing priorities of the Company Information Technology work programs
- Deciding and setting the implementation of an Information Technology system to be used in the Company.



## AUDIT EKSTERNAL/ AKUNTAN PUBLIK

Fungsi Audit Eksternal diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjalankan fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perusahaan. Akuntan publik merupakan organ eksternal Perusahaan yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perusahaan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh akuntan publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

### Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Auditor Eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Mekanisme penunjukan Akuntan Publik oleh Perusahaan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa sesuai dengan prinsip penerapan GCG, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme RUPS dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

## EXTERNAL AUDIT/PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

The external audit function is implemented through the audit implementation of the Company's financial statements by the Public Accountant Firm (KAP) which operates independent supervision functions for the Company's financial aspects. Public Accountant is an external organ of the Company which functions to provide opinions related to the conformity of the presentation of the Company's financial statements on financial accounting standards (SAK) that apply in Indonesia. The audit of the Company's financial statements for fiscal year 2020 has been conducted by independent, competent, professional, and objective public accountant in accordance with the professional standards of public accountants, as well as the work agreement and the scope of the audit which has been established.

### Public Accountant Appointment Mechanism

External Auditor for the evaluation of the Company's Financial Statements are Public Accountants Firm (KAP) chosen through the Annual GMS by considering the recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is carried out through the mechanism for the procurement of goods and services of the Company. To guarantee the independence and quality of the evaluation result, the designated external auditor may not have a conflict of interest with the Company.

The mechanism of appointment of a Public Accountant Firm by the Company is in accordance with OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the use of public accountants and public accountant firms in financial services activities. The regulation states that in accordance with the principle of implementing GCG, the appointment of public accountants and the Public Accountant Firm is conducted through the Mechanism of the GMS which involves consideration of the proposal from the Board of Commissioners. The process of selection is carried out in accordance with the mechanism for the procurement of goods and services which applies in the Company.



## Akuntan Publik Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Partner) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut.

Berdasarkan Surat No. 26/DK-BPUI/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat S-1154/MBU/12/2020 maka IFG menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) untuk melakukan perkerjaan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 beserta Anak Perusahaan IFG dan juga Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020.

## Public Accountant Firm hired in 2020

Based on Minister of Finance's Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Services in Article 3 paragraph 1, it is mentioned that the provision of public audit services for the financial statements of an entity is carried out by a Public Accountant Firm for the longest 6 (six) fiscal years successively.

Based on Letter No. 26/DK-BPUI/XI/2020 dated November 16, 2020 which was approved by the Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) through the letter number S-1154/MBU/12/2020, IFG appointed the Public Accountant Firm (KAP) of Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners (PWC) to conduct the work of auditing of the Company's and IFG subsidiaries' financial statements in the 2020 fiscal year, as well as the annual report on the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL) of the 2020 fiscal year.

### Akuntan Publik Tahun 2020

Public Accountant Firm in 2020

<b>Kantor Akuntan Publik</b> Public Accountant Firm	: Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners
<b>No. Izin KAP</b> Public Accountant Firm License Number	: KEP/241/KM.1/2015
<b>Akuntan</b> Accountant in Charge	: Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
<b>No. Izin Akuntan Publik</b> Accountant License Number	: AP.0222
<b>Tahun Audit</b> Audit Year	: Tahun Buku 2020 Fiscal Year 2020
<b>Periode Penugasan</b> Assignment Period	: 30 Desember 2020 sampai dengan 13 Januari 2022 December 30, 2020 to January 13, 2022
<b>Jasa</b> Service Rendered	: Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 General Audit for Financial Reports of 2020 Fiscal Year
<b>Jasa Lainnya</b> Other Services Provided	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan Entitas Anak Perusahaan</li> <li>• Audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern</li> <li>• Laporan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, termasuk evaluasi RKAP dan Investasi, Review Penilaian Tingkat Kesehatan, dan KPI Manajemen</li> <li>• Audit Laporan Keuangan Program PKBL</li> <li>• Audit Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD)</li> <li>• Audit Laporan Perhitungan Saham Milik Nasabah</li> <li>• Audit Laporan Unit Syariah</li> <li>• Audit on Fairness of the Presentation of Financial Reports of Subsidiaries</li> <li>• Audit of Compliance with Laws and Regulations and Internal Control</li> <li>• Evaluation report on the Company's performance, including evaluation on the Company's Work Plan and Budget and Investment, Review of Health Level Assessment, and the Management's KPI</li> <li>• Audit of the Partnership and Community Development Program's Financial Report</li> <li>• Audit of Adjusted Net Working Capital (MKBD) Report</li> <li>• Audit of Customers' Shares Calculation Reports</li> <li>• Audit of Sharia Unit Reports</li> </ul>
<b>Biaya</b> Fees	: Rp2.547.000.000 IDR2,547,000,000



## Akuntan Publik dan Biaya Periode 5 (lima) Tahun Terakhir

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Partner) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut.

Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan keuangan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir.

## Public Accounting Firm and Its Fees for the Last 5 (Five) Years

In order to maintain professionalism and independence, the selection of an External Auditor, which is conducted annually, must comply with the provisions of the Minister of Finance Regulation no. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Services which stipulates that 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) may only audit for a maximum of 6 (six) consecutive fiscal years with a Public Accountant (a Partner) a maximum of 3 (three) consecutive Fiscal Years.

In relation to transparency, the following is a list of Public Accounting Firms, the Public Accountants, and their fees, auditing the Company's financial statements for the last 5 (five) years.

**Daftar Akuntan Publik 2016-2020**  
List of Public Accounting Firms 2016-2020

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firms	Akuntan Accountant	Opini Opinion	Biaya Fees (Rp) (Rp/IDR)
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PWC)	Drs. M. Jusuf Wibisana M. EC., CPA	Wajar dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	Rp2.547.000.000
2019	RSM Indonesia	Benny Andria	Wajar dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	Rp350.000.000
2018	RSM Indonesia	Benny Andria	Wajar dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	Rp350.000.000
2017	RSM Indonesia	Saptoto Agustomo	Wajar dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	Rp340.000.000
2016	RSM Indonesia	Saptoto Agustomo	Wajar dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	Rp340.000.000

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM



Sistem Pengendalian Internal yang efektif sangat diperlukan untuk mengamankan investasi dan aset, yaitu mencakup sistem pengendalian prosedur (*tangible*) dan pengendalian substansi (*intangible*). Hal ini dilakukan dalam rangka memantau dan memastikan adanya keselarasan seluruh aktivitas kegiatan usaha dengan strategi bisnis dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan serta merekomendasikan tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya penyimpangan serta menjamin kehandalan laporan dan informasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional dan keamanan aset.

Direksi sebagai organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan harus memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan manajemen risiko telah tersedia dan diterapkan pada semua aspek dan lini Perusahaan. Penerapan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perusahaan mengacu pada Pasal 26, Peraturan Menteri BUMN No. PeR-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

An effective Internal Control System is required to secure investment and assets. This system includes a system of procedural control (*tangible*) and control of substance (*intangible*). This is done to monitor and ensure the alignment of all business activities with the established business strategy and Company strategy which have been determined as well as to recommend corrective actions if deviations are found. It is also to ensure the reliability of reports and information, compliance with prevailing regulations, as well as the efficiency and effectiveness of operational activitie and asset security.

The Board of Directors as the Company's organ responsible for the management of the Company must ensure that the internal control and risk management functions are available and applied to all aspects and lines of business of the Company. The implementation of the internal control system carried out by the Company refers to Article 26, Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/ MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.



## Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

IFG menerapkan kegiatan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka Sistem COSO *Internal Control – Integrated Framework* – yaitu suatu kerangka terintegrasi yang membantu perusahaan untuk dapat mengembangkan dan menjaga pengendalian internal secara efektif dan efisien dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan operasional.

## Hasil Review Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Guna memastikan semua komponen pengendalian internal berfungsi terpadu, efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi ini dilakukan pada komponen yang saling berkaitan, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Sistem informasi dan komunikasi;
5. Monitoring.

Manajemen selalu berkomitmen dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang dilakukan Divisi Internal Audit.

## Internal Control System Compatibility with COSO

IFG implements internal control system activities with reference to the COSO Framework of Internal Control – Integrated Framework – which is an integrated framework that helps companies to develop and maintain internal controls effectively and efficiently in adapting to changes in the business and operational activities.

## Results of the Review on the Effectiveness of the Internal Control System

To ensure that all components of internal control function is in an integrated manner, the effectiveness of the internal control system is conducted on an ongoing basis. This evaluation is carried out on interrelated components, namely:

1. Control environment;
2. Assessment of business risk management;
3. Control activities;
4. Information and communication systems;
5. Monitoring.

The management is always committed to improving the effectiveness of the internal control system and to follow up on the results of monitoring carried out by the Internal Audit Division.



# MANAJEMEN RISIKO

## RISK MANAGEMENT

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan menyadari bahwa kegiatan usahanya tidak akan bisa terlepas dari berbagai risiko yang ada, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perusahaan, dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Penerapan manajemen risiko yang komprehensif merupakan salah satu aspek penting bagi Perusahaan untuk mengelola secara efektif, efisien dan konsisten berbagai risiko yang dihadapi sebagai perwujudan dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

### **Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan**

IFG memandang bahwa manajemen risiko merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktifitas dan pengambilan keputusan serta dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perusahaan. Dalam pengelolaan bisnis, Perusahaan berkomitmen mengelola semua risiko secara efektif dan efisien serta memastikan keberlanjutan bisnis yang berkesinambungan melalui pengelolaan risiko secara proaktif, berfokus pada risiko yang terpenting, dan memberikan perhatian terhadap proses pengendalian risiko.

Perusahaan terus berupaya untuk membangun dan memelihara manajemen risiko menggunakan kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta secara konsisten dari kerangka kerja tata kelola Perusahaan untuk mencapai *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan.

Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di Perusahaan berpedoman pada peraturan tentang tata kelola Perusahaan yang sehat dan praktik manajemen risiko yang berlaku umum dan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan munculnya risiko-risiko baik eksternal maupun internal. Atas dasar identifikasi itu, Perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk meminimalkan terjadinya risiko, misalnya dengan menutup asuransi yang relevan, ataupun merancang kontrak sedemikian rupa sehingga Perusahaan terlindungi secara hukum. Hal ini diharapkan dapat mengidentifikasi sedini

In operating its business, the Company realizes that its business activities is prone from the various risks that exist, whether they can be under the control or risks that are beyond the control of the Company, and can affect the results of operations and performance of the Company. The implementation of comprehensive risk management is one of the important aspects for the Company to manage effectively, efficiently and consistently the various risks which are faced as a manifestation of the implementation of Good Corporate Governance (GCG).

### **The Company Risk Management Implementation Policy**

IFG views that risk management is an integral and inseparable part of every business process. These risks are inherent in all activities and decision making as well as the impact of these risks can significantly affect the stability of the Company. In business management, the Company is committed to managing all risks effectively and efficiently as well as ensuring sustainable business continuity through proactive risk management, focusing on the most important risks, and paying attention to the risk control process.

The Company continues to develop and maintain risk management using the Company's risk management framework as an integral and consistent part of the Company's governance framework to achieve the Company's Key Performance Indicators (KPI).

The implementation and development of risk management in the Company is guided by regulations regarding sound corporate governance and generally accepted risk management practices that can be implemented effectively and efficiently. The Company is obligated to identify the possibility of the emergence of both external and internal risks. Based on this identification, the Company will conduct the necessary efforts to minimize the occurrence of risks, for example by closing the relevant insurance, or designing contracts in such a way that the Company is legally protected. This is expected to be able to identify, as early as possible, the potential risks that could affect the Company's



mungkin potensi risiko yang dapat berpengaruh pada kinerja Perusahaan, untuk selanjutnya mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk meminimalkan risiko.

## Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Perusahaan dipimpin oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko dan dibantu oleh 2 (dua) orang staff dan anggota, sebagaimana tabel berikut ini:

Keterangan Jabatan Detail of the Position	Jumlah (orang) Number of people
SEVP Manajemen Risiko SEVP of Risk Management	1
Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division	1
Staff Manajemen Risiko Risk Management Staff	2

## Pejabat Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/BPUI/SDM/IV/2020 tanggal 29 April 2020, Perusahaan telah menunjuk 1 (satu) orang Plt. Kepala Divisi Manajemen Risiko.

performance, and further take the necessary steps to minimize the risks.

## Risk Management Organizational Structure

The Company's Risk Management is led by the Head of the Risk Management Division and assisted by 2 (two) staff and members. The Risk Management's Organizational Structure is shown in the following organizational chart.

## Risk Management Officer

Based on the Decree of the Board of Directors No. 007/SK-DIR/BPUI/SDM/IV/2020 dated April 29, 2020, The Company has appointed 1 (one) person as Head of Risk Management Division.

### Wiki Wirakrisna

**Plt. Kepala Divisi Manajemen Risiko | Head of Risk Management Division**  
Menjabat sejak 29 April 2020 | In position since April 29, 2020

#### Data Pribadi

Warga negara Indonesia  
Usia 50 tahun  
Kelahiran Jakarta

#### Personal Data

Indonesian Citizens  
50 years old  
Born in Jakarta

#### Domisili

DKI Jakarta

#### Domicile

DKI Jakarta

#### Pendidikan

- Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara, 2000
- Sarjana Sains, Universitas Indonesia, 1994

#### Education

- Master of Management, Bina Nusantara University, 2000
- Bachelor of Science, University of Indonesia, 1994

#### Pengalaman Kerja

- Kepala Divisi TI PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2001–2019)
- Pelaksana Tugas Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2019–2021)

#### Work Experience

- Head of IT Division, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2001–2019)
- Acting Head of the Risk Management Division of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (2019–2021)

## Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola Manajemen Risiko Perusahaan, memberikan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menangani pekerjaan baru yang belum pernah dikerjakan oleh Perusahaan sebelumnya dan seluruh kegiatan yang dilakukan di seluruh unit kerja.

## Duties and Responsibilities

In carrying out their duties, the Company's Risk Management provides consideration for decision making in handling new projects that has never been done by the Company and for all activities conducted in all work units.



Pengelola Manajemen Risiko Perusahaan antara lain melakukan tugas:

1. Membuat, melaksanakan, dan memonitor rencana program kerja Divisi Manajemen Risiko;
2. Menyusun, me-review dan/atau melakukan evaluasi pedoman strategis pengelolaan manajemen risiko operasional, pengadaan barang dan jasa dan/atau kebijakan yang akan diberlakukan di Perusahaan dan Anak Perusahaan;
3. Melakukan identifikasi, pengukuran, mitigasi risiko dan pengendalian risiko di Perusahaan dan Anak Perusahaan serta melaporkannya secara berkala;
4. Melakukan pemeriksaan kepatuhan atas semua usulan dan/atau Internal Memo yang diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan internal Perusahaan;
5. Membuat evaluasi risiko Perusahaan sehubungan dengan kegiatan aksi korporasi Perusahaan;
6. Me-review dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu Perusahaan untuk melakukan identifikasi, perolehan dan penerapan sertifikasi internasional/regional/nasional yang diperlukan oleh Perusahaan untuk memperoleh pengakuan standar secara internasional/regional/nasional;
7. Membuat, me-review, mengadministrasikan, mengelola dan mengevaluasi seluruh Kebijakan dan SOP;
8. Melakukan pemeriksaan, penyelarasan dan memberikan rekomendasi atas penyusunan kebijakan dan SOP di seluruh unit kerja Perusahaan, termasuk kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan penyusunan, penyelarasan dan penetapan *Service Level Agreement (SLA)* pada seluruh Direktorat;
10. Melakukan pengukuran terhadap pemahaman karyawan terkait kebijakan yang berlaku di Perusahaan;
11. Melakukan evaluasi secara periodik atas kebijakan dan SOP dari seluruh Direktorat dan menyampaikannya kepada Direktur terkait;
12. Mengajukan, mempersiapkan, membuat analisa dan membuat Internal Memo sehubungan dengan adanya permohonan dari Anak Perusahaan terkait kegiatan manajemen risiko di Anak Perusahaan untuk dapat ditindaklanjuti kepada Direktur Keuangan dan Umum;
13. Membuat laporan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Direktur Keuangan dan Umum secara berkala;

The Company's Risk Management, among others, performs the following tasks:

1. Create, implement, and monitor the planned work program of the Risk Management Division;
2. Develop, review and/or evaluate strategic guidelines for managing operational risk management, procurement of goods and services and/or policies to be implemented in the Company and its Subsidiaries;
3. Identify, measure, mitigate, and control risks in the Company and its Subsidiaries and report them regularly;
4. Conduct compliance checks on all proposals and/or Internal Memos submitted to the Board of Directors for approval in accordance with the Company's internal regulations;
5. Evaluate the Company's risk in relation to the Company's corporate actions;
6. Review and evaluate the implementation of the Company's quality management to identify, obtain, and apply international/regional/national certifications required by the Company to obtain international/regional/national standard recognition;
7. Create, review, administer, manage and evaluate all Policies and SOPs;
8. Conduct inspections, alignment and provide recommendations on the preparation of policies and SOPs in all work units of the Company, including compliance with laws and regulations;
9. Prepare, harmonize and determine Service Level Agreement (SLA) in all Directorates;
10. Measure employees' comprehension regarding the policies applicable in the Company;
11. Conduct periodic evaluations of policies and SOPs from all Directorates and submit them to the relevant Director;
12. Submit, prepare, analyze, and write Internal Memos in relation to the requests from Subsidiaries regarding risk management activities in Subsidiaries to be followed up to the Director of Finance and General Affairs;
13. Prepare reports related to activities carried out by the Risk Management Division to the Director of Finance and General Affairs on a regular basis;



14. Melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap karyawan-karyawan di dalam Divisi Manajemen Risiko; dan
15. Menyelesaikan segala pekerjaan yang tertunda (*pending matters*) dan menyelesaikan tindak lanjut temuan audit.

14. Provide guidance and direct supervision to employees in the Risk Management Division; and
15. Complete all pending matters and follow-up on audit findings.

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Manajemen Risiko

Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

### Appointent and Dismissal of the Head of the Risk Management Division

The position of Head of the Risk Management Division is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.

### Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Dalam rangka terus meningkatkan mutu dan kompetensi personel dari Divisi Manajemen Risiko, Perusahaan melakukan program pengembangan kompetensi bagi personel Divisi Manajemen Risiko secara sistematis dan berjenjang. Program tersebut dilakukan dengan mengikutisertakan para personel divisi dalam program sertifikat. Daftar staf Manajemen Risiko yang telah mengikuti program sertifikasi adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Profesi Professional Certifications	Jumlah Number of People
ERMAP	1
CRMO	2

### Hasil Review Risiko Tahun 2020

Proses pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan dari tahun ke tahun terus berkembang. Perusahaan menerapkan pengelolaan Manajemen risiko berdasarkan ERM berstandar internasional atau ISO 31000 versi terbaru 2018 yang memberikan panduan penerapan risiko terdiri atas tiga elemen: prinsip (*principle*), yaitu dasar praktik atau filosofi manajemen risiko, kerangka kerja (*framework*) yaitu pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi, dan proses (*process*) yaitu aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait.

ISO 31000:2018 menekankan tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Tujuan itu diwujudkan dengan (1) meningkatkan kinerja, (2) mendorong inovasi, dan (3) mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola (*governance*) dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi.

### Results of Risk Review in 2020

The governance process of Company's Risk Management continues to develop from year to year. The Company implements risk management governance based on international standard ERM or ISO 31000, the 2018 latest version, which provides guidance on risk implementation consisting of three elements namely principles, which refers to the basic practice or philosophy of risk management; framework, which refers to the governance of a structured and systematic risk management system throughout the organization, and; processes,which refers to sequential and interrelated risk management activities.

ISO 31000:2018 emphasizes the purpose of risk management, namely to create and protect value. This goal is realized by (1) improving performance, (2) encouraging innovation, and (3) supporting the achievement of goals. Risk management is part of governance and must be integrated into organizational processes.



Pelaksanaan penerapan manajemen risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang telah disosialisasikan ke seluruh karyawan IFG berdasarkan SK Direksi IFG (Persero) No. 022/SK-DIR/CORP/BPUI/III/2019 tentang Kebijakan Manajemen Risiko dan SOP Pembuatan Profil Risiko;
2. Perusahaan memiliki Direktur yang ditugaskan untuk melaksanakan program manajemen risiko berdasarkan SK Direksi IFG;
3. Direksi telah melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko dibuktikan dengan adanya laporan Profil Risiko dan telah melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

### Profil Risiko Tahun 2020 dan Mitigasinya

Berikut disampaikan profil risiko Perusahaan di tahun 2020 dan mitigasi yang telah dilakukan Perusahaan di sepanjang tahun 2020.

The implementation of risk management in 2020 is as follows:

1. The Company possesses a risk management policy that has been disseminated to all IFG employees based on the Decree of the Board of Directors of IFG (Persero) No. 022/SK-DIR/CORP/BPUI/III/2019 concerning Risk Management Policies and SOPs for Risk Profile Creation;
2. The Company has a Director who is assigned to carry out a risk management program based on the Decree of the IFG's Board of Directors;
3. The Board of Directors has carried out monitoring of the risk management program as evidenced by the Risk Profile report and has reported the implementation of risk management to the Board of Commissioners.

### Risk Profile and Mitigation in 2020

The following is the risk profile of the Company and the mitigations carried out by the Company throughout 2020

No	Risiko Risks	Uraian risiko dan Penyebab Description of Risks and Its Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plans
1	Risiko Hukum Legal Risks	4 anggota <i>Holding</i> mendapatkan penugasan dari Pemerintah antara lain Jasa Raharja, Askindo, PT Jamkrindo, dan penugasan asuransi pertanian kepada Jasindo. Dengan menjadi anak Perusahaan, status penugasan 4 anggota <i>holding</i> tersebut terganggu mengingat tidak menjadi perusahaan BUMN lagi  4 Holding members received assignments from the Government, namely Jasa Raharja, Askindo, PT Jamkrindo, and the assignment of agricultural insurance to Jasindo. By becoming a subsidiary, the assignment status of the 4 members of the holding is disrupted considering that they are no longer a state-owned company	Mitigasi risiko dilakukan dengan menerbitkan saham seri A (Dwiwarna) di masing-masing anak perusahaan sehingga program penugasan Pemerintah tetap dapat dilakukan, serta mengacu kepada PP no.72/2016  Risk mitigation is carried out by issuing A series (Dwiwarna) shares in each subsidiary and by referring to PP no. 72/2016, so that the Government's assignment program can still be carried out
2	Risiko Pemegang Saham Pengendali (PSP) Controlling Shareholder Risk (PSP)	Potensi kegagalan Perusahaan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik ( <i>good governance</i> ) akibat ketersediaan pedoman tata kelola yang tidak memadai dan/atau perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan. Setiap risiko yang terdapat di anggota holding akan menjadi tanggung jawab PSP. Sehingga, jika salah 1 anggota holding bermasalah, maka berdampak terhadap PSP.  There are similarities with business lines or products/services in the general insurance, reinsurance and guarantee industry. The potential for a pricing war is likely to occur, thereby reducing the income of holding members and overall consolidation, and may have an impact on increasing marketing costs of holding members.	IFG sebagai perusahaan <i>holding</i> harus memastikan bahwa setiap risiko maupun potensi risiko ke depan dapat dimitigasi terutama dengan adanya portofolio investasi yang kurang sehat dan klaim dari nasabah yang cukup tinggi.  Holding can mitigate through portfolio strategy planning through Championship, Collaboration, Specialization and Consolidation. The arrangement of business line functions will be directed per product, per region, and per customer.



No	Risiko Risks	Uraian risiko dan Penyebab Description of Risks and Its Causes	Rencana Mitigasi Mitigation Plans
3	Risiko Kanibalisasi Cannibalization Risks	<p>Terdapat beberapa irisan lini bisnis atau produk/jasa di sektor asuransi umum, reasuransi dan penjaminan. Potensi terjadinya <i>pricing war</i> sehingga mengurangi pendapatan anggota <i>holding</i> dan konsolidasi secara keseluruhan, dan dapat berdampak pada peningkatan biaya pemasaran anggota <i>holding</i>.</p> <p>There are similarities with business lines or products/services in the general insurance, reinsurance and guarantee industry. The potential for a pricing war is likely to occur, thereby reducing the income of holding members and overall consolidation, and may have an impact on increasing marketing costs of holding members.</p>	<p><i>Holding</i> dapat melakukan mitigasi melalui perencanaan strategi portofolio melalui <i>Championship, Collaboration, Specialization</i> dan <i>Consolidation</i>. Pengaturan fungsi lini bisnis akan diarahkan per produk, per daerah dan per nasabah.</p> <p>Holding can mitigate through portfolio strategy planning through <i>Championship, Collaboration, Specialization</i> and <i>Consolidation</i>. The arrangement of business line functions will be directed per product, per region, and per customer.</p>
4	Risiko Duplikasi Investasi Investment Duplication Risk	<p>Saat terbentuknya <i>Holding</i>, terdapat potensi duplikasi investasi atas rencana belanja modal perusahaan ke depan, baik dari sisi pengembangan kantor wilayah dan kantor cabang (bangunan), peralatan kantor, TI dan kendaraan. Saat terbentuknya <i>holding</i>, terdapat potensi duplikasi investasi atas rencana belanja modal Perusahaan.</p> <p>When the Holding was established, there was a potential for duplication of investment in the Company's planned capital expenditure, whether in terms of developing regional offices and branch offices (buildings), office equipment, IT and vehicles. When the holding is established, there was a potential for duplication of investment in the Company's planned capital expenditures.</p>	<p>Mitigasi dalam hal ini dilakukan dalam bentuk <i>asset sharing</i>, di mana anggota <i>holding</i> yang telah memiliki kantor wilayah dan cabang akan melakukan integrasi dari sisi kantor operasional dengan anggota <i>holding</i> lain yang memiliki rencana dalam melakukan penetrasi ke daerah-daerah tertentu.</p> <p>In this case, mitigation is carried out in the form of asset sharing, in which holding members who already have regional and branch offices will share their operational office with other holding members who have plans to enter into certain areas.</p>
5	Risiko Asimilasi Budaya Cultural Assimilation Risks	<p>Risiko pada Perusahaan secara konsolidasi apabila seluruh portofolio ditempatkan dalam satu portofolio investasi yang sama. Adanya potensi terjadinya kesulitan saat dilakukan integrasi budaya antara <i>holding</i> dan anggota <i>holding</i></p> <p>There are risks to the Company on a consolidated basis if all portfolios are placed in the same investment portfolio. There is a potential for difficulties when cultural integration is carried out between the holding company and holding members</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan komunikasi yang terbuka dan positif</li> <li>• Sosialisasi kepada karyawan mengenai pembentukan <i>holding</i> dan fase transisinya</li> <li>• Maintain open and positive communication</li> <li>• Dissemination to employees regarding the establishment of the holding and its transition phase</li> </ul>

Sumber: Kajian Pembentukan Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan (KPMG)

Source: Study of the Establishment of the Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs (KPMG)



## Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko IFG dibantu oleh Komite Pengelolaan Risiko yang berada di bawah Dewan Direksi. Komite Pengelolaan Risiko mengadakan pertemuan untuk:

1. merumuskan dan menetapkan Kebijakan Pengelolaan Risiko, serta perbaikan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan perkembangan peraturan manajemen risiko di bidang jasa Keuangan yang terkait, dan kondisi perkembangan bisnis Perusahaan;
2. melakukan kajian dan pembahasan atas hasil identifikasi, evaluasi dan analisa atas usulan transaksi yang disampaikan oleh Divisi/Departemen/Unit di IFG;
3. memberikan rekomendasi atas usulan transaksi yang disampaikan oleh Divisi/Departemen/Unit di IFG berdasarkan evaluasi dan analisa atas risiko-risiko terkait transaksi tersebut.

Evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan regulasi dan kondisi operasional. Evaluasi terhadap efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui laporan berkala yang dikirimkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain Laporan Profil Risiko, Laporan Risiko Utama, dan laporan terkait lainnya.

Keseluruhan evaluasi, khususnya evaluasi dan pengkinian kebijakan, prosedur dan metodologi dilakukan secara berkala untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kondisi terkini operasional IFG.

Sebagai perusahaan yang berbentuk konglomerasi, evaluasi juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta komite yang berada di bawah Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi. Anak perusahaan

## Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners

Assisted by the Risk Management Committee, which is under the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Board of Directors evaluate the effectiveness of the IFG risk management system. The Risk Management Committee holds meetings to:

1. Formulate and stipulate a Risk Management Policy, as well as improvement and refinement of the Risk Management Policy in accordance with the development of risk management regulations in the related financial services sector, and the condition of the Company's business development;
2. Conduct studies and discussions on the results of identification, evaluation and analysis of proposed transactions submitted by Divisions/Departments/Units at IFG;
3. Provide recommendations on proposed transactions submitted by Divisions/Departments/Units at IFG based on evaluation and analysis of the risks related to the transaction.

Evaluation and updates of policies, procedures and methodologies is carried out periodically to maintain compliance with regulations and operational conditions. Evaluation of the effectiveness of risk management is also carried out through periodic reports sent to the Board of Commissioners and Board of Directors, which includes Risk Profile Reports, Main Risk Reports, and other related reports.

The overall evaluation, particularly the evaluation and updates of policies, procedures and methodologies is carried out periodically to maintain compliance with the regulations of the Ministry of SOEs, the Financial Services Authority (OJK) and the current conditions of IFG operations.

As a company in the form of a conglomerate, evaluation on the implementation of integrated risk management is also carried out by the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the committees under the Board of Directors and



secara umum telah menerapkan manajemen risiko melalui Unit Manajemen Risiko yang berada di masing-masing Anak perusahaan, dengan tetap dilakukan koordinasi secara terintegrasi melalui Unit Manajemen Risiko IFG di entitas utama. Dewan Komisaris dan Direksi pada masing-masing Anak perusahaan secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh masing-masing Anak Perusahaan untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pada Anak perusahaan. Setiap pelaporan oleh Anak perusahaan juga disampaikan dan ditelaah oleh Unit Manajemen Risiko IFG. IFG juga telah melakukan koordinasi dengan Anak perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada di Indonesia Financial Group ("IFG").

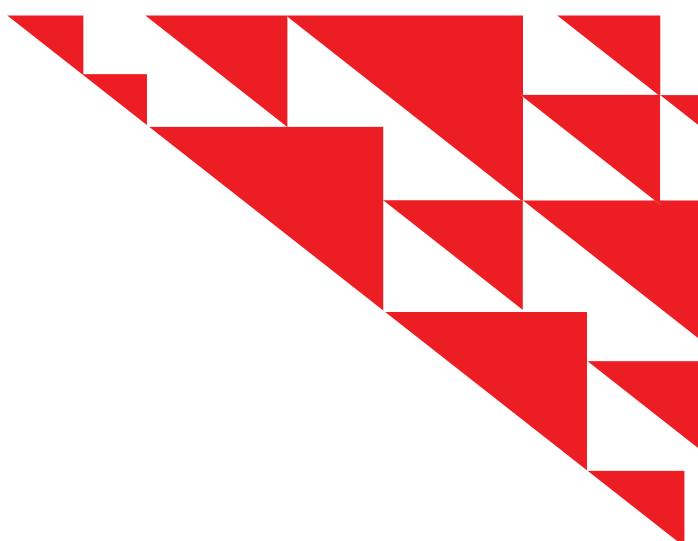
Sebagai salah satu bentuk penerapan risiko secara *enterprise-wide*, IFGI memiliki *risk appetite* sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh IFG dalam rangka mencapai sasaran bisnis IFG. *Risk appetite* yang ditetapkan oleh IFG tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perusahaan.

Agar setiap aspek dari pengelolaan operasional dan keuangan Perusahaan dapat meminimalisir potensi benturan kepentingan, Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang/jasa berupa standar operasional dan prosedur pengadaan barang dan/ atau jasa yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 001/PER-DIR/IFG/VII/2020 tentang pedoman umum barang dan jasa tanggal 24 Juli 2020.

the Board of Commissioners. Subsidiaries in general have implemented risk management through the Risk Management Unit located in each Subsidiary, while maintaining integrated coordination through the IFG Risk Management Unit in the parent entity. The Board of Commissioners and the Board of Directors in each Subsidiary actively monitor and evaluate through reports submitted by each Subsidiary to be further used as a material for consideration in setting policies for the Subsidiary. Each report by the Subsidiaries is also submitted and reviewed by the IFG Risk Management Unit. IFG has also coordinated with Subsidiaries to implement the risk management in accordance with existing policies in the Indonesia Financial Group ("IFG").

As a form of enterprise-wide risk application, IFG possess a risk appetite which functions as the level and type of risk that IFG is willing to take in order to achieve IFG's business goals. The risk appetite set by IFG is reflected in the Company's strategy and business objectives.

In order to ensure that every aspect of the Company's operational and financial management will be able to minimize potential conflicts of interest, the Company is equipped with guidelines for the procurement of goods/services in the form of operational standards and procedures for the procurement of goods and/or services that have been ratified through the Board of Directors Regulation No. 001/PER-DIR/IFG/VII/2020 regarding general guidelines for goods and services dated July 24, 2020.





## PERKARA PENTING

### IMPORTANT CASES

#### Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2019 dibanding tahun 2020 adalah sebagai berikut.

<b>Permasalahan Hukum</b> Legal Problems	<b>2020</b>		<b>2019</b>	
	<b>Perdata</b> Civil Cases	<b>Pidana</b> Criminal Cases	<b>Perdata</b> Civil Cases	<b>Pidana</b> Criminal Cases
	Nihil Nil			

#### Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Sepanjang tahun 2020, Tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki permasalahan hukum.

#### Pengungkapan Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat permasalahan hukum yang bersifat material di Anak Perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan.

#### Legal Problems

The legal problems faced by the Company in 2019, compared to 2020, are as follows.

#### Disclosure of Legal Issues Currently Being Faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors who are Currently Serving

Throughout 2020, there were no legal problems faced by the Board of Commissioners and Board of Directors

#### Disclosure of Legal Problems Currently Being Faced by Subsidiaries

Throughout 2020, there were no material legal issues in the Subsidiaries that affected the Company's financial and operational performance.

## SANKSI ADMINISTRATIF

### ADMINISTRATIVE SANCTIONS

#### Pengungkapan Sanksi Administrasi oleh Otoritas Terkait

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak menerima/mendapatkan sanksi administratif dari otoritas terkait.

#### Disclosure of Administrative Sanctions by Relevant Authorities

Throughout 2020, the Company did not receive/obtain administrative sanctions from the relevant authorities.



## AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

### ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Pengelolaan informasi merupakan upaya dalam rangka menciptakan nilai dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepada Perusahaan. Perusahaan berkomitmen memenuhi standar penerapan GCG terkait prinsip transparansi, di antaranya dengan menyediakan akses informasi baik secara internal maupun eksternal. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Perusahaan dan segala sesuatu yang terkait pada kepentingan publik sesuai dengan ketentuan internal atas pengelolaan informasi.

Perusahaan berupaya memberikan informasi yang memadai, bermanfaat dan aktual dengan memperhatikan ketentuan terkait data Perusahaan yang tergolong dalam informasi rahasia Perusahaan. Pengungkapan informasi tersebut dilakukan oleh pejabat atau unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Perusahaan.

#### Kebijakan Akses Informasi dan Data Perusahaan

Untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan akan informasi terkini terkait IFG, Perusahaan telah menyediakan berbagai akses informasi melalui beberapa saluran komunikasi, antara lain laporan resmi Perusahaan, press release dan pemberitaan media massa. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat kebebasan informasi publik yang di atur Pemerintah melalui undang-undang.

Informasi tentang Perusahaan secara terbuka juga dapat diperoleh melalui website [www.ifg.id](http://www.ifg.id) yang tersaji dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan menyediakan berbagai informasi Perusahaan. Dalam situs tersebut, telah memuat berbagai informasi mengenai profil Perusahaan, produk dan jasa, Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan, serta informasi korporasi lainnya.

Disamping itu, Perusahaan juga menyediakan sarana penyampaian informasi dengan menghubungi kantor pusat Perusahaan secara langsung dengan alamat sebagai berikut:

Information management is an effort to create value and increase stakeholder trust in the Company. The Company is committed to complying with GCG implementation standards related to the principle of transparency, including by providing access to information both internally and externally. Public Information Disclosure is a means of optimizing public oversight of the management of the Company and everything related to the public interest in accordance with internal provisions on information management.

The Company strives to provide adequate, useful and actual information by taking into account the provisions regarding Company data which are classified as Company confidential information. Disclosure of such information is carried out by officials or work units in accordance with their duties, authorities and responsibilities, which in this case is the Corporate Secretary.

#### Access Policy to Company Information and Data

To meet the needs of stakeholders for the latest information related to IFG, the Company has provided various access to information through several communication channels, including official Company reports, press releases and mass media reports. This is certainly in line with the spirit of freedom of public information which is regulated by the Government through law.

Information about the Company can also be obtained openly through the website [www.ifg.id](http://www.ifg.id) which provides various Company information presented in Indonesian and English. The site contains various information regarding the Company's profile, products and services, the Company's Financial Performance Report, as well as other corporate information.

In addition, the Company also provides a means of delivering information by contacting the Company's head office directly at the following address:


**Kantor Pusat IFG**

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58  
 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru  
 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190  
 Telp. +62 21 2505080  
 Surel: cs@ifg.id  
 Situs Web: www.ifg.id


**IFG Headquarters/Head Office**

Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor  
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58  
 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru  
 South Jakarta, DKI Jakarta 12190  
 Tel.+62 21 2505080  
 Email: cs@ifg.id  
 Website: www.ifg.id

**Korespondensi dan Laporan Berkala**

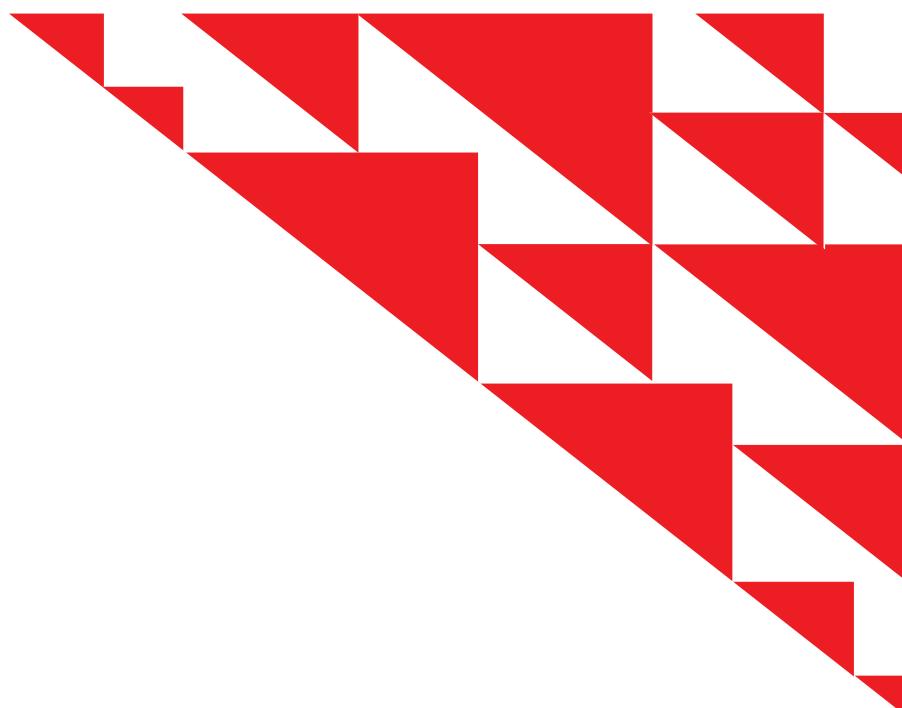
Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana di atur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Keuangan; dan
3. Surat kepada Pemegang Saham.

**Correspondence and Periodic Reports**

Financial and non-financial information from the Company has been compiled and reported transparently to shareholders, stakeholders and other institutions as required. Information is reported according to the target time, presented in a complete and accurate, current, comprehensive and adequate manner in accordance with the procedures, types, and scope as stipulated in the provisions concerning Transparency of the Company's Financial Condition. Information is presented through reports in the form of:

1. Annual report;
2. Financial statements; and
3. Letter to Shareholders.





## KODE ETIK PERUSAHAAN

COMPANY CODE OF CONDUCT

Kode Etik Perusahaan atau *Code of Conduct* (COC) merupakan komitmen penerapan GCG Perusahaan yang mengandung hal-hal yang wajib dilaksanakan dan hal-hal yang wajib dihindari bagi insan Perusahaan dalam etika bisnis dan etika kerja, baik dalam melaksanakan aktivitas operasional Perusahaan maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya dalam menegakkan kode etik berbisnis, Perusahaan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan bisnis. Selain itu *Code of Conduct* juga mengatur tentang tata cara berperilaku Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan yang berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika.

### Prinsip Dasar Penerapan Kode Etik Perusahaan

Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemilik Modal (*shareholders*) namun juga segenap *stakeholders*. Untuk itulah, Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*).

Sesuai dengan Pedoman Umum GCG Perusahaan (Revisi Pertama) yang dirilis pada Januari 2020, Surat Edaran No. SE-07/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Juli 2020 dan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tanggal 29 September 2020, maka saat ini nilai-nilai utama Perusahaan yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) dengan penjabaran sebagai berikut:

#### 1. AMANAH

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan serta berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

The Company's Code of Ethics or Code of Conduct (COC) is a commitment to implementing the Company's GCG which contains aspects which must be carried out, and elements that must be avoided for Company personnel in the context of business ethics and work ethics, both in terms of performing Company operational activities and its daily life. As an effort to enforce the Code of Conduct, the Company is subject to laws and regulations related to business. In addition, the Code of Conduct also regulates the behavior of the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees of the Company towards Stakeholders based on healthy and ethical corporate principles.

### Basic Principles of Implementing the Company's Code of Conduct

The Company realizes the importance of implementing GCG as a tool to increase value and sustainable long-term business growth, not only for shareholders but also for all stakeholders. For this reason, the Company is committed to implementing GCG consistently, one of which is done through the preparation of the Company's Code of Conduct.

In accordance with the General Guidelines for Company GCG (First Revision) released in January 2020, Circular No. SE-07/MBU/07/2020 concerning the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises dated July 1, 2020 and the Decree of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 042/SK-DIR/CORP/BPUI/IX/2020 concerning Determination of the Core Values of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dated September 29, 2020, currently, the Company's main values are Trustworthy, Competence , Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative (AKHLAK) with the following description:

#### 1. TRUSTWORTHY

We uphold the trust given by fulfilling promises and commitments, by being responsible for the tasks, decisions and actions taken, and by adhering to moral and ethical values.



## 2. KOMPETEN

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

## 3. HARMONIS

Kami terus meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai perbedaan yang ada apapun latar belakangnya serta selalu berkeinginan untuk menolong sesama dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif.

## 4. LOYAL

Kami akan terus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan cara menjaga nama baik karyawan, pimpinan, Badan Usaha Milik Negara dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan juga menjunjung tinggi rasa patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan juga etika.

## 5. ADAPTIF

Kami akan terus berinovasi dan juga dengan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan yang terjadi dengan menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif.

## 6. KOLABORATIF

Kami terus membangun kerja sama yang sinergis dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

## 2. COMPETENT

We continue to learn and develop capabilities by improving our competence to respond to ever-changing challenges, by helping others learn, and by completing assignments with the best quality.

## 3. HARMONIOUS

We continue to increase mutual care and respect for differences regardless of background and always want to help others and also build a conducive work environment.

## 4. LOYAL

We will continue to be dedicated and prioritize the interests of the nation and state by maintaining the good name of employees, leaders, State-Owned Enterprises, and the Country. We are willing to sacrifice to achieve a bigger goal and we also uphold a sense of obedience to the leadership as long as it does not conflict with the law and ethics.

## 5. ADAPTIVE

We will continue to innovate and also enthusiastically move forward or face changes that occur by adapting to be better, by continuously making improvements by following technology developments, and by acting proactively.

## 6. COLLABORATIVE

We continue to build synergistic cooperation by providing opportunities for parties to contribute, by being open to working together to generate added value, and by mobilizing the use of various resources for common goals.

## Pemberlakuan Kode Etik bagi Seluruh Level Organisasi

COC Perusahaan berlaku untuk seluruh karyawan IFG, baik Karyawan yang mempunyai hubungan kerja langsung atau Karyawan tetap maupun kontrak, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris.

## Enforcement of the Code of Conduct for All Organizational Levels

The Company's Code of Conduct applies to all IFG employees, whether they are employees who have a direct employment relationship or permanent employees or contract employees, including the Board of Directors and the Board of Commissioners.

## Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik perusahaan dilakukan pada saat terdapat karyawan baru yang bergabung di Perusahaan. Setiap karyawan yang baru bergabung akan diberikan softcopy atau berupa buku pedoman etika perilaku perusahaan, dan akan menandatangani lembar pernyataan telah membaca dan memahami serta berkomitmen

## Dissemination of the Code of Conduct

Dissemination of the Company's code of ethics is conducted when new employees join the Company. Every new employee who joins will be given the Company's code of ethics, or a softcopy of it. Then, they must sign a statement that they have to read and understand, and must be committed to complying with all policies that are standards



untuk mematuhi semua kebijakan yang menjadi standar etika dan perilaku yang tertuang dalam Pedoman Perilaku dan menyerahkan lembar pernyataan tersebut ke Divisi SDM.

Selain itu, yang pengaturan melalui kode etik perusahaan, saat ini terdapat nilai-nilai baru perusahaan yang tertuang pada SK DIR No. 042 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Nilai Utama Core Values IFG, dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan serta jajaran BOD dan BOC.

### **Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik**

Apabila terdapat karyawan IFG yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*, maka Perusahaan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berikut rincian tingkat hukuman dan sanksi yang berlaku di Perusahaan:

<b>Tingkat Pelanggaran</b> Level of Violation	<b>Yang berwenang/ berkewajiban menetapkan sanksi</b> People who are authorized/obligated to set sanctions	<b>Jenis-jenis Sanksi</b> Types of Sanctions
I	Kepala Divisi Terkait dan Kepala Divisi SDM Head of Related Division and Head of HR Division	Surat Peringatan I First Warning Letter
II	Direksi Perusahaan dan Kepala Divisi SDM The Company's BOD and Head of HR Division	Surat Peringatan II Second Warning Letter
III	Direksi Perusahaan dan Kepala Divisi SDM The Company's BOD and Head of HR Division	Surat Peringatan III atau Skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja Third Warning Letter or Suspension or Termination of Employment
Berat Severe Violation	Direksi Perusahaan dan Kepala Divisi SDM The Company's BOD and Head of HR Division	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment

### **Jumlah Pelanggaran Kode Etik**

Perusahaan membentuk Tim Kepatuhan GCG yang bertugas menerima pengaduan dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang masuk. Sebagai realisasi penegakan *Code of Conduct* Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan *Code of Conduct* selama 3 (tiga) tahun terakhir:

of ethics and behavior contained in the Code of Conduct and submitting the statement to the HR Division.

In addition to what is regulated through the Company's code of ethics, currently there are new corporate values contained in SK DIR No. 042 of 2020 concerning Determination of IFG Core Values, which has been disseminated to all employees and BOD and BOC organs.

### **Sanctions for Violation of the Code of Conduct**

If there are IFG employees who are proven to have violated the *Code of Conduct*, the Company will provide sanctions in accordance with prevailing rules and regulations. The following is a detailed of the level of penalties and sanctions that apply in the Company:

### **Number of Code of Conduct Violations**

The Company established a GCG Compliance Team in charge of receiving complaints and following up on incoming complaints. As a realization of the enforcement of the Company's *Code of Conduct*, the following are the details of the sanctions imposed regarding the enforcement of the *Code of Conduct* for the last 3 (three) years:

<b>Kategori Pelanggaran</b> Violation Category	<b>Jenis Sanksi</b> Types of Sanction	<b>Jumlah Pelanggaran</b> Number of Violations		
		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Tingkat I Level I	Surat Peringatan I First Warning Letter			
Tingkat II Level II	Surat Peringatan II Second Warning Letter			
Tingkat III Level III	Surat Peringatan III atau Skorsing atau Pemutusan Hubungan Kerja Third Warning Letter or Suspension or Termination of Employment		NIHIL NIL	
Berat Severe Violation	Pemutusan Hubungan Kerja Termination of Employment			

## KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

ANTI-CORRUPTION POLICY

Sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) IFG selalu menghindari segala bentuk praktik korupsi, selain itu seluruh karyawan IFG termasuk Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang *fair*, nilai sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip GCG.

Perusahaan juga berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan. Perusahaan juga senantiasa memperhatikan kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

In accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), IFG always avoids all forms of corruption practices. In addition, all IFG employees, including the Board of Commissioners and Board of Directors, always uphold fair competition, the value of sportsmanship and professionalism, as well as the principles of GCG.

The Company is also committed to creating a healthy business climate, avoiding actions and attitudes that can cause conflicts of interest, corruption, collusion and nepotism (KKN) and always prioritizing the interests of the Company above personal, family, group or party. The Company also always pays attention to policies on anti-corruption as written in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.



## KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

### GRATIFICATION CONTROL POLICY

Perusahaan mendefinisikan hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) yang tidak dibenarkan adalah sebagai segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan dengan maksud mempengaruhi pejabat atau karyawan yang bersangkutan agar dapat menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.

Penerimaan tersebut secara hukum dan etika usaha tidak dapat dibenarkan. Sejalan dengan prinsip Anti Korupsi, Perusahaan melarang Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga (termasuk dalam bentuk hadiah, imbalan, dan sumbangan (donasi) kepada pemberi pekerjaan (klien) atau pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.

The Company defines gifts, rewards, and unjustified donations as all forms of acceptance by officials or employees of the Company from parties with an interest in the Company with the intention of influencing the official or employee concerned in order to benefit the interests of the gift giver.

Such acceptance, both in term of legality and business ethics, cannot be justified. In line with the Anti-Corruption principle, the Company prohibits the Board of Commissioners, Board of Directors and its Employees from giving or offering, or receiving directly or indirectly anything of value, including in the form of gifts, rewards, and donations to employers (clients) or Government officials, with the intention to influence or in return for what they have done to the giver.



## KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

### POLICY OF PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Penyediaan sarana dan prasana di lingkup Perusahaan dilakukan melalui proses pengadaan barang/jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparansi, adil dan wajar serta akuntabel, sesuai Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Sadan Usaha Milik Negara No. PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PEROS/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Agar setiap aspek dari pengelolaan operasional dan keuangan Perusahaan dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan, Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang/jasa berupa standar operasional dan prosedur pengadaan barang dan/ atau jasa yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa.

Perusahaan menerapkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai standar *Good Corporate Governance* dengan menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, efisiensi biaya, kompetitif, fairness sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The provision of facilities and infrastructure within the Company is carried out through the procurement of goods/services process by applying the principles of efficiency, effectiveness, competitiveness, transparency, fairness and accountability, in accordance with the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008, concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods/Services for State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-15/MBU/2012 dated September 25, 2012, regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No.PER-OS/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods/Services for State-Owned Enterprises.

To have every aspect of the Company's operational and financial management to be able to minimize potential conflicts of interest, the Company has drafted guidelines for the procurement of goods/ services in the form of standard operational and procedures for the procurement of goods and/or services that have been ratified through the Decree of the Board of Directors No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 concerning General Guidelines for the Procurement of Goods and Services.

The Company implements the process of procuring goods and services in accordance with Good Corporate Governance standards by upholding the principles of openness, cost efficiency, competitiveness, and fairness in accordance with applicable laws and regulations.



## KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

POLICY ON FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

Perusahaan memiliki kebijakan yakni Surat Keputusan Direksi No. 049/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang mengharuskan Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan yang mewakili Perusahaan dalam setiap urusan Pemerintah dan politik, untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan Perusahaan dalam urusan publik. Perusahaan mengakui hak setiap orang untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai dengan pilihannya. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memperbolehkan seorang pun melakukan pemaksaan kepada orang lain sehingga membatasi hak individu yang bersangkutan untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk meminta agar karyawan yang aktif dalam partai politik dan/atau menjadi calon partai politik dalam pemilu untuk mengundurkan diri dari Perusahaan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan melarang pemberian sumbangan untuk partai politik mana pun sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang.

The Company has a policy that requires the Board of Commissioners, Board of Directors, the Company's Management and Employees who represent the Company in all Government and political affairs, to comply with the laws and regulations governing the Company's involvement in public affairs. The Company recognizes the right of everyone to channel their political aspirations according to their choice. Therefore, the Company does not allow anyone to coerce others so as to limit the right of the individual concerned to channel his/her political aspirations.

The Company has a policy of requesting the employees who are active in political parties and/or become candidates for political parties in elections to resign from the Company in accordance with the prevailing laws and regulations. The Company prohibits making donations to any political party as stipulated by law.



# LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

STATE ADMINISTRATIVE WEALTH REPORT (LHKPN)

Sebagai bagian dari BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Pelaksanaan LHKPN merupakan salah satu wujud komitmen Perusahaan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan.

## Dasar Hukum dan Peraturan Dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

As part of the BUMN owned by the State through the Government of Indonesia, the Company is obliged to comply with binding laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and acts of internal irregularities is the obligation of the State Administrators Wealth Report (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Administrators' Assets as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decree No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination, and Announcement of State Administrators Wealth Reports. The implementation of LHKPN is a manifestation of the Company's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) within the Company.

## Legal Basis and Regulations in Implementing LHKPN in The Company

In implementing LHKPN, the Company considers several legal and regulatory bases as the basis for implementing LHKPN within the Company. The legal basis are:

1. Law no. 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism;
2. Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
3. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
4. Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of GCG Implementation.



Sebagai BUMN, Dewan Komisaris dan Direksi serta Pejabat struktural di dalamnya, dikategorikan sebagai penyelenggara negara dan terikat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Di mana penyelenggara negara wajib menghindarkan diri dari perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain yang dapat merugikan keuangan perusahaan atau negara.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edara Pipmpinan KPK No. 10 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di lingkungan Instansi Pusat, menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan melaporkannya setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berjalan dan disampaikan secara *online* melalui [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

Sementara, ketentuan terkait tata cara penyampaian LHKPN di lingkup Perusahaan, diatur sendiri dalam Surat Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/CORP/BPUI/I/2020 tentang Kewajiban untuk Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Adapun pejabat Perusahaan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN atau wajib lapor adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. SEVP dan Kepala Divisi;
4. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan IFG yang tertuang dalam SK Direksi di masing-masing Anak Perusahaan.

As an SOE, the Company's the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as structural officials, are categorized as state administrators and are bound by Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. The state administrators are obliged to avoid acts of corruption, collusion and nepotism (KKN) for personal and/or other people's interests that can harm a company or state finances.

In accordance with the Corruption Eradication Commission (KPK) Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Administrators' Assets and the Head of KPK Circular Letter No. 10 of 2017 concerning Guidelines for LHKPN Management in Central Agencies, state administrators are obliged to make a State Administrator Wealth Report (LHKPN) and report it annually no later than March 31 of the current year and it is submitted online through [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

The provisions related to the procedure for submitting LHKPN in the Company are regulated in the Decree of the Board of Directors No.021/SK-Dir/01/BPUI/VIII/2010 dated August 18, 2010 concerning Obligations to Report State Officials' Assets.

The Company officials who are required to submit LHKPN or are required to report are as follows:

1. Board of Commissioners;
2. Board of Directors;
3. Division Heads;
4. Board of Commissioners and Board of Directors of PT BPUI's Subsidiaries.



## Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2020

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2020.

### Pengungkapan Penyampaian LHKPN di Lingkup Perusahaan Tahun 2020

Disclosure of Submission of LHKPN in IFG in 2020

## LHKPN Transparency of the Company Officials in 2020

The following table shows the transparency of the submission of LHKPN for Company officials in 2020.

<b>Pejabat Subjek Pelapor LHKPN</b> Officers who are Obligated to Submit LHKPN Report	<b>Jumlah Wajib Lapor</b> Number of Mandatory Reporters	<b>Pejabat yang Telah Melaporkan</b> Number of Officials who Have Reported	
		<b>Jumlah</b> Total	<b>%</b>
Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	4	100
Direksi Board of Directors	2	2	100
Corporate Secretary, Legal, & Risk Management	2	2	100
Finance & Operation	1	1	100
Human Capital & Information Technology	1	1	100
Information Technology	1	1	100
Pimpinan Tertinggi Higher Officials	1	1	100
Satuan Pengawas Internal Internal Audit Unit	1	1	100



## WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

### Prinsip Dasar Penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) adalah sistem yang dikembangkan Perusahaan dalam rangka mengelola pengaduan/penyengkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis yang pada dasarnya melanggar Kode Etik atau *Code of Conduct* Perusahaan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan GCG, manajemen berkomitmen menjalankan Perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku Perusahaan yang sesuai dengan *Code of Conduct*, guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Untuk itu, Perusahaan telah membangun mekanisme *Whistleblowing System* (WBS) sebagai salah satu perangkat Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengelolaan WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anonim, dan independen. Setiap pengaduan yang masuk, diterima oleh Tim Pengelola Pelaporan yang akan menganalisis untuk kemudian disampaikan kepada IFG. Mekanisme penanganan laporan WBS dilakukan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan No.SK DIR 049/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2019, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Prosedur kebijakan WBS memberikan jaminan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh karyawan IFG dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. WBS akan menerima setiap laporan yang masuk untuk dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

### Sosialisasi Whistleblowing System

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan *Whistleblowing System* kepada seluruh Insan Perusahaan yang meliputi pihak internal maupun eksternal. Sosialisasi dilakukan oleh Perusahaan melalui berbagai media,

### Basic Principles of Implementing a Violation Reporting System

*Whistleblowing System* (WBS) is a system developed by the Company in order to manage complaints/disclosures regarding unlawful behavior or unethical acts which basically violate the Company's Code of Conduct. In order to increase the effectiveness of GCG implementation, the Company's management is committed to operating the Company professionally based on the Company's behavior in accordance with the Code of Conduct, in order to realize Good Corporate Governance. To that end, the Company has developed a *Whistleblowing System* (WBS) mechanism as one of the Good Corporate Governance tools.

The management of the WBS is conducted with the principles of confidentiality, anonymity, and independence. Each incoming complaint is received by the Reporting Management Team which will analyze it and then submit it to PT BPUI. The mechanism for handling the WBS report is carried out based on Implementation Guidelines No. SK DIR 049/SK-DIR/CORP/BPUI/XI/2019, concerning Good Corporate Governance Guidelines for the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

The WBS policy procedure guarantees that reporting can be done confidentially, anonymously and independently which is used to optimize the participation of all IFG employees and other parties in disclosing violations that occur within the Company. WBS will receive every incoming report to be learned, classified and followed up through an in-depth investigation based on the facts obtained. The decision on whether the report is proven or not will be made and taken based on consideration of the consequences of the action, the degree of intent and the motive behind the action.

### Dissemination of Whistleblowing System

The dissemination was conducted to provide an understanding of the Whistleblowing System policy to all Company personnel, as well as the internal and external parties. The dissemination was carried out by the Company through various media,



di antaranya adalah melalui *workshop* sosialisasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan, yang di dalamnya dijelaskan terkait sistem *Whistleblowing System* dilingkungan Perusahaan.

### **Mekanisme Whistleblowing System**

WBS IFG dikelola oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. WBS dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui saluran pengaduan yang disediakan, melalui *email*, *dropbox*, maupun surat yang ditujukan kepada Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Perusahaan menerima setiap pelaporan penyimpangan atau pelanggaran yang ditujukan secara tertulis melalui saluran pengaduan yang telah disiapkan;
2. Kerahasiaan indentitas pelapor telah dijamin dan Perusahaan akan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut;
3. Terhadap Laporan yang disampaikan akan dipilih terlebih dahulu untuk dapat ditetapkan apakah akan ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti
4. Tim akan melaksanakan proses investigasi berupa audit khusus dan hasil investigasi dilaporkan kepada Direksi dengan menyampaikan Laporan Hasil Audit Khusus berupa kajian dan rekomendasi;
5. Berdasarkan Laporan tersebut Direksi akan menetapkan tindak lanjutnya dan dilaporkan ke Dewan Komisaris sebagai bentuk fungsi pengawasan.

### **Perlindungan terhadap Pelapor**

Dalam pelaksanaan pengaduan/penyengkapan *Whistleblowing System* dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Untuk itu, Perusahaan bertanggungjawab atas perlindungan saksi. Perusahaan menyediakan fasilitas saluran pelaporan (*email*, *dropbox*, surat) yang independen, bebas dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.

including through a workshop on dissemination of the GCG implementation within the Company, which explained about the Whistleblowing System system within the Company.

### **Whistleblowing System Mechanism**

The IFG's WBS is managed by the Head of the Internal Audit Unit. WBS can be accessed by all stakeholders through the complaint channels provided via email, dropbox, as well as letters addressed to the Violation Reporting Management Team of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) with the following mechanism:

1. The Company receives reports of irregularities or violations that are addressed in writing through the complaint channels that have been provided;
2. Confidentiality of the whistleblower's identity is guaranteed and the Company will provide strict sanctions for those who violate the confidentiality principle;
3. The submitted reports will be sorted first to determine whether they will be followed up or not followed up
4. The team will carry out an investigation process in the form of a special audit and the results of the investigation will be reported to the Board of Directors by submitting a Special Audit Result Report in the form of studies and recommendations;
5. Based on the report, the Board of Directors will determine the follow-up action, and report it to the Board of Commissioners as a form of supervisory function.

### **Whistleblower Protection**

In the implementation of complaints/disclosures, the Whistleblowing System is protected by Law no. 13 of 2006 concerning Witness Protection. For this reason, the Company is responsible for witness protection. The Company provides reporting channel facilities (*email*, *dropbox*, letter) that are independent, free and confidential for the whistleblower, in order to implement a secure reporting process. In addition, the Company also strives to maintain the confidentiality of the whistleblower's identity with the aim of providing protection to the whistleblower and his/her family members against retaliation from the reported party or organization.



## Media Pelaporan dan Pengelola Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) merupakan suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan IFG untuk membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi pada Perusahaan. WBS IFG dikelola oleh Kepala Satuan Pengawas Internal. WBS dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui saluran pengaduan yang disediakan, yaitu:

Email	<a href="mailto:pengaduan@bahana.co.id">pengaduan@bahana.co.id</a>
<b>Dropbox</b>	Lobi Kantor Pusat Perusahaan, Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 18, Jakarta The Lobby of Company Headquarters, Graha CIMB Niaga Building 18th Floor, Jakarta.
<b>Surat Letter</b>	Kepada Kepala Satuan Pengawas Internal u.p. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Graha CIMB Niaga, Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  To the Head of Internal Audit Unit FAO: Whistleblowing Management Team PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Graha CIMB Niaga, 18th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

## Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses

	2020	2019
Jumlah pengaduan yang masuk Number of incoming complaints	-	-
Jumlah pengaduan yang diproses Number of processed complaints	-	-
Komposisi pengaduan yang masuk dan yang diproses Composition of incoming and processed complaints	-	-

## Tindak Lanjut Laporan Pengaduan

Selama 2020, tidak terdapat pengaduan yang masuk sehingga tidak ada tindak lanjut laporan pengaduan.

## Reporting Media and Management of Whistleblowing System

The Whistleblowing System (WBS) is a system that provides facilities for PT BPUI stakeholders to make complaints regarding alleged violations that occurred in the Company. The WBS of PT BPUI is managed by the Head of the Internal Audit Unit. The WBS can be accessed by all stakeholders through the complaint channels provided, namely:

## Number of Incoming and Processed Complaints

## Follow Up on Complaint Report

In 2020, there were no incoming complaints, so there was no follow-up to the complaint report.



## TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES

### Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak mendapatkan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan.

### Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan terkait perpajakan. Per 31 Desember 2020, Perusahaan berkontribusi terhadap negara melalui pemenuhan kewajiban pajak sebesar Rp22.703.933.901,- Pajak tersebut terdiri dari:

<b>Pembayaran Pajak (dalam rupiah penuh)</b> Tax Payment (in full IDR)		
<b>WAPU</b> VAT Collector		<b>2020</b>
PPh psl. 4 ayat 2 Income Tax, article 4 paragraph 2		505.966.879
PPh psl. 21 Income Tax, article 21		7.981.783.640
PPh psl. 23 Income Tax, article 21		1.070.557.599
PPh psl. 22 Income Tax, article 22		23.057.228
<b>WABA/Corporate Taxpayer</b>		
PPh psl. 4 ayat 2 Income Tax, article 4 paragraph 2		3.646.622.757
PPh psl. 23 Income Tax, article 4 paragraph 2		752.387.582
PPh psl. 25 Income Tax, article 4 paragraph 2		-
<b>PPN/VAT</b>		
Pajak Masukan Input Tax		6.658.902.121
Pajak Keluaran Output Tax		2.040.000.000
PBB Property Tax		12.124.688
Lain-lain Others		12.531.407
<b>Total</b>		<b>22.703.933.901</b>

### Report on Company Activities Polluting The Environment

Throughout 2020, the Company did not receive any reports on the Company's activities that pollute the environment.

### Disclosure Fulfillment of Tax Obligations

The Company has a high commitment to comply with all applicable laws and regulations, one of which is compliance with regulations related to taxation. As of December 31, 2020, the Company has contributed to the country by fulfilling its tax obligations of IDR 22,703,933,901. This tax consists of:



## Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntasi Keuangan (SAK)

Analisa dan pembahasan pada laporan tahunan ini sebagian besar mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC). Laporan keuangan Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Ikatan Akuntan Indonesia.

## Kasus terkait dengan buruh dan karyawan

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak mendapati adanya pelaporan atau pengaduan kasus terkait dengan buruh dan karyawan di lingkungan kerja Perusahaan.

## Kesesuaian Buku Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Perusahaan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

## Incompatibility of Presentation of Annual Reports and Financial Statements With Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (Sak)

The analysis and discussion in this annual report mostly refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2020 and December 31, 2019 which have been audited by the Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PWC). The Company's financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Institute of Indonesia Chartered Accountants.

## Cases Related to Labor and Employees

Throughout 2020, the Company did not find any case reports or complaints related to labors and employees in the Company's work environment.

## Annual Report Compatibility

The Company's Annual Report, whether submitted to shareholders, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report printed and published by the Company.



# Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social  
Responsibility

**IFG selalu berupaya untuk mengelola  
pelibatan para Pemangku Kepentingan  
guna meningkatkan nilai Perusahaan.**

IFG always strives to manage the involvement  
of Stakeholders in order to increase the value  
of the Company.



POWER  
TO  
PROGRESS

# TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE



Sebagai *Holding BUMN* Asuransi dan Penjaminan, Perusahaan senantiasa memastikan bahwa kegiatan usahanya senantiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Perusahaan memandang tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

Melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan yang menyentuh 3 (tiga) aspek CSR yakni Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan.

Selain itu, dalam kaitannya dengan perannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN PER-02/

As a Holding Company of Insurance and Guarantee SOEs, the Company always ensures that its business activities always adhere to the principles of sustainable business. Based on this understanding, the Company views Corporate Social Responsibility/CSR as a form of concern for the environment, respect for human rights, the obligation to provide a comfortable place and good working relationships with employees, prioritizing maintaining occupational health and safety, and participate in developing local economies and communities.

Through the Corporate Social Responsibility Program, the Company supports community development and environmentally sustainable development consistently and continuously that includes 3 (three) CSR aspects, namely Economic, Social, and Environmental.

In addition, in relation to its role as a State-Owned Enterprise (BUMN), the Company implements the Partnership and Community Development Program (PKBL) as regulated in the Minister of SOE Regulation PER-02/MBU/04/2020 dated April 2,



MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. PKBL adalah bentuk tanggung jawab BUMN kepada masyarakat melalui partisipasi aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PKBL terdiri atas Program Kemitraan Usaha Kecil dan Pembinaan Lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Tujuan Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan CSR dan PKBL, Perusahaan senantiasa berpedoman pada ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku berikut ini:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;
4. Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007;
5. Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015;
6. Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016;
7. Permen BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017;
8. Permen BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020.

Selain landasan regulasi di atas, Perusahaan juga merumuskan dan menjalankan aktivitas CSR-nya dengan mengacu pada standar ISO 26000 yang berisi tentang panduan praktik-praktik tanggung jawab sosial dalam aspek akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan kepada kepentingan stakeholder, kepatuhan pada hukum, penghormatan pada norma perilaku internasional, dan penegakan hak asasi manusia.

2020, a Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises. PKBL is a form of SOEs responsibility to the community, which is achieved through active participation in providing guidance and assistance to entrepreneurs from economically weak groups, cooperatives and the community.

The PKBL program consists of the Small Business Partnership Program and Environmental Development by SOEs through the use of funds from the SOE's profit share. The SOE Partnership Program with Small Businesses, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to increase the capacity of small businesses through the use of funds from the SOE's profit share. The purpose of the Partnership Program is to increase the capacity of small entrepreneurs to become independent as well as to empower the social conditions of the community.

In implementing CSR and PKBL, the Company is always referred to the provisions of the following prevailing laws and regulations:

1. Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
2. Law no. 13 of 2003 concerning Manpower;
3. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
4. SOE Ministerial Decree No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007;
5. SOE Ministerial Decree No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015;
6. SOE Ministerial Decree No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 19, 2016;
7. SOE Ministerial Decree No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 20, 2017;
8. SOE Ministerial Decree No. PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020.

In addition to the above regulatory basis, the Company also formulates and conducts the CSR activities by referring to the ISO 26000 standard which contains guidelines for social responsibility practices in the aspects of accountability, transparency, ethical behavior, respect for stakeholder interests, compliance with the law, respect for international norms of behavior, and the enforcement of human rights.



## Visi dan Misi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Untuk terus mewujudkan tumbuh kembang yang berkualitas dan memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, Perusahaan melandaskan implementasi tanggung jawab sosialnya dalam visi dan misi berikut ini.

### Visi

Menjadikan Perusahaan sebagai BUMN yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan melalui peningkatan aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

### Misi

Berperan aktif dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat serta kelestarian lingkungan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sumber daya yang dimiliki Perusahaan dan anak perusahaan.

## Due Diligence Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Uji tuntas kegiatan operasional Perusahaan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan maupun sosial dipetakan berdasarkan tingkatan materialitas suatu subyek serta matriks risiko negatif yang mungkin muncul. Berdasarkan matriks ini, Perusahaan memetakan subyek maupun isu penting yang mempengaruhi Perusahaan dan pembangunan berkelanjutan. Subyek maupun isu prioritas dirumuskan untuk kemudian dirancang sebagai program yang dapat memastikan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Dalam aspek ekonomi, Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi serta memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek lingkungan, Perusahaan melaksanakan kajian risiko lingkungan hidup untuk menentukan risiko lingkungan dari kegiatan operasional dan langkah pengendaliannya. Sementara pada aspek sosial, perhatian Perusahaan tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Detail informasi aspek, topik maupun isu yang mempengaruhi Perusahaan serta pembangunan berkeberlanjutan tersaji pada sub bab isu-isu penting ekonomi, lingkungan dan sosial terkait dampak kegiatan perusahaan.

## The Company's Corporate Social Responsibility Vision and Mission

To continue to realize quality growth and development, and to meet the expectations of all stakeholders, the Company bases its social responsibility implementation in the following vision and mission.

### Vision

Making the Company as a State-Owned Enterprise that provides maximum benefits to the community, environment, and stakeholders through increased activities of the Partnership and Community Development Program (PKBL).

### Mission

To take an active role in realizing the improvement of the quality of life and community independence as well as environmental sustainability within the territory of the Republic of Indonesia through the resources owned by the Company and its subsidiaries.

## Due Diligence of Social, Economic, and Environmental Impacts of Company Activities

Due diligence of the Company's operational activities and their impact on the economy, environment and social are mapped based on the level of materiality of a subject as well as a matrix of negative risks that may arise. Based on this matrix, the Company maps out important subjects and issues that affect the Company and its sustainable development. Priority subjects and issues are formulated and then designed as a program which can ensure sustainability for stakeholders.

In the economy aspect, the Company has a responsibility to ensure sustainable economic performance, free from corruption practices and has benefits for other stakeholders. In the environment aspect, the Company carries out environmental risk studies to determine environmental risks from operational activities and control measures. On the social aspect, the Company's attention is not only on internal stakeholders, but also external ones.

Detailed information on aspects, topics as well as issues that affect the Company and sustainable development is presented in the sub-chapters on important economic, environmental and social issues related to the impact of Company activities.



## Stakeholder Penting yang Terdampak/ Berdampak

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan berinteraksi dengan berbagai *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan. Pemangku kepentingan Perusahaan diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan hubungan yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, demikian juga sebaliknya. Perusahaan selalu berupaya untuk mengelola pelibatan para Pemangku Kepentingan guna meningkatkan nilai Perusahaan. Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

## Important Stakeholders Affected/ Impacted by the Company Activities

In its business activities, the Company interacts with various stakeholders, either directly or indirectly, influencing or being affected by the Company's activities. The Company's stakeholders are identified based on the level of relationship interest that affects the Company's performance, and vice versa. The Company always strives to manage the involvement of Stakeholders in order to increase the value of the Company. Stakeholders who are influential or affected by the Company's activities can be described as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk Pelibatan Forms of Involvement	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Influence/Impact of Company Activities
Pemegang Saham Shareholders	RUPS, Laporan Kinerja GMS, Performance Report	Peningkatan kinerja dan peningkatan nilai Perusahaan serta dukungan pada kepentingan Pemegang Saham Improved performance and increased Company value as well as support for the interests of Shareholders
Karyawan Employees	Perjanjian Kerja Bersama, Pendidikan dan Pelatihan Collective Labor Agreement, Education and Training	Terjaminnya kesejahteraan karyawan beserta keluarganya; Suasana kerja yang kondusif, sehat, dan aman; jenjang karir dan penilaian kinerja yang adil dan transparan; pemenuhan hak-hak karyawan; meningkatkan efektivitas hubungan manajemen dan karyawan Guaranteed welfare of employees and their families; A conducive, healthy and safe working atmosphere; career paths and fair and transparent performance assessments; fulfillment of employee rights; improve the effectiveness of management and employee relations
Pemerintah Government	Kepatuhan terhadap Peraturan; Kesehatan Perusahaan; Compliance with Regulations; Company Soundness	Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan CSR) Economic contribution to the Government (taxes and community economic improvement activities through CSR activities)
Masyarakat Public	Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> , meliputi program pendidikan, pelatihan dan pengembangan, serta program sosial ekonomi lainnya Corporate Social Responsibility activities, including education, training and development programs, as well as other socio-economic programs	Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seiring dengan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan melalui pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Can improve the community's economy along with community empowerment in a sustainable manner through development of both physical and non-physical community welfare.
Konsumen/ Pelanggan Consumers/ Customers	Survei Kepuasan Pelanggan, dan program engagement lainnya Customer Satisfaction Survey, and other engagement programs	Peningkatan fasilitas atas produk-produk Perusahaan yang dapat memberikan kenyamanan dan kualitas hidup lebih baik. Improved facilities for the Company's products that can provide comfort and a better quality of life



Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk Pelibatan Forms of Involvement	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Influence/Impact of Company Activities
Rekanan Partners	Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama, Proses Operasional Cooperation Contracts and Agreements, Operational Process	Proses pengadaan yang adil dan transparan; Proses evaluasi yang objektif; Hubungan yang harmonis. Fair and transparent procurement process; Objective evaluation process; Harmonious relationship;
Media Massa Mass Media	Siaran Pers/Keterbukaan Informasi Press Release/Disclosure of Information	Memperoleh akses informasi yang akurat dan terkini. Gain access to accurate and up-to-date information

### Isu-isu Penting Sosial Ekonomi dan Lingkungan terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

### Important Socio-Economic and Environmental Issues related to the Impact of Company Activities

Aspek Aspects	Fokus Area Area of Focus	Strategi Strategy	Program Kerja Work Programs
Ekonomi Economy	Pengelolaan praktik bisnis berbasis tata kelola yang baik meliputi anti korupsi, persaingan sehat, penghormatan hak dan kekayaan intelektual serta bebas politik Management of business practices based on good governance, which includes anti-corruption, fair competition, respect for intellectual property and rights as well as free from politics	Peningkatan pengelolaan <i>good corporate governance</i> berbasis regulasi dan standar internasional Improving the management of good corporate governance based on regulations and international standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi <i>code of conduct</i> dan pakta integritas</li> <li>Pengelolaan <i>whistleblowing systems</i></li> <li>Dissemination of code of conduct and integrity pact</li> <li>Management of whistleblowing systems</li> </ul>
	Pengelolaan kepuasan pelanggan Customer satisfaction management	Pengelolaan program inovasi dalam hal produk dan layanan untuk memberikan kepuasan lebih pelanggan innovation programs in terms of products and services to achieve more customer satisfaction	<ul style="list-style-type: none"> <li>Improvement program secara berkelanjutan</li> <li>Penanganan keluhan pelanggan</li> <li><i>Customer satisfaction survey</i></li> <li>Continuous improvement program</li> <li>Handling customer complaints</li> <li><i>Customer satisfaction survey</i></li> </ul>
Sosial Social	Memberikan jaminan HAM karyawan Providing guarantees for employee's human rights	Penerapan praktik HAM di lingkungan kerja sesuai regulasi yang berlaku Implementation of human rights practices in the work environment in accordance with prevailing regulations	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi peraturan perusahaan serta <i>code of conduct</i></li> <li>Kebebasan mendirikan serikat pekerja pada <i>holding</i> maupun anak perusahaan</li> <li>Dissemination of the Company's regulations and code of conduct</li> <li>Freedom to establish unions in holding company as well as subsidiaries</li> </ul>



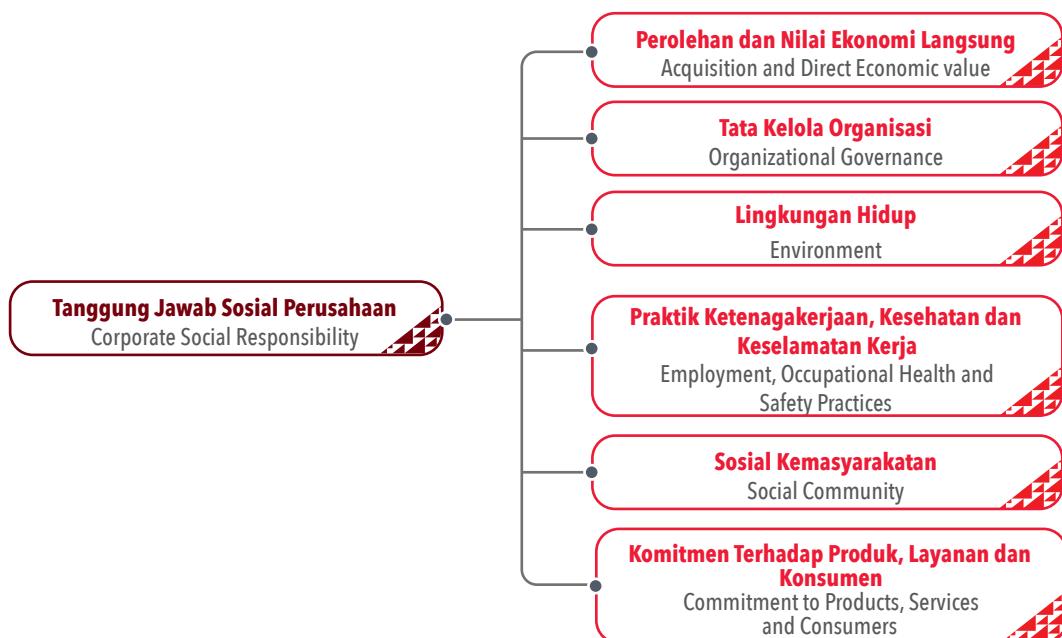
Aspek Aspects	Fokus Area Area of Focus	Strategi Strategy	Program Kerja Work Programs
	Pengelolaan ketenagakerjaan bebas diskriminasi serta membudayakan kesehatan dan keselamatan kerja Employment management which is free from discrimination and develops occupational health and safety	Pengelolaan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai regulasi, persyaratan pelanggan dan standar industri yang berlaku Management of employment, occupational health and safety according to regulations, customer requirements and industry standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alokasi kesempatan dan fasilitas pekerja difabel</li> <li>Pengelolaan sistem kesehatan dan keselamatan kerja berbasis regulasi dan standar yang berlaku</li> <li>Pengelolaan sarana maupun prasarana yang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja</li> <li>Allocation of opportunities and facilities for disabled workers</li> <li>Management of the occupational health and safety system based on applicable regulations and standards</li> <li>Management of facilities and infrastructure that supports occupational health and safety</li> </ul>
Lingkungan	Minimalisasi risiko dan dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas operasional Minimize risks and negative impacts on the environment due to operational activities	Pengelolaan lingkungan sesuai regulasi, pemenuhan persyaratan aktivitas sesuai standar industri yang berlaku Environmental management according to regulations, fulfillment of activity requirements according to prevailing industry standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan material maupun sumber daya secara efisien</li> <li>Inovasi berwawasan lingkungan</li> <li>Efficient use of materials and resources</li> <li>Environmentally-minded innovation</li> </ul>

### Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Di samping itu, terkait hak pemangku kepentingan lainnya, pengembangan dimensi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perusahaan dituangkan dalam beberapa aspek, yang mencakup aspek perolehan dan nilai ekonomi langsung; tata kelola organisasi, lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; sosial kemasyarakatan; serta aspek produk, layanan dan konsumen.

### The Scope of the Company's Corporate Social Responsibility

In addition, related to the rights of other stakeholders, the development of the Company's Corporate Social Responsibility dimension is outlined in several aspects, which include aspects of acquisition and direct economic value; organizational governance, environment; employment, occupational health and safety; social community; as well as product, service and consumer aspects.



## Target dan Realisasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2020

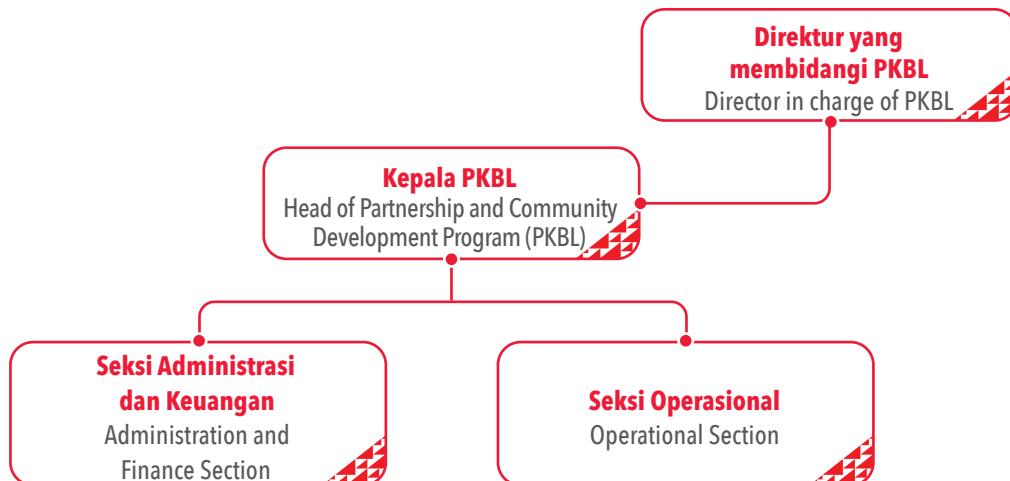
Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menjalankan berbagai kegiatan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar Rp1,2 miliar yang tersalurkan melalui Program Bina Lingkungan sebesar Rp408,6 juta dan Program Kemitraan sebesar Rp800 juta. Pada tahun 2020 tersebut, Perusahaan telah mencapai target penyaluran 100% untuk Program Bina Lingkungan dan mencapai efektivitas penyaluran Program Kemitraan sebesar 95,7% dari dana tersedia.

## Corporate Social Responsibility Program's Targets and Realizations in 2020

Throughout 2020, the Company has carried out various Corporate Social Responsibility Program activities amounting to a cost of IDR 1.2 billion which was channeled through the Community Development Program of IDR 408.6 million and the Partnership Program of IDR 800 million. In 2020, the Company has achieved 100% disbursement target for the Community Development Program and achieved the effectiveness of the Partnership Program distribution of 95.7% of the available funds.

### Struktur Organisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility Organizational Structure





# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS



## Komitmen dan Kebijakan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan jasa keuangan, sumber daya manusia merupakan aset utama yang dimiliki Perusahaan. Oleh karenanya, Perusahaan berupaya penuh dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan ini termasuk jaminan hak asasi manusia yang merupakan hak dasar. Komitmen Perusahaan adalah berupaya memastikan kesetaraan hak serta kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam praktik bisnis yang dijalankan Perusahaan.

Landasan dasar kebijakan pengelolaan hak asasi manusia bisa mengacu pada ISO 26000 Tanggung Jawab Sosial. Hal ini meliputi praktik nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan; termasuk di dalamnya masyarakat lokal, perempuan, orang dengan disabilitas dan lain-lain.

Cakupan definitif ini telah dilaksanakan oleh Perusahaan, baik dalam kegiatan operasional yang melibatkan karyawan, maupun kegiatan pengelolaan kegiatan usaha yang melibatkan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Perusahaan

## Commitments and Policies

As a company engaged in insurance and financial services, human resources are the main assets of the Company. Therefore, the Company makes full efforts in managing human resources. This management includes guarantees of human rights which are basic rights. The Company's commitment is to strive in ensuring equal rights and opportunities to participate and contribute to the business practices conducted by the Company.

The basic guidance of human rights management policies can refer to ISO 26000 on Social Responsibility. These include non-discriminatory practices and attention to vulnerable groups; including local communities, women, people with disabilities and others.

This definitive scope has been implemented by the Company, both in operational activities involving employees, as well as in business activity management which involves the community around the business location. The Company defines human



mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak mendasar bagi setiap individu yang terlibat maupun yang terkena dampak dari kegiatan operasi dan usaha yang dilakukan Perusahaan.

### Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab Sosial Hak Asasi Manusia

Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Perusahaan di antaranya meliputi penegakan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta hal terkait lainnya.

### Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Perusahaan senantiasa menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak karyawan, terutama hak terkait HAM seperti kehidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pemenuhan hak dasar hidup seperti peristiwa kelahiran dan kematian.

Sebagai bentuk implementasinya, Perusahaan telah memiliki sejumlah Prosedur Tetap yang mengatur berbagai pemenuhan HAM karyawan, dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan prosedur sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu, Perusahaan menekankan perihal tanggung jawab sosial terkait HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

### Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia

Sejalan dengan Kebijakan IFG, inisiatif penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bidang HAM dilakukan melalui berbagai program diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan senantiasa memberi kesempatan berkarier bagi karyawan disabilitas, serta berkomitmen untuk terus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan disabilitas yang ingin berkarier di IFG sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
2. Dari segi persamaan hak atas gender, Perusahaan tidak menutup peluang karier bagi para karyawan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan perempuan sebanyak 46,7% dari total keseluruhan karyawan;
3. Perusahaan juga tidak menutup berkarier bagi rekan-rekan seluruh Indonesia tanpa

rights as fundamental rights for every individual involved or affected by the Company's operations and business activities.

### Stakeholders and Impact of Corporate Social Responsibility related to Human Rights

The scope of social responsibility related to the implementation of human rights within the Company includes upholding the principles of diversity and equality for all employees, freedom of association, implementation of the remuneration and employee welfare system, commitment to Collective Labor Agreements (PKB) and other related matters.

### Corporate Social Responsibility Plan in the Human Rights Sector

The Company always emphasizes the importance of fulfilling employee rights, especially rights related to human rights such as a decent life, the right to associate and assemble, as well as the fulfillment of basic life rights such as births and deaths.

As a form of implementation, the Company already has a number of Permanent Procedures that regulate various fulfillments of employee human rights, and will continue to evaluate and develop the implementation of the Permanent Procedures in line with the increasingly complex needs of human life. In addition, the Company emphasizes the Corporate Social Responsibility related to human rights to be on target by implementing all policies related to human rights.

### Implementation of Corporate Social Responsibility Initiatives in the Human Rights Sector

In accordance with the IFG Policy, the initiative to implement Corporate Social Responsibility in the field of Human Rights is carried out through various programs including the following:

1. The Company always provides career opportunities for employees with disabilities, and is committed to continuing to provide opportunities for people with disabilities who want to have a career at IFG, in accordance with applicable regulations and requirements.
2. In terms of equal rights to gender, the Company opens career opportunities for female employees. This can be seen from the number of female employees in the Company of as much as 46.7% of the total employees.
3. The Company also opens careers opportunities for individuals throughout Indonesia regardless



memandang suku, agama, dan lainnya. Hal ini terlihat dari demografi Karyawan yang berasal dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia.

### **Prosedur dan Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Hak Asasi Manusia**

Perusahaan menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait hak asasi manusia. Oleh karenanya, Perusahaan mempersilahkan setiap aduan permasalahan disampaikan melalui kanal tersendiri. Setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai akan ditindaklanjuti secara independen. Karyawan dapat melakukan advokasi maupun meminta ruang penyelesaian atas suatu permasalahan.

### **Pencapaian dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Hak Asasi Manusia**

Perusahaan selalu berusaha meningkatkan mutu manajemen dan kualitas karyawan sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh Insan IFG. Selain Perusahaan, penghargaan inisiatif tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia juga ditunjukan oleh karyawan berupa peningkatan loyalitas, produktivitas dan efektivitas karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan dan membentuk citra positif Perusahaan untuk kesejahteraan bersama. Atas pengelolaan ini, hubungan antara Perusahaan dan karyawan berlangsung dengan baik. Sepanjang 2020, tidak ada persoalan antara Perusahaan dengan karyawan terkait pelanggaran HAM.

of their ethnicity, religion, and others. This can be seen from the demographics of employees who come from various ethnic groups in Indonesia.

### **Procedures and Mechanisms for Handling Conflicts Related to Human Rights**

The Company guarantees the implementation of policies properly and minimizes conflicts that occur related to human rights. Therefore, the Company welcomes any complaints to be submitted through a separate channel. Every complaint which is received by the Company will be followed up independently. Employees can advocate or ask for a solution to a problem.

### **Achievements and Awards for Corporate Social Responsibility Initiatives in the Human Rights Sector**

The Company always strives to improve the quality of management and employee quality so that they can work efficiently and effectively and provide benefits for all IFG Personnel. In addition to the Company, employees also show appreciation for corporate social responsibility initiatives in the field of human rights in increasing employee loyalty, productivity and effectiveness in order to improve the Company's performance and establish a positive image of the Company for mutual prosperity. With this management, the relationship between the Company and employees is going well. Throughout 2020, there were no disputes between the Company and employees regarding human rights violations.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS



## Komitmen dan Kebijakan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil, melalui berbagai kebijakan yang dimiliki Perusahaan yang mengatur dilaksanakannya operasi yang adil, di antaranya kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System* (WBS), *Code of Conduct*, dan kebijakan gratifikasi, serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat.

Perusahaan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kode etik Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan kegiatan operasional dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan atas kepentingan seluruh stakeholder. Wujud kegiatan operasional yang adil yaitu praktik bebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik,

## Commitments and Policies

In conducting the business activities, the Company has a commitment to always conduct fair operating practices, through various policies owned by the Company that regulate the implementation of fair operations, including internal control policies, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, and gratification policies, as well as the Partnership and Community Development Program. This policy is specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing healthy business activities.

The Company guarantees that every interested party obtains fair treatment in accordance with the Company's code of conduct and the provisions of the prevailing laws and regulations. The Company implements operational activities by taking into account the rights of the stakeholders so as to create a harmonious relationship and to create a balance between the interests of all stakeholders. The fair operational activities are corruption and bribery free practices, neutrality in political issues, respect for intellectual property, fair competition and



menghormati kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku.

### **Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil**

Pengelolaan operasi organisasi Perusahaan telah memerhatikan seluruh aspek tersebut, termasuk di dalamnya komitmen terhadap anti korupsi dalam penyelenggaraan bisnis Perusahaan, serta larangan keterlibatan politik bagi segenap insan IFG yang mengatasnamakan Perusahaan. Perusahaan menjunjung tinggi kompetisi yang adil, yang terlihat dari kepatuhan terhadap transaksi Pihak-pihak Berelasi sesuai keterbukaan informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan. Hal itu merupakan implementasi dari ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial memberikan definisi operasi yang adil sebagai praktik yang mencakup: anti korupsi; keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik; kompetisi yang adil; promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*); serta penghargaan atas *property rights*.

### **Pemangku Kepentingan dan Lingkup Dampak Tanggung Jawab atas Operasi yang Adil**

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel;
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan;
4. Konsumen dengan kepentingan atas pengelolaan jasa layanan yang bertanggung jawab;
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

### **Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil**

Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang bersandar pada 2 (dua) tujuan utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan

compliance with applicable laws and regulations.

### **Formulation of Social Responsibility Regarding Fair Operation**

The management of the Company's organizational operations has taken into account all aspects, including the commitment to anti-corruption in the operation of the Company's business, as well as the prohibition of political involvement for all IFG personnel on behalf of the Company. The Company upholds fair competition, which can be seen from compliance with related party transactions according to the disclosure of information in the Company's Financial Statements. It is an implementation of ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines, and it provides a definition of fair operation as a practice that includes: anti-corruption; responsible engagement in politics; fair competition; promotion of social responsibility in the supply chain; and awards for property rights.

### **Stakeholders and Impact of Corporate Social Responsibility related to Fair Operations**

Fair operation mainly emphasizes the importance of transparent, fair and equal management of the Company. Fulfillment of fair operation aspects involves the interests of various stakeholders, including:

1. Shareholders and their interests in transparent and accountable management of the Company.
2. Employees with an interest in Standard Procedures that are reasonable, fair, and with an accountable working mechanism.
3. Partners and suppliers who have an interest in the partnership process that relies on transparency and fairness.
4. Consumers with an interest in responsible service management.
5. Regulators who have an interest in a stable industry.

### **Corporate Social Responsibility Planning related to Fair Operation**

The targets as well as the plan for implementing Corporate Social Responsibility related to Fair Operation are emphasized on the implementation of Good Corporate Governance which relies on 2 (two) main objectives, namely compliance



dan perundang-undangan yang berlaku, serta pelibatan pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada kedua aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pelaksanaan Kegiatan

Penerapan praktik operasi yang adil pada kegiatan usaha IFG diwujudkan dalam inisiatif kebijakan strategis sebagai berikut:

- **Kebijakan Terkait Anti Korupsi**

Melibuti regulasi anti korupsi, kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan, sponsorship, donasi dan lainnya. Setiap pemberian maupun penerimaan harus terlebih dahulu dilaporkan. Setiap pelaporan mendapatkan disposisi untuk ditindaklanjuti selanjutnya.

- **Kebijakan Terkait Praktik Persaingan Usaha yang Adil**

Melibuti regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku baik secara industri maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pengadaan, Perusahaan memastikan layanan jasa terbaik dengan menerapkan praktik keadilan dan transparan. Hal tersebut diwujudkan dengan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang tertuang dalam Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 tanggal 24 Juli 2021.

- **Komitmen Perusahaan untuk Menghormati Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Melibuti berbagai regulasi hak atas kekayaan intelektual yang berlaku, serta kebijakan internal dalam melakukan improvisasi maupun inovasi. Hasil improvisasi maupun inovasi, didaftarkan kepada kementerian terkait untuk diverifikasi keabsahannya.

- **Kebijakan Perusahaan Terhadap Lobi, Kontribusi Politik dan Keterlibatan Politik**

Melibuti kebijakan benturan kepentingan praktik proses bisnis dengan kegiatan terkait politik, termasuk di dalamnya larangan sponsor, donasi dan sebagainya. Sementara itu, hak-hak pekerja sebagai individu untuk ikut serta dalam kegiatan politik dipersilahkan selama tidak ada benturan kepentingan.

with prevailing laws and regulations, as well as stakeholder involvement in order to grow together. The Company strives to continuously improve the implementation of GCG in both aspects, with the expectation of being able to create fair and accountable operations.

## Implementation of Fair Operations Activity

The implementation of fair operating practices in IFG's business activities is manifested in the following strategic policy initiatives:

- **Policies Related to Anti-Corruption**

It covers anti-corruption regulations, policies for giving and receiving gifts, entertainment, sponsorships, donations and others. Every gift or receipt must be reported beforehand. Each report gets a disposition for further follow-up.

- **Policies Regarding Fair Business Competition Practices**

It includes regulations for the procurement of goods and services that apply both industrially as well as in terms of prevailing laws and regulations. In conducting procurement, the Company ensures the best service by implementing fair and transparent practices. This is realized by the Policy on the Procurement of Goods and Services as stated in the regulation of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 dated July 24, 2021.

- **Company Commitment to Respect Intellectual Property Rights**

This covers various applicable intellectual property rights regulations, as well as internal policies in improvising and innovating. The results of improvisation and innovation are registered to the relevant ministries to verify their validity.

- **Company Policy Against Lobbying, Political Contributions and Political Engagement**

This covers the policy of conflicts of interest in business process practices with political-related activities, including prohibitions on sponsorship, donations and so on. Meanwhile, the rights of workers as individuals to participate in political activities are welcome as long as there is no conflict of interest.



- Komitmen Perusahaan dalam Rangka Patuh Hukum dan Regulasi**

Meliputi berbagai regulasi yang berlaku terhadap praktik bisnis Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mengadopsi berbagai standar internasional maupun industri untuk memberikan layanan terbaik.

### **Upaya Promosi Tanggung Jawab Sosial Kepada Rantai Pemasok**

Kegiatan tanggung jawab sosial dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* termasuk di dalamnya ialah pemasok. Perusahaan dalam melaksanakan proses pemilihan pemasok dengan menerapkan prinsip transparan, terbuka, adil, dan kompetitif. Pemasok diseleksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat untuk setiap pengadaan.

Upaya ini ditempuh untuk memberikan kesempatan kerja sama dengan perusahaan dalam negeri sehingga IFG dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, upaya tersebut juga memberikan manfaat bagi Perusahaan berupa efisiensi biaya operasional dan potensi jangka waktu pengadaan pun dapat dipersingkat. IFG mendefinisikan pemasok lokal adalah perusahaan yang berada di area yang sama dengan wilayah operasional Perusahaan.

### **Prosedur dan Mekanisme Penanganan Konflik Terkait Operasi yang Adil**

Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan panduan bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Perusahaan dan peraturan yang berlaku. IFG senantiasa menjamin terlaksananya semua kebijakan dengan baik dan meminimalisir konflik yang terjadi terkait kegiatan operasi yang adil. Adapun lingkup dan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait operasi yang adil diimplementasikan melalui sistem pengadaan dan kontrak pekerjaan. Perusahaan telah memiliki SOP terkait penanganan konflik terkait praktik operasi yang adil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 di IFG.

- Company Commitment to Compliance with Laws and Regulations**

This covers various regulations that apply to the Company's business practices. In addition, the Company also adopts various international and industry standards to provide the best service.

### **Efforts to Promote Corporate Social Responsibility to the Supply Chain**

Corporate Social Responsibility activities are conducted to provide benefits to all stakeholders, including suppliers. The Company in carrying out the supplier selection applies the principles of transparency, openness, fairness, and competitive. Suppliers are selected based on the provisions set out in the Work Plan and Terms for each procurement.

This measure is taken to provide opportunities for cooperation with domestic companies so that IFG can contribute to national economic development. In addition, these efforts also provide benefits for the Company in terms of operational cost efficiency and the potential for shortening the procurement period. IFG defines local suppliers as companies located in the same area as the Company's operational area.

### **Procedures and Mechanisms for Handling Conflicts Related to Fair Operations**

The Company always applies the principles of Good Corporate Governance (GCG) which is a guideline for all Company personnel in performing operational activities. Any violations that occur will be subject to strict sanctions in accordance with Company policies and applicable regulations. IFG always ensures the implementation of all policies properly and minimizes conflicts that occur related to fair operations. The scope and corporate social responsibilities related to fair operations are implemented through the procurement system and work contracts. The Company already has SOPs related to conflict handling related to fair operating practices as stated in the Board of Directors Regulation No. 001/PER-DIR/BPUI/VII/2020 at IFG:



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO THE ENVIRONMENT



## Komitmen dan Kebijakan

IFG menyadari bahwa lingkungan hidup memiliki peranan yang penting dalam menjaga keseimbangan rantai hidup manusia. Sehingga upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk turut menjaga kelestarian lingkungan hidup Perusahaan melakukan beberapa kebijakan yang ramah lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh IFG tidak hanya secara seremonial, tetapi juga mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari seluruh Insan Perusahaan.

Dalam pengelolaan kegiatan bisnis Perusahaan, IFG merupakan perusahaan yang tidak langsung bersentuhan dengan lingkungan hidup namun, IFG tetap mengedepankan komitmen ramah lingkungan dalam proses pengelolaan bisnis dan terus konsisten dalam menerapkan *sustainable development*. Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup di sekitar Perusahaan dan di lingkungan masyarakat secara umum. Tanggung jawab ini diimplementasikan melalui kegiatan

## Commitments and Policies

IFG realizes that the environment has an important role in maintaining the balance of the human life chain. For that reason, measures to preserve the environment are an obligation for all levels of society.

To participate in preserving the environment, the Company conducts several environmentally friendly policies. The corporate social responsibility activities in the environmental field conducted by IFG are not only ceremonial, but also implemented in the daily life of all Company Personnel.

IFG is a company that does not directly come into contact with the environment since IFG is a company engaged in insurance and financial services. However, IFG continues to prioritize environmentally friendly commitments in the business management process and continues to be consistent in implementing sustainable development. This is conducted to preserve the environment around the Company and in the community in general. This responsibility is



CSR dan melalui kehidupan sehari-hari Insan Perusahaan di kantor yakni beberapa di antaranya adalah dengan:

1. Meminimalisasi penggunaan kertas untuk memo dengan mengalihkannya ke surat elektronik (*e-mail*);
2. Menggunakan alat elektronik hemat energi;
3. Menggunakan kertas bekas atau print bolak balik untuk penghematan kertas dan tinta; dan
4. Penghematan air dan listrik dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan.

### Rencana Kegiatan

Di tahun 2020, IFG telah menetapkan rencana tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup yang diharapkan dapat membantu memperbesar kontribusi Perusahaan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan Lingkungan Hidup. Adapun rencana dan target Perusahaan di bidang lingkungan hidup di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Air Bersih di wilayah yang kesulitan air bersih;
2. Program Sanitasi yang layak untuk masyarakat.

### Kegiatan dan Dampaknya

Dalam setiap aktifitas bisnisnya, IFG selalu berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- **Pelestarian Lingkungan Hayati**

Dalam rangka menjaga ekosistem alam, Perusahaan mendukung ketersediaannya sarana kebersihan, salah satunya diwujudkan dengan peralatan angkut sampah yang dilaksanakan di setiap area operasional Perusahaan.

- **Operasional**

- a. Kertas

Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan oleh Perusahaan, yaitu melalui dukungan TI sehingga transaksi yang berbasis kertas diganti dengan tanpa kertas (*paperless*).

- b. Konsumsi Energi

Penggunaan energi di Perusahaan, yang diungkapkan pada Laporan ini, setidaknya berasal dari dua sumber, yaitu listrik dan BBM. Perusahaan menggunakan pendekatan perhitungan jumlah konsumsi energi listrik dengan cara mengkonversi total biaya penggunaan listrik dari PLN menjadi rata-rata jumlah kilo watt jam penggunaan.

implemented through CSR activities and through the daily life of the Company's Personnel in the office, some of which are by:

1. Minimizing the use of paper for memos by diverting them to electronic mail (*e-mail*);
2. Using energy-saving electronic devices;
3. Using used paper or print on both sides to save paper and ink; and
4. Saving water and electricity by conducting dissemination to all employees.

### Planned Activities

In 2020, IFG has established a corporate social responsibility plan in the environmental sector which is expected to increase the Company's contribution in maintaining environmental sustainability and balance. The Company's plans and targets in the environmental sector include the following:

1. Clean Water Supply Program in areas that have difficulty with clean water;
2. A proper sanitation program for the community.

### The Company's Business Activities and Impact

In each of its business activities, IFG always strives to pay attention to environmental aspects through various activities as follows:

- **Conservation of the Biological Environment**

To maintain the natural ecosystem, the Company supports the availability of cleaning facilities, one of which is realized by means of transporting garbage which is carried out in every Company's operational area.

- **Operations**

- a. Paper

The Company continues to strive for saving paper usage, namely through the support of Information Technology so that paper-based transactions are replaced with paperless ones.

- b. Energy Consumption

Energy use in the Company, which is disclosed in this Report, comes from at least two sources, namely electricity and fuel. The Company uses an approach to calculating the amount of electrical energy consumption by converting the total cost of using electricity from PLN to the average number of kilowatt hours of use. The same thing is also done for the calculation



Hal yang sama juga dilakukan untuk perhitungan bahan bakar jenis gasoline yang dipergunakan untuk sumber energi operasional transportasi internal Perusahaan.

Rincian penggunaan energi Perusahaan pada tahun 2020 dan 2019 ditunjukkan oleh tabel berikut:

#### Konsumsi Listrik

Tahun Year	Jumlah Konsumsi Amount of Consumption
2020	11.005,00 kWh
2019	8.318,30 kWh

#### Konsumsi Gasoline

Tahun Year	Jumlah Konsumsi Amount of Consumption
2020	10.340,97 Liter
2019	9.531,33 Liter

#### c. Air

Keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya ini membuat Insan IFG ekstra waspada akan stok atau persediaannya. Untuk menjaga stok atau persediaan air bersih dalam kegiatan operasional kantor sehari-hari, Perusahaan melakukan sosialisasi penghematan terhadap penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor, serta melakukan pengecekan secara rutin instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.

- **Pertimbangan Aspek Lingkungan terkait Kerja Sama dengan Mitra Kerja Pemasok/Vendor/Supplier**

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, Perusahaan kerap melakukan proses kerja sama dengan beberapa mitra kerja seperti Pemasok, Vendor ataupun Suplier, yang pada setiap prosesnya, Perusahaan selalu mempertimbangkan kualitas material yang akan di pakai oleh mitra kerja. Perusahaan pun senantiasa menganalisa setiap material yang akan digunakan oleh mitra kerja.

of the type of gasoline used for energy sources of the Company's internal transportation operations.

The details of the Company's energy use in 2020 and 2019 are shown in the following table:

#### Electricity Consumption

Tahun Year	Jumlah Konsumsi Amount of Consumption
2020	11.005,00 kWh
2019	8.318,30 kWh

#### Gasoline Consumption

Tahun Year	Jumlah Konsumsi Amount of Consumption
2020	10.340,97 Liter
2019	9.531,33 Liter

#### c. Water

The existence of clean water that continues to shrink every year makes IFG Personnel extra vigilant about their stock or supply. To maintain the stock or supply of clean water in daily office operational activities, the Company conducts dissemination of savings on the use of water resources within the office, as well as routinely checks water installations so that leaks are quickly identified and repaired.

- **Environmental Aspects Considerations related to Cooperation with Supplier/Vendor/Supplier Partners**

In its business activities, the Company often cooperates with several work partners such as Suppliers and Vendors, of which in each process, the Company always considers the quality of the material which will be used by work partners. The Company always analyzes every material that will be used by work partners.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY



## Komitmen dan Kebijakan

Perusahaan memahami bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu aset utama dari keberlangsungan bisnis usaha. Untuk itu, Perusahaan terus berupaya agar setiap Insan IFG mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Dalam bidang ketenagakerjaan, Perusahaan merujuk Undang-undang No. 13 Tahun 2003 untuk menyusun hak-hak normatif karyawan yang harus dipenuhi Perusahaan.

Dalam penerapan K3 di Perusahaan, IFG mengacu kepada kebijakan yang mengatur masalah K3 dan melindungi hak karyawan di bidang K3, meliputi:

1. Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana;
2. Pengelolaan Keberlangsungan Usaha.

## Lingkup Perumusan Tanggung Jawab Sosial Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Seperti yang telah dijelaskan di atas, pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung jawab pada aspek K3 adalah karyawan Perusahaan. Lingkup dampak meliputi kesejahteraan,

## Commitments and Policies

The Company understands that Human Resources is one of the main assets of business continuity. For this reason, the Company strives to provide all IFG Personnel with good occupational health and safety. In the field of employment, the Company refers to Law no. 13 of 2003 to formulate the normative rights of employees which must be fulfilled by the Company.

In implementing OHS in the Company, IFG refers to policies that regulate OHS issues and protect the rights of employees in the OHS sector, including:

1. Technical Guidelines for Disaster Preparedness and Response Management;
2. Business Continuity Management

## Formulation of Social Responsibility Related to Employment, Occupational Health and Safety

As explained above, the stakeholders who are impacted by the corporate social responsibility for the OHS aspects are the employees of the Company. The impact includes welfare, fulfillment of rights,



pemenuhan hak-hak, pemantauan K3 dalam pelaksanaan proyek, serta pengelolaan kompetensi pribadi.

Sistem rekrutmen dan promosi di lingkup Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada semua Warga Negara Republik Indonesia untuk dapat diterima menjadi karyawan IFG. Demikian juga halnya dalam pengembangan karir, sistem pengembangan SDM yang berlaku di internal Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

### Rencana Kegiatan

Perusahaan telah menyusun rencana program tanggung jawab sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja setiap tahunnya. Di tahun 2020, Perusahaan telah menerapkan rencana atau program terkait ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, melalui berbagai kebijakan yang diantaranya adalah:

1. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
2. Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi karyawan dan keluarga;
3. Kepesertaan Asuransi Kesehatan bagi karyawan dan keluarga;
4. Medical Check Up bagi karyawan.

### Pelaksanaan Kegiatan dan Dampaknya

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang K3 yang dirasa dapat membantu karyawan dalam memahami hak dan kewajibannya. Sosialisasi yang dilakukan untuk bidang K3 diharapkan karyawan dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan saat terjadinya situasi darurat serta mengetahui perlindungan apa saja yang dimiliki oleh karyawan. Berikut adalah kegiatan K3 yang dilaksanakan oleh Perusahaan sepanjang tahun 2020:

- **Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja**

Kualitas Sumber Daya Manusia yang baik diyakini sebagai salah satu faktor penunjang Perusahaan agar dapat mencapai performa maksimal. Perusahaan terus berupaya untuk merekrut talenta terbaik dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi Insan IFG tanpa membedakan golongan, ras, agama, dan gender.

monitoring of OHS in project implementation, as well as management of personal competence.

The recruitment and promotion system within the Company provides equal opportunities to all Indonesian citizens to be accepted as IFG employees. Likewise in career development, the Human Resources (HR) development system that applies internally in the Company provides equal opportunities for every employee to be promoted to a higher position.

### Planned Activities

The Company has prepared a corporate social responsibility program plan related to employment, occupational health and safety every year. In 2020, the Company has implemented these plans or programs related to employment, occupational safety and health, through various policies including:

1. Participation in BPJS Ketenagakerjaan (Social Insurance on Employment);
2. Membership in BPJS Kesehatan (Governmental Health Insurance) for employees and their families;
3. Participation in Health Insurance for Employees and their families;
4. Medical Check Up for Employees.

### Implementation of Activities and Their Impact

Throughout 2020, the Company has performed various activities in the field of OHS which are deemed to be able to assist employees in understanding their rights and obligations. The dissemination carried out for the field of OHS is expected to get the employees to know the measures that need to be taken when an emergency situation occurs and to know what protections are owned by employees. The following are the OHS-related activities carried out by the Company throughout 2020:

- **Gender Equality and Employment Opportunities**

Good quality of Human Resources is believed to be one of the supporting factors for the Company in order to achieve maximum performance. The Company strives to recruit the best talent and provide equal opportunities to all Indonesian people to become IFG Personnel without discrimination of class, race, religion, and gender.


**Tingkat Perpindahan (*turnover*) Karyawan**

<b>Tahun Year</b>	<b>Total Turnover Total Turnover</b>	<b>Total Karyawan Total Number of Employees</b>
2020	7	77
2019	10	43
2018	7	55

**• Remunerasi**

Sebagai salah satu hak karyawan yang harus dipenuhi, Perusahaan mengatur kebijakan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem remunerasi yang dikembangkan Perusahaan adalah sistem remunerasi berbasis kinerja (*performance-based*). Sistem ini mengatur jumlah remunerasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jabatan atau peran dalam organisasi, atau biasa disebut sebagai input organisasi. Selain berdasarkan jabatan dan peran, penentuan nominal remunerasi juga ditetapkan berdasarkan kinerja atau manfaat ekonomis yang dihasilkan untuk organisasi atau biasa disebut dengan *output* organisasi. Untuk menghargai loyalitas karyawan yang telah mengerahkan seluruh waktu dan pikiran untuk mencapai tujuan Perusahaan, IFG menetapkan kenaikan jumlah remunerasi secara berkala yang dilakukan setiap tahun berdasarkan penilaian kinerja karyawan dengan tetap memperhatikan anggaran keuangan Perusahaan.

**• Kesejahteraan Karyawan**

Untuk mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan Insan IFG, Perusahaan juga menjamin kesejahteraan karyawan dengan memberikan komponen penghasilan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan, dan bonus/incentif kinerja sesuai dengan tingkatan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No. 034/SK/DIR/CORP/BPUI/IX/2020 tentang Kebijakan Penghasilan Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Adapun tunjangan yang diberikan kepada karyawan IFG adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan Hari Raya;
- b. Tunjangan Cuti Tahunan;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Operasional;
- e. Tunjangan Induk Perusahaan;
- f. Tunjangan Keahlian;
- g. Tunjangan Makan;
- h. Tunjangan Cuti Besar.

**Employee Turnover**
**• Remuneration**

As one of the employee's rights that must be fulfilled, the Company regulates the remuneration policy in accordance with the prevailing laws and regulations. The remuneration system developed by the Company is a performance-based remuneration system. This system regulates the amount of remuneration given to employees based on position or role in the organization, or commonly referred to as organizational input. In addition to the position and role, the determination of the nominal of the remuneration is also based on the performance or economic benefits generated for the organization or commonly referred to as organizational output. To appreciate the loyalty of employees who have put all their time and thought into achieving the Company's goals, IFG sets a regular increase in the amount of remuneration which is conducted every year based on employee performance assessments while still taking into account the Company's financial budget.

**• Employee's Welfare**

To appreciate the contributions that have been made by IFG Personnel, the Company also ensures the welfare of employees by providing income components consisting of basic salary, allowances, and bonuses/performance incentives according to their level as stated in the Decree of the Board of Directors No. 034/SK/DIR/CORP/BPUI/IX/2020 regarding the Employee Income Policy of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. The benefits provided to IFG employees are as follows:

- a. Religious Holiday Allowance
- b. Annual Leave Allowance
- c. Position Allowance
- d. Operational Allowance
- e. Parent Company Allowance
- f. Expertise Allowance
- g. Meal Allowance
- h. Major Leave Allowance



- **Mekanisme Pengaduan Masalah**

#### Ketenagakerjaan

Dalam pelaksanaan usahanya, dapat terjadi masalah ketenagakerjaan sewaktu-waktu. Untuk mengantisipasi adanya masalah ini, Perusahaan telah membentuk mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan yang memungkinkan karyawan untuk mengadukan masalah ketenagakerjaannya ke Divisi Sumber Daya Manusia yang secara langsung menaungi masalah ketenagakerjaan seluruh Insan IFG.

- **Hubungan Industrial**

Perusahaan menyadari bahwa lingkungan kerja yang kondusif dapat menunjang kinerja Insan IFG semakin optimal. Untuk menjaga harmonisasi tersebut, Perusahaan terus berupaya untuk menciptakan hubungan industrial yang selaras antara karyawan dan Perusahaan.

- **Sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Insan IFG mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1970 dan Undang-undang No. 23 tahun 1992. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 23 mengenai kesehatan kerja, disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, syarat-syarat Keselamatan Kerja seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya serta jenis-jenis bahaya diatur dengan peraturan perundangan.

Perusahaan telah melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang diterapkan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan mencegah penyakit yang mungkin muncul karena kelalaian saat bekerja. Dengan memicu penerapan K3 dalam setiap menjalankan kegiatan industri, diharapkan dapat berdampak pada hasil produksi dan keselamatan tenaga kerja yang semakin baik.

Sementara untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penanganan terhadap keadaan darurat, IFG melengkapi lingkungan kerja di kantor pusat dengan fasilitas keselamatan kerja, seperti:

- **Complaint Mechanism on Employment Problem**

In conducting the business, employment problems may occur at any time. To anticipate this problem, the Company has established a complaint mechanism for labor issues that allows employees to complain about their employment problems to the Human Resources Division which directly oversees employment issues for all IFG Personnel.

- **Industrial Relations**

The Company realizes that a conducive work environment can support the optimal performance of IFG Personnel. To maintain this harmonization, the Company continues to strive in creating harmonious industrial relations between employees and the Company.

- **Occupational Health and Safety Facilities**

IFG personnel receive occupational health and safety guarantees as regulated in Law No. 1 of 1970 and Law no. 23 of 1992. In Law no. 23 of 1992 concerning Health, Article 23 concerning occupational health. It is stated that occupational health efforts must be carried out in every workplace, especially a workplace that has a high risk of health hazards for workers so that they can work in a healthy manner without endangering themselves and the surrounding community, in order to obtain health benefits and optimal work productivity, in line with the labor protection program. Whereas in Law no. 1 of 1970, Occupational Safety requirements for all aspects of hazardous work and types of hazards are regulated by laws and regulations.

The Company has disseminated the regulations applied to ensure the health and safety of employees. This is conducted to prevent work accidents and prevent diseases that may arise due to negligence at work. By triggering the implementation of OHS in carrying out industrial activities, it is hopeful that it will have an impact on better production results and workforce safety.

Meanwhile, to reduce the risk of work accidents and handling emergencies, IFG complements the work environment at the head office with safety facilities, such as:



- a. APAR (CO<sub>2</sub> dan *Dry Cemical Powder*);
  - b. Hydrant;
  - c. Peralatan *Floor Warden* (Helm, Rompi, Bendera, dan Megaphone).
- a. Light Fire Extinguisher (CO<sub>2</sub> and Dry Chemical Powder);
  - b. Hydrants;
  - c. Floor Warden Equipment (Helmet, Vest, Flag, and Megaphone).

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO RESPONSIBILITY TO CONSUMERS AND WORK PARTNERS

IFG merupakan *holding* non operasional di mana jenis produk dan jasa yang dimiliki dioperasikan melalui 10 (sepuluh) anak perusahaan. Masing-masing anak perusahaan memiliki kompetensi inti sebagai penyedia solusi yang berkualitas bagi pelanggannya sesuai dengan segmen produk dan layanan yang dihadirkan. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, IFG senantiasa untuk terus menerus meningkatkan kepuasan nasabah. Hal tersebut ditunjukan dengan terus memberikan kinerja terbaik di hadapan nasabah, Perusahaan optimis akan mendapatkan kepercayaan nasabah untuk melakukan transaksi sebagai konsumen IFG.

Sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap nasabah, IFG memberikan edukasi literasi keuangan yang sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 pasal 14 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman nasabah mengenai literasi keuangan.

IFG is a non-operational holding in which the types of products and services owned are operated through 10 (ten) subsidiaries. Each subsidiary has core competencies as a provider of quality solutions for its customers in accordance with the product and service segments presented. In carrying out its business activities, IFG always strives to continuously improve customer satisfaction. This is shown by continuing to provide the best performance in front of customers, the Company is optimistic that it will gain customers' trust to conduct transactions as IFG consumers.

As a form of the Company's responsibility towards customers, IFG provides financial literacy education. This activity is in line with Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 article 14 paragraph 1 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and conducted to increase customers' understanding of financial literacy.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT



## Lingkup dan Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Sosial dan Kemasyarakatan

Lingkup dan perumusan tanggung sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan secara umum meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi PKBL, ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara meliputi:

1. Program Kemitraan: Sektor Pertanian, Industri, Jasa, Perkebunan, Perdagangan, Peternakan, Perikanan;
2. Bina Lingkungan: Sektor Pendidikan, Pelestarian Alam, Kesehatan, Bencana Alam, Sarana Ibadah, Pra-Sarana dan Sarana Umum, Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan.

## Coverage and Formulation of Corporate Social Responsibility related to Social and Community Development

The coverage and formulation of corporate social responsibility related to social development in general covers the economic, social and environmental fields. In terms of PKBL, the coverage is in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 regarding the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises, which includes:

1. Partnership Program: The sectors of Agriculture, Industry, Services, Plantation, Trade, Livestock, and Fishery;
2. Community Development: The sectors of Education, Nature Conservation, Health, Natural Disasters, Worship Facilities, Infrastructure and Public Facilities, and Social Assistance for Poverty Alleviation.



## **Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan**

Berdasarkan Risalah Rapat No. RIS-33/D7.MBU.3/11/2019 tanggal 19 November 2019 telah dilakukan pembahasan bersama Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan KBUMN, maka Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2020 yaitu:

### 1. Program Kemitraan:

Rencana penyaluran dana Program Kemitraan pada RKA 2020 sebesar Rp1,59 miliar yang bersumber dari dana tersedia (bergulir) Program Kemitraan tahun 2020 yang terdiri dari:

- Penyaluran PK kepada Mitra Binaan sebesar Rp1,57 miliar;
- Pembinaan Mitra Binaan sebesar Rp20 juta akan digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas MB melalui kegiatan seminar/workshop dan atau sertifikasi produk dan pengurusan izin usaha mitra binaan.

Perusahaan bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura sebagai anak perusahaan mengembangkan usaha kecil kepada mitra binaan melalui bantuan dana Program Kemitraan yang akan dilakukan dengan cara pembiayaan pola Bagi Hasil, dalam bentuk:

- Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap produktif dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

### 2. Program Bina Lingkungan:

Rencana penyaluran dana Program Bina Lingkungan pada RKA 2020 sebesar Rp400 juta atau 100% dari anggaran 2019 yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN tahun 2020. Adapun program Bina Lingkungan yang direncanakan pada tahun 2020 berdasarkan sektor bantuan, adalah sebagai berikut:

## **Targets/Plans of Corporate Social Responsibility Activities related to Social and Community Development**

Based on the Minutes of Meeting No. RIS-33/D7.MBU.3/11/2019 on November 19, 2019, a discussion was held with the Assistant Deputy for Social and Environmental Responsibility of the Ministry of SOEs, which decided that the 2020 Partnership and Community Development Program (PKBL) Work Plan and Budget includes:

### 1. Partnership Program

The planned distribution of Partnership Program funds in the 2020 RKA amounting to IDR 1.59 billion, which is generated from available (revolving) funds for the 2020 Partnership Program, which consists of:

- Distribution of Partnership Program/PK to Fostered Partners in the amount of IDR 1.57 billion;
- Capacity Development of Fostered Partners in the amount of IDR 20 million, which was used for capacity building activities of fostered partners through seminars/workshops and/or product certification and processing of business licenses of fostered partners.

The Company cooperates with PT Bahana Artha Ventura as a subsidiary to develop small businesses for fostered partners through Partnership Program funding assistance which will be carried out by way of Profit Sharing scheme financing, in the form of:

- Loans to finance venture capital and or purchase of productive fixed assets in order to increase production and sales;
- A special loan to finance short-term funding needs for the implementation of the Fostered Partner's business activities in order to fulfill orders from the Fostered Partner's business partners.

### 2. Community Development (BL) Program

The planned distribution of funds for the Community Development Program in the 2020 RKA is IDR 400 million or 100% of the 2019 budget, which is sourced from the budget which is calculated as a cost to SOEs in 2020. The Community Development program planned in 2020, based on the aid sector, is as follows:



### Tabel Rencana Program Bina Lingkungan Berdasarkan Sektor

Table of Plans of Environmental Development Program based on Sectors

Sektor Sectors	RKA 2020
Bencana Alam Natural Disasters	-
Pendidikan dan/atau pelatihan Education and/or Trainings	200.000.000
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	35.000.000
Sarana Ibadah Place of Worship	30.000.000
Sosial Kemasyarakatan/Pengentasan Kemiskinan Social Community/Poverty Alleviation	135.000.000
<b>Total</b> <b>Total</b>	<b>400.000.000</b>

### Kegiatan dan Dampak Kuantitatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

#### Biaya Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Jumlah penyaluran program tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan pada tahun 2020 mencapai Rp1,2 Miliar, atau menurun 42,6% dari tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

### The Activities and Quantitative Impact on the Implementation of Corporate Social Responsibility in Social and Community Development

#### Costs of Corporate Social Responsibility in Social and Community Development

The total distribution of Corporate Social Responsibility in Social and Community Development in 2020 was IDR1.2 billion, or decreased by 42.6% from 2019, with details as follows:

### Tabel Realisasi Biaya Tanggung Jawab Sosial Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Table of Realization of Costs of Corporate Social Responsibility in the Social and Community Sector

No	Perihal Regarding	2020 (Rp)	2019 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Jumlah Total (Rp)	Persentase Percentage (%)
1	Program Kemitraan Partnership Program	800.000.000	1.707.400.000	-907.400.000	-53,15
2	Program Bina Lingkungan Community Development Program	408.641.697	400.104.610	8.537.087	2,13
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.208.641.697</b>	<b>2.107.504.610</b>	<b>-898.862.913</b>	<b>-42,65</b>

Penurunan tersebut dikarenakan menurunnya jumlah dana tersedia Program Kemitraan 2020 yang dana nya bersumber dari pengembalian pinjaman mitra binaan yang sebagian besar terkena dampak dari Pandemi COVID-19.

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Perusahaan telah menyalurkan Rp1,2 miliar kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sebagai wujud upaya perusahaan untuk senantiasa

The decrease was due to the decrease in the amount of funds available for the 2020 Partnership Program, which were sourced from the repayment of loans from fostered partners, most of whom were affected by the COVID-19 pandemic.

Through the Partnership and Community Development Program, the Company has distributed IDR1.2 billion to the community through various activities as a form of the Company's efforts



menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan sosial kemasyarakatan agar dapat mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera yang turut tumbuh kembang bersama Perusahaan dan dapat berkoeksis dalam hubungan yang harmonis.

### C.2. Kegiatan Program Kemitraan Tahun 2020

Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan selama tahun 2020 sebesar Rp800 juta kepada PMVD Pinjaman disalurkan kepada 5 mitra binaan di wilayah Surakarta, Jawa Tengah melalui Kolaborasi dengan PT Bahana Artha Ventura.

Pada tahun 2020, Perusahaan berhasil menyeleksi dan membina 8 mitra binaan baru yang disalurkan ke berbagai sektor yaitu:

1. Perdagangan sebesar Rp774 juta (96,7%);
2. Jasa sebesar Rp26 juta (3,3%).

Melalui penyaluran dana pinjaman sebesar Rp800 juta dari total dana tersedia sebesar Rp836 juta, maka pada tahun 2020 efektivitas penyaluran Program Kemitraan mencapai 95,7% atau skor 3.

Sampai dengan 31 Desember 2020, piutang pinjaman mencapai Rp2,71 miliar. Secara terperinci sebagai berikut:

to always align its presence and business activities in the community. Therefore, the Company is committed to continuing to carry out social and community development programs in order to achieve an independent and prosperous society that also grows and develops with the Company and can coexist in a harmonious relationship.

### C.2. 2020 Partnership Program Activities

Partnership Program Loans distributed in 2020 amounting of IDR 800 million of PMVD Loans distributed to 5 fostered partners in the Surakarta area of Central Java through a collaboration with PT Bahana Artha Ventura.

In 2020, the Company succeeded in selecting and fostering 8 new fostered partners which were distributed to various sectors, namely:

1. Trade of IDR 774 million (96.7%);
2. Services of IDR 26 million (3.3%).

Through the distribution of loan funds amounting to IDR 800 million, from the total available funds of IDR 836 million, in 2020 the effectiveness of the distribution of the Partnership Program was 95.7% or a score of 3.

As of December 31, 2020, loan receivables reached IDR 2.71 billion with detail as follows:

**Tabel Piutang Pinjaman Mitra Binaan (Audited data)**

Table of Assisted Partner Loan Receivables (Audited Data)

Berdasarkan Wilayah Region Based	2020	2019
PMVD Jawa Barat PMVD of West Java	1.325.000.000	1.625.000.034
PMVD Surakarta PMVD of Surakarta	800.000.000	-
PMVD Jawa Timur PMVD of East Java	591.666.675	961.111.111
PMVD Bali PMVD of Bali	-	55.555.556
	2.716.666.675	2.641.666.700

Sepanjang tahun 2020 terdapat peningkatan nilai piutang pinjaman mitra binaan sebesar 102,8% dibandingkan dengan tahun 2019, dengan kolektibilitas 100% lancar.

Throughout 2020, there was an increase in the value of loan receivables from fostered partners by 102.8% when compared to 2019, with 100% current collectibility.



### Kegiatan Program Bina Lingkungan Tahun 2020

Community Development Program Activities in 2020

Sektor Sectors	RKA 2020	Realisasi s.d 31 Desember 2020 Realization until December 31, 2020	%
Bencana Alam Natural Disasters	-	31.632.900	N/A
Pendidikan dan/atau pelatihan Education and/or Trainings	200.000.000	62.100.000	31
Peningkatan Kesehatan Health Improvement	35.000.000	84.469.797	241
Sarana Ibadah Place of Worship	30.000.000	30.000.000	100
Sosial Kemasyarakatan/ Pengentasan Kemiskinan Social Community/Poverty Alleviation	135.000.000	200.439.000	148
<b>Total</b>	<b>400.000.000</b>	<b>408.641.697</b>	<b>102,16</b>

Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan Bina Lingkungan ke beberapa wilayah di Indonesia dengan penyaluran sebesar Rp408,6 juta atau 102% dari target di tahun 2020. Adapun diantaranya terdapat program-program unggulan Bina Lingkungan pada tahun 2020 sebagai berikut:

The Company has carried out various Community Development activities to several regions in Indonesia with a distribution of IDR 408.6 million or 102% of the target in 2020. Among them are the flagship Community Development programs in 2020, such as:

#### Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Cipasung, Jawa Barat

Empowerment Program of Coffee Farmer Community in Cipasung Tourism Village, West Java



Desa Cipasung merupakan kawasan yang memiliki beragam potensi wisata alam, sejarah, budaya dan agrowisata. Salah satu produk lokal yang berpotensi adalah kopi, terutama jenis Liberica tanak merupakan varietas khas dengan aroma nangka. Selama ini, proses pengolahan biji kopi liberica masih melalui proses manual sehingga belum mencapai kapasitas produksi yang optimal. Selain itu, kelompok petani kopi di Desa Cipasung juga belum berpengalaman mengolah biji kopi Liberica menjadi minuman kopi siap saji.

Cipasung Village is an area that has a variety of natural, historical, cultural and agro tourism potentials. One of the potential local products is coffee, especially the Liberica tanak type, which is a distinctive variety with the aroma of jackfruit. So far, the processing of Liberica coffee beans is still conducted through a manual process so that it has not yet reached optimal production capacity. In addition, the coffee farmer group in Cipasung Village also has no experience in processing Liberica coffee beans into ready-to-serve coffee drinks.

Dalam rangka meningkatkan potensi-potensi di atas, Perusahaan menggandeng Anggota Holding untuk bersama-sama memberikan bantuan mesin pascapanen kopi (mesin *roasting*, *pulper*, pencuci dan pengering) serta mesin espresso kepada para petani kopi. Dalam pelaksanaan program ini, Perusahaan juga menggandeng Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Trisakti untuk melakukan *social mapping* kebutuhan masyarakat petani kopi, memberikan advokasi, penguatan kelembagaan, asistensi teknis pembibitan kopi hingga pelatihan barista, pemasaran dan promosi serta memberikan pelatihan Barista kepada masyarakat di Desa Wisata Cipasung.

Skema Program Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Cipasung dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

In order to increase the above potentials, the Company cooperates with Holding Members to jointly provide assistance in the form of post-harvest coffee machines (roasting machines, pulpers, washers and dryers) and espresso machines to coffee farmers. In implementing this program, the Company also cooperates with the Trisakti College of Tourism (STP) to conduct a social mapping of the needs of the coffee farming community, provide advocacy, institutional strengthening, and technical assistance in coffee nurseries to barista training, marketing and promotion as well as providing Barista training to the community in Cipasung Tourism Village.

The scheme of the Coffee Farmer Community Empowerment Program in Cipasung Village can be illustrated in the following chart:

### Skema Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi di Desa Cipasung

The scheme of the Coffee Farmer Community Empowerment Program in Cipasung Village





### Program Webinar “Peluang Bisnis di Era Pandemi COVID-19” dan “Pemasaran Online di Era Pandemi COVID-19”

“Business Opportunities in the Era of the COVID-19 Pandemic” and “Online Marketing in the Era of the COVID-19 Pandemic” Webinar Programs



Masa pandemi COVID-19 yang telah kita rasakan bersama dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini membuat berbagai sektor usaha mengalami guncangan, penurunan yang signifikan terutama untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”).

Dalam rangka peran BUMN dan penguatan UMKM di era pandemi ini, maka perlu dilakukan pelatihan dan penyuluhan terhadap UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan melalui Program Webinar.

Untuk itu, Perusahaan bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila mengadakan Program Webinar dengan target peserta adalah para pelaku UMKM, Mahasiswa, Pekerja dan masyarakat umum sebanyak 75 orang peserta.

The COVID-19 pandemic that we have experienced together from the beginning of 2020 until now has made various business sectors experience shocks and significant decline, especially for Micro, Small and Medium Enterprises (“MSMEs”).

In the context of the role of SOEs and strengthening MSMEs in this pandemic era, it is necessary to conduct training and counseling for MSMEs affected by the COVID-19 pandemic while still implementing health protocols through the Webinar Program.

For this reason, the Company, in collaboration with the Faculty of Economics and Business, Pancasila University, held a Webinar Program with the target participants were MSME actors, students, workers and the general public of as many as 75 participants.

Tema Webinar yang berkaitan dengan UMKM adalah:

1. **Seri 1:** "Peluang Bisnis di Era Pandemi COVID-19" yang diadakan pada hari Selasa, 29 September 2020;
2. **Seri 2:** "Pemasaran Online di Era Pandemi COVID-19" pada hari Selasa, 20 Oktober 2020.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Webinar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mapping kondisi UMKM yang ada;
- b. Memberikan solusi dan peluang usaha yang mungkin dan bisa dilakukan untuk dan oleh UMKM;
- c. Supervisi BUMN yang dapat dilakukan; dan
- d. Informasi dan peluang follow up kegiatan untuk IFG.

Webinar themes related to MSMEs are:

1. **Series 1:** "Business Opportunities in the Era of the COVID-19 Pandemic" held on Tuesday, September 29, 2020
  2. **Series 2:** "Online Marketing in the Era of the COVID-19 Pandemic" held on Tuesday, October 20, 2020
- The aims and objectives of the Webinar are as follows:
- a. Mapping the existing condition of MSMEs;
  - b. Providing possible and applicable solutions and business opportunities for and by MSMEs;
  - c. Supervision of implementable SOEs; and
  - d. Information and opportunities for follow-up activities for IFG.

### Program Pembangunan Water Well dan Sarana Sanitasi di Desa Tenjo, Jawa Barat

Water Well and Sanitation Facilities Development Program in Tenjo Village, West Java



Daerah Singabrama, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memiliki 650 kepala keluarga yang belum memiliki fasilitas sanitasi atau kesehatan lingkungan yang memadai dan kerap terpapar risiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan berbasis lingkungan seperti; diare, demam berdarah dengue, infeksi saluran pernafasan akut dan lainnya.

Perusahaan menyediakan sarana air bersih, sanitasi (kamar mandi, WC dan urinoir), sarana pembuangan air limbah dan sarana pembuangan sampah sangat diperlukan demi mencapai lingkungan yang nyaman dan sehat di Desa Tenjo. Dengan membantu menyediakan layanan sanitasi serta akses air bersih yang memadai, maka akan berdampak terhadap beberapa hal sebagai berikut:

Singabrama area, in Tenjo sub-district, Bogor regency, West Java, which has 650 families who do not have adequate sanitation or environmental health facilities, and are often exposed to the risk of various environmental-based health problems such as; diarrhea, dengue hemorrhagic fever, acute respiratory infections and others.

The Company provides clean water facilities, sanitation (bathrooms, toilets, and urinals), waste water disposal facilities, and waste disposal facilities which are needed to achieve a comfortable and healthy environment in Tenjo Village. By helping to provide adequate sanitation services and access to clean water, it will have an impact on the followings:



1. mengurangi risiko munculnya wabah penyakit akibat rendahnya kebersihan/sanitasi lingkungan;
2. menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk semakin peduli dengan kondisi kesehatan dan lingkungan; dan
3. mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya.

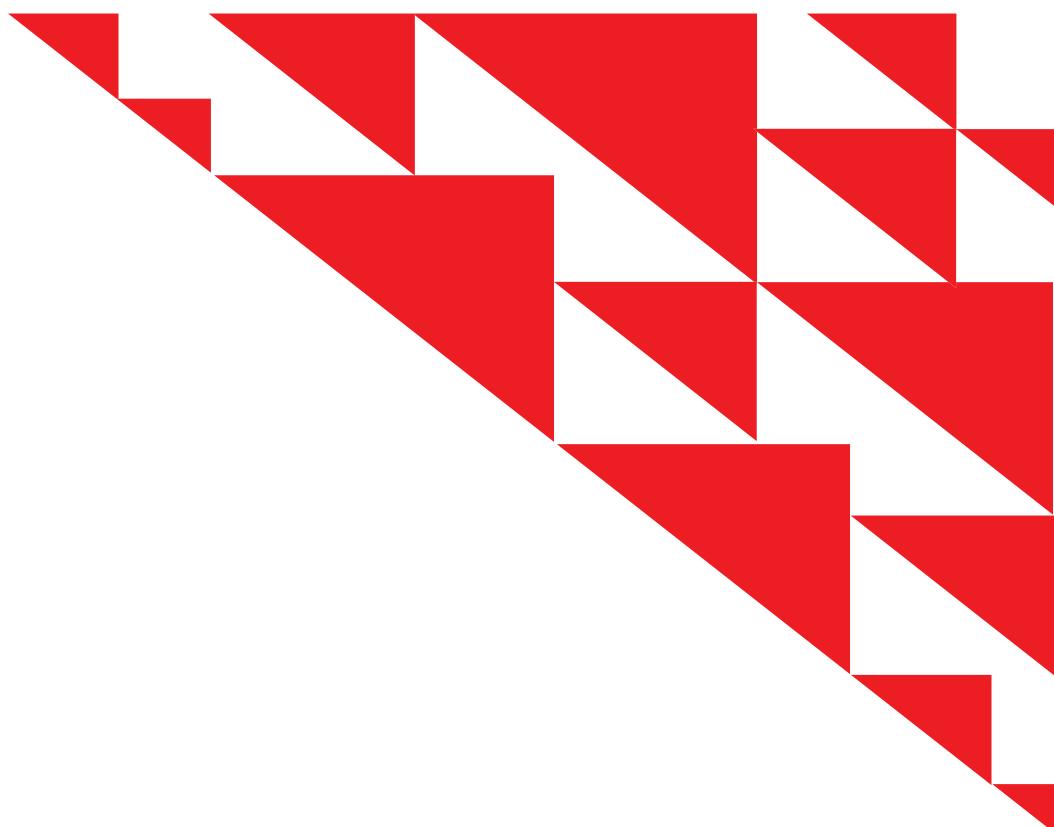
1. reduce the risk of disease outbreaks due to poor environmental hygiene/sanitation;
2. raise public awareness to be more concerned with health and environmental conditions; and
3. educate and motivate the community to maintain the health condition of themselves, their families and environment.

#### **Penghargaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan**

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan belum memperoleh penghargaan terkait bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Kendati demikian, Perusahaan senantiasa berkomitmen mewujudkan perannya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi usaha.

#### **Award for Social and Community Development**

Throughout 2020, the Company did not receive any awards related to social and community development. Nevertheless, the Company is always committed to realizing its role in improving the welfare of the community around the business location



# Laporan Keuangan

Financial  
Report





**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA  
(PERSERO) DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS  
SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/  
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER/*DECEMBER 2020***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN  
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA  
(PERSERO)**

Kami yang berlantai tangan dibawah ini,

1. Nama : Robertus Bintara  
Alamat kantor : Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190

Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Rizal Ariansyah  
Alamat kantor : Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190

Jabatan : Direktur Keuangan dan Umum

Menyatakan bahwa

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak telah diungkap secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghindarkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

Dari sini pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA  
(PERSERO)**

We, the undersigned:

1. Name : Robertus Bintara  
Office address : Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190

Position : President Director

2. Name : Rizal Ariansyah  
Office address : Gedung Graha CIMB Niaga Lt. 18  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190

Position : Finance and General Director

declare that

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its Subsidiaries;
2. The consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;  
b. The consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or facts;
4. We are responsible for the PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its Subsidiaries internal control system.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 13 Januari/January 2022  
Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Robertus Bintara  
Direktur Utama  
President Director



Rizal Ariansyah  
Direktur Keuangan dan Umum/  
Finance and General Director



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADА PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS OF

PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

**Management's responsibility for the consolidated financial statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditors' responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh keturuan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasiyan atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasiyan atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### Opinion

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its subsidiaries as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

JAKARTA,  
13 Januari/January 2022

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA  
Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0222

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 2018 <sup>1)</sup> / 1 Januari/ January 2019 <sup>1)</sup>	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	5,46	25,625,099	14,525,634	15,010,612	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	6,46	26,533,385	27,192,823	23,823,182	<i>Investments</i>
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	7	1,196,788	634,095	912,091	<i>Account receivables and other receivables - net</i>
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	8,46	5,224,650	5,460,147	4,701,884	<i>Insurance and reinsurance premium receivables - net</i>
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	9,46	2,547,138	1,476,814	1,290,811	<i>Guarantee fee receivables - net</i>
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	10,46	2,244,559	2,099,090	1,963,553	<i>Reinsurance and retrocession claim receivables - net</i>
Piutang penjaminan ulang - bersih	11	420,360	301,053	256,542	<i>Re-guarantee receivables - net</i>
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	12	1,919,695	1,649,699	1,383,403	<i>Venture capital financing receivables - net</i>
Piutang hasil investasi - bersih		172,717	303,851	214,946	<i>Investment income receivables - net</i>
Pajak dibayar dimuka	13a	188,421	155,763	86,433	<i>Prepaid taxes</i>
Penyertaan langsung	14	719,676	654,208	601,691	<i>Direct participation</i>
Aset tetap - bersih	15	2,115,442	1,985,288	1,915,983	<i>Fixed assets - net</i>
Properti investasi	16	445,652	457,494	458,999	<i>Investment properties</i>
Aset pajak tangguhan	13d	3,612,246	3,897,142	3,227,840	<i>Deferred tax assets</i>
Aset reasuransi	17	12,417,068	11,185,478	10,216,006	<i>Reinsurance assets</i>
Aset retrosesi	18	1,474,762	1,580,876	1,630,612	<i>Retrocession assets</i>
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	19	1,362,052	1,386,135	1,230,081	<i>Deferred acquisition cost - net</i>
Penjaminan ulang dibayar dimuka	20	895,447	949,574	867,586	<i>Prepaid reguarantee</i>
Aset lain-lain	21	3,223,975	1,786,364	1,383,007	<i>Other assets</i>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>92,339,132</b>	<b>77,681,528</b>	<b>71,175,262</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
Utang klaim asuransi dan reasuransi	22,46	535,107	471,933	927,074	<i>Insurance and reinsurance claim payables</i>
Utang klaim penjaminan	23,46	3,286	12,798	84,744	<i>Guaranteee claim payables</i>
Utang premi reasuransi dan retrosesi	24,46	1,564,402	2,266,183	2,353,236	<i>Reinsurance and retrocession payables</i>
Utang penjaminan ulang	25, 46	205,114	92,885	113,264	<i>Re-guarantee payables</i>
Utang usaha dan utang lain-lain	30	8,237,242	5,090,875	4,142,976	<i>Account payables and other payables</i>
Akrual	31	1,171,708	909,231	683,798	<i>Accruals</i>
Utang pajak	13b	944,562	597,241	348,240	<i>Taxes payable</i>
Liabilitas kontrak asuransi	26	31,838,782	29,407,326	26,492,917	<i>Insurance contract liabilities</i>
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	27	7,826,367	6,666,285	5,464,470	<i>Liabilities for financial guarantee contracts</i>
Pendapatan diterima dimuka		10,280	22,322	27,835	<i>Unearned revenue</i>
Pinjaman dari Pemerintah	28,46	982,488	1,252,454	1,254,554	<i>Government loans</i>
Utang bank	29,46	162,700	249,134	367,815	<i>Bank loans</i>
<i>Medium Term Notes</i>		14,105	13,901	14,481	<i>Medium Term Notes</i>
Liabilitas imbalan kerja	32	1,328,832	1,381,220	897,530	<i>Employee benefit liabilities</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>54,824,975</b>	<b>48,433,788</b>	<b>43,172,934</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
Dana tabarru		(188,854)	(112,316)	(175,809)	Tabarru fund

\*) Disajikan kembali lihat Catatan 4

Restated see Note 4 \*)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019 <sup>1)</sup>	31 Desember/ December 2018 <sup>1)</sup> 1 Januari/ January 2019 <sup>1)</sup>	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham	33				<b>EQUITY</b>
Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham					Share capital
Modal dasar: 240.000.000 lembar dan 1.000.000 lembar masing - masing pada tahun 2020 dan 2019					Rp 1,000,000 (full amount) at par per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh: - Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 67.163.536 saham per 31 Desember 2020					Authorised capital
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan Seri B - 272.499 saham per 31 Desember 2019		67,163,537	272,500	272,500	240,000,000 shares and 1,000,000 shares in year 2020 and 2019, respectively, Issued and fully paid capital:
Tambahan modal disetor	4, 33	(32,998,777)	-	-	1 share of Serie A Dwiwarna - and 67,163,536 of Serie B per 31 December 2020
Akumulasi keuntungan perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual		1,506,764	-	-	1 share of Serie A Dwiwarna - and 272,499 of Serie B per 31 December 2019
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		2,793	33,556	37,208	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya		677	677	677	Accumulated gain for change in fair value of available for sale investments
Saldo laba					Remeasurement of post- employment benefits
Ditetukan penggunaannya		201,383	170,577	166,435	Other equity components
Belum ditetukan penggunaannya		959,014	(15,102)	(68,616)	Retained earnings
Ekuitas merging entities	33	—	27,971,594	26,890,104	Appropriated Unappropriated
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		<u>36,835,391</u>	<u>28,433,802</u>	<u>27,298,308</u>	<b>Equity of merging entities</b>
Kepentingan nonpengendali		867,620	926,254	879,829	<b>Total equity attributable to the owners of the parent entity</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<u>37,703,011</u>	<u>29,360,056</u>	<u>28,178,137</u>	<b>Non-controlling interest</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<u>92,339,132</u>	<u>77,681,528</u>	<u>71,175,262</u>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>					

\*) Disajikan kembali lihat Catatan 4

Restated see Note 4 \*)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial  
statements form an integral part of these consolidated  
financial statements.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR  
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	Catatan/ Notes	2019 <sup>1)</sup>	
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>				<b>UNDERWRITING INCOME</b>
<b>Pendapatan premi asuransi</b>		34,46		<b>Insurance premium income</b>
Pendapatan premi asuransi bruto	21,821,566		23,707,121	Gross insurance premium income
Premi reasuransi dan retrosesi Kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	(5,844,937)		(6,601,679)	Reinsurance and retrocession premiums
	<u>(146,561)</u>		<u>(1,475,549)</u>	Increase in unearned premium reserves
<b>Pendapatan premi asuransi - bersih</b>	<u>15,830,068</u>		<u>15,629,893</u>	<b>Insurance premium income - net</b>
<b>Pendapatan penjaminan</b>		35,46		<b>Guarantee income</b>
Imbal jasa penjaminan Premi penjaminan ulang	2,826,524 (264,682)		2,313,611 (268,384)	Guarantee fee income Re-guarantee premiums
<b>Pendapatan penjaminan - bersih</b>	<u>2,561,842</u>		<u>2,045,227</u>	<b>Guarantee income - net</b>
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING - BERSIH</b>	<u>18,391,910</u>		<u>17,675,120</u>	<b>UNDERWRITING INCOME - NET</b>
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>				<b>UNDERWRITING EXPENSES</b>
<b>Beban klaim asuransi</b>		36,46		<b>Insurance claim expenses</b>
Beban klaim asuransi bruto	12,655,756		13,010,114	Gross insurance claim expenses
Klaim reasuransi dan retrosesi Kenaikan estimasi klaim retensi sendiri	(3,492,130)		(3,767,435)	Reinsurance and retrocession claims Increase in estimated own retention claims
	<u>1,222,939</u>		<u>742,498</u>	
<b>Beban klaim asuransi - bersih</b>	<u>10,386,565</u>		<u>9,985,177</u>	<b>Insurance claim expenses - net</b>
<b>Beban klaim penjaminan</b>		37,46		<b>Guarantee claim expenses</b>
Beban klaim penjaminan bruto	1,921,655		2,031,621	Gross guarantee claim expenses
Klaim penjaminan ulang Kenaikan estimasi liabilitas klaim	(232,171)		(321,036)	Re-guarantee claims Increase in estimated claim liabilities
	<u>514,377</u>		<u>417,872</u>	
<b>Beban klaim penjaminan - bersih</b>	<u>2,203,861</u>		<u>2,128,457</u>	<b>Guarantee claim expenses - net</b>
<b>Pendapatan subrogasi - bersih</b>	(973,391)	38	(1,071,793)	<b>Subrogation income - net</b>
<b>Beban akuisisi dan komisi asuransi - bersih</b>	1,966,601	39	2,249,637	<b>Acquisition cost and insurance commission expenses - net</b>
<b>Beban akuisisi dan komisi penjaminan - bersih</b>	58,853	39	61,893	<b>Acquisition cost and guarantee commission expenses - net</b>
<b>(Pendapatan)/beban underwriting lain-lain - bersih</b>	<u>(50,379)</u>	40	<u>73,469</u>	<b>Other underwriting (income)/expense - net</b>

<sup>1)</sup> Disajikan kembali lihat Catatan 4

Restated see Note 4 <sup>1)</sup>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.*

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2020</b>	Catatan/ Notes	<b>2019<sup>a)</sup></b>	
<b>JUMLAH BEBAN UNDERWRITING</b>	<b>13,592,110</b>		<b>13,426,840</b>	<b>TOTAL UNDERWRITING EXPENSES</b>
<b>HASIL UNDERWRITING - BERSIH</b>	<b>4,799,800</b>		<b>4,248,280</b>	<b>UNDERWRITING INCOME - NET</b>
Hasil investasi - bersih	2,852,163	42,46	2,922,282	<i>Investment income - net</i>
Pendapatan jasa keuangan	485,006	41	542,729	<i>Financial management service income</i>
Pendapatan hasil pengelolaan gedung	176,995	44	196,503	<i>Building management income</i>
Beban umum dan administrasi	(5,811,306)	43	(5,852,535)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan lain-lain - bersih	727,799	45	464,415	<i>Other income - net</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>3,230,457</b>		<b>2,521,674</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
Beban pajak penghasilan	(1,027,650)	13c	(283,062)	<i>Income tax expenses</i>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>2,202,807</b>		<b>2,238,612</b>	<b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>Penghasilan/(beban) komprehensif lain</b>				<i>Other comprehensive income/(expense)</i>
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi:				<i>Items that will be reclassified to profit or loss:</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	196,504		310,870	<i>Unrealised gains on fair value at other comprehensive income, net of tax</i>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali imbalan pasca kerja, setelah pajak	(31,564)	32	(313,701)	<i>Items that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of post employment benefits, net of tax</i>
<b>Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak</b>	<b>164,940</b>		<b>(2,831)</b>	<b>Other comprehensive income/(expense) for the year, net of tax</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2,367,747</b>		<b>2,235,781</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	2,129,527		2,158,924	<i>Owner of parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	73,280		79,688	<i>Non-controlling interest</i>
	<b>2,202,807</b>		<b>2,238,612</b>	
<b>LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADА:</b>				<b>COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	2,295,440		2,157,658	<i>Owner of parent entity</i>
Kepentingan nonpengendali	72,307		78,123	<i>Non-controlling interest</i>
	<b>2,367,747</b>		<b>2,235,781</b>	

\*) Disajikan kembali lihat Catatan 4

Restated see Note 4 \*)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**LAPORAN PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Akumulasi

keuntungan  
perubahan  
nilai wajar  
investasi  
tersedia  
unit dijual/  
Accumulated  
gain for  
change in  
fair value  
of available  
investments  
for sale

Pengukuran  
kembali  
imbalan  
pasca kerja/  
Remeasure-  
ment of post-  
employment  
benefits

Modal  
ditempaikan  
dan disertor/  
Issued and  
paid share  
capital

Tambahan  
modal  
disertor/  
Additional  
paid-in  
capital

Catatan/  
Notes

Saldo per 31 Desember 2018

Dampak penyalian kembali penerapan  
PSAK 38 "Kombinasi Bisnis Entitas  
Sepenggalan"

Saldo per 1 Januari 2019

Transaksi dengan pemilik:

Dividen

Cadangan umum

Pendaftaran Komprehensif tahun berjalan:

Laba bersih tahun berjalan  
Keuntungan yang belum direalisasi atas  
efek-efek pada nilai wajar melalui  
penghasilan komprehensif lain,  
setelah pajak

Pengukuran kembali imbalan

Pasca kerja

Perubahan ekuitas lain entitas anak

Saldo per 31 Desember 2019\*

Penyesuaian terkait penerapan  
awal PSAK 71, setelah pajak

Saldo per 1 Januari 2020 setelah  
dampak penerapan PSAK 71

Transaksi yang berhubungan  
dengan kombinasi bisnis entitas  
sepenggalan:

Pembalikan ekuitas

Perbaikan modal tambahan BPUI

Transaksi dengan pemilik,

Perebutan saham baru

Dividen

Cadangan umum

Konversi piutang

Pendaftaran Komprehensif tahun berjalan:

Laba bersih tahun berjalan

Keuntungan yang belum direalisasi atas  
terek-efek pada nilai wajar melalui  
penghasilan komprehensif lain,  
setelah pajak

Pengukuran kembali imbalan

Pasca kerja

Divestasi entitas anak

Saldo per 31 Desember 2020

\* Disajikan kembali lihat catatan 4

Saldo per 31 Desember 2020

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019 <sup>1)</sup>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
<b>Penerimaan kas:</b>			<b>Cash received:</b>
Penerimaan dari kegiatan manajer investasi, komisi perantara perdagangan efek dan jasa penasihat keuangan	874,153	1,120,682	Cash received from investment manager activities, brokerage commissions, and financial advisory services
Penerimaan pendapatan premi asuransi	24,839,437	22,596,218	Cash received from insurance premium income
Penerimaan imbal jasa penjaminan	2,803,781	2,811,560	Cash received from guarantee fee income
Penerimaan subrogasi, klaim reasuransi, dan klaim retrosesi	3,310,181	4,170,293	Cash received from subrogation, reinsurance claims, and retrocession claims
Penerimaan klaim penjaminan ulang	504,954	597,229	Cash received from re-guarantee claims
Penerimaan lainnya	2,044,090	1,616,917	Cash received from others
<b>Pengeluaran kas:</b>			<b>Cash disbursement:</b>
Pengeluaran untuk klaim	(11,058,087)	(12,323,005)	Cash disbursement for gross claims
Pengeluaran untuk komisi	(999,415)	(1,618,111)	Cash disbursement for commissions
Pengeluaran untuk premi reasuransi dan retrosesi	(12,934,063)	(10,026,589)	Cash disbursement for reinsurance and retrocession premiums
Pembayaran imbal jasa penjaminan ulang	(485,850)	(550,507)	Cash disbursement for re-guarantee premiums
Pengeluaran untuk pajak penghasilan	(615,127)	(705,407)	Cash disbursement for corporate income tax
Pengeluaran untuk beban umum dan underwriting lainnya	(3,059,872)	(3,184,690)	Cash disbursement for general and other underwriting expenses
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(352,683)	(309,191)	Cash disbursement to supplier and other third parties
Pengeluaran untuk lainnya	(1,479,443)	(2,313,589)	Cash disbursement for others
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<u>3,392,056</u>	<u>1,881,810</u>	<b>Net cash flows provided from operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan properti investasi dan aset tetap	132,203	34,700	Proceeds from sale of investment properties and fixed assets
Pembelian properti investasi dan aset tetap	(499,581)	(364,071)	Acquisition of investment properties and fixed assets
Penerimaan hasil investasi	2,577,217	2,588,489	Investment income received
Pencairan/(pemepatan) efek utang dan surat berharga	4,384	(3,803,824)	Redemption/(placement) of bonds and marketable securities
Pembayaran aktivitas investasi lainnya	(700,000)	-	Payment of other investment activities
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<u>1,514,223</u>	<u>(1,544,706)</u>	<b>Net cash provided from/(used in) investing activities</b>

<sup>1)</sup> Disajikan kembali lihat Catatan 4

Restated see Note 4 <sup>1)</sup>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
konsolidasian.

*The accompanying notes to the consolidated financial  
statements form an integral part of these consolidated  
financial statements.*

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2020</b>	<b>2019<sup>*)</sup></b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan utang bank	1,654,296	625,391	Bank loan received
Pembayaran liabilitas sewa	(70,137)	-	Lease liabilities payment
Pembayaran utang bank	(1,315,186)	(360,783)	Bank loan payment
Pembayaran dividen	(53,876)	(1,082,447)	Dividend payment
Penerimaan atas penerbitan saham baru	6,000,000	-	Cash received from issuance of new shares
Aktivitas pendanaan lainnya	(21,551)	3	Other financing activities
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari/ aktivitas pendanaan</b>	<b>6,193,546</b>	<b>(817,836)</b>	<b>Net cash flows provided from/(used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas</b>	<b>11,099,825</b>	<b>(480,732)</b>	<b>Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents</b>
Dampak bersih perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas	(360)	(4,246)	Net effect of changes in exchange rates on cash and cash equivalents
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<b>14,525,634</b>	<b>15,010,612</b>	<b>Cash and cash equivalents at beginning of year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<b>25,625,099</b>	<b>14,525,634</b>	<b>Cash and cash equivalents at end of year</b>

<sup>\*)</sup> Disajikan kembali lihat catatan 4

Restated see Note 4 <sup>\*)</sup>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM**

**a. Pendirian dan informasi umum**

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Muhamad Ali, S.H., No. 11 tanggal 17 April 1973 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan tertanggal 22 Mei 1973 No. YA.5/191/20 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.57 tanggal 17 Juli 1973, Tambahan No.508/1973.

Pada saat pendirian, Perseroan adalah lembaga keuangan sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan No. 444/KMK/017/1993 tertanggal 23 Maret 1993, yang memberi izin usaha lembaga pembiayaan kepada Perseroan untuk melakukan kegiatan dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan kartu kredit.

Dalam perkembangannya, kegiatan usaha Perseroan telah mengalami perubahan dan terakhir sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tertanggal 6 April 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia berdasarkan suratnya nomor S-204/MBU/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, yaitu sebagai perusahaan *holding* di bidang keuangan dan investasi serta konsultasi manajemen untuk kepentingan perusahaan afiliasi atau pihak lain termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Aktivitas Perusahaan holding termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain;
- Aktivitas kantor pusat;
- Investasi langsung maupun tidak langsung;
- Aktivitas restrukturisasi perusahaan/aset; dan
- Aktivitas konsultasi manajemen.

**1. GENERAL INFORMATION**

**a. Establishment and general information**

*PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 11 dated April 17, 1973 of Muhamad Ali, S.H., which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. YA.5/191/20 dated May 22, 1973, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.57 dated July 17, 1973, Supplement No. 508/1973.*

*On the establishment date, the Company was a financial institution as stipulated in the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1256/MK/IV/II/1973, which was subsequently revoked by the Decree No. 444/KMK/017/1993 dated March 23, 1993, which gave the Company license to engage in leasing, factoring and credit card activities.*

*The Company's business activities have undergone changes and the latest changes is as stated in the Company's Articles of Association, in accordance with the Deed of Amendment to Articles of Association No. 7 dated April 6, 2020, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. which has obtained the approval of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia based on his letter number S-204 / MBU / 03 / 2020 dated March 31, 2020, namely as a holding company in finance and investment as well as management consulting for the benefit of companies or other parties including micro businesses, Small and medium enterprises, and optimizing the use of Company resources based on the principles of good corporate governance.*

*In accordance with the Company's Article of Association, to achieve the aims and objectives mentioned above, The company can carry out the following main business activities:*

- *Holding company activities including establishing or participating in other entities;*
- *Head office activities;*
- *Direct or indirect investments;*
- *Company/assets restructuring activities; and*
- *Management consulting activities.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**a. Pendirian dan informasi umum** (lanjutan)

Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dengan menyewakan atau mengerjasamakan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk *real estate*, rumah sakit, pendidikan, hotel, gedung perkantoran dan apartemen kondominium.

Perseroan telah melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 Tambahan No. 18788 tanggal 17 Juli 2009.

Pada tahun 2020, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional, yang mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan. Selain itu, telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tersebut ditetapkan antara lain:

- (i) Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan.
- (ii) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan hak atas seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja"); PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo"); PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"); dan PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") kepada Perseroan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. GENERAL INFORMATION** (continued)

**a. Establishment and general information** (continued)

*In addition to the mentioned main business activities, the Company may engage in other businesses to optimize the utilization of the Company's resources with renting or cooperating the Company's infrastructures, including but not limited to real estate, hospital, education, hotel, office building and condominium apartment.*

*The Company has amended the Company's Articles of Association as required by Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 on Limited Liability Companies as required by law. The adjustment of the Company's Articles of Association is published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 Supplement No. 18788 on July 17, 2009.*

*In 2020, the Government has published Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15/2020 related to Amendments to Government Regulation Number 18 of 1973 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of Company Companies in the National Private Business Development, which changes the aims and objectives as well as the main business activities of the Company. In addition, the Government has also published Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20/2020 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's capital Participation to the Share Capital of the Company PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia has been issued. Through the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20/2020, it is stipulated that:*

- (i) Addition of the capital participation by the Republic of Indonesia to the share capital of the Company.*
- (ii) Transfer of rights of the Series B shares belonging to the Republic of Indonesia to PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja"); PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo"); PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"); and PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") to the Company.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)**

Pengalihan seluruh saham seri B tersebut tertuang pada Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 31 Maret 2020 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham No. 07 tanggal 06 April 2020 oleh notaris Ashoya Ratam S.H., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0029706.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 dan telah diberiahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0186829 tanggal 14 April 2020. Melalui akta perubahan anggaran dasar ini, beberapa hal penting telah diputuskan:

- (i) Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020.
- (ii) Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula sejumlah Rp 1.000.000.000.000,- (nilai penuh) yang terbagi atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan 999.999 saham Seri B, menjadi sejumlah Rp 240.000.000.000.000,- (nilai penuh) terbagi atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan 239.999.999 saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (nilai penuh).

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**a. Establishment and general information (continued)**

*The transfer of all series B shares is stated in the Transfer of Rights to Shares Agreement of the Republic of Indonesia no. 33 dated 31 March 2020 by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.*

*With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 /2020 and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20.2020, the Company's Articles of Association have undergone changes as stated in the Deed of Statement of Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders No. 07 April 06 2020 by notary Ashoya Ratam SH, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-0029706.AH.01.02.Year 2020 dated April 14, 2020 and has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Acceptance Letter of Notification of Amendment to the Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0186829 dated April 14, 2020. Several important things have been decided through the amendment of the company's Article of Association:*

- (i) *Approved the changes of The Company's aims and objectives as well as The Company's business activities to comply with the Government Regulation No. 15/2020.*
- (ii) *Approved the increase in the Company's Share Capital which was originally Rp 1,000,000,000,000 (full amount), which consist of 1 Dwiwarna Series A share and 999,999 Series B shares, into an amount of Rp 240,000,000,000,000 (full amount), which consist of 1 Series A Dwiwarna share and 239,999,999 Series B shares, each share with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount).*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**a. Pendirian dan informasi umum** (lanjutan)

- (iii) Menyetujui pengeluaran/penempatan saham Seri B yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 60.623.019 lembar, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya sebesar Rp 60.623.019.459.595 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- (iv) Untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham yang diambil bagian tersebut, menyetujui penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp 60.623.020.000.000 yang disetorkan dalam bentuk pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Jasa Raharja, Askrindo, Jasindo dan Jamkrindo.
- (v) Dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 272.500.000.000 menjadi Rp 60.895.520.000.000.
- (vi) Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan.

Selanjutnya, pada Desember 2020, Anggaran Dasar Perseroan juga mengalami perubahan dengan adanya penambahan modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 98 tanggal 30 Desember 2020, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0003515 tanggal 06 Januari 2021, yang pada pokoknya menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan sebesar Rp 268.017.000.000,- sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp 60.895.520.000.000,- menjadi sebesar Rp 61.163.537.000.000,- yang bersumber dari penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara.

**1. GENERAL INFORMATION** (continued)

**a. Establishment and general information** (continued)

- (iii) Approved the issuance/placement of Series B shares which are still in savings (portfolio) totaling of 60,623,020 shares, each share with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount). The total share value is Rp 60,623,019,459,595 (full amount), which portion is entirely taken up by the Republic of Indonesia.
- (iv) In relation to fulfill the issuance/placement of the shares, The Company has approved the addition of the capital participation by the Republic of Indonesia to the share capital of the Company amounted tp Rp 60,623,020,000,000.
- (v) Following the additional capital by Republic of Indonesia, the issued/paid-up capital of the Company which was originally Rp.272,500,000,000 becomes Rp.60,895,520,000,000.
- (vi) Approved all of the company's article of association amendment.

Further, in December 2020, there were also amendment on The Company's article of association in relation of the additional capital based on the Deed of Decision of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company No. 98 dated 30 December 2020, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights based on the Acceptance Letter of Notification of Amendment to the Articles of Association No. 98. AHU-AH.01.03-0003515 dated January 6, 2021, which principally approved the addition of the issued and paid-up capital to the Company amounting to Rp 268,017,000,000. The issued and paid-up capital which was originally Rp60,895,520,000,000 became Rp.61,163,537,000,000 sourced from capital participation by the Republic of Indonesia based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 67/2020 concerning Additional Capital Participation.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**a. Pendirian dan informasi umum** (lanjutan)

Pada tahun 2021, Anggaran Dasar Perseroan juga telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

- Adanya penambahan modal berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 05 tanggal 08 Januari 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0015270 tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya menyetujui pengeluaran saham Seri B yang masih dalam simpanan (portepel) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 6.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (nilai penuh) atau seharga Rp 6.000.000.000.000 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia, sehingga modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp 67.163.537.000.000,- yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020.
- Adanya penambahan modal berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia No. 04 tanggal 04 November 2021, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0469414 tanggal 04 November 2021, yang pada pokoknya menyetujui pengeluaran saham yang masih dalam simpanan (portepel) dan penambahan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp20.000.000.000.000,- yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia dan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi sebesar Rp87.163.537.000.000,- yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2021.

Perseroan berdomisili di Indonesia dengan kantor terdaftar di Graha CIMB Niaga Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, DKI Jakarta.

**1. GENERAL INFORMATION** (continued)

**a. Establishment and general information** (continued)

*In 2021, The Company's article of association has also amended several times as follows:*

*- There is an increase in capital based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company No. 05 dated January 8, 2021, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0015270 dated January 12, 2021, which principally approved the issuance of Series B shares that are still in deposit (portepel) and an additional 6,000,000 share issued and paid-up capital, each share with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) or Rp. 6,000,000,000,000 (full amount) which is entirely belonged to the Republic of Indonesia. The total issued and paid-up capital is Rp 67,163,537,000,000 sourced from capital participation by the Republic of Indonesia based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 72/2020.*

*- There is an increase in capital based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at The Company's General Meeting of Shareholders No. 04 dated November 4, 2021, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0469414 dated November 4, 2021, which principally approved the issuance of shares that are still in deposit (portepel) and the addition of issued and paid-up capital in the amount of Rp. 20,000,000,000,000 which portion is entirely taken up by the Republic of Indonesia and approved the addition of issued and paid-up capital. The total issued and paid-up capital is Rp 87,163,537,000,000 sourced from capital participation by the Republic of Indonesia based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 102/2021.*

*The Company is domiciled in Indonesia with its registered office at Graha CIMB Niaga Level 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, DKI Jakarta.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Struktur entitas anak**

Perseroan memiliki pengendalian pada entitas anak sebagai berikut:

*The Company has control in the following subsidiaries:*

<b>Entitas anak/Subsidiaries<sup>a)</sup></b>	<b>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</b>		<b>Bidang Usaha/ Nature of business</b>	<b>Tanggal pendirian/ Date of establishment</b>	<b>Jumlah aset/Total assets (sebelum eliminasi dalam jutaan Rupiah/before elimination in millions of Rupiah)</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>			<b>2020 Rp</b>	<b>2019 Rp</b>
<b>Penyertaan langsung/ Direct investments</b>						
PT Bahana Artha Ventura ("BAV")	64.65%	64.65%	Modal Ventura/ Venture Capital Pialang Surat Berharga, Penjaminan Emisi Efek dan Manajemen Investasi/ Securities Brokerage, Underwriting, and Investment Management	11 Maret/March 1991	2,378,823	2,137,627
PT Bahana Sekuritas ("BS")	99.20%	99.20%	Properti/Property Pengelola Portofolio Investasi, Manajemen Investasi dan Penasihat Investasi/ Portfolio Investment Management, Investment Management and Advisory	26 Juli/July 1989	1,136,759	651,509
PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")	52.88%	52.88%	Properti/Property Pengelola Portofolio Investasi, Manajemen Investasi dan Penasihat Investasi/ Portfolio Investment Management, Investment Management and Advisory	22 Agustus/August 1989	808,963	805,720
PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")	60.00%	60.00%	Properti/Property Pengelola Portofolio Investasi, Manajemen Investasi dan Penasihat Investasi/ Portfolio Investment Management, Investment Management and Advisory	10 Oktober/October 1991	446,549	419,841
PT Bahana Mitra Investa ("BMI")	99.10%	99.10%	Jasa Konsultan Keuangan/ Financial Consulting Service	15 Mei/May 1997	2,368	2,752
PT Bahana Kapital Investa ("BKI")	99.97%	99.97%	Jasa Konsultan Keuangan/ Financial Consulting Service	12 Mei/May 1993	47,747	45,287
PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo")	99.99%	-	Penjaminan Kredit/ Loan Guarantee	1970	19,122,829	16,770,270
PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")	99.99%	-	Asuransi Kerugian/ General Insurance	11 Januari/January 1971	30,134,909	26,639,188
PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja")	99.99%	-	Asuransi Kerugian/ General Insurance	1 Januari/January 1961	17,309,567	16,927,196
PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")	99.99%	-	Asuransi Kerugian/ General Insurance	2 Juni/June 1973	13,914,348	13,643,564
PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")	99.99%	-	Asuransi Jiwa/ Life Insurance	22 Oktober/October 2020	153,511	-
<b>Penyertaan tidak langsung/ Indirect investments</b>						
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	99,99%	-	Penjaminan Syariah/ Sharia Guarantee	24 September/September 2014	1,573,879	1,184,644
PT Reasuransi Nasional Indonesia	99,99%	-	Reasuransi/ Reinsurance	22 Agustus/August 1994	7,987,733	7,216,404
PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah	99,90%	-	Penjaminan Syariah/ Sharia Guarantee	29 November/November 2012	1,258,222	951,789
PT Askindo Mitra Utama	97,92%	-	Jasa Keagenan/ Agency Service	7 Oktober/October 1997	58,668	41,041
PT Asuransi Jasaraharja Putera	93,80%	-	Asuransi Kerugian/ General Insurance	27 November/November 1993	3,434,167	3,104,746
PT Mitracipta Polasarana	88,3%	-	Jasa Penyediaan dan Penyewaan Gedung/ Building Management Service	24 November/November 1994	40,467	52,478
PT Asuransi Jasindo Syariah	96,50%	-	Asuransi Syariah/ Sharia Insurance	1 Desember/December 2015	462,729	430,708

\* Entitas anak seluruhnya berdomisili di Indonesia

*Subsidiaries are domiciled in Indonesia \**

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**b. Struktur entitas anak (lanjutan)**

Perseroan memiliki pengendalian pada entitas anak sebagai berikut: (lanjutan)

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**b. The structure of subsidiaries (continued)**

*The Company has control in the following subsidiaries: (continued)*

<i>Entitas anak/Subsidiaries<sup>)</sup></i>	Percentase kepemilikan/ Percentage of ownership		<i>Bidang Usaha/ Nature of business</i>	<i>Tanggal pendirian/ Date of establishment</i>	Jumlah aset/Total assets (sebelum eliminasi dalam jutaan Rupiah/before elimination in millions of Rupiah)	
	2020	2019			2020 Rp	2019 Rp
<b>Penyertaan tidak langsung/ Indirect investments</b>						
PT Sarana Jatim Ventura ("SJTIV")	61.10%	61.10%	Modal Ventura/ Venture Capital	5 Oktober/ October 1994	99,589	119,803
PT Sarana Sumbar Ventura ("SSBV")	47.12%	47.27%	Modal Ventura/ Venture Capital	17 April/ April 1995	91,083	110,117
PT Sarana Kalteng Ventura ("SKTaV")	45.24%	44.88%	Modal Ventura/ Venture Capital	8 Mei/May 1997	95,873	114,508
PT Sarana Kaltim Ventura ("SKV")	58.53%	58.53%	Modal Ventura/ Venture Capital	15 Juni/June 1995	104,641	109,074
PT Sarana Jakarta Ventura ("SJAV")	99.33%	99.33%	Modal Ventura/ Venture Capital	5 Februari/ February 1998	86,625	97,364
PT Sarana NTB Ventura ("SNTBV")	34.54%	34.60%	Modal Ventura/ Venture Capital	5 Desember/ December 1995	100,584	108,024
PT Sarana Kalsel Ventura ("SKSelV")	47.82%	47.82%	Modal Ventura/ Venture Capital	20 Juni/June 1997	61,704	70,175
PT Sarana Lampung Ventura ("SLV")	53.35%	52.94%	Modal Ventura/ Venture Capital	27 Mei/May 1995	56,399	65,828
PT Sarana Jateng Ventura ("SJTaV")	27.35%	27.70%	Modal Ventura/ Venture Capital	16 Oktober/ October 1994	65,408	71,347
PT Sarana Yogyakarta Ventura ("SYV")	60.46%	60.46%	Modal Ventura/ Venture Capital	10 Oktober/ October 1994	48,978	53,009
PT Sarana Kalbar Ventura ("SKBar")	48.72%	48.72%	Modal Ventura/ Venture Capital	21 Juni/June 1995	57,472	58,212
PT Sarana Surakarta Ventura ("SSV")	29.79%	29.79%	Modal Ventura/ Venture Capital	26 April/April 1995	51,640	59,137
PT Sarana Jabar Ventura ("SJBV")	59.16 %	59.04%	Modal Ventura/ Venture Capital	28 Oktober/ October 1994/28	54,616	58,679
PT Sarana Bali Ventura ("SBaV")	25.15%	25.15%	Modal Ventura/ Venture Capital	10 Desember/ December 1994	58,518	54,235
PT Sarana Riau Ventura ("SRV")	40.75%	40.75%	Modal Ventura/ Venture Capital	23 Juli/July 1996	16,193	21,038
PT Sarana Jambi Ventura ("SJV")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	22 Mei/May 1995	29,542	31,079
PT Sarana Sulsel Ventura ("SSSelV")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	1 Desember/ December 1994	50,721	48,724
PT Sarana Bengkulu Ventura ("SBeV")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	20 Oktober/ October 1997	22,375	25,790
PT Sarana Sulteng Ventura ("SSTengV")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	25 Maret/ March 1997	18,030	21,204
PT Sarana Sultra Ventura ("SSTraV")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	30 Oktober/ October 1996	22,624	20,425
PT Sarana Sulut Ventura ("SSUtv")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	11 April/ April 1995	21,135	23,825
PT Sarana Papua Ventura ("SPV")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	1 Desember/ December 1995	2,870	5,694
PT Sarana Maluku Ventura ("SMV")	41.47%	41.47%	Modal Ventura/ Venture Capital	22 Desember/ December 1995	3,653	4,788
PT Nusasarana Pradipta	70.00%	70.00%	Modal Ventura/ Venture Capital	20 Oktober/ October 1994	6,194	10,295
PT Griyacanggu Tatautama	-	54.94%	Hotel/ Hotel	22 Desember/ December 2010	-	130,540

\* Entitas anak seluruhnya berdomisili di Indonesia

*Subsidiaries are domiciled in Indonesia \**

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**b. Struktur entitas anak** (lanjutan)

**Penyertaan langsung**

Pada tanggal 16 Maret 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2020 terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan, terdapat beberapa entitas anak Perusahaan baru yang dikonsolidasikan oleh Perseroan yaitu:

- Jasindo
- Jasa Raharja
- Jamkrindo
- Askrindo

**PT Bahana Artha Ventura ("BAV")**

PT Bahana Artha Ventura ("Entitas Anak") telah memperoleh izin beroperasi secara komersial sejak tahun 1991. Kantor Perusahaan berlokasi di Wisma Prima lantai 2, Jalan Kapten Pierre Tendean No.34, Jakarta 12790.

Entitas Anak beroperasi sebagai perusahaan modal ventura. Entitas Anak mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan skema pembiayaan modal ventura dan pendampingan manajemen. Entitas Anak melayani pelanggan di Indonesia.

Entitas Anak memiliki 23 Perusahaan Modal Ventura Daerah ("PMVD") per 31 Desember 2020 dan 2019.

**PT Bahana Sekuritas ("BS")**

PT Bahana Sekuritas ("Entitas Anak") mulai operasinya sejak 26 Juli 1989. Entitas Anak pada saat ini berlokasi di Graha CIMB Niaga Lantai 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Lingkup kegiatan usaha Entitas Anak meliputi penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")**

PT Grahaniaga Tatautama ("Entitas Anak") mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Juni 1993 dengan dioperasikannya Graha CIMB Niaga (dahulu Gedung Graha Niaga), sebuah Gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. GENERAL INFORMATION** (continued)

**b. The structure of subsidiaries** (continued)

**Direct investments**

*On 16 March 2020, based on Government Regulation Republic Indonesia No. 20 year 2020, related to Additional Government Capital Investment to the Company's Share Capital, there are several new subsidiaries which consolidated by the Company such as:*

- Jasindo
- Jasa Raharja
- Jamkrindo
- Askrindo

**PT Bahana Artha Ventura ("BAV")**

*PT Bahana Artha Ventura (the Subsidiary) started its commercial operations in 1991. The Company's office address is located at Wisma Prima 2nd floor, Jalan Kapten Pierre Tendean No.34, Jakarta 12790.*

*The Subsidiary operates as a venture capital company. The Subsidiary develops real sector through financing to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) with venture capital financing schemes and management assistances. The Subsidiary serves customers in Indonesia.*

*The Subsidiary owns 23 Regional Venture Capital Companies ("RVCC") as at 31 Desember 2020 dan 2019.*

**PT Bahana Sekuritas ("BS")**

*PT Bahana Sekuritas (the Subsidiary) started its operation since 26 July 1989. The Company is currently located at Graha CIMB Niaga 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.*

*The Subsidiary's scope of activities comprises of securities brokerage, underwriting and other related activities allowed by Financial Services Authority (OJK).*

**PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")**

*PT Grahaniaga Tatautama (the Subsidiary) started its commercial operation on 1 June 1993 with the operation of Graha CIMB Niaga (formerly named Graha Niaga), an office building located on Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**b. Struktur entitas anak** (lanjutan)

**Penyertaan langsung** (lanjutan)

PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU") (lanjutan)

Sesuai dengan Anggaran Dasar Entitas Anak, Entitas Anak bergerak dalam bidang usaha kepemilikan, pengelolaan dan penyewaan Gedung atau bagian Gedung untuk dipergunakan sebagai ruangan kantor, tempat usaha dan keperluan-keperluan lainnya.

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")

PT Bahana TCW Investment Management ("Entitas Anak") mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995. Entitas Anak berkedudukan di Graha CIMB Niaga, lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Entitas Anak, ruang lingkup kegiatan Entitas Anak terutama meliputi bidang Manajer Investasi, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan aktivitas investasi.

PT Bahana Mitra Investa ("BMI")

PT Bahana Mitra Investa ("Entitas Anak") memulai operasinya sejak 15 Mei 1997. Kantor pusat Entitas Anak terletak di Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Entitas Anak, bisnis Entitas Anak adalah untuk memberikan jasa keuangan dan non-keuangan dalam bidang Investasi.

PT Bahana Kapital Investa ("BKI")

PT Bahana Kapital Investa ("Entitas Anak") memulai operasinya sejak 12 April 1993. Perusahaan menghentikan kegiatan operasinya sejak tahun 2013 dan memulai lagi kegiatan operasinya pada bulan Juni 2018.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Entitas Anak, tujuan Entitas Anak adalah berusaha dalam jasa konsultasi manajemen dan investasi. Kantor pusat Perusahaan terletak di Graha CIMB Niaga Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta, Indonesia.

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Entitas Anak") telah memperoleh izin beroperasi secara komersial sejak tahun 1971. Kantor pusat Entitas Anak beralamat di Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. GENERAL INFORMATION** (continued)

**b. The structure of subsidiaries** (continued)

**Direct investments** (continued)

PT Grahaniaga Tatautama ("GNTU")  
(continued)

According to the Subsidiary's Articles of Association, the Subsidiary is engaged in building ownership, maintenance and rental of other parts of the building, which will be used as office space, business space and other purposes.

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")

PT Bahana TWC Investment Management ("the Subsidiary") started its commercial activities in May 1995. The Subsidiary is located at Graha CIMB Niaga, 21st floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.

According to the Subsidiary's Articles of Association, the Subsidiary engaged in Investment Management activities, and other related investment activities.

PT Bahana Mitra Investa ("BMI")

PT Bahana Mitra Investa ("the Subsidiary") started its operation since 15 May 1997. The Company's head office is currently located at Menara Standard Chartered, 18th floor Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta, Indonesia.

In accordance with the Subsidiary's Articles of Association, the Subsidiary's business is to provide financial and non-financial services in the Investment sector.

PT Bahana Kapital Investa ("BKI")

PT Bahana Kapital Investa ("the Subsidiary") has started its operation since 12 April 1993. The Company was in a dormant phase since 2013 and restarted its operation in June 2018.

In accordance with the Articles of Association, the Subsidiary's objective and purpose is to be engaged in management consulting and investment services. The Subsidiary's head office is currently located at Graha CIMB Niaga, 18th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta, Indonesia.

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")

PT Asuransi Kredit Indonesia ("the Subsidiary") has obtained a license to operate commercially since 1971. The Subsidiary's head office is located at Jalan Angkasa Block B-9 Kav. No. 8, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**b. Struktur entitas anak** (lanjutan)

**Penyertaan langsung** (lanjutan)

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")  
(lanjutan)

Maksud dan tujuan pendirian Entitas Anak adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke sistem perkreditan perbankan, dalam kondisi tidak memiliki agunan. Dengan membentuk Askrindo diharapkan akan terjadi peningkatan peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja")

PT Jasa Raharja ("Entitas Anak") beroperasi pada tahun 1965. Entitas Anak berdomisili di Jakarta dengan Kantor Pusat berlokasi di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-2, Jakarta.

Maksud dan tujuan didirikannya Entitas Anak adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi, jaminan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi kerugian dengan menyelenggarakan program asuransi sosial, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Entitas Anak untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna meningkatkan nilai Entitas Anak dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Entitas Anak") mulai beroperasi pada tahun 1973. Kantor Pusat Entitas anak terletak di Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 61, Jakarta.

Maksud dan tujuan Entitas Anak adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan usaha asuransi kerugian dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai Perusahaan Terbatas.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. GENERAL INFORMATION** (continued)

**b. The structure of subsidiaries** (continued)

**Direct investments** (continued)

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")  
(continued)

*Purpose and objective of the Subsidiary's establishment is to provide solution for issues encountered by Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) to access banking credit system, in condition of not having collateral. By establishing Askrindo, the Subsidiary is expected to drive role of SMEs in supporting national economic development.*

PT Jasa Raharja ("Jasa Raharja")

*PT Jasa Raharja ("the Subsidiary") started its commercial operations in 1965. The Subsidiary is domiciled in Jakarta with its Head Office is located at Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-2, Jakarta.*

*The purpose and objective of the Subsidiary are to participate in the implementation and support to the Government's policy program in economics, social security and national development in general, particularly in the field of insurance by organising social insurance programs, and optimising resource utilisation of the Subsidiary to produce high-quality services with robust competitiveness to increase the value of the Subsidiary by applying the principles of Limited Liability Company.*

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")

*PT Asuransi Jasa Indonesia ("the Subsidiary") started its commercial operations in 1973. The subsidiary head office is located at Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 61, Jakarta.*

*The Subsidiary's objective is to running in general insurance business, inaccordance with prevailing laws and regulations for providing high quality services and strong competitive advantage to obtain or pursue profit in order to increase the value of the Subsidiary by applying the principles of good governance for a Limited Liability Company.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM** (lanjutan)

**b. Struktur entitas anak** (lanjutan)

**Penyertaan langsung** (lanjutan)

PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")

PT Asuransi Jiwa IFG ("Entitas Anak") didirikan pada tanggal 22 Oktober 2020. Perseroan berdomisili di Jakarta. Kantor Pusat Entitas Anak terletak di Grha CIMB Niaga Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan.

Entitas Anak bergerak dalam bidang usaha asuransi jiwa. Entitas Anak memperoleh izin usaha dalam bidang usaha asuransi jiwa dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-19/D.05/2021 tanggal 7 April 2021.

**c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Dewan Komisaris:</b>			<b>Board of Commissioners:</b>
Komisaris Utama	Mohamad Fauzi M. Ihsan <sup>4)</sup>	Gatot Darmasto <sup>3)</sup>	President Commissioner
Komisaris	Meirijal Nur	Meirijal Nur	Commissioner
Komisaris Independen	Masyita Crystallin <sup>4)</sup>	Gellwynn Daniel Hamzah	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hotbonar Sinaga <sup>4)</sup>	Yusuf <sup>3)</sup>	Independent Commissioner
	Arief Budiman <sup>4)</sup>	-	
		-	
<b>Dewan Direksi:</b>			<b>Board of Directors:</b>
Direktur Utama	Robertus Billitea <sup>2)</sup>	Marciano Hersondrie	President Director
Direktur	Pantro Pander Silitonga <sup>2)</sup>	Herman <sup>1)</sup>	Director
Direktur	Rizal Ariansyah <sup>2)</sup>	Dwijanti Tjahjaningsih <sup>1)</sup>	Director
		-	
<b>Komite Audit:</b>			<b>Audit Committee:</b>
Ketua	Meirijal Nur	Meirijal Nur	Chairman
Anggota	Nandang Supriyadi	Nandang Supriyadi	Member
Anggota	Maliki Heru Santosa	Maliki Heru Santosa	Member

<sup>1)</sup> Efektif diberhentikan pada tanggal 12 Februari 2020

<sup>2)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 12 Februari 2020

<sup>3)</sup> Efektif diberhentikan pada tanggal 30 Desember 2020

<sup>4)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 30 Desember 2020

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perusahaan memiliki 61 karyawan (tidak diaudit) (2019: 47 karyawan, tidak diaudit), sedangkan Entitas Anak memiliki 5.164 karyawan (tidak diaudit) (2019: 5.911 karyawan, tidak diaudit).

**1. GENERAL INFORMATION** (continued)

**b. The structure of subsidiaries** (continued)

**Direct investments** (continued)

PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")

PT Asuransi Jiwa IFG ("the Subsidiary") was established on October 22, 2020. The Subsidiary is domiciled in Jakarta. The Subsidiary's head office is located in Grha CIMB Niaga 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta.

The Subsidiary is engaged in the life insurance business. The Subsidiary obtained a business license in the life insurance business from the Financial Services Authority ("OJK") through the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-19/D.05/2021 dated 7 April 2021.

**c. Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Employees**

As of December 31, 2020 and 2019 the composition of the Boards of Commissioners and Directors are as follows:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Dewan Komisaris:</b>			<b>Board of Commissioners:</b>
Komisaris Utama	Mohamad Fauzi M. Ihsan <sup>4)</sup>	Gatot Darmasto <sup>3)</sup>	President Commissioner
Komisaris	Meirijal Nur	Meirijal Nur	Commissioner
Komisaris Independen	Masyita Crystallin <sup>4)</sup>	Gellwynn Daniel Hamzah	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hotbonar Sinaga <sup>4)</sup>	Yusuf <sup>3)</sup>	Independent Commissioner
	Arief Budiman <sup>4)</sup>	-	
		-	
<b>Dewan Direksi:</b>			<b>Board of Directors:</b>
Direktur Utama	Robertus Billitea <sup>2)</sup>	Marciano Hersondrie	President Director
Direktur	Pantro Pander Silitonga <sup>2)</sup>	Herman <sup>1)</sup>	Director
Direktur	Rizal Ariansyah <sup>2)</sup>	Dwijanti Tjahjaningsih <sup>1)</sup>	Director
		-	
<b>Komite Audit:</b>			<b>Audit Committee:</b>
Ketua	Meirijal Nur	Meirijal Nur	Chairman
Anggota	Nandang Supriyadi	Nandang Supriyadi	Member
Anggota	Maliki Heru Santosa	Maliki Heru Santosa	Member

<sup>1)</sup> Effectively resigned on 12 February 2020<sup>1)</sup>

<sup>2)</sup> Effectively appointed on 12 February 2020<sup>1)</sup>

<sup>3)</sup> Effectively resigned on 30 December 2020<sup>4)</sup>

<sup>4)</sup> Effectively appointed on 30 December 2020<sup>4)</sup>

As at December 31, 2020, the Company employed 61 employees (unaudited) (2019: 47 employees, unaudited), and Subsidiaries employed 5,164 employees (unaudited) (2019: 5,911 employees, unaudited).

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") disusun dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 12 Januari 2022.

Kebijakan-kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan oleh Grup dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir 31 Desember 2020, kecuali untuk penerapan dari standar, interpretasi baru dan revisi standar yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020 seperti yang diungkapkan pada Catatan 2d adalah sebagai berikut:

**a. Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

**b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laporan laba rugi dimana diukur pada nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat catatan 2f untuk informasi mata uang fungsional Grup.

**c. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi**

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (together called the "Group") were prepared and authorised to be issued by the Directors on 12 January 2022.*

*The significant accounting policies applied by the Group in the preparation of its consolidated financial statements are consistent in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2020, except for the adoption of new and amended standards and interpretations effective beginning 1 January 2020 as disclosed in Note 2d as follows:*

**a. Statement of compliance**

*The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK") which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants.*

**b. Basis of preparation of the consolidated financial statements**

*The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention except for financial assets available for sale which is measured at fair value through other comprehensive income and financial assets which is measured at fair value through profit or loss are measured at fair value, and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flow.*

*The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing, and financing activities.*

*Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to notes 2f for the information on the Group's functional currency.*

**c. Use of judgments, estimates and assumptions**

*The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian SAK requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**c. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi** (lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**d. Perubahan kebijakan akuntansi signifikan**

**Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2020**

Grup menerapkan standar dan interpretasi baru/amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang menjadi efektif pada tahun 2020. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang dipersyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar.

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55 dan Amendemen PSAK 60 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**c. Use of judgments, estimates and assumptions** (continued)

*Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.*

*The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.*

**d. Changes in significant accounting policies**

**Standards and interpretations which became effective in 2020**

*The Group adopted new/amended Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") that became effective in 2020. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards.*

- SFAS 71 "Financial Instrument";
- SFAS 72 "Revenue from Contract with Customer";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";
- Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint Ventures";
- Amendment SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contracts";
- Amendment to SFAS 71, Amendment to SFAS 55 and Amendment to SFAS 60 "Interest Rate Benchmark Reform";
- Amendment to SFAS 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;
- Amendment to SFAS 102 "Accounting for Murabahah";
- ISFAS 35 "Presentation of Non-profit Oriented Entities Financial Statements".
- ISFAS 101 "Recognition of deferred Murabahah Income without Significant Inventory Ownership Risks";

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Perubahan kebijakan akuntansi signifikan (lanjutan)**

**Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2020 (lanjutan)**

- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Penyesuaian tahunan 2020 terhadap Kerangka Konseptual 2019.

PSAK 71 dan 73 di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk PSAK lainnya yang tersebut di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

**PSAK 71 "Instrumen Keuangan"**

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp 501.747 (bersih setelah pajak) yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian instrumen keuangan (lihat Catatan 8, 9, 10, 11 dan 51).

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**d. Changes in significant accounting policies  
(continued)**

**Standards and interpretations which became effective in 2020 (continued)**

- ISFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivables";
- Annual improvements to 2019 to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";
- PPSAK 13 Revocation of SFAS 45 Financial Reporting for Non-profit Organisations; and
- Annual improvements 2020 to Conceptual Framework 2019.

SFAS 71 and 73 had significant effect on the amounts reported for current year and prior years.

Whereas for other SFAS other than mention above had no significant effect on the amount reported for current year or prior years.

**SFAS 71 "Financial Instruments"**

SFAS 71 replaces SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assessment, recognition and measurement for allowance for impairments losses for financial instruments using the expected credit loss model and also provides simplified approach to hedge accounting.

In accordance with the transition requirements in SFAS 71, the Group elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate comparative information. The Group has adjusted the beginning 2020 retained earnings amounting to Rp 501,747 (net after tax) which come from the increase of allowance for losses for financial instruments (see Note 8, 9, 10, 11 and 51).

Based on assessment of business model and contractual cashflow, the new regulation on SFAS 71 for the classification and measurement of financial instruments has no impact on the carrying amount of financial assets and liabilities as of 1 January 2020.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**d. Perubahan kebijakan akuntansi signifikan** (lanjutan)

**PSAK 71 "Instrumen Keuangan"** (lanjutan)

Peraturan baru atas akuntansi lindung nilai juga tidak berdampak terhadap Grup dimana saat ini, Grup tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai.

Entitas anak asuransi telah menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) sampai dengan 1 Januari 2025 karena memenuhi kriteria seperti tertuang di dalam standar. PSAK 71 akan diterapkan oleh entitas anak bersamaan dengan penerapan PSAK 74 "Kontrak Asuransi" di masa yang akan datang.

**PSAK 73 "Sewa"**

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi" berdasarkan prinsip PSAK 30: "Sewa", kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga, Grup juga mempertimbangkan faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73, Grup memilih penerapan secara prospektif, sehingga tidak terdapat dampak kumulatif terhadap saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020 dan Grup tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah membukukan akumulasi beban depresiasi atas aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa pada "beban umum dan administrasi". (lihat Catatan 43)

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar dengan cara menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**d. Changes in significant accounting policies**  
(continued)

**SFAS 71 "Financial Instruments"**  
(continued)

*The hedge accounting rules in this standard also had no impact to the Group as currently the Group did not enter into transactions related to hedge accounting.*

*The Insurance Subsidiaries have applied the temporary exemption of SFAS 71 (deferral approach) up to 1 January 2025 having met the eligibility requirements for deferral under the standard. SFAS 71 will be adopted by the subsidiaries simultaneously with the implementation of SFAS 74 "Insurance Contracts" in the future.*

**SFAS 73 "Leases"**

*In relation to the implementation of SFAS 73, the Group as lessee recognised right-of-use assets and leases liabilities related to leases which were previously classified as "operating leases" based on SFAS 30: "Leases", except for short-term leases or leases with low value assets.*

*These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the incremental borrowing rate as of 1 January 2020. In determining incremental borrowing, the Group also considers the following main factors; the Group corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any prepaid.*

*In accordance with the transition requirements of SFAS 73, the Group leases apply prospectively, so that there is no impact on the cumulative impact on the opening balance of retained earnings as of 1 January 2020 and the Group does not restate comparative information. The Group has recorded the accumulated depreciation expense of right-of-use-assets and interest expense of leases liabilities in "general and administrative expense". (see Note 43)*

*In applying SFAS 73 for the first time, the Group used the practical expedient permitted by the standard in which use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**e. Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan entitas anak.

**Entitas Anak**

Entitas Anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan. Perusahaan mengendalikan entitas ketika Grup terekspos, atau memiliki hak atas, imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas. Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan kepada Perusahaan. Mereka tidak akan dikonsolidasikan sejak tanggal pengendalian itu berhenti.

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar asset yang dialihkan, liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar asset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjenji. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjenji yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Seluruh transaksi dan saldo intraperusahaan antara perusahaan-perusahaan dalam Grup yang material telah dieliminasi.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas-entitas anak, kecuali bila dinyatakan lain.

Kepentingan nonpengendali atas laba bersih entitas anak disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasian untuk menyajikan jumlah laba yang menjadi hak Perseroan. Kepentingan nonpengendali atas aset bersih disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik Perseroan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**e. Principles of consolidation and equity accounting**

*The consolidated financial statements include the financial statements of the Company and its subsidiaries.*

**Subsidiaries**

*Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Company has control. The Company controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company. They are de-consolidated from the date on which that control ceases.*

*The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquiree and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values at the acquisition date.*

*All material intercompany transactions and balances between Group companies are eliminated.*

*The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by subsidiary unless otherwise stated.*

*Non-controlling interest in net income of subsidiaries are presented as a deduction of consolidated net income in order to present the portion of Company's income. Non-controlling interest in net assets is presented as part of equity. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the Company's equity.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas (lanjutan)**

Grup mengakui kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Selisih lebih imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset bersih teridentifikasi atas bisnis yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui ke laporan laba rugi konsolidasian.

**Kombinasi bisnis entitas sepengendali**

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam grup tersebut. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali diakui dalam ekuitas dan disajikan dalam "tambahan modal disetor".

Dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**e. Principles of consolidation and equity accounting (continued)**

*The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets..*

*The excess of the consideration transferred the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the business acquired, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly to the consolidated profit or loss.*

**Business combination for entities under common control**

*Business combination for entities under common control transactions, in the form of business transfer in order to reorganize entities within the same group, do not constitute change in ownership with economic substance, accordingly those transactions do not give rise to gain or loss within the group as a whole or for individual entity within the group. Since business combination for entities under common control transaction do not constitute change in ownership of transferred business with economic substance, these transactions are recognised at its carrying amounts based on pooling of interest method.*

*The difference between consideration transferred and carrying amount of each business combination for entities under common control transaction is recognised in equity and presented as "additional paid-in-capital".*

*In applying pooling of interest method, each financial statements' item of combined entities, for the period of which common control business combination become effective and for the comparative period, are presented as if business combination had occurred from the beginning of the period for which the combined entities were under common control. Carrying amount of those financial statements items are carrying amount of combined entities in business combination for entities under common control.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**e. Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas** (lanjutan)

Grup menyajikan aset neto entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebelum tanggal efektif kombinasi bisnis sebagai "Ekuitas Merging Entities".

Kombinasi bisnis entitas sepengendali yang terjadi di tahun 2020 dijelaskan di Catatan 4.

**Metode ekuitas**

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian investor atas laba rugi pasca akuisisi dari investee atas laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari investee atas pendapatan komprehensif lainnya.

Jika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi dan ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2h.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**e. Principles of consolidation and equity accounting** (continued)

*The Group present net asset of combined entity attributable to equity holder of parent entity prior to the effective date of business combination as "Equity of Merging Entities".*

*The business combination of entities under common control occurred in 2020 is described in Note 4.*

**Equity method**

*Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the investor's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.*

*When the Group's share of losses in an associate or joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.*

*Unrealised gains on transactions between the group and its associates and joint ventures are eliminated to the extent of the group's interest in these entities. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the associates and joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.*

*Dividends received or receivable from associates or joint ventures are recognised as reduction in the carrying amount of the investment.*

*The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment in accordance with the policy described in Note 2h.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Prinsip atas akuntansi konsolidasi dan ekuitas (lanjutan)**

**Perubahan kepemilikan**

Grup memperlakukan transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya kontrol sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Grup. Perubahan dalam kepemilikan menghasilkan penyesuaian antara nilai tercatat dari kepentingan pengendali dan nonpengendali untuk mencerminkan kepentingan relatifnya di entitas anak. Selisih antara jumlah penyesuaian untuk kepentingan nonpengendali dan pertimbangan yang dibayarkan atau diterima diakui dalam cadangan terpisah dalam ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Grup.

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain konsolidasian direklasifikasi ke laporan laba rugi konsolidasian.

Jika kepemilikan saham pada ventura bersama atau perusahaan asosiasi berkurang namun pengendalian bersama atau pengaruh signifikan dipertahankan, hanya sebagian proporsional dari jumlah yang telah diakui sebelumnya dalam pendapatan komprehensif konsolidasian lainnya yang direklasifikasi ke laba atau rugi konsolidasian jika diperlukan

**f. Penjabaran mata uang asing**

**Mata uang fungsional dan penyajian**

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**e. Principles of consolidation and equity accounting (continued)**

**Changes in ownership interests**

*The Group treats transactions with noncontrolling interests that do not result in a loss of control as transactions with equity owners of the Group. A change in ownership interest results in an adjustment between the carrying amounts of the controlling and non-controlling interests to reflect their relative interests in the subsidiary. Any difference between the amount of the adjustment to non-controlling interests and any consideration paid or received is recognised in a separate reserve within equity attributable to owners of the Group.*

*When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in the profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in the consolidated other comprehensive income are reclassified to the consolidated profit or loss.*

*If the ownership interest in a joint venture or an associate is reduced but joint control or significant influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised in the other consolidated comprehensive income are reclassified to the consolidated profit or loss where appropriate.*

**f. Foreign currency translation**

**Functional and presentation currency**

*Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").*

*The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional and presentation currency of the Group.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**f. Penjabaran mata uang asing** (lanjutan)

**Transaksi dan saldo**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember/ December 2020</b>		<b>31 Desember/ December 2019</b>	
Dolar Amerika Serikat (USD)	14,105		13,901	<i>United States Dollar (USD)</i>
Euro (EUR)	17,330		15,589	<i>Euro (EUR)</i>
Dolar Singapura (SGD)	10,603		10,321	<i>Singaporean Dollar (SGD)</i>
Poundsterling Inggris (GBP)	19,086		18,250	<i>Great Britain Poundsterling (GBP)</i>
Yen Jepang (JPY)	136		128	<i>Japanese Yen (JPY)</i>

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan biaya perolehan diamortisasi efek dan perubahan nilai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif konsolidasian lainnya.

**g. Transaksi dengan pihak berelasi**

Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK 7 (Revisi 2015) - "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**f. Foreign currency translation** (continued)

**Transactions and balances**

*Foreign currency transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing on the consolidated statement of financial position date.*

*Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of foreign exchange transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.*

*The exchange rates used as of 31 December 2020 and 2019 were as follows:*

	<b>31 Desember/ December 2020</b>		<b>31 Desember/ December 2019</b>	
Dolar Amerika Serikat (USD)	14,105		13,901	<i>United States Dollar (USD)</i>
Euro (EUR)	17,330		15,589	<i>Euro (EUR)</i>
Dolar Singapura (SGD)	10,603		10,321	<i>Singaporean Dollar (SGD)</i>
Poundsterling Inggris (GBP)	19,086		18,250	<i>Great Britain Poundsterling (GBP)</i>
Yen Jepang (JPY)	136		128	<i>Japanese Yen (JPY)</i>

*Changes in the fair value of monetary securities denominated in foreign currency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes in amortised cost are recognised in the consolidated profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in the consolidated other comprehensive income.*

**g. Transactions with related parties**

*The Group has transactions with related parties. In accordance with SFAS 7 (Revised 2015) - "Related Party Disclosures". This transaction is based on the terms agreed by both parties, where these requirements may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)**

Pihak-pihak Berelasi, yang dimaksud dengan pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- i. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
  2. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
  3. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;
- ii. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  1. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  2. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
  3. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (i);
  4. orang yang diidentifikasi, dalam butir (i) (1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- iii. Definisi pihak-pihak berelasi untuk Grup adalah sebagai berikut:
  1. Pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor; dan;
  2. Entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

Pemerintah yang dimaksud oleh Grup sebagai pihak berelasi adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Milik Negara yang dimiliki langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Anak Perusahaan, namun tidak termasuk Perusahaan Milik Pemerintah Daerah.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 46.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**g. Transactions with related parties  
(continued)**

*A related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follows:*

- i. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
  1. has control or joint control over the reporting entity;
  2. has significant influence over the reporting entity; or
  3. is member of the key management personnel of the reporting entity or parent of the reporting entity;
- ii. *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
  1. the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
  2. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
  3. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (i);
  4. a person identified in (i) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- iii. *The definition of related parties for the Group is as follows:*
  1. *The Government that has control of, or joint control, or significant influence over, the reporting entity; and*
  2. *Other entity that is a related party because it is controlled or jointly controlled, or is significantly influenced by the same government over the reporting entity and the other entity*

*The Government referred to by the Group as a related party is the Government of the Republic of Indonesia and State-Owned Companies which are directly owned by the Government of Indonesia and the Subsidiaries, but do not include Local Government-Owned Companies.*

*The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the Note 46.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum  
1 Januari 2020**

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuan.

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Grup untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dicatat sebagai "pendapatan investasi".

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang diperdagangkan termasuk di dalam pendapatan investasi. Pendapatan/(bebani) investasi diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan/(kerugian) selisih kurs atas investasi dicatat sebagai pendapatan investasi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
*(continued)*

**h. Financial instruments**

**Accounting policy applicable before  
1 January 2020**

*The Group classifies its financial assets in the following categories of financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.*

a) **Financial assets at fair value through profit or loss**

*This category comprises two sub-categories: financial assets classified as held for trading and financial assets designated by the Group as at fair value through profit or loss upon initial recognition.*

*A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.*

*Financial instruments included in this category are recognised initially at fair value, transaction costs (if any) are taken directly to the consolidated statement profit or loss. Gains or losses arising from changes in fair value and sales of these financial instruments are included directly in the profit or loss and are reported as "investment income".*

*Interest income on financial instruments held for trading are included in investment income. Investment income/(expense) is recognised on an accrual basis. Foreign exchange gains/(losses) on investments are reported in investment income.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum  
1 Januari 2020** (lanjutan)

b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Grup untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Grup dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Grup mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam pendapatan investasi. Pendapatan bunga diakui dengan basis akrual. (Kerugian)/keuntungan selisih kurs dicatat dalam pendapatan investasi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**Accounting policy applicable before  
1 January 2020** (continued)

b) *Loans and receivables*

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:*

- *those that the Group intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Group upon initial recognition designates as available-for sale; or*
- *those for which the Group may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration and receivables.*

*Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. In case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables and recognised in the consolidated profit or loss as "allowance for impairment losses".*

*Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the investment income. Interest income is recognised on accrual basis. Foreign exchange (losses)/gains in investments are recorded in investment income.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum  
1 Januari 2020** (lanjutan)

- c) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang ditetapkan oleh Grup dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai (jika ada).

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**Accounting policy applicable before  
1 January 2020** (continued)

- c) Held-to-maturity financial assets

*Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:*

- those that the Group upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- those that the Group designates as available-for-sale; and
- those that meet the definition of loans and receivables.

*Held-to-maturity financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses (if any).*

*The effective interest rate is the interest rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial assets or financial liability (or, where appropriate a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition.*

*The calculation of the effective interest rate includes transaction costs and all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum  
1 Januari 2020** (lanjutan)

d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajarnya di mana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuan. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas konsolidasian, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak  
1 Januari 2020**

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Grup berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut, serta berdasarkan dengan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**Accounting policy applicable before  
1 January 2020** (continued)

d) **Available-for-sale financial assets**

*Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to the need for liquidity or changes in interest rates, exchange rates or those that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments or financial assets at fair value through profit or loss.*

*Available-for-sale financial assets are measured subsequently at fair value with gains and losses being recognised in the consolidated statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in the consolidated statement of changes in equity is recognised in the consolidated profit or loss.*

*However, interest is calculated using the effective interest method, and foreign currency translation gains or losses on monetary assets classified as available-for-sale are recognised in the consolidated profit or loss.*

**Accounting policy applicable from  
1 January 2020**

*The following table presents the classification of the Group's financial instruments based on the characteristics of these financial instruments, as well as in accordance with SFAS 71 "Financial Instruments"*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak  
1 Januari 2020** (lanjutan)

d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

**h. Financial instruments** (continued)

**Accounting policy applicable from  
1 January 2020** (continued)

**d) Available-for-sale financial assets**

Kategori yang diidentifikasi pada PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Grup)/ Classes (as determined by the Group)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit or loss</i> (FVTPL)	Investasi/Investments	Obligasi/Bonds Saham/Equity securities Rekasadana/ Mutual funds Efek beragam aset/Asset-backed securities Investasi pada KIK/Collective investment contract
			Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents
			Investasi/Investments      Obligasi/ Bonds
			Piutang premi asuransi dan reasuransi/ Insurance and reinsurance premium receivables
			Piutang imbal jasa penjaminan/Guarantee fee receivables
	Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial assets at amortised cost</i> (AC)	Piutang klaim reasuransi dan retrosesi/Reinsurance and retrocession claim receivables Piutang penjaminan ulang/Re-guarantee receivables Piutang pembiayaan modal ventura/Venture capital financing receivables Piutang hasil investasi/Investment income receivables Piutang usaha dan piutang lain-lain/Account receivables and other receivables	Uang jaminan/Security deposits
			Bank yang dibatasi penggunaannya/ Restricted cash in bank
			Lain-lain - bersih/Others - net
			Obligasi/Bonds Saham/Equity securities
			Investasi pada entitas asosiasi/Investment in associates
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortised cost</i> (AC)	Utang klaim asuransi dan reasuransi/Insurance and reinsurance claim payables Utang klaim penjaminan/Guarantee claim payables Utang premi reasuransi dan retrosesi/Reinsurance and retrocession premium payables Utang penjaminan ulang/Re-guarantee payables Utang usaha dan utang lain-lain/Account payables and other payables Akrual/Accruals Pinjaman dari pemerintah/Government loans Utang bank/Bank loans Medium Term Notes (MTN)/Medium Term Note(MTN)	Utang klaim asuransi dan reasuransi/Insurance and reinsurance claim payables
			Utang klaim penjaminan/Guarantee claim payables
			Utang premi reasuransi dan retrosesi/Reinsurance and retrocession premium payables
			Utang penjaminan ulang/Re-guarantee payables
			Utang usaha dan utang lain-lain/Account payables and other payables
			Akrual/Accruals
			Pinjaman dari pemerintah/Government loans
			Utang bank/Bank loans

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020**

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, Grup menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual instrumen terkait. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- nilai wajar melalui laporan laba rugi,
- nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan
- biaya perolehan diamortisasi.

Grup mengklasifikasi dan mengukur instrumen ekuitas dan derivatif pada aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi.

**a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (AC)**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI").

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur dengan menggunakan suku bunga efektif.

Biaya transaksi mencakup dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets**

**Accounting policy applicable from 1 January 2020**

To determine categories and classifications, the Group assess all financial assets, except equity and derivative instruments, based on a combination of asset management business models and the characteristics of contractual cash flow related instruments. The Group classifies its financial assets in the following categories:

- fair value through profit or loss ("FVTPL"),
- fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), and
- amortised cost.

The Grup classify and measure equity and derivative instruments on financial assets recognised at fair value through profit or loss.

**a) Financial assets are measured amortized cost (AC)**

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI").

At initial recognition, financial assets measured at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured using the effective interest rate.

Transaction cost includes all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

- a) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (AC) (lanjutan)

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian dan diakui sebagai "pendapatan investasi - bersih".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).

- b) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (FVOCI)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang ("SPPI").

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar, keuntungan atau kerugian atas selisih kurs, dan kerugian penurunan nilai, diakui sebagai penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

- a) Financial assets are measured at amortised cost (AC) (continued)

*Interest income from financial assets measured at amortised cost is recorded in the consolidated profit or loss and is recognised as "investment income - net".*

*When an impairment occurs, an impairment loss is recognised as a deduction from the carrying value of financial assets and is recognised in the consolidated financial positions as "allowance for impairment losses".*

*Financial assets measured at amortised cost are initially recognised at fair value including transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses (if any).*

- b) Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

*Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount owed.*

*At initial recognition, financial instruments measured at fair value through other comprehensive income are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at fair value where gains or losses on changes in fair value, gains or losses on foreign exchange, and impairment losses are recognised as other consolidated comprehensive income.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

- b) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (FVOCI) (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah/pengurang dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan keuangan konsolidasian (tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian). Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif.

- c) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika perolehannya terutama untuk dijual dalam jangka pendek.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan tersebut masuk ke dalam klasifikasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dicatat masing-masing sebagai "keuntungan/(kerugian) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL)" dan "pendapatan investasi - net". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebagai "pendapatan bunga".

**h. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

- b) *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) (continued)*

*Expected credit losses are recognised as addition/deduction to other comprehensive income in the consolidated statement of financial statements (not reducing the carrying amount of financial assets in the consolidated financial statements). Interest income is calculated using the effective interest method.*

- c) *Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)*

*Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short-term.*

*Financial assets are measured at fair value through profit or loss except business model test and contractual cash flow test show that financial assets are included in the classification that are measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income.*

*Financial instruments classified into this category are recognised at fair value at initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the consolidated profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial instruments are recognised in the consolidated profit or loss and are recorded as "gain/(losses) financial assets available for sale" and "investment income - net". Interest income from financial instruments in the group measured at fair value through profit or loss is recorded as "interest income".*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**i. Aset keuangan** (lanjutan)

Sebagai tambahan, pada pengakuan awal, Grup dapat membuat pilihan takterbatalkan untuk menyajikan aset keuangan yang sebenarnya dapat memenuhi ketentuan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebagai instrumen yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi jika dengan perlakuan demikian dapat menghilangkan atau mengurangi secara signifikan ketidakcocokan akuntansi yang dapat terjadi.

Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Grup. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Grup menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**i. Financial assets** (continued)

*In addition, on initial recognition, the Group may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured at amortised cost or at FVOCI that otherwise meets the requirements to be measured at amortized cost as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise.*

Business model assessment

*Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Group. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.*

*The Group assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).*

*Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:*

- how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (lanjutan)

- risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Grup dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Grup untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar aset keuangan pada saat pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok terhutang pada periode waktu tertentu dan risiko dan biaya pinjaman dasar serta marjin laba.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

Business model assessment (continued)

*Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:* (continued)

- the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

*Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Group reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Group did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.*

*The Targeting Operating Model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.*

*Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.*

*The Group can reclassified all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.*

*For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs as well as profit margin.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**i. Aset keuangan (lanjutan)**

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual instrumen, termasuk apakah aset keuangan memiliki persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- peristiwa kontinjenси yang dapat merubah jumlah dan waktu dari arus kas kontraktual;
- fitur pengungkit (*leverage*);
- persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan;
- persyaratan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu; dan
- fitur yang memodifikasi nilai waktu uang dari imbalan (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Instrumen ekuitas yang memiliki arus kas kontraktual yang tidak memenuhi kriteria semata dari pembayaran pokok dan bunga. Oleh karena itu, seluruh aset keuangan ini akan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali opsi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dipilih.

**ii. Liabilitas keuangan**

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari liabilitas keuangan non-derivatif yang tidak dimiliki Perseroan untuk diperdagangkan dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi FVTPL. Tidak ada perubahan signifikan untuk klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan sebelum dan setelah 1 Januari 2020.

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi, kecuali untuk kontrak jaminan keuangan.

**Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi, diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**i. Financial assets (continued)**

Business model assessment (continued)

*In assessing whether the contractual cash flows are solely payment of principal and interest, the Group considers the contractual terms of the instrument, including assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows. In making the assessment, the Group considers:*

- *contingent events that would change the amount and timing of contractual cash flows;*
- *leverage features;*
- *prepayment and extension terms;*
- *terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets; and*
- *features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).*

*Equity instruments have contractual cash flows that do not meet the solely payment of principal and interest criterion. Accordingly, all such financial assets are measured at FVTPL unless the FVOCI option is selected.*

**ii. Financial liabilities**

*Financial liabilities measured at amortised cost consist of non-derivative financial liabilities that are not held for trading purpose and not designated at fair value through profit or loss FVTPL. There is no significant changes in classification and measurement for financial liabilities before and after 1 January 2020.*

*The Group classified its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised costs, except financial guarantee contract.*

**Financial liabilities measured at amortised cost**

*Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Group measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas keuangan untuk kontrak jaminan keuangan**

Kontrak jaminan keuangan selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- (i) jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan; dan
- (ii) jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui.

**iii. Pengukuran awal**

Pengakuan Grup menggunakan akuntansi tanggal transaksi untuk kontrak reguler ketika mencatat transaksi aset keuangan.

**iv. Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Perseroan menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Perseroan menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan penerbit aset keuangan sehingga penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit yang diberikan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuan ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**v. Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**ii. Financial liabilities (continued)**

**Financial liabilities for financial guarantee contract**

*Financial guarantees are subsequently measured at the higher of:*

- i) *the amount of the loss allowance determined; and*
- ii) *the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised.*

**iii. Initial recognition**

*The Group uses trade date accounting for regular contracts when recording financial assets transactions.*

**iv. Derecognition**

*Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Group evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition).*

*The Company writes off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Company determines that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of financial asset's issuer such that the financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.*

*Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.*

**v. Off-setting financial instruments**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**v. Saling hapus instrumen keuangan** (lanjutan)

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak lawan.

**vi. Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang dapat dipercaya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari *Interdealer Market Association* ("IDMA"), Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), atau harga kuotasi broker untuk obligasi, harga saham dari indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk saham, dan nilai aset bersih untuk reksa dana dan reksa dana ETF.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**v. Off-setting financial instruments**  
(continued)

*The legally enforceable rights must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.*

**vi. Determination of fair value**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at the date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.*

*When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.*

*A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid offer spread and there are few recent transactions.*

*Fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the consolidated statement of financial position date from credible sources. This includes IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices, IBPA's (Indonesia Bond Pricing Agency) quoted price or broker's quoted price for bonds, shares price from shares prices indexes at Indonesia Stock Exchange for shares and net assets value for mutual funds and exchange traded funds.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**vi. Penentuan nilai wajar** (lanjutan)

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan estimasi arus kas terhadap aset bersih dari instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau re-packaging) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

**vii. Penurunan nilai aset keuangan**

**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset Keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**vi. Determination of fair value** (continued)

*For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments.*

*For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair value are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using available inputs at the dates of the consolidated statement of financial position.*

*The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is proved by comparison with other observable current market transactions for the same instrument (that is, without modification or repackaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.*

**vii. Impairment of financial assets**

**Accounting policy before 1 January 2020**

*At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**vii. Penurunan nilai aset keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020** (lanjutan)

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset Keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrument ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**vii. Impairment of financial assets**  
(continued)

**Accounting policy before 1 January 2020** (continued)

*The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:*

- (a) *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) *A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) *It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

*For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.*

*If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognised in the consolidated profit or loss.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**vii. Penurunan nilai aset keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari 2020** (lanjutan)

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuan. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020**

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("ECL") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

ECL diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

ECL individual didasarkan pada portfolio kredit per debitur yang telah bermasalah dan diperhitungkan selisih antara nilai bersih kini arus kas diskonto dan total kewajibannya, sedangkan ECL kolektif Grup menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks *probability of default* ("PD"), *forward looking* ("FL"), *loss given default* ("LGD"), *exposure at default* ("EAD") dan *discount factor* ("DF").

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**vii. Impairment of financial assets**  
(continued)

**Accounting policy before 1 January 2020** (continued)

*When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognised in the other consolidated comprehensive income shall be reclassified from equity to the consolidated profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognised. The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognizes in the consolidated profit or loss.*

**Accounting policy after 1 January 2020**

SFAS 71 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses ("ECL") or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

*ECL are recognised for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognised for equity instruments designated at FVOCI.*

*Individual ECL are based on non-performing loans portfolio per debtor and account for variance between net present value of discounted cashflow and their total liabilities, whilst the Group's collective ECL uses a complex model that uses a matrix of probability of default ("PD"), forward looking ("FL"), loss given default ("LGD"), exposure at default ("EAD") and discount factor ("DF").*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Probability of Default ("PD")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar dan bank melakukan klaim jaminan, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (tahapan 1) atau sepanjang umur (tahapan 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Forward Looking ("FL")

Grup melakukan proses korelasi antara *credit factor* dengan kumpulan faktor makroekonomi dengan menggunakan pendekatan *backward stepwise regression* dengan mempertimbangkan berbagai indikator statistika, dan kemampuan ekonomis untuk menyediakan prediksi nilai faktor makro ekonomi terpilih.

Loss Given Default ("LGD")

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari klaim gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Grup mengestimasikan LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments (continued)**

**vii. Impairment of financial assets (continued)**

**Accounting policy after 1 January 2020 (continued)**

Probability of Default ("PD")

*The probability at a point in time that a counterparty will default and bank claimed for financial guarantee, calibrated over up to 12 months from the reporting date (stage 1) or over the lifetime of the product (stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.*

Forward Looking ("FL")

*The Group performs a correlation process between credit factors and a set of macroeconomic factors using the backward stepwise regression approach by considering various statistical indicators, and economic capacity to provide predictions for the value of selected macroeconomic factors.*

Loss Given Default ("LGD")

*The loss that is expected to arise on default claims, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Company expects to receive. The Group estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**h. Instrumen keuangan** (lanjutan)

**vii. Penurunan nilai aset keuangan** (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020** (lanjutan)

Exposure at Default ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang committed pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

Discount Factor ("DF")

Variabel untuk mendapatkan nilai kini dari hasil perhitungan kredit ekspektasian. Suku bunga DF yang dipakai adalah suku bunga efektif ("EIR") tahunan individual debitur atau kelompok debitur.

Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan diukur pada:

- biaya perolehan diamortisasi;
- nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya;
- aset kontrak atau komitmen pinjaman; dan kontrak jaminan keuangan

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**h. Financial instruments** (continued)

**vii. Impairment of financial assets**  
(continued)

**Accounting policy after 1 January 2020**  
(continued)

Exposure at Default ("EAD")

*The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.*

Discount Factor ("DF")

*The variable to get the present value from the calculation of expected credit. The DF interest rate used is the annual effective interest rate (EIR) for an individual debtor or group of debtors.*

*The Group measures allowance for possible losses of financial instruments over the amount of expected credit losses throughout their lifetime, if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since initial recognition.*

*If at the reporting date, the credit risk of the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group measures the allowance for losses for the financial instrument in the amount of the expected 12-month credit loss. The aforementioned losses represent expected credit losses arising from defaults on financial instruments that may occur 12 months after the reporting date*

*The Group recognizes allowance for possible losses on expected credit losses on financial assets measured at:*

- amortized cost;*
- fair value through other comprehensive income;*
- assets contract or loan commitment; and financial guarantee contract.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Grup menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, akan tetapi penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan.

Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal - baik dinilai secara individu atau kolektif - dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Untuk aset keuangan, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara:

- arus kas kontraktual yang jatuh tempo pada Grup di bawah kontrak; dan
- arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasi untuk kontrak jaminan keuangan adalah pembayaran yang diekspektasi untuk mengganti pemegang jaminan atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diharapkan Grup untuk diterima dari pemegang jaminan, debitur, atau pihak lain.

Grup mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat tanggal pelaporan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**vii. Impairment of financial assets (continued)**

**Accounting policy after 1 January 2020 (continued)**

*The Group applies an impairment requirement for the recognition and measurement of allowance for losses for financial assets measured at fair value through other comprehensive income, but allowance for losses is recognised in the other consolidated comprehensive income and does not reduce the carrying amount of financial assets in the statement of financial position.*

*The purpose of the impairment requirements is to recognize expected lifelong credit losses over all financial instruments that have experienced a significant increase in credit risk since initial recognition - whether assessed individually or collectively - taking into account all reasonable and supported information, including information that is estimated future (forward-looking).*

*For financial assets, credit losses are the present value of the difference between:*

- contractual cash flow that matures at the Group under the contract; and*
- expected cash flow will be received by the Group.*

*Measurement of expected credit losses for financial guarantee contracts are payments expected to replace the collateral holder for the credit losses incurred less the amount the Group expects to receive from the collateral holder, debtor, or other party.*

*The Group recognizes cumulative changes in expected credit losses throughout its lifetime from the initial recognition of financial assets as allowance for losses on financial assets purchased or originating from financial assets that worsens at the reporting date.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Menentukan Peningkatan Risiko Kredit secara Signifikan**

Pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan. Grup mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup dapat berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.

Jika informasi *forward-looking* yang wajar dan terdukung tersedia tanpa perlu mengeluarkan biaya atau upaya berlebihan, Grup tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, ketika informasi yang lebih *forward-looking* daripada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tersedia dengan biaya atau upaya berlebihan, Grup dapat menggunakan status tunggakan yang dimaksud untuk menentukan ada atau peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara Grup menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Grup dapat menyanggah praduga ini jika Grup memiliki informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika Grup menentukan bahwa telah terjadi kenaikan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, maka praduga (*rebuttable presumption*) tersebut tidak diterapkan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Financial instruments (continued)**

**vii. Impairment of financial assets (continued)**

**Accounting policy after 1 January 2020 (continued)**

**Determine Significantly Increased Credit Risk**

At each reporting date the Group assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly. The Group considers changes in default risk that occur over the life of the financial instruments, not changes in the amount of expected credit losses. In carrying out this assessment, the Group compares the risk of default on financial instruments incurred on the reporting date with the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supported information available without costs or excessive effort, which is an indication of a significant increase in credit risk since recognition early.

The Group can assume that credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition if it was determined that the financial instrument has a low credit risk at the reporting date.

If reasonable and supported forward-looking information is available without the need to incur excessive costs or efforts, the Group cannot rely solely on arrears information in determining whether credit risk has increased significantly since initial recognition. However, when information that is more forward-looking than the arrears status (both individually and collectively) is available at excessive cost or effort, the Group can use the arrears status referred to to determine the presence or increase of credit risk significantly since initial recognition. Regardless of the way Group value credit risk increases significantly, there is a presumption (*rebuttable presumption*) that the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are overdue for more than 30 days. The Group can refute this presumption if the Group has reasonable and supported information, which is available without excessive costs or efforts, which proves that credit risk has not increased significantly since initial recognition, even though contractual payments are overdue for more than 30 days. If the Group determines that there has been a significant increase in credit risk before contractual payments are overdue for more than 30 days, then the rebuttable presumption is not applied.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**i. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

**j. Piutang usaha dan piutang lain**

Piutang usaha diakui dan dicatat sebesar nilai tagihan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan penelaahan status piutang pada tanggal laporan.

Piutang usaha terdiri atas: piutang jasa penasehat keuangan; piutang nasabah; piutang lembaga kliring dan penjaminan; piutang atas efek; piutang usaha pengelolaan dana; piutang sewa; dan piutang komisi penjaminan ulang. Piutang lain terdiri atas: piutang syariah, piutang koperasi; piutang karyawan; pinjaman yang diberikan; dan lain-lain.

Piutang lain dari pihak berelasi merupakan saldo piutang yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi Grup.

Piutang usaha dan piutang lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Grup tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukkan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**i. Cash and cash equivalents**

*Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current accounts) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted in use.*

**j. Account receivables and other receivables**

*Account receivables is recognizes and carried at original invoice amount less an allowance for impairment losses. An allowance for impairment losses is provided based on upon review of the status of the receivables at the reporting date.*

*Accounts receivable consists of: financial advisory service receivable; customer receivable; clearing and guarantee institution receivable; securities receivable; fund management service receivable; lease receivable; and co-guarantee commission receivable. Other receivables consists of: sharia receivables; receivables from cooperative; employee receivables; loans; and others.*

*Other receivables from related parties are receivables balance reflecting loan given to related parties of the Group.*

*Accounts receivable and other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.*

*Collectability of accounts receivable and other receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Group will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables. Significant financial difficulties of the debtor, probability that the debtor will enter bankruptcy or financial reorganisation, and default or delinquency in payments are considered indicators that the receivable is impaired. The amount of the impairment allowance is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the original effective interest rate. Cash flows relating to short term receivables are not discounted if the effect of discounting is immaterial.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**j. Piutang usaha dan piutang lain (lanjutan)**

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan dalam beban penurunan nilai piutang yang diklasifikasikan di dalam kelompok "beban umum dan administrasi". Ketika piutang usaha dan piutang lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada tahun selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun penyisihan. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban penurunan nilai piutang" pada laporan laba rugi konsolidasian.

**k. Piutang premi asuransi dan reasuransi, dan piutang klaim reasuransi dan retrosesi.**

Piutang premi asuransi dan reasuransi meliputi tagihan premi kepada tertanggung/agen/broker/ asuradur/koasuradur sebagai akibat transaksi asuransi, penjaminan kredit, reasuransi, koasuransi dan co-guarantee. Piutang klaim reasuransi dan retrosesi meliputi tagihan klaim kepada reasuradur/koasuradur/retrosesioner atas transaksi penjaminan ulang, reasuransi, koasuransi, retrosesi, dan co-guarantee.

Grup menelaah penurunan piutang secara berkala dan nilai penurunan nilai piutang disajikan mengurangi nilai piutang. Lihat Catatan 2h untuk penurunan nilai aset keuangan.

**I. Piutang imbal jasa penjaminan**

Piutang Imbal Jasa Penjaminan ("IJP")/ Imbalan Jasa Kafalah ("IJK") Kredit Usaha Rakyat ("KUR") dan Non KUR diakui ketika terbit ketika terbitnya Sertifikat Penjaminan/Sertifikat Kafalah termasuk ulang tahun SP/SK khusus KUR skema subsidi IJP.

Piutang IJP/IJK terdiri dari Piutang Imbal Jasa Penjaminan KUR kepada Pemerintah dan Piutang Imbal Jasa Penjaminan (KUR skema subsidi bunga dan Non KUR) kepada Penerima Jaminan (Bank dan Non Bank).

**m. Piutang co-guarantee dan piutang re-guarantee**

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-guarantee dicatat sebagai piutang co-guarantee.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**j. Accounts receivable and other receivables  
(continued)**

*The amount of the impairment loss is recognised in the consolidated profit or loss within impairment charges for receivables which is classified in the "general and administrative expenses" group. When accounts receivable and other receivables for which an impairment allowance had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "impairment charges for receivables" in the consolidated profit or loss.*

**k. Insurance and reinsurance premium receivables, and reinsurance and retrocession claim receivables**

*Insurance and reinsurance premium receivables consist of receivables from policyholders/agents/brokers/insurers/co-insurers resulting from insurance, credit guarantee, reinsurance, and co-guarantee transactions. Reinsurance and retrocession claim receivables consist of receivables from reinsurers/co-insurers/retrocessioner resulting from re-guarantee, reinsurance, co-insurance, retrocession, and co-guarantee transactions.*

*The Group assesses its receivables for impairment on a regular basis and the impairment is presented as deduction to receivables. Refer to Note 2h for impairment of financial assets.*

**I. Guarantee fee receivables**

*Guarantee fee/Kafalah Fee ("IJK") Kredit Usaha Rakyat ("KUR") and Non-KUR receivables are recognised when issued when the Certificate of Guarantee/Certificate of Kafalah is issued including the anniversary of the SP/SK specifically for the KUR IJP subsidy scheme.*

*Receivables from IJP/IJK consist of Receivables for Return of Guarantee Services from KUR to the Government and Receivables for Guarantee Services (KUR with interest subsidy schemes and Non-KUR) to Beneficiaries (Banks and Non-Banks).*

**m. Co-guarantee and re-guarantee receivables**

*Payment of claims to the sole recipient of a guarantee that partners coguarantee and partners re-guarantee are recorded as a co-guarantee receivable in the settlement.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Piutang co-guarantee dan piutang re-guarantee (lanjutan)**

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang pada saat mitra mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Grup dengan mitra), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat diterbitkannya SOA (*Statement of Account*), namun pembayaran belum dilakukan.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *re-guarantee* pada saat diterbitkannya SOA (*Statement of Account*), namun pembayaran belum dilakukan.

**n. Penjaminan ulang dibayar dimuka**

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban *Fee based income* bank pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan /Kafalah.

Berkaitan dengan mekanisme pembayaran IJP yang dilakukan secara tahunan khusus penjaminan PEN, KUR skema subsidi IJP, KUR skema subsidi bunga maka pengukuran atas biaya reasuransi dibayar dimuka dan biaya loss limit dibayar dimuka juga berbanding lurus dengan pengakuan piutang IJP dan pendapatan IJP ditangguhkan.

**o. Aset retrosesi**

Aset retrosesi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk ceded estimasi klaim reasuransi, dan ceded premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Pada setiap tanggal taporan posisi keuangan, manajemen Grup menelaah apakah aset retrosesi telah mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset retrosesi terjadi jika, dan hanya jika terdapat bukti obyektif yang menyebabkan cedant tidak menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan persyaratan kontrak dan dampaknya dapat diukur secara andal. Penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**m. Co-guarantee and re-guarantee receivable  
(continued)**

*Receivables in the settlement are recognised as Receivables in the completion of when partners accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the Group with partners), but payment has not been done.*

*Receivables in the settlement are recognised as a receivables co-guarantee at the time of the SOA (Statement of Account), but the payment has not been made.*

*Receivables in the settlement are recognised as a receivables re-guarantee at the time of the SOA (Statement of Account), but the payment has not been made.*

**n. Prepaid re-guarantee**

*Prepaid Co-Guarantee expense, re-guarantee expense, Fee based income of banks implementing and agent commission expense are amortized proportionally to follow the pattern of revenue recognition Guarantee/Kafalah Fee.*

*In regards with the annual IJP payment mechanism specifically for PEN guarantee, IJP subsidy scheme KUR, interest subsidy scheme KUR, the measurement of prepaid reinsurance costs and prepaid loss limit fees is also directly proportional to the recognition of IJP receivables and deferred IJP income.*

**o. Retrocession assets**

*Retrocession asset include balances expected to be recovered from reinsurance companies for ceded estimated reinsurance claims and ceded unearned premiums. Amounts recoverable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.*

*The Group's management assesses at each consolidated statement of financial position date whether retrocession assets is impaired. Retrocession asset impairment occurs if, and only if, there is an objective evidence that the cedant did not receive the entire amount in accordance with the contract requirements and the impact can be measured reliably. Impairment loss is recognised in the consolidated profit or loss.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**p. Aset tetap**

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Tanah tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Tahun/Year		
Bangunan	10 - 20	Buildings
Peralatan	4 - 20	Equipment
Kendaraan	4 - 5	Vehicles
Aset tetap lainnya	4 - 5	Other fixed asset

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir tahun pelaporan.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuan pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan.

Akumulasi biaya untuk aset tetap dalam pembangunan dikapitalisasi sebagai aset yang sedang dibangun. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**p. Fixed assets**

*Fixed assets are initially recognised at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.*

*Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to the consolidated profit or loss during the financial year in which they are incurred.*

*Land is not depreciated. After initial recognition, the other fixed assets are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.*

*Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:*

Tahun/Year	Buildings
Bangunan	10 - 20
Peralatan	4 - 20
Kendaraan	4 - 5
Aset tetap lainnya	4 - 5

*The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting year.*

*The carrying amount of an item of fixed assets is derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in the consolidated profit or loss when disposed and could not be classified as revenue.*

*The accumulated costs of the fixed assets under construction are capitalised as asset under construction. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**q. Aset takberwujud**

Aset takberwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Jumlah tersusutkan aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual). Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program perangkat lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk perangkat lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada tahun berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari tiga tahun.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**q. Intangible assets**

*Intangible assets are initially recognised at cost. The cost of acquisition of intangible assets consists of the purchase price, including import duties and taxes that can not be restituted on purchase, net of discounts and rebates and all the costs that are directly attributable to preparing the asset so it is ready for use.*

*After initial recognition, intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.*

*Total depreciation of intangible assets with finite useful life are systematically allocated during their useful life. Amortization begins when the asset is available for use, ie when the asset is at a location and in a condition to operate in the manner intended by management. Amortization stopped at an earlier date between when the assets are classified as assets held for sale (or included in a loose group of assets classified as assets held for sale. The method of amortization is used illustrates the expected pattern of consumption of the entity over the future economic benefits. If the pattern can not be determined reliably, the straight-line method is used.*

*Intangible assets consist of computer software.*

*Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.*

*Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.*

*Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent year.*

*Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed three years.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**q. Aset takberwujud** (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan.

**r. Properti investasi**

Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh perusahaan-perusahaan di Grup konsolidasian diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Setelah pengakuan awal, perusahaan-perusahaan dalam Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan dan Prasarana serta perlengkapan gedung disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis masing-masing 20 hingga 50 tahun serta 15 tahun.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**q. Intangible assets** (continued)

*Any gain or loss arising from derecognition (the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in the consolidated profit or loss when disposed and could not be classified as revenue.*

**r. Investment property**

*Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the companies in the consolidated Group, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property. Investment property is recognised as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.*

*Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.*

*After initial recognition, companies within the Group choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Land rights are not depreciated and are carried at costs. Building and Infrastructure also building equipments are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives 20 until 50 years, and 15 years respectively.*

*Maintenance and repairment costs are charged to the consolidated profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalised.*

*Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.*

*Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation and commencement of development with a view to sale.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Properti investasi (lanjutan)**

Properti investasi dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

**s. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut. Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan/(pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban/(pendapatan) pada laporan laba rugi konsolidasian.

**t. Utang usaha**

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok selain utang premi dan utang klaim. Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

**u. Utang lain-lain**

Utang lain terdiri dari utang bunga, dana tabarru, liabilitas sewa dan utang lainnya yang tidak terjadi dalam kegiatan usaha normal Grup.

**v. Utang klaim dan utang premi asuransi, reasuransi, dan penjaminan kredit**

Utang klaim meliputi utang kepada tertanggung/asuradur/koasuradur sebagai akibat transaksi asuransi, penjaminan kredit, reasuransi, dan co-guarantee. Utang premi meliputi utang kepada reasuradur/koasuradur atas transaksi reasuransi, retrosesi, co-guarantee, dan koasuransi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**r. Investment property (continued)**

*An investment property is derecognised upon disposal or when the investment property is no longer in use permanently and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in consolidated profit or loss and other comprehensive income in the period of the retirement or disposal.*

**s. Impairment of non-financial assets**

*The group examines whether there is any indication of impairment of the non-financial assets on the consolidated statement of financial position date and the possible adjustments to the recoverable value if there are circumstances that indicate such impairment. The value of assets that can be recovered is calculated based on the value in use or selling price, whichever is higher.*

*Impairment loss is recognised if the carrying amount of the asset exceeds its recoverable value. On the other hand, a reversal of impairment is recognised when there is an indication that the impairment is no longer the case. Impairment/(recovery) on the value of the asset is recognised as an expense/(income) in the consolidated profit or loss.*

**t. Accounts payable**

*Accounts payable is the obligation to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers other than premium payables and claim payables. Accounts payable is recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.*

**u. Other payables**

*Other payables consist of interest payable, tabarru fund, lease liabilities and other payables that do not occur in the Group's normal business course.*

**v. Insurance, reinsurance, and credit guarantee claim and premium payables**

*Claim payables consist of payables to policyholders/insurers/co-insurers resulting from insurance, credit guarantee, reinsurance, and co-guarantee transactions. Premium payables consist of payables to reinsurers/co-insurers resulting from reinsurance, retrocession, co-guarantee, and co-insurance transactions.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**w. Pendapatan diterima dimuka**

Pendapatan diterima dimuka berasal dari bisnis penjaminan kredit dan sewa gedung.

Pendapatan diterima dimuka terkait penjaminan kredit merupakan pembayaran imbal jasa penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Grup yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang. Pendapatan diterima dimuka ini akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan diamortisasi ketika Sertifikat Penjaminan (SP) terbit sampai dengan akhir penjaminan. Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi imbal jasa penjaminan kredit diterima dimuka adalah sesuai jangka waktu.

Selain itu, Grup juga mencatatkan pendapatan sewa diterima dimuka yang berasal dari penerimaan pembayaran di depan untuk sewa gedung kepada Grup. Pendapatan diterima dimuka diamortisasi menjadi pendapatan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

**x. Utang bank**

Utang bank terdiri dari pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Pinjaman bank jangka pendek jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan sedangkan pinjaman bank jangka panjang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Rincian utang bank, dapat dilihat pada catatan 29.

**y. Medium term notes (MTN)**

Medium term notes ("MTN") ini diterbitkan dan dikeluarkan kepada masyarakat pada tanggal 12 November 1996 untuk masa tiga tahun dan jatuh tempo pada tanggal 12 November 1999.

**z. Liabilitas imbalan kerja**

**Kewajiban jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**w. Unearned revenue**

*Unearned revenue is derived from credit guarantee and building leases business of the Group.*

*Unearned revenue related to credit guarantee is a guarantee fee payment for current year and previous years from the guaranteed to the Group which will turn to be income in the coming years. This unearned revenue will be recognised as income during the remaining period of guarantee and amortized when the Certificate of Guarantee (SP) is issued until the end of the guarantee period. By considering the number of accelerated payment credits, management establish maximum time limit of the unearned credit guarantee fee allocation, that is due to time limit.*

*Other than that, the Group has also recognised unearned rental revenue which is received from an upfront payment of building leases to the Group. Unearned revenue is amortized using the straight-line method over the lease period.*

**x. Bank loans**

*Bank loans consists of short-term and long-term loans. Short-term bank loans will be due in less than 12 months after the end of the reporting period while the long-term bank loans will be due in more than 12 months after the end of the reporting period. Details of bank loans, could be seen at note 29.*

**y. Medium term notes (MTN)**

*The medium term notes ("MTN") was issued and offered to the public on November 12, 1996 with a maturity term of three years and was due on November 12, 1999.*

**z. Employment benefit liabilities**

**Short term obligations**

*Short-term employee benefits are recognised when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.*

*Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**z. Liabilitas imbalan kerja** (lanjutan)

**Kewajiban pensiun**

Entitas-entitas di dalam Grup mengoperasikan berbagai skema pensiun. Grup memiliki program imbalan pasti dan iuran pasti. Program iuran pasti merupakan program pensiun dimana Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas yang terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan maupun periode lalu. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Pada umumnya, program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya tergantung oleh satu faktor atau lebih, misalnya usia, masa bekerja dan kompensasi.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian atas pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya. Keuntungan dan kerugian ini termasuk di dalam laba ditahan pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**z. Employment benefit liabilities** (continued)

**Pension obligations**

*Group companies operate various pension schemes. The Group has both defined benefit and defined contribution plans. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior periods. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.*

*The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.*

*The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.*

*Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in retained earnings in the consolidated statement of changes in equity.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**z. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)**

**Kewajiban pensiun (lanjutan)**

Perubahan nilai kini atas kewajiban imbalan pasti yang timbul dari amandemen rencana atau pembatasan langsung diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai biaya jasa lalu.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran program pensiun karena diwajibkan, berdasarkan kontrak.

**Kewajiban pasca kerja lainnya**

Beberapa entitas di dalam Grup memberikan imbalan kesehatan pasca kerja untuk pensiunnya. Imbalan ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini diakui secara akrual selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

**Pesongan pemutusan kontrak kerja**

Pesongan pemutusan kontrak kerja terutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesongan. Grup mengakui pesongan pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berasa dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesongan. Dalam hal menyediakan pesongan sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesongan pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

**aa. Pajak penghasilan kini dan tangguhan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain konsolidasian atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain konsolidasian atau ekuitas.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**z. Employment benefit liabilities (continued)**

**Pension obligations (continued)**

*Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in the consolidated profit or loss as past service costs.*

*For defined benefit, the Group pays contributions to pension plans on a mandatory, based on contractual basis.*

**Other post-employment obligations**

*Some Group companies provide postretirement healthcare benefits to the retirees. The entitlement to these benefits usually conditional on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment using projected unit credit method. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.*

**Termination benefits**

*Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of SFAS 57 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.*

**aa. Current and deferred income tax**

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other consolidated comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other consolidated comprehensive income or directly in equity, respectively.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**aa. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)**

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana perusahaan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill*. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak atau rugi pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika perusahaan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**aa. Current and deferred income tax (continued)**

*The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the company's subsidiaries and associates operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.*

*Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.*

*Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.*

*Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.*

*Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in foreign operations where the company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not reverse in the foreseeable future.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**aa. Pajak penghasilan kini dan tangguhan** (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**ab. Sewa**

**Sebelum 1 Januari 2020**

Grup mengadakan perjanjian yang mengandung sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa dan pesewa. Grup mengevaluasi apakah secara substansial risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset telah beralih berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2014), "Sewa", yang mensyaratkan Grup membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan aset.

**Grup sebagai penyewa**

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Grup secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewa pembiayaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan dibebankan langsung pada laporan laba rugi konsolidasian.

Aset sewa pembiayaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Grup akan memperoleh kepemilikan di akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama masa yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi konsolidasian secara garis lurus selama masa sewa.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**aa. Current and deferred income tax (continued)**

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

**ab. Leases**

**Before 1 January 2020**

*The Group has entered into arrangements that contain lease in which the Group is both a lessee and lessor. The Group evaluates whether all of the risks and rewards incidental to ownership are substantially transferred based on SFAS No. 30 (Revised 2014), "Leases" which requires the Group to make judgments and estimates of transfer of risks and rewards of the assets*

***The Group as lessee***

*A finance lease that transfers to the Group substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, is capitalised at the commencement of the leased item at the fair value of the finance lease assets or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to the consolidated profit or loss.*

*Lease assets are depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.*

*Operating lease payments are recognised as an operating expense in the consolidated profit or loss on a straight-line basis over the lease term.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**ab. Sewa** (lanjutan)

**Setelah 1 Januari 2020**

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau, setelah 1 Januari 2020.

**Grup sebagai penyewa**

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluru kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Perusahaan memiliki hak ini ketika memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  - Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**ab. Leases** (continued)

**After 1 January 2020**

*From 1 January 2020, the Group has applied SFAS 73 which set the requirements for the recognition of lease liabilities in relation to leases previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or, after 1 January 2020.*

**The Group as lessee**

*At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.*

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:*

- *The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset;*
- *The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to change how and for what purpose the asset is used. In rare cases where the decision about how and for what purpose the asset is used are predetermined:*
  - *The Group has the right to operate the asset;*
  - *The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purposes it will be used throughout the period of use.*

*At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ab. Sewa (lanjutan)**

**Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Grup sebagai penyewa (lanjutan)**

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeksi atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**ab. Leases (continued)**

**After 1 January 2020 (continued)**

**The Group as lessee (continued)**

*The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.*

*The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.*

*Lease liabilities are measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, then using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses borrowing rate as the interest rate.*

*Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:*

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Grup is reasonably certain not to terminate early.

*Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.*

*The Group presents right-of-use assets and lease liabilities in a separate line items in the statement of financial position.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**ab. Sewa** (lanjutan)

**Setelah 1 Januari 2020** (lanjutan)

**Grup sebagai penyewa** (lanjutan)

**Sewa jangka pendek dan yang aset pendasarnya bernalil rendah**

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernalil rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

**Modifikasi sewa**

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**ab. Leases** (continued)

**After 1 January 2020** (continued)

**The Group as lessee** (continued)

**Short-term leases and leases of low-value assets**

*The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.*

**Lease modifications**

*The Group account for a lease modification as a separate lease if both:*

- modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

*For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Group:*

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognize in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**ab. Sewa** (lanjutan)

**Setelah 1 Januari 2020** (lanjutan)

**Grup sebagai pesewa**

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**ac. Pengakuan pendapatan, beban serta liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan**

**Pendapatan premi**

Pendapatan premi diakui sebagai pendapatan sejak berlakunya polis.

Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan penjaminan kredit dari asuransi (atau reasuransi) dan penjaminan kredit (atau co-guarantee) jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**ab. Leases** (continued)

**After 1 January 2020** (continued)

**The Group as lessor**

*When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.*

*To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.*

*Under a finance lease, where the Group transfers substantially all the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presented a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.*

*The Group recognises lease payments received under operating leases as income on the straight-line basis over the lease term.*

**ac. Revenues, expenses recognition and insurance and guarantee contract liabilities**

**Premium income**

*Premium income is recognised as revenue upon inception of the policy.*

*Premium earned in relation to insurance and credit guarantee contracts of short-term insurance (or reinsurance) and credit guarantee (or co-guarantee) are recognised as revenue over the period of the policy (contract) in proportion to the amount of protection to the amount of protection provided. When the policy period significantly different with the risk period all earned premiums are recognised as revenue over the period of risk.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**ac. Pengakuan pendapatan, beban serta liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan** (lanjutan)

**Pendapatan premi** (lanjutan)

Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan merupakan porsi dari pendapatan premi yang dicatat terkait dengan periode penjaminan risiko yang belum jatuh tempo.

Premi dari polis bersama (*coinsurance* dan *co-guarantee*) diakui sebesar proporsi premi Grup.

Grup mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi untuk kontrak asuransi. Sedangkan untuk kontrak penjaminan kredit, Grup mereasuransikan ke perusahaan penjaminan kredit lain. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai utang premi sebesar kewajiban yang dibukukan sehubungan kontrak reasuransi tersebut.

Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

**Imbal jasa penjaminan**

Imbal jasa penjaminan bruto diakui sejak berlakunya sertifikat penjaminan, dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya.

**Pendapatan subrogasi**

Pendapatan subrogasi diakui pada saat jumlahnya diketahui.

**Beban klaim**

Beban klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Beban klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian klaim reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**ac. Revenues, expenses recognition and insurance and guarantee contract liabilities**  
(continued)

**Premium income** (continued)

*The unearned premium reserve represents the portion of the premiums written related to the unexpired period of risk coverage.*

*Premium from coinsurance and co-guarantee policies is recognised based on the Group's proportionate share of the premium.*

*The Group reinsures part of its total accepted risk to other insurance and reinsurance companies for insurance contracts. Whereas for credit guarantee contracts, the Group reinsures to the other credit guarantee companies. Premiums paid or share in the reinsurance premium on prospective reinsurance transactions are recognised as reinsurance premium over the reinsurance contract period based on the coverage provided. Premium payments or liabilities on retroactive reinsurance transactions are recognised as premium payables in the amount equivalent to the recorded liability in relation to the reinsurance contract.*

*Unearned premiums portion of reinsurance is determined consistently with the approach used in determining the unearned premiums, based on terms and conditions of the reinsurance contract.*

**Guarantee fee income**

*Gross guarantee fee income is recognise upon inception of guarantee certificate, recorded as unearned revenue and amortized over the period of guarantee.*

**Subrogation Income**

*Subrogation income is recognised when the amount is known.*

**Claim expenses**

*Claims expense consisted of settled claims, claims in process, including claims incurred but not yet reported and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses when the obligation to settle the claims is incurred. The portion of claims recovered from reinsurers are recorded and recognised as a deduction from claims expense in the same period when the claims expense is recognised. Subrogation rights are recognised as deduction from claims expense upon realization.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**ac. Pengakuan pendapatan, beban serta liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan** (lanjutan)

**Beban klaim** (lanjutan)

Jumlah klaim dalam proses penyelesaian (estimasi klaim retensi sendiri) dihitung berdasarkan estimasi kerugian retensi sendiri dari klaim yang pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan dalam estimasi klaim retensi sendiri diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada tahun terjadinya perubahan. Kenaikan atau penurunan estimasi klaim retensi sendiri adalah selisih antara klaim retensi sendiri tahun berjalan dengan tahun lalu.

**Reasuransi, retrosesi dan co-guarantee**

Grup mempunyai kontrak reasuransi, retrosesi dan *co-guarantee* proporsional dan non proporsional dengan perusahaan asuransi, reasuransi, dan penjaminan kredit di dalam maupun di luar negeri. Tujuan reasuransi dan *co-guarantee* ini adalah untuk membagi risiko yang melebihi kapasitas retensi Grup yang ditentukan berdasarkan ekuitas. Premi reasuransi, klaim reasuransi dan diskon reasuransi dikurangkan dari premi bruto, klaim bruto dan komisi bruto.

Aset yang timbul dari kontrak reasuransi dan retrosesi juga dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan tes kecukupan liabilitas asuransi. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui dimana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

Jumlah premi yang dibayar diakui sesuai dengan proporsi jumlah proteksi reasuransi dan *co-guarantee* yang diterima.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**ac. Revenues, expenses recognition and insurance and guarantee contract liabilities**  
(continued)

**Claim expenses** (continued)

*Claims in process (estimated own retention claims) are computed based on the Group's own retention share of the claims in process at the consolidated statement of financial position date, including claims incurred but not yet reported. The changes in estimated own retention claims are recognised in the consolidated profit or loss at the time of change. The increase or decrease in estimated own retention claims represents the difference between the estimated own retention claims for the current year and the prior year.*

**Reinsurance, retrocession and co-guarantee**

*The Group has proportional and non proportional reinsurance, retrocession and co-guarantee contracts with domestic and overseas insurance, reinsurance, and credit guarantee companies. The objective of the reinsurance and co-guarantee is to cede the risk exceeding the Group's retention capacity, determined on the basis of its equity. Reinsurance premiums, reinsurance claims and reinsurance discounts are deducted from the gross written premiums, gross claims and gross commissions paid.*

*Assets arising from reinsurance and retrocession contracts are also computed using the same methods as liability adequacy test. In addition, the recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured.*

*The amount of premium paid is recognised over the reinsurance and co-guarantee contract in proportion with the protection received.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**ac. Pengakuan pendapatan, beban serta liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan** (lanjutan)

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayar oleh perusahaan reasuransi untuk liabilitas asuransi, yaitu estimasi klaim dan premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah yang dapat dipulihkan dari reasuradur diestimasikan secara konsisten dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, Grup mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laporan laba rugi konsolidasian. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, yang menyebabkan Grup tidak dapat menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Aset retrosesi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan retrosesi untuk ceded estimasi klaim reasuransi, dan ceded premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Pada setiap tanggal taporan posisi keuangan, manajemen Grup menelaah apakah aset reasuransi telah mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai aset reasuransi terjadi jika, dan hanya jika terdapat bukti obyektif yang menyebabkan cedant tidak menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan persyaratan kontrak dan dampaknya dapat diukur secara andal. Penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Perjanjian retrosesi tidak membebaskan Grup dari kewajiban kepada cedant.

**Beban komisi - bersih**

Beban komisi - bersih merupakan beban yang terjadi untuk mendapatkan premi asuransi, seperti komisi yang dibayarkan kepada pialang asuransi, agen dan entitas asuransi lain. Beban ini ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan metode perhitungan cadangan atas premi.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**ac. Revenues, expenses recognition and insurance and guarantee contract liabilities**  
(continued)

*Reinsurance assets include balances expected to be recovered from reinsurance companies for insurance liabilities, includes estimated claim and unearned premium reserve. Amounts recoverable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.*

*If a reinsurance asset is impaired, the Group reduces the carrying amount accordingly and recognises that impairment losses in the consolidated profit or loss. A reinsurance asset is impaired if there is objective evidence, as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance asset, that the Group may not receive all amounts due under the terms of the contract and the impact on the amounts that the Group will receive from the reinsurers can be reliably measured.*

*Retrocession asset include balances expected to be recovered from retrocessionaires for ceded estimated reinsurance claims and ceded unearned premiums. Amounts receivable from reinsurers are estimated in a manner consistent with the liability associated with the reinsured policy.*

*The Group's management assesses at each consolidated statement of financial position date whether retrocession assets is impaired. Retrocession asset impairment occurs if, and only if, there is an objective evidence that the cedant did not receive the entire amount in accordance with the contract requirements and the impact can be measured reliably. Impairment loss is recognised in the consolidated profit or loss.*

*Retrocession arrangements do not relieve the Group from its obligations to cedant.*

**Commission expenses - net**

*Commission expenses - net represent expenses incurred to obtain premium income, such as commission paid to insurance brokers, agencies and other insurance companies. This expense is deferred and amortized in accordance with calculation method of premium reserve.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Pengakuan pendapatan, beban serta liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan (lanjutan)**

**Liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan**

Liabilitas kontrak asuransi mencakup klaim dalam proses, premi belum merupakan pendapatan dan liabilitas manfaat polis masa depan.

- Premi dan premi reasuransi belum merupakan pendapatan

Premi belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi, dan disajikan dalam jumlah bruto. Porsi reasuransi atas premi belum merupakan pendapatan disajikan sebagai bagian dari aset reasuransi.

Cadangan atas premi dan premi reasuransi yang belum merupakan pendapatan dihitung menggunakan metode harian untuk kontrak asuransi kontrak jangka pendek.

- Risiko yang belum jatuh tempo

Kewajiban untuk manfaat kontraktual yang diharapkan akan timbul di masa depan dicatat pada saat premi diakui. Kewajiban ditetapkan sebagai penjumlahan atas nilai diskonto yang diharapkan dari pembayaran manfaat dan biaya administrasi masa depan yang berkaitan langsung dengan kontrak asuransi, dikurangi dengan nilai diskonto yang diharapkan atas premi teoritis yang dibutuhkan untuk memenuhi manfaat dan biaya administrasi berdasarkan asumsi penilaian yang digunakan (penilaian premi). Kewajiban tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi seperti kerugian, persistensi dan biaya pemeliharaan yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dikeluarkan. Sebuah margin untuk penyimpangan yang merugikan termasuk dalam asumsi yang digunakan.

- Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan adalah nilai sekarang estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayar kepada pemegang polis, dikurangi dengan nilai sekarang dari estimasi premi masa depan yang akan diterima dari pemegang polis dan diakui pada saat pengakuan pendapatan premi. Liabilitas manfaat polis masa depan dinyatakan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan perhitungan aktuarial. Kenaikan (penurunan) liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban (pendapatan) dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**ac. Revenues, expenses recognition and insurance and guarantee contract liabilities (continued)**

**Insurance and guarantee contract liabilities**

*Insurance contract liabilities include the outstanding claims provision, unearned premium reserve and liability for future benefits.*

- *Unearned premium and reinsurance premium reserve*

*Unearned premiums are part of the premium that have not been recognised as revenue because the coverage is still running at the end of the accounting period, and presented in the gross amount. Unearned premiums portion of reinsurance is presented as part of the reinsurance asset.*

*Unearned premium and reinsurance premium reserves are calculated based on daily method for short-term insurance contract.*

- *Unexpired risk reserve (URR)*

*A liability for contractual benefits that is expected to be incurred in the future is recorded when the premiums are recognised. The liability is determined as the sum of the expected discounted value of the benefit payments and the future administration expenses that are directly related to the insurance contract, less the expected discounted value of the theoretical premiums that would be required to meet the benefits and administration expenses based on the valuation assumptions used (the valuation premiums). The liability is based on assumptions as to loss ratios, persistency and maintenance expense that are established at the time the contract is issued. A margin for adverse deviations is included in the assumptions.*

- *Liability for future policy benefits*

*Liability for future policy benefits represents the present value of estimate future policy benefits to be paid to policyholders, less present value of estimated future premiums to be received from policyholders, recognised consistently with the recognition of premium income. Liability for future policy benefits is stated in the consolidated statement of financial position in accordance with the actuarial calculation. Increase (decrease) in liability for future policy benefits is recognised as an expense (income) in the current year consolidated statement of profit or loss.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN** (lanjutan)

**ac. Pengakuan pendapatan, beban serta liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan** (lanjutan)

- Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan estimasi jumlah liabilitas yang menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Nilai estimasi liabilitas klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dihitung dengan metode "triangle". Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Grup tidak mencadangkan provisi untuk kemungkinan klaim masa depan sebagai liabilitas jika klaim tersebut timbul berdasarkan kontrak asuransi yang tidak ada pada akhir periode pelaporan (seperti provisi katasrofi dan provisi setara).

**Liabilitas kontrak jaminan keuangan**

Kontrak jaminan keuangan mensyaratkan Grup untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti penerima jaminan atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Cadangan klaim atas kontrak penjaminan keuangan merupakan estimasi klaim atas kontrak penjaminan keuangan yang akan menjadi tanggungan Grup, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan. Kontrak jaminan keuangan selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan; dan
- ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui.

Grup disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar dengan debitur/terjamin sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**  
(continued)

**ac. Revenues, expenses recognition and insurance and guarantee contract liabilities**  
(continued)

- Estimated claims liabilities

The estimated claims liabilities are an estimate of the amount of liabilities to be borne in connection with claims that are still in the process of completion, including claims incurred but not yet reported. Estimated claim incurred but not yet reported are calculated using "triangle" method. Changes in the estimated amount of claims liabilities, as a result of further review process and the difference between the estimated amounts of the claim and the claims paid amount are recognised in profit or loss in the period of change. The Group does not recognise any provisions for possible future claims as a liability if the claims arising under insurance contracts that do not exist at the end of the reporting period (such as catastrophe provisions and equalisation provisions).

**Liabilities for financial guarantee contracts**

Financial guarantee contracts require the Group to make certain payments to reimburse the recipient for losses incurred because certain debtors fail to make payments when due in accordance with the original terms or the modified terms of a debt instrument.

Claims reserve on financial guarantee contracts are estimated claims on financial guarantee contracts that will be borne by the Group, the amount of which is recognised and recorded at the report date. Financial guarantees are subsequently measured at the higher of:

- i. the amount of the loss allowance determined; and
- ii. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised.

The Group is required to make payments only in the event of default with the debtor/guaranteed in accordance with the terms of the guaranteed instrument.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**ac. Pengakuan pendapatan, beban serta liabilitas kontrak asuransi dan penjaminan (lanjutan)**

- Estimasi liabilitas klaim (lanjutan)

Kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset pengembalian dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian - bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian - bersih.

Jangka waktu periode estimasi cadangan klaim atas kontrak penjaminan adalah periode kontraktual maksimum dimana Grup memiliki kewajiban kontraktual kini untuk melakukan penjaminan.

Kenaikan/(penurunan) liabilitas kontrak penjaminan merupakan selisih liabilitas kontrak penjaminan periode berjalan dan periode sebelumnya.

- Tes kecukupan liabilitas

Pada akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan terkait dengan kontrak asuransi. Jika nilai tercatat liabilitas asuransi setelah dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait lebih rendah dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan. Jika penilaian tersebut menunjukkan kekurangan antara nilai tercatat liabilitas asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan terkait) dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam liabilitas manfaat polis masa depan dan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

**Pendapatan jasa keuangan**

Pendapatan jasa penasihat keuangan diakui pada saat Grup telah menyerahkan dan memindahkan risiko dan manfaat secara signifikan kepada pelanggan sesuai dengan perjanjian secara akrual.

**Pendapatan hasil pengelolaan gedung**

Pendapatan sewa dan jasa pengelolaan gedung diakui sesuai dengan periode sewa yang sudah berjalan pada tahun yang bersangkutan.

**Beban usaha**

Beban usaha dan beban lain-lain diakui secara akrual basis.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(continued)**

**ac. Revenues, expenses recognition and insurance and guarantee contract liabilities (continued)**

- Estimated claims liabilities (continued)

*Expected loss for risks that have been transferred to reguarantor are recognised as reimbursement assets and are measured systematically according to the pattern of claim reserve measurement based on the variance between the total expected loss - gross and the total expected loss - net.*

*The estimated period of the reserve for claims under the guarantee contract is the maximum contractual period during which the Group has a current contractual obligation to provide guarantees*

*Increase/(decrease) in reserve guarantee contract liabilities represents the difference between the guarantee contract liabilities of current period and the previous period.*

- Liability adequacy test

*At the end of the reporting period, the Group assess whether recognised insurance liabilities are sufficient by using current estimates of future cash flows related to the insurance contracts. If the carrying value of insurance liabilities net of related deferred acquisition costs is lower compared to the estimated future cash flows, the entire deficiency is recognised in consolidated statement of profit or loss for the year. If the valuation shows deficiency between insurance liabilities recorded (deducted with respective deferred acquisition costs) with estimation of future cash flow, the shortage will be recognised as liability for future policy benefit and charged to the current year's statement of income.*

**Financial services revenue**

*Revenue from financial services is recognised when the Group has delivered all significant risks and benefits to the customers in accordance with the underlying agreement on accrual basis.*

**Building management revenue**

*Revenues from rental and service charge are recognised proportionally based on the respective rental term.*

**Operating expenses**

*Operating and other expenses are recognised based on accrual basis.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

**Cadangan kerugian penurunan nilai**

Grup meninjau kembali piutang premi dan piutang reasuransi yang dimiliki pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian. Secara khusus, justifikasi manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Dalam estimasi arus kas ini, Grup membuat justifikasi tentang situasi keuangan tertanggung atau perusahaan asuransi. Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, seperti yang tercermin dalam perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tersebut di masa datang.

**Liabilitas imbalan kerja**

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria (lihat Catatan 32). Asumsi digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SOURCE OF UNCERTAINTY ESTIMATION AND CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS**

*Certain estimates and assumption are made in the preparation of financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.*

*Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.*

*Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.*

**Allowances for impairment losses**

*The Group reviews premium receivables and due from reinsurers at each reporting date to assess whether impairment should be recognised in the consolidated statement of profit or loss. In particular, justification made by management is required to estimate the amount and timing of future cash flows when determining impairment.*

*In the estimation of cash flows, the Group makes the justification of the insurer's financial situation. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the provision for impairment in the future.*

**Employee benefit liabilities**

*The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions (refer to Note 32). The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.*

*The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.*

*Other key assumptions for employee benefits obligation are based on current market conditions.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING  
(lanjutan)**

**Estimasi klaim**

Grup wajib membentuk cadangan untuk pembayaran klaim yang timbul. Cadangan ini merupakan biaya yang diharapkan untuk menyelesaikan klaim yang telah terjadi, tetapi masih dalam proses atau klaim belum diterima pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Grup menetapkan cadangan berdasarkan jenis produk, jenis dan periode penjaminan dan tahun kejadian. Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

Cadangan Grup untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan dan klaim. Grup membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan. Estimasi klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR") dihitung dengan metode triangle berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial.

**Tes kecukupan liabilitas asuransi**

Tes kecukupan liabilitas asuransi dilakukan dengan menggunakan perhitungan teknik aktuarial dimana digunakan asumsi dan estimasi aktuaris seperti arus kas masa depan.

**Aset reasuransi dan retrosesi**

Aset yang timbul dari kontrak reasuransi dan retrosesi juga dihitung dengan menggunakan metode yang sama dengan tes kecukupan liabilitas asuransi. Selain itu, pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terhutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal (lihat Catatan 17 dan 18).

**Nilai wajar dari instrumen keuangan**

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Grup melakukan penilaian tentang kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih dari agunan.

**3. SOURCE OF UNCERTAINTY ESTIMATION AND CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS  
(continued)**

**Estimated claim**

*The Group is required to establish reserves for payment of claim that arise. These reserves represent the expected ultimate cost to settle claims occurring prior to, but still outstanding or not yet reported as of the consolidated statement of financial position date. The Group establishes its reserves by product line, type and extent of coverage and year of occurrence. There are two categories of reserve: reserves for reported losses and reserves for incurred but not reported ("IBNR") losses.*

*The Group's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Group bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established. Claims estimation for incurred but not reported ("IBNR") is calculated using actuarial calculation triangle method based on certain actuarial assumptions.*

**Insurance liability adequacy test**

*Liability adequacy testing is calculated using actuarial technic with of actuarial assumptions and estimation such as future cash flow.*

**Reinsurance and retrocession assets**

*Assets arising from reinsurance and retrocession contracts are also computed using the same methods as liability adequacy test. In addition, the recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflective of the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not receive amounts due to it and these amounts can be reliably measured (refer to Note 17 and 18).*

**Fair value of financial instruments**

*Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Group makes judgement about the borrower's financial condition and the net realizable value of collateral.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. SUMBER KETIDAKPASTIAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING  
(lanjutan)**

**Aset pengembalian**

Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang sebagai pemulihian cadangan klaim dihitung dengan menggunakan pendekatan *gross* dan *netting-off* pemulihian klaim ekspektasian setelah dikurangi ekspektasi pemulihian aset. Pemulihian aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, mempertimbangkan faktor-faktor seperti *counterparty* dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

**Liabilitas kontrak jaminan keuangan**

Liabilitas kontrak jaminan keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan terjamin dan nilai realisasi bersih dari setiap subrogasi.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan terjamin tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN KOMPARATIF ENTITAS SEPENGENDALI TERTENTU**

Berdasarkan KMK RI No. 146/ KMK.06/ 2020, pada tanggal 31 Maret 2020, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia memberikan penyertaan modal dalam bentuk pengalihan seluruh saham seri B milik Pemerintah Republik Indonesia pada perusahaan Jasindo, Askindo, Jasa Raharja, dan Jamkrindo kepada Perusahaan sebagaimana dijelaskan di Catatan 33.

Terkait dengan transaksi ini, Pemerintah Republik Indonesia telah menerima jumlah imbalan yang dialihkan dalam bentuk penerbitan saham baru oleh Perseroan sebanyak 60.623.019 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (nilai penuh) atau sebesar Rp 60.623.019.459.595 (nilai penuh).

Transaksi di atas dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" karena Jasindo, Askindo, Jasa Raharja dan Jamkrindo merupakan entitas sepengendali dibawah Pemerintah Republik Indonesia.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. SOURCE OF UNCERTAINTY ESTIMATION AND CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS  
(continued)**

**Reimbursement asset**

*Assets arising from re-guarantee contracts as recovery of reserves for claims are calculated using the gross and netting-off approach of the expected recovery of claims after deducting expected recovery of assets. The recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflecting the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not received amounts due to it and these amounts can be reliably measured.*

**Liabilities for financial guarantee contracts**

*Liabilities for financial guarantee contract is evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the guaranteed's financial situation and the net realisable value of any underlying subrogation.*

*In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.*

*The accuracy of the allowances depends on how well the estimation of future cash flows for specific guaranteed allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.*

**4. RESTATEMENT OF COMPARATIVE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF CERTAIN ENTITIES UNDER COMMON CONTROL**

*Based on KMK RI No. 146/ KMK.06/ 2020, on 31 March 2020, and based on Government Regulation No. 20 year 2020, Government of Republic Indonesia provided a state equity participation in form of transferring all series B shares owned by the Government of Indonesia in Jasindo, Askindo, Jasa Raharja, and Jamkrindo to the Company as disclosed in Note 33.*

*In relation to this transaction, Government of the Republic of Indonesia had received the purchase of consideration in form of the issuance of new shares by the Company around 60,623,019 number of shares with nominal amount Rp 1,000,000 (full amount) or amounting to Rp 60,623,019,459,595 (full amount).*

*The above transaction was accounted for using the pooling-of-interests method as required under SFAS 38 (Revised 2012) "Business Combination of Entities Under Common Control" since Jasindo, Askindo, Jasa Raharja and Jamkrindo are entities under common control of the Government of Republic of Indonesia.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN KOMPARATIF ENTITAS  
SEPENGENDALI TERTENTU (lanjutan)**

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas. Ekuitas dari Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja dan Jamkrindo sebelum tanggal penggabungan disajikan sebagai "ekuitas merging entities" pada bagian ekuitas. Rincian jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan/ <i>Purchase consideration</i>	Jumlah tercatat investasi/ <i>Carrying value of investment</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid- in-capital</i>	
Jasindo	4,689,845	1,304,783	3,385,062	<i>Jasindo</i>
Askrindo	15,491,454	6,803,966	8,687,488	<i>Askrindo</i>
Jasa Raharja	25,166,005	10,847,408	14,318,597	<i>Jasa Raharja</i>
Jamkrindo	15,275,715	8,668,085	6,607,630	<i>Jamkrindo</i>
Jumlah	<u>60,623,019</u>	<u>27,624,242</u>	<u>32,998,777</u>	<i>Total</i>

Grup menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian sedemikian rupa seolah-olah anak perusahaan yaitu Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja, dan Jamkrindo telah terkonsolidasi pada periode 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2019/31 Desember 2018.

Manajemen juga telah menyajikan kembali akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan beban pajak penghasilan sebagai akibat perubahan atas implementasi PSAK 38 yang telah dijelaskan di atas. Tabel berikut merupakan ikhtisar atas dampak dari penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi terdahulu:

*The difference between the purchase consideration and the carrying value of investments obtained from this transaction is recorded in the account "additional paid-in-capital" in the equity section. The equity of Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja and Jamkrindo prior to the date of combination is presented as "equity of merging entities" in the equity section. The details of the purchase consideration and the carrying value of the investments are as follows:*

*The Group has restated the consolidated financial statements as if the subsidiaries, namely Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja, and Jamkrindo have been consolidated as at 31 December 2019 and 1 January 2019/31 December 2018.*

*Management has also restated accounts related to assets, liabilities and income tax expense as a result the implementation of PSAK 38 as explained above. The following table is a summary of the effects of restatement of previous consolidated financial statements:*

**31 Desember 2019  
Laporan posisi keuangan  
konsolidasian**

	<b>Sebelum penyajian kembali/ <i>Before restatement</i></b>	<b>Penyajian kembali/ <i>Restatement</i></b>	<b>Setelah penyajian kembali/ <i>After restatement</i></b>	<b>31 December 2019 Consolidated statements of financial position</b>
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	896,001	13,629,633	14,525,634	Cash and cash equivalents
Investasi	357,204	26,835,619	27,192,823	Investments
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	-	634,095	634,095	Account receivables and other receivables - net
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	-	5,460,147	5,460,147	Insurance and reinsurance premium receivables - net
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	-	1,476,814	1,476,814	Guarantee fee receivables - net
Piutang klaim reasuransi dan retrosepsi - bersih	-	2,099,090	2,099,090	Reinsurance and retrocession claim receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	-	301,053	301,053	Re-guarantee receivables - net
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	-	1,649,699	1,649,699	Venture capital financing receivables - net
Piutang hasil investasi - bersih	-	303,851	303,851	Investment income receivables - net
Piutang usaha - bersih	1,989,361	(1,989,361)	-	Account receivables - net
Piutang bunga dan piutang lain-lain - bersih	18,000	(18,000)	-	Interest and other receivables - net
Pajak dibayar dimuka	13,165	142,598	155,763	Prepaid taxes
Penyertaan langsung	7,318	646,890	654,208	Direct participation
Aset tetap - bersih	289,183	1,696,105	1,985,288	Fixed assets - net
Properti investasi	445,045	12,449	457,494	Investment properties
Aset pajak tangguhan	29,364	3,867,778	3,897,142	Deferred tax assets
Aset reasuransi	-	11,185,478	11,185,478	Reinsurance assets
Aset retrosepsi	-	1,580,876	1,580,876	Retrocession assets
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	-	1,386,135	1,386,135	Deferred acquisition cost - net
Penjaminan ulang dibayar dimuka	-	949,574	949,574	Prepaid guaranteee
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	24,001	(24,001)	-	Advances and prepaid expenses
Aset lain-lain	168,513	1,617,851	1,786,364	Other assets

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KOMPARATIF ENTITAS SEPENGENDALI  
TERTENTU (lanjutan)**

Manajemen juga telah menyajikan kembali akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan beban pajak penghasilan sebagai akibat koreksi atas kesalahan-kesalahan tersebut di atas. Tabel berikut merupakan ikhtisar atas dampak dari penyajian kembali laporan keuangan terdahulu: (lanjutan)

**4. RESTATEMENT OF COMPARATIVE FINANCIAL  
STATEMENTS OF CERTAIN ENTITIES UNDER  
COMMON CONTROL (continued)**

*Management has also restated accounts related to assets, liabilities and income tax expense as a result of correction of the above errors. The following table is a summary of the effects of restatement of previous consolidated financial statements: (continued)*

	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Penyajian kembali/ Restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	31 Desember 2019 Laporan posisi keuangan konsolidasian	31 December 2019 Consolidated statements of financial position
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
Utang klaim asuransi dan reasuransi	-	471,933	471,933		Insurance and reinsurance claim payables
Utang klaim penjaminan	-	12,798	12,798		Guarantee claim payables
Utang premi reasuransi dan retrosesi	-	2,266,183	2,266,183		Reinsurance and retrocession premium payables
Utang penjaminan ulang	-	92,885	92,885		Re-guarantee payables
Utang usaha dan utang lain-lain	-	5,090,875	5,090,875		Account payables and other payables
Utang usaha	174,486	(174,486)	-		Account payables
Utang lain-lain	391,812	(391,812)	-		Other payables
Akrual	66,508	842,723	909,231		Accruals
Utang pajak	22,179	575,062	597,241		Taxes payable
Liabilitas kontrak asuransi	-	29,407,326	29,407,326		Insurance contract liabilities
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	-	6,666,285	6,666,285		Liabilities for financial guarantee contracts
Pendapatan diterima dimuka	-	22,322	22,322		Unearned revenue
Pinjaman dari Pemerintah	-	1,252,454	1,252,454		Government loans
Utang bank	231,650	17,484	249,134		Bank loans
Utang promes	14,343	(14,343)	-		Promissory notes
Utang bunga	61,744	(61,744)	-		Interest payables
Utang penerusan pinjaman	268,016	(268,016)	-		Subsidiary loan
Utang rekening dana investasi	942,650	(942,650)	-		Investment fund account loan
Utang pihak berelasi	608,888	(608,888)	-		Related parties payables
Liabilitas imbalan kerja	122,968	1,258,252	1,381,220		Employee benefit liabilities
Dana tabarru	-	(112,316)	(112,316)		Tabarru fund
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	33,556	33,556		Remeasurement of post-employment benefits
Komponen ekuitas lainnya	(7,069)	7,746	677		Other equity components
Saldo laba					Retained earnings
Ditetulkan penggunaannya	289	170,288	170,577		Appropriated
Belum ditetulkan penggunaannya	131,077	(146,179)	(15,102)		Unappropriated
Ekuitas merging entities	-	27,971,594	27,971,594		Equity of merging entities
Kepentingan nonpengendali	921,212	5,042	926,254		Non-controlling interest
<b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian</b>					<b>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</b>
<b>PENDAPATAN UNDERWRITING</b>					<b>UNDERWRITING INCOME</b>
<b>Pendapatan premi asuransi</b>					<b>Insurance premium income</b>
Pendapatan premi asuransi bruto	-	23,707,121	23,707,121		Gross insurance premium income
Premi reasuransi dan retrosesi	-	(6,601,679)	(6,601,679)		Reinsurance and retrocession premiums
Kenaikan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	-	(1,475,549)	(1,475,549)		Increase in unearned premium reserves
<b>Pendapatan penjaminan</b>					<b>Guarantee income</b>
Imbal jasa penjaminan	-	2,313,611	2,313,611		Guarantee fee income
Premi penjaminan ulang	-	(268,384)	(268,384)		Re-guarantee premiums
<b>BEBAN UNDERWRITING</b>					<b>UNDERWRITING EXPENSES</b>
<b>Beban klaim asuransi</b>					<b>Insurance claim expenses</b>
Beban klaim asuransi bruto	-	13,010,114	13,010,114		Gross insurance claim expenses
Klaim reasuransi dan retrosesi	-	(3,767,435)	(3,767,435)		Reinsurance and retrocession claims
Kenaikan estimasi klaim retensi sendiri	-	742,498	742,498		Increase in estimated own retention claims
<b>Beban klaim penjaminan</b>					<b>Guarantee claim expenses</b>
Beban klaim penjaminan bruto	-	2,031,621	2,031,621		Gross guarantee claim expenses
Klaim penjaminan ulang	-	(321,036)	(321,036)		Re-guarantee claims
Kenaikan estimasi liabilitas klaim	-	417,872	417,872		Increase in estimated claim liabilities
Pendapatan subrogasi - bersih	-	(1,071,793)	(1,071,793)		Subrogation income - net
Beban akuisisi dan komisi asuransi - bersih	-	2,249,637	2,249,637		Acquisition cost and insurance commission expenses - net

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KOMPARATIF ENTITAS SEPENGENDALI  
TERTENTU (lanjutan)**

Manajemen juga telah menyajikan kembali akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan beban pajak penghasilan sebagai akibat koreksi atas kesalahan-kesalahan tersebut di atas. Tabel berikut merupakan ikhtisar atas dampak dari penyajian kembali laporan keuangan terdahulu: (lanjutan)

	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Penyajian kembali/ Restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	
<b>31 Desember 2019</b> <b>Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (lanjutan)</b>				<b>31 December 2019</b> <b>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (continued)</b>
Beban akuisisi dan komisi penjaminan - bersih (Pendapatan)/beban underwriting lain-lain - bersih	-	61,893	61,893	Acquisition cost and guarantee commission expenses - net
Hasil investasi - bersih	-	2,922,282	2,922,282	Investment income - net
Pendapatan jasa keuangan	-	542,729	542,729	Financial management service income
Pendapatan hasil pengelolaan gedung	-	196,503	196,503	Building management income
Pendapatan bunga, dividen dan bagi hasil	237,551	(237,551)	-	Interest revenue, dividends and profit sharing
Jasa penasihat keuangan, penjaminan emisi dan penjualan efek	280,221	(280,221)	-	Financial advisory services, underwriting and selling fees
Pendapatan perantara perdagangan efek	57,991	(57,991)	-	Revenue from brokerage activities
Pendapatan pengelolaan gedung	142,164	(142,164)	-	Building management income
Pendapatan operasional lainnya	46,170	(46,170)	-	Other operational income
Beban umum dan administrasi	(207,997)	(5,644,538)	(5,852,535)	General and administrative expenses
Bunga dan komisi terkait	(57,231)	57,231	-	Interest and related fees
Beban karyawan	(280,245)	280,245	-	Employee expenses
Penyusutan dan amortisasi	(27,290)	27,290	-	Depreciation and amortization
Imbalan kerja karyawan	(26,589)	26,589	-	Employee benefits expense
Beban pajak final	(15,580)	15,580	-	Final tax expense
Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan	(9,123)	9,123	-	Impairment losses on financial assets
Pendapatan lain-lain - bersih	8,368	456,047	464,415	Other income - net
Beban pajak penghasilan	23,508	259,554	283,062	Income tax expenses
<b>Penghasilan/(beban) komprehensif lain</b>				<b>Other comprehensive income/ (expenses)</b>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to profit or loss:
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	5,300	305,570	310,870	Unrealised gains on fair value at other comprehensive income, net of tax
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali imbalan pasca kerja, setelah pajak	(5,768)	(307,933)	(313,701)	Items that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of post employment benefits, net of tax
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	54,304	2,104,620	2,158,924	Owner of parent entity
Kepentingan nonpengendali	70,598	9,090	79,688	Non-controlling interest
<b>LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	54,004	2,103,654	2,157,658	Owner of parent entity
Kepentingan nonpengendali	70,430	7,693	78,123	Non-controlling interest

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KOMPARATIF ENTITAS SEPENGENDALI  
TERTENTU (lanjutan)**

Manajemen juga telah menyajikan kembali akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan beban pajak penghasilan sebagai akibat koreksi atas kesalahan-kesalahan tersebut di atas. Tabel berikut merupakan ikhtisar atas dampak dari penyajian kembali laporan keuangan terdahulu: (lanjutan)

	Sebelum penyajian kembali/ <i>Before restatement</i>	Penyajian kembali/ <i>Restatement</i>	Setelah penyajian kembali/ <i>After restatement</i>	
<b>31 Desember 2019</b>				<b>31 December 2019</b> <i>Statements of cash flows</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari kegiatan manajer investasi, komisi perantara perdagangan efek dan jasa penasihat keuangan	-	1,120,682	1,120,682	Cash received from investment manager activities, brokerage commissions, and financial advisory services
Penerimaan dari pelanggan	740,727	(740,727)	-	Receipt from customers
Penerimaan pendapatan premi asuransi	-	22,596,218	22,596,218	Cash received from insurance premium income
Penerimaan imbal jasa penjaminan	-	2,811,560	2,811,560	Cash received from guarantee fee income
Penerimaan subrogasi, klaim reasuransi, dan klaim retrosesi	-	4,170,293	4,170,293	Cash received from subrogation, reinsurance claims, and retrocession claims
Penerimaan klaim penjaminan ulang	-	597,229	597,229	Cash received from re-guarantee claims
Penerimaan bunga, dividen dan bagi hasil	11,700	(11,700)	-	Receipt of interest, dividend and profit sharing
Penerimaan lainnya	-	1,616,917	1,616,917	Cash received from others
Pengeluaran untuk klaim	-	(12,323,005)	(12,323,005)	Cash disbursement for gross claims
Pengeluaran untuk komisi	-	(1,618,111)	(1,618,111)	Cash disbursement for commissions
Pengeluaran untuk premi reasuransi dan retrosesi	-	(10,026,589)	(10,026,589)	Cash disbursement for reinsurance and retrocession premiums
Pembayaran imbal jasa penjaminan ulang	-	(550,507)	(550,507)	Cash disbursement for re-guarantee premiums
Pengeluaran untuk pajak penghasilan	(40,301)	(665,106)	(705,407)	Cash disbursement for corporate income tax
Pengeluaran untuk beban umum dan underwriting lainnya	-	(3,184,690)	(3,184,690)	Cash disbursement for general and other underwriting expenses
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(418,605)	109,414	(309,191)	Cash disbursement to supplier and other third parties
Pembayaran bunga	(59,156)	59,156	-	Interest payment
Pembayaran kepada karyawan	(270,458)	270,458	-	Payment to employees
Pengeluaran untuk lainnya	-	(2,313,589)	(2,313,589)	Cash disbursement for others
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil penjualan properti investasi dan aset tetap	3,897	30,803	34,700	Proceeds from sale of investment properties and fixed assets
Pembelian properti investasi dan aset tetap	(22,682)	(341,389)	(364,071)	Acquisition of investment properties and fixed assets
Penerimaan hasil investasi	-	2,588,489	2,588,489	Investment income received
Pencairan/(penempatan) efek utang dan surat berharga	-	(3,803,824)	(3,803,824)	Redemption/(placement) of bonds and marketable securities
Penerimaan atas penjualan penyeertaan saham	708	(708)	-	Proceeds from sales of investment in shares
Pembelian aset lain-lain	1,257	(1,257)	-	Purchase of other assets
Penerimaan dari transaksi portofolio efek	79,855	(79,855)	-	Proceed from marketable securities transactions
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan utang bank	92,801	532,590	625,391	Bank loan received
Pembayaran utang bank	(212,630)	(148,153)	(360,783)	Bank loan payment
Pembayaran dividen	-	(1,082,447)	(1,082,447)	Dividend payment
Pembayaran utang rekening dana investasi	(1,500)	1,500	-	Payment of investment fund account loan
Penerimaan utang pihak berelasi	270,011	(270,011)	-	Receipt of related party payables
Aktivitas pendanaan lainnya	-	3	3	Other financing activities

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KOMPARATIF ENTITAS SEPENGENDALI  
TERTENTU (lanjutan)**

Manajemen juga telah menyajikan Kembali akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan beban pajak penghasilan sebagai akibat koreksi atas kesalahan-kesalahan tersebut di atas. Tabel berikut merupakan ikhtisar atas dampak dari penyajian kembali laporan keuangan terdahulu: (lanjutan)

**4. RESTATEMENT OF COMPARATIVE FINANCIAL  
STATEMENTS OF CERTAIN ENTITIES UNDER  
COMMON CONTROL (continued)**

*Management has also restated accounts related to assets, liabilities and income tax expense as a result of correction of the above errors. The following table is a summary of the effects of restatement of previous consolidated financial statements: (continued)*

	Sebelum penyajian kembali/ Before restatement	Penyajian kembali/ Restatement	Setelah penyajian kembali/ After restatement	
<b>1 Januari 2019/31 Desember 2018</b>				<b>1 January 2019/31 December 2018</b>
<b>Laporan posisi keuangan  konsolidasian</b>				<b>Consolidated statements of  financial position</b>
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	720,380	14,290,232	15,010,612	Cash and cash equivalents
Investasi	437,059	23,386,123	23,823,182	Investments
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	-	912,091	912,091	Account receivables and other receivables - net
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	-	4,701,884	4,701,884	Insurance and reinsurance premium receivables - net
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	-	1,290,811	1,290,811	Guarantee fee receivables - net
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	-	1,963,553	1,963,553	Reinsurance and retrocession claim receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	-	256,542	256,542	Re-guarantee receivables - net
Piutang pembayaran modal ventura - bersih	-	1,383,403	1,383,403	Venture capital financing receivables - net
Piutang hasil investasi - bersih	-	214,946	214,946	Investment income receivables - net
Piutang usaha - bersih	1,975,113	(1,975,113)	-	Account receivables - net
Piutang bunga dan piutang lain-lain - bersih	15,630	(15,630)	-	Interest and other receivables - net
Pajak dibayar dimuka	13,674	72,759	86,433	Prepaid taxes
Penyertaan langsung	8,026	593,665	601,691	Direct participation
Aset tetap - bersih	297,591	1,618,392	1,915,983	Fixed assets - net
Properti investasi	444,470	14,529	458,999	Investment properties
Aset pajak tangguhan	25,088	3,202,752	3,227,840	Deferred tax assets
Aset reasuransi	-	10,216,006	10,216,006	Reinsurance assets
Aset retrosesi	-	1,630,612	1,630,612	Retrocession assets
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	-	1,230,081	1,230,081	Deferred acquisition cost - net
Penjaminan ulang dibayar dimuka	-	867,586	867,586	Prepaid reguarantee
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	31,270	(31,270)	-	Advances and prepaid expenses
Aset lain-lain	174,691	1,208,316	1,383,007	Other assets
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang klaim asuransi dan reasuransi	-	927,074	927,074	Insurance and reinsurance claim payables
Utang klaim penjaminan	-	84,744	84,744	Guarantee claim payables
Utang premi reasuransi dan retrosesi	-	2,353,236	2,353,236	Reinsurance and retrocession premium payables
Utang penjaminan ulang	-	113,264	113,264	Re-guarantee payables
Utang usaha dan utang lain-lain	-	4,142,976	4,142,976	Accounts payable and other payables
Utang usaha	448,655	(448,655)	-	Account payables
Utang lain-lain	300,872	(300,872)	-	Other payables
Akrual	57,253	626,545	683,798	Accruals
Utang pajak	20,845	327,395	348,240	Taxes payable
Liabilitas kontrak asuransi	-	26,492,917	26,492,917	Insurance contract liabilities
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	-	5,464,470	5,464,470	Liabilities for financial guaranteed contracts
Pendapatan diterima dimuka	-	27,835	27,835	Unearned revenue
Pinjaman dari Pemerintah	-	1,254,554	1,254,554	Government loans
Utang bank	351,480	16,335	367,815	Bank loans
Utang promes	14,941	(14,941)	-	Promissory notes
Utang bunga	61,299	(61,299)	-	Interest payables
Utang penerusan pinjaman	268,016	(268,016)	-	Subsidiary loan
Utang rekening dana investasi	944,150	(944,150)	-	Investment fund account loan
Utang pihak berelasi	338,876	(338,876)	-	Related parties payables
Liabilitas imbalan kerja	98,069	799,461	897,530	Employee benefit liabilities
Dana tabaruu	-	(175,809)	(175,809)	Tabaruu fund
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	-	37,208	37,208	Remeasurement of post-employment benefits
Komponen ekuitas lainnya	(7,069)	7,746	677	Other components of equity
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	289	166,146	166,435	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	77,074	(145,690)	(68,616)	Unappropriated
Ekuitas merging entities	-	26,890,104	26,890,104	Equity of merging entities
Kepentingan nonpengendali	881,262	(1,433)	879,829	Non-controlling interest

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. KAS DAN SETARA KAS**

Kas dan setara kas terdiri dari:

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

*Cash and cash equivalents consist of:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kas	7,142	7,972	<i>Cash on hand</i>
Kas di bank	8,388,502	1,668,023	<i>Cash in banks</i>
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	<u>17,232,425</u>	<u>12,849,639</u>	<i>Time deposits 3 months or less</i>
	<u>25,628,069</u>	<u>14,525,634</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(2,970)</u>	-	<i>Allowance for impairment loss</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>25,625,099</u></b>	<b><u>14,525,634</u></b>	<b>Total</b>

Kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan pihak:

*Cash and cash equivalents by currency and party:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Kas</b>	7,142	7,972	<b><i>Cash on hand</i></b>
<b>Kas di bank</b>			<b><i>Cash in banks</i></b>
<b>Rupiah</b>			<b><i>Rupiah</i></b>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,515,401	449,103	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	442,764	95,220	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	252,322	237,875	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	173,392	8,129	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	62,650	15,068	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	16,285	40,059	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia Syariah	1,295	1,626	PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Tabungan Negara Syariah	1,051	990	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	251	2,319	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Mandiri Taspen POS	<u>4</u>	<u>4</u>	PT Bank Mandiri Taspen POS
	<u>7,465,415</u>	<u>850,393</u>	
<b>Pihak ketiga</b>	<u>810,598</u>	<u>706,198</u>	<i>Third parties</i>
	<u>8,276,013</u>	<u>1,556,591</u>	
<b>Mata uang asing</b>			<b><i>Foreign currency</i></b>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	84,732	33,724	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,474	52,748	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	282	278	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<u>29</u>	<u>30</u>	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	<u>90,517</u>	<u>86,780</u>	
<b>Pihak ketiga</b>	<u>21,972</u>	<u>24,652</u>	<i>Third parties</i>
	<u>112,489</u>	<u>111,432</u>	
	<u>8,388,502</u>	<u>1,668,023</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(355)</u>	-	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>8,388,147</u>	<u>1,668,023</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

Kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan pihak: (lanjutan)

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

*Cash and cash equivalents by currency and counterparty: (continued)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**Deposito berjangka 3 bulan  
atau kurang  
Rupiah**

Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,416,487	4,534,203	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,694,242	1,845,461	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,004,850	1,488,973	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	865,408	736,914	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	598,340	211,384	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	277,150	109,650	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk</i>
PT Bank Syariah Mandiri	196,206	224,363	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank Tabungan Negara Syariah	175,294	173,352	<i>PT Bank Tabungan Negara Syariah</i>
PT Bank Negara Indonesia Syariah	91,050	150,000	<i>PT Bank Negara Indonesia Syariah</i>
PT Bank Mandiri Taspen POS	15,230	27,000	<i>PT Bank Mandiri Taspen POS</i>
	<u>13,334,257</u>	<u>9,501,300</u>	
Pihak ketiga	<u>3,139,727</u>	<u>2,661,742</u>	<i>Third parties</i>
	<u><b>16,473,984</b></u>	<u><b>12,163,042</b></u>	

**Mata uang asing**

Pihak berelasi			<i>Foreign currency Related parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	249,165	342,418	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	117,071	234,927	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	91,683	-	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Syariah Mandiri	8,548	11,277	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	65,377	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
	<u>466,467</u>	<u>653,999</u>	
Pihak ketiga	<u>291,974</u>	<u>32,598</u>	<i>Third parties</i>
	<u><b>758,441</b></u>	<u><b>686,597</b></u>	
	<u><b>17,232,425</b></u>	<u><b>12,849,639</b></u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(2,615)</u>	<u>-</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u><b>17,229,810</b></u>	<u><b>12,849,639</b></u>	

Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada bank dan deposito berjangka 3 bulan atau kurang adalah sebagai berikut:

*Contractual interest rates on cash at bank and time deposits 3 months or less are as follows:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
--	-------------	-------------

**Rupiah**

Penempatan pada bank	0.00% - 3.50%	0.00% - 5.00%
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	3.00% - 8.75%	4.00% - 8.75%

**Rupiah**

*Cash in banks  
Time deposits  
3 months or less*

**Mata uang asing**

Penempatan pada bank	0.06% - 0.15%	0% - 0.25%
Deposito berjangka 3 bulan atau kurang	0.38% - 2.33%	2.35%

**Foreign currency**

*Cash in banks  
Time deposits  
3 months or less*

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. INVESTASI**

**6. INVESTMENTS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Deposito berjangka	2,604,251	5,571,287	<i>Time deposits</i>
Obligasi dan sukuk	12,355,203	11,911,945	<i>Bonds and sukuk</i>
Saham	1,769,118	1,653,835	<i>Shares</i>
Reksadana	9,715,315	7,911,682	<i>Mutual funds</i>
Efek beragun aset	65,007	111,128	<i>Asset-backed securities</i>
Kontrak investasi kolektif	45,045	50,000	<i>Collective investment contract</i>
	<u>26,553,759</u>	<u>27,209,877</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20,374)	(17,054)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>26,533,385</u>	<u>27,192,823</u>	
<b>a. Deposito berjangka</b>			<b>a. Time deposits</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	856,444	1,342,805	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	371,937	581,157	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	136,555	426,755	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53,605	276,365	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen POS	35,000	35,000	PT Bank Mandiri Taspen POS
PT Bank Tabungan Negara Syariah	8,000	-	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Negara Indonesia Syariah	3,250	4,250	PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	500	5,750	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	4,500	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
Bank Lainnya	-	25,000	Other Banks
	<u>1,465,291</u>	<u>2,701,582</u>	
Pihak ketiga	<u>1,111,032</u>	<u>2,766,065</u>	<i>Third parties</i>
	<u>2,576,323</u>	<u>5,467,647</u>	
<b>Mata uang asing</b>			<b>Foreign currencies</b>
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25,812	101,555	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,116	2,085	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	<u>27,928</u>	<u>103,640</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>2,604,251</u>	<u>5,571,287</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>(1,369)</u>	<u>-</u>	
	<u>2,602,882</u>	<u>5,571,287</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. INVESTASI (lanjutan)**

**b. Obligasi dan sukuk**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Biaya perolehan diamortisasi			<i>Amortised cost</i>
Obligasi pemerintah	2,254,822	2,116,730	Government bonds
Obligasi korporasi	1,762,193	1,867,299	Corporate bonds
Sukuk	242,121	286,704	Sukuk
	4,259,136	4,270,733	
Nilai wajar melalui laba rugi			<i>Fair value through profit or loss</i>
Obligasi pemerintah	26,920	21,136	Government bonds
Obligasi korporasi	374,463	386,969	Corporate bonds
	401,383	408,105	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Obligasi pemerintah	2,514,785	2,094,702	Government bonds
Obligasi korporasi	4,913,787	4,977,004	Corporate bonds
Sukuk	266,112	161,401	Sukuk
	7,694,684	7,233,107	
	12,355,203	11,911,945	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(19,005)	-	<i>Allowance for impairment losses</i>
	12,336,198	11,911,945	

**c. Saham**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Nilai wajar melalui laba rugi			<i>Fair value through profit or loss</i>
Perusahaan milik negara	1,038,829	253,946	State owned enterprises
Perusahaan milik swasta	492,998	123,583	Private owned enterprises
	1,531,827	377,529	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Perusahaan milik negara	175,007	865,735	State owned enterprises
Perusahaan milik swasta	62,284	410,571	Private owned enterprises
	237,291	1,276,306	
	1,769,118	1,653,835	

**d. Reksadana**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Nilai wajar melalui laba rugi	9,715,135	2,549,283	<i>Fair value through profit or loss</i>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	4,307,548	<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Biaya perolehan diamortisasi	-	1,054,851	<i>Amortised cost</i>
	9,715,135	7,911,682	
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(17,054)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	9,715,135	7,894,628	

**e. Efek beragun aset**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Nilai wajar melalui laba rugi	45,820	17,325	<i>Fair value through profit or loss</i>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	19,187	56,409	<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Biaya perolehan diamortisasi	-	37,394	<i>Amortised cost</i>
	65,007	111,128	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. INVESTASI (lanjutan)**

**f. Kontrak investasi kolektif**

	2020	2019	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	45,045	50,000	<i>Fair value through other comprehensive income</i>
Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.			<i>Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.</i>

**7. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAIN-LAIN - BERSIH**

**7. ACCOUNT RECEIVABLES AND OTHER RECEIVABLES - NET**

	2020	2019	
Piutang usaha	1,050,625	497,152	<i>Account receivables</i>
Piutang lain-lain	<u>235,538</u>	<u>187,416</u>	<i>Other receivables</i>
	<u>1,286,163</u>	<u>684,568</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(89,375)</u>	<u>(50,473)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>1,196,788</u>	<u>634,095</u>	

**a. Piutang usaha**

	2020	2019	
Piutang nasabah	649,793	199,636	<i>Customer receivables</i>
Piutang imbal jasa kafalah - asuransi	133,461	49,244	<i>Kafalah fee receivables - insurance</i>
Piutang atas efek	75,105	81,444	<i>Securities receivables</i>
Piutang imbal jasa kafalah - penjaminan	74,006	44,100	<i>Kafalah fee receivables - guarantee</i>
Piutang sewa	49,241	44,893	<i>Lease receivables</i>
			<i>Co-guarantee commission</i>
Piutang komisi penjaminan ulang	29,460	24,565	<i>receivables</i>
Piutang usaha pengelolaan dana	20,800	27,093	<i>Fund management service</i>
Piutang lembaga kliring dan penjaminan	<u>13,317</u>	<u>17,602</u>	<i>receivables</i>
Piutang jasa penasehat keuangan	<u>5,442</u>	<u>8,575</u>	<i>Clearing and guarantee institution receivables</i>
	<u>1,050,625</u>	<u>497,152</u>	<i>Financial advisory service receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(69,736)</u>	<u>(29,799)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>980,889</u>	<u>467,353</u>	

**b. Piutang lain-lain**

	2020	2019	
Piutang pemulihan klaim	132,954	91,394	<i>Claim recovery receivables</i>
Pinjaman yang diberikan kepada karyawan	13,379	12,075	<i>Employee receivables</i>
Pinjaman bagi hasil	9,813	7,688	<i>Profit sharing loan</i>
Piutang koperasi	2,452	1,826	<i>Receivables from cooperatives</i>
Lainnya	<u>76,940</u>	<u>74,433</u>	<i>Others</i>
	<u>235,538</u>	<u>187,416</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(19,639)</u>	<u>(20,674)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>215,899</u>	<u>166,742</u>	

Direksi berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha dan piutang lain-lain.

*The Directors believe that the provision for impairment of receivables is adequate to cover loss on uncollectible account receivables and other receivables.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PIUTANG PREMI ASURANSI DAN REASURANSI - BERSIH**      **8. INSURANCE AND REINSURANCE PREMIUM RECEIVABLES - NET**

**a. Berdasarkan pihak**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	4,211,305	3,487,145	Related parties (see Note 46)
Pihak ketiga	<u>2,727,783</u>	<u>3,210,489</u>	Third parties
	6,939,088	6,697,634	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,714,438)</u>	<u>(1,237,487)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>5,224,650</u>	<u>5,460,147</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.

**b. Berdasarkan jenis asuransi**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	3,738,246	2,555,251	Credit
Aneka	1,139,753	1,254,589	Miscellaneous
Tanggung gugat	198,503	188,352	Liability
Harta benda (properti)	703,938	1,237,277	Property
Jiwa	236,541	309,464	Life
<i>Suretyship</i>	131,488	96,955	<i>Suretyship</i>
<i>Energy offshore</i>	68,837	200,431	<i>Energy offshore</i>
Kesehatan	30,842	23,917	Health
Kendaraan bermotor	52,434	77,186	Vehicles
Rangka kapal	175,084	174,053	Marine hull
Rangka pesawat	175,608	191,986	Aviation
Rekayasa	179,113	296,707	Engineering
Pengangkutan	38,438	37,812	Marine cargo
Satelit	31,050	24,315	Satellites
Kecelakaan diri	31,373	21,511	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	<u>7,840</u>	<u>7,828</u>	<i>Energy onshore</i>
	6,939,088	6,697,634	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,714,438)</u>	<u>(1,237,487)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>5,224,650</u>	<u>5,460,147</u>	

**c. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Saldo awal	1,237,487	1,138,048	Beginning balance
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	106,386	-	Adjustment of balance on initial application of SFAS 71
Penambahan provisi	<u>370,565</u>	<u>99,439</u>	Addition of provision
Saldo akhir	<u>1,714,438</u>	<u>1,237,487</u>	Ending balance

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang premi asuransi dan reasuransi.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on insurance and reinsurance premium receivables.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN - BERSIH**

**9. GUARANTEE FEE RECEIVABLES - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	3,541,582	2,478,758	<i>Related parties (see Note 46)</i>
Pihak ketiga	<u>112,934</u>	<u>54,486</u>	<i>Third parties</i>
	<u><u>3,654,516</u></u>	<u><u>2,533,244</u></u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,107,378)</u>	<u>(1,056,430)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u><u>2,547,138</u></u>	<u><u>1,476,814</u></u>	

**Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai**

**Changes in allowance for impairment losses**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Saldo awal	1,056,430	859,511	<i>Beginning balance</i>
Penambahan provisi	<u>50,948</u>	<u>196,919</u>	<i>Additional provision</i>
Saldo akhir	<u><u>1,107,378</u></u>	<u><u>1,056,430</u></u>	<i>Ending balance</i>

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tergantinya piutang imbal jasa penjaminan.

*The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on guarantee fee receivables.*

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**10. PIUTANG KLAIM REASURANSI DAN RETROSESI  
- BERSIH**

**10. REINSURANCE AND RETROCESSION CLAIM RECEIVABLES - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	517,640	288,544	<i>Related parties (see Note 46)</i>
Pihak ketiga	<u>2,515,505</u>	<u>2,488,403</u>	<i>Third parties</i>
	<u><u>3,033,145</u></u>	<u><u>2,776,947</u></u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(788,586)</u>	<u>(677,857)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u><u>2,244,559</u></u>	<u><u>2,099,090</u></u>	

**Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai**

**Changes in allowance for impairment losses**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Saldo awal	677,857	711,969	<i>Beginning balance</i>
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	21,467	-	<i>Adjustment of balance on initial application of SFAS 71</i>
Penambahan/(pengurangan) provisi	<u>89,262</u>	<u>(34,112)</u>	<i>Addition/(deduction) of provision</i>
Saldo akhir	<u><u>788,586</u></u>	<u><u>677,857</u></u>	<i>Ending balance</i>

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tergantinya piutang klaim reasuransi dan retrosesi.

*The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on reinsurance and retrocession claim receivables.*

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. PIUTANG PENJAMINAN ULANG - BERSIH**

**11. RE-GUARANTEE RECEIVABLES - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	9,218	13,661	<i>Related parties (see Note 46)</i>
Pihak ketiga	<u>607,350</u>	<u>470,265</u>	<i>Third parties</i>
	616,568	483,926	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(196,208)</u>	<u>(182,873)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>420,360</u>	<u>301,053</u>	

**Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai**

**Changes in allowance for impairment losses**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Saldo awal	182,873	205,155	<i>Beginning balance</i>
Penambahan/(pengurangan) provisi	<u>13,335</u>	<u>(22,282)</u>	<i>Addition/(deduction) of provision</i>
Saldo akhir	<u>196,208</u>	<u>182,873</u>	<i>Ending balance</i>

Direksi berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang penjaminan ulang.

*The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible re-guarantee receivables.*

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**12. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL VENTURA - BERSIH**

**12. VENTURE CAPITAL FINANCING RECEIVABLES - NET**

**a. Berdasarkan pihak**

**a. By parties**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak ketiga	2,052,633	1,677,182	<i>Third parties</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(132,938)</u>	<u>(27,483)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>1,919,695</u>	<u>1,649,699</u>	

**b. Berdasarkan umur**

**b. By aging**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Belum jatuh tempo	1,717,219	1,450,828	<i>Not yet due</i>
Jatuh tempo selama 1 sampai 30 hari	93,414	110,387	<i>Due for 30 days or less</i>
Jatuh tempo selama 31 sampai 90 hari	47,669	28,355	<i>Due between 31 until 90 days</i>
Jatuh tempo lebih dari 90 hari	<u>194,331</u>	<u>87,612</u>	<i>Due for over 90 days</i>
	<u>2,052,633</u>	<u>1,677,182</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(132,938)</u>	<u>(27,483)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>1,919,695</u>	<u>1,649,699</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL VENTURA - 12. VENTURE CAPITAL FINANCING  
BERSIH (lanjutan) RECEIVABLES - NET (continued)**

**b. Berdasarkan umur (lanjutan)**

Pembiayaan usaha produktif berasal dari kegiatan pembiayaan modal ventura dalam bentuk kerja sama dengan pola bagi hasil. Grup menyediakan sejumlah dana untuk keperluan usaha perusahaan pasangan usaha. Pola pembiayaan ini mengatur besarnya persentase keuntungan setiap bulan atau periode bagi Grup.

Rincian pembiayaan usaha produktif berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Lancar	1,717,219	1,450,829	Current
Dalam perhatian khusus	93,414	110,387	Special mention
Kurang lancar	13,712	12,779	Substandard
Diragukan	33,957	15,576	Doubtful
Macet	<u>194,331</u>	<u>87,611</u>	Loss
	<u>2,052,633</u>	<u>1,677,182</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(132,938)</u>	<u>(27,483)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>1,919,695</u>	<u>1,649,699</u>	

Analisis saldo dan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Penilaian secara kolektif	64,755	7,254	Collective assessments
Penilaian secara individual	<u>68,183</u>	<u>20,229</u>	Individual assessments
	<u>132,938</u>	<u>27,483</u>	

Perubahan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan modal ventura adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Saldo awal	27,483	28,388	Beginning balance
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	69,001	-	Adjustment of balance on initial application of SFAS 71
Penambahan/(pemulihan) tahun berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>	Additional/(recovery) during the year
Saldo akhir	<u>132,938</u>	<u>27,483</u>	Ending balance

**b. By aging (continued)**

*Productive financing represents venture capital financing activities receivables in the form of joint cooperation arrangements with a profit sharing. The Group provides funds for operational use of the finance partner companies. These financing schemes define a certain percentage of revenue for each month or period attributable to the Group.*

*Details of productive financing based on collectibility as of 31 December 2020 and 31 December 2019 is as follows:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Lancar	1,717,219	1,450,829	Current
Dalam perhatian khusus	93,414	110,387	Special mention
Kurang lancar	13,712	12,779	Substandard
Diragukan	33,957	15,576	Doubtful
Macet	<u>194,331</u>	<u>87,611</u>	Loss
	<u>2,052,633</u>	<u>1,677,182</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(132,938)</u>	<u>(27,483)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>1,919,695</u>	<u>1,649,699</u>	

*Analysis of total balance and allowance for impairment losses are as follows:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Penilaian secara kolektif	64,755	7,254	Collective assessments
Penilaian secara individual	<u>68,183</u>	<u>20,229</u>	Individual assessments
	<u>132,938</u>	<u>27,483</u>	

*Movement of allowance for impairment losses of venture capital financing receivables are as follows:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Saldo awal	27,483	28,388	Beginning balance
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	69,001	-	Adjustment of balance on initial application of SFAS 71
Penambahan/(pemulihan) tahun berjalan	<u>-</u>	<u>-</u>	Additional/(recovery) during the year
Saldo akhir	<u>132,938</u>	<u>27,483</u>	Ending balance

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PIUTANG PEMBIAYAAN MODAL VENTURA - BERSIH (lanjutan)**

**b. Berdasarkan umur (lanjutan)**

Perubahan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan modal ventura adalah sebagai berikut (lanjutan):

**12. VENTURE CAPITAL RECEIVABLES - NET (continued)**

**b. By aging (continued)**

*Movement of allowance for impairment losses of venture capital financing receivables are as follows (continued):*

	31 Desember/December 2020			Jumlah/ Total
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
Saldo awal periode, 31 Desember 2019	1,204	6,050	20,229	27,483
Dampak penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020 (Catatan 51)	10,350	13,800	44,851	69,001
Transfer dari Stage 1 ke Stage 2	(452)	452	-	-
Transfer dari Stage 1 ke Stage 3	(423)	-	423	-
Transfer dari Stage 2 ke Stage 1	665	(665)	-	-
Transfer dari Stage 2 ke Stage 3	-	(456)	456	-
Transfer dari Stage 3 ke Stage 2	-	2,554	(2,554)	-
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	3,411	4,720	28,323	36,454
Saldo akhir periode, 31 Desember 2020	<u>14,755</u>	<u>26,455</u>	<u>91,728</u>	<u>132,938</u>

Direksi berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan modal ventura tersebut.

*The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible loss on uncollectibility of such venture capital financing receivables.*

**13. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

**13. TAXATION**

**a. Prepaid taxes**

	2020	2019	
<b>Pajak penghasilan badan:</b>			<b>Corporate income tax:</b>
<b>Perseroan</b>			<b>The Company</b>
Pasal 25	318	610	Article 25
<b>Entitas anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
Pasal 25	5,789	-	Article 25
Kelebihan pembayaran pajak			Claims for tax refund
Tahun 2020	17,898	-	Year 2020
Tahun 2019	86,672	62,025	Year 2019
Tahun 2018	50,497	84,256	Year 2018
Tahun 2017	-	680	Year 2017
Tahun 2013	2,598	2,598	Year 2013
Tahun 2012	2,491	2,491	Year 2012
	<u>165,945</u>	<u>152,050</u>	
	<u>166,263</u>	<u>152,660</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Pajak lain-lain:</b>			<b>Other taxes:</b>
<b>Perseroan</b>			<b>The Company</b>
Pasal 23	1,291	1,352	Article 23
Pajak pertambahan nilai	<u>5,319</u>	<u>187</u>	Value-added tax
	6,610	1,539	
<b>Entitas anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
Pasal 21	22	6	Article 21
Pasal 23	3,421	-	Article 23
Pajak pertambahan nilai	11,500	1,551	Value-added tax
Pasal 4(2)	153	7	Article 4(2)
Pajak lain-lain	<u>452</u>	<u>-</u>	Other taxes
	15,548	1,564	
	22,158	3,103	
	<u>188,421</u>	<u>155,763</u>	
<b>b. Utang pajak</b>			<b>b. Taxes payable</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Pajak penghasilan badan:</b>			<b>Corporate income tax:</b>
<b>Entitas anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
Pasal 25	13,442	21,756	Article 25
Pasal 29			Article 29
Tahun 2020	462,256	-	Year 2020
Tahun 2019	207,060	247,008	Year 2019
Tahun 2018	2,118	3,522	Year 2018
Tahun 2017	<u>186,034</u>	<u>186,101</u>	Year 2017
	870,910	458,387	
<b>Pajak lain-lain:</b>			<b>Other taxes:</b>
<b>Perseroan</b>			<b>The Company</b>
Pasal 21	2,498	1,789	Article 21
Pasal 22	1	6	Article 22
Pasal 23	818	26	Article 23
Pajak pertambahan nilai	1,726	761	Value-added tax
Pasal 4(2)	<u>3</u>	<u>1</u>	Article 4(2)
	5,046	2,583	
<b>Entitas anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
Pasal 21	40,101	49,893	Article 21
Pasal 22	23	41	Article 22
Pasal 23	8,651	5,107	Article 23
Pasal 26	125	359	Article 26
Pajak pertambahan nilai	14,077	18,406	Value-added tax
Pasal 4(2)	5,020	4,402	Article 4(2)
Pajak Penghasilan Daerah - PB 1	154	319	Local Government Tax - PB 1
Pajak lain-lain	<u>455</u>	<u>57,744</u>	Other taxes
	68,606	136,271	
	73,652	138,854	
	<u>944,562</u>	<u>597,241</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Beban pajak penghasilan**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Entitas anak</b>			<b>Subsidiaries</b>
Kini	762,767	828,780	Current
Penyesuaian tahun lalu	1,348	17,838	Adjustment from prior year
Tangguhan	<u>263,535</u>	<u>(563,556)</u>	Deferred
	<u>1,027,650</u>	<u>283,062</u>	
<b>Konsolidasian</b>			<b>Consolidated</b>
Kini	762,767	828,780	Current
Penyesuaian tahun lalu	1,348	17,838	Adjustment from prior year
Tangguhan	<u>263,535</u>	<u>(563,556)</u>	Deferred
	<u>1,027,650</u>	<u>283,062</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

*A reconciliation between income tax expenses and the theoretical amount of income tax expenses is calculated based on the Company's profit before income tax at the tax rates that apply is as follows:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	3,230,457	2,521,674	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(3,373,994)	(2,547,840)	<i>Profit before income tax - subsidiaries</i>
Penyesuaian untuk eliminasi	<u>1,830,291</u>	<u>71,882</u>	<i>Adjustment for elimination</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>1,686,754</u>	<u>45,716</u>	<i>Profit before income tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku (2020: 22%; 2019: 25%)	371,086	11,429	<i>Taxes calculated at the applicable tax rate (2020: 20%; 2019: 25%)</i>
Dampak perubahan tarif pajak	9,892	-	<i>Impact on changes in tax rate</i>
Dampak PSAK 71	(149)	-	<i>Impact of SFAS 71</i>
<b>Perbedaan tetap:</b>			<b>Permanent differences:</b>
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(407,090)	(43,458)	<i>Income subject to final tax and non-taxable income</i>
Beban yang tidak diperkenankan	3,937	2,362	<i>Non-deductible expenses</i>
Penyesuaian atas cadangan aset pajak tangguhan	(16,528)	22,209	<i>Adjustments for allowance of deferred tax assets</i>
Beban pajak penghasilan Perseroan	-	-	<i>Income tax expenses</i>
Entitas anak	<u>1,027,650</u>	<u>283,062</u>	<i>The Company Subsidiaries</i>
	<u>1,027,650</u>	<u>283,062</u>	

Pajak penghasilan badan dihitung untuk masing-masing entitas sebagai bagian yang terpisah secara hukum.

*The corporate income tax is calculated for each entity as a separate legal entity.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

Taksiran laba kena pajak Perseroan, dan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	3,230,457	2,521,674	<i>Consolidated profit before income tax</i>
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(3,373,994)	(2,547,840)	<i>Profit before income tax - subsidiaries</i>
Penyesuaian untuk eliminasi	<u>1,830,291</u>	<u>71,882</u>	<i>Adjustment for elimination</i>
 Laba sebelum pajak penghasilan	 <u>1,686,754</u>	 45,716	 <i>Profit before income tax</i>
 <b>Perbedaan waktu:</b>			 <b>Temporary differences:</b>
Penyusutan	531	(364)	Depreciation
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(35,167)	87,656	Allowance for impairment losses
Liabilitas imbalan kerja	3,440	1,544	Employee benefit liabilities
Sewa	<u>353</u>	-	Leases
	<u>(30,843)</u>	<u>88,836</u>	
 <b>Perbedaan tetap:</b>			 <b>Permanent differences:</b>
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(1,850,409)	(173,832)	Income subject to final tax and non-taxable income
Beban yang tidak diperkenankan	<u>17,895</u>	<u>9,448</u>	Non-deductible expenses
	<u>(1,832,514)</u>	<u>(164,384)</u>	
Rugi kena pajak	<u>(176,603)</u>	<u>(29,832)</u>	 <i>Taxable loss</i>
Akumulasi kerugian pajak yang dapat dikompensasikan: - tahun pajak 2018	-	(27,625)	 <i>Accumulated tax loss carried forward: fiscal year 2018 -</i>
- tahun pajak 2019	(29,832)	-	<i>fiscal year 2019 -</i>
- tahun pajak 2020	<u>-</u>	<u>-</u>	<i>fiscal year 2020 -</i>
	<u>(206,435)</u>	<u>(57,457)</u>	
 <b>Perseroan:</b>			 <b>The Company:</b>
Beban pajak penghasilan - kini	-	-	- Income tax expenses - current
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:			
Pasal 23	(508)	(1,002)	Less prepaid income taxes:
Pasal 25	<u>-</u>	<u>-</u>	Article 23 Article 25
Pajak dibayar dimuka	<u>(508)</u>	<u>(1,002)</u>	 <i>Prepaid taxes</i>
Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perseroan meyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.			 <i>The corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2020 is an estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return.</i>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**13. TAXATION (continued)**

**d. Aset pajak tangguhan**

**d. Deferred tax assets**

	31 Desember/December 2020						<b>The Company</b>
	<b>1 Januari/ January 2020</b>	<b>(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss</b>	<b>ke penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/credited to other comprehensive income</b>	<b>Dampak penurunan tarif pajak/ Impact on decrement in tax rate</b>	<b>Dampak PSAK 71/Impact of SFAS 71</b>	<b>31 Desember/ December 2020</b>	
<b>Perseroan</b>							
Penyusutan	(426)	117	-	51	-	(258)	Depreciation Allowance for
Cadangan kerugian penurunan penilaian	12,657	(7,737)	-	(1,519)	149	3,550	impairment losses Allowance for impairment
Cadangan kerugian penurunan penilaian piutang - MTN	64,209	-	-	(7,705)	-	56,504	losses - MTN Employee benefit liabilities
Liabilitas imbalan kerja	5,994	757	327	(719)	-	6,359	Leases
Sewa	-	78	-	-	-	78	
	<u>82,434</u>	<u>(6,785)</u>	<u>327</u>	<u>(9,892)</u>	<u>149</u>	<u>66,233</u>	
Cadangan DTA	<u>(82,434)</u>	<u>6,785</u>	<u>(327)</u>	<u>9,892</u>	<u>(149)</u>	<u>(66,233)</u>	Allowance for DTA
	<u><u>=</u></u>	<u><u>=</u></u>	<u><u>=</u></u>	<u><u>=</u></u>	<u><u>=</u></u>	<u><u>=</u></u>	
<b>Entitas anak</b>							
Penyusutan dan amortisasi	(12,627)	3,466	-	1,409	-	(7,752)	Depreciation and amortisation
Liabilitas imbalan kerja	337,745	(30,354)	13,018	(40,472)	-	279,937	Employee benefit liabilities
Akrual	71,094	10,674	-	(8,529)	-	73,239	Accruals
Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	1,236,944	20,971	-	(148,433)	-	1,109,482	Unearned premium reserves
Estimasi liabilitas klaim	662,767	(23,850)	-	(79,507)	-	559,410	Estimated claim liabilities
Cadangan kerugian penurunan penilaian	817,305	108,531	-	(98,887)	7,470	834,419	Allowance for impairment losses
Provisi atas kerugian klaim	789,987	114,372	-	(93,560)	(10,323)	800,476	Provision for claim loss
Sewa	-	(354)	-	-	-	(354)	Leases
	<u>3,897,142</u>	<u>202,936</u>	<u>(17,054)</u>	<u>(467,925)</u>	<u>(2,853)</u>	<u>3,612,246</u>	Unrealised gain/(loss) on fair value of marketable securities
Keuntungan/(kerugian) belum direalisasikan atas nilai wajar efek	(5,544)	(584)	(30,072)	54	-	(36,146)	Financial liabilities valuation
Penilaian liabilitas keuangan	<u>(529)</u>	<u>64</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(465)</u>	
	<u><u>3,897,142</u></u>	<u><u>3,612,246</u></u>	<u><u></u></u>	<u><u></u></u>	<u><u></u></u>	<u><u></u></u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)**

<b>31 Desember/December 2019</b>					The Company Depreciation Allowance for impairment losses Allowance for impairment losses - MTN Employee benefits liabilities
	1 Januari/ January 2019	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laporan penghasilan komprehensif lain/ (Charged)/credited to other comprehensive income	31 Desember/ December 2019	
<b>Perseroan</b>					
Penyusutan	(335)	(91)	-	(426)	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9,257)	21,914	-	12,657	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang - MTN	64,209	-	-	64,209	
Liabilitas imbalan kerja	5,672	386	(64)	5,994	Employee benefits liabilities
	<u>60,289</u>	<u>22,209</u>	<u>(64)</u>	<u>82,434</u>	
Cadangan DTA	(60,289)	(22,209)	64	(82,434)	Allowance for DTA
	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	
<b>Entitas anak</b>					
Beban penyusutan dan amortisasi	(10,534)	(2,093)	-	(12,627)	Subsidiaries Depreciation and amortisation expenses
Liabilitas imbalan kerja	219,514	15,042	103,189	337,745	Employee benefits liabilities
Akrual	34,927	36,167	-	71,094	Accruals
Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan	1,121,792	115,152	-	1,236,944	Unearned premium reserves
Estimasi liabilitas klaim	436,978	225,789	-	662,767	Estimated claim liabilities
Cadangan kerugian penurunan penilaian	751,708	65,597	-	817,305	Allowance for impairment losses
Provisi atas kerugian klaim	681,030	108,957	-	789,987	Provision for claim loss
Sewa	-	-	-	-	Leases Unrealised gain/(loss) on fair value of marketable securities
Keuntungan/(kerugian) belum direalisasikan atas nilai wajar efek Penilaian liabilitas keuangan	(7,015)	(574)	2,045	(5,544)	Financial liabilities valuation
	<u>(560)</u>	<u>31</u>	<u>-</u>	<u>(529)</u>	
	<u>3,227,840</u>	<u>564,068</u>	<u>105,234</u>	<u>3,897,142</u>	
	<u>3,227,840</u>			<u>3,897,142</u>	

**e. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

**e. Administration**

*Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.*

**f. Perubahan tarif pajak**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perppu") No. 1 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Anak perusahaan Perseroan telah membukukan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 berupa penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp 467,925 dimana jumlah tersebut dibebankan ke laporan konsolidasian laba rugi tahun berjalan.

**f. Changes in tax rates**

*On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law ("Perppu") No. 1 year 2020 which among others reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal year 2020 and 2021 and to 20% since fiscal year 2022. The Company's subsidiaries has recorded the effect of changes in the corporate income tax rate in the financial statement for the year ended 31 December 2020, in the form of decrease in deferred tax asset by Rp 467,925 in which the amount was charged to the consolidated current year's profit or loss.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Pemeriksaan Pajak**

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia  
(Persero)

Pada bulan Agustus 2020, Perseroan menerima Surat Perintah Pemeriksaan untuk tahun pajak 2019. Hingga saat tanggal laporan keuangan, pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2019 masih berlangsung.

Pada bulan Agustus 2019, Perseroan menerima Surat Perintah Pemeriksaan untuk tahun pajak 2018. Pada bulan Oktober 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 722, Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 70 dan PPN sebesar Rp 17. Pada bulan November 2020, Perusahaan telah membayar seluruh jumlah yang diminta oleh Kantor Pajak pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")

Pada tanggal 19 Februari 2018, Askrindo menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") yang menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan untuk masa pajak 2016 sebesar Rp 116.771. Pada tanggal 14 Maret 2018, Askrindo menerima Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") yang menyatakan pengembalian pajak sebesar Rp 57.105 dan sisanya digunakan sebagai kompensasi utang pajak dan pajak yang akan terutang lainnya sebesar Rp 59.666. Pada tanggal 19 Maret 2018, Askrindo telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp 57.105.

Pada tanggal 24 April 2019, Askrindo menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan untuk masa pajak 2017 sebesar Rp 309 (termasuk denda pajak). Pada tanggal 14 Mei 2019, Askrindo telah membayar kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 309.

PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre")

Pada tanggal 2 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelesaikan pemeriksaan pajak Nasre tahun pajak 2017 dan menerbitkan surat keputusan pemeriksaan pajak yaitu kurang bayar pasal 21, 23 dan 26 sebesar Rp 262.716 dan lebih bayar pasal 25 sebesar Rp 9.498. Pada tanggal 26 April 2019, DJP mengeluarkan surat keputusan No. 00052/203/17/093/19 terkait pembayaran kurang bayar pajak sebesar Rp 4.829 dan lebih bayar pajak sebesar Rp 9.498.

**13. TAXATION (continued)**

**g. Tax examination**

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia  
(Persero)

*In August 2020, the Company received an instruction letter for tax audit for fiscal year 2019. Up to the report date, tax audit for fiscal year 2019 is still on going.*

*In August 2019, the Company received an instruction letter for tax audit for fiscal year 2018. In October 2020, the Company received the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) for Corporate Income tax amounting to Rp 722, withholding tax art 21 amounting to Rp 70 and VAT amounting to Rp 17. In November 2020, the Company has fully paid the amount that being requested by the Tax Office on the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB).*

PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo")

*On 19 February 2018, Askrindo received Tax Assessment Letter of Tax Overpayment ("SKPLB"), which stated that there was an overpayment of corporate income tax for fiscal year 2016 amounting to Rp 116,771. On 14 March 2018, Askrindo received Tax Overpayment Refund Order ("SPMKP"), which stated that the tax refund was amounting to Rp 57,105, while the remaining balance was used to compensate other outstanding and to be outstanding tax payables amounting to Rp 59,666. On 19 March 2018, Askrindo has received the tax refund amounting to Rp 57,105.*

*On 24 April 2019, Askrindo received Tax Assessment Letter of Tax Underpayment ("SKPKB"), which stated that there was an underpayment of corporate income tax for fiscal year 2017 amounting to Rp 309 (including tax penalty). On 14 May 2019, Askrindo has paid the tax underpayment amounting to Rp 309.*

PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre")

*On 2 April 2019, the Directorate General of Tax (DGT) have completed tax examination of Nasre's fiscal year 2017 and issued the decision letter of tax audit, which resulted in tax underpayment article 21, 23 and 26 amounting to Rp 262,716 and overpayment article 25 amounting to Rp 9,498. On 26 April 2019, the DGT released a decision letter No. 00052/203/17/093/19 of the tax underpayment of Rp 4,829 and overpayment of Rp 9,498.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Pemeriksaan Pajak (lanjutan)**

PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre")  
(lanjutan)

Nasre telah menyetujui dan membayar pajak sesuai dengan penerimannya. DGP merilis lebih bayar pasal 25 dengan mengkompensasi kurang bayar pasal 21 dan 26 pada 17 Mei 2019. Pada tanggal 14 Juni 2019, Nasre mengajukan surat keberatan atas kurang bayar pasal 23 kepada DGP. Atas permohonan ini, Nasre telah membayar kurang bayar Pasal 23 yang disepakati sebesar Rp 135 dari kurang bayar Pasal 23 sebesar Rp 258.021 pada tanggal 8 Mei 2020. Pada tanggal 14 Mei 2020, DGP menolak keberatan Nasre. Nasre kemudian mengirimkan surat banding tertanggal 9 Juni 2020 ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, banding pajak masih dalam proses.

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")

Pada tanggal 21 April 2020, BTIM menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No.00013/240/18/093/20 untuk tahun pajak 2018, dimana Kantor Pajak memutuskan bahwa BTIM kurang membayar pajak pertambahan nilai sebesar Rp 128. BTIM menyetujui SKPKB tersebut dan membebankannya dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Pada tanggal 31 Juli 2020, BTIM melakukan pembayaran atas pajak tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020, BTIM menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No.00012/543/18/093/20 untuk tahun pajak 2018, dimana Kantor Pajak memutuskan bahwa BTIM kurang membayar pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 5. BTIM menyetujui SKPKB tersebut dan membebankannya dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Pada tanggal 31 Juli 2020, BTIM melakukan pembayaran atas pajak tersebut.

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")

Pada bulan Agustus 2019, Kantor Pajak melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2018. Pada Februari 2020, Jasindo menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") denda atas Pajak Penghasilan ("PPh") Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk tahun pajak 2018 dengan total senilai Rp 15.257 dan Rp 4.717. Pada 10 Maret 2020, Jasindo telah melakukan pembayaran atas pajak yang dinyatakan kurang bayar tersebut, dan dicatat sebagai beban umum dan administrasi sebesar Rp 19.974 dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2019.

**13. TAXATION (continued)**

**g. Tax examination (continued)**

PT Reasuransi Nasional Indonesia ("Nasre")  
(continued)

*Nasre has agreed and paid the tax underpayment as accepted. DGT released the overpayment article 25 compensated with underpayment article 21 and 26 on 17 May 2019. Based on Tax Overpayment Assessment Letter On 14 June 2019, Nasre submitted the objection letter for the underpayment article 23 to the DGT. For this objection, Nasre has paid the underpayment of Article 23 as agreed amounting to Rp 135 from the total underpayment of article 23 amounting to Rp 258,021 on 8 May 2020. On 14 May 2020, the DGT declined Nasre objection. Nasre then submitted the appeal request letter on 9 June 2020 to the Tax Court. Up to the date of these financial statements, the tax appeal is still in process.*

PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM")

*On 21 April 2020, BTIM received Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) No.00013/240/18/093/20 fiscal year 2018, wherein the Tax office decided that BTIM underpaid of value added tax amounting to Rp 128. BTIM approved the SKPKB and charged the amount in current year income statement. On 31 July 2020, BTIM has paid such underpayment.*

*On 21 April 2020, BTIM received Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) No.00012/543/18/093/20 fiscal year 2018, wherein the Tax office decided that BTIM underpaid of Tax Income Article 21 amounting to Rp 5. BTIM approved the SKPKB and charged the amount in current year income statement. On 31 July 2020, BTIM has paid such underpayment.*

PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")

*On August 2019, Tax Office performed examination for fiscal year 2018. On February 2020, Jasindo received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") and Tax Collection Letter penalties for income tax art 21, income tax art 23, income tax art 26 and Value Added Tax ("VAT") for its 2018 fiscal year amounting to Rp 15,257 and Rp 4,717, respectively. The underpayment has been paid by Jasindo on 10 March 2020, and recorded as general and administrative expenses amounting to Rp 19,974 in the consolidated statement of profit or loss for 2019."*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Pemeriksaan Pajak (lanjutan)**

**PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")  
(lanjutan)**

Pada Februari 2020, Jasindo menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas PPh Badan atas lebih bayar pajak 2018 dengan total senilai Rp 17.217. Pada 24 Maret 2020, Jasindo telah menerima pembayaran atas lebih bayar pajak tersebut, dan dicatat sebagai beban pajak penghasilan - tahun lalu sebesar Rp 17.217 dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2019.

Pada bulan Juni dan Juli 2020, Jasindo menerima STP sanksi bunga atas PPN dan PPh pasal 21 untuk masa pajak 2019 senilai Rp 65 dan Rp 16. Jasindo telah melakukan pembayaran dan pencatatan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2020.

**13. TAXATION (continued)**

**g. Tax examination (continued)**

**PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo")  
(continued)**

On February 2020, Jasindo received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") for Corporate Income Tax (CIT) for overpayment 2018 fiscal year amounting to Rp 17,217. The overpayment has been paid to Jasindo on 24 March 2020, and recorded as income tax expense - prior year for Rp 17,217 in the consolidated statement of profit or loss for 2019.

On June and July 2020, Jasindo Tax Collection Letter for interest penalties for VAT and income tax art 21 for fiscal period 2019 amounting to Rp 65 and Rp 16. Jasindo has paid and recorded in the consolidated statement of profit or loss for 2020.

**14. PENYERTAAN LANGSUNG**

**14. DIRECT PARTICIPATION**

Nama Perusahaan	Jenis usaha/ Nature of business	Percentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	2020		2019		<i>Name of Company</i>
			2020	2019	2020	2019	
Entitas asosiasi Metode ekuitas							<i>Associate entity Equity method</i>
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Asuransi kerugian/ General insurance	40	463,842	396,885	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia		
Entitas lain Nilai wajar							<i>Other entity Fair value</i>
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Asuransi jiwa/ Life insurance	10	175,000	175,000	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia		
PT Asuransi Allianz Utama	Asuransi kerugian/ General insurance	2.25	57,814	57,814	PT Asuransi Allianz Utama		
PT Reasuransi Maipark Indonesia	Asuransi kerugian/ General insurance	5.69	2,557	2,557	PT Reasuransi Maipark Indonesia		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Bank/Bank	0.02	120	120	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		
PT Asrinda Arthasangga	Asuransi kerugian/ General insurance	11	330	330	PT Asrinda Arthasangga		
Lain-lain/Others	Lain-lain/ Others		20,013	21,502			<i>Others</i>
			255,834	257,323			
			719,676	654,208			

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**15. ASET TETAP - BERSIH**

**15. FIXED ASSETS - NET**

2020					
	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 2020
<b>Biaya perolehan:</b>					<b>Acquisition cost:</b>
Pemilikan langsung					<i>Direct acquisition</i>
Tanah	618,993	35,628	(81,395)	-	573,226
Bangunan	1,326,209	66,217	(9,280)	55,157	1,438,303
Kendaraan	287,935	1,851	(31,438)	-	258,348
Peralatan	817,766	47,177	(8,498)	38	856,483
Aset tetap lainnya	89,572	17,909	(8,749)	1,051	99,783
Aset dalam penyelesaian	206,438	48,222	(33,711)	(56,207)	164,742
	<b>3,346,913</b>	<b>217,004</b>	<b>(173,071)</b>	<b>39</b>	<b>3,390,885</b>
Aset hak guna					<i>Right of use assets</i>
Bangunan	-	177,896	-	3,197	181,093
Kendaraan	-	122,891	(916)	269	122,244
Peralatan	-	7,590	-	-	7,590
	<b>-</b>	<b>308,377</b>	<b>(916)</b>	<b>3,466</b>	<b>310,927</b>
	<b>3,346,913</b>	<b>525,381</b>	<b>(173,987)</b>	<b>3,505</b>	<b>3,701,812</b>
<b>Akumulasi penyusutan:</b>					<b>Accumulated depreciation:</b>
Bangunan	(579,951)	(62,236)	8,025	-	(634,162)
Kendaraan	(214,346)	(9,277)	16,533	-	(207,090)
Peralatan	(505,721)	(45,516)	8,377	(13)	(542,873)
Aset tetap lainnya	(61,447)	(18,312)	3,189	-	(76,570)
	<b>(1,361,465)</b>	<b>(135,341)</b>	<b>36,124</b>	<b>(13)</b>	<b>(1,460,695)</b>
Aset hak guna					<i>Right of use assets</i>
Bangunan	-	(76,171)	-	-	(76,171)
Kendaraan	-	(45,227)	244	-	(44,983)
Peralatan	-	(4,361)	-	-	(4,361)
	<b>-</b>	<b>(125,759)</b>	<b>244</b>	<b>-</b>	<b>(125,515)</b>
	<b>(1,361,465)</b>	<b>(261,100)</b>	<b>36,368</b>	<b>(13)</b>	<b>(1,586,210)</b>
Penurunan nilai tanah	(160)				(160) <i>Decreasing in value of land</i>
Nilai buku - bersih	<b>1,985,288</b>				<b>2,115,442</b> <i>Book value - net</i>
2019					
	1 Januari/ January 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember/ December 2019
<b>Biaya perolehan:</b>					<b>Acquisition cost:</b>
Tanah	620,014	5,247	(985)	(5,283)	618,993
Bangunan	1,259,848	71,405	(17,902)	12,858	1,326,209
Kendaraan	291,593	3,500	(7,158)	-	287,935
Peralatan	753,328	96,160	(31,722)	-	817,766
Aset tetap lainnya	91,666	10,206	(12,300)	-	89,572
Aset dalam penyelesaian	143,698	75,598	-	(12,858)	206,438
	<b>3,160,147</b>	<b>262,116</b>	<b>(70,067)</b>	<b>(5,283)</b>	<b>3,346,913</b>
<b>Akumulasi penyusutan:</b>					<b>Accumulated depreciation:</b>
Bangunan	(528,723)	(61,176)	9,948	-	(579,951)
Kendaraan	(196,986)	(17,828)	468	-	(214,346)
Peralatan	(464,460)	(65,675)	24,414	-	(505,721)
Aset tetap lainnya	(53,835)	(13,915)	6,303	-	(61,447)
	<b>(1,244,004)</b>	<b>(158,594)</b>	<b>41,133</b>	<b>-</b>	<b>(1,361,465)</b>
Penurunan nilai tanah	(160)				(160) <i>Decreasing in value of land</i>
Nilai buku - bersih	<b>1,915,983</b>				<b>1,985,288</b> <i>Book value - net</i>

Direksi berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh Grup selain yang tersaji pada tabel di atas.

Pada tahun 2020 dan 2019, aset tetap kecuali tanah telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.034.563 dan Rp 884.019. Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset dipertanggungkan.

*The Directors believe that there is no indication of impairment of fixed assets owned by the Group other than as presented above.*

*In 2020 and 2019, fixed assets, except land, have been insured with the sum insured of Rp 1,034,563 and Rp 884,019, respectively. The Directors believe that the sum insured are adequate to cover possible loss on such assets.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**16. PROPERTI INVESTASI**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, properti investasi merupakan tanah, bangunan dan prasarana, dan perlengkapan gedung yang disewakan kepada pihak ketiga dan berelasi berdasarkan perjanjian sewa.

**16. INVESTMENT PROPERTIES**

*As at 31 December 2020 and 2019, investment properties consist of a land, building equipment, and building infrastructure which being leased to third and related parties to generate rental income.*

	2020				
	1 Januari/ January 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 2020	
<b>Biaya perolehan:</b>					<i>Acquisition cost:</i>
Tanah	261,843	-	-	261,843	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	246,193	400	-	246,593	<i>Building and infrastructure</i>
Perlengkapan gedung	<u>96,841</u>	<u>1.275</u>	-	<u>98,116</u>	<i>Building equipment</i>
	<u>604,877</u>	<u>1.675</u>	-	<u>606,552</u>	
<b>Akumulasi penyusutan:</b>					<i>Accumulated depreciation:</i>
Bangunan dan prasarana	(101,150)	(7,831)	-	(108,981)	<i>Building and infrastructure</i>
Perlengkapan gedung	<u>(46,233)</u>	<u>(5,686)</u>	-	<u>(51,919)</u>	<i>Building equipment</i>
	<u>(147,383)</u>	<u>(13,517)</u>	-	<u>(160,900)</u>	
Nilai buku - bersih	<u>457,494</u>			<u>445,652</u>	<i>Book value - net</i>
	2019				
	1 Januari/ January 2019	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 2019	
<b>Biaya perolehan:</b>					<i>Acquisition cost:</i>
Tanah	261,843	-	-	261,843	<i>Land</i>
Bangunan dan prasarana	242,891	3,302	-	246,193	<i>Building and infrastructure</i>
Perlengkapan gedung	<u>88,268</u>	<u>8,573</u>	-	<u>96,841</u>	<i>Building equipment</i>
	<u>593,002</u>	<u>11,875</u>	-	<u>604,877</u>	
<b>Akumulasi penyusutan:</b>					<i>Accumulated depreciation:</i>
Bangunan dan prasarana	(94,059)	(7,091)	-	(101,150)	<i>Building and infrastructure</i>
Perlengkapan gedung	<u>(39,944)</u>	<u>(6,289)</u>	-	<u>(46,233)</u>	<i>Building equipment</i>
	<u>(134,003)</u>	<u>(13,380)</u>	-	<u>(147,383)</u>	
Nilai buku - bersih	<u>458,999</u>			<u>457,494</u>	<i>Book value - net</i>

Pendapatan sewa dari properti investasi tercatat pada akun Pendapatan hasil pengelolaan gedung (lihat Catatan 44) masing-masing sebesar Rp 79.320 dan Rp 77.243 selama tahun 2020 dan 2019.

*Rental income from investment properties is recorded under the Building management income account (see Note 44) which amounting to Rp 79,320 and Rp 77,243 throughout the year 2020 and 2019.*

Beban terkait properti investasi baik yang menghasilkan sewa maupun tidak, tercatat dalam beban umum dan administrasi (lihat Catatan 43) masing-masing sebesar Rp 174.019 dan Rp 274.320 selama tahun 2020 dan 2019.

*Expenses related to investment properties which generating rental income or not, are recorded under the General and administrative expenses account (see Note 43) amounting to Rp 174,019 and Rp 274,320 throughout the year 2020 and 2019.*

**17. ASET REASURANSI**

**17. REINSURANCE ASSETS**

	2020	2019	
Premi yang belum merupakan pendapatan	5,597,627	5,325,640	<i>Unearned premium reserves</i>
Estimasi klaim retensi sendiri	<u>6,819,441</u>	<u>5,859,838</u>	<i>Estimated own retention claims</i>
	<u>12,417,068</u>	<u>11,185,478</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. ASET REASURANSI (lanjutan)**

**17. REINSURANCE ASSETS (continued)**

**a. Premi yang belum merupakan pendapatan**

**a. Unearned premium reserve**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	4,362,880	4,020,583	Credit
Aneka	420,732	414,115	Miscellaneous
Tanggung gugat	26,136	10,981	Liability
Harta benda (properti)	238,569	331,416	Property
<i>Suretyship</i>	365,835	210,422	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	39,636	160,465	Energy offshore
Kesehatan	6,288	6,563	Health
Kendaraan bermotor	13,856	16,544	Vehicles
Rangka kapal	29,491	28,223	Marine hull
Rangka pesawat	39,086	38,704	Aviation
Rekayasa	38,355	71,778	Engineering
Pengangkutan	323	730	Marine cargo
Satelit	12,102	7,586	Satellites
Kecelakaan diri	2,703	4,609	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	1,635	2,921	Energy onshore
	<u>5,597,627</u>	<u>5,325,640</u>	

**b. Estimasi klaim retensi sendiri**

**b. Estimated own retention claims**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	793,671	763,533	Credit
Aneka	775,019	660,859	Miscellaneous
Tanggung gugat	33,949	28,657	Liability
Harta benda (properti)	1,469,367	963,807	Property
<i>Suretyship</i>	522,980	429,590	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	2,746,798	2,304,343	Energy offshore
Kesehatan	-	24,187	Health
Kendaraan bermotor	9,073	10,086	Vehicles
Rangka kapal	108,463	141,189	Marine hull
Rangka pesawat	140,333	374,376	Aviation
Rekayasa	130,298	140,513	Engineering
Pengangkutan	24,249	11,828	Marine cargo
Kecelakaan diri	5,790	5,883	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	59,451	987	Energy onshore
	<u>6,819,441</u>	<u>5,859,838</u>	

**18. ASET RETROSESI**

**18. RETROCESSION ASSETS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Premi yang belum merupakan pendapatan	280,291	653,961	Unearned premium reserves
Estimasi klaim retensi sendiri	1,194,471	926,915	Estimated own retention claims
	<u>1,474,762</u>	<u>1,580,876</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**19. BIAYA AKUISISI TANGGUHAN - BERSIH**

**19. DEFERRED ACQUISITION COST - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	795,257	744,603	Credit
Aneka	237,241	233,205	Miscellaneous
Tanggung gugat	577	1,441	Liability
Harta benda (properti)	8,190	9,565	Property
Jiwa	141,799	150,801	Life
<i>Suretyship</i>	152,907	205,697	Suretyship
Kendaraan bermotor	23,812	36,928	Vehicles
Rekayasa	978	1,124	Engineering
Pengangkutan	195	367	Marine cargo
Satelit	547	220	Satellites
Kecelakaan diri	549	2,184	Personal accident
	<u>1,362,052</u>	<u>1,386,135</u>	

**20. PENJAMINAN ULANG DIBAYAR DIMUKA**

**20. PREPAID REGUARANTEE**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	891,564	944,517	Credit
<i>Suretyship</i>	3,883	5,057	Suretyship
	<u>895,447</u>	<u>949,574</u>	

**21. ASET LAIN - LAIN**

**21. OTHER ASSETS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Bank yang dibatasi penggunaannya	1,192,064	709,915	Restricted cash in bank
Uang muka pembelian Cilandak Town Square	700,000	-	Down payment for purchase of Cilandak Town Square
Aset asuransi syariah	336,822	270,929	Sharia insurance assets
Aset asuransi penjaminan syariah	308,457	238,616	Sharia guarantee insurance asset
Aset tidak berwujud	128,823	130,151	Intangible assets
Beban dibayar dimuka	43,345	60,716	Prepaid expenses
Uang muka lain-lain	32,553	30,170	Other advances
Uang jaminan	17,636	14,315	Security deposits
Lainnya	464,275	331,552	Others
	<u>3,223,975</u>	<u>1,786,364</u>	

**22. UTANG KLAIM ASURANSI DAN REASURANSI**

**22. INSURANCE PAYABLES AND REINSURANCE CLAIM**

**a. Berdasarkan pihak tertanggung**

**a. By parties**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	167,296	190,838	Related parties (see Note 46)
Pihak ketiga	367,811	281,095	Third parties
	<u>535,107</u>	<u>471,933</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**22. UTANG KLAIM ASURANSI DAN REASURANSI (lanjutan)**      **22. INSURANCE AND REINSURANCE CLAIM PAYABLES (continued)**

**b. Berdasarkan jenis asuransi**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	69,007	115,883	Credit
Aneka	190,646	112,918	Miscellaneous
Tanggung gugat	17,537	18,955	Liability
Harta benda (properti)	67,226	69,754	Property
Jiwa	50,431	57,705	Life
<i>Suretyship</i>	49,173	14,079	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	31,129	30,776	<i>Energy offshore</i>
Kesehatan	(125)	(142)	Health
Kendaraan bermotor	18,340	19,914	Vehicles
Rangka kapal	9,037	3,900	Marine hull
Rangka pesawat	11,909	7,644	Aviation
Rekayasa	7,665	8,852	Engineering
Pengangkutan	2,873	(632)	Marine cargo
Kecelakaan diri	3,757	5,904	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	<u>6,502</u>	<u>6,423</u>	<i>Energy onshore</i>
	<u>535,107</u>	<u>471,933</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.

**23. UTANG KLAIM PENJAMINAN**

**23. GUARANTEE CLAIM PAYABLES**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	3,094	10,604	Related parties (see Note 46)
Pihak ketiga	<u>192</u>	<u>2,194</u>	Third parties
	<u>3,286</u>	<u>12,798</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.

**24. UTANG PREMI REASURANSI DAN RETROSESI**

**24. REINSURANCE AND PREMIUM PAYABLES**

**a. Berdasarkan pihak**

**a. By parties**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	216,485	354,114	Related parties (see Note 46)
Pihak ketiga	<u>1,347,917</u>	<u>1,912,069</u>	Third parties
	<u>1,564,402</u>	<u>2,266,183</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**24. UTANG PREMI REASURANSI DAN RETROSESI  
(lanjutan)**

**b. Berdasarkan jenis asuransi**

**24. REINSURANCE AND RETROCESSION  
PREMIUM PAYABLES (continued)**

**b. By classes of business**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	210,272	117,593	Credit
Aneka	65,195	239,077	Miscellaneous
Tanggung gugat	29,060	14,093	Liability
Harta benda (properti)	492,947	929,390	Property
Jiwa	59,778	69,279	Life
<i>Suretyship</i>	139,190	140,110	<i>Suretyship</i>
<i>Energy offshore</i>	64,572	127,893	<i>Energy offshore</i>
Kesehatan	8,968	6,924	Health
Kendaraan bermotor	2,467	6,404	Vehicles
Rangka kapal	106,650	96,666	Marine hull
Rangka pesawat	172,963	232,944	Aviation
Rekayasa	163,258	247,822	Engineering
Pengangkutan	19,232	12,338	Marine cargo
Satelit	28,286	23,346	Satellites
Kecelakaan diri	-	-	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	1,564	2,304	<i>Energy onshore</i>
	<u>1,564,402</u>	<u>2,266,183</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**25. UTANG PENJAMINAN ULANG**

**25. RE-GUARANTEE PAYABLES**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	9,483	735	Related parties (see Note 46)
Pihak ketiga	<u>195,631</u>	<u>92,150</u>	Third parties
	<u>205,114</u>	<u>92,885</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**26. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI**

**26. INSURANCE CONTRACT LIABILITIES**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Premi yang belum merupakan pendapatan	18,615,659	18,547,243	Unearned premium reserves
Estimasi klaim retensi sendiri	<u>13,223,123</u>	<u>10,860,083</u>	Estimated own retention claims
	<u>31,838,782</u>	<u>29,407,326</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**26. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI (lanjutan)**

**a. Premi yang belum merupakan pendapatan**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	11,557,200	10,964,738	Credit
Aneka	2,336,147	2,576,766	Miscellaneous
Tanggung gugat	2,159,600	2,205,879	Liability
Harta benda (properti)	394,599	559,950	Property
Jiwa	1,003,459	944,865	Life
<i>Suretyship</i>	599,190	336,098	<i>Suretyship</i>
<i>Energy offshore</i>	39,097	163,507	<i>Energy offshore</i>
Kesehatan	26,065	28,590	Health
Kendaraan bermotor	279,063	491,882	Vehicles
Rangka kapal	77,245	70,035	Marine hull
Rangka pesawat	48,491	48,223	Aviation
Rekayasa	61,531	115,395	Engineering
Pengangkutan	4,632	4,023	Marine cargo
Satelit	15,917	10,491	Satellites
Kecelakaan diri	9,814	23,488	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	3,609	3,313	<i>Energy onshore</i>
	<b>18,615,659</b>	<b>18,547,243</b>	

**b. Estimasi klaim retensi sendiri**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	1,805,267	1,456,482	Credit
Aneka	4,621,122	3,469,891	Miscellaneous
Tanggung gugat	438,577	498,797	Liability
Harta benda (properti)	1,741,068	1,273,348	Property
Jiwa	288,510	214,885	Life
<i>Suretyship</i>	694,808	559,093	<i>Suretyship</i>
<i>Energy offshore</i>	2,792,744	2,337,292	<i>Energy offshore</i>
Kesehatan	90,486	122,746	Health
Kendaraan bermotor	98,651	100,077	Vehicles
Rangka kapal	211,485	215,419	Marine hull
Rangka pesawat	147,776	382,532	Aviation
Rekayasa	166,350	173,573	Engineering
Pengangkutan	51,109	40,149	Marine cargo
Kecelakaan diri	9,200	13,809	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	65,970	1,990	<i>Energy onshore</i>
	<b>13,223,123</b>	<b>10,860,083</b>	

**27. LIABILITAS KONTRAK JAMINAN KEUANGAN**

**27. LIABILITIES FOR FINANCIAL GUARANTEE CONTRACTS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pendapatan terkait penjaminan kredit diterima dimuka	3,797,561	3,235,732	Deferred credit
Cadangan klaim	4,028,806	3,430,553	guarantee income Claim provision
	<b>7,826,367</b>	<b>6,666,285</b>	

**a. Pendapatan terkait penjaminan kredit diterima dimuka**

**a. Deferred credit guarantee income**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	3,781,249	3,212,185	Credit
<i>Suretyship</i>	16,312	23,547	<i>Suretyship</i>
	<b>3,797,561</b>	<b>3,235,732</b>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27. LIABILITAS KONTRAK JAMINAN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**b. Cadangan klaim**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit <i>Suretyship</i>	3,962,292	3,370,531	<i>Credit Suretyship</i>
	<u>66,514</u>	<u>60,022</u>	
	<b>4,028,806</b>	<b>3,430,553</b>	

Liabilitas kontrak penjaminan merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

**27. LIABILITIES FOR FINANCIAL GUARANTEE CONTRACTS (continued)**

**b. Claim provision**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit <i>Suretyship</i>	3,962,292	3,370,531	<i>Credit Suretyship</i>
	<u>66,514</u>	<u>60,022</u>	
	<b>4,028,806</b>	<b>3,430,553</b>	

*The guarantee contract liabilities is the reserve of claim that might occur in the coming years onto the guarantee that has not mature yet.*

**28. PINJAMAN DARI PEMERINTAH**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Utang rekening dana investasi	941,900	942,650	<i>Investment fund account loan</i>
Utang penerusan pinjaman	<u>40,588</u>	<u>309,804</u>	<i>Subsidiary loan</i>
	<b>982,488</b>	<b>1,252,454</b>	

**a. Utang rekening dana investasi (RDI)**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dengan No. RDI/327/DP3/1997 untuk pinjaman subordinasi RDI tanggal 16 Desember 1997 disepakati bahwa Perusahaan mendapat pinjaman subordinasi dalam rangka stabilisasi pasar modal dan pasar uang sejumlah maksimum Rp 250.000.000.000 (nilai penuh). Pinjaman ini dikenakan beban administrasi sebesar 20% per tahun, beban komitmen sebesar 0,25% serta denda pokok 4% per tahun dari yang tertunggak dan denda biaya administrasi sebesar 24% per tahun dari yang tertunggak. Jangka waktu pinjaman adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian pinjaman tersebut. Pada saat jatuh tempo Perusahaan gagal melunasi pinjaman RDI tersebut.

Perusahaan mengajukan gugatan hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 6 September 2005 kepada Saudara Sudjiono Timan, mantan Direktur Utama Perusahaan pada saat itu dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, masing-masing sebagai Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan penggunaan dana pinjaman RDI dengan pokok pinjaman sebesar Rp 250.000.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 18 Oktober 2005, Majelis Hakim memberikan putusan provisi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan seluruh provisi Perusahaan; dan
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman No. RDI/327/DP3/1997 tertanggal 16 Desember 1997 antara Perusahaan yang diwakili oleh Saudara Sudjiono Timan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk dana sebesar Rp 250.000.000.000 (nilai penuh) untuk sementara tidak dapat dilaksanakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum atas perkara ini.

**28. GOVERNMENT LOANS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Utang rekening dana investasi	941,900	942,650	<i>Investment fund account loan</i>
Utang penerusan pinjaman	<u>40,588</u>	<u>309,804</u>	<i>Subsidiary loan</i>
	<b>982,488</b>	<b>1,252,454</b>	

**a. Investment fund account payable (RDI)**

*Based on Loan Agreement No. RDI/327/DP3/1997 between the Government of the Republic of Indonesia and the Company, in relation to a subordinated loan RDI dated December 16, 1997, it has been agreed that the Company will obtain a subordinated loan in relation with the stabilization of the capital and money markets for a maximum amount of Rp 250,000,000,000 (full amount). This loan is charged with administration fee of 20% per annum, commitment fee of 0.25% and principal penalty of 4% per annum from the outstanding balance and penalty on the administration fee of 24% per annum from the outstanding balance. The loan period is 3 (three) years from the signing date of the loan agreement. At due date the Company defaulted on the RDI loan.*

*The Company filed a civil case in South Jakarta State Court with register No. 889/Pdt.G/2005/PN-.Jak.Sel dated September 6, 2005 against Mr. Sudjiono Timan, the former President Director of the Company and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia as the Defendant and Auxiliary Defendant, respectively, in relation with the utilization of the RDI loan with principal amount of Rp 250,000,000,000 (full amount). On October 18, 2005, the Court of Justice made decision provision as follows:*

- 1. To accept and grant all the Company's provision; and*
- 2. Announce that the Loan Agreement No. RDI/327/DP3/1997 dated December 16, 1997 between the Company as represented by Mr. Sudjiono Timan and the Department of Finance of the Republic of Indonesia for the fund amounting to Rp 250,000,000,000 (full amount) in the time being could not be executed until there is a binding legal decision on this case.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PINJAMAN DARI PEMERINTAH** (lanjutan)

**a. Utang rekening dana investasi (RDI) (lanjutan)**

Pada 17 Februari 2006, Perusahaan mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan No. 889/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. Pencabutan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Februari 2006.

Pada tahun 2007 Perusahaan mengajukan restrukturisasi utang ini. Pada tanggal 14 Mei 2007, Perusahaan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi No. 38/PB.4.13/PTBPUI/0507, terkait atas restrukturisasi pinjaman RDI. Sejak 31 Desember 2006, selama proses restrukturisasi berlangsung, Perusahaan tidak dikenakan bunga pinjaman.

Pada tanggal 2 Februari 2012, Perusahaan mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa objek hasil rampasan aset Sudjiono Timan telah dilaksanakan lelang dengan nilai sebesar Rp 55.717.200.000 (nilai penuh). Perusahaan juga mengajukan revisi permohonan restrukturisasi RDI dengan skema sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara (PMN) atas utang pokok RDI senilai Rp 250.000.000.000 (nilai penuh); dan
2. Penjadwalan kembali utang bunga RDI sebesar Rp 950.651.929.000 (nilai penuh), dilakukan cicilan sampai dengan tahun 2026.

Pada tanggal 5 November 2012, Menteri Keuangan RI telah menyetujui permohonan restrukturisasi RDI yang diajukan Perusahaan dan kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Perubahan (Amendemen) atas Perjanjian RDI pada tanggal 28 Desember 2012. Namun demikian, pelaksanaan restrukturisasi masih menunggu adanya Peraturan Pemerintah mengingat pola restrukturisasi utang RDI adalah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Pada tanggal 21 Januari 2013, Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-28/MBU/2013 meminta kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar dapat dialokasikan sebesar Rp 250.000.000.000 (nilai penuh) sebagai tambahan PMN di Perusahaan.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. GOVERNMENT LOANS** (continued)

**a. Investment fund account payable (RDI) (continued)**

*On February 17, 2006, the Company filed a letter for revocation of the case No. 889/Pdt.G/2005 PN.Jak.Sel. The South Jakarta State Cour accepted the revocation on February 21, 2006.*

*In 2007, the Company has been in process of restructuring for this loan. On May 14, 2007, the Company and the Department of Finance of the Republic of Indonesia, signed the Official Report of Reconciliation No. 38/PB.4.13/PTBPUI/0507, regarding to the RDI loan restrukturization. Started from December 31, 2006, during the restructuring process, the Company has not been charged of any interest loan.*

*On February 2, 2012, the Company sent a letter to the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of Republic of Indonesia stating that the assets confiscated from Sudjiono Timan has been auctioned off in the amount of Rp 55,717,200,000 (full amount). The Company also proposed a revision on RDI restructuring with the following scheme:*

1. *State Capital Investment (PMN) on RDI principal amounting to Rp 250,000,000,000 (full amount); and*
2. *Rescheduling of RDI interest payable amounting to Rp 950,651,929.000 (full amount), to be installed until year 2026.*

*On November 5, 2012, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia has approved the Company proposed restructuring of the RDI and both parties have signed an Amendment on the RDI Agreement on December 28, 2012. However, the implementation of the restructuring is still waiting for Government Regulation considering debt restructuring scheme of RDI is through the State Capital Investment (PMN).*

*On January 21, 2013, the Minister of State-Owned Enterprise through his letter No. S-28/MBU/2013 has asked the Minister of Finance c.q. Directorate General of Treasury to allocate the outstanding principal of Rp 250,000,000,000 (full amount) as additional PMN to the Company.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PINJAMAN DARI PEMERINTAH (lanjutan)**

**a. Utang rekening dana investasi (RDI) (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Tagihan No. S-7142/PB/2014 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2014, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI meminta Perusahaan untuk melakukan pembayaran tunggakan bunga dan denda sebesar Rp 30.000.000.000 (nilai penuh) yang seharusnya jatuh tempo tanggal 16 Desember 2014.

Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perusahaan menyampaikan pandangan terkait Surat Tagihan Kewajiban No. S-7142/PB/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bahwa Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas kewajiban RDI tahun 2012, 2013, 2014 sampai dengan 2018 dengan mempertimbangkan beberapa dokumen sebagai berikut:

- Surat Menteri Keuangan No.S-92/MK.6/2010 tanggal 13 April 2010;
- Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung No.434K/3 Desember 2004 berupa uang tunai sebesar Rp 55.717.200.000 (nilai penuh);
- Surat direksi BPUI No.013/HS/BPUI/II/2012 tanggal 2 Februari 2012;
- Surat No.S-352/PB.4/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang menyatakan perhitungan pembayaran utang belum dapat dilakukan atau belum mengurangi saldo utang BPUI;
- Persetujuan Menteri Keuangan atas proses restrukturisasi berdasarkan surat No.S- 792/MK.05/2012 tanggal 5 November 2012 dimana kewajiban pokok sebesar Rp 250.000.000.000 (nilai penuh) akan dijadikan penyertaan modal negara (PMN) dan kewajiban lainnya sebesar Rp 950.651.929.000 (nilai penuh) akan dicicil secara berjenjang selama 20 tahun (tahun 2007 sampai dengan 2026) termasuk masa tenggang 5 tahun (2007 sampai dengan 2011).

Pada tanggal 3 Desember 2014 Perseroan kembali menyampaikan surat No. 58/DSW/BPUI/XII/2014 kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi RI tentang penyelesaian kewajiban tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan total sebesar Rp 55.717.200.000 (nilai penuh) selambat-lambatnya pada akhir tahun 2017, dengan cara melakukan penjualan asset seluas 2008 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Teuku Cik Ditiro No. 23 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. GOVERNMENT LOANS (continued)**

**a. Investment fund account payable (RDI) (continued)**

*Based on the Collection Letter No. S-7142 /PB/ 2014 issued on October 28, 2014, by the Directorate General of Treasury Ministry of Finance RI has asked the Company to make payments on outstanding interest and penalties amounting to Rp 30,000,000,000 (full amount) which should be due on December 16, 2014.*

*On October 30, 2014, the Company has expressed their view on the related Collection Letter No. S-7142 /PB/2014 dated October 28, 2014 noting that the Company has no obligation to make payments on the outstanding RDI loan in 2012, 2013, 2014 through to 2018 with consideration to the existing document as follows:*

- *Letter of the Minister of Finance No. S-92 /MK.6/2010 dated April 13, 2010;*
- *Implementation of the Supreme Court ruling No.434K / December 3, 2004 in the form of cash of Rp 55,717,200,000 (full amount);*
- *Letter of directors BPUI No.013/HS/BPUI/II/2012 dated February 2, 2012;*
- *Letter No. S-352/PB.4/2012 dated February 29, 2012 which states the calculation of debt payments can not be done or not reducing debt balances BPUI;*
- *Approval of the Minister of Finance on the restructuring process by letter No. S- 792/MK.05/2012 dated November 5, 2012 in which the principal obligation of Rp 250,000,000,000 (full amount) will be converted as the state capital participation (PMN) and other liabilities amounting to Rp 950,651,929,000 (full amount) will be repaid within 20 years (2007 until 2026) including a grace period of 5 years (2007 until 2011).*

*On December 3, 2014 the Company submit a letter No. 58/DSW/BPUI/XII/2014 to Director System Investment Management RI regarding the repayment period of liabilities within 2012 to 2017 amounting to Rp 55,717,200,000 (full amount) at the latest by the end of 2017, this settlement will be done by selling the asset of 2008 m<sup>2</sup> which is located on jalan Teuku Cik Ditiro No. 23 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PINJAMAN DARI PEMERINTAH (lanjutan)**

**a. Utang rekening dana investasi (RDI) (lanjutan)**

Selanjutnya, Pemerintah melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2015, menyampaikan perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2015 yang diantaranya mengalokasikan pembiayaan anggaran dana investasi pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa BUMN termasuk BPUI yaitu menyetujui adanya penambahan modal sebesar Rp 250.000.000.000 (nilai penuh). Kemudian melalui surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-924/MK.06/2015 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 20 November 2015 dengan mengacu kepada Undang-Undang No.3 Tahun 2015 Penyertaan Modal Negara kepada beberapa BUMN, Presiden diminta untuk memberikan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 133 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan nilai penambahan sebesar Rp 250.000.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari konversi pokok pinjaman Rekening Dana Investasi, Perusahaan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai proses Restrukturisasi Utang Rekening Dana Investasi tersebut.

**Utang bunga rekening dana investasi ("RDI")**

Utang bunga RDI merupakan utang Perusahaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam hubungannya dengan utang subordinasi dan saldoanya terdiri dari denda utang pokok dan beban administrasi akibat Perusahaan lalai untuk melunasi pinjaman RDI ini pada saat jatuh tempo.

Pada tahun 2020 dan 2019, Perusahaan melakukan pembayaran atas sebagian kewajiban ini sebesar Rp 750 dan Rp 1.500.

**b. Utang penerusan pinjaman**

Utang tersebut berupa pinjaman berasal dari dana Export-Import Bank of Japan ("JEXIM") (kini operasinya diambil alih oleh Japan Bank for International Cooperation) melalui Pemerintah Republik Indonesia dengan pagu kredit sebesar JPY 21.000.000.000 (nilai penuh) yang hasilnya kemudian diteruskan oleh Perusahaan kepada BAV. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 6,50% per tahun. Jatuh tempo pembayaran pertama cicilan pokok adalah pada bulan Februari 2000 sebesar 1/22 dari jumlah terutang pada tanggal 31 Desember 1999. Jatuh tempo pembayaran terakhir adalah tanggal 15 Juli 2010.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. GOVERNMENT LOANS (continued)**

**a. Investment fund account payable (RDI) (continued)**

*Furthermore, the Government through Act No.3 year 2015 has submitted amendments to the Act No.27 year 2014 regarding Funding Under State Budget year 2015 which among others allocate the budget for Government Investment in the form of State Capital Investment (PMN) to several State Owned Companies including BPUI which approved the capital increase amounting to Rp 250,000,000,000 (full amount). Later, through the letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.S-924/MK.06/2015 addressed to the President of the Republic of Indonesia on 20 November 2015 by referring to Act No.3 Year 2015 regarding the State Capital investment to several State-Owned Companies, the President was asked to approve the draft of Government Regulation.*

*Based on the Government Regulation No. 133 Year 2015, dated December 28, 2015, regarding the additional of State Capital Investment of the Republic of Indonesia into the capital shares of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, amounting to Rp 250,000,000,000 (full amount) which were converted from Investment Fund Account Loan, the Company has already get an approval from Government of the Republic of Indonesia regarding the restructuring process of the Investment Fund Account.*

**Investment fund account ("RDI") interest payable**

*The interest payable on RDI is payable to the Government of the Republic of Indonesia in relation to the subordinated loans and the balance consists of penalties and administration fees charged to the Company for its failure to repay the related loans on the due date.*

*In 2020 and 2019, the Company partially paid this loan amounting to Rp 750 and Rp 1,500, respectively.*

**b. Subsidiary loan**

*The loan was obtained from Export-Import Bank of Japan ("JEXIM") (now its operations is taken over by Japan Bank for International Cooperation) through the Government of the Republic of Indonesia that involves a loan facility amounting to JPY 21,000,000,000 (full amount) of which proceeds were channeled by the Company to BAV. The subsidiary loan bears interest rate at 6.50% per annum. The first installment of this subordinated loan was due on February 2000 amounted to 1/22 of the outstanding loan as of December 31, 1999. The final repayment date was due on July 15, 2010.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PINJAMAN DARI PEMERINTAH (lanjutan)**

**b. Utang penerusan pinjaman (lanjutan)**

Utang ini disajikan sebagai utang penerusan pinjaman sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan No. S-1158/KMK.17/1997, tanggal 15 Desember 1997.

Pada tanggal 15 Februari 2007, entitas anak, BAV, telah membayar bunga terutang atas pinjaman dana JEXIM setelah restrukturisasi sebesar Rp 3.903.604.000 (nilai penuh) kepada PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada tanggal 13 Juni 2008, Perusahaan dan Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit No. AMA-322/SLA-919/DP3/2008. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5,50% per tahun yang wajib dibayar setiap enam bulan dengan beban komitmen atas pagu kredit yang belum dicairkan sebesar 0,15% per tahun. Pokok pinjaman wajib dibayar setiap tanggal 15 Februari dan 15 Agustus setiap tahunnya dan pembayaran pertama dilakukan pada 15 Februari 2009. Jatuh tempo pembayaran kembali adalah pada tanggal 15 Agustus 2021.

Pada tahun 2014, BAV telah membayar pinjamannya sebesar Rp 17.867.737.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 17 Februari 2014, Perusahaan telah mengajukan permohonan penjadwalan kembali pinjaman ini kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Permohonan penjadwalan ulang ini kemudian diajukan kembali oleh pihak manajemen Perusahaan pada tanggal 19 Agustus 2014. Selain mengajukan permohonan restrukturisasi, manajemen juga mengajukan permohonan agar dapat dilakukan penghentian perhitungan kewajiban pokok dan kewajiban bunga/denda pada tanggal *cut off date* yang disepakati bersama.

Menanggapi permohonan tersebut, melalui surat tanggal 13 November 2014, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah meminta Perusahaan untuk melampirkan laporan hasil uji tuntas (*due diligence*) baik secara keuangan maupun legal paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Menanggapi permintaan akan laporan hasil uji tuntas dan jangka waktu yang diberikan kepada manajemen BPUI, maka melalui surat No.027/HG/BPUI/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 manajemen Perusahaan telah meminta perpanjangan waktu untuk penyelesaian hasil uji tuntas tersebut paling lambat akhir Januari 2015.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**28. GOVERNMENT LOANS (continued)**

**b. Subsidiary loan (continued)**

*This loan is presented as a subsidiary loan in accordance with a letter from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia c.q. Directorate General of Financial Institutions No. S-1158/KMK.17/1997 dated December 15, 1997.*

*On February 15, 2007, the subsidiary, BAV, has paid the interest payable of JEXIM loan after the restructuring amounting to Rp 3,903,604,000 (full amount) to PT Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*

*On June 13, 2008, the Company and the Government of the Republic of Indonesia entered into a Loan Renewal Agreement Deed No. AMA- 322/SLA-919/DP3/2008. The loan is subjected to interest fee of 5.50% per annum to be paid with semi annually with commitment fees over the unused facility of 0.15% per annum. The loan principal has to be paid on February 15 and August 15 in every year. The first installment of this loan was due on February 15, 2009. The due date for the repayment of such loan will be on August 15, 2021.*

*In year 2014, BAV has paid such loan amounting to Rp 17,867,737,000 (full amount).*

*On February 17, 2014, the Company have applied for loan rescheduling to the Director General of Treasury, Ministry of Finance Republic of Indonesia. The rescheduling petition was then resubmitted by the Company management on August 19, 2014. In addition to applying for restructuring, management also filed a petition to freeze the principal obligation and interest/penalties calculation based on the cut-off date that to be mutually agreed.*

*In response to this request, the Ministry of Finance Republic of Indonesia through its letter dated November 13, 2014, has asked the Company to perform and complete the due diligence report for financial and legal aspect areas by no later than December 31, 2014.*

*In response to the request for due diligence and the timeline given to the BPUI management, then through their letter No.027/HG/BPUI/XII/2014 dated December 18, 2014, Company management has requested an extension of timeline for the completion and result of the due diligence by the end of January 2015.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**28. PINJAMAN DARI PEMERINTAH** (lanjutan)

**b. Utang penerusan pinjaman** (lanjutan)

Pada tanggal 6 Maret 2015 manajemen telah melaporkan hasil dari *financial due diligence* kepada pihak Kementerian Republik Indonesia. Sedangkan atas hasil *legal due diligence* telah disampaikan terlebih dahulu pada tanggal 30 Januari 2015.

Melalui surat perusahaan No.014/DSW/ BPUI/ III/ 2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditujukan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai permohonan penjadwalan kembali (restrukturisasi kedua) pinjaman SLA-919/DP3/1996 dengan skema sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali jangka waktu perjanjian pinjaman selama 20 tahun terhitung sejak posisi *cut-off* 31 Desember 2013, sehingga akan jatuh tempo pada tahun 2033;
2. Grace period atas pokok pinjaman selama 10 tahun sehingga pembayaran pokok dimulai pada Februari 2024 sampai dengan Agustus 2033;
3. Perubahan tingkat suku bunga yang semula sebesar 5,5% per tahun menjadi 1% pertahun.

Atau berupa konversi hutang menjadi penyertaan modal negara dan/ atau skema lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku kreditur.

Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai proses restrukturisasi utang penerusan pinjaman tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, dengan nilai penambahan sebesar Rp 268.017.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari konversi piutang pokok negara berupa *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) pada Perusahaan (lihat catatan 33).

Jumlah utang bunga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 40.588 dan Rp 41.787.

**29. UTANG BANK**

	<b>2020</b>
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)	123,887
Pihak ketiga	38,813
	<b>162,700</b>

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**28. GOVERNMENT LOANS** (continued)

**b. Subsidiary loan** (continued)

*On March 6, 2015 management has submitted the results of the financial due diligence to the Ministry of the Republic of Indonesia. While the results of the legal due diligence was earlier submitted on January 30, 2015.*

*Through the Company's Letter No.014/DSW/ BPUI/ III/ 2015 dated March 10, 2015, which addressed to the Director of Investment Management System of Directorate General of Treasury Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding the request for rescheduling (second rescheduling) loan SLA-919/ DP3/1996 with the following scheme:*

1. Rescheduling term of the loan agreement for 20 years, starting from the position of the *cut-off* December 31, 2013, which will mature in 2033;
2. Grace period on principal for 10 years, therefore the principal repayment will begin in February 2024 until August 2033;
3. Changes in interest rate which originally amounting to 5.5% per annum to become 1% per annum.

*Or in the form of debt conversion into equity of the state and/or other schemes established by the Ministry of Finance as the creditor.*

*The company has obtained approval from the Government of the Republic of Indonesia regarding the process of debt restructuring based on Government Regulation Republic Indonesia No. 67/2020 dated 20 November 2020 regarding the addition of State Capital Investment of the Republic of Indonesia into the capital shares of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, amounting to Rp 268,017,000,000 (full amount) originated from the Company's Subsidiary Loan Agreement conversion (SLA). (see note 33).*

*The interest payable as of December 31, 2020 and 2019 are amounting to Rp 40,588 and Rp 41,787, respectively.*

**29. BANK LOANS**

*Related parties (see note 46)  
Third parties*

	<b>2019</b>
	159,112
	90,022
	<b>249,134</b>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. UTANG BANK (lanjutan)**

Informasi yang signifikan terkait dengan utang bank pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**29. BANK LOANS (continued)**

*Significant information related to bank loans as at 31 December 2020, are as follows:*

Kreditur/ <i>Lender</i>	Fasilitas/ <i>Facility</i>	Jumlah fasilitas/ <i>Total facility</i>	Saldo pokok pinjaman/ <i>Principal balance</i>	Periode pinjaman/ <i>Loan term</i>	Tingkat suku bunga per tahun/ <i>Annual interest rate</i>	Jaminan/ <i>Guarantee</i>	Pembatasan/ <i>Covenant</i>
<b>PT Bahana Artha Ventura</b>							
PT Bank Syariah Mandiri	Mudharabah -Wa'ad	54.027	13.601	24 Bulan/ <i>Months</i> 30 Agustus/ <i>August</i> 2019- 2021	Porsi Bagi hasil : <i>Profit Sharing Portion: 10,50%</i> per Tahun/ <i>Annum</i>	Tagihan Piutang Group kepada PPU/ CPPU atas pembelian yang bersumber dari BSM/Company Receivable from BSM.	Menjaga rasio non performing loan (NPL) maksimum 5%/ <i>Maintain NPL maximum 5%.</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit modal kerja/ <i>Working capital loan</i>	200.000	67.719	53 Bulan/ <i>Months</i> 10 Februari/ <i>February</i> 2017 - 10 July/ <i>July</i> 2021 - (KMK I) dan 51 Bulan/ <i>Month</i> s 24 September/ <i>September</i> 2018 - 24 Desember / <i>December</i> 2022 (KMK II)	a. KMK I 9,75% per Tahun/ <i>Annum</i> b. KMK II 9,50% per Tahun/ <i>Annum</i>	Fidusia Tagihan, Sebidang tanah dan Bangunan (SHGB 2525/Gondangdia) seluas 2.008 m <sup>2</sup> atas nama Perseroan dengan hak tanggungan Rp 100.000.000/ Fiducia Invoice, land and building (SHGB 2525/Gondangdia) owned by the Company with insurance coverage Rp 100.000.000.	Menjaga rasio NPL maksimum 5%/ <i>Maintain NPL maximum 5%.</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kredit modal kerja/ <i>Working capital loan</i>	49.700	28.707	12 Bulan / <i>Months</i> 11 Mei/ <i>May</i> 2020 - 11 Mei / <i>May</i> 2021	6,35% per tahun / <i>Annum</i>	Bilyet Deposito IDR dengan no Bilyet DD 1017049 ; DD 1017050 ; DD 1017051 ; DD 1017052 ; DD 1017053/Securitis deposit in IDR No. DD 1017049 ; DD 1017050 ; DD 1017051 ; DD 1017052 DD 1017053	Menjaga rasio NPL maksimum 5%/ <i>Maintain NPL maximum 5%.</i>
Bank Ganeshaa	Fixed Loan	40.000	29.859	36 Bulan/ <i>Months</i> 27 Desember/ <i>December</i> 2019 - 27 Desember/ <i>December</i> 2022	10,5% per tahun/ <i>Annum</i>	Fidusia piutang lancar 100%/ <i>100% of Fiducia current receivables</i>	Menjaga rasio NPL maksimum 5%/ <i>Maintain NPL maximum 5%.</i>

Seluruh pinjaman yang diperoleh diperuntukkan untuk mendanai modal kerja Grup.

*All borrowings are intended to finance the working capital of the Group.*

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman bank.

*At each reporting date, the Group has complied with all covenants of its bank loans.*

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. UTANG USAHA DAN UTANG LAIN-LAIN**

**30. ACCOUNT PAYABLES AND OTHER PAYABLES**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Utang usaha	966,049	537,454	<i>Account payables</i>
Utang lain-lain	7,271,193	4,553,421	<i>Other payables</i>
	<b><u>8,237,242</u></b>	<b><u>5,090,875</u></b>	
<b>a. Utang usaha</b>			<b><i>a. Account payables</i></b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Utang nasabah	607,497	165,652	<i>Customers payables</i>
Utang komisi asuransi	204,671	222,866	<i>Insurance commissions payables</i>
Utang komisi agen	39,419	41,693	<i>Agents commissions payables</i>
Utang fee terkait penjaminan kredit	23,357	19,770	<i>Guarantees payables</i>
Utang lembaga kliring dan penjaminan	13,079	5,262	<i>Clearing and guarantee institutions payables</i>
Utang atas efek	2,068	13,837	<i>Securities payables</i>
Utang Koperasi Bahana	131	1,076	<i>Payable from Koperasi Bahana</i>
Utang usaha lain-lain	75,827	67,298	<i>Other payables</i>
	<b><u>966,049</u></b>	<b><u>537,454</u></b>	
<b>b. Utang lain</b>			<b><i>b. Other payables</i></b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Titipan premi dan imbal jasa penjaminan	1,976,762	357,432	<i>Premium and guarantee fee income deposits</i>
Uang jaminan	1,541,588	1,358,332	<i>Cash collateral</i>
Pinjaman non-bank	1,302,175	877,870	<i>Non-bank loan</i>
Liabilitas kontrak penjaminan syariah	784,755	561,877	<i>Sharia guarantee contract liability</i>
Liabilitas kontrak asuransi syariah	772,617	532,282	<i>Sharia insurance contract liability</i>
Liabilitas sewa	147,395	-	<i>Lease liability</i>
Utang promes	14,553	14,343	<i>Promissory notes</i>
Utang zakat	4,210	3,603	<i>Zakat payables</i>
Utang bunga	2,508	2,472	<i>Interest payables</i>
Utang lainnya	724,630	845,210	<i>Other payables</i>
	<b><u>7,271,193</u></b>	<b><u>4,553,421</u></b>	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh nilai tercatat utang usaha berdenominasi Rupiah.

*As at 31 December 2020 and 2019, all the carrying amount of the Group's trade payables were denominated in Rupiah.*

**31. AKRUAL**

**31. ACCRUALS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Beban karyawan	635,735	573,041	<i>Employee expenses</i>
Beban umum dan administrasi	108,246	126,816	<i>General and administrative expenses</i>
Beban operasional	97,999	69,927	<i>Operating expenses</i>
Beban kantor	54,562	20,397	<i>Office expenses</i>
Imbal jasa profesional	43,465	2,719	<i>Professional fees</i>
Beban penelitian dan pengembangan	30,125	29,217	<i>Research and development expenses</i>
Beban pemasaran	12,538	6,992	<i>Marketing expenses</i>
Lainnya	189,038	80,122	<i>Others</i>
	<b><u>1,171,708</u></b>	<b><u>909,231</u></b>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**32. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya	997,308	881,315	<i>Pension and other post-retirement benefits</i>
Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan	140,502	368,905	<i>Pension health facilities benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>191,022</u>	<u>131,000</u>	<i>Other long-term employee benefits</i>
	<u>1,328,832</u>	<u>1,381,220</u>	

Imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar dan program penghargaan pengabdian.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan menggunakan metode "Projected Unit Credit", sedangkan untuk Entitas Anak, liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen PT Padma Radya Aktuaria, Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits ("S&M") (sebelumnya bernama PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), Kantor Konsultan Aktuaria Muh. Imam Basuki dan Rekan (KIS Aktuaria), Prima Aktuaria, Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, Fsa & Rekan (KKGD), dan PT Sentra Jasa Aktuaria dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berdasarkan laporan aktuaris independen untuk Perseroan dan Entitas Anak, asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

**32. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES**

*The employee benefit liabilities consists of:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya	997,308	881,315	<i>Pension and other post-retirement benefits</i>
Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan	140,502	368,905	<i>Pension health facilities benefits</i>
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>191,022</u>	<u>131,000</u>	<i>Other long-term employee benefits</i>
	<u>1,328,832</u>	<u>1,381,220</u>	

*Other long-term employee benefits are in the form of long services leave and a long service award program.*

*The liability for employee benefits as at 31 December 2020 and 2019 are calculated by an independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan using the "Projected Unit Credit" method, whilst for Subsidiaries, the liability for employee benefits as at 31 December 2020 and 2019 are calculated by an independent actuary, PT Padma Radya Aktuaria, Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits ("S&M") (previously PT Dayamandiri Dharmakonsilindo), Kantor Konsultan Aktuaria Muh. Imam Basuki dan Rekan (KIS Aktuaria), and Prima Aktuaria, Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, Fsa & Rekan (KKGD), and PT Sentra Jasa Aktuaria, using the "Projected Unit Credit" method.*

*Based on the independent actuary report for the Company and Subsidiaries, the actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Usia pensiun	55-56 tahun/years	55-56 tahun/years	<i>Pension age</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	4.00% - 10.00%	6.00% - 10.00%	<i>Salary incremental rate per annum</i>
Tingkat diskonto per tahun	4.75% - 8.00%	6.00% - 8.10%	<i>Discount rate per annum</i>
Tingkat inflasi kesehatan	11.00%	11.00%	<i>Health inflation rate</i>
Tingkat inflasi emas	8.00%	8.00%	<i>Gold inflation rate</i>
Tingkat imbal hasil	7.00%	-	<i>Yield rate</i>
Tingkat mortalitas	TMI 2011 & TMI 2019 1 - 10% dari tingkat mortalita/ 1-10% of mortality rate	TMI 1999 & 2011 1 - 10% dari tingkat mortalita/ 1-10% of mortality rate	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat tetap	0% - 5% tergantung usia/0 - 5% depending on age	0% - 5% tergantung usia/0 - 5% depending on age	<i>Disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri			
Tingkat pengembalian investasi DPLK	6.00%	6.00%	<i>Resignation rate</i> <i>Return on investment of DPLK</i>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**32. LIABILITAS IMBALAN KERJA** (lanjutan)

Aset program ditempatkan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT BNI Life Insurance.

a. Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya

Mutasi imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya bersih adalah sebagai berikut:

	2020			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar asset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations	
Saldo awal	2,171,625	(1,393,249)	778,376	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	120,141	(12,947)	107,194	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu - vested	12,911	-	12,911	<i>Past service cost - vested</i>
Beban/(penghasilan) bunga	172,026	(70,235)	101,791	<i>Interest expense/(income)</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurement:</i>
- Imbal hasil atas aset program	-	(55,937)	(55,937)	<i>Return on plan assets - Change in -</i>
- Perubahan asumsi demografi	8,730	-	8,730	<i>demographic assumption</i>
- Perubahan asumsi keuangan	84,204	-	84,204	<i>Change in financial assumption -</i>
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	12,989	-	12,989	<i>Experience adjustment - on obligation</i>
Mutasi transfer in/out kewajiban	120	-	120	<i>Liability transfer in/out mutation</i>
Liabilitas penyesuaian	3,108	-	3,108	<i>Adjustment liability</i>
Iuran	-	(111,909)	(111,909)	<i>Contribution paid</i>
Imbalan yang dibayar	(179,544)	132,122	(47,422)	<i>Benefit paid</i>
	2,406,310	(1,512,154)	894,155	
Cadangan kerugian penurunan atas nilai aset program	-	103,153	103,153	<i>Allowance for impairment losses of plan assets</i>
Saldo akhir	2,406,310	(1,409,001)	997,308	<i>Ending balance</i>

	2019			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar asset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations	
Saldo awal	1,790,375	(1,307,504)	482,871	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	99,191	(15,334)	83,857	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu - vested	13	-	13	<i>Past service cost - vested</i>
Beban/(penghasilan) bunga	162,584	24,999	187,583	<i>Interest expense/(income)</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurement:</i>
- Imbal hasil atas aset program	-	(123,268)	(123,268)	<i>Return on plan assets -</i>
- Perubahan asumsi keuangan	259,738	-	259,738	<i>Change in financial assumption -</i>
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	10,729	-	10,729	<i>Experience adjustment - on obligation</i>
Iuran	-	(83,745)	(83,745)	<i>Contribution paid</i>
Imbalan yang dibayar	(151,005)	111,603	(39,402)	<i>Benefit paid</i>
	2,171,625	(1,393,249)	778,376	
Cadangan kerugian penurunan atas nilai aset program	-	102,939	102,939	<i>Allowance for impairment losses of plan assets</i>
Saldo akhir	2,171,625	(1,290,310)	881,315	<i>Ending balance</i>

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2020	2019	
Biaya jasa kini	107,194	83,857	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu - vested	12,911	13	<i>Past service cost - vested</i>
Beban bunga	103,280	187,836	<i>Interest expense</i>
	223,385	271,706	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**32. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

- a. Imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Imbal hasil atas aset program	(55,723)	(20,329)	<i>Return on plan assets</i>
Perubahan asumsi demografi	8,730	Change in demographic assumption	
Perubahan asumsi keuangan	84,204	259,738	<i>Change in financial assumption</i>
Penyesuaian pengalaman kewajiban	<u>12,989</u>	<u>10,729</u>	<i>Experience adjustment on obligation</i>
	<u>50,200</u>	<u>250,138</u>	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 18,46 tahun (2019: 19,19 tahun). (tidak diaudit)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Dalam 1 tahun	161,298	143,407
Antara 1 sampai 5 tahun	530,686	502,015
Antara 5 sampai 10 tahun	475,314	420,961
Lebih dari 10 tahun	<u>2,859,422</u>	<u>3,079,959</u>
	<u>4,026,720</u>	<u>4,146,342</u>

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pensiun dan pasca kerja lainnya untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

As at 31 December 2020, the weighted average duration of the defined benefit obligation is 18.46 years (2019: 19.19 years). (unaudited)

Expected maturity analysis of undiscounted pension and other post-retirement benefits is as follows: (unaudited)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Within 1 year	161,298	143,407	<i>Within 1 year</i>
Between 1 and 5 years	530,686	502,015	<i>Between 1 and 5 years</i>
Between 5 and 10 years	475,314	420,961	<i>Between 5 and 10 years</i>
More than 10 years	<u>2,859,422</u>	<u>3,079,959</u>	<i>More than 10 years</i>
	<u>4,026,720</u>	<u>4,146,342</u>	

The sensitivity of the pension and other post retirement benefits liabilities to changes in the principal actuarial assumptions are as follows: (unaudited)

**31 Desember/December 2020**

<b>Asumsi aktuaria</b>	<b>Penjelasan kemungkinan perubahan/ Reasonably Possible Change</b>	<b>Kewajiban imbalan pasti/ Defined benefit obligation</b>		<b>Actuarial assumption</b>
		<b>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</b>	<b>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</b>	
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(236,906)	194,965	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	205,195	(98,568)	<i>Salary growth rate</i>

**31 Desember/December 2019**

<b>Asumsi aktuaria</b>	<b>Penjelasan kemungkinan perubahan/ Reasonably Possible Change</b>	<b>Kewajiban imbalan pasti/ Defined benefit obligation</b>		<b>Actuarial assumption</b>
		<b>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</b>	<b>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</b>	
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(293,751)	362,213	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	(+/- 1%)	212,867	(154,440)	<i>Salary growth rate</i>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**32. LIABILITAS IMBALAN KERJA** (lanjutan)

b. Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan

Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Nilai kini kewajiban	197,250	416,977	<i>Present value of obligation</i>
Nilai wajar aset program	<u>(56,748)</u>	<u>(48,072)</u>	<i>Fair value of plan assets</i>
Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan	<u>140,502</u>	<u>368,905</u>	<i>Pension health facilities benefits</i>

Mutasi imbalan fasilitas kesehatan pensiunan bersih adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>			
	<b>Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation</b>	<b>Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets</b>	<b>Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations</b>	
Saldo awal	416,977	(48,072)	368,905	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	23,811	-	23,811	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu - vested	(264,242)	-	(264,242)	<i>Past service cost - vested</i>
Beban bunga	25,072	(4,832)	20,240	<i>Interest expense</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurement:</i>
- Imbal hasil atas aset	-	(60,749)	(60,749)	<i>Return on plan assets - Change in -</i>
- Perubahan asumsi demografi	8,684	-	8,684	<i>demographic assumption Change in -</i>
- Perubahan asumsi keuangan	16,801	-	16,801	<i>financial assumption</i>
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(20,035)	49,681	29,646	<i>Experience adjustment - on obligation</i>
Imbalan yang dibayar	<u>(9,818)</u>	<u>7,224</u>	<u>(2,594)</u>	<i>Benefit paid</i>
Saldo akhir	<u>197,250</u>	<u>(56,748)</u>	<u>140,502</u>	<i>Ending balance</i>

	<b>2019</b>			
	<b>Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation</b>	<b>Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets</b>	<b>Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations</b>	
Saldo awal	212,113	(94,125)	117,988	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	17,770	-	17,770	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	20,697	48,088	68,785	<i>Interest expense</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurement:</i>
- Imbal hasil atas aset	-	(5,725)	(5,725)	<i>Return on plan assets - Change in -</i>
- Perubahan asumsi keuangan	120,573	-	120,573	<i>financial assumption</i>
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	53,197	-	53,197	<i>Experience adjustment - on obligation</i>
Imbalan yang dibayar	<u>(7,373)</u>	<u>3,690</u>	<u>(3,683)</u>	<i>Benefit paid</i>
Saldo akhir	<u>416,977</u>	<u>(48,072)</u>	<u>368,905</u>	<i>Ending balance</i>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**32. LIABILITAS IMBALAN KERJA** (lanjutan)

b. Imbalan fasilitas kesehatan pensiunan (lanjutan)

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Biaya jasa kini	23,811	17,770	Current service cost
Biaya jasa lalu - vested	(264,242)	-	Past service cost - vested
Beban bunga	20,240	68,785	Interest expense
	<b>(220,191)</b>	<b>86,555</b>	

Jumlah yang diakui pada laba rugi komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Imbal hasil aset program	(60,749)	(5,725)	Return on plan assets
Perubahan asumsi demografi	8,684	-	Change in demographic assumption
Perubahan asumsi keuangan	16,801	120,573	Change in financial assumption
Penyesuaian pengalaman kewajiban	29,646	53,197	Experience adjustment on obligation
	<b>(5,618)</b>	<b>168,045</b>	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 37,82 tahun (2019: 38,99 tahun). (tidak diaudit)

The weighted average duration of the pension health facilities benefits liabilities at 31 December 2020 is 37.82 years (2019: 38.99 years). (unaudited)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

Expected maturity analysis of undiscounted pension health facilities benefits liabilities is as follows: (unaudited)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Dalam 1 tahun	12,045	10,739	Within 1 year
Antara 1 sampai 5 tahun	41,641	46,450	Between 1 and 5 years
Antara 5 sampai 10 tahun	28,225	41,616	Between 5 and 10 years
Lebih dari 10 tahun	324,800	735,137	More than 10 years
	<b>406,711</b>	<b>833,942</b>	

Sensitivitas liabilitas imbalan fasilitas kesehatan pensiunan untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

The sensitivity of pension health facilities benefits liabilities to changes in the principal actuarial assumptions are as follows: (unaudited)

	<b>31 Desember/December 2020</b>			
<b>Asumsi aktuaria</b>	Penjelasan kemungkinan perubahan/ <i>Reasonably Possible Change</i>	<b>Kewajiban imbalan pasti/ <i>Defined benefit obligation</i></b>		<b>Actuarial assumption</b>
		<b>Kenaikan/ <i>Increase</i></b>	<b>Penurunan/ <i>Decrease</i></b>	
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(29,907)	44,557	Discount rate
Tingkat inflasi kesehatan	(+/- 1%)	55,275	(27,113)	Health inflation rate

	<b>31 Desember/December 2019</b>			
<b>Asumsi aktuaria</b>	Penjelasan kemungkinan perubahan/ <i>Reasonably Possible Change</i>	<b>Kewajiban imbalan pasti/ <i>Defined benefit obligation</i></b>		<b>Actuarial assumption</b>
		<b>Kenaikan/ <i>Increase</i></b>	<b>Penurunan/ <i>Decrease</i></b>	
Tingkat diskonto	(+/- 1%)	(79,975)	116,542	Discount rate
Tingkat inflasi kesehatan	(+/- 1%)	123,161	(80,998)	Health inflation rate

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**32. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

c. Imbalan jangka panjang lainnya

Mutasi imbalan jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Saldo awal	131,000	107,322	<i>Beginning balance</i>
Jumlah yang dibebankan pada laba rugi	85,860	43,294	<i>Amount charged to profit or loss</i>
Imbalan yang dibayar	(25,838)	(19,616)	<i>Benefit paid</i>
Saldo akhir	<u>191,022</u>	<u>131,000</u>	<i>Ending balance</i>

Jumlah yang diakui pada laba rugi konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Biaya jasa kini	30,541	21,397	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu - vested	518	1,687	<i>Past service cost - vested</i>
Beban bunga	14,418	8,657	<i>Interest expense</i>
Pengukuran kembali yang diakui selama tahun berjalan	40,383	11,553	<i>Remeasurement recognised during the year</i>
	<u>85,860</u>	<u>43,294</u>	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 3,05 - 20,78 tahun (2019: 3,05 - 20,45 tahun). (tidak diaudit)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan jangka panjang lainnya yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Dalam 1 tahun	3,891	4,230	<i>Within 1 year</i>
Antara 1 sampai 5 tahun	28,752	20,549	<i>Between 1 and 5 years</i>
Antara 5 sampai 10 tahun	30,312	28,583	<i>Between 5 and 10 years</i>
Lebih dari 10 tahun	231,455	123,427	<i>More than 10 years</i>
	<u>294,410</u>	<u>176,789</u>	

**33. MODAL SAHAM, TAMBAHAN MODAL DISETOR, DAN EKUITAS MERGING ENTITIES**

Berdasarkan Akta Notaris No. 05, tanggal 8 Januari 2021, oleh Hadijah, S.H., susunan Pemegang Saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>2020</b>		
	Jumlah saham/ <i>Number of shares</i>	Percentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i>	Nilai/ <i>Amount</i>
Pemerintah Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.0002%	1
Saham Seri B	67,163,536	99.9998%	67,163,536
	<u>67,163,537</u>	<u>100.0000%</u>	<u>67,163,537</u>

**33. SHARE CAPITAL, ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND MERGING ENTITIES EQUITY**

*Based on Notarial Deed No. 05, on 8 January 2021, by Hadijah, S.H., the details of the Company's Shareholders as of December 31, 2020 are as follows:*

*Government of the Republic of Indonesia*  
*Series A Shares Dwiwarna*  
*Series B Shares*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. MODAL SAHAM, TAMBAHAN MODAL DISETOR,  
DAN EKUITAS MERGING ENTITIES (lanjutan)**

Sedangkan susunan Pemegang Saham pada tanggal 31 Desember 2019 dimuat pada Akta Notaris mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan No. 24, tanggal 11 Desember 2017 oleh Notaris Hadijah, S.H., adalah sebagai berikut:

	2019			<b>Government of the Republic of Indonesia</b>
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai/ Amount	
<b>Pemerintah Republik Indonesia</b>				<b>Series A Shares Dwiwarna</b>
Saham Seri A Dwiwarna	1	0,0004%	1	
Saham Seri B	272.499	99,9996%	272.499	
	<b>272.500</b>	<b>100,0000%</b>	<b>272.500</b>	<b>Series B Shares</b>

Sesuai dengan KMK RI No. 146/KMK.06/2020, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 60.623.019.459,595 (nilai penuh) atau 60.623.019 lembar saham ke dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Askrindo, Jamkrindo, Jasa Raharja, dan Jasindo dalam rangka membentuk holding asuransi dan penjaminan.

Pada 20 November 2020, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Notaris Hadijah, S.H., No. 98 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham sebesar Rp 268.017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 melalui konversi piutang pokok negara berupa *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) pada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman/SLA Nomor SLA-919/DP3/1996 tanggal 12 Desember 1996 sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Perjanjian Perubahan (Amandemen) Nomor AMA-322/SLA-919/DP3/2008 tanggal 13 Juni 2008; dan
- b. Perjanjian Perubahan (Amandemen) Nomor AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 2021 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0003515.

Pada 8 Januari 2021, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Akta Notaris Hadijah, S.H., No. 05 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham sebesar Rp 6.000.001 yang seluruhnya menjadi penambahan penyertaan modal Perseroan ke dalam modal saham PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Jaminan Kredit Indonesia. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2021 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0015270.

**33. SHARE CAPITAL, ADDITIONAL PAID-IN  
CAPITAL AND MERGING ENTITIES EQUITY  
(continued)**

Whereas the list of Company's Shareholders as of December 31, 2019 was stated in the Notarial Deed regarding Shareholders Resolution No. 24, on December 11, 2017, by Notary Hadijah S.H., are as follows:

In accordance with KMK RI No. 146/KMK.06/2020, the Government of Republic Indonesia injected a state equity participation of Rp 60,623,019,459,595 (full amount) or 60,623,019 number of shares into PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) originating from the transfer of all Republic of Indonesia's series B shares in Askrindo, Jamkrindo, Jasa Raharja, and Jasindo with the purpose of forming the insurance and guarantee holding.

On November 20, 2020, there was an amendment to the Company's Articles of Association by the Notarial Deed of Hadijah, SH, No. 98 regarding changes in authorized capital, issued and paid-up capital and share ownership of Rp268,017 originated from the State Budget for Fiscal Year 2020 through the conversion of the Indonesia's principal receivables of from the company's subsidiary loan agreement conversion based on the Subsidiary Loan Agreement/SLA No. SLA - 919/DP3/1996 dated December 12, 1996 as amended by:

- a. Amendment Agreement No. AMA-322/SLA-919/DP3/2008 dated June 13, 2008; and
- b. Amendment Agreement No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 dated December 13, 2019.

The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on January 6, 2021 through Decree No. AHU-AH.01.03-0003515.

On January 8, 2021, there was an amendment to the Company's Articles of Association by Notarial Deed of Hadijah, SH, No. 05 regarding changes in the authorized capital, issued and paid-in capital and share ownership of Rp 6,000,001, all of which is a Company's capital additional participation to PT Asuransi Kredit Indonesia and PT Jaminan Kredit Indonesia. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on January 12, 2021 through Decree No. AHU-AH.01.03-0015270.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. MODAL SAHAM, TAMBAHAN MODAL DISETOR,  
DAN EKUITAS MERGING ENTITIES (lanjutan)**

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas. Ekuitas dari Jasindo, Askrindo, Jasa Raharja dan Jamkrindo sebelum tanggal penggabungan disajikan sebagai "ekuitas merging entities" pada bagian ekuitas. Rincian aset bersih yang diakui sebagai "ekuitas merging entities" pada bagian ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Jasindo	1,186,843	1,311,837	Jasindo
Askrindo	6,751,347	6,538,764	Askrindo
Jasa Raharja	11,355,344	10,622,934	Jasa Raharja
Jamkrindo	8,678,060	8,416,569	Jamkrindo
Jumlah aset bersih	<u>27,971,594</u>	<u>26,890,104</u>	<i>Total net assets</i>

**34. PENDAPATAN PREMI ASURANSI - BERSIH**

**34. INSURANCE PREMIUM INCOME - NET**

	2020			
	Pendapatan premi asuransi bruto/Gross insurance premium income	Premi reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession premiums	(Kenaikan)/ penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan / (Increase)/ decrease in unearned premium reserves	
Kredit	7,096,379	(1,261,594)	(341,019)	5,493,766
Aneka	5,314,243	(1,884,890)	52,256	3,481,609
Tanggung gugat	4,179,547	(88,662)	31,139	4,122,024
Harta benda (properti)	1,238,863	(784,374)	32,189	486,678
Jiwa	1,166,891	(241,532)	(61,272)	864,087
<i>Suretyship</i>	714,733	(323,841)	(17,195)	373,697
<i>Energy offshore</i>	674,239	(652,831)	882	22,290
Kesehatan	330,620	(56,679)	(22,094)	251,847
Kendaraan bermotor	276,455	(23,949)	11,192	263,698
Rangka kapal	265,685	(135,680)	114,646	244,651
Rangka pesawat	226,685	(193,785)	7,278	40,178
Rekayasa	178,832	(125,916)	651	53,567
Pengangkutan	61,654	(9,613)	11,516	63,557
Satelit	59,294	(49,269)	1,167	11,192
Kecelakaan diri	31,182	(8,890)	25,358	47,650
<i>Energy onshore</i>	6,264	(3,432)	6,745	9,577
	<u>21,821,566</u>	<u>(5,844,937)</u>	<u>(146,561)</u>	<u>15,830,068</u>
	<b>2019</b>	<b>(Kenaikan)/ penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan / (Increase)/ decrease in unearned premium reserves</b>	<b>Pendapatan premi asuransi - bersih /Insurance premium income - net</b>	
	Pendapatan premi asuransi bruto/Gross insurance premium income	Premi reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession premiums	(Kenaikan)/ penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan / (Increase)/ decrease in unearned premium reserves	
Kredit	7,237,389	(1,323,351)	(1,501,092)	4,412,946
Aneka	5,656,134	(2,246,029)	(284,970)	3,125,135
Tanggung gugat	77,446	(94,681)	15,673	(1,562)
Harta benda (properti)	1,596,768	(982,681)	(5,395)	608,692
Jiwa	1,077,329	(226,804)	(98,324)	752,201
<i>Suretyship</i>	928,894	(450,513)	(50,603)	427,778
<i>Energy offshore</i>	683,110	(601,942)	3,817	84,985
Kesehatan	349,023	(56,894)	15,629	307,758
Kendaraan bermotor	486,346	(24,595)	(5,732)	456,019
Rangka kapal	215,483	(99,355)	313,194	429,322
Rangka pesawat	231,816	(189,651)	49,103	91,268
Rekayasa	312,382	(207,403)	4,339	109,318
Pengangkutan	78,824	(16,112)	2,115	64,827
Satelit	51,317	(39,790)	51,100	62,627
Kecelakaan diri	4,691,908	(14,546)	12,397	4,689,759
<i>Energy onshore</i>	32,952	(27,332)	3,200	8,820
	<u>23,707,121</u>	<u>(6,601,679)</u>	<u>(1,475,549)</u>	<u>15,629,893</u>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**34. PENDAPATAN PREMI ASURANSI - BERSIH  
(lanjutan)**

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

**34. INSURANCE PREMIUM INCOME - NET  
(continued)**

Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.

**35. PENDAPATAN PENJAMINAN - BERSIH**

**35. GUARANTEE INCOME - NET**

2020

	Imbal jasa penjaminan/ <i>Guarantee fee income</i>	Premi penjaminan ulang/ <i>Re-guarantee premiums</i>	Pendapatan penjaminan - bersih/ <i>Guarantee income - net</i>	
Kredit <i>Suretyship</i>	2,758,159 68,365	(253,708) (10,974)	2,504,451 57,391	Credit <i>Suretyship</i>
	<u>2,826,524</u>	<u>(264,682)</u>	<u>2,561,842</u>	
		2019		
Kredit <i>Suretyship</i>	2,215,676 97,935	(247,332) (21,052)	1,968,344 76,883	Credit <i>Suretyship</i>
	<u>2,313,611</u>	<u>(268,384)</u>	<u>2,045,227</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.

**36. BEBAN KLAIM ASURANSI - BERSIH**

**36. INSURANCE CLAIM EXPENSES - NET**

2020

	Beban klaim asuransi bruto/ <i>Gross insurance claim expenses</i>	Klaim reasuransi dan retrosesi/ <i>Reinsurance and retrocession claims</i>	Kenaikan/ (penurunan) estimasi klaim retensi sendiri/ <i>Increase/ (decrease) in estimated own retention claims</i>	Beban klaim asuransi - bersih/ <i>Insurance claim expenses - net</i>	
Kredit	3,087,064	(910,872)	444,020	2,620,212	Credit
Aneka	3,425,759	(685,516)	812,626	3,552,869	Miscellaneous
Tanggung gugat	2,328,035	(26,675)	(65,538)	2,235,822	Liability
Harta benda (properti)	782,793	(471,904)	(43,414)	267,475	Property
Jiwa	912,773	(173,952)	-	738,821	Life
<i>Suretyship</i>	444,550	(245,451)	369,133	568,232	<i>Suretyship</i>
<i>Energy offshore</i>	256,649	(243,276)	12,996	26,369	<i>Energy offshore</i>
Kesehatan	253,001	(46,774)	(8,026)	198,201	Health
Kendaraan bermotor	245,792	(13,001)	(469)	232,322	Vehicles
Rangka kapal	120,751	(73,602)	20,654	67,803	Marine hull
Rangka pesawat	67,127	(54,820)	(113)	12,194	Aviation
Rekayasa	92,866	(54,534)	(322,174)	(283,842)	Engineering
Pengangkutan	24,199	(4,063)	(1,132)	19,004	Marine cargo
Satelit	493,104	(470,023)	-	23,081	Satellites
Kecelakaan diri	118,665	(15,796)	(6,502)	96,367	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	2,628	(1,871)	10,878	11,635	<i>Energy onshore</i>
	<u>12,655,756</u>	<u>(3,492,130)</u>	<u>1,222,939</u>	<u>10,386,565</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**36. BEBAN KLAIM ASURANSI (lanjutan)**

**36. INSURANCE CLAIM EXPENSE (continued)**

	2019				
	Beban k asuransi bruto/ <i>Gross insurance claim expenses</i>	Klaim reasuransi dan retroesesi/ <i>Reinsurance and retrocession claims</i>	Kenaikan/ (penurunan) estimasi k laim retensi sendiri/ <i>Increase/ (decrease) in estimated own retention claims</i>	Beban k asuransi - bersih/ <i>Insurance claim expenses - net</i>	
Kredit	3,318,940	(1,053,747)	431,415	2,696,608	Credit
Aneka	2,590,768	(310,172)	145,187	2,425,783	Miscellaneous
Tanggung gugat	2,684,437	(21,365)	21,966	2,685,038	Liability
Harta benda (properti)	952,033	(665,711)	101,917	388,239	Property
Jiwa	811,269	(163,312)	-	647,957	Life
<i>Suretyship</i>	426,043	(227,087)	44,456	243,412	<i>Suretyship</i>
<i>Energy offshore</i>	867,435	(840,702)	(2,461)	24,272	<i>Energy offshore</i>
Kesehatan	358,537	(61,833)	(10,893)	285,811	Health
Kendaraan bermotor	333,874	(11,545)	(33,314)	289,015	Vehicles
Rangka kapal	68,639	(37,698)	28,520	59,461	Marine hull
Rangka pesawat	237,778	(226,067)	884	12,595	Aviation
Rekayasa	125,002	(121,009)	16,698	20,691	Engineering
Pengangkutan	27,575	(6,334)	(3,508)	17,733	Marine cargo
Kecelakaan diri	205,490	(19,743)	808	186,555	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	2,294	(1,110)	823	2,007	<i>Energy onshore</i>
	<u>13,010,114</u>	<u>(3,767,435)</u>	<u>742,498</u>	<u>9,985,177</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**37. BEBAN KLAIM PENJAMINAN - BERSIH**

**37. GUARANTEE CLAIM EXPENSES - NET**

	2020				
	Beban k penjaminan bruto/ <i>Gross guarantee claim expenses</i>	Klaim penjaminan ulang/ Re- guarantee claims	Kenaikan estimasi liabilitas k laim/ <i>Increase in estimated claim liabilities</i>	Beban k penjaminan - bersih/ <i>Guarantee claim expenses - net</i>	
Kredit	1,868,552	(216,736)	459,480	2,111,296	Credit
<i>Suretyship</i>	<u>53,103</u>	<u>(15,435)</u>	<u>54,897</u>	<u>92,565</u>	<i>Suretyship</i>
	<u>1,921,655</u>	<u>(232,171)</u>	<u>514,377</u>	<u>2,203,861</u>	
	2019				
	Beban k penjaminan bruto/ <i>Gross guarantee claim expenses</i>	Klaim penjaminan ulang/ Re- guarantee claims	Kenaikan estimasi liabilitas k laim/ <i>Increase in estimated claim liabilities</i>	Beban k penjaminan - bersih/ <i>Guarantee claim expenses - net</i>	
Kredit	1,984,765	(307,580)	409,149	2,086,334	Credit
<i>Suretyship</i>	<u>46,856</u>	<u>(13,456)</u>	<u>8,723</u>	<u>42,123</u>	<i>Suretyship</i>
	<u>2,031,621</u>	<u>(321,036)</u>	<u>417,872</u>	<u>2,128,457</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi pihak berelasi.

*Refer to Note 46 for the details of related parties balances and transactions.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**38. PENDAPATAN SUBROGASI - BERSIH**

**38. SUBROGATION INCOME - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	944,287	1,020,086	Credit
Aneka	16,137	16,959	Miscellaneous
Tanggung gugat	94	82	Liability
Harta benda (properti)	11	388	Property
<i>Suretyship</i>	11,819	32,798	Suretyship
Kendaraan bermotor	681	807	Vehicles
Rangka kapal	150	306	Marine hull
Rekayasa	77	-	Engineering
Pengangkutan	80	-	Marine cargo
Kecelakaan diri	35	367	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	20	-	Energy onshore
	<u>973,391</u>	<u>1,071,793</u>	

**39. BEBAN AKUISISI DAN KOMISI - BERSIH**

**39. ACQUISITION COST AND COMMISSION EXPENSES - NET**

**Beban akuisisi dan komisi asuransi**

**Acquisition cost and insurance commision**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	106,993	302,124	Credit
Aneka	1,725,390	1,610,133	Miscellaneous
Tanggung gugat	74,086	113,770	Liability
Harta benda (properti)	(4,340)	(209)	Property
Jiwa	191,510	207,855	Life
<i>Suretyship</i>	(37,678)	(2,917)	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	(103,185)	(106,598)	Energy offshore
Kesehatan	(17,280)	(10,504)	Health
Kendaraan bermotor	44,812	111,238	Vehicles
Rangka kapal	(17,803)	(11,116)	Marine hull
Rangka pesawat	(708)	(7,372)	Aviation
Rekayasa	(2,065)	330	Engineering
Pengangkutan	373	6,666	Marine cargo
Satelite	2,040	1,064	Satellites
Kecelakaan diri	3,381	7,110	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	1,075	28,063	Energy onshore
	<u>1,966,601</u>	<u>2,249,637</u>	

**Beban akuisisi dan komisi penjaminan**

**Acquisition cost and guarantee commision**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	28,278	17,840	Credit
<i>Suretyship</i>	30,575	44,053	Suretyship
	<u>58,853</u>	<u>61,893</u>	

**40. (PENDAPATAN)/BEBAN UNDERWRITING LAIN- LAIN - BERSIH**

**40. OTHER UNDERWRITING (INCOME)/EXPENSES - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kredit	(42,643)	(29,258)	Credit
Aneka	(9,545)	96,217	Various
Tanggung gugat	432	1,754	Liability
Harta benda (properti)	(3,078)	(31,390)	Property
<i>Suretyship</i>	(6,214)	2,294	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	(3,688)	1,992	Energy Offshore
Kesehatan	4,962	953	Health
Kendaraan bermotor	3,681	13,991	Vehicles
Rangka kapal	2,829	2,737	Marine Hull
Rangka pesawat	427	3,334	Aviation
Rekayasa	183	(3,395)	Engineering
Pengangkutan	1,436	1,040	Marine Cargo
Satelite	259	12,250	Satellites
Kecelakaan diri	424	274	Personal Accident
<i>Energi onshore</i>	156	676	Energy Onshore
	<u>(50,379)</u>	<u>73,469</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**41. PENDAPATAN JASA KEUANGAN**

**41. FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES INCOME**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pendapatan kegiatan modal ventura	191,809	214,952	Venture capital services income
Pendapatan pengelolaan dana	147,540	161,724	Fund management services income
Pendapatan kegiatan sekuritas	127,261	143,352	Securities services income
Pendapatan jasa investasi	6,657	8,532	Investment services income
Pendapatan jasa penasehat keuangan	6,303	6,172	Financial advisory services income
Pendapatan hasil kegiatan keuangan lainnya	5,436	7,990	Other financial services income
Pendapatan jasa kustodian	-	7	Custody services income
	<u>485,006</u>	<u>542,729</u>	

**42. HASIL INVESTASI - BERSIH**

**42. INVESTMENT INCOME - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Pihak berelasi (lihat Catatan 46)			Related parties (see Note 46)
Deposito berjangka	650,743	811,597	Time deposits
Reksadana	578,236	413,550	Mutual funds
Obligasi dan sukuk	565,457	549,053	Bonds and sukuk
Saham	20,192	48,541	Shares
Efek beragun aset	3,343	4,040	Asset-backed securities
Lainnya	(4,063)	(23,747)	Others
	<u>1,813,908</u>	<u>1,803,034</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Deposito berjangka	416,827	495,198	Time deposits
Reksadana	243,547	240,095	Mutual funds
Obligasi dan sukuk	293,090	302,107	Bonds and sukuk
Saham	2,293	52,948	Shares
Efek beragun aset	1,587	677	Asset-backed securities
Lainnya	80,911	28,223	Others
	<u>1,038,255</u>	<u>1,119,248</u>	
	<u>2,852,163</u>	<u>2,922,282</u>	

Lihat Catatan 46 untuk rincian saldo dan transaksi  
pihak berelasi.

Refer to Note 46 for the details of related parties  
balances and transactions.

**43. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

**43. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Beban karyawan	2,774,152	3,122,898	Employee expense
Beban cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	597,686	242,283	Allowance for impairment loss
Beban kantor	441,701	634,913	Office expense
Beban pemasaran	371,617	496,122	Marketing expense
Beban penyusutan dan amortisasi	365,858	245,405	Depreciation and amortisation expense
Beban pengelolaan data, gedung, dana dan investasi	238,670	233,486	Data, building, fund, and investment management
Imbal jasa profesional	234,700	111,361	Professional fee
Beban sewa kantor	111,207	208,291	Office rental
Beban utilitas	94,154	90,474	Utility expense
Beban bunga dan provisi bank	91,491	56,588	Interest & bank provision expense
Beban pemeliharaan aset tetap	62,545	63,544	Fixed assets maintenance
Beban penelitian dan pengembangan	30,896	48,105	Research and development
Lainnya	396,629	299,065	Others
	<u>5,811,306</u>	<u>5,852,535</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN GEDUNG**

**44. BUILDING MANAGEMENT INCOME**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Sewa bangunan	79,320	77,243	<i>Building rental</i>
Jasa pengelolaan gedung	36,209	35,481	<i>Building service charges</i>
Parkir	7,273	9,732	<i>Parking</i>
Lembur	4,299	11,274	<i>Overtime</i>
Lainnya	<u>49,894</u>	<u>62,773</u>	<i>Others</i>
	<u><u>176,995</u></u>	<u><u>196,503</u></u>	

**45. PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH**

**45. OTHER INCOME - NET**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Denda keterlambatan pelunasan SWDKLLJ	413,851	604,419	<i>Late payments penalty of SWDKLLJ</i>
Administrasi sertifikasi/kartu dana	220,575	239,694	<i>Administration of certificates/fund cards</i>
Laba divestasi	51,161	7	<i>Gain on divestment</i>
Laba/(rugi) selisih kurs - bersih	38,034	(100,276)	<i>Foreign exchange gain/(loss) - net</i>
Laba pelepasan aset tetap - bersih	10,590	2,224	<i>Gain on disposal of fixed asset - net</i>
Administrasi bank	5,793	6,950	<i>Bank charges</i>
Bunga piutang	1,428	1,570	<i>Interest on receivables</i>
Kerugian dari biaya yang tidak tervalifikasi	(101,662)	(155,974)	<i>Losses from unverified expenses</i>
Lainnya	<u>88,029</u>	<u>(134,199)</u>	<i>Others</i>
	<u><u>727,799</u></u>	<u><u>464,415</u></u>	

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

**a. Pemerintah Republik Indonesia**

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Grup. Grup memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, piutang klaim reasuransi dan retrosesi, utang klaim asuransi dan reasuransi, premi utang penjaminan ulang, pinjaman dari pemerintah, pendapatan premi asuransi bruto, imbal jasa penjaminan, beban klaim asuransi bruto, dan hasil investasi.

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

**a. The Government of the Republic of Indonesia**

*The Government of the Republic of Indonesia is Group's shareholder. The Group owns bonds which issued by the Government of the Republic of Indonesia, insurance and reinsurance premium receivables, guarantee fee receivables, reinsurance and retrocession claim receivables, insurance and reinsurance claim payables, re-guarantee payables, government loans, gross insurance premium income, guarantee fee income, gross insurance claim expenses, and investment income.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**b. Perusahaan Milik Negara dan Anak  
Perusahaan**

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham Perusahaan Milik Negara. Grup memiliki penempatan rekening giro, deposito, investasi, piutang premi asuransi dan reasuransi, piutang imbal jasa penjaminan, piutang klaim reasuransi dan retrosesi, piutang penjaminan ulang, utang klaim asuransi dan reasuransi, utang klaim penjaminan, utang premi reasuransi dan retrosesi, utang penjaminan ulang, utang bank, pendapatan premi asuransi bruto, imbal jasa penjaminan, beban klaim asuransi bruto, beban klaim penjaminan bruto, dan pendapatan hasil investasi pada entitas-entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, serta memiliki transaksi signifikan dengan Grup. Entitas-entitas tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan unit syariahnya, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Pembangkitan Jawa Bali (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perseroan Pengelola Aset (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Barata Indonesia (Persero).

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED  
PARTIES (continued)**

**b. State Owned Enterprises and Subsidiaries**

*The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of State Owned Enterprises. The Group has placement in current account, deposits, investments, insurance and reinsurance premium receivables, underwriting fee receivables, reinsurance and retrocession claims receivable, re-guarantee receivables, insurance and reinsurance claims payables, guarantee claim payables, reinsurance and retrocession premium payables, re-guarantee payables, bank loans, gross insurance premium income, guarantee fee income, gross insurance claim expenses, gross guarantee claim expenses, and investment income with entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, which have significant transactions with The Group. These entities are PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and unit syariahnya, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Danareksa (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Sarana Multigriya Infrastruktur (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Pembangkitan Jawa Bali (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero), PT PLN (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perseroan Pengelola Aset (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, and PT Barata Indonesia (Persero).*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**c. Manajemen kunci**

Manajemen kunci adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)**

**c. Key management**

*Key management are Board of Commissioners and Directors.*

*Significant balances and transactions with related parties are as follows:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Aset:</b>			<b>Assets:</b>
<b>Kas di bank</b>			<b>Cash in bank</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,600,133	482,827	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	448,238	147,968	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	252,351	237,905	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	173,392	8,129	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	62,650	15,068	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	16,567	40,337	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara Syariah	1,051	990	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Negara Indonesia Syariah	1,295	1,626	PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	251	2,319	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Mandiri Taspen POS	4	4	PT Bank Mandiri Taspen POS
	<u>7,555,932</u>	<u>937,173</u>	
<b>Deposito berjangka 3 bulan atau kurang</b>			<b>Time deposits 3 months or less</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,665,652	4,876,621	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4,694,242	1,910,838	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,121,921	1,723,900	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	957,091	736,914	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	598,340	211,384	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	277,150	109,650	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	204,754	235,640	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara Syariah	175,294	173,352	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Negara Indonesia Syariah	91,050	150,000	PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Mandiri Taspen POS	<u>15,230</u>	<u>27,000</u>	PT Bank Mandiri Taspen POS
	<u>13,800,724</u>	<u>10,155,299</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BEREELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)**

*Significant balances and transactions with related parties are as follows: (continued)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Deposito Berjangka</b>			<b>Time Deposit</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	882,256	1,444,360	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	374,053	583,242	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	136,555	426,755	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	53,605	276,365	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen POS	35,000	35,000	PT Bank Mandiri Taspen POS
PT Bank Tabungan Negara Syariah	8,000	-	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Negara Indonesia Syariah	3,250	4,250	PT Bank Negara Indonesia Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	500	5,750	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	4,500	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
Bank Lainnya	-	25,000	Other Banks
	<b>1,493,219</b>	<b>2,805,222</b>	
<b>Obligasi dan sukuk</b>			<b>Bonds and sukuk</b>
Obligasi pemerintah	4,796,527	4,232,568	Government bonds
Obligasi korporasi	5,806,691	5,550,145	Corporate bonds
Sukuk	<b>508,233</b>	<b>448,105</b>	Sukuk
	<b>11,111,451</b>	<b>10,230,818</b>	
<b>Saham</b>			<b>Shares</b>
Perusahaan milik negara dan anak perusahaan	1,213,836	1,119,681	State owned enterprises and subsidiaries
<b>Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih</b>			<b>Insurance and reinsurance premium receivables - net</b>
Pemerintah Republik Indonesia	1,421,199	1,497,203	The Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,060,023	271,232	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	819,704	469,453	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	246,881	137,202	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	83,375	114,546	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	73,694	214,970	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	58,780	79,624	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	41,779	70,621	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	37,871	50,813	Kementerian Pertanian Republik Indonesia
PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)	36,579	19,630	PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	34,493	56,744	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)	32,588	22,491	PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	31,665	19,066	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	25,635	23,198	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Timah (Persero) Tbk	25,479	33,577	PT Timah (Persero) Tbk
Lainnya	<b>181,560</b>	<b>406,775</b>	Others
	<b>4,211,305</b>	<b>3,487,145</b>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)**

*Significant balances and transactions with related parties are as follows: (continued)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Piutang imbal jasa penjaminan - bersih</b>			<b>Guarantees fee receivables - net</b>
Pemerintah Republik Indonesia	1,680,429	1,521,528	The Government of
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,069,232	317,179	the Republic of Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	678,089	575,116	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	112,657	61,946	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,175	2,989	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<u>3,541,582</u>	<u>2,478,758</u>	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
<b>Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih</b>			<b>Reinsurance and retrocession claim receivables - net</b>
PT Asrinda Arthatasangga	264,916	9,038	PT Asrinda Arthatasangga
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama	72,296	92,975	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
PT Asuransi ASEI Indonesia	71,669	65,742	PT Asuransi ASEI Indonesia
PT Tugu Pratama Indonesia	30,658	51,593	PT Tugu Pratama Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	27,972	23,068	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Brins General Indonesia	17,284	12,318	PT Brins General Indonesia
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	14,281	14,265	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Asuransi Bangun Askrida	6,982	7,507	PT Asuransi Bangun Askrida
PT Tugu Reasuransi Indonesia	5,291	6,373	PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	4,587	3,967	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)
Dana Kelolaan Kementerian KUKM - MAP	799	898	Dana Kelolaan Kementerian KUKM - MAP
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	604	605	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Air Nav (Persero)	301	195	PT Air Nav (Persero)
	<u>517,640</u>	<u>288,544</u>	
<b>Piutang penjaminan ulang - bersih</b>			<b>Re-guarantee receivables - net</b>
PT Brins General Indonesia	6,992	12,554	PT Brins General Indonesia
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	<u>2,226</u>	<u>1,107</u>	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
	<u>9,218</u>	<u>13,661</u>	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	<u>43,454,907</u>	<u>31,516,301</u>	<i>Total assets with related parties</i>
Persentase terhadap jumlah aset	<u>47.06%</u>	<u>40.57%</u>	<i>Percentage of total assets</i>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI** (lanjutan)

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES** (continued)

*Significant balances and transactions with related parties are as follows:* (continued)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Insurance and reinsurance claim payables</b>
<b>Utang klaim asuransi dan reasuransi</b>			
SKK Migas	33,678	32,999	SKK Migas
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12,439	9,730	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	11,808	3,420	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	11,552	-	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,813	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	9,601	3,662	Kementerian Pertanian Republik Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	9,263	15,674	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Pertamina (Persero)	7,094	6,993	PT Pertamina (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,971	57,797	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	5,057	576	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT Mandiri Tunas Finance	4,606	4,633	PT Mandiri Tunas Finance
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,888	3,874	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	3,726	1,129	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Bank Mandiri Taspen POS	3,150	8,254	PT Bank Mandiri Taspen POS
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	1,907	-	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Asuransi Bangun Askrida	1,750	16	PT Asuransi Bangun Askrida
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	1,477	14,783	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
PT Krakatau Posco	1,265	1,240	PT Krakatau Posco
PT Istaka Karya	1,262	-	PT Istaka Karya
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	909	896	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
PT Pegadaian (Persero)	803	837	PT Pegadaian (Persero)
BPD Lampung	657	-	BPD Lampung
PT Timah Tbk	597	595	PT Timah Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	534	93	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)	353	13	PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)
PT Tugu Reasuransi Indonesia	50	905	PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Bank Syariah Mandiri	31	1,069	PT Bank Syariah Mandiri
PT Tugu Pratama Indonesia	1	427	PT Tugu Pratama Indonesia
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	12	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Lainnya	<u>22,054</u>	<u>21,211</u>	Others
	<u><b>167,296</b></u>	<u><b>190,838</b></u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)**

*Significant balances and transactions with related parties are as follows: (continued)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Utang klaim penjaminan</b>			<b>Guarantee claim payables</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,694	9,580	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,205	647	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	195	324	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	28	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	25	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
	<b>3,094</b>	<b>10,604</b>	
<b>Utang premi reasuransi dan retrosesi</b>			<b>Reinsurance and retrocession premium payables</b>
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	61,241	52,681	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Brins General Indonesia	45,024	118,658	PT Brins General Indonesia
PT Tugu Pratama Indonesia	39,724	60,065	PT Tugu Pratama Indonesia
PT Asuransi Tugu Kresna Pratama	28,548	70,918	PT Asuransi Tugu Kresna Pratama
PT Asuransi Ekspor Indonesia	21,432	16,593	PT Asuransi Ekspor Indonesia
PT Tugu Reasuransi Indonesia	9,304	11,710	PT Tugu Reasuransi Indonesia
PT Mandiri AXA General Insurance	2,809	4,246	PT Mandiri AXA General Insurance
PT Asuransi Bangun Askrida	-	651	PT Asuransi Bangun Askrida
PT Asuransi ASEI Indonesia	-	644	PT Asuransi ASEI Indonesia
Lainnya	<b>8,403</b>	<b>17,948</b>	Others
	<b>216,485</b>	<b>354,114</b>	
<b>Utang penjaminan ulang</b>			<b>Re-guarantee payables</b>
Pemerintah Republik Indonesia	9,426	-	The Government of
PT Brins General Indonesia	<b>57</b>	<b>735</b>	the Republic of Indonesia
	<b>9,483</b>	<b>735</b>	PT Brins General Indonesia
<b>Pinjaman dari Pemerintah</b>	<b>982,488</b>	<b>1,252,454</b>	<b>Government loans</b>
<b>Utang bank</b>			<b>Bank loans</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	104,163	103,878	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	13,602	45,210	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	<b>6,122</b>	<b>10,024</b>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<b>123,887</b>	<b>159,112</b>	
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	<b>1,502,733</b>	<b>1,967,857</b>	<i>Total liabilities with related parties</i>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<b>2.74%</b>	<b>4.06%</b>	<i>Percentage of total liabilities</i>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)**

*Significant balances and transactions with related parties are as follows: (continued)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Pendapatan premi asuransi bruto</b>			<b>Gross insurance premium income</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,011,251	1,300,208	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,266,732	663,085	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	662,654	912,935	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
SKK Migas	588,647	610,173	SKK Migas
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	226,273	204,855	Kementerian Pertanian Republik Indonesia
PT Bank Mandiri Taspen POS	206,942	-	PT Bank Mandiri Taspen POS
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	179,504	227,990	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)	163,950	175,846	PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)
PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	88,110	82,715	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	74,441	587,957	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	70,417	100,394	PT Pegadaian (Persero)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	55,508	89,535	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Telekomunikasi Satelit (Telkomsat by Telkom Indonesia)	49,436	11,514	Telekomunikasi Satelit (Telkomsat by Telkom Indonesia)
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	48,259	18,284	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	42,014	200,689	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Mandiri Tunas Finance	41,140	189,862	PT Mandiri Tunas Finance
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	40,775	100,565	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Pupuk Kalimantan Timur	39,108	29,043	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	35,308	37,967	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	32,298	53,016	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Lainnya	<u>553,416</u>	<u>1,387,939</u>	Others
	<u>6,476,183</u>	<u>6,984,572</u>	

**Imbal jasa penjaminan**

Pemerintah Republik Indonesia	1,957,908	1,518,548	<b>Guarantee fee income</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	189,101	87,152	The Government of the Republic of Indonesia
PT Pegadaian (Persero)	78,030	59,813	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	76,060	74,305	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47,867	25,932	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	45,899	69,646	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41,861	14,348	PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk
PT Mandiri Tunas Finance	20,853	23,055	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	4,194	2,761	PT Mandiri Tunas Finance
PT Bank Syariah Mandiri	3,874	4,677	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	1,030	3,653	PT Bank Syariah Mandiri
			PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)**

*Significant balances and transactions with related parties are as follows: (continued)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>Imbal jasa penjaminan (lanjutan)</b>			<b>Guarantee fee income (continued)</b>
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
Syariah	61	118	Syariah
PT Bank Tabungan Negara			PT Bank Tabungan Negara
Syariah	4	46	Syariah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	-	3	PT Pupuk Indonesia (Persero)
	<u>2,466,742</u>	<u>1,884,057</u>	
Jumlah pendapatan underwriting dengan pihak berelasi	<u>8,942,925</u>	<u>8,868,629</u>	<i>Total underwriting income with related parties</i>
Persentase terhadap pendapatan underwriting	<u>48.62%</u>	<u>50.18%</u>	<i>Percentage of underwriting income</i>
<b>Beban klaim asuransi bruto</b>			<b>Gross insurance claim expenses</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	788,393	750,673	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	512,315	377,733	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	309,906	231,409	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	206,186	155,145	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Kementerian Pertanian Republik Indonesia	173,302	167,486	Kementerian Pertanian Republik Indonesia
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	61,260	56,437	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia	56,229	24,139	PT BRI Asuransi Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	43,329	77,283	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	37,024	-	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi BRI Life	34,832	65,725	PT Asuransi BRI Life
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	25,708	19,787	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Timah (Persero) Tbk	25,203	5,994	PT Timah (Persero) Tbk
PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)	20,553	9,554	PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)
PT Pegadaian (Persero)	20,445	64,118	PT Pegadaian (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	18,525	63,567	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	18,199	591	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	18,037	315,993	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	15,999	6,080	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	14,876	6,601	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	8,611	5,322	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
Lainnya	<u>33,575</u>	<u>323,959</u>	<i>Others</i>
	<u>2,442,507</u>	<u>2,727,596</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI** (lanjutan)

Saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES** (continued)

*Significant balances and transactions with related parties are as follows: (continued)*

	2020	2019	
<b>Beban klaim penjaminan bruto</b>			<b>Gross guarantee claim expenses</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	939,116	839,540	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	155,533	93,549	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	128,642	139,608	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	103,813	159,838	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	96,169	117,467	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mandiri Tunas Finance	36,263	38,386	PT Mandiri Tunas Finance
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	16,797	28,726	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,921	2,693	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Indonesia	2,511	2,574	Bank Indonesia
PT Pupuk Indonesia (Persero)	2,351	2,351	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Bank Syariah Mandiri	1,244	2,995	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	14	28	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank Tabungan Negara Syariah	-	509	PT Bank Tabungan Negara Syariah
	<u>1,486,374</u>	<u>1,428,264</u>	
Jumlah beban underwriting dengan pihak berelasi	<u>3,928,881</u>	<u>4,155,860</u>	Total underwriting expense with related parties
Persentase terhadap beban underwriting	<u>28.91%</u>	<u>29.26%</u>	Percentage of underwriting expense
<b>Hasil investasi</b>			<b>Investment income</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	346,571	451,046	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pemerintah Republik Indonesia	294,628	284,271	The Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	247,018	223,951	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	190,151	179,250	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	169,706	112,608	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Danareksa (Persero)	156,361	94,802	PT Danareksa (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	121,097	150,818	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	48,208	48,434	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30,119	33,657	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	22,128	14,553	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15,869	19,735	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara Syariah	15,279	11,871	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	14,949	4,485	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	13,445	14,244	PT Bank Syariah Mandiri
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	13,276	21,727	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	11,583	13,330	PT Pegadaian (Persero)
Lainnya	<u>103,520</u>	<u>124,252</u>	Others
	<u>1,813,908</u>	<u>1,803,034</u>	
Jumlah hasil investasi dengan pihak berelasi	<u>1,813,908</u>	<u>1,803,034</u>	Total investment income with related parties
Persentase terhadap Hasil investasi	<u>63.60%</u>	<u>61.70%</u>	Percentage of investment income

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**46. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 13.617 (2019: Rp 14.545)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko nilai mata uang dan risiko tingkat bunga), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, manajemen permodalan, dan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko, tingkat pengembalian, dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup. Grup mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Pada periode laporan keuangan ini, pandemi penyakit virus corona ("COVID-19") muncul dan menyebabkan volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan yang signifikan. Pandemi virus corona juga memicu perlambatan ekonomi global dan dapat mengakibatkan peningkatan risiko atas pembayaran yang tertunda atau kredit macet dari pelanggan dan peningkatan kerugian kredit.

Seiring dengan merebaknya pandemi virus corona, Grup semakin menyadari urgensi untuk fokus implementasi dari langkah-langkah strategis dalam menanggulangi dampak pandemi yang terjadi.

**a. Risiko pasar**

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Grup menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan pada harga pasar. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga, mata uang dan ekuitas, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum, dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga, nilai tukar, dan produk ekuitas.

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Grup menghadapi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang pada posisi keuangan dan arus kas. Direksi memonitor secara berkala risiko ini.

**46. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)**

*Total compensation paid to the Group's Board of Commissioners and Directors for the year ended 31 December 2020 are amounted to Rp 13,617 (2019: Rp 14,545).*

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including foreign exchange risk and interest rate risk), liquidity risk, credit risk, operational risk, financial management, and fair value of financial assets and liabilities.*

*The Group's aim is to achieve an appropriate balance between risk, return, and minimize potential adverse effects on the Group's financial performance. The Group defines risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors.*

*During the period of this financial statements, the coronavirus disease ("COVID-19") pandemic is emerging and inflicts to the significant financial market volatility and uncertainty. The pandemic also triggers the global economic slowdown and may result in an increase in risk on delayed or delinquent payments from customers and an increase in credit losses.*

*Along with the outbreak of the coronavirus disease pandemic, the Group is increasingly aware of the urgency to focus on implementing strategic steps in dealing with the impact of the pandemic that has occurred.*

**a. Market risk**

i. Foreign exchange risk

*The Group takes on exposure to market risks which is the risk that the fair value of future cash flows of financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products, all of which are exposed to the general and specific market movements and changes in the level of volatility or market rates or prices such as interest rates, foreign exchange rates, and equity products.*

*Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.*

*The Group takes on exposure to the effects of fluctuation in the prevailing foreign exchange rates on its financial position and cash flows. The Directors monitor this risk periodically.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup yang menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing (disajikan dalam jumlah yang setara dengan jutaan Rupiah).

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

a. Market risk (continued)

i. Foreign exchange risk (continued)

*The table below summarises the Group's financial assets and liabilities that are exposed to foreign exchange rate risk (presented as millions of Rupiah equivalents).*

	2020		
	Dolar AS/ USD	Lain-lain/ Others	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Kas dan setara kas	862,132	8,798	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	32,384	-	<i>Investments</i>
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	1,094,036	44,129	<i>Insurance and reinsurance premium receivables - net</i>
Piutang klaim reasuransi dan retroresesi - bersih	1,106,812	69,420	<i>Reinsurance and retrocession claim receivables - net</i>
Piutang hasil investasi - bersih	75	-	<i>Investment income receivables - net</i>
Aset lain-lain	2,904	-	<i>Other assets</i>
	<u>3,098,343</u>	<u>122,347</u>	
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
Utang klaim asuransi dan reasuransi	146,773	8,487	<i>Insurance and reinsurance claim payables</i>
Utang premi reasuransi dan retroresesi	683,483	32,577	<i>Reinsurance and retrocession premium payables</i>
Utang usaha dan utang lain-lain	436,016	7,245	<i>Accounts payable and other payables</i>
Medium Term Notes (MTN)	14,105	-	<i>Medium term notes (MTN)</i>
	<u>1,280,377</u>	<u>48,309</u>	
<b>Aset bersih</b>	<u>1,817,966</u>	<u>74,038</u>	<b>Net asset</b>
	2019		
	Dolar AS/ USD	Lain-lain/ Others	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Kas dan setara kas	795,560	2,469	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	334,436	-	<i>Investments</i>
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	1,780,861	26,886	<i>Insurance and reinsurance premium receivables - net</i>
Piutang klaim reasuransi dan retroresesi - bersih	1,204,496	397,078	<i>Reinsurance and retrocession claim receivables - net</i>
Piutang hasil investasi - bersih	131	-	<i>Investment income receivables - net</i>
Aset lain-lain	2,862	-	<i>Other assets</i>
	<u>4,118,346</u>	<u>426,433</u>	
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
Utang klaim asuransi dan reasuransi	154,377	8,210	<i>Insurance and reinsurance claim payables</i>
Utang premi reasuransi dan retroresesi	1,038,782	11,469	<i>Reinsurance and retrocession premium payables</i>
Utang usaha dan utang lain-lain	46,491	608	<i>Accounts payable and other payables</i>
Medium Term Notes (MTN)	13,901	-	<i>Medium term notes (MTN)</i>
	<u>1,253,551</u>	<u>20,287</u>	
<b>Aset bersih</b>	<u>2,864,795</u>	<u>406,146</u>	<b>Net asset</b>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Sensitivitas Grup terhadap mata uang asing diperhitungkan dengan menggunakan informasi Posisi Devisa Neto yang ditranslasikan ke dalam mata uang asing Dolar AS.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba sebelum pajak Grup atas perubahan nilai tukar mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. (tidak diaudit)

<b>Pengaruh pada laba rugi/ Impact on profit loss</b>		31 December 2020
<b>Peningkatan/ Increase by 1%</b>	<b>Penurunan/ Decrease by 1%</b>	<i>31 December 2020</i>
31 Desember 2020	18,920	(18,920)
<hr/>		
<b>Pengaruh pada laba rugi/ Impact on profit loss</b>		<i>31 December 2019</i>
<b>Peningkatan/ Increase by 1%</b>	<b>Penurunan/ Decrease by 1%</b>	<i>31 December 2019</i>
31 Desember 2019	32,709	(32,709)

ii. Risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai suku bunga wajar adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup menghadapi dampak dari fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas. Marjin suku bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut namun juga dapat mengurangi kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan. Direksi menetapkan batas atas tingkat ketidaksesuaian dari suku bunga repricing dan value at risk yang bisa dilakukan, yang dimonitor secara harian oleh Divisi Investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup tidak memiliki risiko tingkat suku bunga yang signifikan. Sebagian besar aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup tidak dikenakan bunga atau berbunga tetap, sehingga tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

a. Market risk (continued)

i. Foreign exchange risk (continued)

The Group's sensitivity on foreign currencies is determined using the Net Open Position information that translated into USD.

The table below shows the sensitivity of the Group's income before tax to movement of foreign exchange rates on 31 December 2020 and 2019. (unaudited)

<b>Pengaruh pada laba rugi/ Impact on profit loss</b>		31 December 2020
<b>Peningkatan/ Increase by 1%</b>	<b>Penurunan/ Decrease by 1%</b>	<i>31 December 2020</i>
31 Desember 2020	18,920	(18,920)
<hr/>		
<b>Pengaruh pada laba rugi/ Impact on profit loss</b>		<i>31 December 2019</i>
<b>Peningkatan/ Increase by 1%</b>	<b>Penurunan/ Decrease by 1%</b>	<i>31 December 2019</i>
31 Desember 2019	32,709	(32,709)

ii. Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both its fair value and cash flow risks. Interest margins may increase as a result of such changes but may reduce losses in the event that unexpected movements arise. The Directors set limits on the level of mismatch of interest rate repricing and value at risk that may be undertaken, which is monitored daily by Investment Division.

As at 31 December 2020 and 2019, the Group has no significant interest rate risk. Most of the Group's financial assets and financial liabilities are non-interest bearing or fixed interest rate, thus no significant exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both fair value and cash flow risks.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**b. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul dari ketidakmampuan Grup dalam memenuhi kewajiban yang bersifat kontraktual yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun Grup memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka Grup dikatakan tidak likuid.

Profil jatuh tempo ini didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Selain itu, jika terdapat kebutuhan akan likuiditas, efek-efek dan aset lancar dapat dijual. Kebijakan Grup sehubungan dengan maturity gap antara aset dan liabilitas moneter adalah menetapkan gap limit yang disesuaikan dengan kemampuan Grup untuk memperoleh likuiditas.

Tabel berikut ini menyajikan arus kas kontraktual atas liabilitas keuangan Grup berdasarkan sisa periode sampai tanggal jatuh tempo sesuai kontrak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

**b. Liquidity risk**

*Liquidity risk is the risk of inability of the Group in paying its contractual obligation in cash. Although the Group have sufficient assets to pay its liabilities, but when the assets can not be converted into cash immediately, then the Group is illiquid.*

*This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. In addition, if the Group encounters liquidity needs, marketable securities and current assets could be liquidated. The Group's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Group ability to obtain immediate liquidity.*

*The following table show cash flows on the Group's financial liabilities based on the remaining period to the contractual maturity date as at 31 December 2020 and 2019.*

31 Desember/December 2020			
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value
Utang klaim asuransi dan reasuransi	524,384	10,723	535,107
Utang klaim penjaminan	3,286	-	3,286
Utang premi reasuransi dan retrosesi	1,553,519	10,883	1,564,402
Utang penjaminan ulang	205,114	-	205,114
Utang usaha dan utang lain-lain	7,305,829	931,413	8,237,242
Akrual	1,162,559	9,149	1,171,708
Pinjaman dari Pemerintah	5,750	976,738	982,488
Utang bank	125,004	37,696	162,700
Liabilitas kontrak jaminan keuangan <i>Medium Term Notes (MTN)</i>	1,840,690 14,105	5,985,677 -	7,826,367 14,105
	<b>12,740,240</b>	<b>7,962,279</b>	<b>20,702,519</b>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**b. Risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel berikut ini menyajikan arus kas kontraktual atas liabilitas keuangan Grup berdasarkan sisa periode sampai tanggal jatuh tempo sesuai kontrak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. (lanjutan)

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**b. Liquidity risk (continued)**

*The following table show cash flows on the Group's financial liabilities based on the remaining period to the contractual maturity date as at 31 December 2020 and 2019. (continued)*

	31 Desember/December 2019		
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year	Nilai tercatat/ Carrying value
Utang klaim asuransi dan reasuransi	424,767	47,166	471,933
Utang klaim penjaminan	12,798	-	12,798
Utang premi reasuransi dan retrosesi	2,253,186	12,997	2,266,183
Utang penjaminan ulang	92,885	-	92,885
Utang usaha dan utang lain-lain	4,490,467	600,408	5,090,875
Akrual	909,231	-	909,231
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	2,119,067	4,547,218	6,666,285
Pinjaman dari Pemerintah	268,016	984,438	1,252,454
Utang bank	71,289	177,845	249,134
<i>Medium Term Notes (MTN)</i>	<i>13,901</i>	<i>-</i>	<i>13,901</i>
	<b>10,655,607</b>	<b>6,370,072</b>	<b>17,025,679</b>

**c. Risiko kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pihak lawan Grup gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Grup. Grup juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksa dana.

Risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar bagi Grup sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada tim manajemen risiko kredit yang bertanggung jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

**c. Credit risk**

*Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Group's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Group. The Group is also exposed to other credit risks arising from investments in debt securities and mutual funds.*

*Credit risk is the one of the largest risk for the Group's business, therefore management carefully manages its exposure to credit risk. The credit risk management and control are centralised in a credit risk management team which reports to the Directors. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails estimations as to the likelihood of defaults occurring of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties.*

*Impairment allowances (if any) are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position (based on objective evidence of impairment).*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**c. Risiko kredit** (lanjutan)

Konsentrasi risiko instrumen keuangan dengan eksposur risiko kredit

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit untuk aset keuangan

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

**c. Credit risk** (continued)

Concentration of risks of financial instruments with credit risk exposure

The following table presents the Group's maximum exposure to credit risk of financial assets:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Kas dan setara kas	25,111,409	13,642,657	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	24,915,833	26,174,832	<i>Investments</i>
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	989,321	591,224	<i>Account receivables and other receivables - net</i>
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	4,687,862	4,224,142	<i>Insurance and reinsurance premium receivables - net</i>
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,547,138	1,476,814	<i>Guarantee fee receivables - net</i>
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	1,447,600	1,863,035	<i>Reinsurance and retrocession claim receivables - net</i>
Piutang penjaminan ulang - bersih	420,360	301,053	<i>Re-guarantee receivables - net</i>
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	1,919,695	1,649,699	<i>Venture capital financing receivables - net</i>
Piutang hasil investasi - bersih	172,717	303,851	<i>Investment income receivables - net</i>
Penyertaan langsung	719,676	654,208	<i>Direct participations</i>
Aset lain-lain	<u>1,960,227</u>	<u>890,294</u>	<i>Other assets</i>
	<u>64,891,838</u>	<u>51,771,809</u>	

- Kualitas kredit dari aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

- Credit quality of financial assets

As at 31 December 2020 and 2019, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

	<b>31 Desember/December 2020</b>			<b>Jumlah/ Total</b>	
	<b>Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired</b>	<b>Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired</b>	<b>Mengalami penurunan nilai/ Impaired</b>		
Kas dan setara kas	25,111,409	-	2,970	25,114,379	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	24,915,833	-	66,112	24,981,945	<i>Investments</i>
Piutang usaha dan piutang lain-lain	981,011	8,310	86,721	1,076,042	<i>Account receivables and other receivables</i>
Piutang premi asuransi dan reasuransi	984,164	3,703,698	1,714,438	6,402,300	<i>Insurance and reinsurance premium receivables</i>
Piutang imbal jasa penjaminan	2,547,138	-	1,107,378	3,654,516	<i>Guaranteed receivables</i>
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi	607,450	840,150	788,586	2,236,186	<i>Reinsurance and retrocession claim receivables</i>
Piutang penjaminan ulang	420,360	-	196,208	616,568	<i>Re-guarantee receivables - net</i>
Piutang pembiayaan modal ventura	1,654,550	265,145	132,939	2,052,634	<i>Venture capital financing receivables</i>
Piutang hasil investasi	172,717	-	20,304	193,021	<i>Investment income receivables</i>
Penyertaan langsung	719,676	-	-	719,676	<i>Direct participation</i>
Aset lain-lain	<u>1,956,813</u>	<u>3,414</u>	<u>528,549</u>	<u>2,488,776</u>	<i>Other assets</i>
	<u>60,071,121</u>	<u>4,820,717</u>	<u>4,644,205</u>	<u>69,536,043</u>	
Dikurangi: Cadangan Kerugian penurunan nilai				<u>(4,644,205)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
				<u>64,891,838</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**c. Risiko kredit** (lanjutan)

- Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: (lanjutan)

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)

**c. Credit risk** (continued)

- Credit quality of financial assets (continued)

*As at 31 December 2020 and 2019, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows: (continued)*

	31 Desember/December 2019				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan setara kas	13,642,657	-	-	13,642,657	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	26,174,832	-	17,054	26,191,886	<i>Investments</i>
Piutang usaha dan piutang lain-lain	587,508	3,716	47,819	639,043	<i>Account receivables and other receivables</i>
Piutang premi asuransi dan reasuransi	1,816,825	2,407,318	1,237,487	5,461,630	<i>Insurance and reinsurance premium receivables</i>
Piutang imbal jasa penjaminan	1,476,814	-	1,056,430	2,533,244	<i>Guarantee receivables</i>
Piutang klaim reasuransi dan retrosepsi	1,244,687	618,349	677,857	2,540,893	<i>Reinsurance and retrocession claim receivables</i>
Piutang penjaminan ulang	301,053	-	182,873	483,926	<i>Re-guarantee receivables - net</i>
Piutang pembiayaan modal ventura	1,539,312	110,387	27,483	1,677,182	<i>Venture capital financing receivables</i>
Piutang hasil investasi	303,851	-	20,304	324,155	<i>Investment income receivables</i>
Penyertaan langsung	654,208	-	654,208	654,208	<i>Direct participation</i>
Aset lain-lain	857,349	32,943	519,870	1,410,162	<i>Other assets</i>
Jumlah kotor	<u>48,599,096</u>	<u>3,172,713</u>	<u>3,787,177</u>	<u>55,558,986</u>	<i>Total gross</i>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai				<u>(3,787,177)</u>	<i>Less: Allowance for impairment losses</i>
				<u>51,771,809</u>	

**d. Risiko operasional**

Pengelolaan risiko operasional untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan adanya kesalahan yang melibatkan personalia, sistem dan teknologi, proses, operasi, serta kondisi eksternal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Grup adalah melalui pengadaan sistem Teknologi Informasi ("TI") yang handal, menyusun *Business Continue/Disaster Recovery Plan*, menyediakan server cadangan untuk meminimalisir kerusakan sistem TI secara berkala, prasyarat terkait dengan pemisahan tugas/fungsi, prasyarat rekonsiliasi dan pengawasan transaksi, kepatuhan terhadap regulasi dan prasyarat hukum lainnya, dokumentasi prosedur dan kontrol, ketentuan terkait penilaian secara periodik atas risiko operasional yang dihadapi, kecukupan kontrol dan prosedur terhadap risiko yang teridentifikasi, ketentuan terkait pelaporan atas kerugian operasional dan usulan upaya perbaikannya.

**d. Operational risk**

*In the operational risk management, Group anticipates the losses resulting from an error involving personnel, systems and technologies, processes, operations, and external conditions. In order to minimize operational risks, Group establishes reliable Information Technology ("IT") systems, develops Business Continue/Disaster Recovery Plan, provides backup servers to minimize damage of IT systems on a regular basis, manages separation of duties/functions, reconciliation and monitoring of transactions, compliance with regulations and other legal requirements, documentation and control procedures, periodic assessment to ensure the adequacy of controls and procedures of the identified risks, relevant provisions of operational losses and proposed improvement.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**e. Manajemen permodalan**

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada stakeholders lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

**f. Nilai wajar asset dan liabilitas keuangan**

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya yang diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatatnya merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diukur melalui laporan laba rugi adalah sama dengan dengan nilai tercatatnya.

i. Tingkat 1

Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas terkait;

ii. Tingkat 2

Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*unobservable inputs*).

Instrumen yang diukur pada nilai wajar

Tabel berikut menyajikan asset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Tingkat 1/ Level 1</b>	<b>Tingkat 2/ Level 2</b>	<b>Tingkat 3/ Level 3</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	
Investasi Penyertaan langsung	17,096,057	-	18,367,268	-	18,367,268	<i>Investments Direct participation</i>
Aset lain-lain	719,676 113,551	- -	113,181	719,676 -	719,676 113,181	<i>Other assets</i>
	<b>17,929,284</b>	<b>-</b>	<b>18,480,449</b>	<b>719,676</b>	<b>19,200,125</b>	
<b>2019</b>						
	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>	<b>Tingkat 1/ Level 1</b>	<b>Tingkat 2/ Level 2</b>	<b>Tingkat 3/ Level 3</b>	<b>Nilai wajar/ Fair value</b>	
Investasi Penyertaan langsung	16,899,386	-	18,265,787	-	18,265,787	<i>Investments Direct participation</i>
Aset lain-lain	568	198	-	-	198	<i>Other assets</i>
	<b>16,899,954</b>	<b>198</b>	<b>18,265,787</b>	<b>-</b>	<b>18,265,985</b>	

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**e. Capital management**

*The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.*

**f. Fair value of financial assets and liabilities**

*The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.*

i. Level 1

*Quoted prices (unadjusted) in active markets for associated assets or liabilities;*

ii. Level 2

*Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and*

iii. Level 3

*Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Financial instruments measured at fair value

*The following tables show the Group's financial assets and liabilities that are measured at fair value as at 31 December 2020 and 2019:*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**f. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

Instrumen yang tidak diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan Grup yang tidak diukur dengan nilai wajar pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Tingkat 1/ <i>Level 1</i>	Tingkat 2/ <i>Level 2</i>	Tingkat 3/ <i>Level 3</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>	<i>Financial assets</i> <small>Cash and cash equivalents Investment Account receivables and other receivables - net Insurance and reinsurance premium receivables Guarantee fee receivables - net Reinsurance and retrocession claim receivables - net Re-guarantee receivables - net Venture capital financing receivables - net Investment income receivables - net Direct participation Other assets</small>
<b>Aset keuangan</b>						
Kas dan setara kas	25,625,099	25,625,099	-	-	25,625,099	
Investasi	9,437,328	-	9,437,328	-	9,437,328	
Piutang usaha dan piutang lain-lain	1,196,788	-	-	1,196,788	1,196,788	
Piutang premi asuransi dan reasuransi	5,224,650	-	-	5,224,650	5,224,650	
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,547,138	-	-	2,547,138	2,547,138	
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	2,244,559	-	-	2,244,559	2,244,559	
Piutang penjaminan ulang - bersih	420,360	-	-	420,360	420,360	
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	1,919,695	-	-	1,919,695	1,919,695	
Piutang hasil investasi - bersih	172,717	-	-	172,717	172,717	
Penyertaan langsung	-	-	-	-	-	
Aset lain-lain	<u>1,846,675</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,846,675</u>	<u>1,846,675</u>
	<u>50,635,009</u>	<u>25,625,099</u>	<u>9,437,328</u>	<u>15,572,582</u>	<u>50,635,009</u>	
<b>Liabilitas keuangan</b>						<i>Financial liabilities</i> <small>Insurance and reinsurance claim payables Guarantee claim payables Reinsurance and retrocession premium payables Re-guarantee payables Account payables and other payables</small>
Utang klaim asuransi dan reasuransi	535,107	-	-	535,107	535,107	
Utang klaim penjaminan	3,286	-	-	3,286	3,286	
Utang premi reasuransi dan retrosesi - bersih	1,564,402	-	-	1,564,402	1,564,402	
Utang penjaminan ulang - bersih	205,114	-	-	205,114	205,114	
Utang usaha dan utang lain-lain	8,237,242	-	-	8,237,242	8,237,242	
Akrual	1,171,708	-	-	1,171,708	1,171,708	
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	7,826,367	-	-	7,826,367	7,826,367	
Pinjaman dari pemerintah	982,488	-	-	982,488	982,488	
Utang bank	162,700	-	-	145,242	145,242	
Medium Term Notes (MTN)	<u>14,105</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,105</u>	<u>14,105</u>	<small>Medium Term Notes (MTN)</small>
	<u>20,702,519</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20,685,061</u>	<u>20,685,061</u>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN** (lanjutan)

**f. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan** (lanjutan)

Instrumen yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan Grup yang tidak diukur dengan nilai wajar pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019: (lanjutan)

	Nilai tercatat/ <u>Carrying value</u>	Tingkat 1/ <u>Level 1</u>	Tingkat 2/ <u>Level 2</u>	Tingkat 3/ <u>Level 3</u>	Nilai wajar/ <u>Fair value</u>	
<b>Aset keuangan</b>						
Kas dan setara kas	14,525,634	14,525,634	-	-	14,525,634	<b>Financial assets</b>
Investasi	10,293,437	-	10,293,437	-	10,293,437	Cash and cash equivalent
Piutang usaha dan piutang lain-lain	634,095	-	-	634,095	634,095	Investment Account receivables and other receivables - net
Piutang premi asuransi dan reasuransi	5,460,147	-	-	5,460,147	5,460,147	Insurance and reinsurance premium receivables
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	1,476,814	-	-	1,476,814	1,476,814	Guarantee receivables - net
Piutang klaim reasuransi dan retrosesi - bersih	2,099,090	-	-	2,099,090	2,099,090	Reinsurance and retrocession claim receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	301,053	-	-	301,053	301,053	Re-guarantee receivables - net
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	1,649,699	-	-	1,649,699	1,649,699	Venture capital financing receivables - net
Piutang hasil investasi - bersih	303,851	-	-	303,851	303,851	Investment income receivables - net
Penyertaan langsung	654,208	-	-	654,208	654,208	Direct participation
Aset lain-lain	890,292	-	-	890,292	890,292	Other assets
	<u>38,288,320</u>	<u>14,525,634</u>	<u>10,293,437</u>	<u>13,469,249</u>	<u>38,288,320</u>	
<b>Liabilitas keuangan</b>						
Utang klaim asuransi dan reasuransi	471,933	-	-	471,933	471,933	<b>Financial liabilities</b>
Utang klaim penjaminan	12,798	-	-	12,798	12,798	Insurance and reinsurance claim payables
Utang premi reasuransi dan retrosesi - bersih	2,266,183	-	-	2,266,183	2,266,183	Guarantee claim payables
Utang penjaminan ulang - bersih	92,885	-	-	92,885	92,885	Reinsurance and retrocession premium payables
Utang usaha dan utang lain-lain Akrual	5,090,875 909,231	-	-	5,090,875 909,231	5,090,875 909,231	Re-guarantee payables
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	6,666,285	-	-	6,666,285	6,666,285	Account payables and other payables
Pinjaman dari pemerintah	1,252,454	-	-	1,252,454	1,252,454	Accruals
Utang bank	249,134	-	-	198,247	198,247	Liabilities for financial guarantee contracts
Medium Term Notes (MTN)	13,901	-	-	13,901	13,901	Government loans
	<u>17,025,679</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,974,792</u>	<u>16,974,792</u>	Bank loans
						Medium Term Notes (MTN)

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**47. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**f. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang tersedia untuk dijual, dan pinjaman yang diberikan dan piutang serta liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya yang diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset yang bukan merupakan aset keuangan mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan yang bervariasi sesuai dengan jatuh tempo aset tersebut.

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN**

Grup bertanggung jawab untuk mengelola secara tepat dalam menghadapi perubahan dalam siklus asuransi dan penjaminan terhadap lingkungan politik dan ekonomi dimana Grup beroperasi.

**Rincian risiko asuransi**

Risiko utama yang dihadapi Grup terkait dengan kontrak asuransi adalah perbedaan antara jumlah klaim yang terjadi, manfaat yang dibayarkan dan waktu terjadinya klaim dengan yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, tingkat keparahan (severity) dari klaim, manfaat aktual yang dibayarkan, dan perkembangan lanjutan dari klaim jangka panjang. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan yang dibentuk cukup untuk memenuhi semua liabilitas tersebut.

Tabel di bawah menunjukkan konsentrasi liabilitas kontrak asuransi berdasarkan lini-lini usaha:

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**f. Fair value of financial assets and liabilities (continued)**

All financial assets classified as financial assets at fair value through profit or loss, available-for-sale financial assets, and loans and receivables and financial liabilities at amortised cost have maturities of less than or equals 12 months. Financial assets classified into held-to-maturity financial assets and assets which are not financial assets have maturities of more than 12 months which vary according to the maturity of the asset.

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK**

The Group is responsible for managing appropriately in response to changes in insurance cycles to the political and economic environments in which the Group operates.

**Details of insurance risk**

The key risk that the Group faces in relation to insurance contracts is the difference between the amount of actual claims, benefit payments and claim dates from the estimation. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure reserves are adequate to cover the liabilities

The table below sets out the concentration risk of the insurance contract liabilities.

31 Desember/December 2020			
	Reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession	Bersih/ Net	
Kotor/ Gross			
Premi yang belum merupakan pendapatan			
Estimasi klaim retensi sendiri			
	18,615,659	(5,877,918)	12,737,741
	13,223,123	(8,013,912)	5,209,211
	<u>31,838,782</u>	<u>(13,891,830)</u>	<u>17,946,952</u>
31 Desember/December 2019			
	Reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession	Bersih/ Net	
Kotor/ Gross			
Premi yang belum merupakan pendapatan			
Estimasi klaim retensi sendiri			
	18,547,243	(5,979,601)	12,567,642
	10,860,083	(6,786,753)	4,073,330
	<u>29,407,326</u>	<u>(12,766,354)</u>	<u>16,640,972</u>

Unearned premium reserves  
Estimated own retention claims

Unearned premium reserves  
Estimated own retention claims

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Premi yang belum merupakan pendapatan**

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)**

**a. Unearned premium reserves**

	31 Desember/December 2020			
	Kotor/ Gross	Reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession	Bersih/ Net	
Kredit	11,557,200	(4,362,880)	7,194,320	Credit
Aneka	2,336,147	(690,154)	1,645,993	Miscellaneous
Tanggung gugat	2,159,600	(26,136)	2,133,464	Liability
Harta benda (properti)	394,599	(238,569)	156,030	Property
Jiwa	1,003,459	(10,869)	992,590	Life
<i>Suretyship</i>	599,190	(365,835)	233,355	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	39,097	(39,636)		Energy offshore
Kesehatan	26,065	(6,288)	19,777	Health
Kendaraan bermotor	279,063	(13,856)	265,207	Vehicles
Rangka kapal	77,245	(29,491)	47,754	Marine hull
Rangka pesawat	48,491	(39,086)	9,405	Aviation
Rekayasa	61,531	(38,355)	23,176	Engineering
Pengangkutan	4,632	(323)	4,309	Marine cargo
Satelite	15,917	(12,102)	3,815	Satelite
Kecelakaan diri	9,814	(2,703)	7,111	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	3,609	(1,635)	1,974	Energy onshore
	<b>18,615,659</b>	<b>(5,877,918)</b>	<b>12,737,741</b>	
31 Desember/December 2019				
	Reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession	Bersih/ Net		
	Kotor/ Gross			
Kredit	10,964,738	(4,020,583)	6,944,155	Credit
Aneka	2,576,766	(1,056,300)	1,520,466	Miscellaneous
Tanggung gugat	2,205,879	(10,981)	2,194,898	Liability
Harta benda (properti)	559,950	(331,416)	228,534	Property
Jiwa	944,865	(11,776)	933,089	Life
<i>Suretyship</i>	336,098	(210,422)	125,676	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	163,507	(160,465)	3,042	Energy offshore
Kesehatan	28,590	(6,563)	22,027	Health
Kendaraan bermotor	491,882	(16,544)	475,338	Vehicles
Rangka kapal	70,035	(28,223)	41,812	Marine hull
Rangka pesawat	48,223	(38,704)	9,519	Aviation
Rekayasa	115,395	(71,778)	43,617	Engineering
Pengangkutan	4,023	(730)	3,293	Marine cargo
Satelite	10,491	(7,586)	2,905	Satelite
Kecelakaan diri	23,488	(4,609)	18,879	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	3,313	(2,921)	392	Energy onshore
	<b>18,547,243</b>	<b>(5,979,601)</b>	<b>12,567,642</b>	

**b. Estimasi klaim retensi sendiri**

**b. Estimated own retention claims**

	31 Desember/December 2020			
	Kotor/ Gross	Reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession	Bersih/ Net	
Kredit	1,805,267	(793,671)	1,011,596	Credit
Aneka	4,621,122	(1,931,928)	2,689,194	Miscellaneous
Tanggung gugat	438,577	(33,949)	404,628	Liability
Harta benda (properti)	1,741,068	(1,469,367)	271,701	Property
Jiwa	288,510	(37,562)	250,948	Life
<i>Suretyship</i>	694,808	(522,980)	171,828	Suretyship
<i>Energy offshore</i>	2,792,744	(2,746,798)	45,946	Energy offshore
Kesehatan	90,486	-	90,486	Health
Kendaraan bermotor	98,651	(9,073)	89,578	Vehicles
Rangka kapal	211,485	(108,463)	103,022	Marine hull
Rangka pesawat	147,776	(140,333)	7,443	Aviation
Rekayasa	166,350	(130,298)	36,052	Engineering
Pengangkutan	51,109	(24,249)	26,860	Marine cargo
Satelite	-	-	-	Satelite
Kecelakaan diri	9,200	(5,790)	3,410	Personal accident
<i>Energy onshore</i>	65,970	(59,451)	6,519	Energy onshore
	<b>13,223,123</b>	<b>(8,013,912)</b>	<b>5,209,211</b>	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN** (lanjutan)

**b. Estimasi klaim retensi sendiri** (lanjutan)

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK** (continued)

**b. Estimated own retention claims** (continued)

	31 Desember/December 2019			
	Kotor/ Gross	Reasuransi dan retrosesi/ Reinsurance and retrocession	Bersih/ Net	
Kredit	1,456,482	(763,533)	692,949	Credit
Aneka	3,469,891	(1,547,652)	1,922,239	Miscellaneous
Tanggung gugat	498,797	(28,657)	470,140	Liability
Harta benda (properti)	1,273,348	(963,807)	309,541	Property
Jiwa	214,885	(40,122)	174,763	Life
Suretyship	559,093	(429,590)	129,503	Suretyship
Energy offshore	2,337,292	(2,304,343)	32,949	Energy offshore
Kesehatan	122,746	(24,187)	98,559	Health
Kendaraan bermotor	100,077	(10,086)	89,991	Vehicles
Rangka kapal	215,419	(141,189)	74,230	Marine hull
Rangka pesawat	382,532	(374,376)	8,156	Aviation
Rekayasa	173,573	(140,513)	33,060	Engineering
Pengangkutan	40,149	(11,828)	28,321	Marine cargo
Satelite	-	-	-	Satelite
Kecelakaan diri	13,809	(5,883)	7,926	Personal accident
Energy onshore	1,990	(987)	1,003	Energy onshore
	<b>10,860,083</b>	<b>(6,786,753)</b>	<b>4,073,330</b>	

**Asumsi utama**

Asumsi utama yang menjadi dasar dalam perhitungan estimasi kewajiban klaim yaitu bahwa pembentukan klaim masa depan Grup akan memiliki pola yang sama dengan pembentukan klaim yang terjadi di masa lalu. Termasuk asumsi dari rata-rata beban klaim, beban penanganan klaim, faktor inflasi klaim, dan jumlah klaim untuk setiap tahun kecelakaan.

Justifikasi kualitatif tambahan digunakan untuk memperkirakan tingkat di mana tren masa lampau tidak akan terulang lagi di masa depan, misalnya; kejadian khusus yang hanya terjadi sekali, perubahan yang terjadi di pasar seperti sikap masyarakat terhadap klaim, kondisi ekonomi maupun faktor internal seperti campuran portofolio, syarat dan ketentuan polis dan prosedur penanganan klaim.

Justifikasi lebih lanjut digunakan untuk menghitung tingkat dimana faktor eksternal seperti keputusan peradilan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi estimasi besaran klaim. Kondisi utama yang mempengaruhi keandalan dari asumsi yang digunakan adalah rasio kerugian, perbedaan tingkat bunga, keterlambatan dalam penyelesaian dan perubahan nilai tukar mata uang asing.

**Main assumptions**

*The main assumption in calculating the estimated claim reserves is the Group's future claims development which will follow similar pattern with the historical claims incurred. This includes assumptions on average claim costs, claim handling costs, claim inflation factors and claim frequency for each accident year.*

*Additional qualitative judgments are used to assess the extent to which the historical trends may not apply for the future, for example: specific one off event, changes in market factors such as public attitude towards insurance claims, economic conditions, as well as internal factors such as portfolio mix, policy terms and conditions and claims handling procedures.*

*Further justification is required to assess the extent to which external factors such as judicial decisions and government regulations affect the claim estimates. Other key conditions affecting the reliability of assumption used are loss ratio, changed in interest rates, delayed in settlement and movement in foreign currency exchange rates.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN** (lanjutan)

**Asumsi utama** (lanjutan)

Liabilitas klaim sangat sensitif terhadap asumsi utama yang digunakan. Hingga saat ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dapat menentukan tingkat sensitivitas dari beberapa asumsi seperti perubahan perundungan atau ketidakpastian dalam proses estimasi. Analisis berikut dibuat untuk menunjukkan pengaruh terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian apabila asumsi utama diubah dengan semua asumsi lain dianggap tetap. Korelasi antara asumsi-asumsi yang ada dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan liabilitas klaim.

Estimasi klaim memiliki sensitivitas terhadap perubahan asumsi yang digunakan seperti *expected loss ratio, first incurred development factor* dan *claim handling expenses*.

**Analisa sensitivitas**

Tabel berikut menyajikan sensitivitas dari nilai liabilitas asuransi terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam estimasi liabilitas asuransi. Korelasi asumsi akan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan cadangan teknis. Tabel ini juga menunjukkan dampak terhadap cadangan teknis akibat dari perubahan asumsi aktuarial. (tidak diaudit)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK** (continued)

**Main assumptions** (continued)

*Claim liabilities are very sensitive to the key assumptions used. It is not possible to quantify the sensitivity of certain assumptions such as regulation change or uncertainty in the estimation process. The following analysis is made to show the impact on the consolidated statement of financial positions if the main assumptions were changed while all the other assumptions remain unchanged. The correlation between those assumptions can give significant impact in calculating the claim liability.*

*Estimated claims are sensitive to the key assumptions used such as initial expected loss ratio, first incurred development factor and claim handling expenses.*

**Sensitivity analysis**

*The following tables present the sensitivity of the value of insurance liabilities to the movements in the assumptions used in the estimation of insurance liabilities. The correlation of assumptions will have a significant effect in determining the ultimate technical reserves. This table also indicates the impact on the technical reserve due to the changes in the actuarial assumptions. (unaudited)*

<b>PT Jasa Raharia</b>		
Dampak atas liabilitas klaim/ <i>Impact on claim liabilities</i>		
Rasio kerugian/ <i>Loss ratio</i>	2020	2019
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:		
Liabilitas bruto	+5	1,376
	-5	(1,079)
Liabilitas neto	+5	1,245
	-5	(1,004)
		<i>Impact increase/(decrease) on: Gross liability</i>
		<i>Net liability</i>

<b>PT Jasa Raharia</b>		
Faktor UPR SW/ <i>UPR SW</i> <i>Factor +1%</i>		
2020		
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:		
Liabilitas bruto	+1	39,608
	-1	(39,608)
Liabilitas neto	+1	39,460
	-1	(39,460)
		<i>Impact increase/(decrease) on: Gross liability</i>
		<i>Net liability</i>

<b>PT Asuransi Jasraharja Putera</b>		
Dampak atas liabilitas klaim/ <i>Impact on claim liabilities</i>		
Rasio kerugian/ <i>Loss ratio</i>	2020	2019
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:		
Liabilitas bruto	+5	52,508
	-5	(52,508)
Liabilitas neto	+5	18,009
	-5	(18,009)
		<i>Impact increase/(decrease) on: Gross liability</i>
		<i>Net liability</i>

<b>PT Asuransi Jasraharja Putera</b>		
Dampak atas liabilitas klaim/ <i>Impact on claim liabilities</i>		
Rasio kerugian/ <i>Loss ratio</i>	2020	2019
Dampak kenaikan/(penurunan) pada:		
Liabilitas bruto	+5	46,363
	-5	(46,362)
Liabilitas neto	+5	16,896
	-5	(16,870)
		<i>Impact increase/(decrease) on: Gross liability</i>
		<i>Net liability</i>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN** (lanjutan)

**Analisa sensitivitas** (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan sensitivitas dari nilai liabilitas asuransi terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam estimasi liabilitas asuransi. Korelasi asumsi akan memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan cadangan teknis. Tabel ini juga menunjukkan dampak terhadap cadangan teknis akibat dari perubahan asumsi aktuarial. (tidak diaudit) (lanjutan)

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK** (continued)

**Sensitivity analysis** (continued)

*The following tables present the sensitivity of the value of insurance liabilities to the movements in the assumptions used in the estimation of insurance liabilities. The correlation of assumptions will have a significant effect in determining the ultimate technical reserves. This table also indicates the impact on the technical reserve due to the changes in the actuarial assumptions. (unaudited) (continued)*

**PT Asuransi Jasa Indonesia**  
**Dampak atas liabilitas klaim/  
Impact on claim liabilities**

<b>Rasio kerugian/ Loss ratio</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
+5	220,167	162,020
-5	(219,744)	(162,018)
+5	86,447	78,604
-5	(86,025)	(79,601)

*Impact increase/(decrease) on:  
Gross liability*

*Net liability*

**PT Asuransi Kredit Indonesia**  
**Dampak atas liabilitas klaim/  
Impact on claim liabilities**

<b>Rasio kerugian/ Loss ratio</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
+5	201,648	190,798
-5	(200,838)	(190,798)
+5	129,204	115,978
-5	(128,395)	(115,978)

*Impact increase/(decrease) on:  
Gross liability*

*Net liability*

**PT Asuransi Kredit Indonesia**  
**Dampak atas cadangan premi/  
Impact on premium reserve**

<b>Rasio kerugian/ Loss ratio</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
+5	528,326	463,264
-5	(636,447)	(463,264)
+5	343,369	285,911
-5	(213,924)	(285,911)

*Impact increase/(decrease) on:  
Gross premium reserve*

*Net premium reserve*

**PT Reasuransi Nasional Indonesia**

**Dampak atas liabilitas klaim/  
Impact on claim liabilities**

<b>Tingkat diskonto/ Discount rate</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
+1	(32,968)	(21,156)
-1	34,144	21,854

*Impact increase/(decrease) on:  
Net liability*

*Net liability*

**PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah**

**Dampak atas liabilitas klaim/  
Impact on claim liabilities**

<b>Rasio kerugian/ Loss ratio</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
+1	423	252
-1	(414)	(246)

*Impact increase/(decrease) on:  
Net liability*

*Net liability*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN** (lanjutan)

**Reasuransi**

Profil bisnis dan risiko dari pertanggungan Grup cukup beragam dan cenderung memiliki tingkat risiko dan nilai pertanggungan yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan dukungan reasuransi yang cukup dan aman untuk memproteksi portofolio bisnis Grup. Dukungan reasuransi diperoleh melalui kontrak reasuransi treaty dengan reasuransi dalam negeri maupun luar negeri, baik untuk treaty proporsional maupun non proporsional disesuaikan dengan karakter bisnis masing-masing lini usaha.

Program reasuransi *treaty* berpedoman pada kepentingan terbaik Grup, peraturan perundangan undangan serta regulasi dari pemerintah antara lain ketentuan terbaru dari OJK No.14/POJK.05/2015 dan Surat Edaran No. S.31/SEOJK.05/2015 yang mengatur mengenai "Optimalisasi Kapasitas Dalam Negeri" (batas retensi sendiri, besar dukungan reasuransi).

Grup tidak tergantung pada satu reasuradur ataupun satu kontrak reasuransi tertentu secara signifikan.

**Tabel perkembangan klaim**

Tabel berikut memperlihatkan estimasi klaim yang terjadi, termasuk klaim yang dilaporkan dan IBNR untuk setiap kejadian pada tanggal 31 Desember 2020.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK** (continued)

**Reinsurance**

*The business and risk profile of the Group is quite diverse and tend to have higher risk and sum insured, therefore sufficient and secure reinsurance backup is needed to protect the Group's business portfolio. The reinsurance back up is obtained through treaty reinsurance with domestic and overseas reinsurers, proportional and non-proportional treaty specific to the character of each line of business.*

*Treaty reinsurance programs are based on the best benefits of the Group, laws and other government regulations, such as the latest regulation from OJK No.14/POJK.05/2015 and Circular Letter No. S.31/SEOJK.05/2015 regarding "Optimising of the Local Capacity" (limit of own retention amount of reinsurance back up).*

*The Group is not dependent on single reinsurance company or reinsurance contract.*

**Claim development table**

*The following table show the estimates of incurred claims, including both claims reported and IBNR for each successive accident year as at 31 December 2020.*

Akumulasi klaim dibayar/ Cumulative claim paid Tahun kejadian/ Year of accident	PT Jasa Raharia				Telah dibayar/ Paid to date	
	Perhitungan tahun ke-/Development year					
	1	2	3	4		
2017	1,835,106	2,074,588	2,080,640	2,081,693	2,081,693	
2018	2,322,261	2,589,607	2,599,469	-	2,599,469	
2019	2,433,415	2,700,077	-	-	2,700,077	
2020	2,056,189	-	-	-	2,056,189	
Akumulasi klaim dibayar/ Cumulative claim paid Tahun kejadian/ Year of accident	PT Asuransi Jasaraharia Putera				Telah dibayar/ Paid to date	
Perhitungan tahun ke-/Development year						
1	2	3	4			
2017	203,831	291,795	295,164	298,328	298,328	
2018	241,694	345,003	359,990	-	359,990	
2019	281,309	423,235	-	-	423,235	
2020	303,738	-	-	-	303,738	
Akumulasi klaim dibayar/ Cumulative claim paid Tahun kejadian/ Year of accident	PT Asuransi Jasa Indonesia				Telah dibayar/ Paid to date	
Perhitungan tahun ke-/Development year						
1	2	3	4			
2016	601,116	1,444,004	1,720,973	1,749,652	1,781,548	
2017	1,028,812	1,941,340	2,525,447	2,816,192	2,816,192	
2018	1,188,757	2,376,382	2,589,661	-	2,589,661	
2019	1,104,111	2,053,712	-	-	2,053,712	
2020	1,228,417	-	-	-	1,228,417	
Akumulasi klaim dibayar/ Cumulative claim paid Tahun kejadian/ Year of accident	PT Asuransi Kredit Indonesia				Telah dibayar/ Paid to date	
Perhitungan tahun ke-/Development year						
1	2	3	4			
2016	1,205,380	1,698,748	1,729,170	1,734,532	1,736,806	
2017	1,327,764	2,123,238	2,257,879	2,270,687	-	
2018	1,595,357	2,413,612	2,491,901	-	2,491,901	
2019	2,257,518	3,099,366	-	-	3,099,366	
2020	2,128,834	-	-	-	2,128,834	
Klaim dibayar/ Claim paid Tahun kejadian/ Year of accident	PT Reasuransi Nasional Indonesia				Telah dibayar/ Paid to date	
Perhitungan tahun ke-/Development year						
0	1	2	3			
2016	124,253	498,649	209,261	62,595	23,842	
2017	599,333	640,191	257,731	111,268	-	
2018	630,723	1,101,118	522,947	-	2,254,788	
2019	944,785	1,095,497	-	-	2,040,282	
2020	1,228,041	-	-	-	1,228,041	

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN** (lanjutan)

**Risiko Penjaminan Keuangan**

Risiko utama yang dihadapi Grup dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya default risk dan tingkat *Non-performing financing* (NPF) kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, besarnya nilai klaim, nilai klaim yang dibayarkan, dan perkembangan klaim jangka Panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menutupi kewajiban tersebut.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi *underwriting*, serta pengaturan program penjaminan ulang.

Operasional Grup didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Grup melakukan proses identifikasi dan seleksi risiko dalam menjamin kredit dengan eksposure resiko yang besar.

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect*, *Productivity*, *Payment*, dan *Personality* dan 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*) yang harus diperhatikan. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P dan 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem *scoring*. Berdasarkan score ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK** (continued)

**Financial Guarantee Risk**

*The principal risk the Group faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's nonperforming financing (NPF), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.*

*The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.*

*The Group's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Group to underwrite and accept large guarantee accounts.*

*To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4Ps, are Prospect, Productivity, Payment, and Personality and 5C (Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral) . The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4Ps. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a group of guaranteed, or a new product.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN** (lanjutan)

**Risiko penjaminan keuangan** (lanjutan)

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Proses bisnis penjaminan ulang yang dilakukan terkoordinasi oleh Kantor Pusat dilakukan sebagai bentuk *transfer risk*. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan beban penjaminan ulang. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Grup harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu dan yang dimasukkan melalui proses reviu keuangan yang ketat agar mendapat persetujuan dari senior manajemen. Akibatnya penjaminan ulang hanya ditempatkan dengan kelompok terpilih hanya dari Grup yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pembayaran klaim yang konsisten dan sesuai juga harus dipastikan. Selain kontrol internal, unit operasional Grup dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit Grup yang secara teratur melakukan audit operasional.

Eksposur Grup terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portfolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

**Analisa eksposur**

Pada tahun 2020 dan 2019, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Grup diklasifikasikan berdasarkan *class of business* sebagai berikut:

	2020				Credit Suretyship
	<b>Beban klaim/ <i>Claim expenses</i></b>	<b>Klaim penjaminan ulang/ <i>Re-guarantee claims</i></b>	<b>Kenaikan/ estimasi klaim/ <i>Increase in estimated claims</i></b>	<b>Beban klaim - bersih/<i>Claim expenses - net</i></b>	
	<b>1,868,552</b>	<b>(224,255)</b>	<b>459,480</b>	<b>2,103,777</b>	
Kredit Suretyship	<b>53,103</b>	<b>(15,435)</b>	<b>54,897</b>	<b>92,565</b>	
	<b>1,921,655</b>	<b>(239,690)</b>	<b>514,377</b>	<b>2,196,342</b>	

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK** (continued)

**Financial guarantee risk** (continued)

*Furthermore, to make a decision whether a guarantee application can be approved or not, a committee meeting will be carried out. In accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (*risk taker unit*) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (*risk financing unit*). With a decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.*

*Centrally-coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Reinsurers utilised by the Group must fulfill certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, re-guarantee is placed with a select Company of only the most financially secured and experienced companies in the reguarantee industry. Consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Group's operating units and functional areas are subject to review by the corporate audit team that regularly carries out operational audits.*

*The Group's exposure to concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.*

***Exposure analysis***

*In 2020 and 2019, the Group's guarantee risks classified based on class of businesses are as follows:*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**48. RISIKO ASURANSI DAN PENJAMINAN KEUANGAN** (lanjutan)

**Risiko penjaminan keuangan** (lanjutan)

Pada tahun 2020 dan 2019, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Grup diklasifikasikan berdasarkan *class of business* sebagai berikut: (lanjutan)

**48. INSURANCE AND FINANCIAL GUARANTEE RISK** (continued)

**Financial guarantee risk** (continued)

*In 2020 and 2019, the Group's guarantee risks classified based on class of businesses are as follows:* (continued)

	2019				Credit Suretyship
	<u>Beban klaim/ Claim expenses</u>	<u>Klaim penjaminan ulang/ Re-guarantee claims</u>	<u>Kenaikan/ estimasi klaim/ Increase in estimated claims</u>	<u>Beban klaim - bersih/Claim expenses - net</u>	
	1,984,765	(307,724)	409,149	2,086,190	
Kredit Suretyship	46,856	(13,456)	8,723	42,123	
	<u>2,031,621</u>	<u>(321,180)</u>	<u>417,872</u>	<u>2,128,313</u>	

**49. KONTINJENSI DAN PERIKATAN**

**Jasindo**

Jasindo memiliki ketidaksepakatan dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sehubungan dengan penagihan piutang oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejumlah USD 6.562.788 (nilai penuh). Sampai saat ini, hal ini masih sedang dalam pemeriksaan.

Jasindo tidak mengakui dan tidak mencatat liabilitas kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, oleh karena Jasindo berkeyakinan bahwa kewajiban ini tidak terutang.

**BTIM**

BTIM memperoleh imbalan jasa pengelolaan dana sebesar maksimum 1,5%- 5,00% per tahun yang diperhitungkan secara harian dari nilai aset bersih untuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

BTIM mengadakan kerjasama dengan beberapa bank kustodian sehubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, dimana BTIM bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola kekayaan Reksa Dana dan memperoleh imbalan jasa.

**49. CONTINGENCIES AND AGREEMENTS**

**Jasindo**

*Jasindo has a dispute with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, in respect of receivable claimed by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk amounted to USD 6,562,788 (full amount). Up until now, this matter is still in investigation.*

*Jasindo did not recognise and record a liability to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in the Group's consolidated financial statements as at 31 December 2020, because Jasindo believes that the liability is not liable.*

**BTIM**

*BTIM receives a fund management fee at the maximum 1.5%-5.00% above per annum which is calculated daily based on the net asset value for Collective Investment Contract for the following mutual funds.*

*BTIM entered into an agreement with the custodian banks in connection with a Collective Investment Contract Mutual Funds, whereby BTIM acts as an investment manager who manage the assets of the mutual funds and received the fees.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**50. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan interpretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf";
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2)";
- Penyesuaian Tahunan terhadap PSAK 110 "Akuntansi Sukuk"; dan
- Penyesuaian Tahunan terhadap PSAK 111 "Akuntansi Wa'd".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian Tahunan 2020.
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang reformasi acuan suku bunga tahap 2;
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi

**50. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT**

*Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) issued several new standards, amendments and interpretations but not yet effective for the financial year beginning 31 December 2020 are as follows:*

- SFAS 112 "Accounting for Endowments";
- Amendment of SFAS 22 "Business Combination";
- Amendment of SFAS 71 "Financial Instrument";
- Amendment of SFAS 55 "Financial Instrument: Recognition and Measurement (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendment of SFAS 60 "Financial Instrument: Disclosure (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Amendment SFAS 62 "Insurance Contract (Interest Rate Benchmark Reform Batch 2)";
- Annual Improvement to SFAS 110 "Sukuk Accounting"; and
- Annual Improvement to SFAS 111 "Wa'd Accounting".

*The above standards will be effective on 1 January 2021 and early adoption is permitted.*

- Amendment of SFAS 22 "Business Combination for Reference to Conceptual Framework";
- Amendment of SFAS 57 "Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Assets Related to Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts";
- Annual Adjustment 2020.
- The amendments to SFAS 73 "Lease" about interest rate benchmark reform batch 2;
- The amendments of SFAS 73 "Lease" about rent concessions related to COVID-19.

*The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.*

- Amendment of SFAS 1 "Presentation of Financial Statement".

*The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.*

- SFAS 74 "Insurance Contract".
- The amendments to SFAS 16 "Property, Plant, and Equipment" about proceeds before intended use
- The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates.

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**50. STANDAR AKUNTANSI BARU** (lanjutan)

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi dan interpretasi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian.

**51. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 73**

**PSAK 71 Instrumen Keuangan**

**Penurunan Nilai Instrumen Keuangan**

Grup telah menghitung dampak dari transisi dari "*incurred loss approach*" (PSAK 55) menjadi "*kerugian kredit ekspektasian*" (PSAK 71) untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada saldo awal 1 Januari 2020.

**PSAK 73 "Sewa"**

Pada saat penerapan PSAK 73, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, "Sewa". Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup pada tanggal 1 Januari 2020.

Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimulainya hingga akhir masa manfaat dari aset hak-guna atau akhir dari masa sewa. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dinilai untuk penurunan nilai dan disesuaikan atas pengukuran kembali dari liabilitas sewa.

Dengan menerapkan standar ini, saldo awal aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah Rp. 153.488. Pada saat penerapan awal, Grup juga mengakui aset hak-guna yang berasal dari beban sewa dibayar dimuka sebesar Rp 27.475, sehingga jumlah aset hak-guna yang diakui pada saat penerapan awal adalah Rp 180.963.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**50. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT** (continued)

*As at the authorisation date of this consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and amendments and interpretations SFAS to its consolidated financial statements.*

**51. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71 AND SFAS 73**

**SFAS 71 Financial Instruments**

***Impairment of Financial Instruments***

*The Group has assessed the impact of the transitioning from the "incurred loss approach" (SFAS 55) to "expected credit loss" (SFAS 71) for the financial assets measured at amortised cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income on the 1 January 2020.*

**SFAS 73 "Leases"**

*On the adoption of SFAS 73, the Group recognised right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as "operating lease" under the principles of SFAS 30, "Leases". These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group's incremental borrowing rate as at 1 January 2020.*

*Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognised in the statement of financial position as at 31 December 2019. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability.*

*By applying this standard, the balance of right-of-use assets and lease liabilities as at 1 January 2020 is amounting to Rp 153,488. At initial implementation, the Group also recognised right-of-use assets from prepaid rent expenses amounting to Rp 27,475, resulting total right-of-use assets recognised at initial implementation amounting to Rp 180,963.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**51. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 73  
(lanjutan)**

PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	<b>Jumlah/ Amount</b>	
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	40,214	<i>Operating lease commitments disclosed as at 31 December 2019</i>
Ditambah:		<i>Add:</i>
Komitmen sewa operasi yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	161,745	<i>Operating lease commitments were not disclosed as at 31 December 2019</i>
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga inkremental Grup	(44,384)	<i>Discounted using Group's incremental borrowing rate</i>
Dikurang:		<i>Less:</i>
Sewa jangka pendek	(347)	<i>Short-term leases</i>
Aset bernilai rendah	<u>(3,740)</u>	<i>Low value assets</i>
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	<u>153,488</u>	<i>Lease liabilities recognised as at 1 January 2020</i>

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- 1) Sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek
- 2) Menggunakan tinjauan ke belakang (*hind sight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa
- 3) Untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar
- 4) Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa
- 5) Mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Perusahaan tidak menerapkan PSAK 73 ini untuk kontrak yang sebelumnya tidak diidentifikasi mengandung sewa sesuai PSAK 30 dan ISAK 8.

**51. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71 AND SFAS 73 (continued)**

SFAS 73 "Leases" (continued)

*The reconciliation between the operating lease commitments disclosed under SFAS 30 as of 31 December 2019 and the lease liabilities recognised under SFAS 73 on 1 January 2020 are as follows:*

<i>Operating lease commitments disclosed as at 31 December 2019</i>	<b>Add:</b>
<i>Operating lease commitments were not disclosed as at 31 December 2019</i>	
<i>Discounted using Group's incremental borrowing rate</i>	
<i>Less:</i>	
<i>Short-term leases</i>	
<i>Low value assets</i>	

*In applying SFAS 73 for the first time, the Group applies the following practical means permitted by the standard:*

- 1) *Operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at 1 January 2020 are treated as short-term leases*
- 2) *The use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease*
- 3) *Not to separate non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets*
- 4) *The use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics*
- 5) *Rely on the assessment of whether leases are onerous based on SFAS 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.*

*The Company does not apply SFAS 73 to contract previously identified as not containing leases under SFAS 30 and IFAS 8.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 73  
(lanjutan)**

PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

**Aset Hak Guna**

Grup telah menghitung dampak dari perhitungan PSAK 73 dan menetapkan untuk menerapkan modified simplified approach pada saldo awal 1 Januari 2020. Dampak perhitungan PSAK 73 menghasilkan aset hak guna pada saldo awal sebesar Rp 180.963.

**Dampak PSAK 71 dan 73**

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2b, Grup telah menerapkan PSAK 71 dan 73 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

**51. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71  
AND SFAS 73 (continued)**

SFAS 73 "Leases" (continued)

**Right-of-use Assets**

*The Group has assessed the impact of SFAS 73 calculation and decided to implement modified simplified approach on the 1 January 2020. The impact of SFAS 73 calculation resulting the beginning balance of right-of-use assets amounting to Rp 180,963.*

**SFAS 71 and 73**

*As described in Note 2b, the Group has adopted SFAS 71 and 73 as of 1 January 2020, the effect of this transition to SFAS 71 and 73 has had on these financial statements as of 1 January 2020 are as follows:*

	<b>Saldo sebelum penerapan PSAK 71 &amp; 73/ Balance before adoption of SFAS 71 &amp; 73</b>	<b>Dampak penerapan PSAK 71/ Impact on implementation of SFAS 71</b>	<b>Dampak penerapan PSAK 73/ Impact on implementation of SFAS 73</b>	<b>Saldo setelah penerapan PSAK 71 &amp; 73/ Balance after adoption of SFAS 71 &amp; 73</b>	<b>ASSETS</b>
<b>ASET</b>					
Kas dan setara kas	14,525,634	(3,389)	-	14,522,245	Cash and cash equivalents
Investasi	27,192,823	21,443	-	27,214,266	Investments
Piutang usaha dan piutang lain-lain	634,095	(21,991)	-	612,104	Account receivables and other receivables
Piutang premi asuransi dan reasuransi - bersih	5,460,147	(106,386)	-	5,353,761	Insurance and reinsurance premium receivables - net
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	1,476,814	-	-	1,476,814	Guarantee receivables - net
Piutang klaim reasuransi dan retroresi - bersih	2,099,090	(21,467)	-	2,077,623	Reinsurance and retrocession claim receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	301,053	-	-	301,053	Re-guarantee receivables - net
Piutang pembiayaan modal ventura - bersih	1,649,699	(69,001)	-	1,580,698	Venture capital financing receivables - net
Piutang hasil investasi - bersih	303,851	(35,522)	-	268,329	Investment income receivables - net
Aset reasuransi	11,185,478	-	-	11,185,478	Reinsurance assets
Aset retroresi	1,580,876	-	-	1,580,876	Retrocession assets
Pajak dibayar dimuka	155,763	-	-	155,763	Prepaid taxes
Penyertaan langsung	654,208	-	-	654,208	Direct participation
Aset tetap - bersih	1,985,288	-	180,963	2,166,251	Fixed assets - net
Properti investasi	457,494	-	-	457,494	Investment properties
Aset pajak tangguhan	3,897,142	(2,864)	-	3,894,278	Deferred tax assets
Biaya akuisisi tangguhan - bersih	1,386,135	-	-	1,386,135	Deferred acquisition cost - net
Penjaminan ulang dibayar dimuka	949,574	-	-	949,574	Prepaid reguarantee
Aset lain-lain	1,786,364	(33,925)	(27,475)	1,724,964	Other assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>77,681,528</b>	<b>(273,102)</b>	<b>153,488</b>	<b>77,561,914</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**51. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN PSAK 73  
(lanjutan)**

**Dampak PSAK 71 dan 73 (lanjutan)**

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2b, Grup telah menerapkan PSAK 71 dan 73 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**51. IMPACT OF IMPLEMENTATION OF SFAS 71  
AND SFAS 73 (continued)**

**SFAS 71 and 73 (continued)**

As described in Note 2b, the Group has adopted SFAS 71 and 73 as of 1 January 2020, the effect of this transition to SFAS 71 and 73 has had on these financial statements as of 1 January 2020 are as follows: (continued)

	Saldo sebelum penerapan PSAK 71 & 73/ Balance before adoption of SFAS 71 & 73	Dampak penerapan PSAK 71/ Impact on implementation of SFAS 71	Dampak penerapan PSAK 73/ Impact on implementation of SFAS 73	Saldo setelah penerapan PSAK 71 & 73/ Balance after adoption of SFAS 71 & 73	
<b>LIABILITAS</b>					
Utang klaim asuransi dan reasuransi	471,933	-	-	471,933	Insurance and reinsurance claim payables
Utang klaim penjaminan	12,798	-	-	12,798	Guarantee claim payables
Utang premi reasuransi dan retroresi	2,266,183	-	-	2,266,183	Reinsurance and retrocession premium payables
Utang penjaminan ulang	92,885	-	-	92,885	Re-guarantee payables
Utang usaha dan utang lain-lain	5,090,875	-	153,488	5,244,363	Account payables and other payables
Akrual	909,231	-	-	909,231	Accruals
Liabilitas kontrak asuransi	29,407,326	-	-	29,407,326	Insurance contract liabilities
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	6,666,285	(48,467)	-	6,617,818	Liabilities for financial guarantee contracts
Pendapatan diterima dimuka	22,322	-	-	22,322	Unearned revenue
Pinjaman dari Pemerintah	1,252,454	-	-	1,252,454	Government loans
Utang bank	249,134	-	-	249,134	Bank loans
<i>Medium Term Notes (MTN)</i>	13,901	-	-	13,901	Medium Term Notes (MTN)
Utang pajak	597,241	-	-	597,241	Taxes payable
Liabilitas imbalan kerja	<u>1,381,220</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,381,220</u>	Employee benefits liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>48,433,788</b>	<b>(48,467)</b>	<b>153,488</b>	<b>48,538,809</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
Dana tabarru	(112,316)	-	-	(112,316)	Tabarru fund
<b>EKUITAS</b>					
Modal saham					<b>EQUITY</b>
Modal saham – Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham					Share capital – Share capital
Modal dasar 240.000.000 dan 1.000.000 lembar masing-masing pada tahun 2020 dan 2019,					Share capital – Nominal amount Rp 1,000,000 (full amount) at par per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh:					Authorised capital 240,000,000 and 1,000,000 shares in year 2020 and 2019, respectively
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan seri B - 67.163,536 saham per 31 Desember 2020	272,500	-	-	272,500	Issued and fully paid: 1 share of Serie A Dwiwarna - and 67,163,536 of Serie B per 31 December 2020
- Seri A Dwiwarna - 1 saham dan seri B - 272.499 saham per 31 Desember 2019	272,500	-	-	272,500	1 share of Serie A Dwiwarna - and 272,499 of Serie B per 31 December 2019
Tambahan modal disetor	-	-	-	-	Additional paid-in capital
Akumulasi keuntungan/(kerugian) perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	-	293,299	-	293,299	Accumulated loss for change in fair value of available for sale investment
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	33,556	-	-	33,556	Remeasurement of post-employment benefits
Komponen ekuitas lainnya	677	-	-	677	Other equity components
Saldo laba					Retained earnings
Ditetapkan penggunaannya	170,577	(1,432)	-	169,145	Appropriated
Belum ditetapkan penggunaannya	(15,102)	(501,747)	-	(516,849)	Unappropriated
Ekuitas merging entities	<u>27,971,594</u>	<u>32,190</u>	<u>-</u>	<u>28,003,784</u>	Equity of merging entities
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>28,433,802</b>	<b>(177,690)</b>	<b>-</b>	<b>28,256,112</b>	<b>Total equity attributable to the owners of the parent entity</b>
Kepentingan nonpengendali	926,254	(46,945)	-	879,309	Non-controlling interest
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>29,360,056</b>	<b>(224,635)</b>	<b>-</b>	<b>29,135,421</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>77,681,528</b>	<b>(273,102)</b>	<b>153,488</b>	<b>77,561,914</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN**

**52. SUBSEQUENT EVENT AFTER REPORTING PERIOD**

a) Undang-undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja. Grup menilai pada umumnya, peraturan pelaksana tersebut tidak akan memiliki dampak buruk terhadap bisnis dan operasional Grup.

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan Grup.

b) Dewan Komisaris dan Direksi

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, susunan Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a) *Omnibus Law*

*In February 2021, the Government officially enacted 49 implementing regulations of the Omnibus Law. The Group assessed that generally there is no potential adverse impact of the Law to the Group's business and operation.*

*As at the authorisation date of these financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Omnibus Law, as well as its impact to the Group's financial statements.*

b) *Board of Commissioners and Directors*

*As at the authorisation date of these financial statements, the composition of the Company's Board of Directors and Commissioners are as follows:*

**2021**

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris  
Komisaris  
Komisaris Independen

Mohamad Fauzi M. Ichsan  
Masyita Crystallin  
Nasrudin <sup>1)</sup>  
Sumiyati <sup>3)</sup>  
Hotbonar Sinaga

**Board of Commissioners:**

President Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Independent Commissioner

**Dewan Direksi:**

Direktur Utama  
Wakil Direktur Utama  
Direktur Bisnis  
Direktur Keuangan dan Umum  
Direktur Teknik

Robertus Billitea  
Hexana Tri Sasongko <sup>2)</sup>  
Pantri Pander Silitonga  
Rizal Ariansyah  
Rianto Ahmadi <sup>4)</sup>

**Board of Directors:**

President Director  
Vice President Director  
Business Director  
Finance and General Director  
Technical Director

**Komite Audit:**

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

Mohamad Fauzi M. Ichsan<sup>5)</sup>  
Masyita Crystallin<sup>5)</sup>  
Maliki Heru Santosa  
Sumiyati<sup>5)</sup>  
Nandang Supriyadi

**Audit Committee:**

Chairman  
Member  
Member  
Member  
Member

<sup>1)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 29 April 2021

<sup>2)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 4 Juni 2021

<sup>3)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 30 Juli 2021

<sup>4)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 20 September 2021

<sup>5)</sup> Efektif diangkat pada tanggal 29 September 2021

*Effectively appointed on 29 April 2021 <sup>1)</sup>*

*Effectively appointed on 4 Juni 2021 <sup>2)</sup>*

*Effectively appointed on 30 July 2021 <sup>3)</sup>*

*Effectively appointed on 20 September 2021 <sup>4)</sup>*

*Effectively appointed on 29 September 2021 <sup>5)</sup>*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(lanjutan)**

**52. SUBSEQUENT EVENT AFTER REPORTING  
PERIOD (continued)**

c) Penyertaan Modal Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2021, tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perseroan, dengan nilai penambahan sebesar Rp20.000.000.000.000 (nilai penuh) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, Perseroan sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai penambahan modal Perseroan ke dalam modal saham IFG Life.

d) Restrukturisasi Utang Bunga Rekening Dana investasi ("RDI") dan Utang Penerusan Pinjaman ("SLA")

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. S-110/MK.5/2021 tanggal 29 November 2021, Pemerintah telah menyetujui penjadwalan kembali atas piutang bunga Rekening Dana Investasi ("RDI") No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 dan piutang Penerusan Pinjaman ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 diangsur selama 20 tahun termasuk masa tenggang 2 tahun yaitu tahun 2021-2022.

e) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") dan PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")

Pada tanggal 20 Mei 2021, BPUI, Jiwasraya, dan IFG Life menandatangani Perjanjian Induk Pengalihan Portofolio (Aset dan Kewajiban) Jiwasraya kepada IFG Life dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Jiwasraya ("Perjanjian Induk Awal") yang mengatur rencana pengalihan aset dan kewajiban Jiwasraya kepada IFG Life sehubungan dengan upaya penyelamatan pemegang polis Jiwasraya sebagaimana ditugaskan kepada BPUI berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-187/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penugasan BPUI dalam rangka Penyehatan Keuangan Jiwasraya.

c) *The Additional of State capital Investment*

*Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 102 Year 2021, dated 6 October, 2021, regarding Addition of The Capital Participation of the Republic of Indonesia to the share capital of the Company, amounting to Rp20,000,000.000.000 (full amount) which were converted from the State Budget year 2021. By the issuance of the respective Government Regulation, the Company has already get an approval from Government of the Republic of Indonesia regarding The Company's capital into IFG Life's capital.*

d) *Restructuring of Investment Fund Account ("RDI") Interest Payable and Subsidiary Loan ("SLA")*

*Based on the Decision Letter of Finance Ministry No. S-110/MK.5/2021 dated 29 November 2021, Government has agreed to restructure the receivable from Investment Fund Account ("RDI") Interest No. AMA-196/RDI-327/DSMI/2018 and subsidiary loan ("SLA") No. AMA-506/SLA-919/DSMI/2019 for 20 years in installments including 2 years grace period in 2021-2022.*

e) *Amendment and Restatement of the Master Agreement between PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") and PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life")*

*On May 20, 2021, BPUI, Jiwasraya, and IFG Life signed a Master Agreement for the Transfer of Jiwasraya's Portfolio (Assets and Liabilities) to IFG Life for the purpose of resolving Jiwasraya's Problems (the "Initial Master Agreement") which regulates the plan for the transfer of Jiwasraya's assets and liabilities to IFG Life. In connection with efforts to assist Jiwasraya policyholders as assigned to BPUI based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-187/MBU/03/2020 dated March 23, 2020 regarding the Assignment of BPUI in the context of Mental Health Financial Restructuring..*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**52. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN  
(lanjutan)**

- e) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") dan PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") (lanjutan)

Perjanjian Induk Awal telah diubah dan dinyatakan kembali oleh BPUI, Jiwasraya, dan IFG Life ke dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk No. 10 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H, Notaris di Jakarta Selatan ("Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk") yang antara lain melengkapi ketentuan-ketentuan peralihan aset dan portofolio serta jenis aset-aset dan liabilitas yang akan dialihkan dari Jiwasraya kepada IFG Life.

Berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Induk, perjanjian tersebut akan terus berlaku dan mengikat bagi para pihak sampai dengan seluruh persyaratan pendahuluan yang diatur dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi. Aset-aset serta liabilitas Jiwasraya akan dialihkan kepada IFG Life berdasarkan perjanjian tambahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi masing-masing jenis aset serta liabilitas Jiwasraya tersebut.

**53. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN**

Informasi keuangan tambahan pada lampiran 6/1 sampai dengan lampiran 6/5 adalah informasi keuangan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), entitas induk saja, pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang menyajikan investasi Perseroan pada entitas anak berdasarkan metode biaya.

Informasi keuangan tambahan ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Entitas Anak.

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**52. SUBSEQUENT EVENT AFTER REPORTING  
PERIOD (continued)**

- e) *Amendment and Restatement of the Master Agreement between PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI"), PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ("Jiwasraya") and PT Asuransi Jiwa IFG ("IFG Life") (continued)*

*The Initial Master Agreement has been amended and restated by BPUI, Jiwasraya, and IFG Life in the Deed of Amendment and Restatement of the Master Agreement No. 10 dated December 15, 2021, drawn up before Lenny Janis Ishak, S.H, Notary in South Jakarta ("Amendment and Restatement of Master Agreement") which, among other things, completes the provisions for the transfer of assets and portfolios as well as the types of assets and liabilities to be transferred from Jiwasraya to IFG Life.*

*Based on the Amendment and Restatement of the Master Agreement, the agreement will continue to be valid until all the preliminary requirements stipulated in the agreement have been fulfilled. Jiwasraya's assets and liabilities will be transferred to IFG Life based on additional agreements in accordance with the mechanism that applies to each type of Jiwasraya's assets and liabilities.*

**53. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION**

*Supplementary financial information on schedule 6/1 to schedule 6/5 represents financial information of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), parent entity only, as at and for the year ended 31 December 2020, which presents the Company's investment in subsidiaries under cost method.*

*The following supplementary financial information should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and subsidiaries.*

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**INDUK SAJA/PARENT ONLY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
**AS AT 31 DECEMBER 2020**  
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	6,926,598	85,930	<i>Cash and cash equivalents</i>
Investasi	29,002	19,823	<i>Investments</i>
Piutang usaha dan piutang lain-lain - bersih	331,396	334,915	<i>Account receivables and other receivables - net</i>
Piutang hasil investasi - bersih	1,422	298	<i>Investment income receivables - net</i>
Pajak dibayar dimuka	6,928	2,150	<i>Prepaid taxes</i>
Penyertaan langsung	28,463,896	689,654	<i>Direct participation</i>
Aset tetap - bersih	37,127	30,527	<i>Fixed assets - net</i>
Aset lain-lain	710,138	9,043	<i>Other assets</i>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>36,506,507</b>	<b>1,172,340</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Utang usaha dan utang lain-lain	29,632	31,127	<i>Account payables and other payables</i>
Akrual	35,363	8,066	<i>Accruals</i>
Utang pajak	5,046	2,583	<i>Taxes payable</i>
Pinjaman dari Pemerintah	982,488	1,252,454	<i>Government loans</i>
Utang bank	-	6,193	<i>Bank loans</i>
Medium Term Notes (MTN)	14,105	13,901	<i>Medium Term Notes (MTN)</i>
Liabilitas imbalan kerja	28,905	23,978	<i>Employee benefit liabilities</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>1,095,539</b>	<b>1,338,302</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>			<b>EQUITY</b>
Modal saham			<i>Share capital</i>
Modal saham - Nilai nominal			<i>Share capital - Nominal amount</i>
Rp 1.000.000 (nilai penuh)			<i>Rp 1,000,000 (full amount)</i>
per lembar saham			<i>at par per share</i>
Modal dasar:			<i>Authorised capital</i>
240.000.000 lembar dan			<i>240,000,000 shares and</i>
1.000.000 lembar masing-masing			<i>1,000,000 shares in year</i>
pada tahun 2020 dan 2019			<i>2020 and 2019, respectively,</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh:			<i>Issued and fully paid:</i>
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			<i>1 share of Serie A Dwiwarna -</i>
dan Seri B - 67.163.536 saham			<i>and 67,163,536 of</i>
per 31 Desember 2020			<i>Serie B per 31 December 2020</i>
- Seri A Dwiwarna - 1 saham			<i>1 share of Serie A Dwiwarna -</i>
dan Seri B - 272.499 saham			<i>and 272,499 of Serie B</i>
per 31 Desember 2019	67,163,537	272,500	<i>per 31 December 2019</i>
Tambahan modal disetor	(32,998,777)	-	<i>Additional paid in capital</i>
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	10,799	12,286	<i>Remeasurement of post-employment benefits</i>
Saldo laba			<i>Retained earnings</i>
Ditentukan penggunaannya	5,215	5,215	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya	1,230,194	(455,963)	<i>Unappropriated</i>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>35,410,968</b>	<b>(165,962)</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>36,506,507</b>	<b>1,172,340</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**INDUK SAJA/PARENT ONLY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN  
 PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
 AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
 FOR THE YEAR ENDED  
 31 DECEMBER 2020**  
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
Hasil investasi - bersih	9,652	5,850	<i>Investment Income - net</i>
<b>JUMLAH PENDAPATAN USAHA</b>	<b>9,652</b>	<b>5,850</b>	<b>TOTAL OPERATING INCOME</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban umum dan administrasi	(182,745)	(51,770)	<i>General and administrative  expenses</i>
Pendapatan lain-lain - bersih	1,859,847	91,636	<i>Other income - net</i>
<b>LABA SEBELUM  PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1,686,754</b>	<b>45,716</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
Beban pajak penghasilan	-	-	<i>Income tax expenses</i>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,686,754</b>	<b>45,716</b>	<b>NET PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>Beban komprehensif lain</b>			<b>Other comprehensive expense</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali imbalan pasca kerja, setelah pajak	(1,487)	(256)	<i>Items that will not be  reclassified to profit or loss:  Remeasurement of post-  employment benefits,  net of tax</i>
<b>Beban komprehensif lain  tahun berjalan setelah pajak</b>	<b>(1,487)</b>	<b>(256)</b>	<b>Other comprehensive expense  for the year net of tax</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF  TAHUN BERJALAN</b>	<b>1,685,267</b>	<b>45,460</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE  INCOME FOR THE YEAR</b>

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**INDUK SAJA/PARENT ONLY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**  
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020**  
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor/ <i>Issued and paid share capital</i>	Tambahan modal disetor/ <i>Additional paid in capital</i>	Akumulasi keuntungan/ (kerugian) aktuarial/ <i>Accumulated actuarial gain/(loss)</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>		Jumlah ekuitas/ Total equity
				Telah ditentukan penggunaannya/ <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya/ <i>Unappropriated</i>	
<b>Saldo per 1 Januari 2019</b>	<b>272.500</b>	<b>-</b>	<b>12.542</b>	<b>5.215</b>	<b>(501.679)</b>	<b>(211.422)</b>
Pendapatan komprehensif tahun berjalan: Laba bersih tahun berjalan Pengikuran kembali dari skema manfaat imbalan pasti	-	-	(256)	-	45.716	45.716
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>272.500</b>	<b>-</b>	<b>12.286</b>	<b>5.215</b>	<b>(455.933)</b>	<b>(256)</b>
Penyesuaian terkait penerapan awal PSAK 71 setelah pajak	-	-	-	(536)	(596)	(165.982)
<b>Saldo per 1 Januari 2020 setelah dampak penerapan PSAK 71</b>	<b>272.500</b>	<b>-</b>	<b>12.286</b>	<b>5.215</b>	<b>(456.558)</b>	<b>(166.558)</b>
Transaksi yang berhubungan dengan kombinasi bisnis entitas sependidali:						
Penerbitan modal tambahan BPUI	60,623,019	(32,998,777)	-	-	-	27,624,242
Transaksi dengan pemilik:	6,000,001	-	-	(1)	6,000,000	
Penerbitan saham baru	268,017	-	-	-	268,017	
Konversi pinjaman	-	-	-	1,686,754	1,686,754	
Pendapatan komprehensif tahun berjalan: Laba bersih tahun berjalan Pengikuran kembali dari skema manfaat imbalan pasti	-	(1.487)	-	-	-	(1.487)
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>67,163,537</b>	<b>(32,998,777)</b>	<b>10,799</b>	<b>5,215</b>	<b>1,230,194</b>	<b>35,410,968</b>

**Balance as at 31 December 2020**

**Comprehensive income for the year:  
Net income for the year  
Remeasurement of benefit pension  
pension scheme**

**Balance as at 1 January 2019**

**Adjustment on the initial  
application of SFAS 71 - net of tax**

**Balance as at 1 January 2020 after  
impact of SFAS 71  
implementation**

**Transaction related to  
the business combination entities  
under common control;  
issuance of additional  
BPUI's capital**

**Transaction with owners:  
Additional capital / reserves  
Loan conversion**

**Comprehensive income for the year:  
Net income for the year  
Remeasurement of benefit pension  
pension scheme**

**Balance as at 31 December 2020**

**PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)**  
**INDUK SAJA/PARENT ONLY**

**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2020**  
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS**  
**FOR THE YEAR ENDED**  
**31 DECEMBER 2020**  
*(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
<b>Penerimaan kas:</b>			<b>Cash received:</b>
Penerimaan dari kegiatan manajer investasi, komisi perantara perdagangan efek, dan jasa penasihat keuangan	14,744	14,400	Cash received from investment manager, brokerage, commissions and financial advisory
Penerimaan lainnya	15,267	15,372	Cash received from others
<b>Pengeluaran kas:</b>			<b>Cash disbursement:</b>
Pengeluaran untuk pajak penghasilan	(7,993)	-	Cash disbursement for corporate income tax
Pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya	(71,150)	(5,367)	Cash disbursement to supplier and other third parties
Pengeluaran untuk lainnya	<u>(65,295)</u>	<u>(43,856)</u>	Cash disbursement for others
<b>Kas bersih yang digunakan untuk dari aktivitas operasi</b>	<u>(114,427)</u>	<u>(19,451)</u>	<b>Net cash used in operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Pencairan efek utang surat berharga	(9,967)	(15,191)	Redemption of marketable securities
Pembelian properti investasi dan aset tetap	(1,553)	(1,569)	Acquisition of investment properties and fixed assets
Investasi pada anak perusahaan	(149,999)	(9,997)	Investment in subsidiary
Penerimaan dividen anak perusahaan	1,818,564	88,390	Dividend from subsidiaries
Pembayaran aktivitas investasi lainnya	<u>(700,000)</u>	<u>-</u>	Payment of other investment activities
<b>Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi</b>	<u>957,045</u>	<u>61,633</u>	<b>Net cash provided from investing activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan utang bank	700,000	-	Receipt of bank loan
Pembayaran utang bank	(700,000)	(24,253)	Payment of bank loan
Penerimaan atas penerbitan saham baru	6,000,000	-	Cash received from issuance of new shares
Aktivitas pendanaan lainnya	<u>(1,950)</u>	<u>-</u>	Other financing activities
<b>Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<u>5,998,050</u>	<u>(24,253)</u>	<b>Net cash provided by/(used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	<u>6,840,668</u>	<u>17,929</u>	<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<u>85,930</u>	<u>68,001</u>	<b>Cash and cash equivalents at beginning of year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u>6,926,598</u>	<u>85,930</u>	<b>Cash and cash equivalents at end of year</b>

**2020**  
Laporan Tahunan  
Annual Report

**TRANSFORMASI  
MENUJU EKOSISTEM  
YANG INKLUSIF  
DAN BERKELANJUTAN**

*Transformation towards an Inclusive  
& Sustainable Ecosystem*



**Indonesia Financial Group (IFG)**

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 58  
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190  
(+62) 021 2505080  
[www.ifg.id](http://www.ifg.id)  
[cs@ifg.id](mailto:cs@ifg.id)



[www.ifg.id](http://www.ifg.id)